



GUBERNUR ACEH

BUKU
I

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH**

RKPA

TAHUN 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
TAHUN 2025**



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

G

19. Qanun .../3
f

19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2026.

Pasal 1

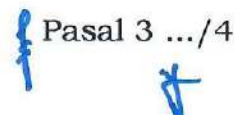
- (1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 memuat:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi Aceh;
 - b. Prioritas program Aceh;
 - c. Rencana kerja; dan
 - d. Pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Aceh Tahun 2026.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) Tahun 2026;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2026.



Pasal 3 .../4



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 November 2025
21 Jumadil Awal 1447



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 November 2025
21 Jumadil Awal 1447



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 27

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Dokumen RKPA.....	I-9
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH	 II-1
2.1. Gambaran Umum Aceh.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.2.Demografi.....	II-22
2.1.1.3.Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-25
2.1.1.4.Indeks Risiko Bencana.....	II-25
2.1.1.5.Indeks Ketahanan Daerah.....	II-33
2.1.1.6.Sosiologi	II-34
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-35
2.1.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-35
2.1.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial	II-59
2.1.2.3.Fokus Seni Budaya.....	II-67
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-74
2.1.3.1.Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh	II-74
2.1.3.2.Fokus Layanan Urusan Wajib	II-84
2.1.3.3.Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-178
2.1.3.4.Penunjang Urusan.....	II-231
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-238
2.1.4.1.Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	II-238
2.1.4.2.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-242
2.1.4.3.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-250
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPA.....	II-254
2.2.1. Realisasi Pendanaan Tahun 2024	II-254
2.2.1.1.Realisasi Pendapatan Tahun 2024.....	II-256
2.2.1.2.Realisasi Belanja Tahun 2024	II-259
2.2.1.3.Realisasi Pembiayaan Tahun 2024	II-262

2.2.1.4.	Trend APBA	II-263
2.2.2.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	II-264
2.2.2.1.	Metode Evaluasi	II-264
2.2.2.2.	Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2024	II-265
2.2.2.3.	Hasil Capaian Kinerja RPA Tahun 2023-2026 ...	II-275
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024	II-298
2.4.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-301
2.5.	Isu Strategis	II-315

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH III-1

3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi	III-1
3.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.2.	Inflasi	III-4
3.1.3.	Gini Ratio	III-6
3.1.4.	Kemiskinan	III-7
3.1.5.	Pengangguran	III-10
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Aceh	III-16
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Aceh	III-16
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Aceh	III-19
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh	III-22
3.3.	Dukungan Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	III-24
3.3.1.	Alokasi dan Realisasi TJSLP/CSR Tahun 2024	III-24
3.3.2.	Program/Kegiatan CSR Tahun 2024	III-27

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH IV-1

4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh	IV-3
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-16
4.2.1.	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026	IV-16
4.2.2.	Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 ...	IV-31
4.2.3.	Penelaahan Pokok Pokok Pikiran	IV-137
4.2.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026	IV-138
4.3.	Inovasi	IV-138

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1

- 5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh V-1
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota V-2
 - 5.2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 V-2
 - 5.2.2. Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di
Aceh V-11
 - 5.2.3. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota V-13

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH VI-1

- 6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun
2026 VI-1
- 6.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun
2026 VI-25

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

Daftar Gambar

Gambar 1. 1	Pendekatan Perencanaan Pembangunan	I-2
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Aceh	II-2
Gambar 2. 2	Peta Topografi Aceh.....	II-3
Gambar 2. 3	Peta Geologi Aceh.....	II-4
Gambar 2. 4	Peta Kemiringan Lereng Aceh	II-6
Gambar 2. 5	Peta Jenis Tanah Aceh	II-7
Gambar 2. 6	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh	II-9
Gambar 2. 7	Peta Batas DAS di Wilayah Aceh.....	II-13
Gambar 2. 8	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh	II-17
Gambar 2. 9	Peta Curah Hujan Aceh	II-22
Gambar 2. 10	Struktur Penduduk Aceh Tahun 2024 (Jiwa).....	II-24
Gambar 2. 11	Data Bencana Aceh Tahun 2017-2023	II-28
Gambar 2. 12	Peta Rawan Bencana Gempa Aceh	II-30
Gambar 2. 13	Peta Risiko Bencana Banjir Aceh.....	II-31
Gambar 2. 14	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh.....	II-33
Gambar 2. 15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024 (Persen)	II-36
Gambar 2. 16	Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024.....	II-37
Gambar 2. 17	Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen)	II-43
Gambar 2. 18	Laju Inflasi Aceh dan Nasional (m-to-m) Tahun 2024- Februari 2025 (Persen).....	II-44
Gambar 2. 19	PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB.....	II-47
Gambar 2. 20	Gini Rasio Aceh di Perkotaan dan Perdesaan Periode Maret 2019-Maret 2024	II-49
Gambar 2. 21	Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024	II-49
Gambar 2. 22	Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2017- 2024.....	II-53
Gambar 2. 23	Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2017-2024	II-54
Gambar 2. 24	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh.....	II-55
Gambar 2. 25	Garis Kemiskinan Aceh Tahun Tahun 2023-2024.....	II-56
Gambar 2. 26	TPT Aceh dibandingkan Nasional, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019-2023.....	II-57
Gambar 2. 27	Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024.....	II-63
Gambar 2. 28	Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024.....	II-63
Gambar 2. 29	Capaian Umur Harapan Hidup Aceh dan Nasional tahun 2020-2024.....	II-64

Gambar 2. 30	Usia Harapan Hidup di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024.....	II-65
Gambar 2. 31	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-65
Gambar 2. 32	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2. 33	Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 (Data Termutakhir).....	II-73
Gambar 2. 34	Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020-2024.....	II-77
Gambar 2. 35	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2. 36	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia 16-18 Tahun 2020-2024.....	II-85
Gambar 2. 37	Kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi	II-86
Gambar 2. 38	Persentase Kondisi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2023.....	II-87
Gambar 2. 39	Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019-2023.....	II-90
Gambar 2. 40	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) Tahun 2020-2024.....	II-90
Gambar 2.41	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Aceh 2020-2024.....	II-96
Gambar 2. 42	Pembagian Wilayah Sungai Aceh.....	II-107
Gambar 2. 43	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Persen	II-107
Gambar 2.44	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024	II-113
Gambar 2. 45	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2019-2024.....	II-117
Gambar 2. 46	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023	II-118
Gambar 2. 47	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020–Agustus 2023.....	II-119
Gambar 2. 48	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-2022	II-119
Gambar 2. 49	Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2019-2023	II-121
Gambar 2. 50	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2022.....	II-122
Gambar 2. 51	Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2019 - 2023.....	II-123
Gambar 2. 52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 - 2023.....	II-124
Gambar 2. 53	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2023	II-125
Gambar 2. 54	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-125

Gambar 2. 55	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang Terlapor pada UPTD PPA Tahun 2019 - 2023.....	II-126
Gambar 2. 56	Jumlah Kasus Penyebab Terjadinya Perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019 - 2023	II-127
Gambar 2. 57	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2013-2022	II-129
Gambar 2. 58	Jumlah Laporan Sengketa dan Konflik yang Terjadi pada Tahun 2022	II-133
Gambar 2. 59	Jumlah Laporan Sengketa dan Konflik yang Terjadi pada Tahun 2020 sampai 2024 di Kab/Kota.....	II-135
Gambar 2. 60	Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 di Kab/Kota	II-136
Gambar 2. 61	Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh.....	II-144
Gambar 2. 62	Status Desa di Aceh Tahun 2020 - 2024.....	II-146
Gambar 2. 63	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-150
Gambar 2. 64	Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2020-2024	II-150
Gambar 2. 65	Prasarana Transportasi Aceh.....	II-152
Gambar 2. 66	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-154
Gambar 2. 67	Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2020-2024.....	II-163
Gambar 2. 68	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2019-2024	II-170
Gambar 2. 69	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2024.....	II-171
Gambar 2. 70	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2020-2024.....	II-172
Gambar 2. 71	Jumlah Pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN Tahun 2018-2024.....	II-176
Gambar 2. 72	Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Aceh (Persen). Tahun 2020 - 2024	II-179
Gambar 2. 73	Capaian Pembangunan Kepariwisata Tingkat Provinsi	II-181
Gambar 2. 74	Gambar Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub indeks.....	II-182
Gambar 2. 75	PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	II-184
Gambar 2. 76	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh (rumah tangga), 2013 dan 2023.....	II-185
Gambar 2. 77	Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Aceh (Ribu Hektare), Tahun 2022–2024*	II-186
Gambar 2. 78	Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ribu Ton-GKG), 2022–2024*	II-187
Gambar 2. 79	Proporsi Komoditi pada sub Sektor Perkebunan	II-188

Gambar 2. 80	Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta dan Arabika Tahun 2018-2022	II-190
Gambar 2. 81	Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2018-2022	II-191
Gambar 2. 82	Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi di Aceh, Aceh Besar, Bener Meriah dan Aceh Jaya.....	II-194
Gambar 2. 83	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2023–2024*.....	II-195
Gambar 2. 84	Luas deforestasi di Aceh pada Periode 1990-2017	II-197
Gambar 2. 85	Akumulasi Deforestasi dan Jumlah Kejadian Karhutla tahun 2003-2023	II-201
Gambar 2. 86	Konflik Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2019-2024	II-204
Gambar 2. 87	Capaian Perhutanan Sosial Aceh S.D 2024.....	II-211
Gambar 2. 88	Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh	213
Gambar 2. 89	Kontribusi Subsektor Listrik Dan Gas Terhadap PDRB Aceh Tahun 2019-2023.....	II-216
Gambar 2. 90	Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024.	II-218
Gambar 2. 91	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan Tahun 2020-2023	II-219
Gambar 2. 92	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2019-2023.....	II-220
Gambar 2. 93	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2020-2024.....	II-222
Gambar 2. 94	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Terhadap Total PDRB Aceh Tahun 2019-2023.....	II-225
Gambar 2. 95	Peta <i>Fishing Ground</i> Ikan Tuna Provinsi Aceh	II-227
Gambar 2. 96	Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim.	II-228
Gambar 2. 97	Konsumsi Ikan Provinsi Aceh Per kapita Tahun 2019-2023	II-229
Gambar 2. 98	Konsumsi Ikan Provinsi Aceh per Kapita Tahun 2019-2023	II-229
Gambar 2. 99	Kerangka IDSD 2023	II-240
Gambar 2. 100	Skor IDSD 2023 Provinsi Aceh	II-241
Gambar 2. 101	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Makanan Dan Non Makanan) Tahun 2019-2024	II-242
Gambar 2. 102	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020.....	II-245
Gambar 2. 103	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020.	II-246
Gambar 2. 104	NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020.....	II-247

Gambar 2. 105	Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2019-2023	II-248
Gambar 2. 106	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank) Tahun 2021-2023.....	II-249
Gambar 2. 107	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro).....	II-249
Gambar 2. 108	Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2019-2023.....	II-254
Gambar 2. 109	Pendapatan Asli Aceh Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah)	II-258
Gambar 2. 110	Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2024	II-259
Gambar 2. 111	Struktur Belanja Aceh Tahun 2024	II-261
Gambar 2. 112	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020-2024.....	II-263
Gambar 3. 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen).	III-1
Gambar 3. 2	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen)	III-2
Gambar 3. 3	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen)	III-3
Gambar 3. 4	Perbandingan Kinerja Ekonomi Provinsi Sumatera Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen).....	III-3
Gambar 3. 5	Perkembangan Gini Ratio Aceh Maret 2019 - September 2024 (Indeks).....	III-6
Gambar 3. 6	Perkembangan Kemiskinan Aceh Periode Maret 2019 - September 2024	III-8
Gambar 3. 7	Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Perdesaan Periode Maret 2019 - September 2024	III-9
Gambar 3. 8	Indeks Kedalaman Kemiskinan Periode Maret 2019 - September 2024	III-9
Gambar 3. 9	Indeks Keparahan Kemiskinan Periode Maret 2019 - September 2024	III-10
Gambar 3. 10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Februari 2023 - Februari 2025	III-11
Gambar 3. 11	Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025.....	III-13
Gambar 3. 12	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2023 - Februari 2025.....	III-14
Gambar 3. 13	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2023 - Februari 2025.....	III-15
Gambar 4. 1	17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat	IV-2
Gambar 4. 2	9 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026.....	IV-32

Gambar 4. 3	Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRA	IV-137
Gambar 4. 4	Nilai Indeks Inovasi Aceh Tahun 2020-2024	IV-140
Gambar 4. 5	Persentase Inovasi Aceh Tahun 2024.....	IV-145

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Kemiringan Lereng Aceh	II-5
Tabel 2. 2	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan	II-9
Tabel 2. 3	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai	II-12
Tabel 2. 4	Potensi Danau Aceh	II-15
Tabel 2. 5	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh	II-16
Tabel 2. 6	Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.....	II-21
Tabel 2. 7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2020-2024.....	II-22
Tabel 2. 8	Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2. 9	Indeks Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2. 10	Potensi Bencana di Aceh	II-28
Tabel 2. 11	Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2024	II-29
Tabel 2. 12	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2024.....	II-34
Tabel 2. 13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah).....	II-38
Tabel 2. 14	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah).....	II-39
Tabel 2. 15	Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 - 2024 (Persen).....	II-40
Tabel 2. 16	Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (Persen)	II-41
Tabel 2. 17	Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2019-2024 (Persen).....	II-45
Tabel 2. 18	PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah).....	II-47
Tabel 2. 19	Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 - 2024 (Maret).....	II-50
Tabel 2. 20	Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2019-2024	II-51
Tabel 2. 21	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2019-2024	II-57
Tabel 2. 22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2019-2024	II-58
Tabel 2. 23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Aceh Tahun 2019-2024	II-58
Tabel 2. 24	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024.....	II-59

Tabel 2. 25	Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2. 26	Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2. 27	Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Provinsi Aceh, 2019-2024.....	II-69
Tabel 2. 28	Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2024.....	II-70
Tabel 2. 29	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2020-2024 sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.....	II-75
Tabel 2. 30	Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2020-2024.....	II-76
Tabel 2. 31	Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2025.....	II-78
Tabel 2. 32	Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel 2. 33	Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019-2024.....	II-80
Tabel 2. 34	Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2. 35	Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2. 36	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020-2023	II-83
Tabel 2. 37	Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	II-88
Tabel 2. 38	Angka Kematian Neonatus Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2. 39	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap	II-92
Tabel 2. 40	Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2019-2024.....	II-93
Tabel 2. 41	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2. 42	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020-2024	II-97
Tabel 2. 43	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020-2024.....	II-97
Tabel 2. 44	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033	II-98
Tabel 2. 45	Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024	II-100
Tabel 2. 46	Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya.....	II-101
Tabel 2. 47	Jenis Irigasi dan Luasannya	II-102
Tabel 2. 48	Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota	II-102
Tabel 2. 49	Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan.....	II-103
Tabel 2. 50	Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan.....	II-103

Tabel 2. 51	Hasil Capaian Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024.....	II-104
Tabel 2. 52	Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel 2. 53	Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024	II-108
Tabel 2. 54	Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM dan Yayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2020-2024	II-109
Tabel 2. 55	Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2024	II-111
Tabel 2. 56	Pahlawan Nasional dari Provinsi Aceh	II-112
Tabel 2. 57	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2. 58	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019– Agustus 2024.....	II-115
Tabel 2. 59	Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan pada Agustus 2023	II-120
Tabel 2. 60	Target dan Realisasi Kegiatan Persertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin (PTM3) di Aceh	II-130
Tabel 2. 61	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin sebagai Pilot Project Tahun 2022 Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin.....	II-131
Tabel 2. 62	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2023	II-131
Tabel 2. 63	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Tahun 2024 Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perkim & Baitul Mal Aceh Tahun 2023	II-132
Tabel 2. 64	Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2022.....	II-134
Tabel 2. 65	Data Penyerahan Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sd Tahun 2024	II-139
Tabel 2. 66	Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2023.....	II-140
Tabel 2. 67	Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset dan Penataan Akses sd Tahun 2022.....	II-140
Tabel 2. 68	Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2024.....	II-141
Tabel 2. 69	Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset sd Tahun 2024	II-142
Tabel 2. 70	Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Akses sd Tahun 2024	II-143

Tabel 2. 71	Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh.....	II-146
Tabel 2. 72	Status Desa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024	II-147
Tabel 2. 73	Alokasi Dana Desa Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2. 74	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2019 - 2023	II-149
Tabel 2. 75	Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2. 76	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2. 77	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel 2. 78	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2. 79	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2. 80	Capaian Indikator Indeks SPBE Aceh 2019-2023	II-157
Tabel 2. 81	Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2020 - 2024.....	II-159
Tabel 2. 82	Jumlah KSPPS dan USPPS di Aceh Tahun 2023	II-160
Tabel 2. 83	Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2. 84	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023.....	II-162
Tabel 2. 85	Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2019-2023	II-164
Tabel 2. 86	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel 2. 87	Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2020-2024.....	II-168
Tabel 2. 88	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2020-2024.....	II-169
Tabel 2. 89	Rekapan UPLM Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2. 90	Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh	II-173
Tabel 2. 91	Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022-2024.....	II-174
Tabel 2. 92	Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2020-2024.....	II-175
Tabel 2. 93	Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2. 94	Gedung dan Bangunan Terbangkalai (tidak fungsional)	II-177
Tabel 2. 95	Bangunan dan Gedung Terbangkalai kewenangan Kabupaten/Kota	II-178
Tabel 2. 96	Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2019 - 2023	II-183
Tabel 2. 97	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit).....	II-185

Tabel 2. 98	Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani pada Sub sektor Perkebunan Tahun 2023II-189
Tabel 2. 99	Produksi Daging dan telur di Aceh Tahun 2020-2024II-192
Tabel 2. 100	Produksi Daging dan Telur Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2021-2023.....II-193
Tabel 2. 101	Nilai tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024II-195
Tabel 2. 102	Perkembangan NTP Peternakan Tahun 2024II-196
Tabel 2. 103	Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan FungsinyaII-196
Tabel 2. 104	Deforestasi 2019-2024II-198
Tabel 2. 105	Deforestasi Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023 Menurut Kabupaten/KotaII-199
Tabel 2. 106	Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2020 s.d. 2024.....II-200
Tabel 2. 107	Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2019-2024II-201
Tabel 2. 108	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024.....II-203
Tabel 2. 109	Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2024II-203
Tabel 2. 110	PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh.....II-205
Tabel 2. 111	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2020-2024.....II-207
Tabel 2. 112	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024II-208
Tabel 2. 113	Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh.....II-209
Tabel 2. 114	Capaian Izin Perhutanan Sosial Aceh Tahun 2019 - 2023II-210
Tabel 2. 115	Pembangkit Tenaga Listrik EksistingII-213
Tabel 2. 116	Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)II-214
Tabel 2. 117	Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2023.....II-215
Tabel 2. 118	Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETIII-217
Tabel 2. 119	Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2019-2024.....II-221
Tabel 2. 120	Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota (Data Termutakhir)II-223
Tabel 2. 121	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh Tahun 2019-2022 (Data Termutakhir)II-224
Tabel 2. 122	Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023.....II-225
Tabel 2. 123	Jumlah kapal (unit) pada PPS Kutaraja LampuloII-226
Tabel 2. 124	Kawasan yang telah ditetapkan sebagai transmigrasi dan kawasan yang memiliki potensiII-231
Tabel 2. 125	Jumlah Opini WTP Kabupaten Kota 2023.....II-233

Tabel 2. 126	Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2020-2024	II-234
Tabel 2. 127	Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2020-2024	II-234
Tabel 2. 128	Data Diklat Pejabat Struktural Pemerintah Aceh Tahun 2020-2024	II-235
Tabel 2. 129	Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-235
Tabel 2. 130	Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan Spesialis dalam Negeri Tahun 2019-2024	II-236
Tabel 2. 131	Rekapitulasi Penerima Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang S1, S2, S3 Luar Negeri Tahun 2019-2024	II-237
Tabel 2. 132	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita Sebulan menurut Kelompok Barang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Rupiah), Tahun, 2019-2023	II-244
Tabel 2. 133	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024	II-250
Tabel 2.134	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2023	II-252
Tabel 2. 135	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2023 (Lanjutan)	II-252
Tabel 2. 136	Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2018-2022	II-253
Tabel 2. 137	Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2024	II-255
Tabel 2. 138	Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2024	II-256
Tabel 2. 139	Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2024	II-259
Tabel 2. 140	Kemajuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Triwulan IV Tahun 2024	II-262
Tabel 2. 141	Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2024	II-263
Tabel 2. 142	Kriteria Kinerja	II-265
Tabel 2. 143	Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2024 Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	II-267
Tabel 2. 144	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2024 Terhadap Target RKPA Tahun 2024	II-273
Tabel 2. 145	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Indikator Makro RKPA periode 2021-2024	II-275
Tabel 2. 146	Tingkat Capaian Realisasi Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026	II-277
Tabel 2. 147	Tingkat Capaian Terhadap Target Indikator RPA Tahun 2023-2026	II-280
Tabel 2. 148	Capaian Indikator Makro Tahun 2024 Terhadap Target RPA 2023-2024	II-281
Tabel 2. 149	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Terhadap Target RPA	II-282

Tabel 2. 150	Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 Terhadap Target RPA	II-284
Tabel 3. 1	Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, April 2025	III-4
Tabel 3. 2	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran April 2025 (y-on-y) (persen)	III-5
Tabel 3. 3	Andil Beberapa Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi April 2025 (y-on-y) (persen)	III-5
Tabel 3. 4	Gini Ratio Menurut Provinsi Periode Maret 2023 - September 2024	III-7
Tabel 3. 5	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Periode Februari 2023 s.d Februari 2025	III_12
Tabel 3. 6	Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2026.....	III-16
Tabel 3. 7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2022-2026.....	III-18
Tabel 3. 8	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2022-2026.....	III-21
Tabel 3. 9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2022-2026.....	III-23
Tabel 3. 10	Anggaran dan Realisasi TJSLP/CSR Tahun 2024.....	III-26
Tabel 3. 11	Rekapitulasi Capaian CSR PT Mifa Bersaudara Tahun 2024	III-31
Tabel 4. 1	Keselaran Antara Visi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029.....	IV-4
Tabel 4. 2	Keselaran Antara Misi Pembangunan Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029	IV-4
Tabel 4. 3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026.....	IV-6
Tabel 4. 4	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-17
Tabel 4. 5	Sasaran Pembangunan dan Indikator Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2026	IV-18
Tabel 4. 6	Proyek Strategis Nasional RKP Tahun 2026	IV-29
Tabel 4. 7	Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026	IV-31
Tabel 4. 8	Keselaran Antara Misi RPJMA Tahun 2025-2029 dan Prioritas Aceh	IV-33
Tabel 4. 9	Keselaran Antara Prioritas Nasional dan Prioritas Aceh Tahun 2026	IV-34
Tabel 4. 10	Sasaran Pembangunan PA-1 "Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)"	IV-35
Tabel 4. 11	Program Prioritas Mendukung PA-1.....	IV-36
Tabel 4. 12	Sasaran Pembangunan PA-2 "Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh"	IV-37
Tabel 4. 13	Program Prioritas Mendukung PA-2.....	IV-38

Tabel 4. 14	Sasaran Pembangunan PA-3	IV-42
Tabel 4. 15	Program Prioritas Mendukung PA-3.....	IV-43
Tabel 4. 16	Sasaran Pembangunan PA-4	IV-50
Tabel 4. 17	Program Prioritas Mendukung PA-4.....	IV-51
Tabel 4. 18	Sasaran Pembangunan PA-5	IV-54
Tabel 4. 19	Program Prioritas Mendukung PA-5.....	IV-54
Tabel 4. 20	Sasaran Pembangunan PA-6	IV-56
Tabel 4. 21	Program Prioritas Mendukung PA-6.....	IV-57
Tabel 4. 23	Program Prioritas Mendukung PA-7.....	IV-60
Tabel 4. 24	Sasaran Pembangunan PA-8	IV-67
Tabel 4. 26	Sasaran Pembangunan PA-9	IV-69
Tabel 4. 27	Program Prioritas Mendukung PA-9.....	IV-70
Tabel 4. 29	Program Prioritas Mendukung PA-10	IV-77
Tabel 4. 30	Program Prioritas Aceh Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2026.....	IV-79
Tabel 4. 31	Keselarasn Highlight Intervensi RKP Tahun 2026 dengan Program Prioritas Aceh Tahun 2026	IV-90
Tabel 4. 32	Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026	IV-138
Tabel 4. 33	Perbandingan Daya Saing Provinsi Aceh dengan Rata- Rata Kabupaten/Kota Berdasarkan Aspek dan Pilar IDSD 2024.....	IV-141
Tabel 4. 34	Daftar Satuan Inovasi SKPA Tahun 2024.....	IV-146
Tabel 5. 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2020-2024	V-3
Tabel 5. 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen Pembentuk dan Provinsi, Tahun 2023-2024	V-3
Tabel 5. 3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2024	V-5
Tabel 5. 4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	V-7
Tabel 5. 5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2024.....	V-10
Tabel 5. 6	Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Target 2026.....	V-13
Tabel 6. 1	Hasil Pembahasan Desk Kewilayahan Aceh Dalam RAKORTEKRENBANG NASIONAL Tahun 2026.....	VI-2
Tabel 6. 2	Hasil Desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025	VI-11
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2026.....	VII-2
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2026.....	VII-6

Tabel 7. 3	Target Indikator Urusan Pemerintahan Tahun 2026 VII-18
------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPA Tahun 2026 merupakan tahun kedua penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan daerah, maka untuk mewujudkan RKPA tahun 2026 sebagai sebuah dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, maka dalam proses penyusunannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPA tahun 2024 dengan permasalahan dan isu strategis;
2. Keterkaitan antara sasaran dan Prioritas Aceh (PA) dalam RKPA tahun 2026 dengan sasaran dan Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2026;
3. Konsistensi antara Prioritas Aceh (PA) dengan permasalahan, isu strategis, program prioritas, serta pagu anggaran;
4. Arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2026 yang terdapat dalam Rancangan RPJMA Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026 menjadi rujukan dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2026;
5. Tersedianya dukungan program daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama (PKU) dan highlight intervensi nasional.

Sementara itu, untuk mendukung koordinasi dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan, penyusunan RKPA tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) *top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) *bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) *teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) *politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) *partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Disamping itu, RKPA tahun 2026 juga disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis money follow program dan pendekatan

perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik bermakna bahwa perencanaan RKPA tahun 2026 mengacu kepada tema yang telah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang terdapat dalam Rancangan RPJMA Tahun 2025-2029 dan RKP tahun 2026. Sementara itu, holistik merupakan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan/proyek secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir dalam rangka mendukung tema yang telah dirumuskan. Integratif dilakukan melalui pengintegrasian berbagai program/kegiatan/sub kegiatan/proyek dan sumber pendanaan dan spasial merupakan penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan/proyek dalam satu kesatuan wilayah serta keterkaitan antar wilayah.



Gambar 1. 1
Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja indikator makro pembangunan tahun 2024 diketahui Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Aceh tahun 2024 tumbuh sebesar 4,66 persen (y-on-y), pertumbuhan LPE ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Sementara itu, angka kemiskinan Aceh pada September 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yaitu mencapai 1,81 persen poin dari 14,45 persen menjadi 12,64 persen. Namun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, angka kemiskinan Aceh masih berada diatas rata rata nasional yang tercatat sebesar 8,74 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh periode Agustus tahun 2024 tercatat sebesar 5,75 persen, mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 (6,03 persen). Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, serta tema pembangunan RKP tahun 2026 serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian, maka tema RKPA Tahun 2026 adalah **"Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja"**. Fokus utama RKPA tahun 2026 adalah meliputi (1) Swasembada pangan dan energi (2) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (3) Penurunan kemiskinan dan (4) Penciptaan lapangan kerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPA tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPA tahun 2026, yang meliputi penyusunan rancangan Keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPA tahun 2026 yang meliputi:
 - a) Penyusunan Rancangan Awal RKPA Tahun 2026 dimulai sejak bulan Desember 2024 s.d 25 Maret 2025;
 - b) Forum Konsultasi Publik Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2026 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2025.
3. Penyusunan Rancangan RKPA tahun 2026 mencakup:
 - a) Penyempurnaan Rancangan RKPA Tahun 2026 dimulai tanggal 26 Maret s.d 15 Mei 2025;
 - b) Pembukaan Musrenbang RKPA Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 15 Mei 2025;
 - c) Musrenbang DOKA dilaksanakan pada tanggal 5 - 16 Mei 2025;
 - d) Forum Gabungan SKPA dilaksanakan dari tanggal 10 - 13 Juni 2025;
4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPA tahun 2026 mencakup pelaksanaan fasilitasi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2025;
5. Penetapan RKPA tahun 2025 tanggal 12 November 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPA tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan baik yang berskala nasional maupun lokal antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
36. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

- tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 38. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
 39. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 40. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
 41. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh tahun 2025 Nomor 8);
 42. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
 43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPA tahun 2026 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

a. Hubungan dengan Rancangan RPJMA Tahun 2025-2029

Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Keselarasan tersebut meliputi: visi, misi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, indikator kinerja (nomenklatur dan target).

b. Hubungan dengan RKP Tahun 2026

RKPA tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2026. Keselarasan tersebut meliputi sebagai berikut (1) Sasaran Prioritas Nasional (PN) (2) Program-program daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026, (3) Indikator makro yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 untuk daerah menjadi indikator makro daerah terkait termasuk nomenklatur, satuan dan besaran targetnya, (4) tema pembangunan RKPA tahun 2026 harus selaras dengan tema RKP tahun 2026.

c. Hubungan dengan Renja SKPA tahun 2026

RKPA tahun 2026 menjadi pedoman bagi SKPA dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2026. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2026.

d. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBA tahun 2026

RKPA tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2026. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBA tahun 2026 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPA tahun 2026.

e. Hubungan dengan Asta Cita

Rancangan Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 yang disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Hubungan antara RKPA Tahun 2026 dan Asta Cita tercermin dalam upaya memastikan setiap sasaran, program, dan kegiatan pembangunan di Aceh berkontribusi langsung terhadap pencapaian delapan agenda prioritas nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPA tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Aceh tahun 2026, dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2026;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPA tahun 2026;
4. Menjadi pedoman penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026;
5. Sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2026; dan
6. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPA

Sistematika RKPA tahun 2026 disusun terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPA.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

Memuat kondisi umum Aceh dari berbagai aspek yakni aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPA sampai triwulan II tahun 2025 dan realisasi RPA Tahun 2023-2026 dan permasalahan daerah dan isu strategis yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan kondisi eksisting dan proyeksi kerangka ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB Sektor, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), inflasi dan kemiskinan baik yang bersumber dari RKP tahun 2026. Disamping itu, juga menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah yang menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah.

Memuat arah kebijakan keuangan daerah yang menjelaskan realisasi dan proyeksi/target pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2022-2026.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indikator kinerja pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indikator kinerja dalam RKP tahun 2026 dan RPJMA Tahun 2025-2029.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan dan target makro yang diberikan untuk setiap kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Aceh.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Aceh yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMA Tahun 2025-2029.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) yang akan dicapai tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

2.1. Gambaran Umum Aceh

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

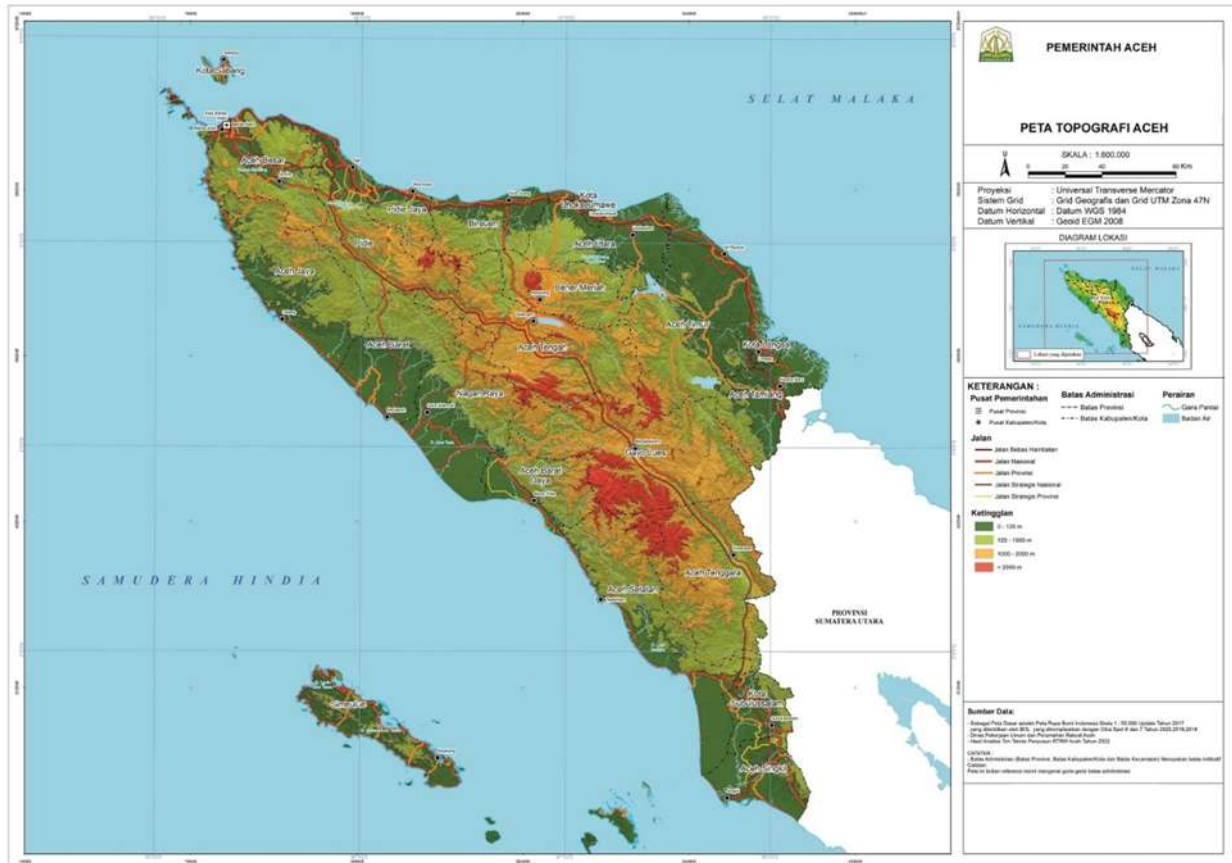
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan). Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong sesuai dengan data BPS Aceh yang dipublikasikan dalam Aceh Dalam Angka tahun 2023. Secara lebih jelas batas wilayah administrasi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.1

kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 - 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Burni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 2
Peta Topografi Aceh

2.1.1.1.3. Geologi

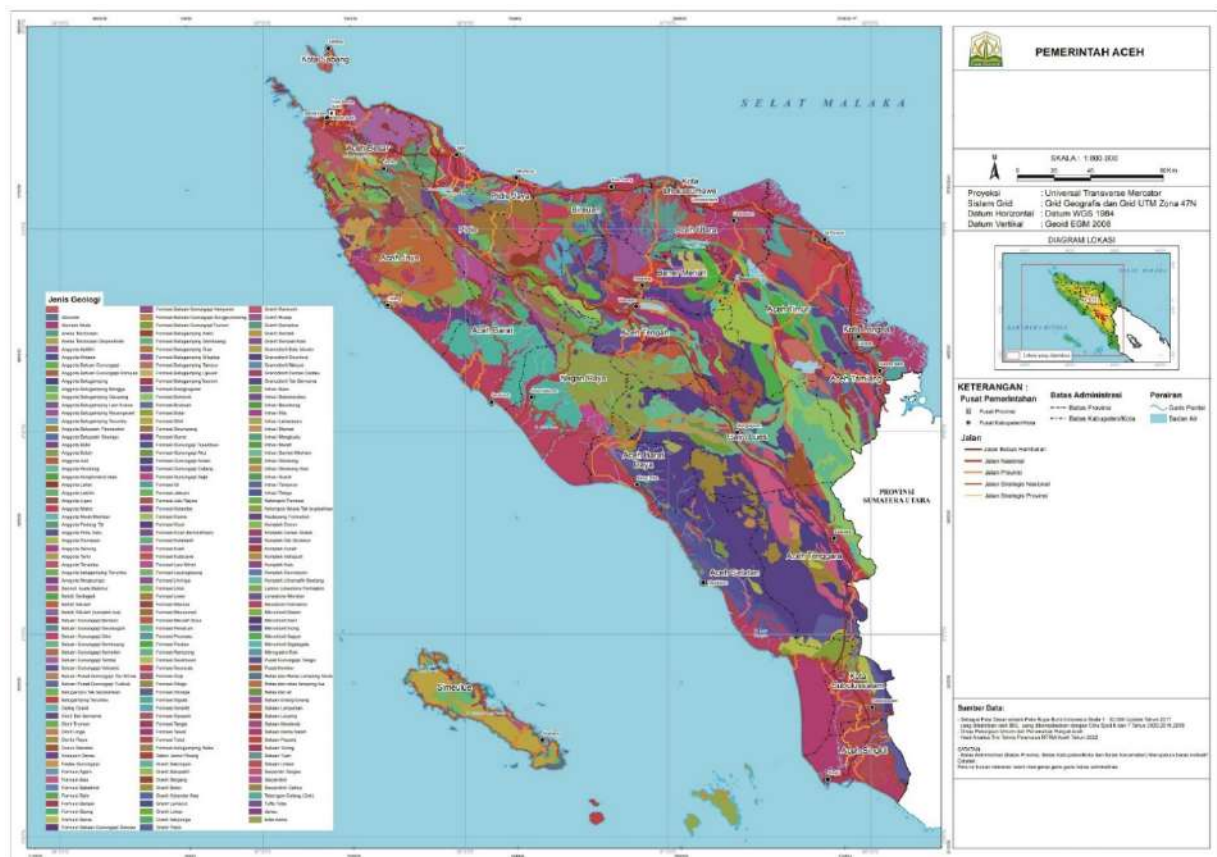
Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;
- Sedimen padu-tak terbedakan (*consolidated sediment - undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks

pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;

- c. Batu gamping atau dolomit (limestones or dolomites), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
- e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment* (gravel, sand, silt, clay)), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 3
Peta Geologi Aceh

2.1.1.1.4. Kemiringan

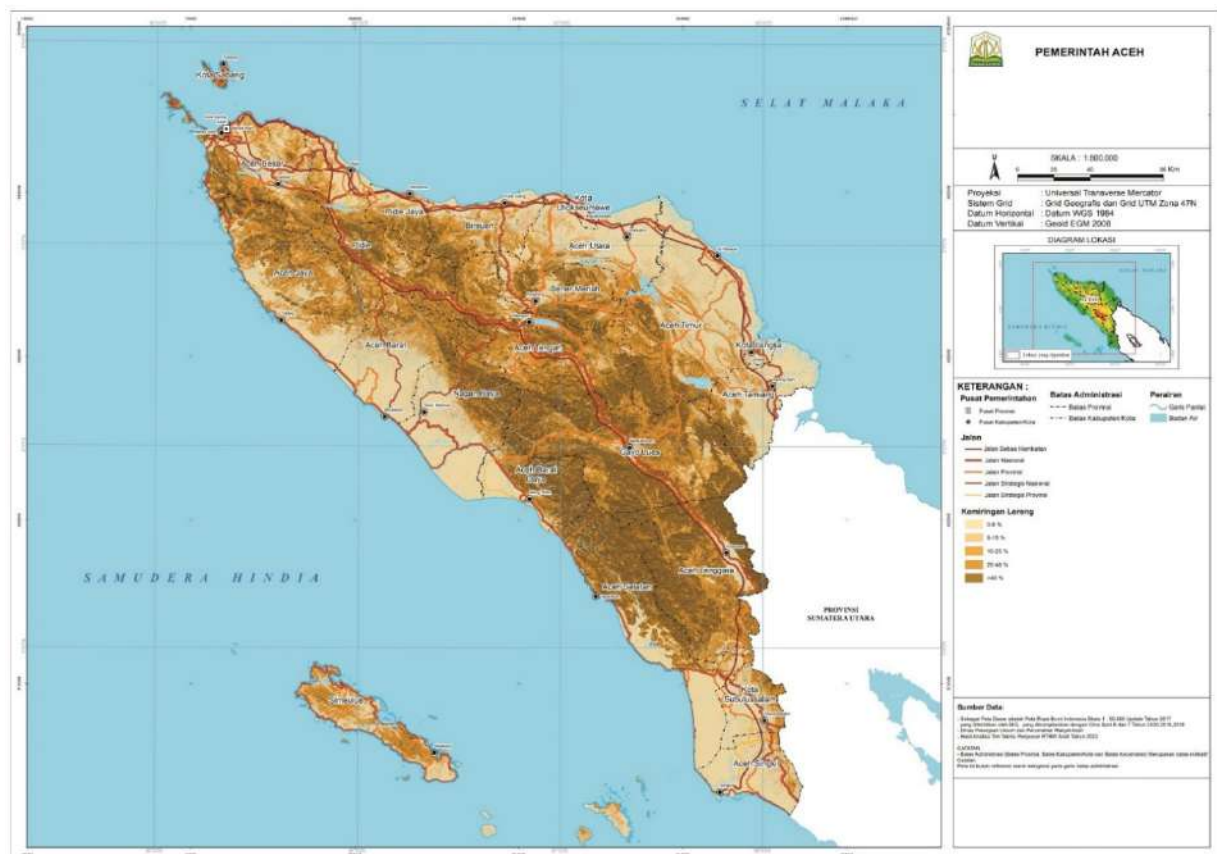
Aceh memiliki berbagai macam variasi kemiringan lereng. Kemiringan lereng di Aceh dibagi menjadi 0% - 8%, 8%-15%, 15%-25%, 25%-40%, dan >40%. Kabupaten

dan kota di Aceh memiliki bermacam-macam kemiringan lereng. Berikut tabel kemiringan lereng di Aceh.

Tabel 2. 1
Kemiringan Lereng Aceh

No	Kabupaten/Kota	Kemiringan Lereng (%)	Luas (ha)
1	Aceh Barat	0 - 8	146.666,90
		8 - 15	31.030,82
		15 - 25	39.793,23
		25 - 40	39.902,49
		>40	24.355,19
2	Aceh Barat Daya	0 - 8	47.140,47
		8 - 15	4.551,77
		15 - 25	10.850,11
		25 - 40	33.396,67
		>40	92.291,98
3	Aceh Besar	0 - 8	96.720,25
		8 - 15	40.851,82
		15 - 25	4.7257,95
		25 - 40	58.345,40
		>40	45.184,95
4	Aceh Jaya	0 - 8	103.997,80
		8 - 15	42.847,65
		15 - 25	80.850,95
		25 - 40	96.327,80
		>40	65.365,46
5	Aceh Selatan	0 - 8	146.755,56
		8 - 15	10.136,57
		15 - 25	23..892,14
		25 - 40	69.451,64
		>40	166.884,39
6	Aceh Singkil	0 - 8	149.176,70
		8 - 15	19.805,91
		15 - 25	10.545,95
		25 - 40	3.563,41
		>40	287,28
7	Aceh Tamiang	0 - 8	139.711,55
		8 - 15	14.928,23
		15 - 25	13.823,41
		25 - 40	17.773,44
		>40	23.862,27
8	Aceh Tengah	0 - 8	25.204,65
		8 - 15	36.212,55
		15 - 25	88.961,74
		25 - 40	160.170,39
		>40	141.892,09
9	Aceh Tenggara	0 - 8	26.039,84
		8 - 15	16.902,18
		15 - 25	44.759,28

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

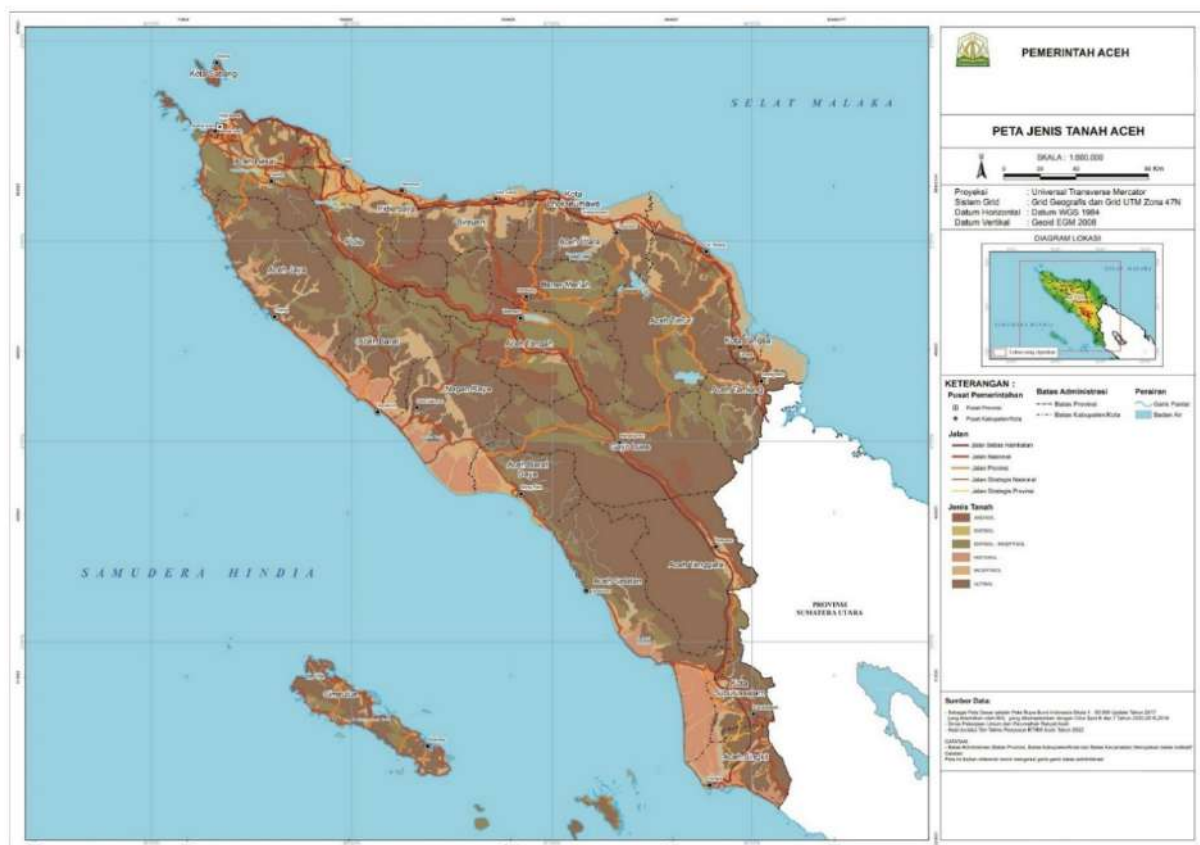
Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Aceh

2.1.1.1.5. Jenis Tanah

Aceh memiliki jenis tanah yang bervariasi, seperti andisol, entisol - inceptisol, histosol, ultisol. Tanah andisol merupakan salah satu dari banyak jenis tanah yang tanahnya cukup subur tetapi memiliki tingkat serapan Ph tinggi. Tanah andisol alami yang belum mengalami proses pengolahan oleh manusia memiliki kandungan akan bahan organik (humus) yang tinggi, hal tersebut membuat tanah andisol memiliki warna hitam hingga coklat tua, tidak begitu plastis, tidak begitu lekat, dan mempunyai kemampuan tinggi dalam menyimpan air. Tanah entisol termasuk kategori tanah yang masih muda, dikarenakan baru dalam tahap permulaan perkembangan tanah. Tanah entisol memiliki kadar lempung serta bahan organik yang rendah, sehingga daya tahan airnya rendah, dengan struktur berbutir, dan sarang, hal inilah yang menyebabkan entisol mudah melewatkan air serta menyebabkan air mudah hilang. Tanah inceptisol merupakan tanah muda yang proses pembentukannya tergolong cepat dari hasil pelapukan bahan induk. Tanah inceptisol memiliki permasalahan dalam proses budidaya. Kendala ini perlu menjadi perhatian serius oleh petani agar tanah garapan dapat subur dan mencukupi nutrisi di tanaman. Kendala tersebut berupa tanah inceptisol memiliki pH yang tergolong masam (kurang dari 5) sehingga perlu penambahan kapur pertanian untuk kegiatan budidaya, tanah inceptisol rata-rata memiliki kandungan bahan organik yang rendah,

sehingga membutuhkan banyak masukan bahan organik, dan perlu penanganan teknologi tepat guna untuk mengolah lahan inceptisol karena kesuburan tanah yang rendah.

Tanah histosol atau yang sering diketahui sebagai tanah gambut adalah jenis lapisan tanah yang di dalamnya lebih banyak terkandung bahan organik dengan keadaan kedalaman lebih dari 40 cm dari permukaan tanah, berbeda dengan tanah mineral lainnya. Histosol terbentuk dalam kondisi seperti di lahan basah. Sehingga jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami sayur- sayuran, buah-buahan, dan produksi pertanian. Tanah ultisol adalah tanah yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut dan terdapat timbunan liat di horison bawah. Adanya endapan liat ini menyebabkan tanah ultisol tidak mendapatkan daya resap air yang cukup dan hal ini sebagai tanah dengan kemasaman kurang dari 5 sehingga dianggap tanah yang kurang subur. Ultisol juga memerlukan upaya pengelolaan untuk dijadikan sebagai tanah pertanian yang disebabkan kandungan aluminium yang tinggi akibat kemasaman tanah.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 5
Peta Jenis Tanah Aceh

2.1.1.1.6. Hidrologi

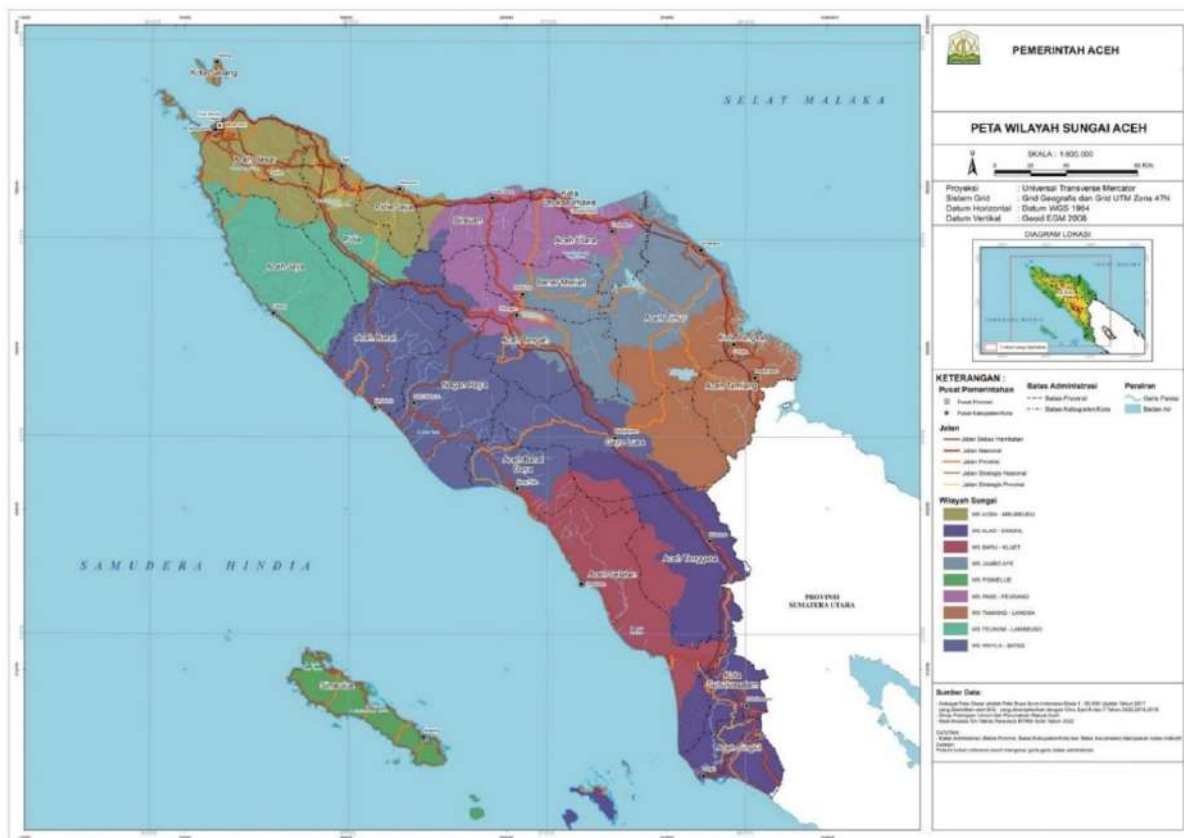
Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

A.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh- Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla-Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas-Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom-Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase-Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang-Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah - daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2. 6

Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Berdasarkan gambar di atas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing - masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km2)	Jumlah DAS
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh - Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla - Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas - Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase - Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang - Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom - Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru - Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber : Permen PUPR No. 04 Tahun 2015

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

2. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue

Banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh Seuleunggoh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Krueng Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Krueng Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Adapun Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Krueng Baro dan Krueng Tiro di Kabupaten Pidie serta Krueng Meureudu, Krueng Panteraja dan Krueng Ulim di Kabupaten Pidie Jaya.

3. Wilayah Sungai Jambo Aye

DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo) dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.

4. Wilayah Sungai Woyla-Bateue

Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi. Adapun sungai-sungai yang terjadi banjir/luapan air antara lain Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa.

5. Wilayah Sungai Alas-Singkil

Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).

6. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi

Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom.

7. Wilayah Sungai Pase-Peusangan

Terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Mane, dan Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara serta Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

8. Wilayah Sungai Baru-Kluet

Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Krueng Baru. Krueng Kluet dan Krueng Baru

setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Krueng Kluet di Kota Fajar.

9. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota seperti pada DAS Tamiang yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru serta pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur. Adapun DAS yang dominan terdampak genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa hanya seluas 7.617,30 Ha.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan aset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Keureuto dan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) rehabilitasi dan reboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; dan 2) pengerukan sedimen pada muara sungai.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No.	Nama Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m3/dt	milyar. m3/thn	m3/dt	milyar. m3/thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh - Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3.	WS Woyla - Batee	13	547,40	638,64	20,14	109,40	3,45
4.	WS Alas - Singkil	8	639,80	890,73	28,09	109,72	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6.	WS Teunom- Lambesoi	14	502,20	604,71	19,07	89,1	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,20	11,17	129,38	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
TOTAL		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 - 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 - 8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 - 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 - 18 liter/detik/km². Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7. Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air.



Gambar 2. 7

A.2. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Embung kewenangan Pemerintah Aceh diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai dan Daerah Irigasi. Embung Kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasi berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai antara lain Embung Teupin Keubu, Embung Paya Punjet dan Embung Lhok Gajah di Kab. Aceh Utara. Sedangkan embung kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk Daerah Irigasi yaitu Embung Paya Seupat, Embung Paya Reuleut, Embung Paya Pie, Embung Jurong Beurangkat, Embung Glee Bruk dan Embung Hutan Pantang di Kab. Pidie Jaya; Embung Paya Laot dan Embung Paya Sikameh di Kab. Bireuen; Embung Meurandeh di Kota Langsa.

Waduk adalah sebuah bendungan besar yang dibangun untuk menampung air dalam jumlah besar. Waduk biasanya dibangun di lembah sungai dan dapat

menyimpan air hujan serta aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti irigasi, air minum, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk single purpose dan waduk multi purpose. Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m³/kapita, Aceh mempunyai potensi-potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi-potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m³, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m³, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m³ dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m³.

A.3. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang 14awasan14 datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa 14awasan rawa yang telah ditetapkan sebagai 14awasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar 14awasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

Adapun Daerah Irigasi Rawa yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.R. Keutengga yang merupakan daerah irigasi rawa lintas kabupaten/kota yang tersebar di Kota Langsa, Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang; D.I.R. Babah Nipah di Kab. Aceh Jaya dan D.I.R. Seuneubok Padang Kab. Aceh Jaya.

A.4. Tambak

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak, Tambak adalah kolam air payau

yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.

Adapun Daerah Irigasi Tambak yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.T. Pasi Sibadeh dan D.I.T. Trumon di Kab. Aceh Selatan; D.I.T. Julok dan D.I.T. Simpang Ulim di Kab. Aceh Timur; D.I.T. Seuneudon di Kab. Aceh Utara; D.I.T. Jeumpa Peusangan di Kab. Bireuen.

Tabel 2. 4
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m3)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangko	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh 2017 (data termutakhir)

A.5. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau - danau tersebut disajikan dalam Tabel 2.5 di atas. Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

A.6. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti

amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

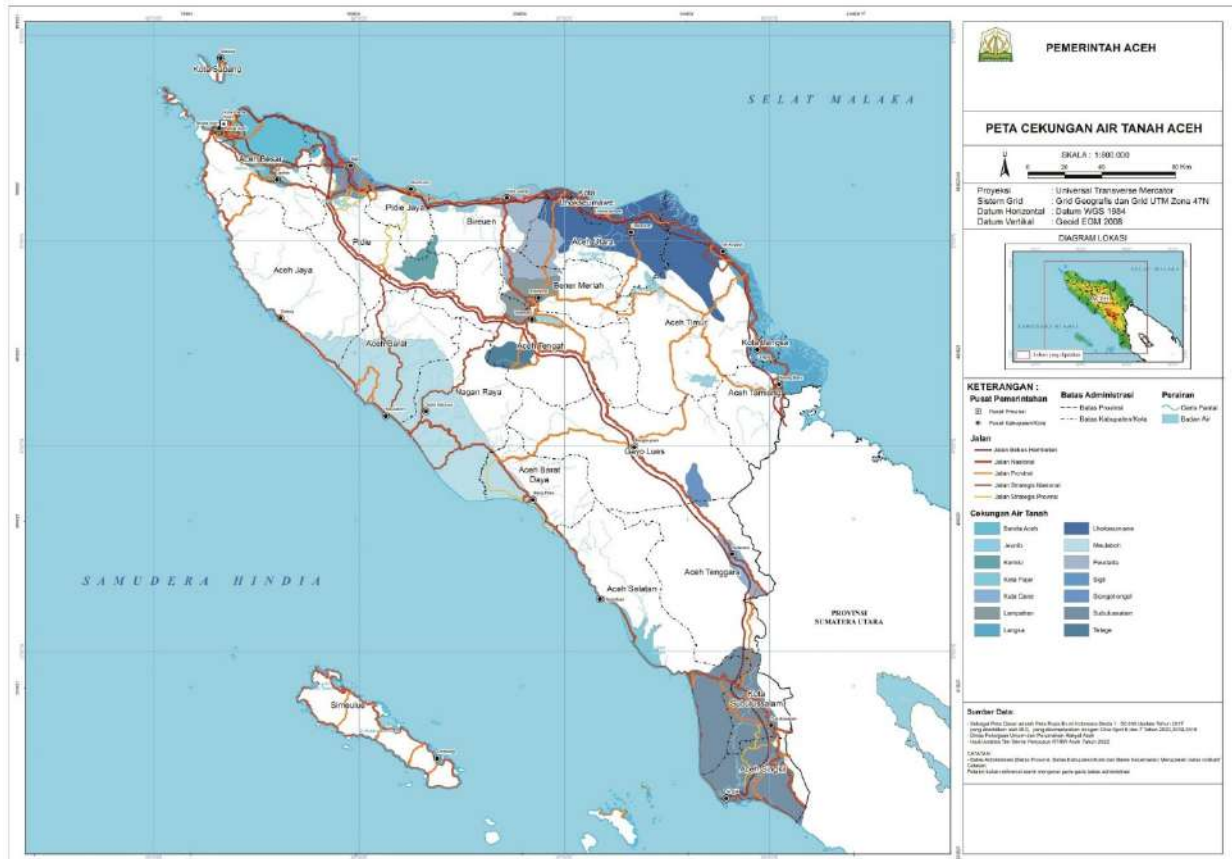
Tabel 2. 5
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari peta geologi, peta hidrogeologi, analisa laboratorium, dan peninjauan lapangan.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 8
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh

2.1.1.1.7. Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8°C. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9°C. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9°C. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosferik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang

diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim.

Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara ($^{\circ}\text{C}$), suhu udara maksimum ($^{\circ}\text{C}$), suhu udara minimum ($^{\circ}\text{C}$), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar $26,60^{\circ}\text{C}$, suhu udara maksimum $32,79^{\circ}\text{C}$ dan suhu udara minimum berkisar $22,31^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51. Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara $20,7-32,8^{\circ}\text{C}$. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara $20,5-31,9^{\circ}\text{C}$. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara $22,3-31,9^{\circ}\text{C}$. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam

keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosferik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim.

Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (°C), suhu udara maksimum (°C), suhu udara minimum (°C), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 °C, suhu udara maksimum 32,79 °C dan suhu udara minimum berkisar 22,31 °C. Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35 persen dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34 persen. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13 persen, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan

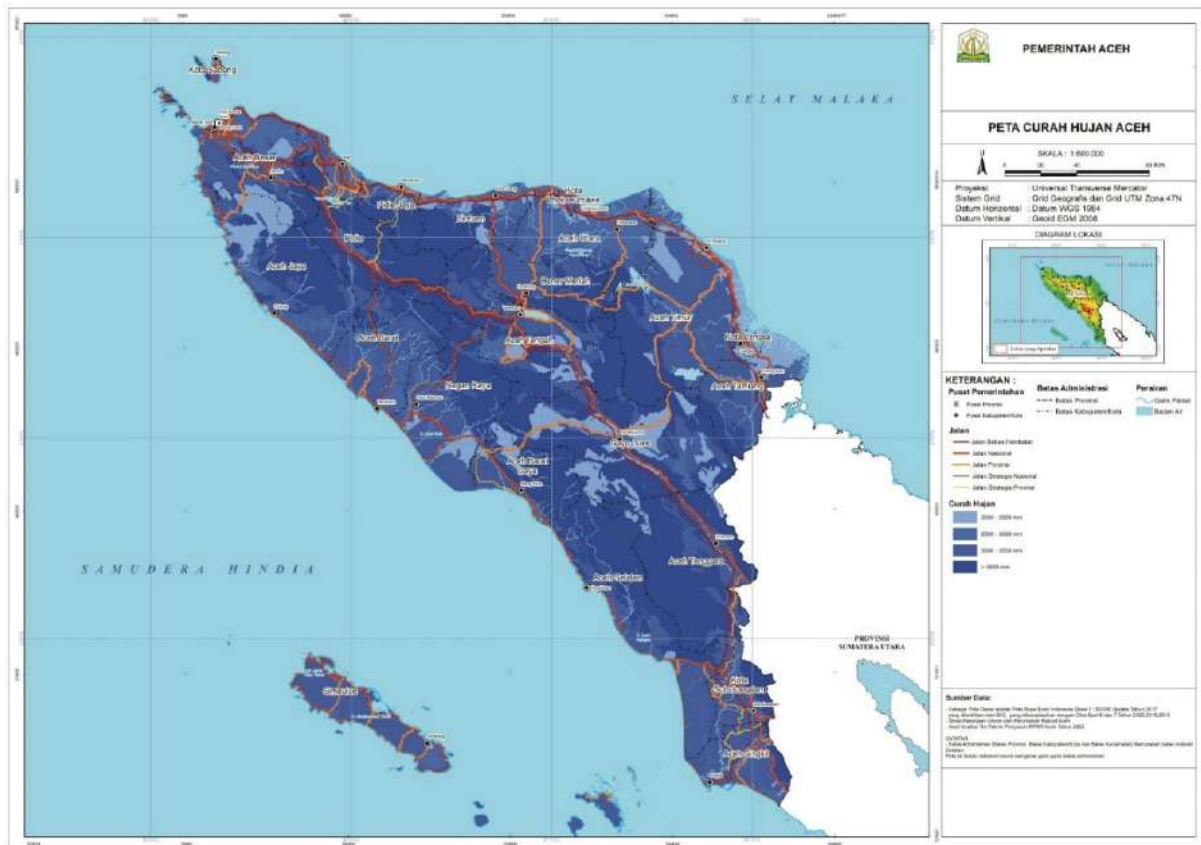
angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6
Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber data : Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023 (data termutakhir)

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 C menjadi 27.1 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 C. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0.4 C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 9
Peta Curah Hujan Aceh

2.1.1.2. Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, pada tahun 2020 jumlah penduduk Aceh berjumlah 5.269.809 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 92,84 jiwa/km. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2024, jumlah penduduk Aceh tahun 2024 meningkat menjadi 5.623.479 jiwa dengan kepadatan penduduk 97,03 Jiwa/Km². Angka ini meningkat dari tahun 2023 yaitu sebanyak 5,515,839 jiwa atau tumbuh sebesar 1,54 persen. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran dan migrasi penduduk. Berikut gambaran jumlah dan pertumbuhan penduduk di Aceh.

Tabel 2. 7
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk per Km
2020	5.269.809	0,78	92,84
2021	5.311.320	0,68	93,58
2022	5.432.312	0,60	92,27
2023	5,515,839	1,54	95,71
2024	5,623,479	1,91	97,03

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)

B. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2020-2024 tersebar di 18 (delapan belas) kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk
Aceh Selatan	237.326	0,41	236.487	-0,35	234.339	-0.99	236.933	1.11	9,629	1.13
Aceh Tenggara	227.174	0,45	227.456	0,12	228.175	0.20	231.331	1,38	235,589	1.81
Aceh Timur	426.398	0,65	429.094	0,63	441.719	1.34	449.796	1,83	461,391	2.51
Aceh Tengah	216.072	0,58	219.098	0,58	222.558	0.29	227.168	2,07	32,606	2.34
Aceh Barat	196.834	0,45	198.411	0,8	200.123	0.22	204.475	2,17	209,220	2.27
Aceh Besar	403.711	2,43	416.532	3,13	429.143	1.35	435.298	1,43	42,987	1.74
Pidie	444.149	0,38	435.797	-1,9	439.298	0.23	444.898	1,27	451,076	1.37
Aceh Utara	590.536	0,62	600.163	1,62	619.506	1.57	627.543	1,30	41,007	2.10
Simeulue	94.146	0,45	94.368	0,24	95.047	0.20	96.031	1,04	96,812	0.81
Aceh Singkil	127.711	0,56	129.333	1,26	131.423	0.26	135.435	3,05	40,461	3.58
Bireuen	444.149	0,59	444.383	0,32	451.952	0.25	458.978	1,55	468,696	2.07
Aceh Barat Daya	152.949	0,46	153.213	0,17	153.829	0.20	154.800	0,63	156,128	0.85
Gayo Lues	101.54	0,49	101.754	0,21	102.314	0.20	104.856	2,48	107,506	2.46
Aceh Jaya	92.781	0,72	94.761	2,11	97.124	1.34	99.717	2,67	101,407	1.67
Nagan Raya	172.257	0,41	172.484	0,13	173.316	0.20	176.461	1,81	181,103	2.56
Aceh Tamiang	299.487	0,69	300.831	0,45	303.471	0.32	308.102	1,53	312,061	1.27
Bener Meriah	161.627	0,61	166.448	2,94	171.400	1.20	175.781	2,56	181,376	3.08
Pidie Jaya	162.174	0,46	159.941	-1,39	160.828	0.21	163.591	1,72	166,517	1.76
Banda Aceh	248.892	1,25	253.198	1,72	255.409	0.33	259.538	1,62	265,310	2.18
Sabang	42.457	0,63	42.696	0,56	43.176	0.40	43.527	0,81	42,793	-1.72
Lhokseumawe	190.479	0,51	191.034	0,29	192.860	0.34	196.067	1,66	198,705	1.33
Langsa	188.244	0,45	185.836	-1,29	186.211	0.13	182.469	-2,01	183,914	0.79
Subulussalam	91.423	4,53	94.571	3,39	99.091	1.79	103.044	3,99	107,185	3.86
Aceh	5.269.809	0,78	5.311.320	0,68	5.432.312	0.60	5.515,839	1,54	5,623,479	1.91

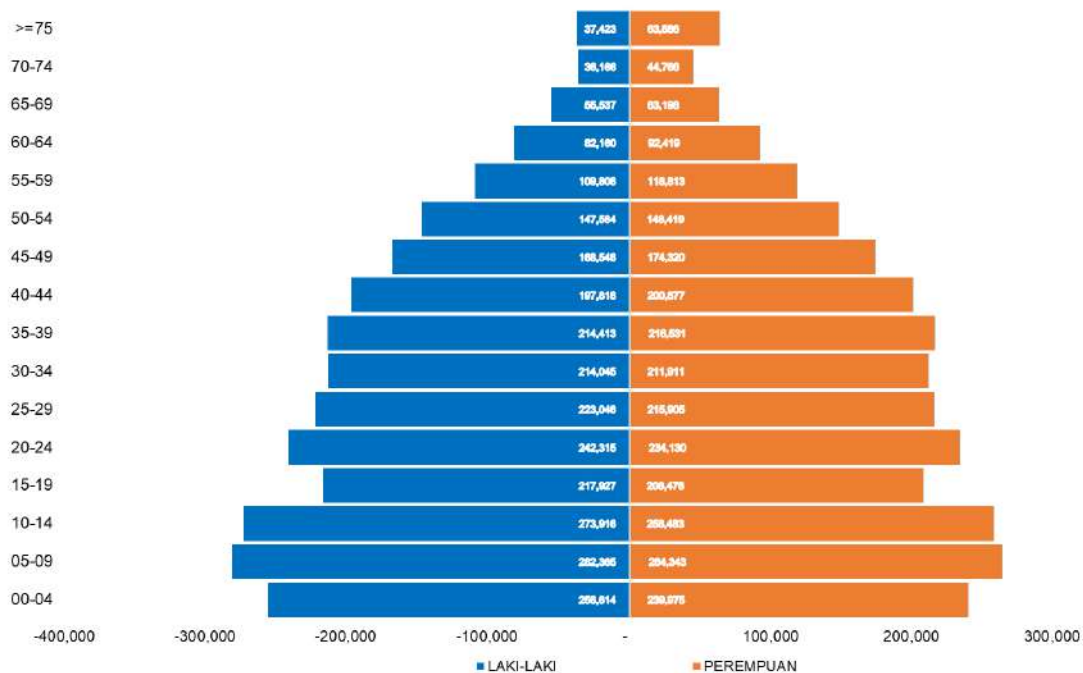
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)

Selama periode 2020-2024 peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Aceh Utara, Pidie dan Aceh Timur, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Bener Meriah. Peningkatan jumlah penduduk yang paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada Kota Sabang, Kabupaten Simeulue dan Kota Subulussalam. Tahun 2024 jumlah penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan

Pidie. Tingginya persebaran penduduk di kabupaten tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya migrasi dan kelahiran.

C. Struktur Penduduk

Pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk menjadi tiga yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun, penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60). Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda, yang menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer, yang menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; dan 3) Piramida penduduk tua, yang menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)

Gambar 2. 10
Struktur Penduduk Aceh Tahun 2024 (Jiwa)

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tertinggi pada tahun 2024 berada pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 476,445 jiwa (8.64%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 242,315 jiwa (8.78%) dan perempuan sebesar 234,130 jiwa (8.49%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur terendah adalah pada kelompok umur non produktif antara (70-74) tahun, yakni sebesar 80,932 jiwa (1,47%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3,639,467.00 jiwa (65,98%). Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan

umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥ 65 tahun), yaitu sebesar 300,676.00 jiwa (5,45%).

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2023-2043 menetapkan kawasan strategis Aceh dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan peningkatan investasi di Aceh melalui pengembangan dan penataan kawasan ekonomi yang berorientasi pada sektor industri, energi, chemical, logistik, pariwisata, dan perdagangan. Pengembangan Kawasan Industri Ladong yang berada di KPI Indrapatra Kabupaten Aceh Besar untuk mewujudkan pengembangan agroindustri, chemical, manufaktur, pusat logistik, dan industri halal. Pengembangan Kawasan Industri Lampulo yang berada di KPI Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk penanganan dan pengolahan perikanan. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BASAJAN yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BARSELA yang berada di wilayah barat-selatan Aceh; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi TATIMLAGA yang berada di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi DTGA yang berada di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; untuk memajukan penataan ekonomi kawasan dengan bentuk kerja sama regional dalam hal penataan dan pengembangan kawasan, daya dukung dan daya tampung ruang, dan pengembangan infrastruktur penghubung.

Selain itu, pengembangan kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC), meliputi: 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan /Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat dan sekitarnya;

2.1.1.4. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data tahun 2024, menunjukkan IRB Provinsi Aceh memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 144,29. Sebaran IRB di Provinsi Aceh disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9
Indeks Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Indek Risiko Bencana (IRB)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	162,00	162,00	162,00	171,20	162,00
2	Aceh Singkil	178,00	178,00	178,00	118,31	178,00
3	Aceh Selatan	171,20	171,20	171,20	164,56	171,20
4	Aceh Tenggara	127,23	120,03	121,43	118,95	112,89
5	Aceh Timur	176,05	166,74	173,00	185,57	155,31
6	Aceh Tengah	124,80	124,80	121,46	202,01	116,18
7	Aceh Barat	189,04	179,15	179,15	159,02	173,76
8	Aceh Besar	211,20	209,78	207,78	165,86	195,61
9	Pidie	163,20	163,20	163,15	162,00	151,00
10	Bireuen	168,00	168,00	165,83	178,00	155,99
11	Aceh Utara	175,20	175,20	170,46	163,23	166,20
12	Aceh Barat Daya	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20
13	Gayo Lues	101,41	97,59	97,59	94,63	98,40
14	Aceh Tamiang	146,52	139,20	133,66	166,09	125,06
15	Nagan Raya	203,20	200,08	200,08	197,60	192,31
16	Aceh Jaya	178,80	165,00	166,43	129,56	175,54
17	Bener Meriah	123,20	119,36	115,98	112,63	108,97
18	Pidie Jaya	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60
19	Banda Aceh	127,31	117,02	109,29	102,93	105,80
20	Sabang	116,62	108,65	113,73	113,73	113,73
21	Langsa	143,20	138,73	130,44	134,83	136,99
22	Lhokseumawe	130,11	130,11	132,70	124,22	115,04
23	Subulussalam	95,20	95,20	95,20	92,88	87,87
IRB Provinsi Aceh		153,58	149,99	149,10	146,90	144,29
IRB Nasional		141,85	138,81	135,56	132,25	128,52

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah Aceh yang meliputi geografi, kependudukan, perekonomian dan sebagainya menentukan tingkat kerentanan wilayah jika terjadi suatu bencana. Potensi risiko bencana akan meningkat dan memberikan dampak yang besar apabila kapasitas wilayahnya rendah. Aceh memiliki riwayat terjadinya bencana di masa lalu, yang tentu harus diantisipasi kemungkinan berulangnya kejadian bencana tersebut dalam skala yang lebih besar.

Kerawanan bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Aceh adalah bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, likuefaksi dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi serta cuaca ekstrem).

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Potensi bencana non alam di Aceh antara lain yaitu epidemi dan wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Pandemi Covid- 19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020 lalu merupakan salah satu jenis bencana non-alam. Jenis bencana yang terakhir adalah bencana sosial yang merupakan bencana akibat serangkaian peristiwa oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Berdasarkan catatan historis kebencanaan, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Aceh dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024) mengalami kecenderungan penurunan kejadian bencana setiap tahunnya. Data kebencanaan dapat dilihat pada gambar 2.11. berikut. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.409 kejadian bencana atau rata-rata 568 kejadian bencana per tahun. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 9 jenis.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2024

Gambar 2. 11
Data Bencana Aceh Tahun 2017-2023

Tabel 2. 10
Potensi Bencana di Aceh

No.	Jenis Bencana	No.	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi	8	Kebakaran Hutan dan Lahan
2	Gunung Api	9	Angin Putting Beliung
3	Tsunami	10	Gelombang Pasang atau Badai
4	Longsorg	11	Abrasi
5	Banjir	12	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
6	Banjir Bandang	13	Likuifaksi
7	Kekeringan	14	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat
8	Kebakaran		

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7) bahwa pemerintah daerah diwajibkan Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana dengan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Penyusunan dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait

penanggulangan kebencanaan di daerah, mulai dari pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok substansi, diskusi publik, paparan draft RPB hingga finalisasi penyusunan dokumen RPB.

Penyusunan dokumen RPB Aceh menyikapi tingginya potensi bencana yang terjadi di Provinsi Aceh. secara historis, di Aceh telah mengalami beberapa jenis bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 hingga 2024. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.955 kejadian bencana atau rata-rata 494 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.11 Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 11
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2024

Jenis Bencana		Tahun								Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Gempa Bumi	1	6	14	21	1	2	2	1	48
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanah Longsor	18	27	46	57	42	35	27	14	266
5	Banjir	61	80	102	108	112	120	105	68	756
6	Banjir Bandang	5	7	8	5	6	4	3	4	42
7	Kekeringan	-	-	-	2	-	-	1	2	5
8	Kebakaran	71	97	285	289	269	153	149	86	1399
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	66	220	205	133	79	85	63	860
10	Angin Puting Beliung	17	71	102	100	89	71	44	34	528
11	Gelombang Pasang	2	0	2	3	5	1	0	0	13
12	Abrasi	1	7	6	12	5	4	2	1	38
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Likuifaksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		185	361	785	802	662	469	418	273	3.955

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025

Dari 14 jenis bencana tersebut diatas, masih terdapat 1 bencana tambahan berupa bencana ledakan sumur minyak masyarakat yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Timur. Melihat jumlah dan jenis bencana tersebut diatas, sehingga dibutuhkan RPB Aceh yang komprehensif, terpadu dan optimal. Optimalisasi perencanaan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta pengintegrasian RPB Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana

Gambar 2. 12
Peta Rawan Bencana Gempa Aceh

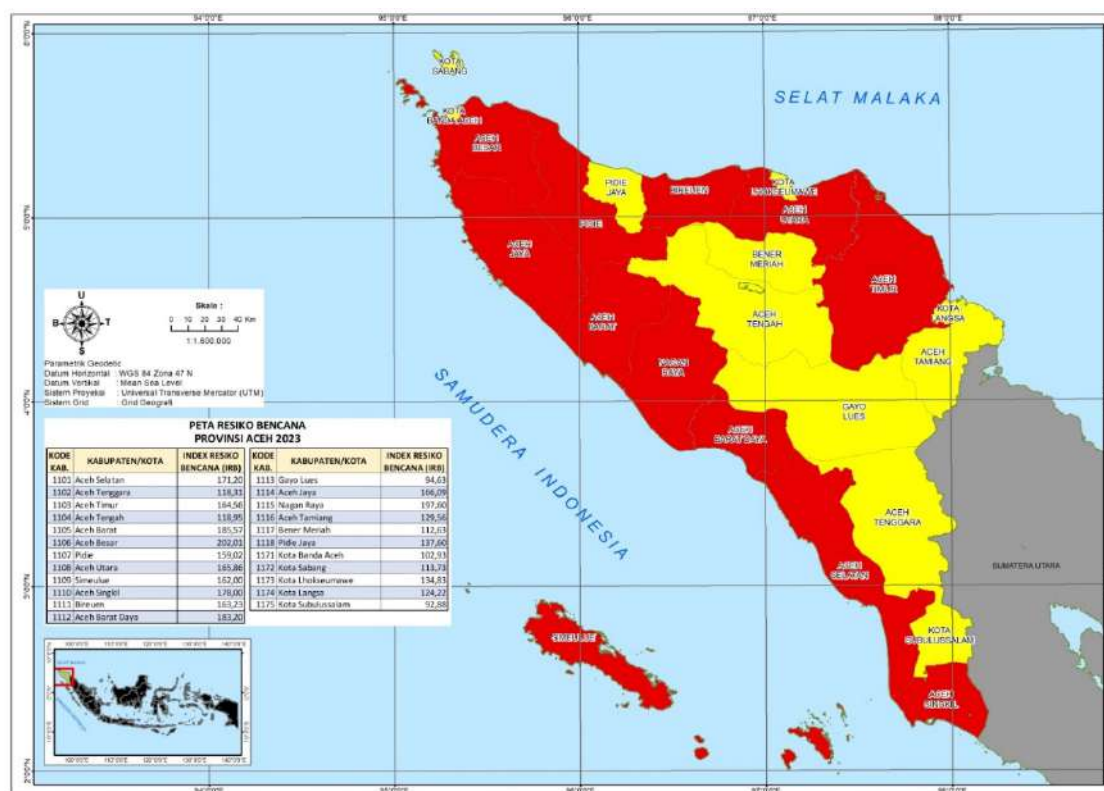


Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA pada tahun 2024 Periode Januari hingga Desember menunjukkan bahwa bencana banjir sudah terjadi sebanyak 68 kali yang berdampak pada 5.062 rumah masyarakat terendam, 11 jembatan dan 18 tanggul rusak serta 883 hektar sawah terendam dengan total pengungsi sebantak 4.009 orang. Berdasarkan data kebencanaan Aceh dapat dibagi dalam beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

- Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, yang tersebar pada beberapa kawasan yaitu pada Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya;
 3. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
 4. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir utara-timur, pesisir barat-selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
 5. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII - XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
 6. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya;
 7. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah Barat, perairan Laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
 8. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
 9. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
 10. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
 11. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.
 12. Kawasan rawan bencana Likuefaksi meliputi wilayah Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie

Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

Data tahun 2023, menunjukkan Provinsi Aceh masih memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 146.9/tinggi Sedangkan pada tahun 2024, nilai IRB Provinsi Aceh mengalami koreksi menjadi lebih rendah dengan nilai IRB sebesar 144.29/tinggi. Namun demikian IRB Aceh masih berada pada tingkatan 'tinggi', sehingga masih dibutuhkan usaha untuk mencapai angka IRB dengan tingkatan 'sedang'. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terkategori memiliki risiko tinggi (peta bergambar merah), sisanya sebanyak 11 wilayah kabupaten/kota tergolong berisiko sedang. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, ketahanan tinggi, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Provinsi diturunkan menjadi kategori rendah. Peta sebaran Indeks Rawan Bencana Aceh disajikan pada Gambar 2.14.



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024

Gambar 2. 14

Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

2.1.1.5. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang mungkin timbul. IKD tertinggi diraih oleh Kota Langsa dengan indeks sebesar 0,49, menyusul

Kabupaten/Kota Banda Aceh, Aceh Timur Aceh Barat, dan Aceh Tamiang dengan angka IKD masing-masing sebesar 0,48, 0,46, 0,45, dan 0,44 Selanjutnya daerah yang memiliki nilai IKD terendah sebesar 0,25 adalah Kabupaten Gayo Lues. Nilai IKD setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.12. di bawah ini.

Tabel 2. 12
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Simeulue		0,29	0,29	0,29	0,30
2.	Aceh Singkil		0,23	0,23	0,29	0,29
3.	Aceh Selatan		0,22	0,22	0,30	0,29
4.	Aceh Tenggara	0,36	0,41	0,34	0,38	0,42
5.	Aceh Timur	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46
6.	Aceh Tengah		0,20	0,35	0,36	0,37
7.	Aceh Barat	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45
8.	Aceh Besar	0,30	0,33	0,34	0,36	0,38
9.	Pidie	0,27	0,29	0,32	0,35	0,40
10.	Bireuen		0,21	0,34	0,34	0,39
11.	Aceh Utara		0,29	0,35	0,36	0,34
12.	Aceh Barat Daya	0,23	0,25		0,30	0,31
13.	Gayo Lues	0,39	0,39		0,39	0,25
14.	Aceh Tamiang	0,40	0,41	0,41	0,42	0,44
15.	Nagan Raya	0,30	0,34		0,34	0,36
16.	Aceh Jaya	0,47	0,48	0,38	0,39	0,29
17.	Bener Meriah		0,36	0,37	0,38	0,40
18.	Pidie Jaya		0,28	0,27	0,29	0,29
19.	Banda Aceh	0,64	0,58	0,59	0,61	0,48
20.	Sabang	0,42	0,45	0,30	0,30	0,29
21.	Langsa	0,32	0,36	0,42	0,42	0,40
22.	Lhokseumawe			0,41	0,40	0,49
23.	Subulussalam	0,26	0,26	0,31	0,35	0,40
	Aceh				0,37	

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

2.1.1.6. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh

memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

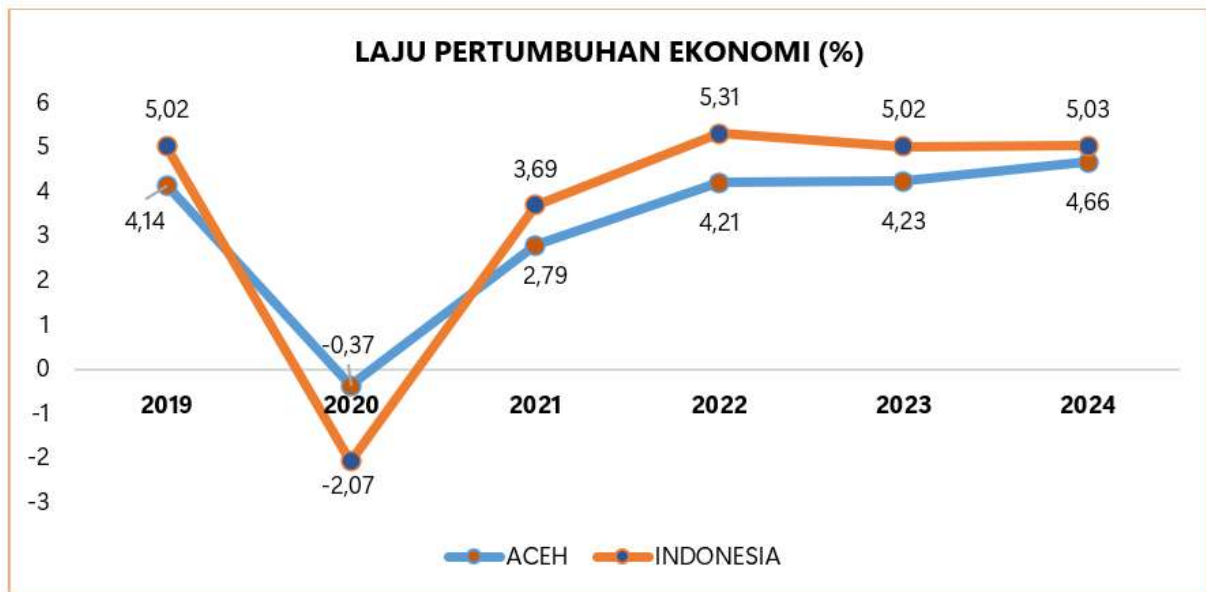
Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejujuannya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan angka Pertumbuhan Ekonomi tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan cerminan dari kinerja perekonomian Aceh. Selama kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami fluktuasi dan kontraksi. Pada tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Aceh mencapai 4,14 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Kondisi ini relevan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana pada tahun 2019 telah mencapai 5,02 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 0,27 persen. Kontraksi ekonomi Aceh dan nasional merupakan dampak dari resesi ekonomi global yang diakibatkan pandemi covid-19 yang mengharuskan negara-negara memberlakukan pembatasan pergerakan orang dan barang (lockdown).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

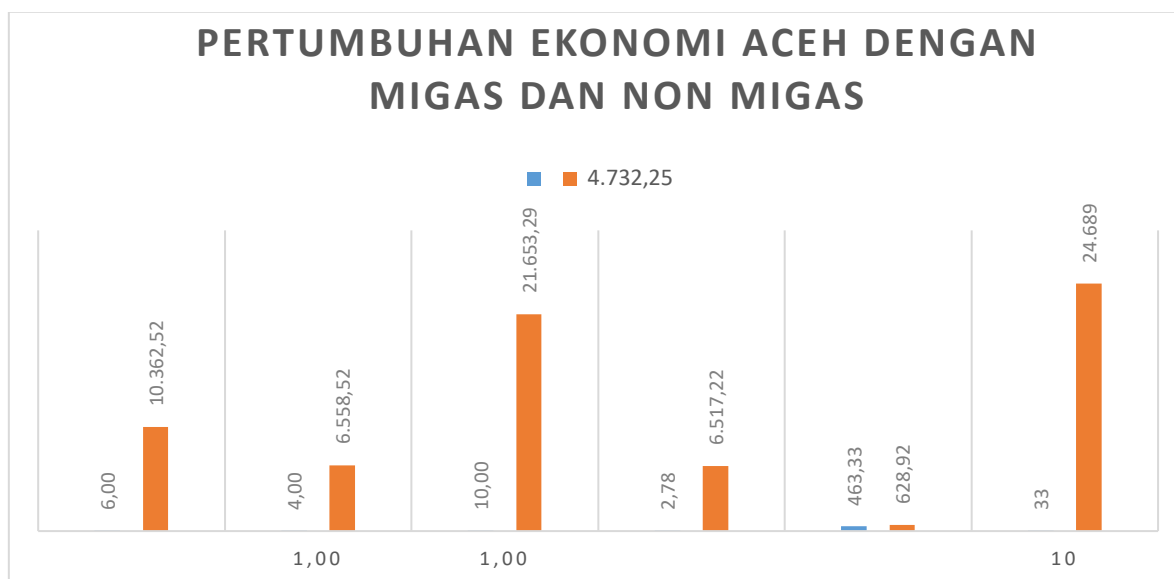
Gambar 2. 15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024
(Persen)

Paska Covid 19, Perekonomian Aceh mulai berangsur membaik sebagai dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan global. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2021 sebesar 2,79 persen, kemudian meningkat mencapai 4,23 persen pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 4,66 persen. Begitu juga dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2021, melonjak hingga 5,31 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 5,05 persen pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 5,03 persen.

Secara umum ekonomi Aceh mengalami pergerakan yang relatif sama dengan nasional dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 akibat Covid 19. Pada tahun 2023-2024 laju pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami perlambatan pertumbuhan, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional.

Bila ditinjau berdasarkan komposisi penyumbang, pertumbuhan ekonomi dengan migas dan non migas selama periode 2019-2024 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kinerja perekonomian Aceh Non Migas tumbuh signifikan bila dibandingkan dengan migas. (Gambar 2.10). Perekonomian dengan Migas tumbuh signifikan pada tahun 2024 sebesar 4,66 persen bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,23 persen, sedangkan laju pertumbuhan tanpa Migas tumbuh sebesar 4,91 persen dan mengalami perlambatan pada tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,69 persen.. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Aceh

secara umum mengalami perubahan dari dominasi sektor migas menuju sektor non migas. Dengan demikian, tingkat ketergantungan ekonomi Aceh terhadap sektor migas mulai berkurang dan sektor non migas tercatat tumbuh relatif lebih stabil.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2024

Gambar 2. 16
Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024

Struktur perekonomian Aceh dari tahun 2019 hingga tahun 2024 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata yang mencapai lebih dari 30 persen. Kemudian pada peringkat kedua diduduki oleh sektor Perdagangan dan Reparasi (Mobil dan Sepeda Motor), diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada posisi keempat.

Pada Tabel 2.13, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024, nilai nominal PDRB migas dan non migas terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB migas pada tahun 2019 sebesar Rp. 164.17 triliun dan pada tahun 2023 menjadi Rp.227.11 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp.. Sedangkan PDRB non migas sebesar Rp.158.51 triliun meningkat menjadi Rp. 216.72 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi Rp.243,20 triliun. Lapangan usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terus mengalami peningkatan dan penyumbang terbesar perekonomian Aceh, Pada tahun 2019 sebesar Rp.48.44 triliun menjadi Rp.75.32 triliun pada tahun 2024. Lapangan Usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peringkat kedua dengan nilai nominal sebesar Rp.25.47 triliun dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 34.43 triliun dan meningkat menjadi Rp.36.46 triliun pada tahun 2024. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa Jaminan Sosial Wajib menduduki peringkat ke tiga, pada tahun 2019 sebesar

Rp.16.83 triliun menjadi Rp.22.08 triliun pada tahun 2024 dan peringkat ke empat yaitu Lapangan Usaha Konstruksi sebesar Rp.15.79 triliun menjadi Rp.21.39 triliun.

Tabel 2. 13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	48,44	51,55	55,61	62,3	69,76	75,32
B.	Pertambangan & Penggalian	7,9	7,41	12,31	19,12	16,95	17,15
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	4,17	3,59	6,3	10,89	8,56	8,94
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	3,73	3,82	6,01	8,24	8,37	8,02
C.	Industri Pengolahan	7,78	7,59	9,31	10,87	10,98	11,46
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	1,48	1,48	1,54	1,71	1,71	1,63
C2.	Industri Nonmigas	6,3	6,11	5,87	9,17	9,27	9,83
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,23	0,23	0,23	0,24	0,26	0,28
E.	Pengadaan Air	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1	0,16
F.	Konstruksi	15,79	17,76	18,31	19,05	20,32	21,39
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	25,47	24,6	26,46	29,36	34,43	36,46
H.	Transportasi & Pergudangan	10,59	7,65	9,49	11,5	14,3	16,91
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,78	2,65	2,53	3,57	4,01	4,17
J.	Informasi & Komunikasi	4,67	5,19	5,57	6,2	6,59	6,69
K.	Jasa Keuangan	3,51	3,51	3,53	3,62	3,28	4,06
L.	Real Estate	7,16	7,17	7,53	8,13	8,56	8,58
M.N	Jasa Perusahaan	1,07	1,06	1,1	1,34	1,38	1,44
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	16,83	17,08	19,05	18,75	19,87	22,08
P.	Jasa pendidikan	4,9	5,24	5,51	5,78	5,95	6,42
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,62	5,14	5,8	6,8	6,99	7,3
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,36	2,47	2,57	2,95	3,28	3,38
	PDRB	164,17	166,37	184,98	209,698	227,018	243,202
	PDRB NON MIGAS	158,51	161,3	177,14	197,11	216,72	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 sebagaimana pada tabel 2.15 relatif stabil kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan pada PDRB migas dan non migas dampak dari pandemic Covid 19 atau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019 nilai PDRB migas sebesar Rp.132.07 triliun dan menurun pada tahun 2020, menjadi 131.58 triliun atau sebesar Rp.49.00 milyar kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp.146.93 triliun dan Rp.153.78 triliun. Sedangkan nilai PDRB non migas juga mengalami pergerakan yang sama yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.125.91 dan pada tahu 2020 sebesar Rp.124.97 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.94.00 milyar dan terus

meningkat hingga tahun 2023 menjadi Rp. 141.00 triliun dan relative mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp. 147.62 triliun.

Tabel 2. 14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	36,63	37,9	37,77	39,01	41,63	42,121
B.	Pertambangan & Penggalian	9,69	10,49	10,41	10,86	10,33	11,48
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	4,99	5,42	4,61	5,35	4,7	4,94
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	4,7	5,07	5,8	5,5	5,63	3,16
C.	Industri Pengolahan	6,34	6,06	6,21	6,47	6,37	6,56
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	1,18	1,19	1,18	1,21	1,23	1,22
C2.	Industri Nonmigas	5,16	4,87	5,03	5,26	5,15	5,33
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,21	0,22	0,22	0,22	0,24	0,25
E.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	12,57	13,9	13,84	13,52	14,02	14,63
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	20,32	19,24	20,05	21,33	23,26	23,85
H.	Transportasi & Pergudangan	9,85	7,06	8,43	9,04	9,72	11,35
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,79	1,65	1,55	2,05	2,22	2,28
J.	Informasi & Komunikasi	4,63	5,19	5,58	6,21	6,51	6,63
K.	Jasa Keuangan	2,34	2,36	2,24	2,1	1,87	2,29
L.	Real Estate	5,51	5,45	5,67	5,89	6,11	6,32
M.N	Jasa Perusahaan	0,87	0,84	0,84	0,94	0,93	0,97
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	11,85	11,46	12,19	12,18	12,41	13,33
P.	Jasa pendidikan	3,53	3,65	3,7	3,84	3,908	4,079
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,99	4,17	4,58	5,02	5	5,11
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,89	1,91	1,96	2,22	2,35	2,45
	PDRB	132,07	131,58	135,27	140,97	146,93	153,78
	PDRB NON MIGAS	125,91	124,97	129,48	134,41	141	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Besarnya kontribusi masing-masing sektor berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15
Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB 2010 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2024 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	29,51	30,98	30,06	29,71	30,73	30,97
B.	Pertambangan & Penggalian	4,82	4,45	6,65	9,12	7,5	7,05
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	2,54	2,16	3,4	5,19	3,78	3,68
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	2,27	2,29	3,25	3,93	3,69	3,38
C.	Industri Pengolahan	4,47	4,56	5,04	5,19	4,84	4,71
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	0,9	0,89	0,83	0,82	0,75	0,67
C2.	Industri Nonmigas	3,84	3,67	4,2	4,37	4,07	4,05
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
E.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
F.	Konstruksi	9,62	10,67	9,9	9,09	8,95	8,80
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	15,51	14,79	14,3	14	15,17	14,99
H.	Transportasi & Pergudangan	6,45	4,60	5,13	5,48	6,30	6,95
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,69	1,59	1,37	1,7	1,77	1,72
J.	Informasi & Komunikasi	2,85	3,12	3,01	2,96	2,9	2,75
K.	Jasa Keuangan	2,14	2,11	1,91	1,73	1,45	1,67
L.	Real Estate	4,36	4,31	4,07	3,88	3,77	3,52
M.N	Jasa Perusahaan	0,65	0,64	0,59	0,64	0,61	0,59
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	10,25	10,26	10,3	8,94	8,75	9,04
P.	Jasa pendidikan	2,98	3,15	2,98	2,75	2,62	2,64
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,81	3,09	3,13	3,24	3,08	3,00
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,44	1,49	1,39	1,41	1,45	1,39
	PDRB	100	100	100	100	100	100
	PDRB NON MIGAS	95,56	96,95	95,76	93,67	95,43	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota selama tahun 2019-2024 sebagaimana tergambar pada Tabel 2.16 secara umum mengalami fluktuasi dan kontraksi. Pada tahun 2019 perekonomian relative stabil dan terdapat beberapa kabupaten yang tumbuh relative kecil atau pertumbuhan dibawah 4 persen dan yang terkecil adalah Kabupaten Gayo Lues dengan pertumbuhan sebesar 2.62 persen. Pertumbuhan tertinggi yang berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional adalah Kota Sabang sebesar 5.82 persen dan Kabupaten Nagan Raya sebesar 6.77 persen.

Kemudian pada tahun 2020, semua kabupaten/kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kecuali 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Simeulue (tumbuh 0.12%), Aceh Timur (tumbuh 1.54%), Aceh Barat (tumbuh 1.88%), Aceh Utara (0.98%), Nagan Raya (tumbuh 3.36%), Bener Meriah (tumbuh 0.09%) dan Subulussalam (tumbuh 1.97%). Baru pada tahun 2021-2023 seluruh PDRB kabupaten/kota tumbuh positif, kecuali Aceh Utara yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0.54 persen pada tahun 2021.

Tabel 2. 16

Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (Persen)

Wilayah	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	4,6	0,12	3,14	4,2	4,63	4,43
Aceh Singkil	3,99	-1,01	3,9	3,61	3,52	3,46
Aceh Selatan	4,43	-0,05	2,46	3,11	3,53	3,21
Aceh Tenggara	4,23	-0,17	1,57	2,69	3,04	3,59
Aceh Timur	4,42	1,54	1,94	3,73	2,09	4,63
Aceh Tengah	3,51	-1,18	3,3	4,93	5,6	4,98
Aceh Barat	4,99	1,88	5,84	3,28	4,08	7,5
Aceh Besar		0,39	2,44	3,87	4,37	4,95
Pidie	4,43	-0,12	2,63	3,98	3,95	4,15
Bireuen	5	-1,02	4,09	4,35	4,38	4,52
Aceh Utara	3,48	0,98	-0,54	4,69	0,51	3,56
Aceh Barat Daya	4,75	-0,65	2,88	3,87	3,92	4,24
Gayo Lues	1,26	0,88	2,32	3,51	3,98	3,26
Aceh Tamiang	4,55	0,42	0,88	3,27	2,25	4,25
Nagan Raya	6,77	3,36	4,26	3,06	6,83	4,38
Aceh Jaya	3,75	-0,62	2,59	3,68	4,15	3,83
Bener Meriah	4,32	0,09	3,42	3,42	5,22	3,27
Pidie Jaya		-0,79	2,03	3,57	4,24	4,55
Banda Aceh	4,13	-3,39	5,5	5,23	5,06	6,08
Sabang	5,82	-1,29	2,67	2,57	2,96	4,16
Langsa	4,39	-1,12	3,92	4,78	4,22	4,43
Lhokseumawe	3,98	-1,8	3,84	4,01	4,21	4,46
Subulussalam	4,42	1,97	3,87	4,12	4,06	4,12
Aceh	4,12	-0,37	2,81	4,21	4,23	4,66
Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan PDRB di tahun 2024. Tiga Kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB terbesar adalah Aceh Barat (meningkat 3,42 persen), Aceh Utara (meningkat 3,05 persen), dan

Acet Timur (meningkat 2,54 persen). Sementara itu, delapan Kabupaten/Kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB adalah Simeulue (menurun 0,2 persen), Aceh Singkil (menurun 0,06 persen), Aceh Selatan (menurun 0,32 persen), Aceh Tengah (menurun 0,62 persen), Gayo Lues (menurun 0,72 persen), Nagan Raya (menurun 2,45 persen), Aceh Jaya (menurun 0,32 persen), dan Bener Meriah (menurun 2,95 persen).

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB kabupaten/kota sepanjang tahun 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonominya diindikasikan adanya sektor atau lapangan usaha yang tidak produktif (tidak efisien dalam pengelolaan, tidak inovatif dan sumber bahan baku yang terbatas/berkurang). Kabupaten/kota ini perlu mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan signifikan dapat terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

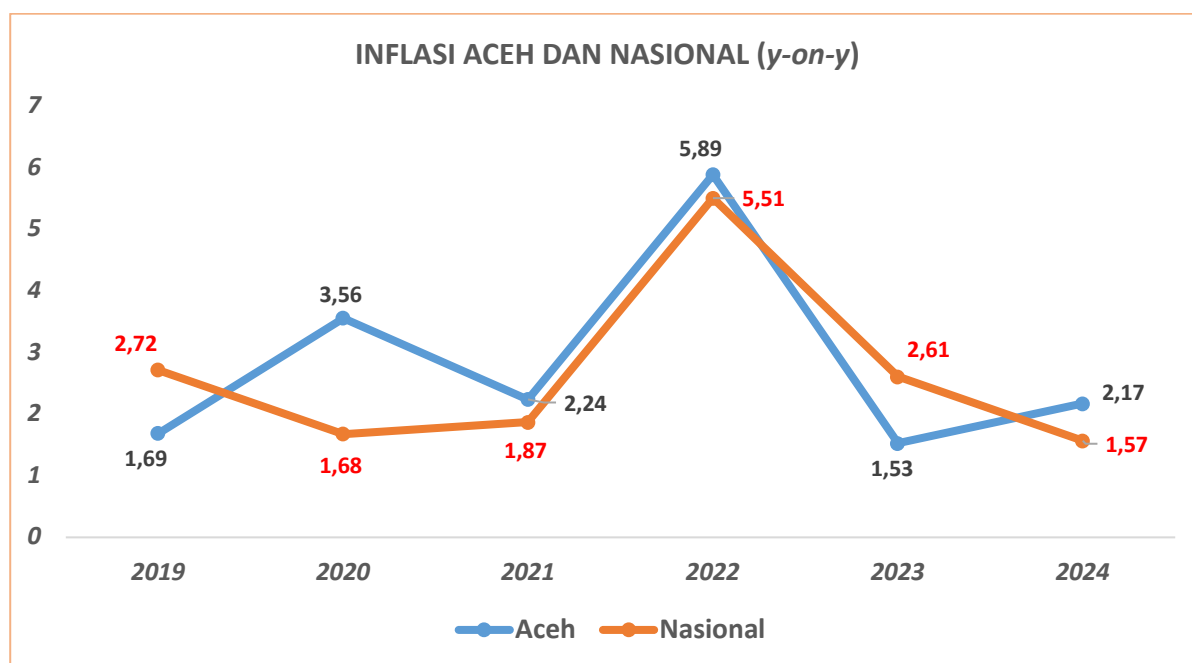
Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam perekonomian. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu: *cost push inflation*, *demand pull inflation* dan *expected inflation*. Faktor-faktor ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecenderungan kenaikan perubahan struktur harga.

Bank Indonesia, menyatakan bahwa tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional tahun 2019-2024 (*y-on-y*) relatif mengalami fluktuasi dengan pergerakan yang sama, hal ini terlihat pada Gambar 2.17. Inflasi Aceh pada tahun 2019 dapat dikendalikan sebesar 1.69 persen dan nasional sebesar 2.72 persen. Pada tahun 2020 inflasi Aceh meningkat sebesar 3.56 persen dan nasional relative lebih yaitu sebesar 1.68 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu Aceh sebesar 5.89 persen dan Nasional sebesar 5.51 persen, kondisi ini meningkat disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Secara

umum penyebab inflasi di Aceh adalah naiknya harga komoditas *volatile food* dan *administrerad prices*. Kemudian pada tahun 2023 inflasi Aceh kembali dapat dikendalikan sebesar 1.53 persen dan Nasional sebesar 2.61 persen atau masih berada dibawah rata-rata nasional.

Selama periode 2019 - 2024 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1.69 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5.89 persen akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 dan mengalami inflasi selama 7 bulan dan 5 bulan deflasi. Pada tahun 2024 inflasi (y-on-y) Aceh terkendali sebesar 2,17 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional yang mampu dikendalikan sebesar 1.57 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

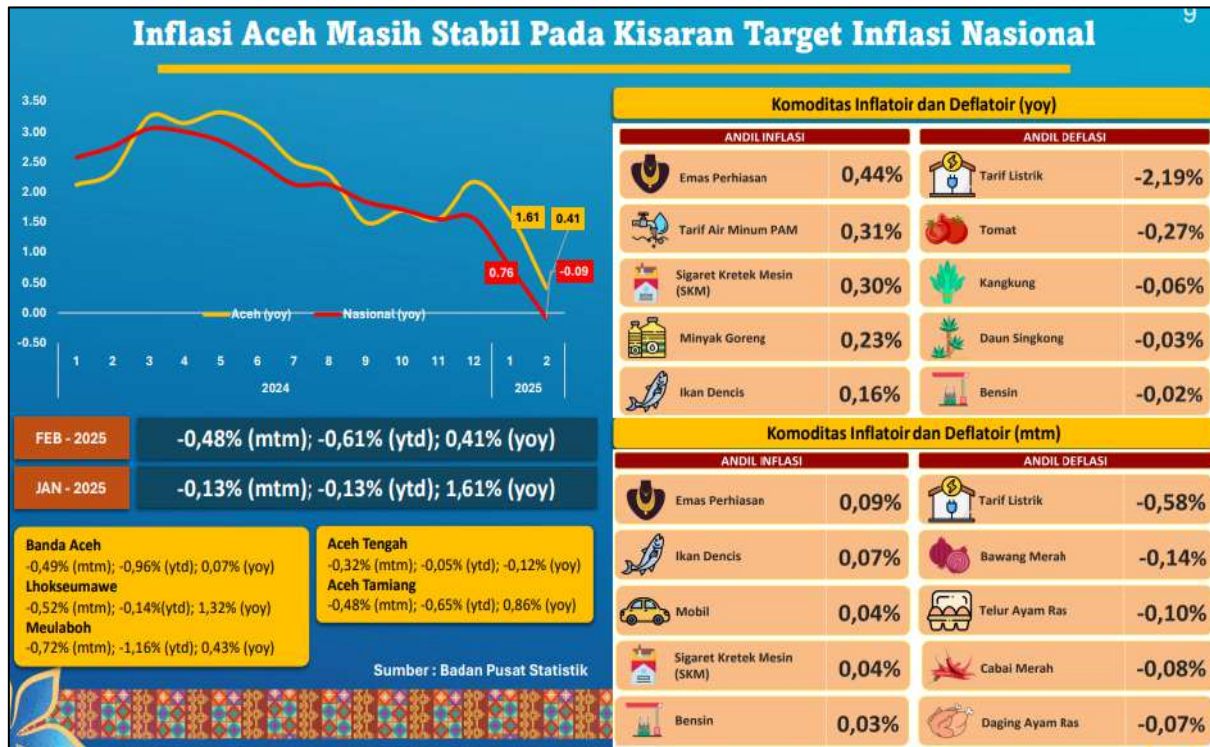
Gambar 2. 17

Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen)

Pengaruh inflasi sepanjang tahun 2024- Februari 2025 (y-on-y) karena adanya beberapa komoditas inflator yang mengalami kenaikan atau memberi andil inflasi seperti, Emas Perhiasan sebesar 0.44 persen, Tarif Air Minum PAM sebesar 0.31 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0.23 persen, Minyak Goreng sebesar 0,23 persen dan Ikan Dencis sebesar 0,16 persen. Sedangkan komoditas inflator dan deflator (m-to-m) masih disumbangkan oleh perhiasan emas dan Ikan Dencis, masing-masing sebesar (0.09 % dan 0.07%). Andil deflator

terjadi pada Trif Listrik sebesar -0.58 persen, Bawang Merah sebesar -0.14 persen dan Telur Ayanm Ras sebesar -0.10 persen.

Kabupaten dan Kota penyumbang inflasi tertinggi selama tahun 2024 (y-on-y) yaitu kota Lhokseumawe dan Aceh Tamiang masing-masing sebesar (1.32% dan 0.86%). Secara (m-to-m) penyumbang deflator terdapat di Kabupaten Meulaboh dan Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tengah secara berturut-turut sebagai berikut (-0.72 %, -0.52%, -0.49), untuk lebih jelasnya sebagai mana pada Gambar 2.18.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 18

Laju Inflasi Aceh dan Nasional (m-to-m) Tahun 2024- Februari 2025 (Persen)

Inflasi (Gabungan 3 Kota) di Aceh (kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh), selama tahun 2019-2023 relatif dapat dikendalikan atau berada dibawah 6 persen. Pada tahun 2019 inflasi terjadi ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh dan Nasional pada periode 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. IHK Aceh tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana IHK Bulan Desember berada pada level 131,87 namun masih di bawah rerata nasional yaitu pada level 139,07. Pada tahun 2022 IHK Aceh per Desember berada pada level 115,35, IHK tersebut lebih tinggi dari IHK nasional yang berada pada level 113,59. Penyumbang kenaikan IHK tertinggi adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau, Kelompok Sandang dan kelompok Kesehatan, serta kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga.

Tabel 2. 17
Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2019-2024 (Persen)

Bulan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jan	0,4	0,66	0,79	1,04	1,04	1,69
Feb	-0,6	0,44	-0,65	-0,6	-0,6	0,71
Maret	0,34	0,6	0,37	0,68	0,68	0,52
April	0,42	-0,15	0,51	1,23	1,23	0,25
Mai	1,27	0,26	0,25	1	1	0,15
Juni	0,47	-0,15	-0,06	0,75	0,75	0,03
Juli	0,04	-0,31	-0,07	0,86	0,86	0,11
Agustus	-0,1	0,46	0,08	-0,51	-0,51	0,10
Sept	0,32	-0,1	-0,2	0,77	0,77	0,16
Okt	0,22	0,65	0,43	-0,25	-0,25	-0,03
Nov	0,12	0,19	0,8	-0,12	-0,12	0,37
Des	0,42	0,99	0,71	0,93	0,93	0,57
Inflasi	1,69	3,59	2,24	5,89	1,53	2,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025

Inflasi (Gabungan 3 Kota) pada tahun 2023 mengalami inflasi year on year sebesar 1,53 persen. Inflasi tahun 2023 dimulai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 115,35 pada bulan November 2023 menjadi 117,11 pada bulan Desember 2023. Sepanjang tahun 2023, IHK gabungan 3 kota di Aceh mengalami inflasi year on year yang cukup stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Diawali dengan bulan Januari hingga April 2023 terjadi inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y Januari sebesar 5,52 persen) dan mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (6,71 persen) pada bulan februari 2023. Sedangkan inflasi y-on-y bulan desember 2023 berada dibawah target inflasi nasional yaitu sebesar 1,53 persen.

Inflasi (m-to-m) selama bulan Januari-Desember 2023 diatas 5 persen terjadi pada bulan Januari-Maret. Selama April -Desember inflasi mampu dikendalikan dibawah 5 persen dan terkecil sebesar 1.53 persen.. Dalam kurun waktu 12 bulan juga terjadi deflasi (m-to-m) selama 4 bulan (Maret, April, Agustus dan Oktober) dan deflasi cukup dalam terjadi pada bulan maret 2023 (deflasi m-to-m 0,51 persen).

Pada tahun 2023 seluruh kelompok mengalami inflasi, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi y-on-y di bulan Desember sebesar 0,03 persen. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y selama tahun 2023 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,72 persen, kemudian kelompok perawatan pribadi dan lainnya dengan andil sebesar 0,25 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y antara lain Beras dengan andil 0,66 persen, Rokok Kretek Filter dengan andil sebesar 0,26 persen, Cabai Merah dengan andil sebesar 0,24 persen, Emas Perhiasan dengan andil sebesar 0,23 persen, Nasi dengan Lauk dengan andil 0,09 persen, serta Mobil dengan andil sebesar 0,08 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil negatif antara lain Ikan Tongkol/Ambu-Ambu dengan andil -0,32 persen, Daging Ayam Ras dengan andil sebesar -0,08 persen, juga Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar -0,04 persen.

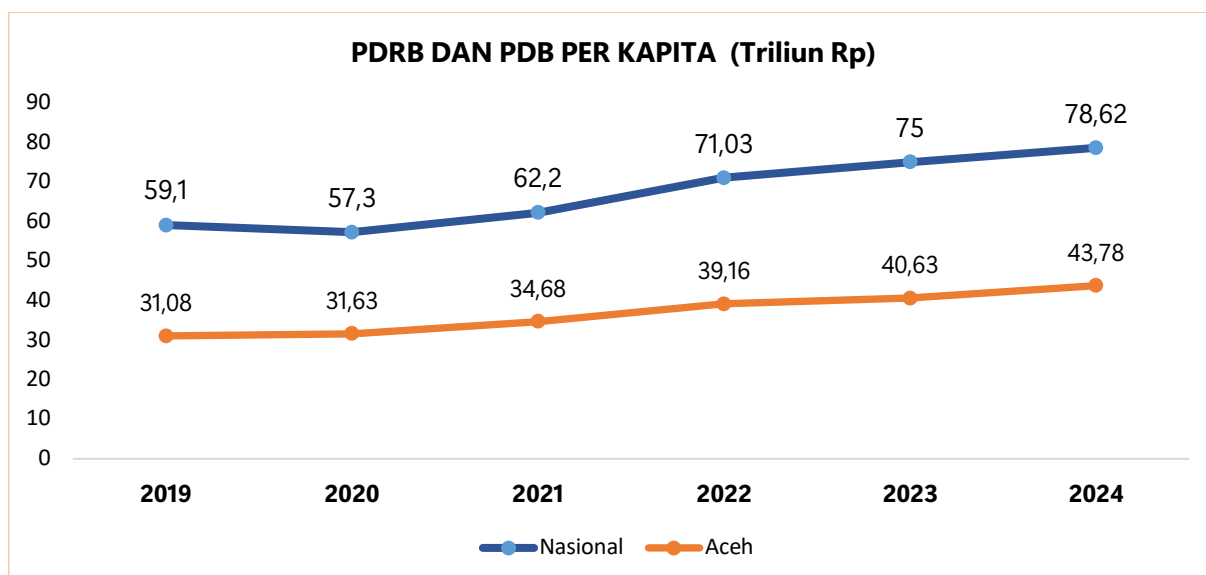
Selama lima tahun terakhir, penyumbang inflasi tertinggi dilihat dari komoditas yang dihitung dalam IHK adalah Beras, rokok/tembakau, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu, Angkutan Udara, Ikan Dencis, Telur Ayam Ras, Ikan Kembung, dan minyak goreng. Komoditas tersebut memberikan andil dalam meningkatnya tingkat kemiskinan di Aceh.

2.1.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Aceh 2019-2024 secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDB Perkapita Aceh sebesar 31,08 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 40,63 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan nasional, PDB Per Kapita Aceh jauh berada di bawah rata-rata nasional. PDRB perkapita Aceh pada tahun 2024 sebesar Rp. 43,78 juta Rupiah lebih kecil bila dibandingkan dengan PDB per kapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 59.1 Juta. PDRB Per Kapita Nasional pada tahun 2019 sebesar 59,10 ribu rupiah, dan terus mengalami peningkatan tajam menjadi Rp. 78,62 Juta pada tahun 2024. Sementara trend kenaikan PDB Per Kapita Aceh terlihat melemah dan semakin menjauh dari rerata PDB nasional.

Untuk melihat persebaran tingkat kesejahteraan penduduk kabupaten/kota di Aceh, dapat memperhatikan PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2019-2024 sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa selama periode 2019-2024, PDRB per kapita Kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional kecuali Kota Banda Aceh (98.20 juta Rupiah) yang berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 19

PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB

Selanjutnya terdapat beberapa kabupaten/kota dengan PDRB perkapita berada di atas rata-rata Aceh, namun masih di bawah Nasional yaitu, Kabupaten Aceh Tengah (47.28 Juta Rupiah), Kabupaten Aceh Barat (67.98 Juta Rupiah), Nagan Raya (70.46 Juta), Aceh Utara, (47.60 Juta Rupiah) Kota Sabang (44.61 Juta Rupiah) dan Lhokseumawe (59.12 Juta Rupiah). Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang yang pada tahun 2019-2020 berada di atas-rata-rata Aceh, kemudian pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan hingga berada di bawah rata-rata Aceh. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi sektoral di kabupaten/kota tersebut dan terjadinya percepatan perekonomian di beberapa kabupaten/kota lainnya. Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah), sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 18.

Tabel 2. 18

PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

Kab/Kota, Aceh dan Nasional	PDRB/Kapita/Tahun (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	23.49	24.55	26.15	28.12	30.22	31.94
Aceh Singkil	19.62	19.23	21.13	22.96	24.03	25.36
Aceh Selatan	22.93	23.85	25.47	27.21	29.37	30.85
Aceh Tenggara	23.01	23.00	24.24	25.64	27.10	28.74
Aceh Timur	23.91	25.18	27.40	30.29	31.50	33.67
Aceh Tengah	35.73	34.41	36.86	40.17	43.97	47.28
Aceh Barat	38.56	40.90	49.80	62.82	66.28	67.98
Aceh Besar	31.64	32.95	34.24	37.12	40.20	42.99

Kab/Kota, Aceh dan Nasional	PDRB/Kapita/Tahun (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pidie	23.84	24.78	25.84	27.98	30.11	32.15
Bireuen	27.78	30.03	31.91	34.58	37.57	40.03
Aceh Utara	31.96	32.76	38.08	45.83	45.56	47.60
Aceh Barat Daya	25.74	26.07	27.13	29.38	31.63	33.72
Gayo Lues	28.10	27.18	28.32	29.88	31.81	33.55
Aceh Tamiang	25.13	25.59	29.83	34.62	35.15	37.34
Nagan Raya	45.02	45.63	53.43	61.75	68.54	70.46
Aceh Jaya	27.72	28.29	30.28	32.50	34.55	36.36
Bener Meriah	30.29	28.23	30.62	32.92	35.55	37.90
Pidie Jaya	21.75	22.17	22.99	24.54	26.46	28.38
Banda Aceh	69.25	73.31	78.06	83.31	90.76	98.20
Sabang	44.61	37.41	38.42	38.85	40.73	42.81
Langsa	29.70	28.49	30.61	32.70	35.19	37.00
Lhokseumawe	43.56	47.05	49.34	52.91	56.60	59.12
Subulussalam	21.59	20.00	22.83	24.99	26.43	27.88
Aceh	30.88	31.63	34.67	38.90	41.42	43.78
Nasional	59.10	57.30	62.20	71.03	75.00	78.62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

2.1.2.1.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

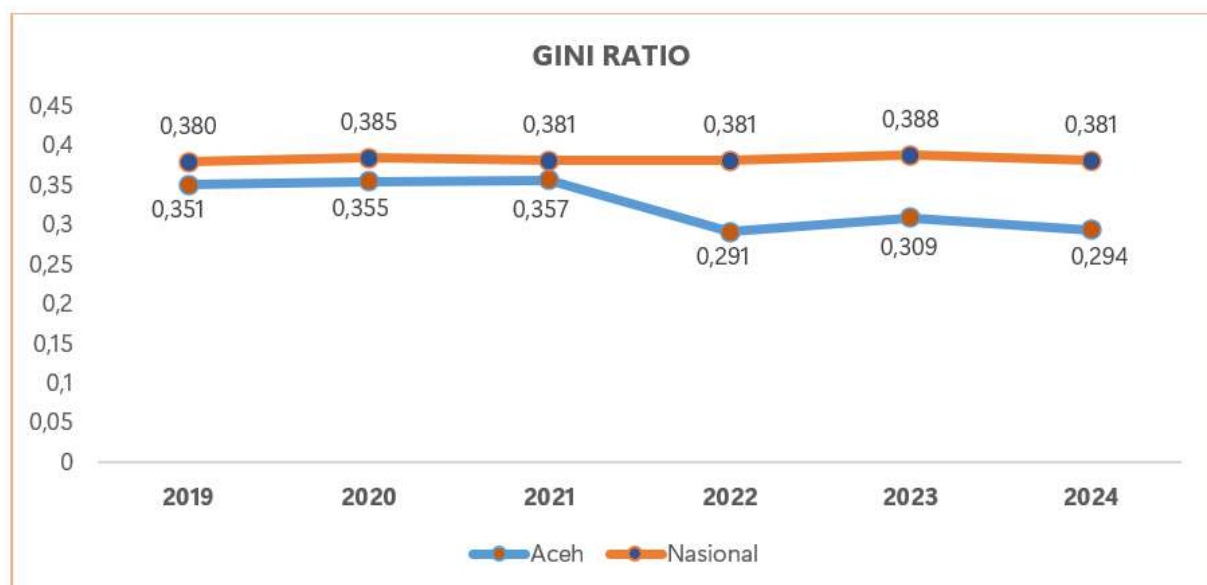
Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (disparitas) pendapatan agregat, yaitu suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35.

Gini Rasio membantu Pemerintah Aceh dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Aceh. Perkembangan Gini Rasio Aceh dan Nasional tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.20.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2024

Gambar 2. 20
Gini Rasio Aceh di Perkotaan dan Perdesaan Periode Maret 2019-Maret 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2025

Gambar 2.21.
Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024

Gambar 2.21 menunjukkan bahwa dalam kurun periode September 2019-2022 dan Maret 2023-2024, Rasio Gini Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata nasional. Indeks Gini Aceh dan Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama. Pada September tahun 2019 Indeks Gini Aceh sebesar 0.321 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.296 pada Maret tahun 2023. Sedangkan Nasional mengalami peningkatan dari 0,380 pada September tahun 2019 menjadi 0,388 pada Maret 2023. Koefisien gini Aceh terendah terjadi pada September tahun 2022 sebesar 0.291 dan tertinggi pada September tahun 2021 sebesar 0.323. Pada tahun 2024 gini rasio Aceh dan nasional memiliki

kecenderungan yang sama dengan penurunan masing-masing menjadi 0,294 dan 0,381. Secara umum Rasio Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan sedang karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan nasional, maka ketimpangan Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional.

Tabel 2. 19
Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 - 2024 (Maret)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,34	0,296	0,31	0,279	0,297	0,259
Aceh Singkil	0,282	0,287	0,336	0,296	0,270	0,26
Aceh Selatan	0,273	0,313	0,295	0,257	0,258	0,274
Aceh Tenggara	0,278	0,315	0,247	0,274	0,277	0,233
Aceh Timur	0,249	0,282	0,271	0,283	0,224	0,221
Aceh Tengah	0,256	0,331	0,29	0,27	0,248	0,258
Aceh Barat	0,33	0,304	0,295	0,265	0,237	0,249
Aceh Besar	0,288	0,352	0,296	0,293	0,299	0,262
Pidie	0,249	0,249	0,22	0,223	0,213	0,209
Bireuen	0,295	0,304	0,296	0,275	0,258	0,258
Aceh Utara	0,308	0,261	0,283	0,275	0,294	0,267
Aceh Barat Daya	0,301	0,273	0,282	0,24	0,250	0,226
Gayo Lues	0,29	0,28	0,263	0,254	0,241	0,241
Aceh Tamiang	0,289	0,264	0,276	0,305	0,277	0,256
Nagan Raya	0,252	0,275	0,257	0,236	0,207	0,159
Aceh Jaya	0,253	0,252	0,312	0,299	0,267	0,254
Bener Meriah	0,267	0,259	0,255	0,257	0,226	0,23
Pidie Jaya	0,236	0,227	0,236	0,231	0,221	0,214
Banda Aceh	0,289	0,303	0,347	0,391	0,330	0,339
Sabang	0,281	0,271	0,293	0,298	0,306	0,295
Langsa	0,363	0,356	0,34	0,368	0,330	0,305
Lhokseumawe	0,306	0,307	0,296	0,348	0,293	0,326
Subulussalam	0,342	0,344	0,303	0,33	0,296	0,276
Aceh	0,319	0,323	0,324	0,311	0,296	0,294
Nasional	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2025

Persebaran Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatu kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indeks Gini kabupaten terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2019 sebesar 0.236 dan yang tertinggi di Kota Langsa sebesar 0.363. Selanjutnya Indeks Gini kategori terkecil pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Nagan Raya yaitu 0.159 dan yang tertinggi terdapat di dua kota yaitu kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe dengan Indeks Gini masing-masing sebesar 0.339 dan 0.326. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi melalui program dan kegiatan pada sektor prioritas yang relatif memberi

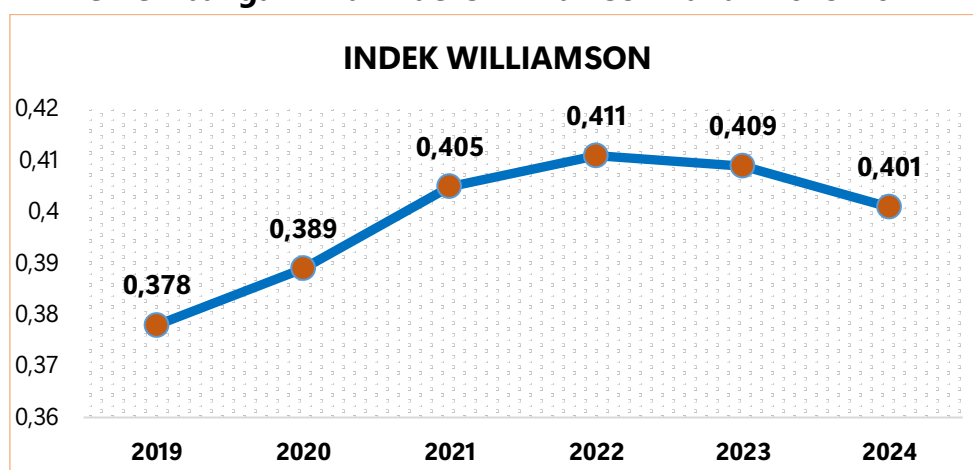
peluang dan kesempatan kerja. Produktivitas dan kreativitas masyarakat terutama kaum melinial dapat memberikan keseimbangan pendapatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

2.1.2.1.5. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah (*regional disparity*) merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (*regional*) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan persebaran (*coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Walaupun indeks ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, maka akan berdampak pada ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indeks Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah. Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamson Aceh terdapat pada Gambar 2.20 berikut:

Gambar 2. 20
Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2019-2024



Sumber: Bappeda Aceh, 2024 (data diolah)

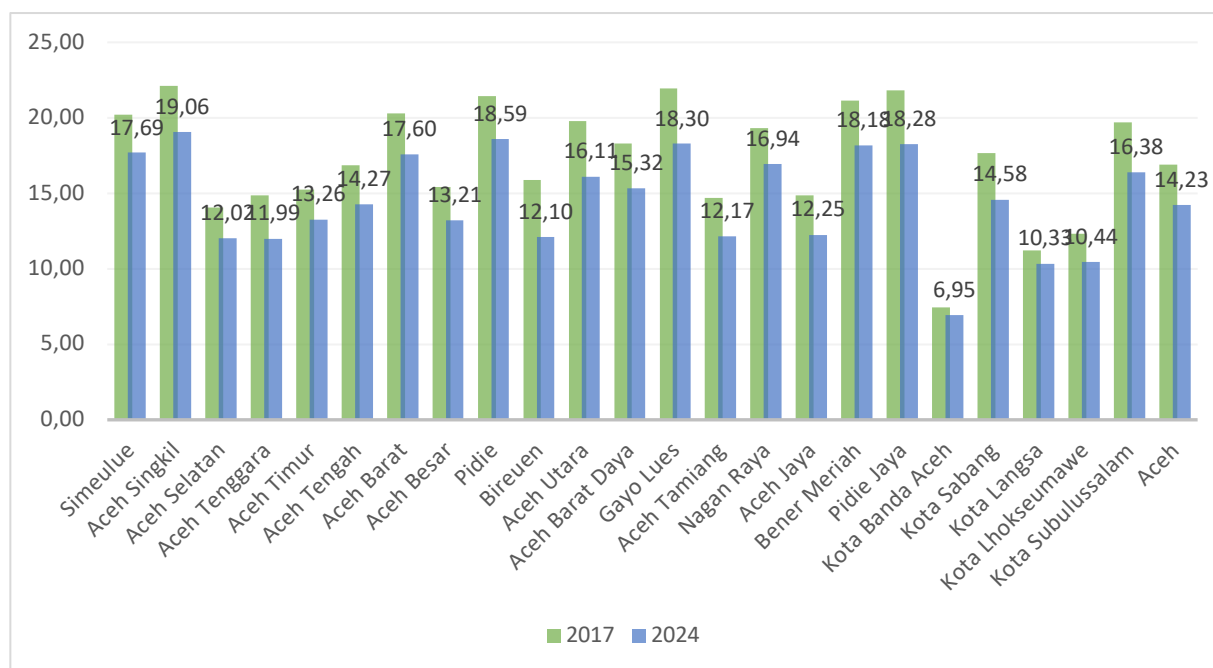
Pada Gambar 2.20 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2019 - 2024 yang dikategorikan sedang

menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2019 sebesar 0,378 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 0,411, dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan sebesar 2.00 persen dan pada tahun 2023-2024 kembali mengalami perbaikan ketimpangan ditandai dengan nilai indek yang menurun masing-masing sebesar 0.409 dan 0,401. Selama kurun waktu 6 tahun (2019-2023) relatif mengalami penurunan ketimpangan. Nilai Indeks Williamson ini mengindikasikan adanya perubahan dari tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota karena dampak Covid-19. Sedangkan nilai indek yang semakin menurun mencerminkan terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa kabupaten/kota dengan meningkatnya harga komoditi non migas (seperti batubara dan Sawit). Walaupun ketimpangan di Aceh relative tergolong sedang, namun kondisi ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki antar kabupaten/ikota yang belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, maka akan berdampak pada ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah.

2.1.2.1.6. Kemiskinan

Kinerja penurunan angka kemiskinan Aceh berada pada berada pada tracknya. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, seluruh kab/kota di Aceh menunjukkan kinerja yang sejalan disemua tahun (2017 - 2024). Angka kemiskinan Aceh sempat mengalami kenaikan diseluruh daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2021. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat saat covid 19 melanda dunia. Kabupaten/kota yang paling terimbas kebijakan penanganan covid 19 adalah Kota Banda Aceh, yang mengalami kenaikan hingga 10 persen yakni dari 6.9 persen menjadi 7.61 persen.

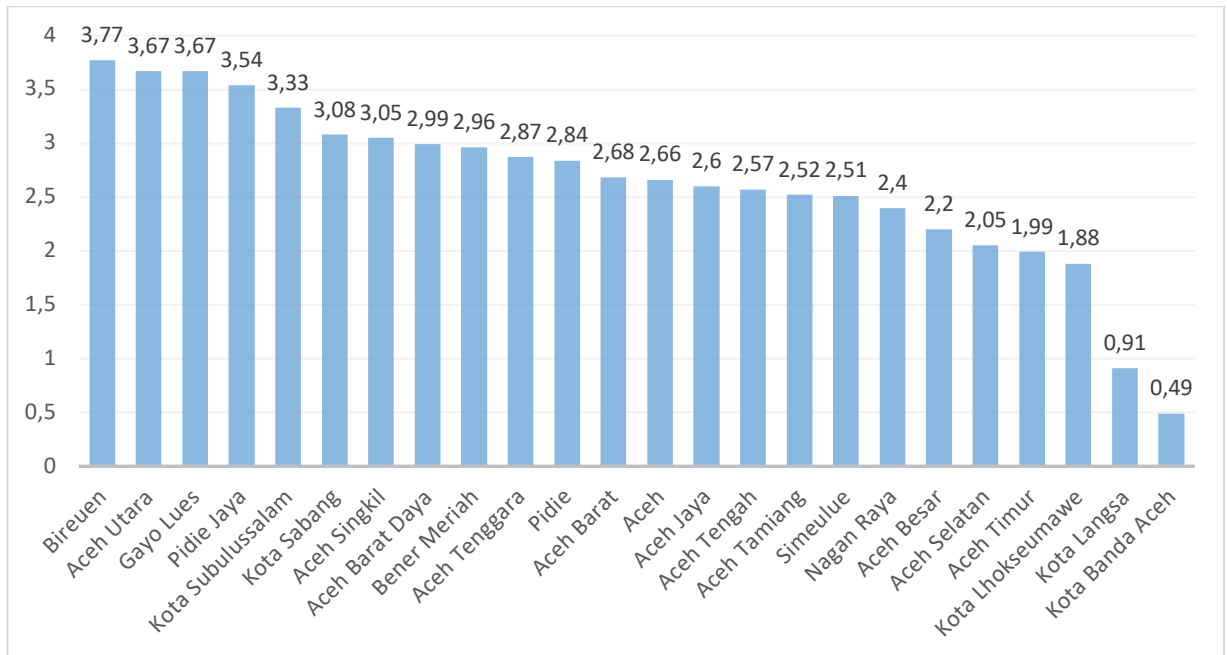


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 22

Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2017 dan 2024

Kab. Aceh Singkil, Kab. Pidie, Kab. Gayo Lues, Kab. Pidie Jaya, dan Kab. Bener Meriah merupakan wilayah sebaran kemiskinan tertinggi di Aceh dengan poin rata-rata diatas 18 persen dan menjadi fokus penurunan angka kemiskinan Aceh. Enam wilayah lainnya, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Utara, Kota Subulussalam, Kab. Aceh barat Daya berada pada rang 15 hingga dibawah 18 persen. Banda Aceh menjadi satu satunya wilayah di Aceh yang memiliki persentase kemiskinan di bawah 10 persen. Dalam hal kinerja penurunan angka kemiskinan dalam 2017 - 2024, Kab. Bireuen menjadi daerah paling perform dalam kurun waktu delapan tahun terakhir dengan kinerja penurunan sebesar 3.77 poin. Wilayah lain yang memiliki kinerja penurunan angka kemiskinan diatas 3 persen adalah Kab. Aceh Utara, Kab. Gayo Lues, Kab. Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Kota Sabang dan Kab. Aceh Singkil. (Lihat Gambar 2.22)



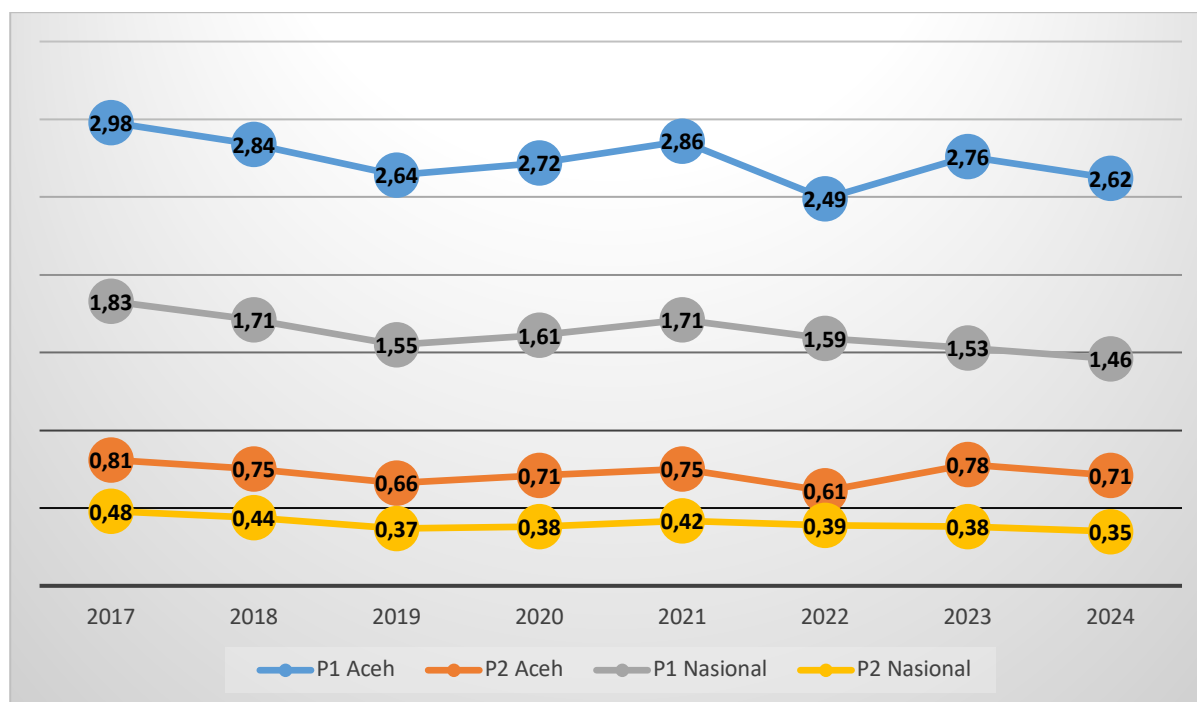
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 23

Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2017-2024

Selain angka kemiskinan, terdapat indikator lain dalam memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Aceh dan Nasional, periode 2017-2024 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Namun pada 2024 baik P1 maupun P2 Aceh mengalami penurunan, sementara P1 dan P2 rata-rata nasional stagnan pada level sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa terdapat progress yang baik pada 2024 dalam hal pengeluaran penduduk miskin Aceh yang cenderung makin mendekati garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Aceh yang juga semakin menyempit. Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya Kemiskinan (P0) Aceh pada periode tahun 2017-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

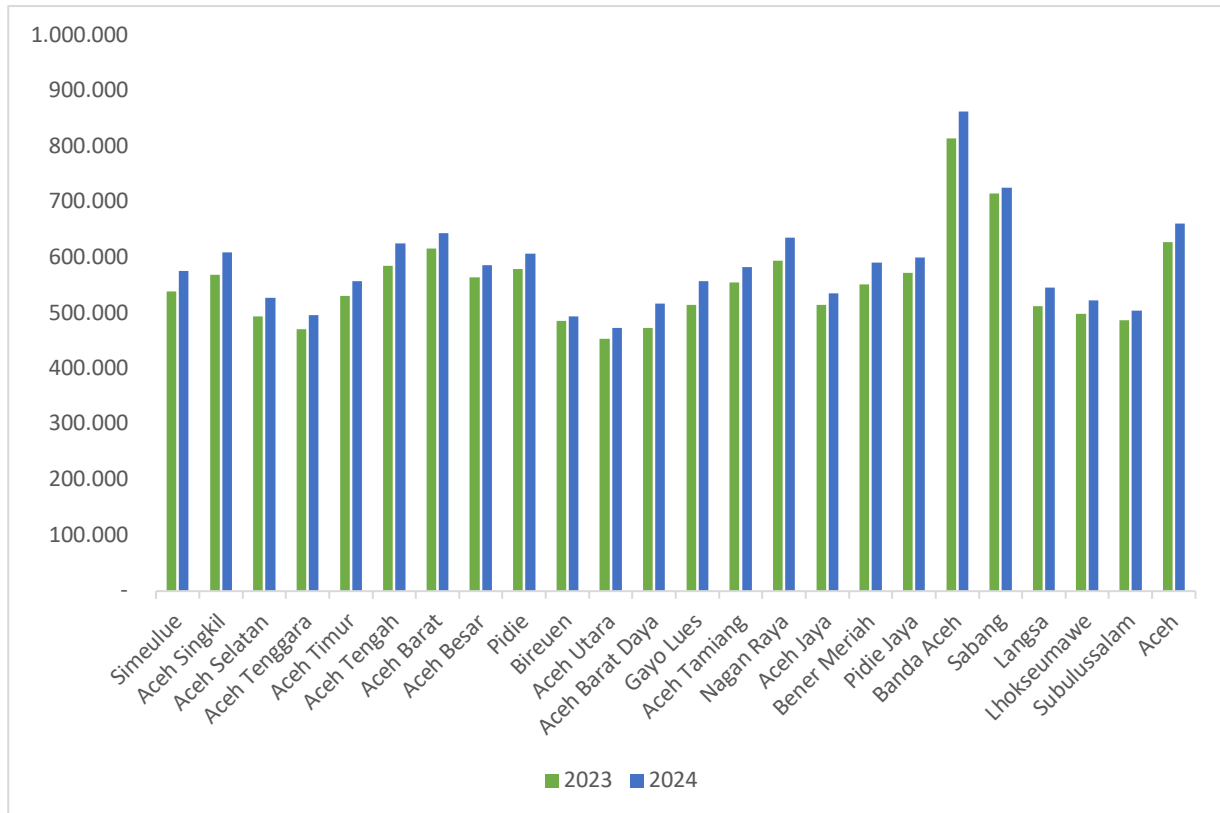


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 24
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh
Tahun 2017-2024

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan angka kemiskinan ialah garis kemiskinan itu sendiri. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis Kemiskinan pada 2024 mengalami perubahan sebesar 5.37 persen jika dibandingkan dengan 2023, yaitu dari Rp. 627.534,- per kapita per bulan menjadi Rp. 661.227,- per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perubahan garis kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan inflasi di masing-masing kabupaten kota, sehingga pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan terutama dalam hal intervensi pengurangan beban penduduk miskin.



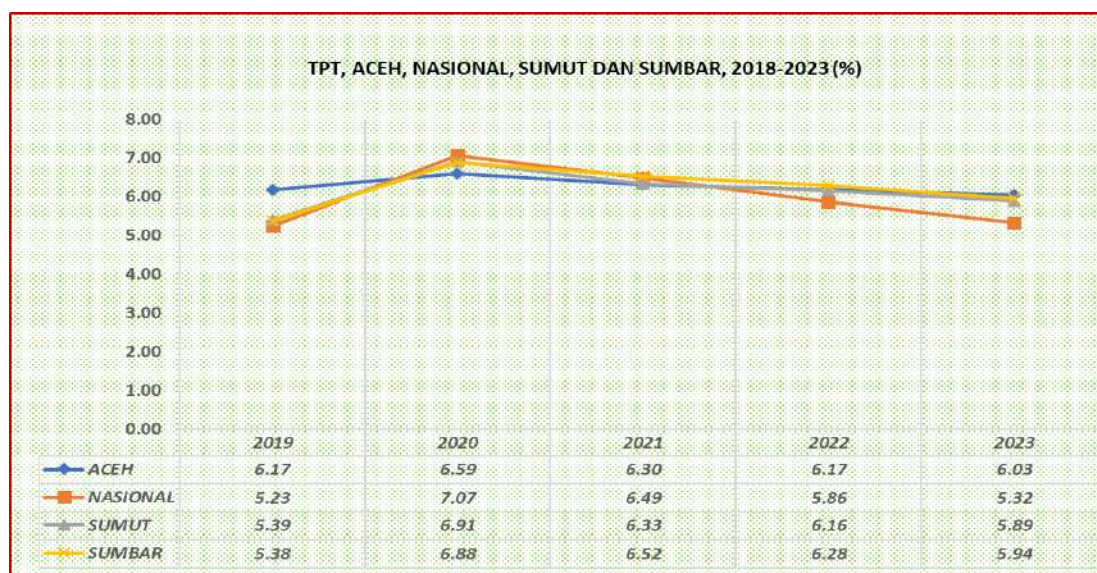
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 25
Garis Kemiskinan Aceh Tahun Tahun 2023-2024

Garis kemiskinan bervariasi antar daerah, hal ini mengindikasikan bahwa standar kemiskinan itu berbeda antar daerah. Kota Banda Aceh merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp. 862.944,-, sementara Kab. Aceh Utara mempunyai garis kemiskinan yang terendah Rp. 473.719,-.

2.1.2.1.7. Pengangguran

Secara umum perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh masih kurang menggembirakan dan bervariasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh tertinggi bila dibandingkan dengan Nasional, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumbar. Pada tahun 2019 TPT Aceh sebesar 6.17 persen sedangkan nasional 5.23 persen, Sumatera Utara 5.38 persen dan Sumatera Barat sebesar 5.39 persen. Pada tahun 2020 TPT semua provinsi dan Nasional mengalami peningkatan karena dampak dari Covid 19 yang melanda Indonesia dan Dunia, sehingga perekonomian tidak berjalan dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada tahun 2021-2023 seiring dengan pemulihan Covid 19, perekonomian kembali bergerak maka TPT kembali terus mengalami penurunan. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh, Nasional, Sumut dan Sumbar secara rinci disajikan pada Gambar 2.26.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2024

Gambar 2. 26

TPT Aceh dibandingkan Nasional, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019-2023

Secara umum perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh menunjukkan tren yang positif terutama pada indikator pengangguran. Meskipun terjadi peningkatan secara jumlah di tahun 2020 akibat covid-19 yang didominasi oleh pekerja formal, namun jumlah tersebut terus menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah pengangguran sebanyak 167 ribu jiwa dan terus menurun menjadi 153 ribu jiwa di tahun 2024. Trend penurunan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur. dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2. 21

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2019-2024

Karakteristik		Tahun (Ribu Orang)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja		3.809	3.881	3.951	4.020	4.021	4.087
a.	Angkatan Kerja	2.405	2.527	2.520	2.553	2.604	2.661
	- Bekerja	2.257	2.360	2.361	2.395	2.447	2.508
	- Pengangguran	148	167	159	158	157	153
b.	Bukan Angkatan Kerja	1.404	1.354	1.431	1.467	1.417	1.426

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMTA kejuruan, dengan persentase mencapai 10,59 persen. Bila dilihat dari perkembangannya persentase tersebut masih berfluktuasi meskipun

kecenderungannya masih cukup tinggi di atas 10 persen. Sedangkan TPT untuk tingkat pendidikan SMA umum cenderung berkurang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat pengangguran penduduk berpendidikan tinggi juga cukup memberi perhatian bagi Aceh secara umum karena masih berada di atas TPT Aceh secara umum. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2. 22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2019-2024

Pendidikan	Tahun								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
≤ SD	3,07	2,32	3,22	2,9	2,57	2,88	2,46	1,8	2,72
SMPT	3,01	4,53	3,42	5,04	4,9	4,76	5,79	3,4	3,96
SMTA Umum	12,96	10,74	9,83	8,5	9,39	8,88	10,1	9,77	7,92
SMTA Kejuruan	14,85	10,95	10,72	10,76	10,87	10,55	7,45	9,56	10,59
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5,79	8,2	5,92	7,45	6,67	7,27	4,3	6,74	5,7
DIPLOMA IV/S1/S2/S3	10,77	8,06	9,3	7,04	8,42	6,53	4,91	6,76	6,22
TPT	7,57	6,57	6,36	6,2	6,59	6,3	6,17	6,03	5,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Distribusi pengangguran pada tahun 2019-2024 menurut kabupaten/kota menunjukkan keadaan yang sama dengan provinsi yang cenderung mengalami penurunan. Lhokseumawe merupakan daerah dengan TPT tertinggi di Aceh dengan persentase sebesar 8,47 persen di tahun 2024. Sedangkan Bener Meriah merupakan daerah dengan TPT terendah yang mencapai 2,2 persen di tahun yang sama. Perkembangan distribusi TPT di kabupaten/kota tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.23 sebagai berikut:

Tabel 2. 23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Aceh Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	5,82	5,47	5,71	6,00	5,85	5,5
Aceh Singkil	8,58	8,24	8,36	6,88	6,84	6,44
Aceh Selatan	6,54	6,54	6,54	4,82	4,73	4,56
Aceh Tenggara	3,45	5,72	6,43	5,09	5,00	4,79
Aceh Timur	7,61	7,26	7,13	8,07	8,03	7,75
Aceh Tengah	2,65	3,05	2,61	4,44	4,42	4,21
Aceh Barat	7,41	7,3	7,09	6,09	6,07	5,58
Aceh Besar	7,67	7,62	7,7	8,28	8,17	7,93
Pidie	6,83	6,45	7,28	5,94	5,92	5,74
Bireuen	3,83	4,12	4,32	4,2	4,14	3,93
Aceh Utara	8,65	8,56	8,31	7,08	7,07	6,88
Aceh Barat Daya	4,29	3,93	4,04	4,12	4,08	3,83
Gayo Lues	1,74	2,01	1,84	2,7	2,65	2,4
Aceh Tamiang	6,04	7,97	5,87	7,38	7,21	6,95

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nagan Raya	5,35	5,11	4,99	5,84	5,74	5,22
Aceh Jaya	4,18	4,08	3,47	3,12	2,88	2,75
Bener Meriah	1,03	1,35	1,24	2,61	2,45	2,2
Pidie Jaya	4,34	6,58	3,57	4,4	4,34	3,82
Banda Aceh	6,89	9,54	8,94	8,62	8,03	7,55
Sabang	4,6	4,81	3,56	4,01	3,92	2,95
Langsa	7,69	9,75	7,21	7,85	7,73	7,34
Lhokseumawe	11,01	11,99	11,16	9,15	8,78	8,47
Subulussalam	7,25	6,93	6,26	5,75	5,69	5,12
Aceh	6,17	6,59	6,3	6,17	6,03	5,75

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang dijalani. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, perkembangan RLS di Aceh relatif merata seperti yang ditunjukkan pada Table 2.24. berikut.

Tabel 2. 24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	9,34	9,48	9,73	9,81	9,89
Aceh Singkil	8,53	8,68	8,69	8,70	8,72
Aceh Selatan	8,87	8,88	8,89	8,91	8,92
Aceh Tenggara	9,66	9,67	9,92	10,09	10,1
Aceh Timur	8,15	8,21	8,32	8,47	8,48
Aceh Tengah	9,85	9,86	9,87	9,89	10,03
Aceh Barat	9,37	9,55	9,87	9,89	9,99
Aceh Besar	10,32	10,33	10,35	10,36	10,37
Pidie	8,99	9,00	9,02	9,03	9,04
Bireuen	9,28	9,29	9,31	9,32	9,59
Aceh Utara	8,63	8,64	8,73	8,85	9,11
Aceh Barat Daya	8,66	8,67	8,68	8,77	8,78
Gayo Lues	8,20	8,40	8,41	8,42	8,44
Aceh Tamiang	8,90	8,91	9,04	9,24	9,3
Nagan Raya	8,68	8,69	8,95	8,96	9,25

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh Jaya	8,70	8,71	8,72	8,74	9,02
Bener Meriah	9,79	10,00	10,01	10,12	10,13
Pidie Jaya	9,33	9,34	9,53	9,58	9,59
Banda Aceh	12,65	12,83	13,03	13,04	13,1
Sabang	11,14	11,18	11,19	11,20	11,22
Langsa	11,11	11,12	11,14	11,27	11,28
Lhokseumawe	10,91	11,11	11,12	11,27	11,31
Subulussalam	7,84	8,03	8,22	8,32	8,43
Aceh	9,33	9,37	9,44	9,55	9,64
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dan lebih baik dibandingkan dengan nasional. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Aceh tahun 2024 adalah 9,64 tahun menunjukkan bahwa secara umum penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sebahagian besar telah mengenyam tingkat pendidikan hingga kelas XII (SMP kelas III) hingga pendidikan tinggi. Kota Banda Aceh memiliki angka RLS paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan Kota Subulussalam, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang terendah capaian angka Rata-rata Lama Sekolah bahkan masih dibawah angka Nasional. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah sulitnya akses menuju sekolah. Pemerintah Aceh berupaya melakukan pemerataan dan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera, namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.25. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah Aceh di awal periode tercatat 9,33 tahun, angka ini di atas rerata nasional dan Sumatera, namun masih lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara dengan angka 9,54. Pada periode akhir yaitu tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 9,64 tahun dan berada di atas rerata nasional dan Sumatera. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, angka tersebut masih relatif lebih rendah dimana Sumatera Utara berada pada angka 10,18 tahun.

Tabel 2. 25

Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2020-2024

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2020	9,33	9,54	8,89	8,48
2021	9,37	9,58	8,93	8,54
2022	9,44	9,71	9,02	8,69
2023	9,55	9,82	9,02	8,77
2024	9,64	10,18	9,54	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Angka rata-rata lama sekolah harus terus ditingkatkan mengingat angka lama sekolah yang berada pada rata-rata 9 tahun mencerminkan bahwa lama sekolah di Aceh masih pada tingkat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama. Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,63 tahun menjadi 14,39 tahun pada tahun 2024, namun demikian HLS Aceh Tahun 2024 masih berada diatas nasional 13,21 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,39 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam Tabel 2.26. dibawah ini.

Tabel 2. 26

Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	13,76	13,9	14,08	14,28	14,53
Aceh Singkil	14,31	14,32	14,34	14,35	14,36
Aceh Selatan	14,42	14,6	14,69	14,7	14,71
Aceh Tenggara	14	14,01	14,26	14,27	14,47
Aceh Timur	13,03	13,04	13,06	13,07	13,08
Aceh Tengah	14,27	14,28	14,61	14,85	15,03
Aceh Barat	14,6	14,61	14,63	14,64	14,93
Aceh Besar	14,72	14,73	14,75	14,76	14,77
Pidie	14,46	14,47	14,49	14,5	14,52
Bireuen	14,83	14,84	14,86	14,87	14,88
Aceh Utara	14,7	14,71	14,73	14,74	14,75

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh Barat Daya	13,58	13,65	13,66	13,67	13,69
Gayo Lues	13,77	13,78	14,08	14,34	14,59
Aceh Tamiang	13,59	13,76	13,96	14,23	14,51
Nagan Raya	14,13	14,14	14,16	14,17	14,18
Aceh Jaya	13,98	13,99	14,01	14,02	14,06
Bener Meriah	13,46	13,47	13,71	13,72	13,73
Pidie Jaya	14,82	14,97	14,98	14,99	15,01
Banda Aceh	17,79	17,8	17,81	17,93	17,94
Sabang	13,95	14,13	14,4	14,68	14,97
Langsa	15,35	15,63	15,64	15,7	15,71
Lhokseumawe	15,2	15,21	15,27	15,54	15,55
Subulussalam	14,61	14,62	14,81	15,06	15,31
Aceh	14,31	14,63	14,37	14,38	14,39
Nasional	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21

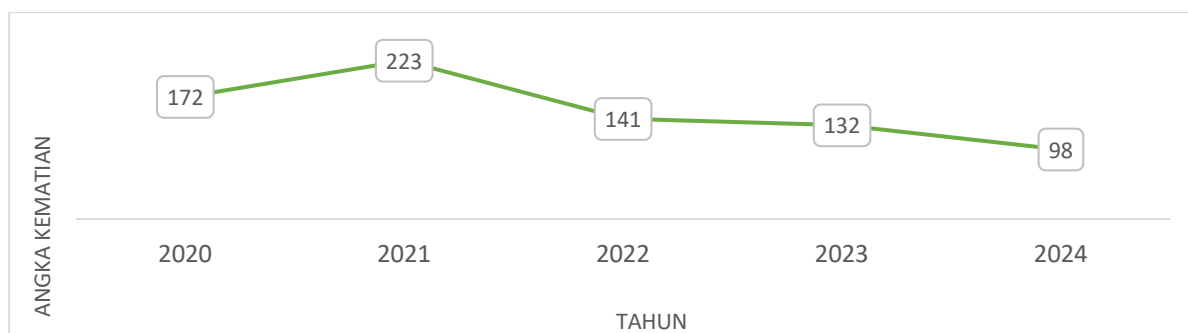
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

2.1.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator kesehatan ibu, sebagai nilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. AKI juga menggambarkan kesehatan ibu, status gizi, kesehatan lingkungan, tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Angka kematian Ibu di Aceh mengalami penurunan dari 223/100.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 98/100.000 kelahiran hidup di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan status gizi dan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat, disamping itu perbaikan layanan kesehatan juga menunjukkan perbaikan.

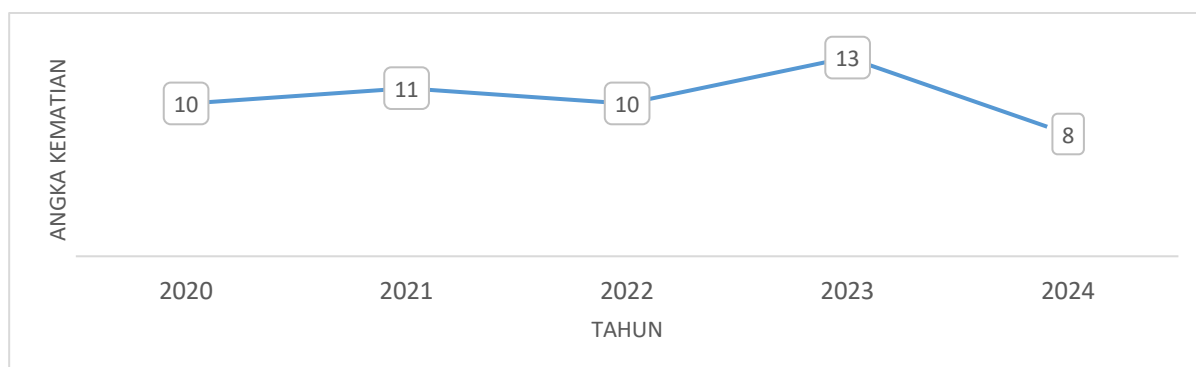


Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Gambar 2. 27
Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

2.1.2.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 -11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan probabilitas bayi meninggal sbelum mencapai usia satu tahun. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan AKB diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil.



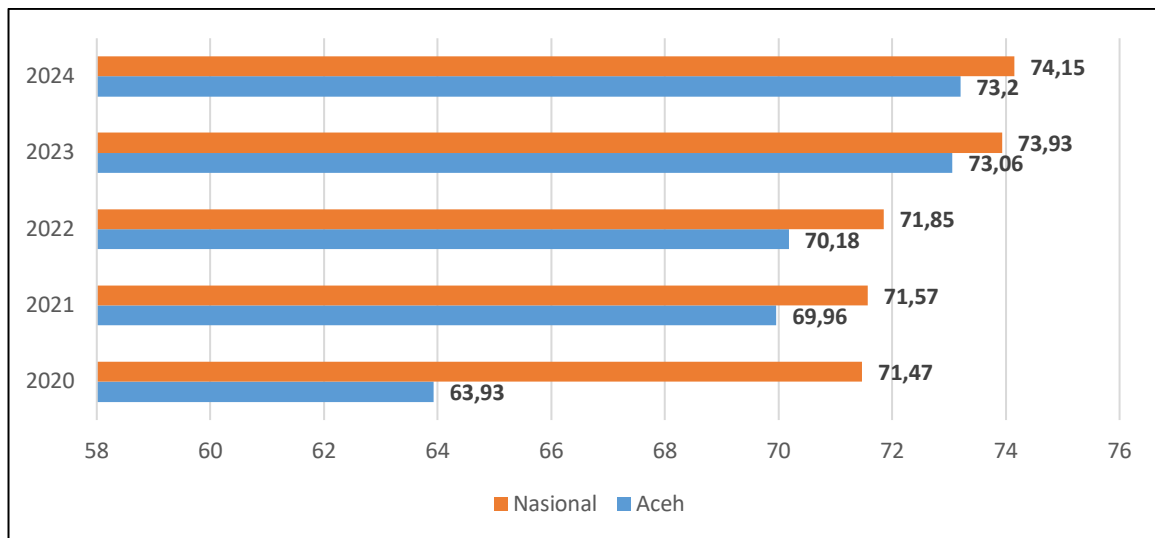
Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Gambar 2. 28
Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

Tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun pada tahun 2023 sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2023 menjadi yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan AKB sangat berkaitan erat dengan perbaikan pelaporan melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDM), sehingga laporan yang diterima lebih konkrit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.2.2.5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir yang diwakili dimensi angka panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Aceh. Secara umum umur harapan hidup penduduk Aceh meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (Aceh 73,20) (Nasional 74,15). Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional, umur harapan hidup Aceh masih berada dibawah angka nasional. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

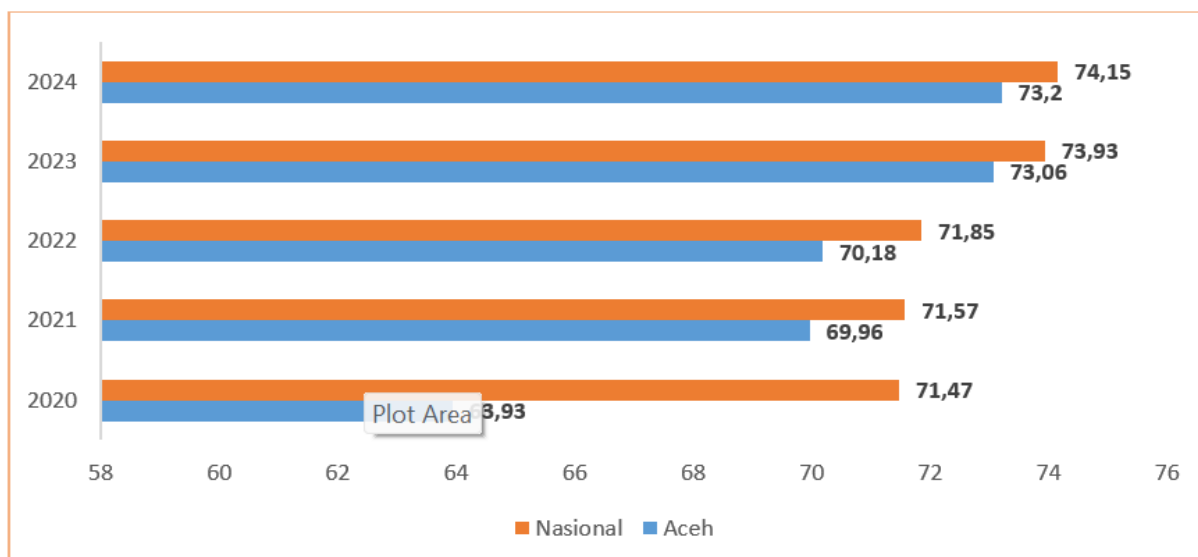


Sumber: BPS 2020-2024 (data diolah)

Gambar 2. 29

Capaian Umur Harapan Hidup Aceh dan Nasional tahun 2020-2024

Jika dilihat usia harapan hidup berdasarkan jenis kelamin, perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Aceh dan Indonesia dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 30
Usia Harapan Hidup di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024

Secara umum umur harapan hidup penduduk Aceh meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (Aceh 73,20) (Nasional 74,15). Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional, umur harapan hidup Aceh masih berada dibawah angka nasional.

2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 IPM Aceh sedikit lebih tinggi dari IPM Nasional. IPM Aceh berada pada angka 75,36 sementara nasional 75,02. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas IPM di kabupaten/kota seperti yang terlihat pada tabel 2.31 dibawah ini.

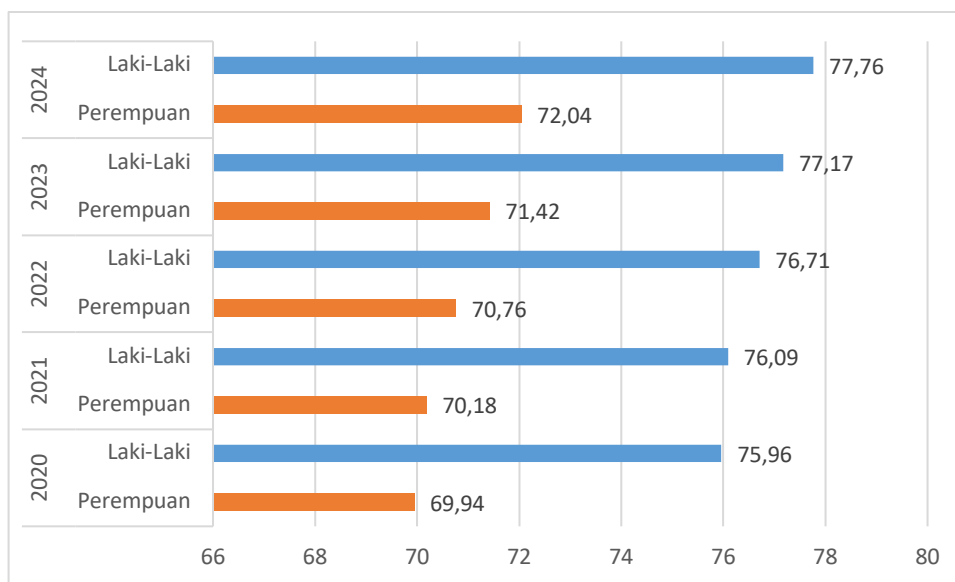
Gambar 2. 31
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	66.03	66.41	67.27	69.98	70,95
2	Aceh singkil	68.94	69.22	69.62	71.14	71,76
3	Aceh Selatan	67.12	67.44	67.87	71.14	71,82
4	Aceh Tenggara	69.37	69.44	70.32	72.93	73,59
5	Aceh Timur	67.63	67.83	68.72	70.73	71,29
6	Aceh Tengah	73.24	73.37	73.95	76.45	77,27
7	Aceh Barat	71.38	71.67	72.34	74.62	75,45
8	Aceh Besar	73.56	73.58	74.00	75.98	76,57
9	Pidie	70.63	70.70	71.20	72.95	73,60

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
10	Bireuen	72.28	72.33	73.16	74.56	75,39
11	Aceh Utara	69.33	69.46	70.22	72.50	73,35
12	Aceh Barat Daya	66.75	66.99	67.41	70.47	71,16
13	Gayo Lues	67.22	67.56	68.25	70.82	71,75
14	Aceh Tamiang	69.24	69.48	70.43	73.02	74,00
15	Nagan Raya	69.18	69.31	70.10	72.15	73,10
16	Aceh Jaya	69.75	69.84	70.36	72.44	73,40
17	Bener Meriah	72.98	73.27	73.90	76.06	76,58
18	Pidie Jaya	73.20	73.60	74.34	76.04	76,39
19	Banda Aceh	85.41	85.71	86.28	88.32	88,85
20	Sabang	75.78	76.11	76.85	78.70	79,50
21	Langsa	77.17	77.44	77.82	80.50	80,96
22	Lhokseumawe	77.31	77.57	78.04	80.26	80,89
23	Subulussalam	64.93	65.27	66.20	69.66	70,64
ACEH		73,29	73,48	74,11	74,70	75,36
NASIONAL		71,92	71,94	72,29	72,91	75,02

Sumber: BPS 2021-2025 (data diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa IPM Aceh diseluruh kabupaten/kota meningkat secara konsisten. IPM tertinggi adalah Kota Banda Aceh yakni mencapai 88.85 sedangkan yang terendah Kota Subulussalam yaitu 70,64.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2025

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, IPM laki-laki secara umum lebih tinggi capaiannya dibandingkan IPM perempuan. Untuk mengetahui apakah

ada ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan, dilakukan perbandingan seperti terlihat pada Gambar 2.32 di atas.

Dari Gambar 2.32. terlihat bahwa walaupun IPM meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM laki-laki dan Perempuan di Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, IPM perempuan Aceh 69,94, sedangkan IPM laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 75,96. Tren yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM perempuan Aceh walaupun lebih baik dari pada IPM perempuan, namun jauh lebih rendah daripada IPM laki-laki. Sampai dengan tahun 2024, IPM perempuan Aceh mencapai 72,04 sedangkan IPM laki-laki mencapai 77,76.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Aceh memiliki berbagai warisan budaya yang berharga, baik berupa warisan budaya benda atau Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda Budaya (WBTB). Nilai-nilai budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan nusantara, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh kemudian baru menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Jejak sejarah dan peradaban inilah yang kemudian mewariskan tradisi, seni dan budaya yang masih ada hingga saat ini dan perlu dijaga kelestariannya untuk generasi yang akan datang.

2.1.2.3.1 Seni dan Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama rencana pembangunan Aceh, kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan, ciri khas dan kebudayaan yang sudah hampir punah atau sudah jarang diketahui masyarakat luas. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan

bencana gempa dan tsunami. Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.138 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda (intangible) yang menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeluedan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman sanggar-sanggar kesenian yang tersebar di seluruh Aceh yang jumlahnya telah mencapai kurang lebih 1.280 sanggar kesenian. Sanggar-sanggar kesenian diupayakan mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 27

Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Provinsi Aceh, 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Group Kesenian	1.279	1.236	1.266	1.254	1.280

Sumber : Disbudpar Aceh, 2024 (diolah)

Selain itu Aceh juga memiliki Gedung kesenian yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk menyelenggarakan pameran. Saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat minim, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaraan festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni. Dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2023 terlihat bahwa festival seni yang dilakukan sangat beragam dengan rata-rata jumlah festival sebanyak 50 festival per tahun, sedangkan pada tahun telah dilaksanakan 2023 sebanyak 60 festival.

Pembangunan sektor kebudayaan di Aceh diarahkan agar dapat memberikan peran penting dan strategis dalam memperkuat nilai-nilai budaya Aceh yang bersifat khas dan unik serta memiliki ragam kebudayaan, baik berupa budaya benda (tangible) maupun budaya bukan benda (intangible). Namun keberagaman dan kekayaan budaya tersebut belum sepenuhnya mampu dioptimalkan baik dalam pendataan, pelestarian, perlindungan pemanfaatan. Selain tujuan untuk edukasi dan kelestarian budaya, kekayaan dan keragaman warisan budaya tersebut seharusnya

dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi sektor pariwisata sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya.

2.1.2.3.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, penataan, dan lain sebagainya. Aceh memiliki sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dll yang belum dilestarikan. Selama tahun 2021 sampai tahun 2023 telah dilakukan pelestarian terhadap 86 situs cagar budaya, 324 buah naskah kuno, 312 keping koin emas dan 56 buah peralatan emas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2023 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya mencapai 1.138 buah.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.28.

Tabel 2. 28
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Makam	Masjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpustakaan	Bangunan/Gedung	Struktur	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
1.	Aceh Selatan	26	1	5	2	-	2	-	5	-	-	-	-	-	10	51
2.	Aceh Tenggara	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
3.	Aceh Timur	35	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	39
4.	Aceh Tengah	4	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	12
5.	Aceh Barat	14	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	25
6.	Aceh Besar	227	21	3	6	-	31	1	9	-	-	-	14	-	10	322
7.	Pidie	34	10	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	53
8.	Aceh Utara	75	1	2	1	2	-	-	4	2	-	-	-	-	-	87
9.	Simeulue	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Aceh Singkil	17	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	28
11.	Bireuen	38	5	3	-	1	-	-	8	-	2	-	-	-	6	63

No.	Kab/Kota	Makam	Masjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpustakaan	Bangunan/Gedung	Struktur	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
12.	Aceh Barat Daya	27	2	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	36
13.	Gayo Lues	20	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	26
14.	Aceh Jaya	50	1	-	-	4	3	-	4	-	3	-	1	-	8	74
15.	Nagan Raya	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
16.	Aceh Tamiang	36	-	1	3	-	-	-	10	-	2	-	-	2	-	54
17.	Bener Meriah	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	Pidie Jaya	78	9	-	-	1	5	-	5	-	-	-	3	-	16	117
19.	Banda Aceh	50	6	6	1	6	-	-	13	-	4	-	-	-	9	95
20.	Sabang	3	2	1	-	-	14	-	82	-	2	-	-	-	-	104
21.	Lhokseumawe	15	1	4	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	25
22.	Langsa	1	-	-	1	1	1	-	13	-	-	-	-	-	-	17
23.	Subulussalam	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
Jumlah		768	73	31	26	15	66	1	166	5	15	0	20	4	72	1.262

Sumber : Disbudpar Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.28, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebanyak 322 situs, Pidie Jaya sebanyak 117, dan Kota Sabang sebanyak 104 Situs. Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebanyak 3 situs.

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang- tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.262 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

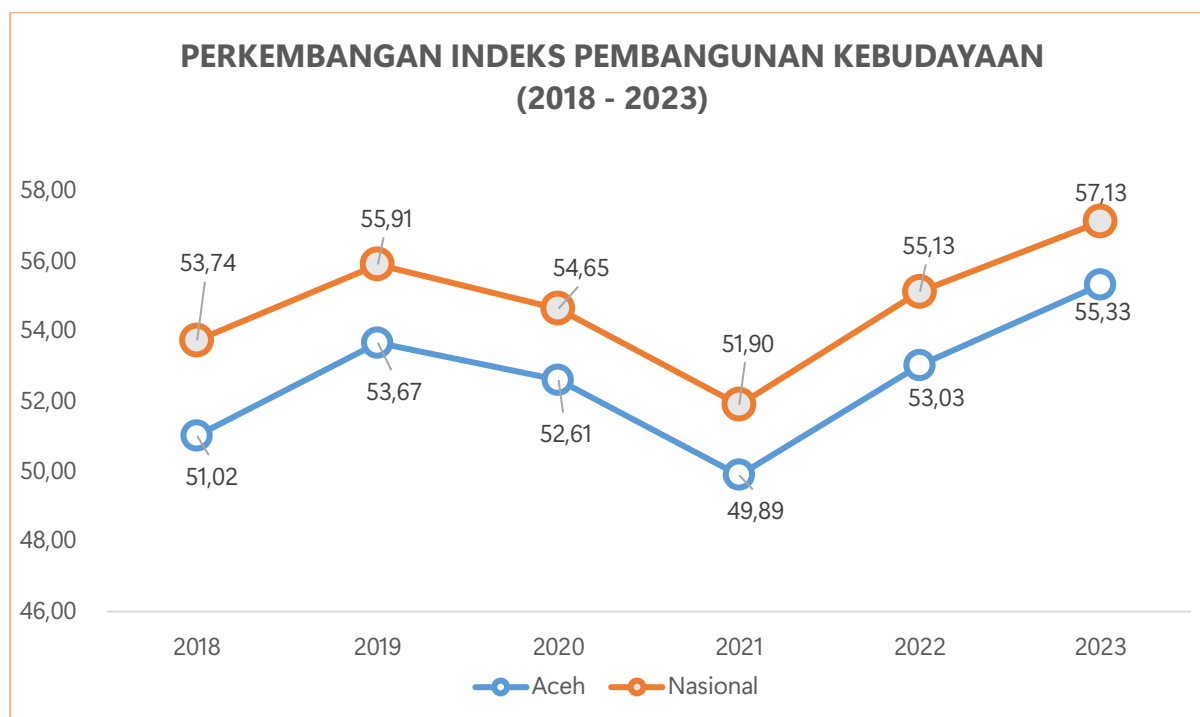
Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperti: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011.

2.1.2.3.3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu indikator yang lebih komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan yang terdiri dari 7 dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi budaya
2. Dimensi Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial
4. Dimensi Warisan Budaya
5. dimensi Ekspresi Budaya
6. Dimensi Budaya Literasi
7. Dimensi Gender

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh sebagaimana grafik berikut.



Sumber : Kemendikbud, 2024

Gambar 2. 33

**Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun
2018-2023 (Data Termutakhir)**

Dari gambar diatas menunjukkan pembangunan kebudayaan Aceh cukup baik, namun dengan potensi yang ada, pembangunan kebudayaan di Aceh dapat dikatakan belum optimal dan masih berada sedikit dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019, hal ini juga terjadi secara nasional akibat dari dampak pembatasan pada pandemi covid-19. Seiring dengan pelonggaran pembatasan dan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, indeks pembangunan kebudayaan Aceh di tahun 2023 kembali meningkat mencapai angka 55,33 sedikit dibawah capaian nasional pada angka 57,13.

Capaian Pembangunan Kebudayaan Aceh paling tinggi dipengaruhi oleh dimensi pendidikan dengan capaian 80,90, kemudian dimensi budaya literasi, ketahanan sosial budaya, gender, warisan budaya, ekspresi budaya dan terakhir yang paling rendah pada dimensi ekonomi budaya dengan capaian 11,79.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A. Syariat Islam

Penguatan penerapan syariat Islam secara holistik merupakan salah satu misi dari Gubernur Aceh tahun 2025. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu keistimewaan provinsi ini dan diatur oleh berbagai qanun (peraturan daerah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan Syariat Islam di Aceh mencakup beberapa aspek penting kehidupan masyarakat, antara lain:

1. **Bidang Hukum:** Penerapan hukum pidana dan perdata yang berbasis syariat, seperti hukum jinayat yang mengatur tindak pidana dalam perspektif Islam. Contoh hukuman yang diterapkan termasuk cambuk untuk pelanggaran tertentu.
2. **Bidang Ekonomi:** Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk keberadaan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Zakat, infaq, dan wakaf juga merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah di Aceh.
3. **Bidang Sosial dan Budaya:** Promosi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan busana Muslim, pemisahan tempat duduk pria dan wanita di tempat umum, serta pengaturan waktu operasional tempat hiburan sesuai dengan waktu ibadah.
4. **Pendidikan Islam:** Penekanan pada pendidikan berbasis Islam di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan juga mencakup pendidikan agama yang mendalam.
5. **Layanan Keagamaan:** Fasilitas dan program yang mendukung pelaksanaan ibadah dan pengembangan spiritual, seperti pembangunan masjid, pelaksanaan haji dan umrah, serta kegiatan keagamaan lainnya.
6. **Pengawasan dan Penegakan Syariat:** Pemerintah Aceh memiliki lembaga pengawas dan penegak syariat, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariah) yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Penerapan Syariat Islam di Aceh bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih taat beragama, menjaga nilai-nilai keislaman, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga. Dari tahun 2020-2024, secara umum kondisi jarimah (kejahatan) meningkat. Pada tahun 2023 jumlah jarimah sebanyak 409 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 516 kasus. Namun, kalau dilihat kasus per kasus terdapat sejumlah jarimah yang menurun, tetapi tidak dapat dipungkiri juga ada yang meningkat. Seperti Khamar, Ikhtilath, zina, pelecehan

seksual, pemerkosaan dan liwath mengalami pengurangan, sedangkan Maisir dan Khalwat mengalami peningkatan. Bahkan kasus Maisir meningkat signifikan, di mana pada tahun 2023 dari 153 kasus Maisir menjadi meningkat sebanyak 247 kasus di tahun 2024, adapun kasus Khalwat dari 4 kasus bertambah menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang dilakukan masyarakat periode tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel 2.29. berikut.

Tabel 2. 29

**Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2020-2024
sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014**

No.	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Khamar	18	18	13	23	17
2	Maisir	65	194	153	95	247
3	Khalwat	7	10	7	4	8
4	Ikhtilath	39	46	25	22	15
5	Zina	49	51	28	38	21
6	Pelecehan Seksual	41	36	55	48	42
7	Pemerkosaan	49	115	136	177	165
8	Liwath	1	2	2	2	0
Jumlah Kasus		269	472	419	409	516

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh melalui Mahkamah Syari'ah Aceh, 2025

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran syariat islam, kerawanan terhadap pemahaman syariat islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat islam di daerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan Da'i Perbatasan di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Jumlah Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil di tahun 2020 sampai dengan 2021 berjumlah 200 orang dan mulai berkurang menjadi 189 orang pada tahun 2022 orang dan 179 orang pada tahun 2023 selanjutnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 sehingga menjadi 170 orang. Secara keseluruhan terjadi pengurangan Da'i sebanyak 30 orang, umumnya disebabkan karena sebagian Da'i telah mencapai batas umur maksimal tenaga kontrak, mengundurkan diri karena telah lulus seleksi PPPK, menjadi Calon anggota DPR Kabupaten/Kota dan menjadi Calon Anggota DPR Aceh pada Pemilu tahun 2024. Berikut jumlah Da'i perbatasan di Aceh. Berikut jumlah Da'i perbatasan di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.30. dibawah ini.

Tabel 2. 30

Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Singkil	26	17	26	17	26	17	21	17	21	17
Subulussalam	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18
Aceh Selatan	0	18	0	18	0	13	0	14	0	13
Aceh Tamiang	24	15	24	15	24	15	24	13	24	12
Aceh Tenggara	38	5	38	5	38	5	36	5	32	5
Simeulue	0	31	0	31	0	27	0	23	0	21
Jumlah	96	104	96	104	96	93	89	90	84	86

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2025. *Ket: **Pbts (Perbatasan), Tpcl (Terpencil)**

B. Pengelolaan Harta Agama (BMA)

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhitung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2025

Gambar 2. 34

Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020-2024

Pendapatan zakat dan infak selama kurun waktu lima tahun terakhir berkisar antara Rp. 80 M hingga Rp. 100 M. Adapun pada tahun 2019-2020 pertumbuhan pendapatan zakat dan infak mengalami perlambatan dipengaruhi oleh kondisi covid-19 yang juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat Aceh. Namun demikian di tahun 2021- 2022 pendapatan zakat dan infak sudah mulai meningkat kembali seiring dengan adanya pemulihan perekonomian diberbagai sektor. Akan tetapi pada tahun 2023 pendapatan zakat dan infak sedikit mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran, yang berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pembangunan fisik, dimana setiap anggaran belanja pembangunan fisik yang bersumber dari APBA akan dipotong sebesar 0.5% untuk pendapatan infak.

Sementara dari sisi penyaluran zakat dan infak pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan, karena selain penerimaan pendapatan juga ditambahkan dengan silpa dari tahun sebelumnya. Kondisi penerimaan dan penyaluran masih masih dapat dioptimalkan melalui perbaikan dari sisi penggalan potensi zakat dan penyalurannya dilakukan secara terpisah tanpa menunggu proses pengesahan APBA.

C. Pelaksanaan Ibadah

Dalam upaya meningkatkan persentase masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasi maka Dinas Syariat Islam menjadikan indikator kinerja dan Dinas Syariat Islam telah melaksanakan beberapa pendekatan antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dan pembinaan takmir masjid melalui para takmir masjid di kabupaten/kota serta

melibatkan Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Aceh. Data masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasinya yang disajikan oleh laporan berbasis aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA) yang telah dilakukan pengembangannya mulai tahun 2018 bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian Aceh. Adapun rincian data masjid berdasarkan tipologi sampai Desember 2024 sebagai berikut. Kondisi jumlah masjid di Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2024 dan yang melaksanakan shalat Jum'at dapat dilihat pada Tabel 2.31. di bawah ini.

Tabel 2. 31
Data Masjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Raya	Mesjid Agung	Mesjid Kecamatan	Mesjid Mukim	Mesjid Gampong
1	Aceh Selatan		1	18	50	260
2	Aceh Tenggara		1	16	51	385
3	Aceh Timur		1	24	66	513
4	Aceh Tengah		1	14	20	295
5	Aceh Barat		1	12	36	322
6	Aceh Besar		1	23	68	604
7	Pidie		1	23	97	730
8	Aceh Utara		1	27	76	852
9	Simeulue		1	10	29	138
10	Aceh Singkil		1	11	16	116
11	Bireuen		1	17	75	609
12	Aceh Barat Daya		1	9	20	152
13	Gayo Lues		1	11	25	136
14	Aceh Jaya		1	9	21	172
15	Nagan Raya		1	10	30	222
16	Aceh Tamiang		1	12	31	213
17	Bener Meriah		1	10	27	232
18	Pidie Jaya		1	8	34	222
19	Banda Aceh	1	1	9	17	90
20	Sabang		1	3	7	18
21	Lhokseumawe		1	4	9	68
22	Langsa		1	5	6	66
23	Subulussalam		1	5	8	82
	Jumlah	1	23	290	819	6497

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2025

2.1.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Untuk mempertahankan adat istiadat dilakukan berbagai kegiatan diantaranya melalui sosialisasi dan pelatihan. Dari tahun 2019-2023 Sekretariat Majelis Adat Aceh telah melakukan pembinaan kepada tokoh-tokoh adat di kabupaten/kota sebanyak 774 orang. Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan pembinaan adat istiadat di beberapa kabupaten/kota diharapkan penyelenggaraan kehidupan adat

istiadat di masyarakat terus membaik. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 32
Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan Meunasib	orang	30	0	30	30	0
2	Sosialisasi Adat Istiadat	orang	0	60	276	0	0
3	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	orang	30	0	30	0	0
4	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	orang	46	46	46	0	0
Total		845	106	106	382	30	0

Sumber : Sekretariat MAA, 2025

Selain melaksanakan pembinaan adat istiadat, dilakukan juga pembinaan dan pengembangan hukum adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya. Pada tahun 2022 telah diselesaikan beberapa sengketa secara adat sebanyak 509 perkara dan tahun 2023 menurun menjadi 129 perkara yang tersebar di semua kabupaten/kota. Tahun 2024 telah diselesaikan beberapa sengketa secara adat sebanyak 589 perkara. Terdapat beberapa permasalahan dimasyarakat yang belum dapat diselesaikan secara adat dikarenakan mengandung unsur tindak pidana.

2.1.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang

sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam yang ditujukan sesuai dengan Tabel 2.33. sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Tipe Dayah						Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe B	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
2020	23	94	168	338	-	513	1.136	22.951
2021	23	94	168	338	-	513	1.136	22.951
2022	23	110	230	499	-	626	1.488	23.551
2023	29	158	362	554	-	582	1685	24.710
2024	29	158	362	554	-	582	1685	24.710

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2025 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.33. diatas terlihat bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2018 setelah melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) dayah dengan kategori tipe A+ dan jumlah ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019, menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah atau berkurang sebanyak 4 (empat) dayah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan dayah tipe mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah.

Mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A+, Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2020, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh masih belum adanya peningkatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum melakukan pendataan ulang/akreditasi terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA). Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah melakukan inisiasi terhadap pembentukan BADA yang akan melaksanakan fungsi akreditasi dayah di Aceh. Dengan terbentuknya BADA, pada tahun 2021 akan dilakukannya pendataan ulang terhadap dayah-dayah di Aceh untuk dapat dilakukan proses Akreditasi. Dayah-dayah yang telah terakreditasi akan ditetapkan dalam database dayah Aceh

untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengembangan dayah di Aceh.

Pada Tahun 2022 jumlah dayah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.488 dayah. Hal ini diputuskan setelah dilaksanakannya kegiatan akreditasi dayah Aceh oleh Tim Badan Akreditasi Dayah. Pada Tahun 2023 jumlah dayah yang terakreditasi terus mengalami peningkatan yaitu 1685 dayah. ada penambahan jumlah dayah yang terakreditasi sekitar 197 dayah (dayah baru yang masuk dalam database), ada sejumlah dayah yang mengalami kenaikan tipe setelah dilakukan Re-akreditasi oleh Tim BADA pada Tahun 2023 artinya terjadi peningkatan terhadap sejumlah dayah setelah dilihat dan divalidasi kembali oleh Tim BADA dengan melihat kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan oleh dayah yang bersangkutan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga sejumlah dayah tersebut layak untuk dinaikkan tipologinya.

Sedangkan pada Tahun 2024 tidak dilakukan akreditasi berhubung, Tim Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA) berakhir kepeguruan di bulan Januari 2024, dan dilakukan kembali seleksi perekrutan Tim MADA di pertengahan Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dayah di Aceh, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah melalui pelaksanaan akreditasi dayah yang akan terus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

2.1.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Peran dan fungsi ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) banyak berpengaruh dalam menetapkan fatwa dalam taushiyah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan Masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) telah mengeluarkan fatwa dan taushiyah serta menetapkan kehalalan suatu produk baik berupa pangan, obat-obatan dan kosmetika melalui penerbitan sertifikat halal. Disamping itu, MPU juga melaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Aceh.

Tabel 2. 34
Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Fatwa dan Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam	Dokumen	13	12	12	20	20
2	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	0	24	48	48	24
3	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	150	213	148	220	192

Sumber : Sekrt. MPU Aceh, 2025

Berdasarkan data Tabel 2.34. dapat diketahui indikator kinerja sekretariat MPU mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah fatwa dan taushiyah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2020 sebanyak 13 dokumen berturut-turut mengalami penambahan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 20 dokumen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh banyak permintaan penetapan fatwa dan taushiyah oleh lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya serta melihat fenomena kekinian terhadap. Jumlah sertifikat Produk halal yang telah diterbitkan terus meningkat dari tahun 2020-2024 dari 150 menjadi 220 sertifikat pada tahun 2023 dan 192 sertifikat pada tahun 2024. Upaya pemerintah untuk terus mendorong pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal melalui sosialisasi, kebijakan pemerintah agar menggunakan produk UMKM lokal yang bersertifikasi halal serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk baik makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di Aceh.

2.1.3.1.5. Perdamaian

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kesinambungan perdamaian diantaranya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi korban konflik dan melakukan rehabilitasi perlindungan sosial korban konflik. Data korban konflik yang mendapat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial mengacu pada data yang ada pada Sistem Informasi Badan Reintegrasi Aceh (SIBRA). Adapun pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan jaminan sosial yang telah dilakukan melalui BRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 35
Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Target	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Orang)	2,514	2,766	3,042	1,050	1,200
2	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik (Orang)	759	835	918	632	686

Sumber : Badan Reintegrasi Aceh, 2025

2.1.3.1.6. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy), pada Tahun 2021 untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama untuk IDI 2020. Akhirnya, pada tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru untuk IDI 2021 mencakup tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain, yaitu: 1. *media review* (analisis isi berita surat kabar) 2. *document review* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah) 3. *Focused Group Discussion* (FGD).

Tabel 2. 36
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020-2023

Aspek	2020	Aspek	Tahun			Kategori
			2021	2022	2023	
Aspek kebebasan sipil	84,49	Aspek Kebebasan	85,50	80,10	85,71	Tinggi
Aspek hak-hak politik	64,94	Aspek Kesetaraan	80,28	84,66	74,47	Tinggi
Aspek lembaga demokrasi	74,91	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,82	77,90	73,12	Sedang
Indeks Demokrasi Indonesia	73,93	Indeks Demokrasi Indonesia	80,92	80,92	77,53	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (Data diolah)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Provinsi Aceh mencapai angka 77,53 dalam skala 0 sampai 100. Klasifikasi tingkat Kinerja demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "Tinggi" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 - 80), dan "rendah" (indeks < 60). Hal ini berarti Indeks demokrasi Provinsi Aceh termasuk dalam kategori "kinerja demokrasi tinggi". Nilai IDI Provinsi Aceh menempati

peringkat 11 Nasional dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2022, 14 provinsi memiliki indeks Demokrasi dengan kategori tinggi (>80) dan 20 provinsi lainnya berada dalam kategori (60-80). Indeks Capaian IDI tinggi IDI Provinsi Aceh tahun 2022 merupakan yang pertama dihitung menggunakan metode baru sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2009 - 2020) Pada tahun 2021. Untuk Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh tahun 2023 sedang dalam tahap pengumpulan data dan penilaian dari Badan Pusat Statistik.

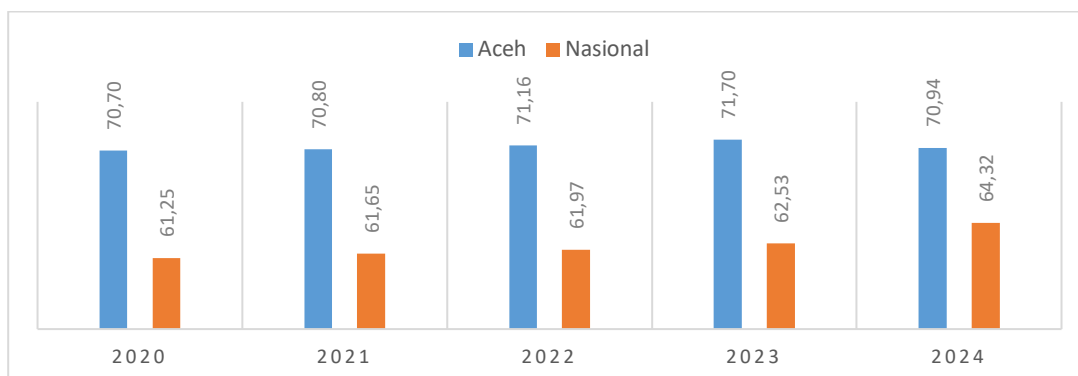
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

A.1. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 tercatat sebesar 71,70 persen. Tetapi di tahun berikutnya telah mengalami penurunan walaupun tidak besar menjadi 70,94 persen dan masih berada di atas angka capaian nasional yang hanya 64,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah masih tinggi walaupun ada hal-hal yang masih harus terus diperbaiki dan dilakukan usaha yang maksimal sehingga di tahun berikutnya tidak mengalami penurunan lagi tetapi meningkat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) berikut ini :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (data diolah)

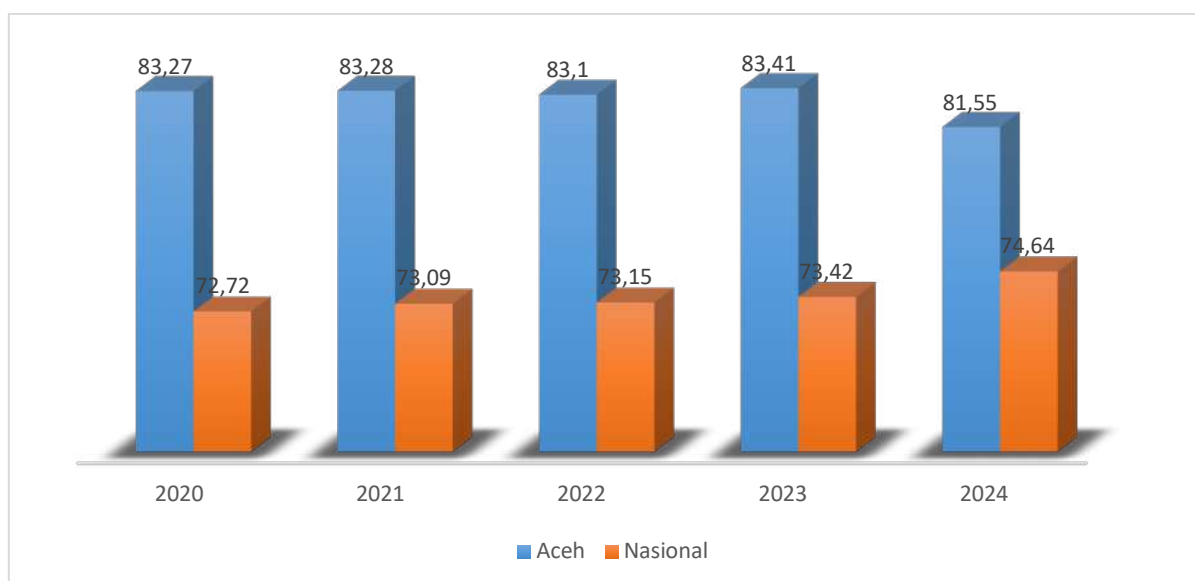
Gambar 2. 35

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa capaian APM Aceh selalu lebih tinggi dari rata-rata capaian APM secara nasional.

A.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. APS provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus berfluktuasi. Tahun 2020 APS Provinsi Aceh adalah sebesar 83,27 persen, mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 83,28 persen tetapi mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 83,1 persen, sedangkan pada Tahun 2023 meningkat kembali dengan capaian APS sebesar 83,41 persen, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 81,55 persen, ini berarti masih terdapat 18,45 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak aktif bersekolah pada tingkat SMA/ sederajat atau tidak bersekolah lagi. Jika dibandingkan secara nasional, dalam kurun waktu Tahun 2020 - 2024, Provinsi Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yang berada dikisaran 74 persen. Perkembangan APS Provinsi Aceh dan nasional usia 16 - 18 tahun terlihat pada Gambar 2.36. berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)

Gambar 2. 36

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia 16-18 Tahun 2020-2024

A.3. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya.

Pentingnya pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan ini untuk memenuhi hak warga negara dalam hal ini anak usia sekolah. Pada level provinsi terdapat sebanyak 29 indikator yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu:

- a. Angka Partisipasi Sekolah;
- b. Kemampuan literasi dan numerasi;
- c. Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- d. Iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas.

Untuk kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi terdapat sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2. 37
Kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,28	56,03	64,96
2	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,06	48,94	65,25
3	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,28	53,27	59,06
4	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,17	47,09	57,89
5	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,95	58,96	65,09
6	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	41,55	44,51	57,24
7	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,14	59,6	68,62
8	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,77	53,29	59,93
9	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,05	57,27	63,21
10	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,78	52,41	57,46

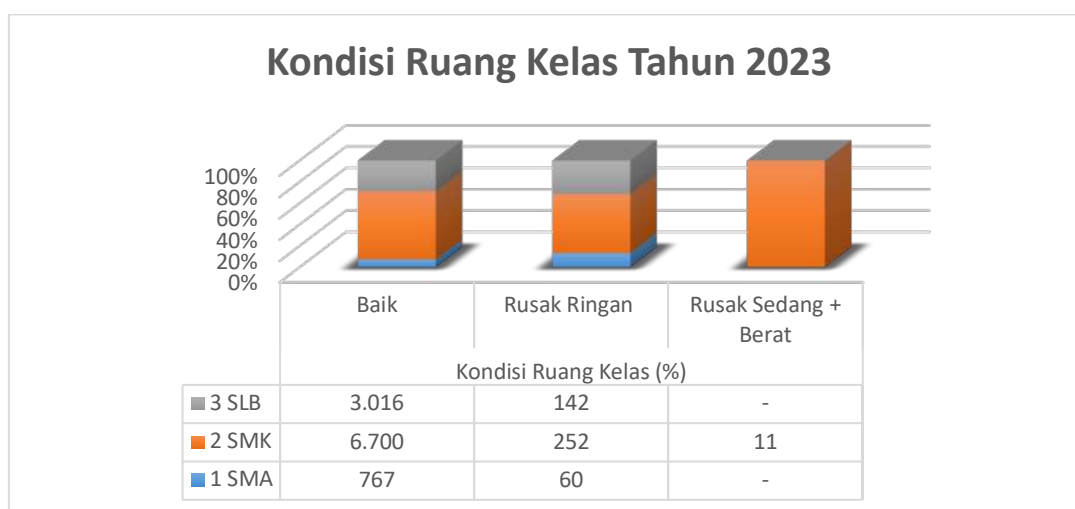
Sumber : Rapor Pendidikan, 2022-2024

Kemampuan Literasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan tabel diatas, capaian literasi dan numerasi untuk masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Kemampuan literasi dan numerasi Jenjang SMA masing lebih baik jika dibandingkan dengan SMK. Secara umum diperlukan upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

A.4. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Data persentase kondisi ruang kelas jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.38. berikut ini.



Gambar 2. 38

Persentase Kondisi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2023

Gambar 2.38 di atas menginformasikan bahwa kondisi ruang kelas sekolah negeri/ swasta tahun 2023 dalam Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini terlihat pada kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kondisi ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/berat dan rusak ringan. Pada tahun 2023, ruang kelas jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB berjumlah 10.948 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 10.483 ruang kelas (95,75%) sedangkan kondisi rusak ringan dan rusak sedang/berat hanya sebesar 4,25 persen atau 465 ruang kelas. Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di provinsi Aceh.

A.5. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Jadi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik dapat diartikan bahwa guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi guru tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.37. berikut ini.

Tabel 2. 37

Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	SMA		SMK		SLB	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Aceh Barat	313	166	253	108	13	23
Aceh Barat Daya	309	129	106	54	11	7
Aceh Besar	683	326	288	166	52	24
Aceh Jaya	176	62	93	51	8	2
Aceh Selatan	557	333	197	115	1	27
Aceh Singkil	205	92	105	73	6	8
Aceh Tamiang	510	268	236	136	30	16
Aceh Tengah	366	128	188	113	65	75
Aceh Tenggara	417	268	161	172	19	11
Aceh Timur	568	228	364	162	10	12
Aceh Utara	998	421	453	283	21	36
Bener Meriah	316	121	142	42	34	34
Bireuen	738	389	340	164	67	42
Gayo Lues	183	110	45	28	13	22
Nagan Raya	298	123	45	56	17	11
Pidie	695	372	247	207	37	19
Pidie Jaya	300	139	132	94	30	11
Simeulue	257	180	85	75	5	3
Kota Banda Aceh	694	271	286	189	63	115
Kota Langsa	241	97	272	95	29	29
Kota Lhokseumawe	300	77	363	117	30	27
Kota Sabang	83	28	38	7	16	3
Kota Subulussalam	169	92	116	61	3	6
Aceh	9.376	4.420	4.555	2.568	580	563
Aceh (%)	68	32	64	36	51	49

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase sertifikasi guru pada jenjang pendidikan SLB yang memiliki guru sudah bersertifikasi paling kecil sebesar 51 persen dan yang belum bersertifikasi sebanyak 49 persen.

B. Kesehatan

B.1. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2021-2022 AKN Aceh mengalami peningkatan, namun tahun 2024 turun menjadi 8 per 1.000 kelahiran.

Tabel 2. 38
Angka Kematian Neonatus Tahun 2020-2024

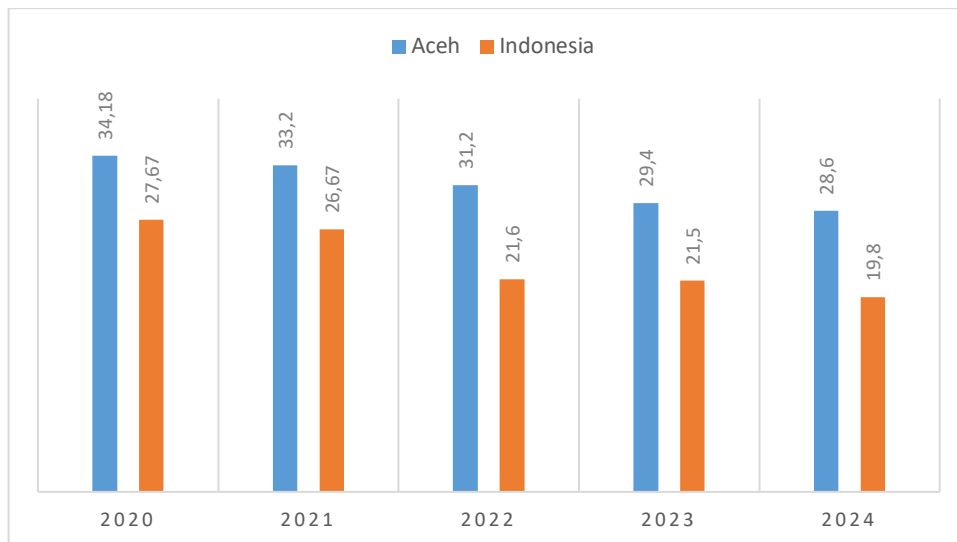
Tahun	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Neonatus (per 1.000 Kelahiran)	8	9	10	9	8

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematian neonatal di Aceh, baik penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh.

B.2. Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 39
Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2020-2024

Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana di tahun 2020 berada pada 34,18 persen dan menurun hingga 28,60 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, prevalensi stunting di Aceh pada tahun 202 hingga 2024 masih berada di atas nasional, dengan selisih antara 7-10 persen.

B.3. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Salah satu indikator untuk menilai kinerja rumah sakit adalah *Bed Occupancy Rate (BOR)*. BOR adalah persentase tempat tidur yang terisi dari sekian kapasitas tempat tidur yang disediakan atau tersedia pada layanan rawat inap. Berdasarkan Data BOR pada Rumah Sakit di Aceh periode tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.40. sebagai berikut.

Gambar 2. 40
***Bed Occupancy Rate (BOR)* Tahun 2020–2024**

Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA)	48,46	52,92	67,46	70,16	67,62
Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	90,14	91,01	94,72	83,08	78,72
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)	23,00	36,00	53,00	51,20	72,4

Sumber : RSUZA, RSJ, RSIA, 2025

Persentase BOR pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) selama periode 2020-2021 belum mencapai kondisi ideal, sedangkan periode 2022-2024 sudah mencapai kondisi ideal dengan nilai BOR tahun 2024 sebesar 67,62 persen. Pada Rumah Sakit Jiwa kondisi ideal sudah dicapai semenjak periode 2020-2024,

sementara pada Rumah Sakit Ibu dan Anak pada tahun 2020-2023 belum mencapai kondisi ideal, namun pada tahun 2024 sudah mencapai kondisi ideal yaitu 72,4%.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.112,07 km (Kepmen PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022) tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.897,91 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/603/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Di Aceh.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.679,91 km.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2. 39

Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.111,39	1.210,51	821,74	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98
2023	1.781,72	1.439,46	95,15	0,86	2.112,07	887,426	1176,975	0,98
2024	1.897,91	1.228,57	304,90	0,81	2.112,07	756,72	1.269,22	0,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2025 dan Satker P2JN Aceh 2025

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan provinsi dalam keadaan mantap, dari 0,79 di tahun 2020 menjadi 0,81 di tahun 2024. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 0,96.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

b. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2. 40
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2019-2024

Tahun	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (Jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2020	2.111,39	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.274.871	223,04
2021	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.333.733	225,53
2022	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.407.855	228,66
2023	2.112,07	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.482.527	231,72
2024	2.112,07	1.897,91	19.679,91	23.689,89	5.554.815	234,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Pada Tabel 2.40, menggambarkan bahwa di Aceh pada tahun 2024, 1 km jalan melayani 234 penduduk. Sementara pada tahun 2020, 1 km jalan melayani 223 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

c. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan

nilai *international roughness index/IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *road condition index/RCI*). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap antara tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 dan 2023 kondisi mantap jalan mengalami peningkatan yaitu 84,41 persen tahun 2022 dan 86,13 persen tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 80,80 persen. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.41.

Tabel 2. 41
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Provinsi	Kondisi				Mantap	
		Baik (B) (km)	% Baik	Sedang (S) (km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	$(4)=(3)/(2)*100$	(5)	$(6)=(5)/(2)*100$	$(7)=(3)/(5)$	$(8)=(7)/(2)*100$
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55
2022	1.781,72	1.391,21	78,08	112,72	6,32	1.503,93	84,41
2023	1.781,72	1.439,46	80,79	95,15	5,34	1.534,61	86,13
2024	1.897,91	1.228,57	64,73	304,90	16,07	1.533,47	80,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2025

Penurunan kondisi mantap jalan provinsi disebabkan karena : adanya penambahan panjang ruas jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 600.1.8/603/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Aceh yang sebelumnya 1.781,72 Km menjadi 1.897,91 Km, dimana kondisi jalan masih banyak dalam kategori rusak berat dan rusak ringan; adanya bencana alam seperti longsor dan banjir yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ruas jalan; dan kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan baik pemeliharaan rutin dan berkala, sehingga kerusakan jalan yang terjadi kurang dapat ditangani dengan optimal.

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di

seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

C.2. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

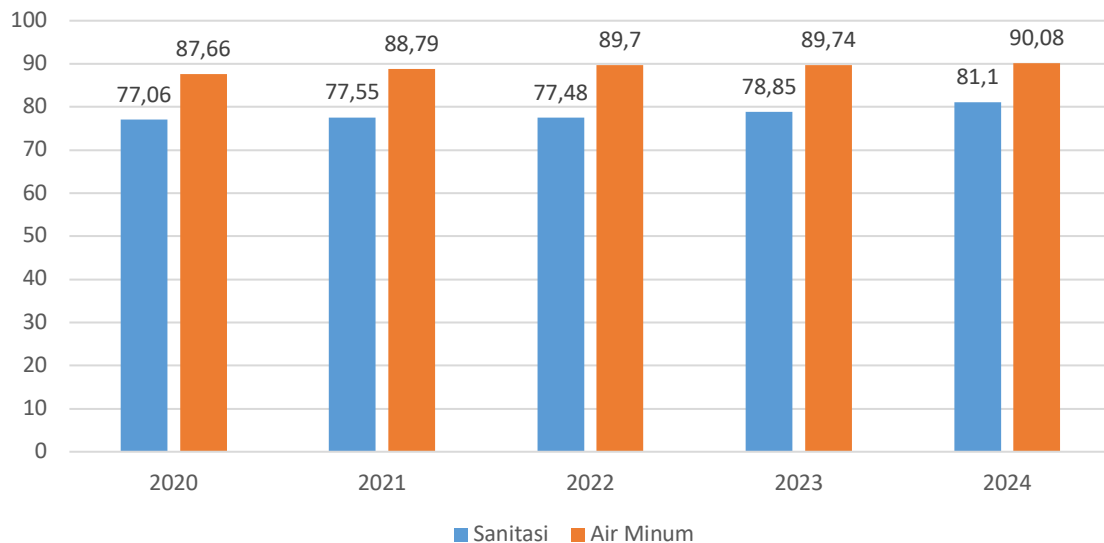
a. *Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi*

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti permukaan sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak Aceh sampai dengan 2024 adalah 90,08 persen, sedangkan capaian nasional adalah 92,64 persen. Dan capaian akses sanitasi layak tahun 2024 adalah 81,10 persen

sedangkan capaian nasional adalah 83,60 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa capaian akses air minum dan sanitasi layak Aceh masih berada dibawah capaian nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.41.
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Aceh 2020-2024

Gambar 2.41 menjelaskan bahwa persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akses sanitasi layak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,04 persen. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024 disajikan pada 2.42.

Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.16. Kota Banda Aceh adalah yang mendominasi tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi dan yang terendah adalah Kota Subulussalam

Tabel 2. 42
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	66,51	71,56	70,21	72,67	76,51
Aceh Singkil	64,22	69,56	78,92	67,93	63,22
Aceh Selatan	68,78	62,55	70,83	74,54	77,96
Aceh Tenggara	54,04	62,71	62,88	65,08	64,01
Aceh Timur	74,65	66,75	69,06	70,01	73,59
Aceh Tengah	81,26	90,58	89,69	92,61	86,34
Aceh Barat	83,45	89,60	88,39	90,16	91,09
Aceh Besar	87,51	87,40	83,49	89,07	90,30
Pidie	63,54	54,10	54,68	60,36	63,88
Bireuen	84,16	81,89	85,39	84,96	88,26
Aceh Utara	75,83	79,97	78,92	77,95	80,63
Aceh Barat Daya	50,27	65,71	65,94	64,69	69,39
Gayo Lues	43,32	47,63	46,33	46,05	49,79
Aceh Tamiang	84,61	87,45	82,74	78,61	85,93
Nagan raya	80,35	74,86	79,97	82,72	87,32
Aceh Jaya	83,27	81,60	78,05	78,83	82,31
Bener Meriah	84,12	86,69	81,56	87,04	88,05
Pidie Jaya	66,39	74,30	73,49	78,07	80,82
Banda Aceh	99,41	99,88	96,88	99,91	99,39
Sabang	89,20	92,25	89,52	93,96	95,90
Langsa	91,57	91,81	91,92	92,92	94,30
Lhokseumawe	88,07	93,10	90,27	90,36	93,71
Subulussalam	73,54	69,71	72,46	63,40	61,57
Aceh	77,06	77,55	77,48	78,85	81,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Tabel 2. 43
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum
Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	79,79	87,45	83,69	83,10	82,79
Aceh Singkil	72,72	78,58	84,37	83,99	79,60
Aceh Selatan	80,44	79,65	77,45	82,44	85,87
Aceh Tenggara	90,92	86,71	93,80	88,04	91,40
Aceh Timur	74,67	83,16	82,85	82,46	84,43
Aceh Tengah	89,38	90,10	97,10	91,02	88,27
Aceh Barat	94,03	94,22	95,49	97,09	96,52
Aceh Besar	88,59	82,36	90,38	92,63	90,68
Pidie	90,35	89,24	89,22	87,60	87,57
Bireuen	91,32	93,53	94,79	92,62	90,06

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh Utara	86,25	91,09	91,25	92,47	94,56
Aceh Barat Daya	93,87	95,34	89,11	92,69	95,12
Gayo Lues	71,76	84,68	86,19	79,64	80,93
Aceh Tamiang	78,73	83,12	83,82	87,50	89,02
Nagan Raya	93,32	90,13	90,49	93,28	90,75
Aceh Jaya	89,89	86,36	83,10	87,87	87,15
Bener Meriah	89,50	89,71	88,48	85,16	84,98
Pidie Jaya	93,18	93,46	90,38	90,26	94,54
Banda Aceh	98,85	99,37	95,66	98,63	99,05
Sabang	97,04	96,18	92,55	92,67	89,92
Langsa	99,13	97,14	98,46	99,11	98,06
Lhokseumawe	93,92	94,44	98,69	98,31	97,41
Subulussalam	64,28	60,87	56,02	55,58	57,25
Aceh	87,66	88,79	89,70	89,74	90,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

C.3. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

a. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2. 44

Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	2.938.579,68	Jumlah	2.949.506,83

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.45 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP

Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2. 45
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan (%)	12,19	83,13	14,61	46,87	46,86
Luasan RTH (Ha)	1.013,70	78.527,13	1.211,76	9.928,85	19.432,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, (SIPSN KLHK 2024)

C.4. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari - hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

a. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota.

1) Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2. 46
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Total			
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622	Ha	13	DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468	Ha	47	DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428	Ha	1.439	DI
Total		28.541	361.977	390.518	Ha	1.499	DI

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencakup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencakup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencakup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencakup 30 D.I. Irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha sebagaimana disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2. 47
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		13	108.622	47	78.468	1.439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.48. menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2. 48
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pidie	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		13	108,622	47	78,468	1,439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.49 dan Tabel 2.50.

Tabel 2. 49
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

2025										
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Km)	Kondisi Saluran					
		Baku (Ha)	Fungsional (Ha)		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
					(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	Pusat	101.622	67.689	1.189,46	813,11	68,36	349,70	29,40	26,65	2,24
2	Provinsi	65.409	23.254	537,34	420,46	78,25	41,75	7,77	75,13	13,98
3	Kab/Kota	196.261	68.941	2.668,97	1.344,62	50,38	689,92	25,85	634,41	23,77

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2025

Tabel 2. 50
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

2023								
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku (Ha)	Fungsional (Ha)		Baik		Rusak	
					(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
1	Pusat	10.622	67.689	1.011	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65.409	23.254	1.117	928	83,08	189	16,92
3	Kab/Kota	196.261	68.941	10.234	5.023	49,08	5.211	50,92

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025

Tabel 2.49 dan Tabel 2.50 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data tahun 2025, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.668,97 km, jumlah bangunan sebanyak 10.234 unit dan luas layanan fungsional 68.941 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.189,46 km, jumlah

bangunan 1011 unit dengan luas layanan fungsional 67.689 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2025, memiliki panjang jaringan 537,34 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 23.254 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2025 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 78.25 %, dalam kondisi rusak sedang 7.77 % dan dalam kondisi rusak berat 13.98 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

2) *Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik*

Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik memiliki Indikator untuk mengukur kinerja suatu Daerah Irigasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik. Melalui serangkaian kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik mencapai 72,98 persen. Angka capaian ini melampaui angka yang ditargetkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 - 2026 yang sebesar 72,65 persen dengan persentase capaian mencapai 100,45 persen. Perkembangan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 di sajikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2. 51

Hasil Capaian Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024

Keterangan	Satuan	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	67,37	71,16	74,20	78,79	79,55	82,56	71,21	72,98

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2024

Hasil Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2017-2024 menargetkan luas lahan budidaya seluas 65.409 Ha dengan hasil luas lahan fungsional seluas 38.462 Ha. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan satu peta yang merupakan target pemerintah untuk memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Maka dari hasil pemetaan Informasi Geospasial Tematik (IGT), dihasilkan luas lahan budidaya yang ditargetkan di tahun 2024 masih

digunakan luasan 38.462 Ha dengan realisasi luasan lahan fungsional mencapai 23.254 Ha. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi terhadap Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik.

b. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

c. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada tahun 2024 adalah sepanjang 226.53 Km. Berdasarkan Tabel 2.50, total panjang pantai kritis pada tahun 2017 adalah sepanjang 233,94 km, dimana 16,54 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 226,53 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 7,41 km selama rentang waktu 2017 hingga 2024. Pada tahun 2024 total pantai yang masih kritis terbesar masih berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 17 persen. Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2024 diperkirakan sepanjang 226,53 km. Panjang Pantai dalam kondisi kritis tahun 2017-2024 disajikan dalam Table 2.52.

Tabel 2. 52
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sabang	3,57	3,57	3,57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	5,86	5,86	5,86	5.86	5.86
3	Aceh Besar	38.52	38.52	38.52	38.52	38.52
4	Aceh Jaya	33.22	33.22	32.98	32.98	32.98
5	Aceh Barat	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
6	Nagan Raya	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	Aceh Barat Daya	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70
8	Aceh Selatan	17.84	17.56	17.56	16.83	16.83
9	Aceh Singkil	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
10	Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.83
12	Bireuen	3.20	3.20	3.20	2.35	2.35
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.22	15.22	15.07	14.89	14.89
15	Aceh Timur	8.42	8.42	8.42	8.42	8.11
16	Langsa	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
17	Simeulue	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54
Jumlah		229.38	229.10	228.71	226.95	226.62

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2024

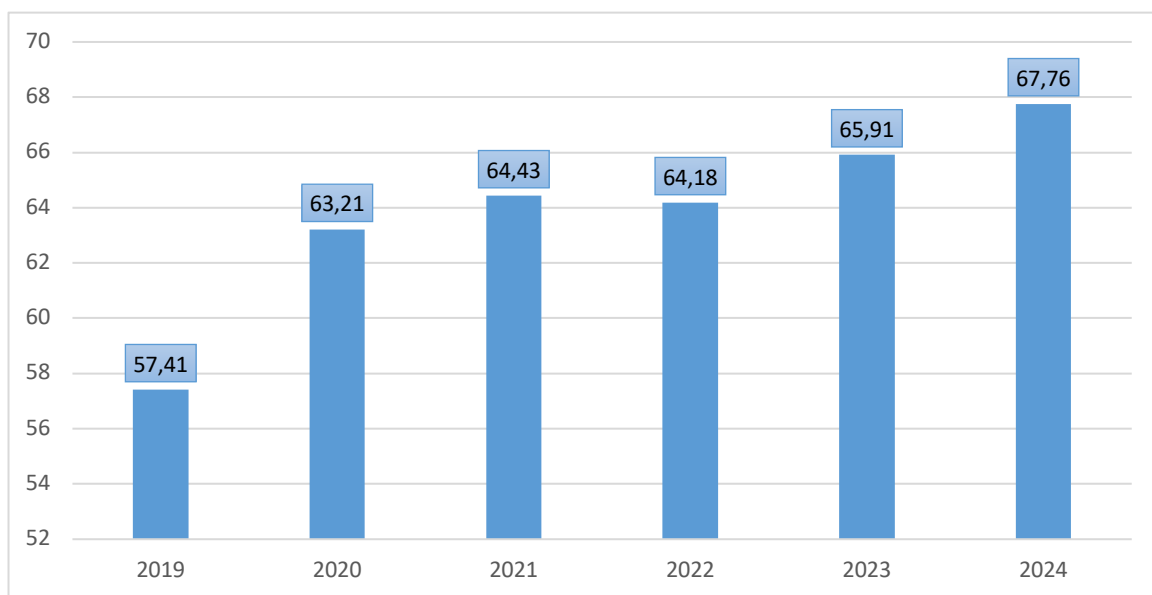
d. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh- Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla-Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas-Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom-Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase-Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang-Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2. 42
Pembagian Wilayah Sungai Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi, 2025

Gambar 2. 43
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2020 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 6646,01 ha. Total luasan ini mengalami peningkatan menjadi 6141,62 ha pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 luas kawasan kumuh meningkat lagi menjadi 7315,46 ha, pada tahun 2023

kembali meningkat menjadi 7526,51 ha. Sehingga Total Luasan kawasan kumuh Aceh di awal Tahun 2024 adalah sebesar 7627,54 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (awal) dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Dalam hal infrastruktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah - langkah signifikan sebagai berikut.

- 1) Mengubah infrastruktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi sarana umum sehingga ramah disabilitas dan ramah lingkungan;
- 2) Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para penyandang disabilitas.

Tabel 2. 53

Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/ Walikota 2020		SK Bupati/ Walikota 2021		SK Bupati/Walikota a 2022		SK Bupati/ Walikota 2023		SK Bupati/ Walikota 2024	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh	473	6646,01	547	6141,62	613	7315,46	669	7526,51	582	7627,545
Banda Aceh	20	451,40	26	451,4	26	451,4	26	451,4	26	451,4
Aceh Barat	12	152,29	12	152,29	9	194,67	9	194,67	9	185,35
Sabang	4	123,71	4	123,713	4	123,71	16	100,277	16	100,277
Aceh Besar	7	185,37	13	152,28	13	152,28	13	152,28	13	152,28
Langsa	18	359,40	18	359,40	18	359,40	56	359,40	56	359,40
Simeulue	1	29,55	1	29,55	1	29,55	1	29,55	1	29,55
Aceh Tamiang	41	348,12	41	348,12	34	307,55	34	307,55	34	307,55
Aceh Timur	20	538,85	20	538,85	20	538,85	20	538,85	20	538,85
Bireuen	29	1031,72	38	588,90	38	588,90	38	588,90	38	588,90
Aceh Tenggara	52	563,89	51	284,35	51	284,35	51	284,35	51	284,35
Bener Meriah	10	337,25	10	337,25	12	87,05	12	87,05	12	87,05
Aceh Utara	7	62,97	7	62,97	7	62,97	13	297,45	13	297,45
Aceh Singkil	9	108,86	9	108,86	9	108,86	9	108,86	9	108,86
Aceh Barat Daya	33	832,51	33	832,51	33	832,51	33	832,51	33	832,51
Nagan Raya	43	108,33	43	108,33	43	108,33	43	108,33	34	260,93
Gayo Lues	30	69,34	30	69,34	30	69,34	30	69,34	30	69,34
Pidie Jaya	12	206,10	66	457,16	66	457,16	66	457,16	42	1015,43
Lhokseumawe	17	78,10	17	78,1	17	78,1	17	78,1	17	78,1
Subulussalam	12	320,17	12	320,17	12	320,17	12	320,17	12	320,17
Aceh Tengah	14	187,39	14	187,39	14	187,39	14	187,39	6	161,61
Pidie	66	294,30	66	294,3	66	294,3	66	294,3	66	294,3
Aceh Selatan	8	120,10	8	120,1	82	1542,33	82	1542,33	36	967,6
Aceh Jaya	8	136,29	8	136,29	8	136,29	8	136,29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2024

D. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

D.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK Kemenkumham Oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tabel 2. 54

Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM dan Yayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2020-2024

No.	Ormas/LSM/Yayasan/ Perkumpulan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	10	n.a.	7	31	29
2	Yayasan/Perkumpulan	119	42	39	12	11
Jumlah		51	129	42	46	43

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2025

Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2024 dengan target penyelesaian Surat Tanda Lapor untuk Yayasan/ Perkumpulan dan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas/LSM.

Proses verifikasi berkas permohonan (Proposal) selambat-lambatnya terhitung 3 hari kerja akan di keluar surat Tanda Lapor, sedangkan Ormas/LSM proses penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) pada web ULA Kemendagri membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan terverifikasi lengkap untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Politik Pemerintahan Umum yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada Tahun 2024 sebanyak 29 Ormas/LSM yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Sementara Yayasan/Perkumpulan yang melaporkan keberadaan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 45 Yayasan/Perkumpulan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Surat Tanda Lapor.

D.2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2019-2023 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan diterima Partai Politik setiap tahunnya dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu sebelumnya.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2022 diberikan dalam 1 tahap dan mendapat kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) menjadi Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dihitung berdasarkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Periode 2019-2024. Hak Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan diatur sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang berbunyi "Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

E. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan. Dalam menunjang urusan kesejahteraan sosial diperlukan dukungan sumber daya manusia

Kesejahteraan Sosial memiliki kompetensi yang tersertifikasi, potensi sumber kesejahteraan sosial Lembaga yang terakreditasi, perorangan yang tersertifikasi dan pilar-pilar sosial lainnya.

Proses pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi, sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pelayanan sosial milik pemerintah provinsi serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik masyarakat yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Aceh, serta penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

E.1. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti membutuhkan peningkatan sarana seiring dengan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Ketersediaan sarana prasarana sosial guna optimalisasi pelayanan sosial yang menjamin pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di dalam panti. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 6 (enam) unit dalam kondisi baik 1 (satu) unit dalam kondisi kurang baik. Panti pelayanan sosial merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2. 55

Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2024

No.	Nama Panti	Jenis PPKS yang dilayani	Daya Tampung	Jumlah Tertampung	Jenis Pelayanan PPKS	Tempat Kedudukan
1.	Panti Sosial Anak Jroh Naguna	Anak Putus Sekolah	50 Orang	55 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung-Kota Banda Aceh
2.	Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang	Lanjut Usia Terlantar	70 Orang	67 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Ulee Kareng-Kota Banda Aceh
3.	Panti Sosial Disabilitas Meujroh Meukarya	Disabilitas	60 Orang	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong-Kab. Aceh Besar

No.	Nama Panti	Jenis PPKS yang dilayani	Daya Tampung	Jumlah Tertampung	Jenis Pelayanan PPKS	Tempat Kedudukan
4.	Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe	Anak Terlantar	70 Orang	56 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Geu Gajah-Kab. Aceh Besar
5.	Panti Sosial Tuna Sosial	Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	30 Orang	91 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong-Kab. Aceh Besar
6.	Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	30 Orang	0 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung-Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Sarana sosial lainnya dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, maka perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sebagai fungsi edukasi dan destinasi pada Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Gampong Ateuk, Kecamatan Peuniti, Kota Banda Aceh, berikut Pahlawan Nasional yang berasal dari Provinsi Aceh, dapat dilihat pada Tabel 2.56. dibawah ini.

Tabel 2. 56
Pahlawan Nasional dari Provinsi Aceh

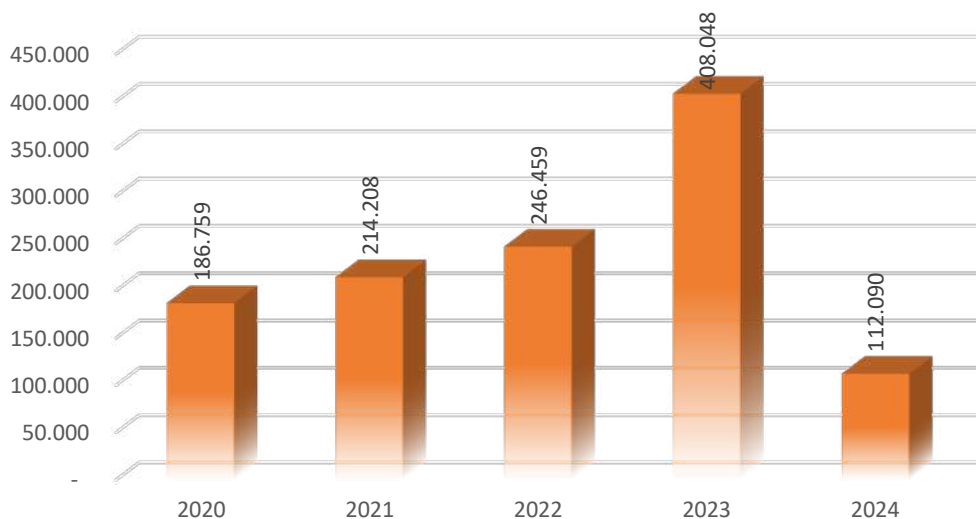
No	Nama Pahlawan Nasional	Kelahiran		Wafat	Alamat Makam	SK Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional
		Tempat	Tanggal Lahir			
1.	Sultan Iskandar Muda	Bandar Aceh Darussalam	1593	27 Desember 1636 (Umur 43 Tahun) di Bandar Aceh Darussalam.	Komplek Kandang Meuh, Kelurahan Peniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.	077/TK/Tahun 1993 Tanggal 14 September 1993.
2.	Laksamana Malahayati	Aceh Besar, Kesultanan Aceh	1 Januari 1550	30 Juni 1615 (umur 65 Tahun) di Aceh Besar.	Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.	115/TK/Tahun 2017 Tanggal 6 November 2017.
3.	Teuku Chik Ditiro	Tiro, Pidie, Kesultanan Aceh Darussalam	1 Januari 1836	31 Januari 1891 (Umur 55 Tahun) di Aneuk Galong.	Jl. Makam Pahlawan Nasional Tgk. Chik Ditiro Mureu lamglumpang Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.	087/TK/Tahun 1973 Tanggal 6 November 1973.
4.	Cut Nyak Dhien	Lampadang, Kesultanan Aceh	12 Mei 1848	06 November 1908 (Umur 60 Tahun) di Sumedang.	Jalan Gunung Puyuh No. 1 Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat.	106/TK/Tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964.
5.	Teuku Umar	Meulaboh, Kesultanan Aceh Darussalam	1854	11 Februari 1899 (Umur 44-45 tahun) di Meulaboh.	Gle Raya Tameh Uteun Mugo, Gampong, Mugo Rayeuk, Kec. Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat.	087/TK/1973 tanggal 6 November 1973.
6.	Cut Nyak Mutia	Keureutoe, Pirak, Aceh Utara	15 Februari 1870	24 Oktober 1910 (Umur 40 Tahun) di Alue Kurieng.	Makam ini terletak di Hutan, Kec. Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.	107/TK/1964 Tanggal 2 Mei 1964.
7.	Teuku Nyak Arif	Ulee Lheue, Banda Aceh	17 Juli 1899	04 Mei 1946 (Umur 46 Tahun) di Takengon Kabupaten Aceh Tengah.	Makam Bak Trieng, Kec. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.	071/TK/1974.

No	Nama Pahlawan Nasional	Kelahiran		Wafat	Alamat Makam	SK Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional
		Tempat	Tanggal Lahir			
8.	Teuku Muhammad Hasan	Sigli	04 April 1906	21 September 1997 (Umur 91 Tahun) di Jakarta.	Jl. Raya Kalibata No.14, RT.14/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta.	085/TK/2006 tertanggal 3 November 2006.

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

E.2. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Aceh merupakan daerah dengan sejarah panjang dalam menghadapi tantangan permasalahan sosial dan ekonomi semenjak masa perjuangan kemerdekaan. Meskipun telah mengalami kemajuan dalam penanganan beragam permasalahan sosial seperti Penyelesaian Konflik dan penanganan Tsunami, namun eskalasi permasalahan terus terjadi. Hal ini disebabkan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, akses layanan dan kesehatan dan Pendidikan yang belum merata dan dampak dari bencana alam.



Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Gambar 2.44.
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.44. dapat dilihat bahwa Pemerintah Aceh berupaya melaksanakan optimalisasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan Dinas Sosial Aceh selama 5 tahun terakhir yaitu periode tahun 2020-2024 sebanyak 1.167.564 jiwa.

E.3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan konkrit dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disekitarnya. Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan upaya dalam mendorong percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Aceh periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna (Lembaga)	1.376	1.413	1.462	1.542	1542
2	Organisasi Sosia (Lembaga)	57	60	60	65	65
3	LKS Panti (Lembaga)	166	164	158	143	143
4	PSM (Orang)	1.252	1.295	1.302	1.349	1.349
5	TKSK (Orang)	289	289	289	290	274
6	LK3 (Lembaga)	27	27	27	26	26
7	Dunia Usaha (Lembaga)	13	13	15	18	18
8	Tagana (Orang)	772	759	873	757	768
9	Kader Perempuan (Orang)	23	23	23	23	23
10	Pendamping Sosial (PKH & Rehsos) (Orang)	1.246	1.246	1.248	1.251	1.148
11	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) (Lembaga)	364	371	385	453	441
	Jumlah	5.562	5.637	5.819	5.894	4.649

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan melalui pelaksanaan bimbingan pemantapan dan sertifikasi, sedangkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Akreditasi. Apresiasi dalam bentuk penghargaan perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi kepada para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan menambah minat dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

2.1.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan

meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Aceh. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Aceh secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

A.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 63,50 persen, turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 81,06 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,15 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,21 persen poin.

Tabel 2. 58

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019—Agustus 2024

Karakteristik	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	3.734.614	3.881.102	3.951.368	4.019.977	4.021.068	4.087.000
a. Angkatan Kerja	2.366.320	2.526.505	2.520.157	2.552.562	2.604.452	2.661.000
- Bekerja	2.219.698	2.359.905	2.361.300	2.394.994	2.447.354	2.508.000
- Pengangguran	146.622	166.600	158.857	157.568	157.107	153.000
b. Bukan Angkatan Kerja	1.368.294	1.354.597	1.431.211	1.467.415	1.416.616	1.426.000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,13	65,10	65,14	64,15	64,77	65,11
Laki-laki	80,79	81,47	79,4	81,06	80,57	80,68
Perempuan	45,68	48,94	48,36	46,15	49,05	49,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. Tabel 2.14 mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2019 hingga 2023. Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2019 hingga 2024 berfluktuatif dan pada tahun 2024 kembali meningkat bila dibandingkan pada tahun 2022 dan 2023. TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 65,14 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,19 persen.

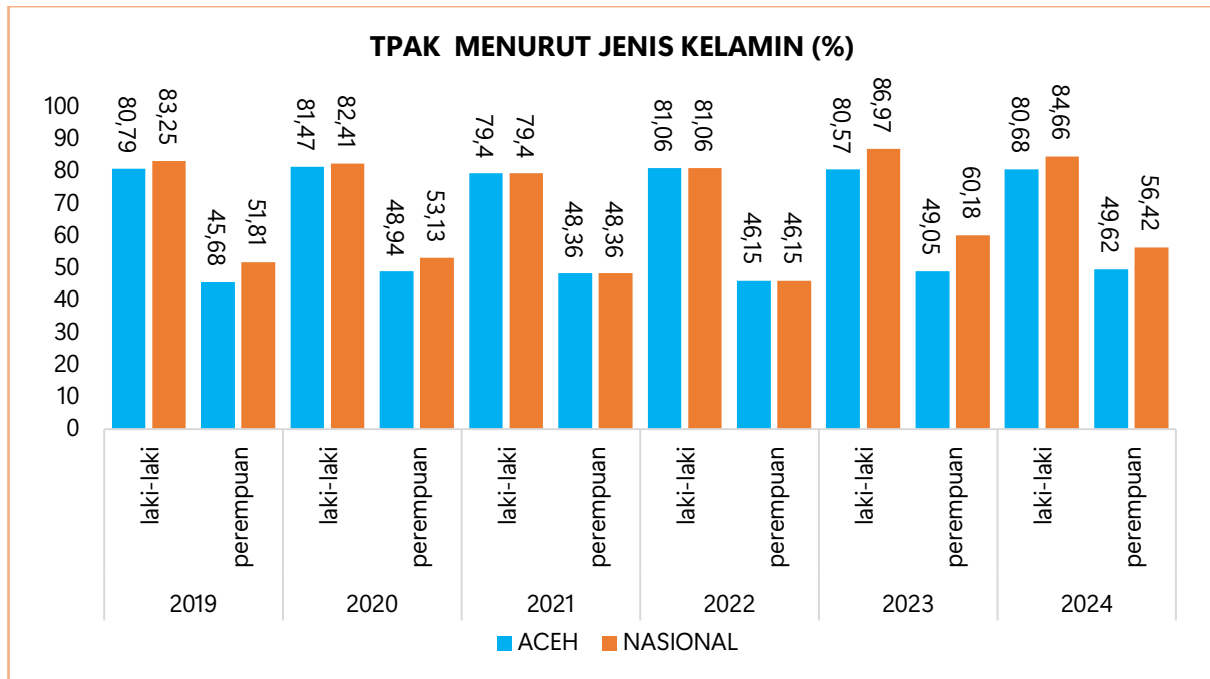
Bila di tinjau dari TPAK laki-laki dan perempuan juga berfluktuasi, pada tahun 2020 TPAK Laki-laki dan Perempuan terjadi peningkatan yang signifikan masing-masing sebesar 81.47 persen dan 48.94 persen. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen. Pada tahun 2023 TPAK Laki-laki cenderung mengalami penurunan sedangkan TPAK perempuan meningkat. Pada tahun 2024 TPAK laki laki meningkat menjadi 80.68 persen dan TPAK perempuan menjadi 49.62 persen. Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Secara umum selama tahun 2019-2024 TPAK Aceh baik laki-laki maupun perempuan masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini juga tercermin dengan perbandingan TPT Aceh dan nasional, dimana Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen. Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 berfluktuatif. TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 65,10 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,36 persen. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan TPAK dengan persentase laki-laki sebesar 81,47 persen dan perempuan sebesar 48,94 persen pada tahun 2020. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen.

Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.



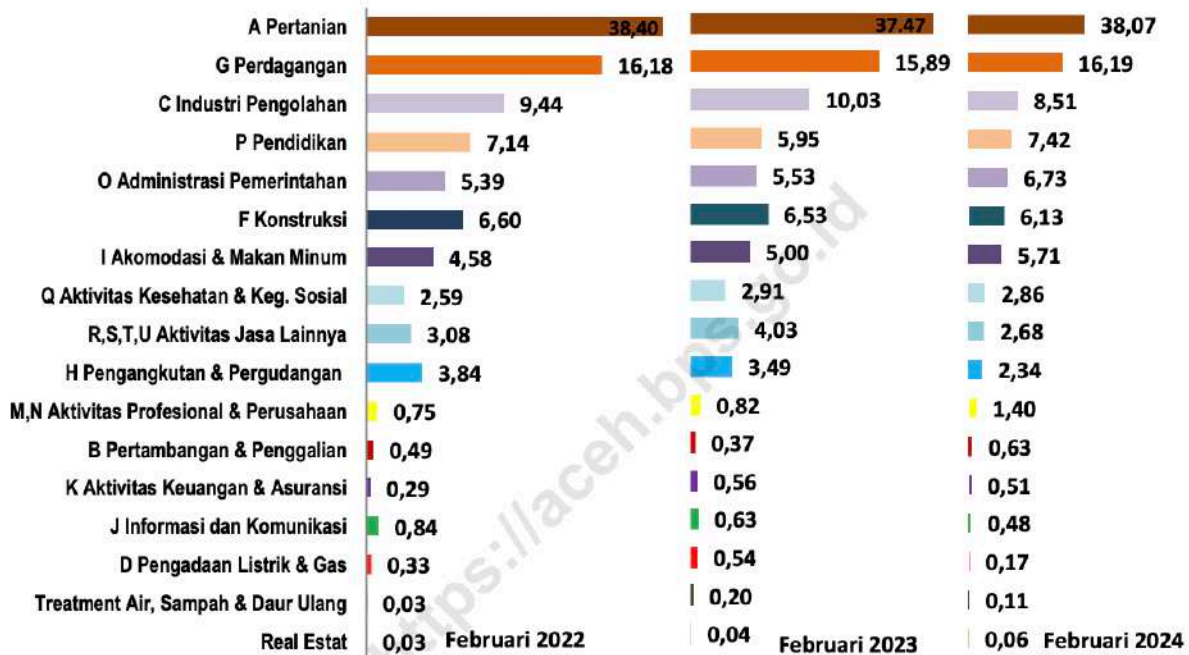
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025

Gambar 2. 45

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2019-2024

A.2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian sebesar 38,07 persen; Perdagangan sebesar 16,19 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,51 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini berbeda dengan bulan Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2023, beberapa lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan distribusi di tahun 2024 adalah sektor pengolahan sebesar 1,52 persen, sektor konstruksi sebesar 0,40 persen, dan Aktivitas Jasa Lainnya sebesar 1,35 persen.



Gambar 2. 46

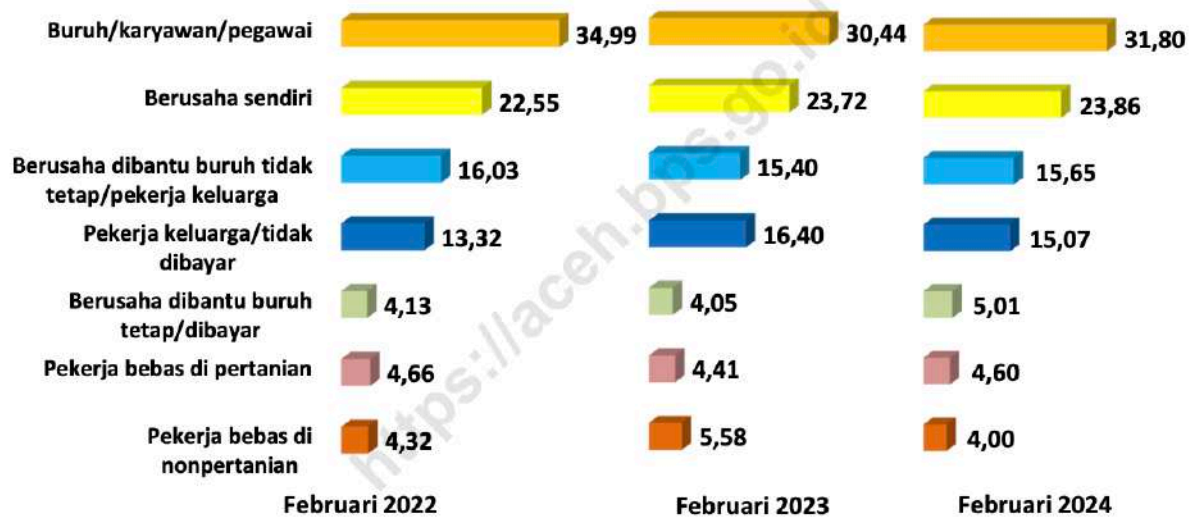
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2024

A.3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Februari 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,80 persen, sementara yang paling sedikit berstatus Pekerja bebas di nonpertanian yaitu sebesar 4,00 persen. Dibandingkan Februari 2023, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan 0,08 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

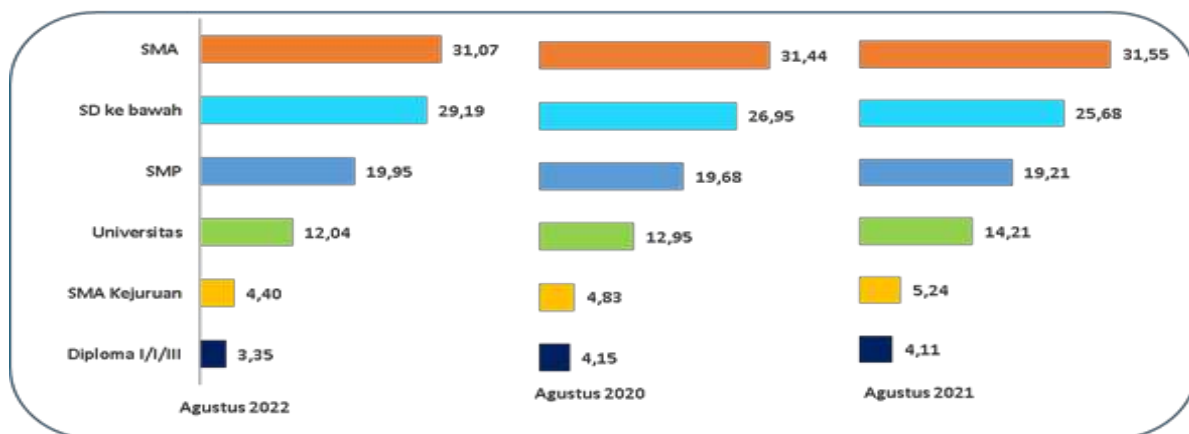
Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 59,86 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 40,14 persen. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen poin.



Gambar 2. 47

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2022–Februari 2024

A.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



Keterangan: Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Gambar 2. 48

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020-2022

Tabel 2. 59
Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan pada Agustus 2023

PERKOTAAN+PERDESAAN / URBAN+RURAL			PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN/ EDUCATIONAL ATTAINMENT							LAKI-LAKI+PEREMPUAN / MALE+FEMALE	
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA MAIN INDUSTRY (*)	TIDAK/BLM PERNAH SEKOLAH NOT ATTENDING SCHOOL	TIDAK/BLM TAMAT SD DID NOT COMPLETE/NOT YET COMPLETED PRIMARY SCHOOL	SEKOLAH DASAR PRIMARY SCHOOL	S L T P JUNIOR HIGH SCHOOL	S L T A SENIOR HIGH SCHOOL UMUM GENERAL	KEJURUAN VOCATIONAL	DIPLOMA I/II/III AKADEMI DIPLOMA I/II/III ACADEMY	DIPLOMA IV/UNIVERSITAS DIPLOMA IV/UNIVERSITY	JUMLAH TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	6 363	93 510	294 545	231 921	274 094	21 921	5 747	18 548	946 649		
2	-	1 497	5 494	5 016	8 851	1 006	323	1 261	23 448		
3	783	13 896	33 898	40 620	59 405	14 713	3 202	9 483	176 000		
4	-	623	975	1 332	4 092	1 293	972	1 146	10 433		
5	212	5 356	34 588	50 659	70 838	8 457	2 807	5 785	178 702		
6	917	19 449	77 575	100 507	209 552	39 411	11 779	35 915	495 105		
7	130	2 908	15 407	23 961	36 640	5 909	1 410	7 432	93 797		
8	-	421	1 237	3 453	13 116	2 549	3 136	14 695	38 607		
9	285	4 896	23 373	29 977	122 423	19 609	57 032	227 009	484 604		
JUMLAH TOTAL	8 690	142 556	487 092	487 446	799 011	114 868	86 408	321 274	2 447 345		
CATATAN/NOTE:											
*) 1. PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERBURUAN, DAN PERIKANAN / AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHERY 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGAJIAN / MINING AND QUARRYING 3. INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRY 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM / ELECTRICITY, GAS AND WATER 5. KONSTRUKSI / CONSTRUCTION 6. PERDAGANGAN, RUMAH MAKAN, DAN JASA AKOMODASI / TRADE, RESTAURANT AND HOTELS 7. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI / TRANSPORTATION, STORAGE AND COMMUNICATION 8. LEMBAGA KEUANGAN, REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN / FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICE 9. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN PERORANGAN / COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE											

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (diolah)

Tabel 2.59 menjelaskan bahwa penduduk berusia 15 Tahun ke atas bekerja menurut lapangan usaha utama dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Agustus 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berjumlah 6.363 orang dengan tingkat Pendidikan Tidak Pernah Sekolah (*not attending school*). Lapangan pekerjaan Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi diurutan kedua dengan jumlah 495.105, dirutan ketiga pada sektor Industri Pengolahan dengan jumlah 176.000 orang.

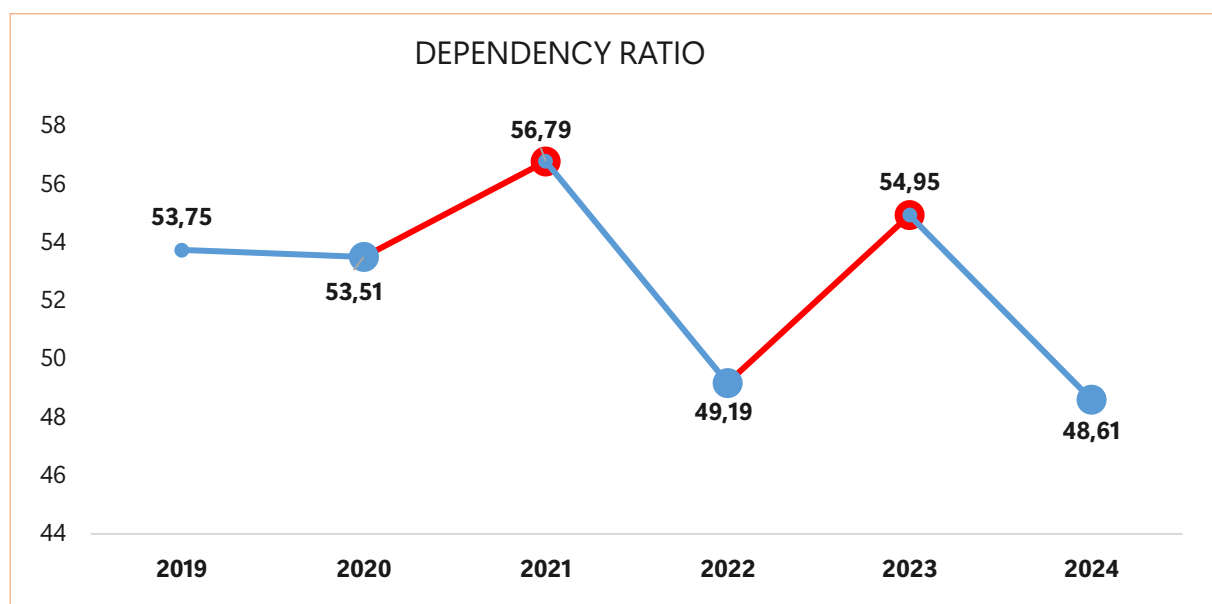
Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selama Agustus 2021-2023, Lapangan Pekerjaan Utama yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja berjumlah 946.649 orang pada Agustus 2023 dengan didominasi Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 294.545 orang. Sedangkan pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SMA, yaitu sebesar 31,07 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 15,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 3,52 persen poin dan 0,72 persen poin. Sementara

penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Universitas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan Universitas, yakni sebesar 2,15 persen poin.

A.5. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Secara umum tingkat ketergantungan Aceh dan Nasional mengalami penurunan, namun Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional.

Dari tahun 2019 hingga 2024 tingkat ketergantungan Aceh mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 tingkat ketergantungan Aceh berada pada 53,75 persen, sementara itu pada tahun 2024 tingkat ketergantungan di Aceh menurun hingga 48,61 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk usia produktif Aceh harus menanggung 48. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2019 hingga 2024 terdapat pada Gambar 2.49 berikut :

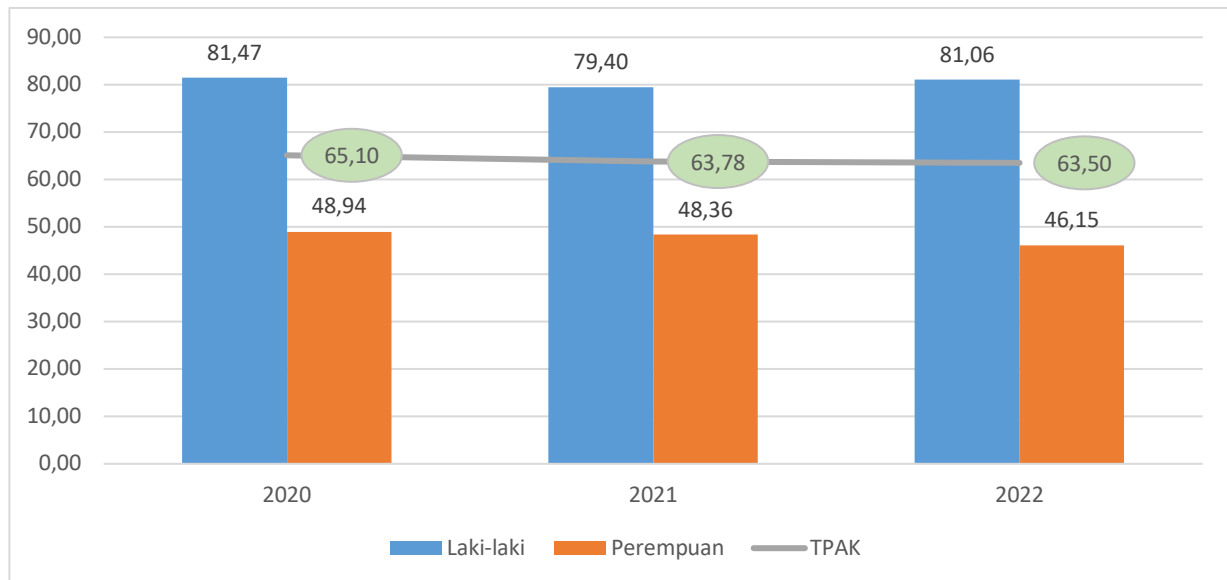


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (diolah)

Gambar 2. 49
Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2019-2024

A.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan tahun 2020 yaitu sebesar 48,94 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 81,47 persen. Pada tahun 2021 TPAK perempuan sebesar 48,36 persen, menurun sebesar 0,58 persen dari tahun 2020, sedangkan tenaga kerja laki-laki sebesar 79,40, menurun sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2022 TPAK perempuan sebesar 46,15 persen dan TPAK laki-laki sebesar 81,06 persen meningkat dari tahun sebelumnya 1,66 persen. Data tersebut menggambarkan partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

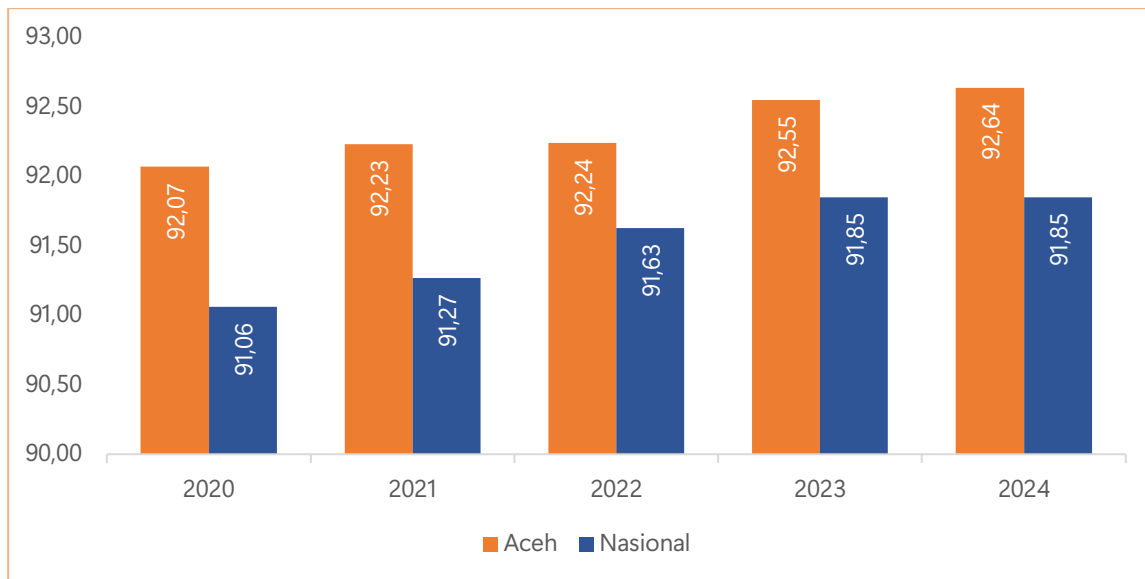


Gambar 2. 50
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2022

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2019-2023 sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar 2.51 di bawah ini.



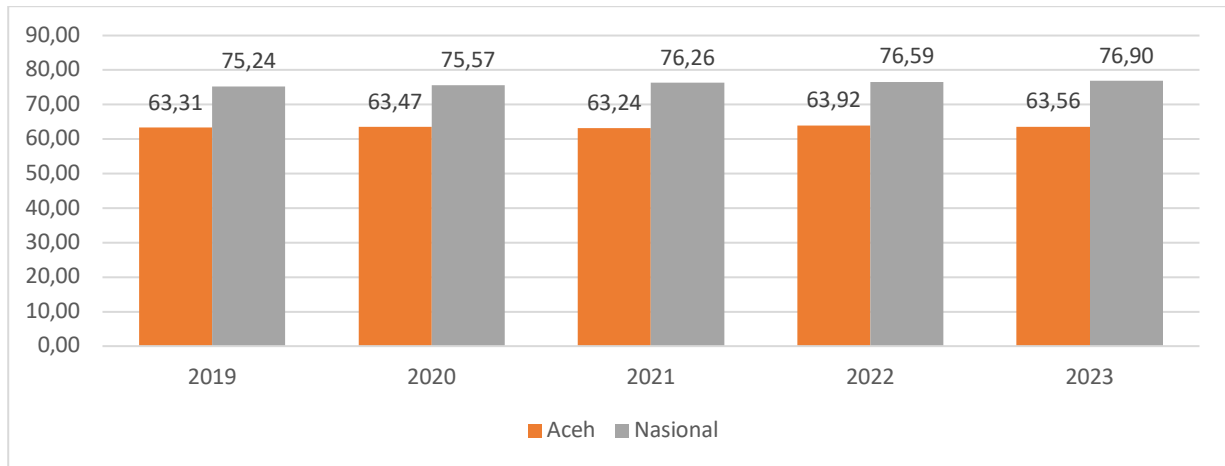
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 51
Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2020 - 2024

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 Indeks Pembangunan Gender Aceh lebih baik dibandingkan dengan Nasional. Capaian IPG Nasional pada tahun 2024 sebesar 91,85 dan IPG Aceh sebesar 92,64. Capaian IPG Aceh pada tahun 2024 sebesar 92,64 naik 0,09 poin dari tahun 2023 yang capaiannya sebesar 92,55. Namun meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Aceh masih lebih lambat dari laki-laki terutama di sektor ekonomi.

B.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan trend, setiap angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh mengalami penurunan dan peningkatan seperti pada gambar 2.52. Capaian IDG nasional pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,33 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 76,59, sedangkan capaian tahun sebelumnya sebesar 76,26 dan di tahun 2023 meningkat 0,31 poin menjadi 76,90. Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan sebesar 0,68 poin, yaitu dari capaian 63,24 tahun 2021 menjadi 63,92 pada tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami penurunan 0,36 poin menjadi 63,56.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

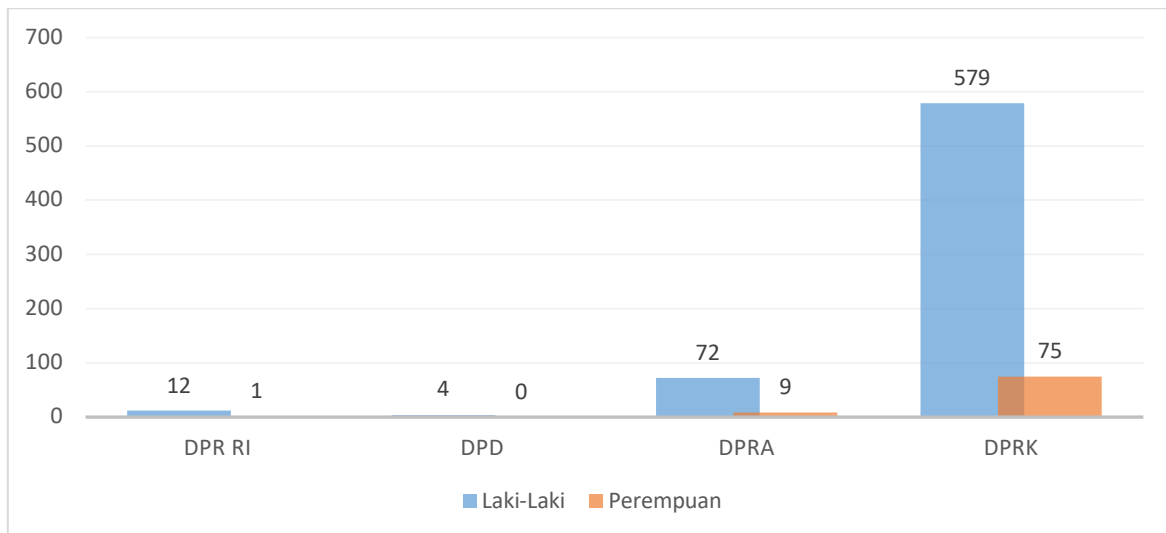
Gambar 2. 52
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 - 2023 (Data Termutakhir)

B.3. Proporsi Perempuan di Parlemen

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat.

Terobosan yang dicapai Aceh dalam mendorong pemenuhan hak politik perempuan, muncul melalui Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang dinyatakan pada Pasal 7 tentang hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan Pasal 8 tentang partisipasi dalam bidang politik.

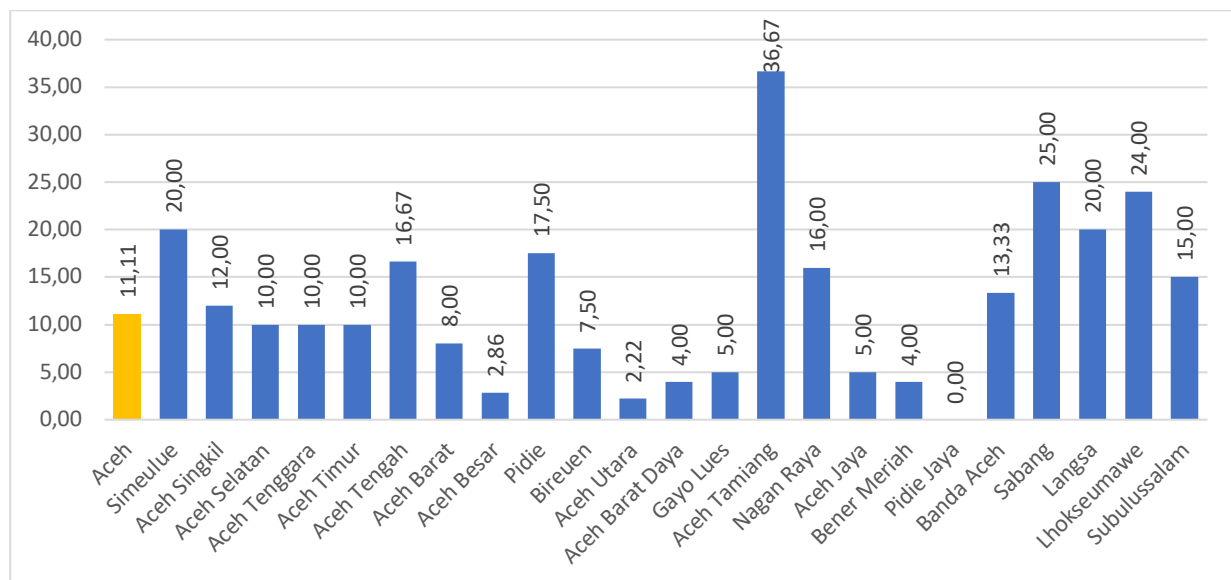
Namun sampai saat ini jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan, dan diharapkan perempuan dapat memainkan peranan aktif dan power dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Keberadaan perempuan harus dilihat sebagai potensi yang dimiliki Aceh sehingga penting untuk dilibatkan dalam pembangunan Aceh yang sedang berlangsung. Gambar 2.48 berikut menampilkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2023 di level DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK sesuai gambar di bawah:



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024

Gambar 2. 53
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa hanya pada DPD yang tidak terdapat keterwakilan perempuan. Sedangkan pada DPR RI, DPRA dan DPRK walau terdapat keterwakilan perempuan, namun angkanya masih sangat kecil dan belum mencapai kebijakan *Affirmatif Action* tentang kuota politik minimal 30% untuk perempuan di legislatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 54
Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

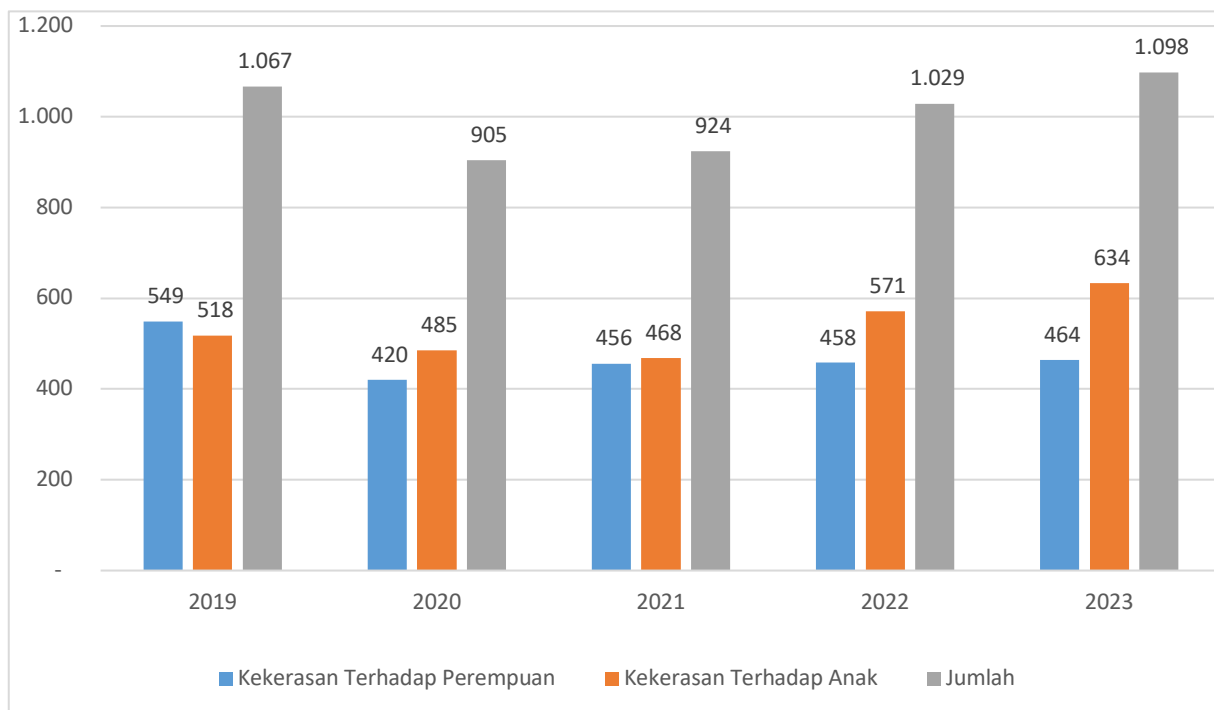
Dari 23 Kabupaten/Kota hanya Kabupaten Aceh Tamiang keterwakilan perempuan yang melebihi kuota politik minimal yaitu sebesar 36,67%, sedangkan terdapat 4

Kabupaten/Kota yang angkanya mencapai atau di atas 20% yaitu Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Simeuleu, dan Kota Langsa.

B.4. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak menurun pada kondisi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, namun kembali mengalami kenaikan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.098 kasus. Pada tahun 2022 tercatat ada 458 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 571 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian di tahun 2023, tercatat kasus meningkat menjadi 464 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 634 kasus kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.1



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024

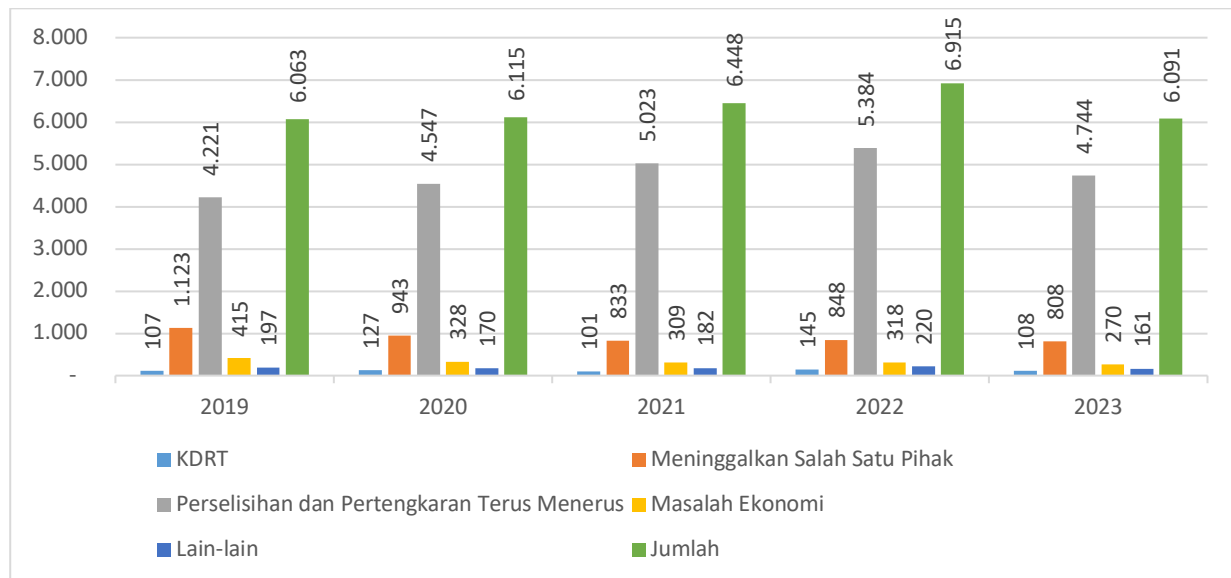
Gambar 2. 55

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang Terlapor pada UPTD PPA Tahun 2019 - 2023

B.5. Angka Perceraian

Jumlah kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ada 6.063 kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, kemudian terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi 6.915 kasus. Tahun 2023 kasus perceraian menurun menjadi 6.091 kasus. Penyebab terjadinya perceraian sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pasangan suami istri, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus lain-

lainnya yang mencakup zina, mabuk, madat, judi, di hukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa, dan murtad. Jumlah kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus meningkat dari 4.221 kasus di tahun 2019 menjadi 5.384 kasus di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 4.744 kasus.



Sumber: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2024

Gambar 2. 56

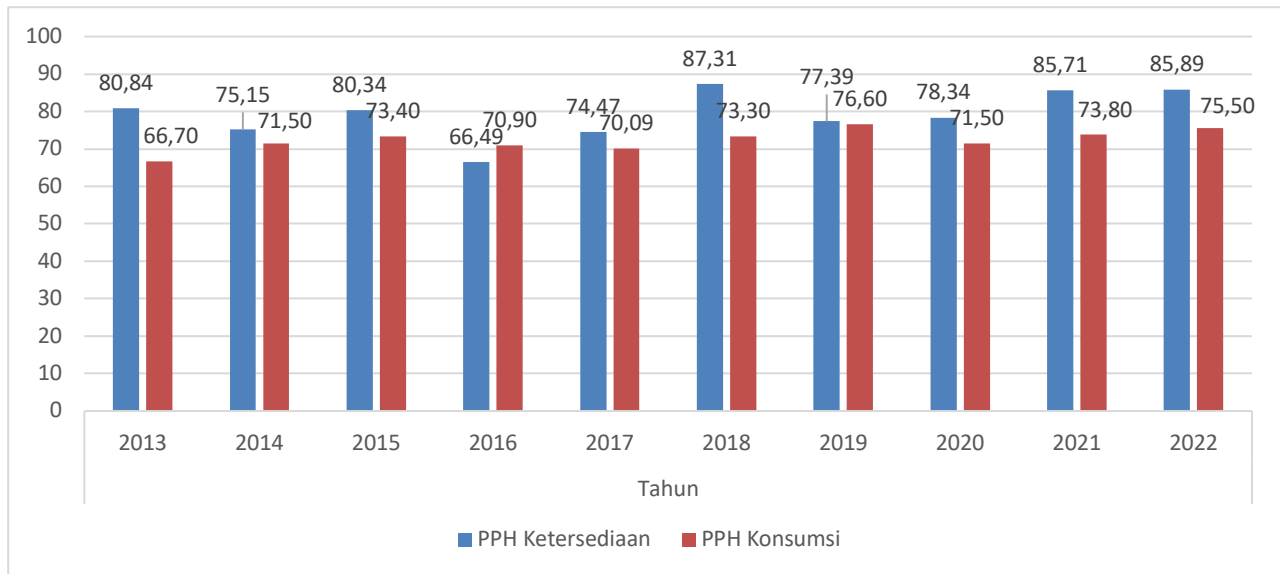
Jumlah Kasus Penyebab Terjadinya Perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019 - 2023

C. Pangan

Situasi ketahanan pangan sangatlah dipengaruhi oleh ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berbagai permasalahan dan isu pangan yang dihadapi diantaranya: Pertama, dalam aspek ketersediaan pangan, dimana peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini, sehingga ketergantungan terhadap impor beras dapat mengancam ketahanan pangan. Kemudian, dari sisi Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (dibawah 1500 kkal/kapita/hari) pada tahun 2022 tercatat ada sekitar 10.6% penduduk Aceh masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum. Menilik pada Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2022 ada 34 kecamatan yang masuk dalam daerah prioritas 1, 2 dan 3 rawan pangan, hal ini jika dibandingkan dengan data FSVA 2021 menunjukkan adanya peningkatan kerawanan pangan di Aceh. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2022 produksi pangan menurun, angka kesakitan meningkat, kemiskinan meningkat dan juga stunting meningkat. Bahkan di tahun 2022 terdapat 8 Kecamatan dalam prioritas 1 yang tahun sebelumnya tidak ada yaitu pada kabupaten Aceh Singkil terdapat 5 kecamatan,

pada Kabupaten Aceh Tengah terdapat 1 kecamatan, pada Kabupaten Pidie terdapat 1 kecamatan dan pada Kota Subulussalam terdapat 1 kecamatan. Kedua, dalam aspek keterjangkauan pangan, dimana kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses pangan. Kondisi pasokan pangan Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain terutama dari Sumatera Utara. Hampir semua kebutuhan pangan masyarakat Aceh seperti telur, gula, minyak makan bahkan termasuk rempah-rempah, buah dan sayur dipasok dari provinsi lain, sehingga harga kebutuhan pangan di Provinsi Aceh sering terjadi kenaikan diatas batas normal dan menyebabkan inflasi. Ketiga, dalam aspek pemanfaatan, dimana pola konsumsi sebagian besar masyarakat Aceh masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; konsumsi protein hewani, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan. Dalam aspek pemanfaatan pangan, keamanan pangan merupakan aspek penting yang juga diperhatikan untuk menentukan kualitas sumber daya manusia. Di era pasar bebas saat ini Aceh harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan dari daerah maupun negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Menyikapi persoalan pangan tersebut, maka perlu kebijakan yang diupayakan dalam hal penyediaan pangan dan penanganan rawan pangan antara lain melalui (1) peningkatan ketersediaan pangan yang beragam; (2) menekan jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; dan (3) peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Secara umum kondisi ketahanan pangan dapat dilihat melalui pencapaian pola pangan harapan (PPH) ketersediaan dan konsumsi pangan. Capaian PPH ketersediaan dan konsumsi pangan Aceh selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.57.



Gambar 2. 57

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2013-2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa skor PPH ketersediaan dan konektivitas konsumsi Aceh dari tahun 2013 - 2022 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan cenderung meningkat dari tahun 2013 - 2022 sedangkan skor PPH Konsumsi dari 2013 - 2022 juga mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 terjadi penurunan pada angka yang lebih rendah dari tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan akses masyarakat terhadap pangan rendah.

D. Pertanian

D.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Aceh (Desember, 2019) Salah satu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah adalah melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria memiliki dua bentuk yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Capaian Reforma Agraria hingga akhir tahun 2019, antara lain: (1) realisasi penerbitan sertipikat tanah transmigrasi sebanyak 56.941 bidang atau seluas 57.169 hektar; (2) legalisasi tanah masyarakat melalui PRONA & Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) dengan realisasi sertipikat sebanyak 17.670.963 bidang atau seluas 4.476.692 hektar; (3) redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, tanah terlantar dan Tanah Negara lainnya dengan realisasi sebesar 1.666.349 bidang atau seluas 795.458 hektar; (4) redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan realisasi penerbitan sertipikat 47.116 bidang atau seluas 32.753 hektar.

D.2. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

Tabel 2. 60
Target dan Realisasi Kegiatan Persertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin (PTM3) di Aceh

No	Kabupaten	Target Bidang	Realisasi	Keterangan
II.	Tahun 2019			
1.	Aceh Selatan	500	487	Telah diterima oleh penerima manfaat
2.	Aceh Singkil	400	333	sda
3.	Aceh Barat	200	25	sda
4.	Pidie Jaya	200	75	sda
5.	Nagan Raya	200	193	sda
Jumlah I		1.500	1.113	sda
II.	Tahun 2020			
1.	Bener Meriah	75	75	sda
2.	Bireuen	75	75	sda
Jumlah II		150	150	
Total			1.263	

Sumber : Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2023

Sejak tahun 2021 Dinas Pertanahan Aceh tidak melaksanakan lagi Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin tetapi hanya melakukan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Sub Kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin.

Dalam mengawali pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin maka di tahun 2022 Dinas Pertanahan Aceh Melaksanakan Koordinasi dengan Kantah Kabupaten/Kota dan Sosialisasi di Dinas Pertanahan

Kabupaten/Kota; 1. Kabupaten Aceh Timur 2. Kabupaten Aceh Utara 3. Kota Lhokseumawe 4. Kabupaten Bener Meriah 5. Kabupaten Aceh Tengah 6. Kabupaten Aceh Jaya 7. Kabupaten Aceh Barat 8. Kabupaten Aceh Selatan.

Disamping hal tersebut diatas Dinas Pertanahan Aceh juga melakukan Kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin sebagai Pilot Project agar kedepannya nanti diharapkan tidak hanya Dinas Pertanahan Provinsi aja yang melakukan ini tetapi Dinas Kabupaten/Kota juga dapat melaksanakannya. Daerah yang menjadi Pilot Project adalah Desa Blang Paku yang berada di Kecamatan Wim Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2. 61

Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin sebagai Pilot Project Tahun 2022 Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin

No	Kab/Kota	Jumlah Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Gampong	Jumlah Lahan/Tanah Terinventarisasi dan Administrasi	Jumlah Yang telah bersertipikat	Yang Belum bersertipikat
1	Bener Meriah	1	1	22 Lokasi	-	-

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanahan Aceh melakukan pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin di Kabupaten/Kota yang sebelumnya sudah dilaksanakan sosialisasi yaitu;

1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Jaya
3. Kabupaten Aceh Selatan
4. Kabupaten Aceh Tengah
5. Kabupaten Aceh Timur
6. Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2. 62

Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Gampong	Jumlah Lahan/Tanah Terinventarisasi dan Administrasi	Jumlah Yang telah bersertipikat	Yang Belum bersertipikat
1	Aceh Barat	1	1	16	-	-
2	Aceh Jaya	1	1	72	-	-
3	Aceh Selatan	1	1	58	-	-
4	Aceh Tengah	1	1	37	-	-
5	Aceh Timur	1	1	61	-	-
6	Aceh Utara	1	1	30	-	-

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan titik fokus yaitu Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin dilakukan juga terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perkim & Baitul Mal Aceh Tahun 2023.

Tabel 2. 63

Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Tahun 2024 Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perkim & Baitul Mal Aceh Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Gampong	Jumlah Lahan/Tanah Terinventarisasi dan Administrasi	Jumlah Yang telah bersertipikat	Yang Belum bersertipikat
1	Banda Aceh	9	42	51 Lokasi	25	26
2	Aceh Besar	12	87	121 Lokasi	1	120
3	Aceh Jaya	8	20	26 Lokasi	8	18
4	Pidie	4	-	-	-	-

Untuk Tahun 2025 Dinas Pertanahan Aceh akan melanjutkan kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perkim & Baitul Mal Aceh Tahun 2023, tetapi untuk lokasi kabupaten/kota yang berbeda. Adapun lokasi yang direncanakan adalah sebagai berikut; 1. Kabupaten Nagan Raya 2. Kabupaten Aceh Barat Dayat 3. Kabupaten Pidie Jaya dan 4. Kabupaten Bireun.

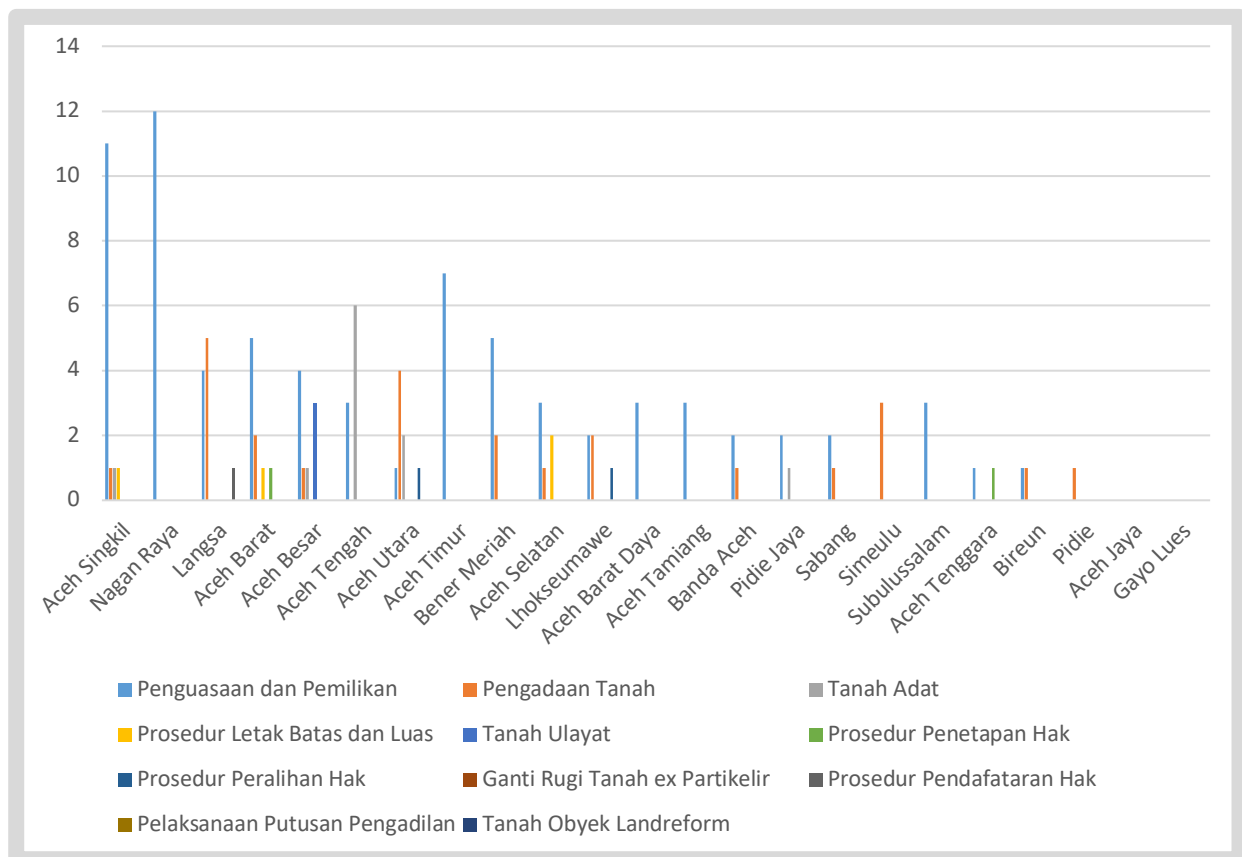
D.3. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Di Fasilitasi

Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sbb:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

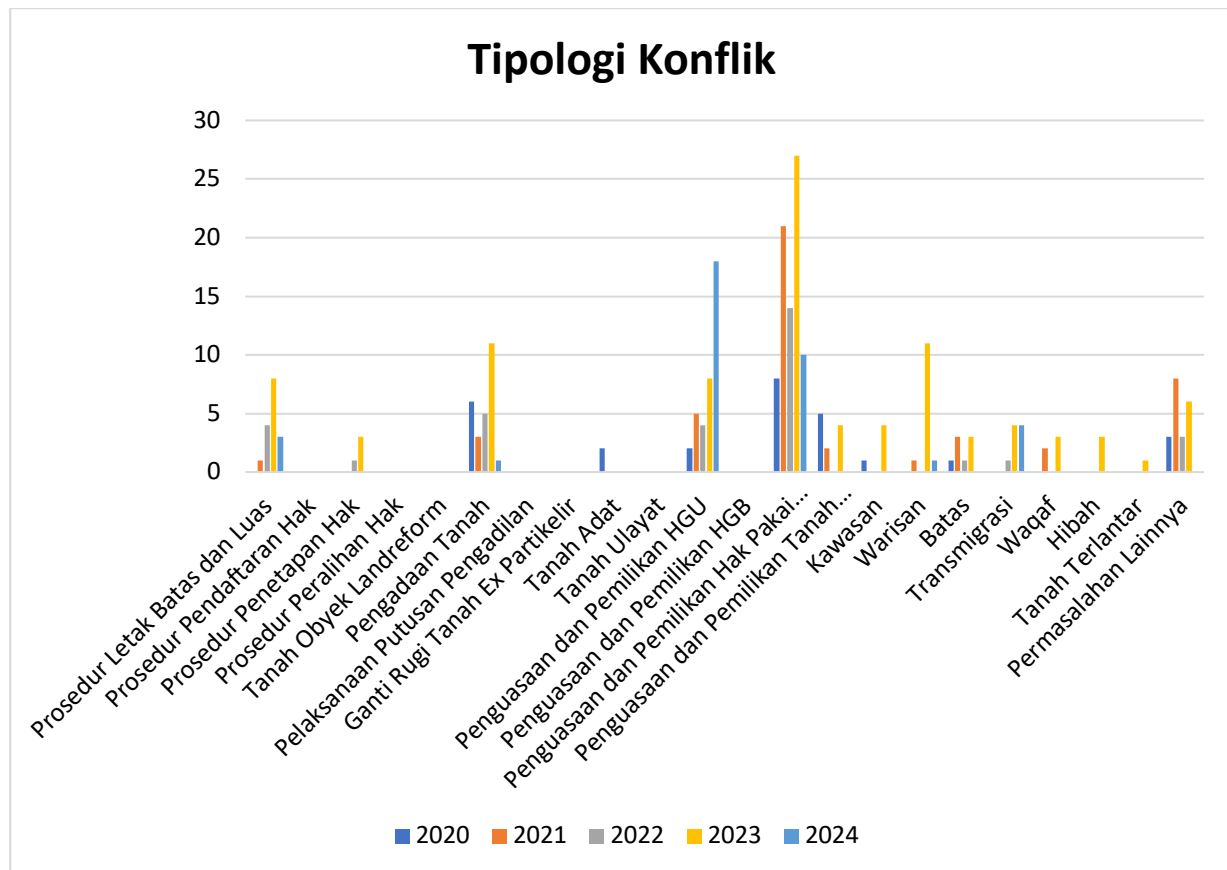
- kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

- d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan



Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2023

Gambar 2. 58
Jumlah Laporan Sengketa dan Konflik yang Terjadi pada Tahun 2022



Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2024

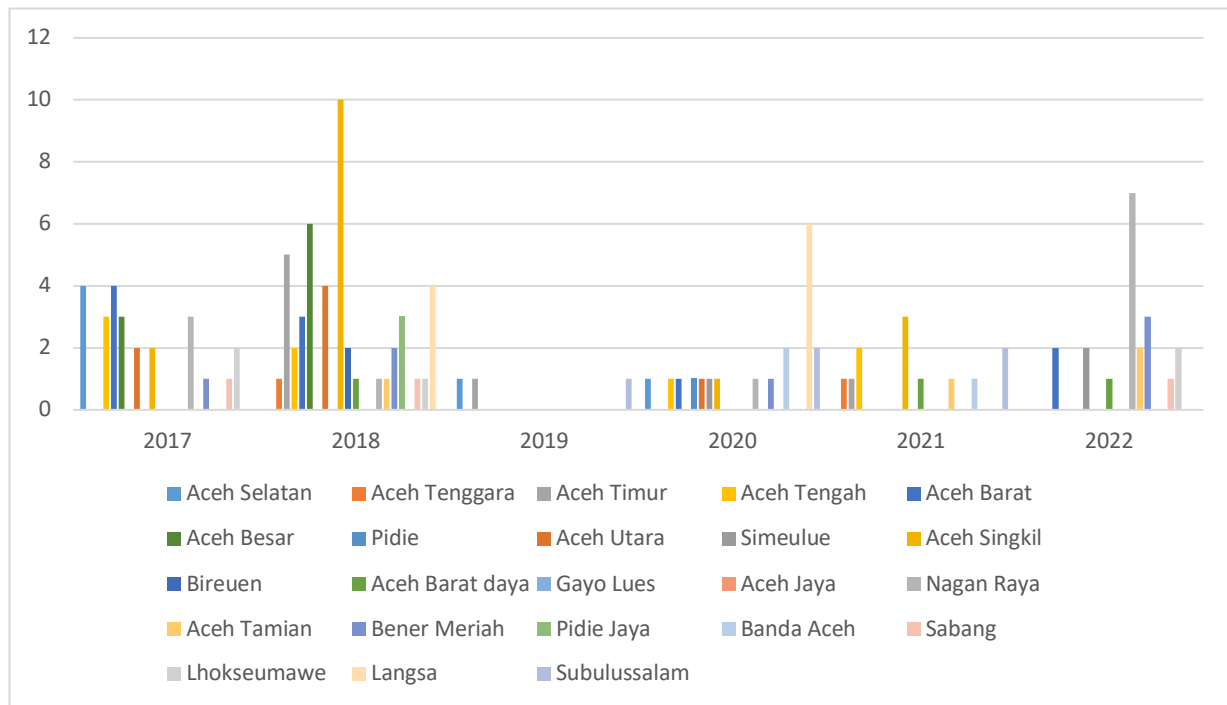
Tabel 2. 64

Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2022

		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Prosedur Letak Batas dan Luas	-	1	4	8	3	16
2	Prosedur Pendaftaran Hak	-	-	-	-	-	-
3	Prosedur Penetapan Hak	-	-	1	3	-	4
4	Prosedur Peralihan Hak	-	-	-	-	-	-
5	Tanah Obyek Landreform	-	-	-	-	-	-
6	Pengadaan Tanah	6	3	5	11	1	26
7	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	-	-	-	-	-	-
8	Ganti Rugi Tanah Ex Partikelir	-	-	-	-	-	-
9	Tanah Adat	2	-	-	-	-	2
10	Tanah Ulayat	-	-	-	-	-	-
11	Penguasaan dan Pemilikan HGU	2	5	4	8	18	37
12	Penguasaan dan Pemilikan HGB	-	-	-	-	-	-
13	Penguasaan dan Pemilikan Hak Pakai (Aset Pemerintah)	8	21	14	27	10	80
14	Penguasaan dan Pemilikan Tanah Garapan	5	2	-	4	-	11
15	Kawasan	1	-	-	4	-	5
16	Warisan	-	1	-	11	1	13
17	Batas	1	3	1	3	-	8
18	Transmigrasi	-	-	1	4	4	9
19	Waqaf	-	2	-	3	-	5
20	Hibah	-	-	-	3	-	3
21	Tanah Terlarang	-	-	-	1	-	1
22	Permasalahan Lainnya	3	8	3	6	-	20

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang

dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparaturn pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.

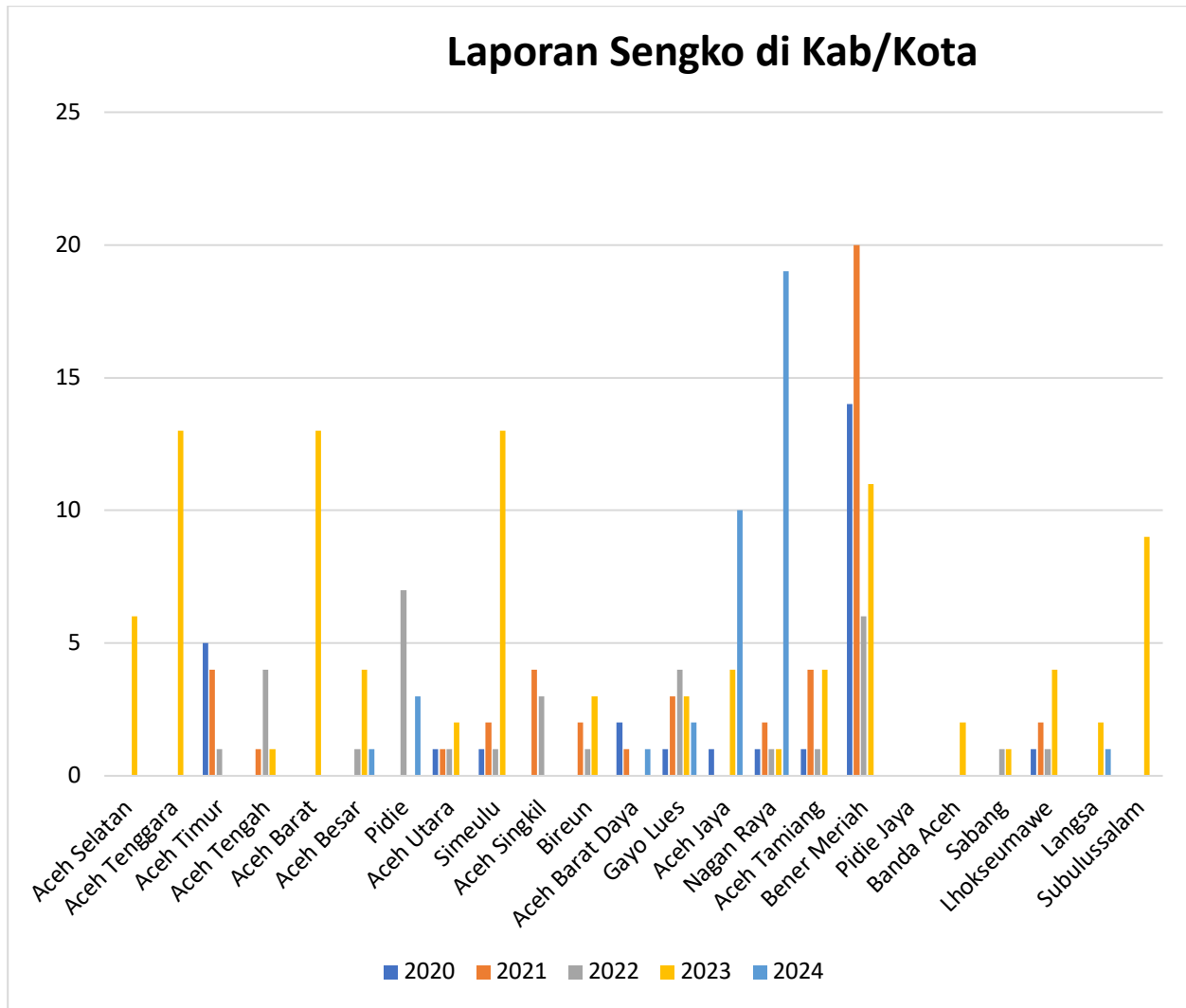


Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2023 (termutakhir)

Gambar 2. 59

Jumlah Laporan Sengketa dan Konflik yang Terjadi pada Tahun 2020 sampai 2024 di Kab/Kota

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparaturn pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.



Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2023 (termutakhir)

Gambar 2. 60
Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 di Kab/Kota

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024	Total Pelaporan
Aceh Selatan	-	-	-	6	-	6
Aceh Tenggara	-	-	-	13	-	13
Aceh Timur	5	4	1	-	-	10
Aceh Tengah	-	1	4	1	-	6
Aceh Barat	-	-	-	13	-	13
Aceh Besar	-	-	1	4	1	6
Pidie	-	-	7	-	3	10
Aceh Utara	1	1	1	2	-	5
Simeulu	1	2	1	13	-	17
Aceh Singkil	-	4	3	-	-	7
Bireun	-	2	1	3	-	6
Aceh Barat Daya	2	1	-	-	1	4
Gayo Lues	1	3	4	3	2	13

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024	Total Pelaporan
Aceh Jaya	1	-	-	4	10	15
Nagan Raya	1	2	1	1	19	24
Aceh Tamiang	1	4	1	4	-	10
Bener Meriah	14	20	6	11	-	51
Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-
Banda Aceh	-	-	-	2	-	2
Sabang	-	-	1	1	-	2
Lhokseumawe	1	2	1	4	-	8
Langsa	-	-	-	2	1	3
Subulussalam	-	-	-	9	-	9

D.4. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam rangka perencanaan pembangunan dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diperlukan pelayanan pemberian informasi yang lebih baik melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini adalah memberikan layanan informasi tentang pertanahan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH),

Sistem pengelolaan informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH) adalah sistem informasi yang mengelola dokumen pertanahan secara digital. Sistem ini mendukung lembaga pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan memberikan layanan informasi dalam perencanaan mengenai pertanahan secara up to date. SIMTANAH membantu mengefektifkan pengelolaan dokumen dan informasi pertanahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara terpadu dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola informasi tentang pertanahan baik berupa peta (gambar), grafik, table, teks, dan informasi pertanahan lainnya berbasis web online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi SIMTANAH dimulai dengan penyusunan Grand Design/Road Map, Penyusunan Perencanaan Aplikasi dan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola pada tahun 2019. Pembangunan aplikasi SIMTANAH dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2020.

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam rangka perencanaan pembangunan dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diperlukan pelayanan pemberian informasi yang lebih baik melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini adalah memberikan layanan informasi tentang pertanahan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH),

Sistem pengelolaan informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH) adalah sistem informasi yang mengelola dokumen pertanahan secara digital. Sistem ini mendukung lembaga pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan memberikan layanan informasi dalam perencanaan mengenai pertanahan secara up to date. SIMTANAH membantu mengefektifkan pengelolaan dokumen dan informasi pertanahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara terpadu dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola informasi tentang pertanahan baik berupa peta (gambar), grafik, table, teks, dan informasi pertanahan lainnya berbasis web online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi SIMTANAH dimulai dengan penyusunan Grand Design/Road Map, Penyusunan Perencanaan Aplikasi dan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola pada tahun 2019. Pembangunan aplikasi SIMTANAH dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2020.

Tabel 2. 65
Data Penyerahan Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sd Tahun 2024

No	PEMEGANG HAK AKSES	HAK AKSES		KONDISI SAAT INI	
1	Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
2	Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
3	Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
4	Dinas Pertanahan Kabupaten Bireun	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
5	Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
6	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
7	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
8	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
9	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
10	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
11	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
12	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
13	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
14	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
15	Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
16	Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
17	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
18	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
19	Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
20	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
21	Dinas Pertanahan Kota Langsa	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
22	Bagian Pemerintahan Kabupaten Pidie	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
23	Bagian Pemerintahan Kota Banda Aceh	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
JUMLAH		23	HAK AKSES	5	HAK AKSES

Sumber Data : Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Aceh, Tahun 2024

D.5. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan diredistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Tabel 2. 66
Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui
Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun
2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Indikatif (ha)	Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH oleh Menteri LHK				
			Nomor	Tanggal	Perubahan Batas KH (ha)	Perhutanan Sosial (ha)	Luas (ha)
1	Aceh Tamiang	6.351,40	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	1.326,99	47,54	1.374,53
2	Aceh Timur	13.114,26	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	139,03	178,06	317,09
3	Kota Langsa	813,34	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	7,51	-	7,51
4	Aceh Barat	66,45	-	-	28,01	-	-
5	Kota Sabang	68,48	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	27,17	4,81	31,98
6	Aceh Utara	189,59	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	78,77	88,77	167,54
7	Aceh Besar	8.927,75	S.128/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2022	30 Mei 2022	373,85	2.756,14	3.129,99
					1.981,33	3.075,32	5.028,64

Sumber Data : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah XVIII Aceh, Tahun 2024

Tabel 2. 67
Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset dan Penataan Akses
sd Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Penataan Aset				Penataan Akses		
		PTSL		Redistribusi Tanah				
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kota Banda Aceh	500	-	-	-	-	-	
2	Kota Sabang	500	66	-	-	-	-	
3	Kab. Aceh Besar	6.150	142	500	1	300	300	Belum ada Data
4	Kab. Aceh Barat	4.500	400	500	3	-	300	Belum ada Data
5	Kab. Aceh Selatan	3.500	1.308	-	498	-	-	
6	Kab. Pidie	4.475	205	500	81	-	-	
7	Kab. Aceh Utara	4.174	116	1.500	-	-	300	Belum ada Data
8	Kab. Aceh Timur	7.000	288	1.000	-	200	300	Belum ada Data
9	Kab. Aceh Tengah	3.000	194	500	-	500	300	Belum ada Data
10	Kab. Aceh Tenggara	3.000	61	1.250	-	-	-	
11	Kab. Bireuen	6.000	-	350	1.000	100	300	Belum ada Data
12	Kab. Aceh Singkil	2.500	1.100	-	-	-	-	
13	Kab. Simeulue	3.000	915	-	125	-	-	
14	Kab. Nagan Raya	3.000	109	1.255	2	-	200	Belum ada Data
15	Kab. Aceh Tamiang	2.884	-	550	-	300	300	Belum ada Data
16	Kota Lhokseumawe	2.000	33	-	-	-	-	
17	Kab. Aceh Jaya	1.600	-	500	230	425	200	Belum ada Data
18	Kota Langsa	697	-	-	-	-	-	
19	Kab. Aceh Barat Daya	2.625	-	-	-	-	-	
20	Kab. Gayo Lues	1.526	8	-	-	-	-	
21	Kab. Pidie Jaya	2.500	59	508	-	500	500	Belum ada Data
22	Kab. Bener Meriah	2.000	343	2.000	-	300	500	Belum ada Data
23	Kota Subulussalam	2.033	55	1.095	202	-	-	
	Total	69.164	5.402	12.008	2.142	2.625	3.500	-

Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Tahun 2023 (termutakhir)

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan didistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 68
Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Indikatif (ha)	Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH oleh Menteri LHK					
			Nomor	Tanggal	Perubahan Batas KH (ha)	Perhutanan Sosial (ha)	Kemitraan Konservasi (ha)	Luas (ha)
1	Aceh Tamiang	6.543,95	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	1.326,99	47,54		1.374,53
2	Aceh Timur	10.094,08	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	139,03	178,06		317,09
3	Kota Langsa	439,59	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	7,51	-		7,51
4	Aceh Barat	66,45	-		28,01			
5	Kota Sabang	65,98	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	27,17	4,81		31,98
6	Aceh Utara	178,37	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	78,77	88,77		167,54
7	Aceh Besar	434,35	S.128/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2022	30 Mei 2022	373,85	2.756,14		3.129,99
8	Aceh Tengah*	9.136,56	S.175/MENLHK/PKTL/PLA.2/7/2023	25 Juli 2023	5432,55	13696,93	1516,62	20646,1
9	Aceh Singkil*	8.635,21						
10	Bener Meriah*	2.343,26						
11	Aceh Barat Daya	13,79						
12	Aceh Jaya	1.341,00						
13	Aceh Selatan	497,73						
14	Aceh Tenggara	2.010,79						
15	Bireuen	165,15						
16	Gayo Lues	1.991,88						
17	Naganraya	3.524,84						
18	Pidie	5.502,69						
19	Pidie Jaya	1,02						
20	Simeulue	1.639,74						
21	Subulussalam	5.569,92						
	Total	60.196,37			7.413,88	16.772,25	1.516,62	25.674,74

Sumber Data : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah XVIII Aceh, Tahun 2024

Tabel 2. 69
Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset sd Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Penataan Aset																TOTAL	
		Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)								Redistribusi Tanah									
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Aceh Selatan	3,500	3,500	4,000	4,000	12,000	12,000	2,100	1,962	-	-	1,000	1,000	500	500	1000	-	24,100	22,962
2	Aceh Besar	6,150	6,150	9,000	9,000	5,500	5,500	8,144	447	500	500	2,000	2,000	500	500	500	-	32,294	24,097
3	Pidie Jaya	2,500	2,500	2,799	2,799	2,000	2,000	2,100	257	500	508	1,000	1,000	200	200	400	-	11,499	9,264
4	Pidie	4,475	4,475	4,083	4,083	4,000	4,000	5,800	1,404	500	500	1,000	1,000	500	500	1000	-	21,358	15,962
5	Bireuen	6,000	6,000	9,179	9,179	6,819	6,819	7,700	116	350	350	1,000	1,000	500	500	1000	-	32,548	23,964
6	Aceh Jaya	1,600	1,600	2,300	2,300	2,500	2,500	1,800	247	500	500	1,500	1,500	500	500	800	-	11,500	9,147
7	Aceh Barat	4,500	4,500	2,600	2,600	4,500	4,500	2,300	16	500	500	1,500	1,500	500	500	1000	-	17,400	14,116
8	Bener Meriah	2,000	2,000	4,200	4,200	6,000	6,000	2,700	92	2,000	2,000	2,500	2,500	1,000	1,000	1500	-	21,900	17,792
9	Aceh Utara	4,174	4,174	3,000	3,000	2,000	2,000	6,700	378	1,500	1,502	2,000	2,000	800	800	1000	-	21,174	13,854
10	Aceh Tengah	3,000	3,000	6,368	6,368	6,000	6,000	2,700	527	500	500	2,000	2,000	500	500	1000	-	22,068	18,895
11	Aceh Timur	7,000	7,000	8,000	8,000	3,941	3,941	8,300	102	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1000	-	31,741	22,543
12	Gayo Lues	1,576	1,526	885	885	2,192	2,192	450	37	-	-	500	500	500	500	500	-	6,603	5,640
13	Nagan Raya	3,000	3,000	2,418	2,369	5,000	5,000	2,300	83	1,255	1,255	2,500	2,500	500	500	800	-	17,773	14,707
14	Aceh Singkil	2,500	2,500	4,527	4,527	4,119	4,119	2,500	492	-	-	800	800	500	500	1000	-	15,946	12,938
15	Aceh Barat Daya	2,625	2,625	3,105	3,105	3,274	3,274	3,200	27	-	-	500	500	750	750	500	-	13,954	10,281
16	Aceh Tamiang	3,700	2,884	2,900	2,900	4,000	4,000	3,000	719	550	550	1,500	1,500	500	500	1000	-	17,150	13,053
17	Langsa	700	697	1,300	1,300	1,011	1,011	2,300	123	-	-	-	-	250	250	-	-	5,561	3,381
18	Aceh Tenggara	3,000	3,000	1,804	1,804	2,000	2,000	3,200	173	1,250	1,250	1,500	1,500	500	500	500	-	13,754	10,227
19	Simeulue	3,000	3,000	4,750	4,750	4,215	4,215	6,100	463	-	-	1,000	1,000	-	-	500	-	19,565	13,428
20	Subulussalam	2,000	2,033	1,427	1,427	1,500	1,500	1,500	219	1,095	1,095	700	700	-	-	-	-	8,222	6,974
21	Sabang	500	500	500	500	500	500	600	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100	-
22	Lhokseumawe	2,000	2,000	2,045	2,045	1,000	1,000	3,000	193	-	-	-	-	-	-	-	-	8,045	-
23	Banda Aceh	500	500	782	782	300	300	400	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1,982	-
TOTAL		70,000	69,164	81,972	81,923	84,371	84,371	78,894	8,182	12,000	12,010	26,000	26,000	10,000	10,000	15,000	-	378,237	283,225

Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Tahun 2024 (termutakhir)

Tabel 2. 70
Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Akses Sampai Dengan
Tahun 2024

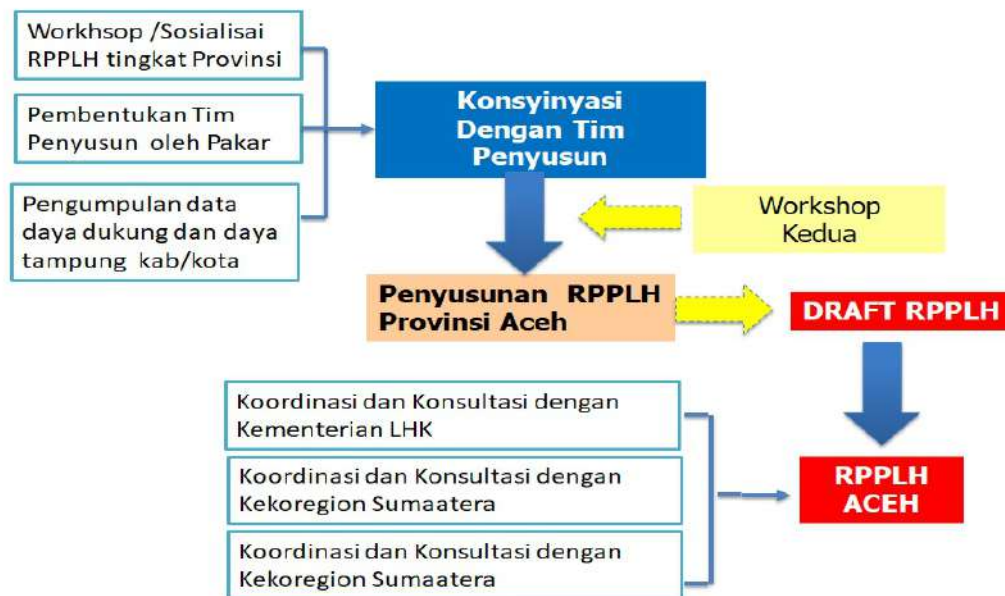
No	Kabupaten/Kota	Penataan Akses								TOTAL	
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Aceh Selatan	-	-	-	-	100	100	500	-	600	100
2	Aceh Besar	300	300	300	300	400	400	1,500	-	2,500	1,000
3	Pidie Jaya	500	500	500	500	300	300	400	-	1,700	1,300
4	Pidie	-	-	-	-	400	400	1,500	-	1,900	400
5	Bireuen	100	100	300	300	300	300	1,500	-	2,200	700
6	Aceh Jaya	425	425	200	200	100	100	200	-	925	725
7	Aceh Barat	-	-	300	300	300	300	800	-	1,400	600
8	Bener Meriah	500	500	500	500	300	300	800	-	2,100	1,300
9	Aceh Utara	-	-	300	300	400	400	1,500	-	2,200	700
10	Aceh Tengah	300	300	300	300	200	200	900	-	1,700	800
11	Aceh Timur	200	200	300	300	400	400	1,500	-	2,400	900
12	Gayo Lues	-	-	-	-	100	100	200	-	300	100
13	Nagan Raya	-	-	200	200	400	400	500	-	1,100	600
14	Aceh Singkil	-	-	-	-	100	100	400	-	500	100
15	Aceh Barat Daya	-	-	-	-	400	400	500	-	900	400
16	Aceh Tamiang	300	300	300	300	400	400	500	-	1,500	1,000
17	Langsa	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-
18	Aceh Tenggara	-	-	-	-	100	100	200	-	300	100
19	Simeulue	-	-	-	-	400	400	500	-	900	400
20	Subulussalam	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
21	Sabang	-	-	-	-	400	400	300	-	700	400
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	400	400	300	-	700	400
23	Banda Aceh	-	-	-	-	100	100	200	-	300	100
TOTAL		2,625	2,625	3,500	3,500	6,000	6,000	15,000	-	27,125	12,125

Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Tahun 2024 (termutakhir)

E. Lingkungan Hidup

E.1. Tersusunnya RPPLH Provinsi

Dalam Dokumen Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), diamanatkan agar setiap kab/kota dapat menyusun dokumen RPPLH yang merupakan dasar dalam perencanaan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan penyusunan RPPLH Aceh sebagaimana pada Gambar 2.61.

TAHAPAN PENYUSUNAN RPPLH
ACEH 2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017

Gambar 2. 61
Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh

Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH kab/kota masih banyak belum tersedia.

E.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi

Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pasal 10, Ayat 5). Diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Kondisi saat ini dengan tersusunnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjadi landasan acuan seluruh perencanaan mempedomani Qanun RPPLH.

E.3. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut

undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan KLHS adalah:

- 1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
- 2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
- 3) Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan.

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJPA, KLHS RPJMA dan KLHS RTRWA. Sementara KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) juga sudah tersedia.

E.4. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan scenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-

Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.71. sebagai berikut

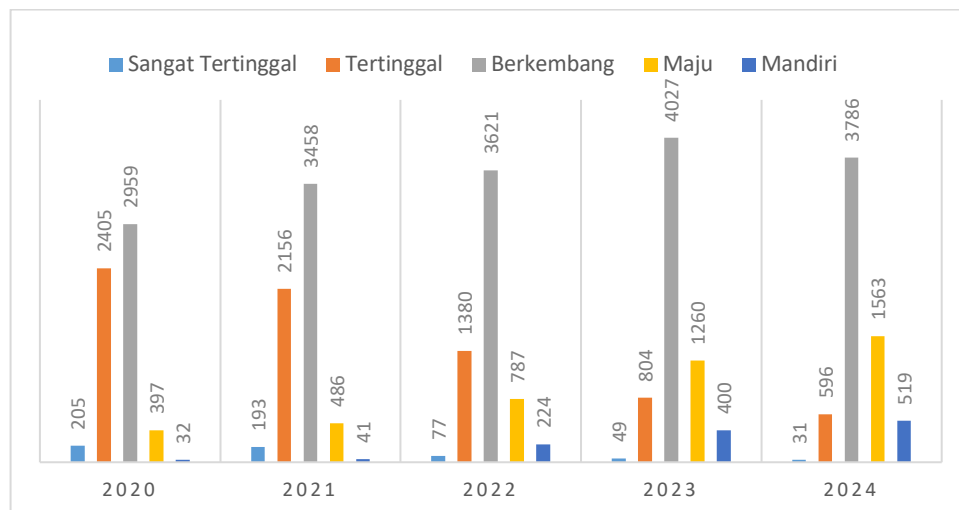
Tabel 2. 71
Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik	3,382,639	99,49	3,599,123	97,45	3,668,899	98,12	3,833,040	96,93	3,792,519	98,73
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	1,623,818	87,03	1,776,750	93,83	1,755,114	96,63	1,771,428	96,09	1,753,848	96,65
3	Kepemilikan Akta Nikah	1.033.668	45,21	1.122.897	48,81	1.379.828	58,55	1,470,499	61,65	1,534,512	100
4	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	627,238	36,16	728,139	42,19	745,125	42,42	875,117	49,37	924,351	53,46

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2020-2024 dapat kita lihat dalam Gambar 2.62. di bawah ini.



Sumber : DPMG Aceh, 2025

Gambar 2. 62
Status Desa di Aceh Tahun 2020 – 2024

Dari Gambar 2.62. diatas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal di Aceh terus menurun dari tahun 2020 ke tahun 2024. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat. Pada tahun 2020, desa maju di Aceh berjumlah 397 desa meningkat menjadi 1.563 desa di tahun 2024. Sedangkan desa mandiri di tahun 2020 berjumlah 32 desa meningkat menjadi 519 desa di tahun 2024.

Tabel 2. 72
Indeks Desa Membangun (IDM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	STATUS DESA (PERSEN)				
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
1	ACEH SELATAN	5.00	14.23	61.15	18.85	0.77
2	ACEH TENGGARA	1.30	38.44	56.10	3.38	0.78
3	ACEH TIMUR	5.26	34.50	54.19	5.65	0.39
4	ACEH TENGAH	16.95	24.07	50.17	8.81	0.00
5	ACEH BARAT	6.52	17.70	58.39	16.77	0.31
6	ACEH BESAR	7.28	32.45	58.61	1.49	0.00
7	PIDIE	1.92	15.62	79.59	2.88	0.00
8	ACEH UTARA	0.94	11.74	63.62	22.18	1.41
9	SIMEULUE	2.90	13.04	65.22	18.84	0.00
10	ACEH SINGKIL	12.93	25.86	34.48	22.41	4.31
11	BIREUEN	3.45	22.82	65.52	8.21	0.00
12	ACEH BARAT DAYA	4.61	19.74	73.68	1.97	0.00
13	GAYO LUES	3.68	24.26	58.82	13.24	0.00
14	ACEH JAYA	6.98	17.44	67.44	6.98	0.58
15	NAGAN RAYA	7.66	29.73	53.60	9.01	0.00
16	ACEH TAMIANG	18.06	32.41	41.20	7.41	0.46
17	BENER MERIAH	20.69	26.29	42.24	10.34	0.43
18	PIDIE JAYA	6.31	41.89	49.10	1.80	0.90
19	BANDA ACEH	93.33	6.67	0.00	0.00	0.00
20	SABANG	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21	LHOKSEUMAWE	36.76	42.65	20.59	0.00	0.00
22	LANGSA	21.21	37.88	39.39	1.52	0.00
23	SUBULUSSALAM	28.05	29.27	34.15	7.32	1.22

Sumber: DPMG Aceh, 2025

Dari tabel 2.72. terlihat bahwa beberapa Kabupaten/Kota masih memiliki desa sangat tertinggal walaupun dengan persentase yang kecil yaitu: Kabupaten Aceh Singkil (4,31%), Kabupaten Aceh Utara (1,41%), dan Kota Subulussalam(1,22%). Hampir seluruh Kabupaten/Kota sebagian besar desa nya adalah desa berkembang kecuali Kota Sabang dan Kota Banda Aceh yang seluruh desa nya sudah maju dan mandiri.

Tabel 2. 73
Alokasi Dana Desa Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH
	PROVINSI ACEH	6.497	4.980.088.180.000	4.986.622.278.000	4.669.371.747.000	4.761.060.876.000	4.958.897.983.000
1	ACEH SELATAN	260	205.268.050.000	205.268.050.000	194.090.688.000	195.811.103.000	196.339.440.000
2	ACEH TENGGARA	385	284.561.253.000	284.561.253.000	265.902.419.000	270.051.986.000	281.372.115.000
3	ACEH TIMUR	513	387.787.938.000	387.787.938.000	373.119.830.000	376.847.461.000	395.019.867.000
4	ACEH TENGAH	295	223.350.548.000	223.350.548.000	209.831.057.000	212.942.662.000	222.523.597.000
5	ACEH BARAT	321	250.632.328.000	250.632.328.000	234.408.383.000	224.045.853.000	236.111.096.000
6	ACEH BESAR	603	437.555.848.000	437.555.848.000	415.515.724.000	422.285.475.000	440.931.838.000
7	PIDIE	730	524.715.756.000	524.715.756.000	494.424.865.000	525.206.131.000	538.343.872.000
8	ACEH UTARA	852	626.338.212.000	626.338.212.000	607.509.747.000	620.592.204.000	650.152.994.000
9	SIMEULUE	138	119.684.330.000	119.684.330.000	107.641.709.000	101.844.034.000	106.573.474.000
10	ACEH SINGKIL	116	108.080.283.000	108.080.283.000	96.138.732.000	92.832.222.000	96.528.106.000
11	BIREUEN	609	455.523.085.000	455.523.085.000	442.297.899.000	446.168.583.000	462.263.930.000
12	ACEH BARAT DAYA	152	119.823.288.000	119.823.288.000	111.846.686.000	113.155.818.000	118.693.008.000
13	GAYO LUES	136	114.193.644.000	114.381.709.000	101.044.300.000	105.937.563.000	110.597.264.000
14	ACEH JAYA	172	135.065.795.000	135.065.795.000	118.845.057.000	121.957.443.000	128.024.164.000
15	NAGAN RAYA	222	175.871.395.000	175.871.395.000	161.264.111.000	165.760.447.000	172.968.346.000
16	ACEH TAMIANG	215	171.672.967.000	171.672.967.000	163.372.347.000	166.158.308.000	177.156.461.000
17	BENER MERIAH	232	182.834.539.000	182.834.539.000	167.049.012.000	164.707.235.000	173.100.709.000
18	PIDIE JAYA	222	165.862.465.000	165.862.465.000	151.746.896.000	163.021.845.000	169.168.059.000
19	BANDA ACEH	90	75.977.398.000	77.702.442.000	70.100.703.000	73.484.769.000	77.088.372.000
20	SABANG	18	25.156.301.000	26.798.027.000	14.179.325.000	15.014.733.000	15.636.770.000
21	LHOKSEUMAWE	68	60.285.819.000	61.983.149.000	53.928.333.000	56.545.740.000	62.402.165.000
22	LANGSA	66	59.424.404.000	60.706.341.000	53.156.136.000	59.732.506.000	58.843.788.000
23	SUBULUSSALAM	82	70.422.534.000	70.422.530.000	61.957.788.000	66.956.755.000	69.058.548.000

Sumber: DPMG Aceh, 2025

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap tahun seluruh desa memperoleh alokasi dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera.

Dari Tabel 2.58. di atas terlihat bahwa alokasi dana desa untuk Aceh meningkat dari tahun 2020-2024, namun turun di tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten yang menerima alokasi dana desa paling besar dikarenakan dua Kabupaten tersebut memiliki jumlah desa paling banyak di Provinsi Aceh.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial, ekonomi dan kependudukan. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi).

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Aceh selama periode 2019-2023 terus menunjukkan fluktuasi, yaitu dari 1,93 pada tahun 2019 menjadi 1,54 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Aceh masih terkendali. *Total Fertility Rate (TFR)* Aceh selama periode 2019-2021 mengalami peningkatan, tahun 2019 TFR Aceh sebesar 2,63 persen meningkat menjadi 2,68 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 TFR Aceh mengalami penurunan menjadi 2,32 persen. Cakupan peserta KB Aktif tahun 2019 sebanyak 404.527 orang, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 407.537 orang. Tetapi pada tahun 2023 cakupan peserta KB Aktif kembali mengalami peningkatan menjadi 525.096 orang.

Tabel 2. 74

**Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2023**

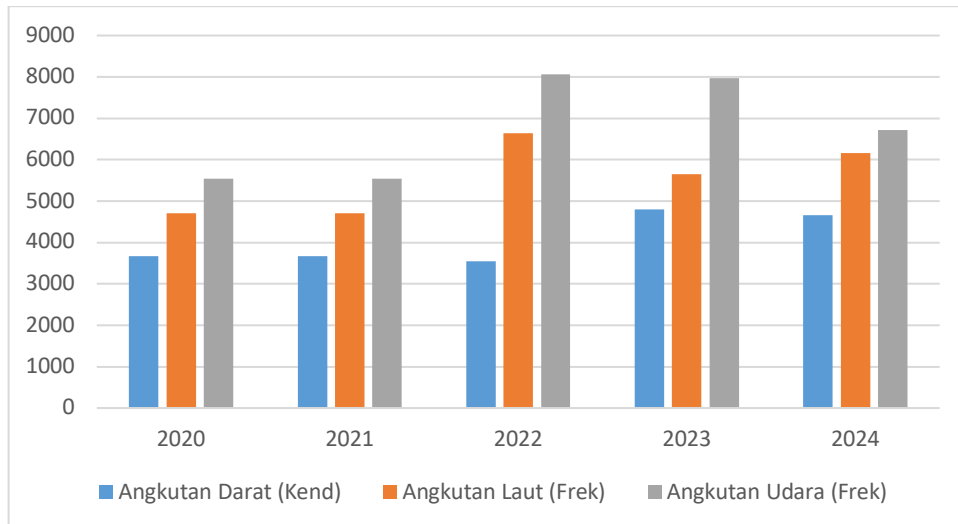
Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,93	1,56	1,10	1,37	1,54
Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,63	2,68	2,68	2,42	2,32
Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	404.527	519.709	557.901	407.537	525.096

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

I. Perhubungan

I.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara pada tahun 2024 secara keseluruhan mengalami tren peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya pada arus penumpang angkutan laut, sedangkan jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi udara dan darat cenderung menurun meski tidak signifikan. Tren peningkatan jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum di Aceh seiring dengan peningkatan frekuensi penyediaan jasa layanan angkutan serta peningkatan dalam pemenuhan aspek standar pelayanan minimal.



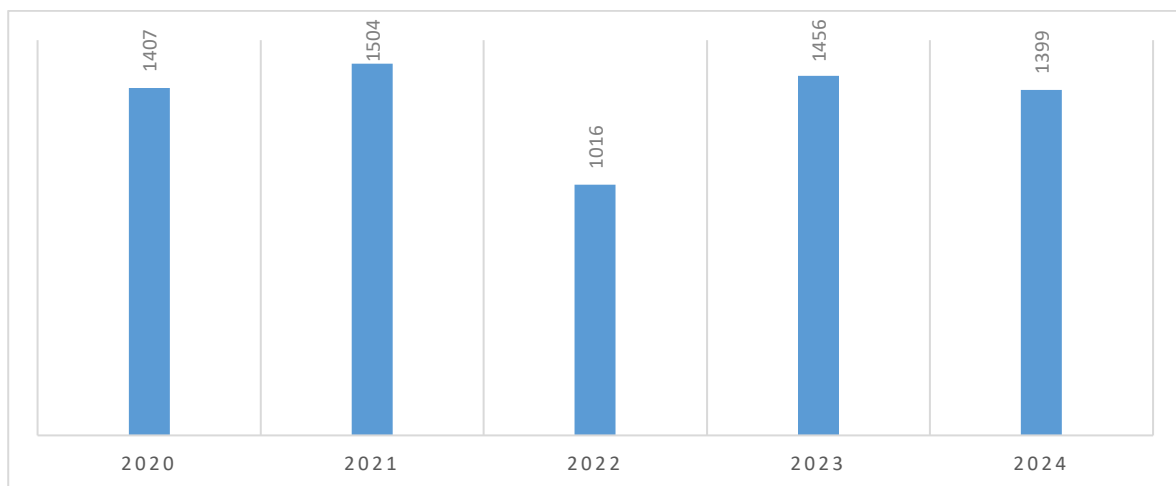
Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

Gambar 2. 63

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024

I.2. Rasio Ijin Trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum. Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2024 sebanyak 1 : 1399. izin/jumlah penduduk.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

Gambar 2. 64

Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2020-2024

I.3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

- Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
- Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
- Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
- Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
- Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
- Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
- Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).

Fasilitas dan Prasarana Transportasi di Aceh secara garis besar dibedakan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kemenhub), Pemerintah Provinsi (Dinas Perhubungan Aceh), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dishub Kab/Kota). Fasilitas prasarana perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 6 pelabuhan penyeberangan, 9 terminal penumpang tipe B fungsional, dan 1 fasilitas penerbangan berupa gedung penumpang VIP yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota yang ada di Aceh. Berikut visualisasi peta sebaran prasarana perhubungan kewenangan pemerintah provinsi:





Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

Gambar 2. 65
Prasarana Transportasi Aceh

Sebagai gambaran secara luas, sampai dengan tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 11 tipe B dan 20 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal.

Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah terminal Tipe B yaitu Terminal Tipe B Nagan Raya dikarenakan belum termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh, kondisi ini tetap bertahan hingga tahun 2024.

Di tahun 2024, status Air Strip di Langsa dihapuskan dari data bandar udara nasional yang tercantum dalam KM Perhubungan No. 33 Tahun 2014 Tatanan Kebandarudaraan Nasional sehingga jumlah bandara turun menjadi 11 bandara, meskipun di dalam KM tersebut terdapat rencana pembangunan Bandara Bireuen yang belum terbangun sampai dengan saat ini, sehingga jumlah bandara tetap menjadi 12 unit. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2. 75**Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024**

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	5	5	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	10	11	9	9
Jumlah Terminal Tipe C	22	21	20	20	20

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

I.4. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkutan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.76.

Tabel 2. 76**Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan angkutan darat	Aceh	47	10	71.43	32.28	38.07
	Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Aceh	27	64	66	60	54
	Nasional	27	27	30	N/A	N/A

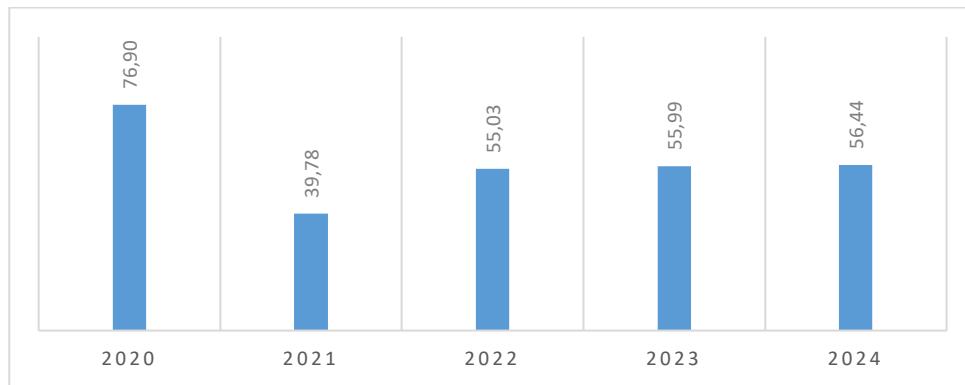
Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

I.5. Pemasangan Rambu-Rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu-Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab

panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas)



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

Gambar 2. 66

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2024

I.6. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan maupun jumlah kepemilikan kendaraan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2020-2024 di sajikan pada Tabel 2.77

Tabel 2. 77

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23,650.05	23,650.05	23.766,24
Total Jumlah Kendaraan (unit)	3.058.000	3.544.000	2,611,882	2,842,966	2.623.223
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	0,13	0,15	110.44	120.21	110,38
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	773,40	667,30	0.91%	0.83%	0,91%

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

I.7. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2024 didominasi oleh angkutan darat yaitu 2.317.048 orang (62.63%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan laut yaitu 960.338 orang (25.96%) dan angkutan udara sebesar 422.361 orang (11.42%). Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana Angkutan laut mendominasi mobilitas orang dari pada angkutan umum lainnya karena adanya pandemi. Seperti, pada Tahun 2022 proporsi jumlah orang terangkut angkutan umum pada moda Angkutan Laut sebesar 69.35 persen diikuti angkutan laut yaitu 25.34 persen dan angkutan udara sebanyak 5.30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa angkutan darat yang terdiri dari AKAP, AKDP, dan Angkutan Perkotaan/Perdesaan masih menjadi moda primadona utama, yang dibarengi dengan peningkatan drastis di banding dua tahun sebelumnya, meskipun kemudian terdapat tren penurunan pada tahun 2023 karena beberapa faktor yang menyebabkan pendataan jumlah penumpang menjadi tidak optimal namun pada tahun 2024 jumlah orang yang terangkut angkutan umum darat mengalami peningkatan cukup signifikan. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.78.

Tabel 2. 78

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkutan Darat	633.082	612.980	2,964,869	602.784	2.317.048
Angkutan Laut	566.099	729.669	1,083,553	869.381	960.338
Angkutan Udara	219.111	157.975	226,687	324.524	422.361
Jumlah	1.418.292	1.500.624	4.275.109	1.796.689	3.699.747

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

1.8. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibilitas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal, pelabuhan dan bandara pada tahun 2024 mengalami sebaran antar moda yang cukup berimbang, seperti pada jumlah orang melalui terminal yaitu sebesar 51.69 persen cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2023 yaitu sebesar 42.44 persen. Pada kedua jenis moda transportasi lain yaitu angkutan udara dan laut, juga terdapat tren positif kenaikan dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan

yang lebih membuat hampir semua moda transportasi kini lebih nyaman untuk digunakan. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2. 79

Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal	1.153.344	1.154.013	5,797,404	1.114.795	1.489.334
Bandara	427.028	302.616	448,034	642.796	432.806
Dermaga	566.099	729.669	1,083,553	869.381	959.338
Jumlah	2.146.471	2.186.298	2.186.298	2.626.972	2.881.478

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2024

J. Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan website milik Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan terus ditingkatkan dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD. Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 telah mengembangkan sebanyak 136 aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah pada tahun 2024, Pemerintah Aceh mendapatkan predikat Sangat Baik (nilai indeks 3,64). Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 80
Capaian Indikator Indeks SPBE Aceh 2019-2023

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,00	3,19	2,76	3,62	3,64

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2025

Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tahun 2024 sudah di atas target indeks SPBE Nasional (3,12). Rekomendasi LKE Kementerian PANRB terhadap Pemerintah Aceh adalah menyusun arsitektur SPBE dalam SIA. Rekomendasi perbaikan SPBE Pemerintah Aceh dalam Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024 terhadap aspek perencanaan strategis SPBE, aspek manajemen SPBE, dan aspek audit TIK.

K. Persandian

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

L. Statistik

L.1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Untuk itu Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh dengan Satu data.

L.2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selebar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

Adapun data dan informasi Geospasial yang selama ini tersedia dan di produksi oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) serta disebarluaskan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai wali data ke Geoportal Aceh (<https://geoportal.acehprov.go.id>). Jumlah data dan informasi geospasial yang tersedia di Geoportal Aceh adalah 320 peta.

M. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

M.1. Koperasi

Perkembangan koperasi di Aceh cukup fluktuatif, jumlah koperasi yang tumbuh terus bertambah namun begitu juga dengan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif. Secara rinci, perkembangan koperasi di Aceh Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 81
Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Total Koperasi	Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
		(unit)	(unit)	(%)	(unit)	(%)
1	2020	6.602	3.777	57,21	2.825	42,79
2	2021	6.767	3.910	57,80	2.857	42,20
3	2022	6.931	3.951	57,00	2.980	43,00
4	2023	7.772	4.037	51,94	3.735	48,06
5	2024	8.177	3.942	48,21	4.235	51,79

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2024

Dari data diatas dapat dilihat secara kuantitas jumlah koperasi di Aceh yang tersebar 23 Kabupaten/Kota terus mengalami pertumbuhan, namun jumlah koperasi aktif yang bertambah tidak lebih besar dibanding pertambahan jumlah koperasi tidak aktif. Hal ini menyebabkan persentase koperasi tidak aktif meningkat menjadi 51,79 persen pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya sebesar 48,06 persen, bahkan persentase koperasi aktif sedikit lebih kecil dari persentase koperasi tidak aktif yaitu 48,21 persen.

Sementara itu komposisi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana table 2.82 sebagai berikut :

Tabel 2. 82
Jumlah KSPPS dan USPPS di Aceh Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jenis Koperasi				Total	Jumlah			Ket
		KSP	USP	KSPPS	USPPS		Anggota	Aktif	Tdk. Aktif	
1	Banda Aceh	4	358	4	78	444	41.261	346	98	
2	Aceh Besar	18	423	29	10	480	29.119	318	162	
3	Pidie	9	122	-	7	138	13.033	126	10	
4	Pidie Jaya	-	9	9	2	20	4.293	20	-	
5	Bireuen	8	93	-	-	101	7.592	88	13	
6	Lhokseumawe	-	316	7	12	335	9.617	131	204	
7	Aceh Utara	13	80	3	9	105	11.854	53	54	
8	Aceh Timur	2	48	-	-	50	3.542	11	39	
9	Langsa	7	150	1	9	167	974	30	137	
10	Aceh Tamiang	1	37	7	2	47	4.124	30	17	
11	Aceh Tenggara	18	161	5	-	184	3.456	51	133	
12	Gayo Lues	2	96	-	1	99	5.519	6	93	
13	Aceh Tengah	6	252	6	1	265	22.698	34	225	
14	Bener Meriah	4	5	10	-	19	2.351	17	2	
15	Aceh Jaya	2	17	-	-	19	871	18	1	
16	Aceh Barat	70	5	12	-	87	2.215	32	55	
17	Nagan Raya	4	56	4	3	67	5.392	43	24	
18	Aceh Barat Daya	-	204	2	7	213	19.793	67	146	
19	Aceh Selatan	6	401	10	-	417	24.918	303	114	
20	Subulussalam	7	8	-	3	18	992	15	3	
21	Aceh Singkil	5	113	-	-	118	6.022	62	56	
22	Sabang	1	34	4	6	45	3.440	21	24	
23	Simeulue	1	105	-	10	116	3.299	27	89	
24	Provinsi	3	4	3	12	22	39.970	17	5	
Jumlah		191	3.097	116	172	3.576	266.345	1.866	1.704	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) masih cukup rendah dibanding keseluruhan entitas koperasi/usaha simpan pinjam. Sampai tahun 2024, jumlah KSPPS dan USPPS hanya sebanyak 288 atau sebesar 8,05 persen dari total koperasi dan usaha simpan pinjam.

Kondisi koperasi yang demikian menunjukkan masih adanya tantangan terhadap perkembangan koperasi di Aceh, terutama alih teknologi dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, faktor lain penyebab tidak aktifnya koperasi antara lain disebabkan oleh:

1. Pengelolaan koperasi belum mapan sehingga banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis, dan masih

banyak yang belum melakukan pernyataan mandiri (*self declare*), karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkooperasi;

2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi serta kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

M.2. UMKM

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, salah satunya sektor UMKM yang merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah UMKM di Aceh terus mengalami pertumbuhan, fasilitasi untuk menumbuhkembangkan UMKM terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada skala ekonomi. Perkembangan jumlah UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 83
Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh Tahun 2020-2024

No	Skala UMKM	Tahun				
		2020*	2021*	2022**	2023	2024
1	Mikro	226.290	226.290	224.523	423.178	622.394
2	Kecil	30.780	30.780	61	1.470	1.839
3	Menengah	2.679	2.679	26	202	288
Total		259.749	259.749	224.610	424.850	624.521

Sumber : Kemenkopukm, 2024

Diskopukm, 2025

KemenUMKM, 2025

* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya

** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Aceh mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2020-2024, dimana pada tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 259.749 tumbuh menjadi 624.521 pada tahun 2024. Proporsi pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok mikro, dimana tumbuh sebanyak 199.216 usaha atau tumbuh sebesar 47,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi di masyarakat untuk menjadi wirausahawan dan peluang berusaha di Aceh yang masih terbuka. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, Kemenkopukm tidak melakukan sensus, sehingga data yang disajikan menggunakan data tahun 2019.

Pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM hanya melakukan sensus di 7 Kabupaten/Kota di Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Tamiang, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan berkurangnya jumlah usaha kecil dan usaha menengah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2019 diakibatkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha, dimana sebelumnya sebuah usaha dikelompokkan mikro jika memiliki aset maksimal Rp. 50 juta atau omzet maksimal

Rp. 300 Juta menjadi maksimal modal Rp. 1 Milyar atau memiliki omzet maksimal Rp. 2 Milyar, begitu juga dengan kelas kecil dan menengah mengalami kenaikan tingkat kriteria. Sehingga banyak unit usaha yang sebelumnya berada dipengelompokan kecil dan menengah menjadi berada pada kelompok mikro. Hal tersebut juga mengakibatkan rasio proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Aceh menjadi berubah secara signifikan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 84
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020*	2021*	2022**	2023	2024
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	12,88	12,88	0,04	0,39	0,34

Sumber : Kemenkopukm, 2024 (diolah)

Diskopukm, 2025 (diolah)

KemenUMKM, 2025 (diolah)

* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya (2019)

** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten

Dari data diatas dapat dilihat terjadinya penurunan signifikan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2022, yang merupakan dampak dari perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha. Perubahan kriteria usaha tersebut mengakibatkan banyak usaha yang berada pada kelompok kecil dan menengah turun menjadi kelas mikro.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah menjadi 0,39 persen dari 0,04 persen dari tahun 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan volume usaha pada usaha mikro yang dapat meningkatkan aset maupun omzet usahanya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan geliat ekonomi secara umum, selain peningkatan kapasitas usaha itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 0,34 persen. Melihat secara jumlah, baik total UMKM, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, semuanya mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan pada kelompok mikro jauh lebih dominan dibandingkan pada kelompok kecil dan menengah, hal ini mengakibatkan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah ini sedikit mengalami penurunan.

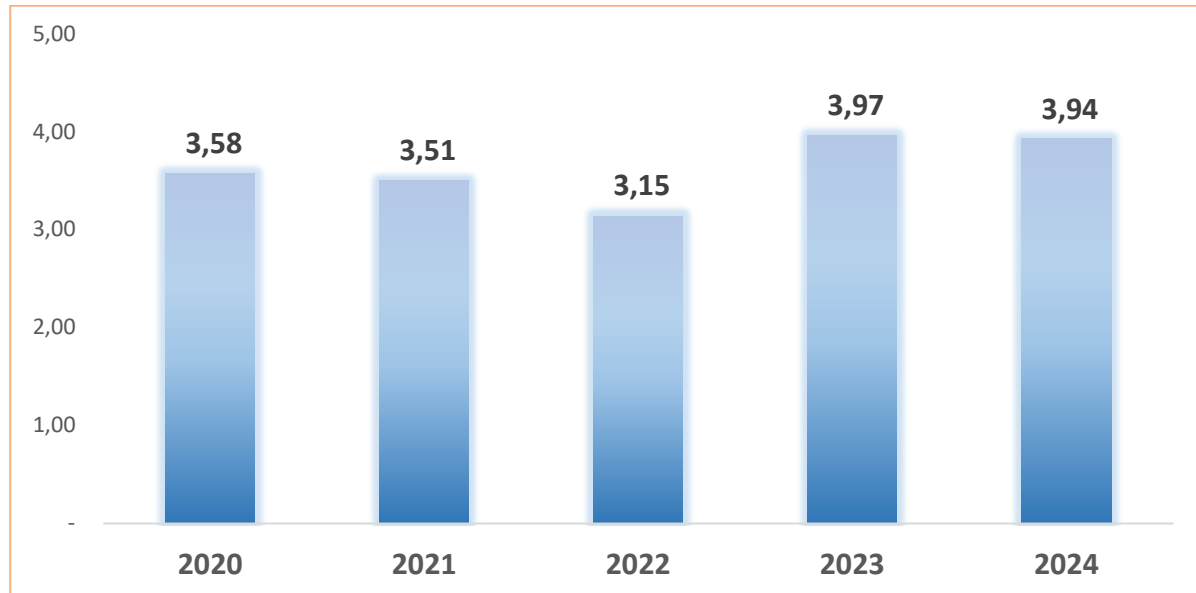
Rendahnya proporsi jumlah usaha kecil dan menengah saat ini menunjukkan sebagian besar usaha belum mampu meningkatkan kapasitas sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana, informasi dan akses pasar;

4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan/akses modal.

Selain beberapa poin diatas, permasalahan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap UMKM juga menjadi isu penting yang perlu dibenahi.

Sedangkan Rasio Kewirausahaan Aceh meskipun berfluktuasi, menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 yang berarti sudah mulai pulih kembali keyakinan dalam masyarakat untuk berwirausaha.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 2. 67
Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2020-2024

Perkembangan kewirausahaan Aceh mengalami tekanan pada tahun 2022 mencapai angka 3,15 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2020 lebih besar, yaitu 3,58 persen. Hal ini diduga merupakan akibat dari berbagai pembatasan pada saat pandemi covid-19, yang mengakibatkan kelesuan perekonomian baik secara global, nasional dan daerah, sehingga dunia usaha juga menjadi sektor yang paling terdampak. Pada tahun 2023, kewirausahaan di Aceh mulai menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97 persen. Namun di tahun 2024 rasio kewirausahaan Aceh sedikit menurun pada tingkat 3,94.

Selain itu sektor ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, maka akan semakin besar peluang terbuka untuk berwirausaha, selanjutnya juga membangun status sosial yang baik di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan iklim dunia usaha mulai membaik, sehingga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Meningkatnya rasio kewirausahaan menunjukkan meningkatnya peluang penciptaan lapangan kerja baru, dan diharapkan dapat memberi efek ganda dalam perekonomian di Aceh.

N. Penanaman Modal

N.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah termasuk Aceh peran swasta sangat menentukan. Kemajuan wilayah tersebut sangat didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor sehingga akan meningkatkan keterbukaan perdagangan dan memberikan ruang gerak yang cukup lebar terhadap peningkatan semua sektor bukan hanya pada sektor riil semata namun juga berimplikasi langsung terhadap sektor jasa. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi tetangga.

Hal tersebut ditandai dengan berfluktuatifnya jumlah investor baik skala nasional maupun asing. Pada tahun 2017 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing sebanyak 31 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yaitu 70 investor dan kemudian menurun kembali menjadi 56 Investor pada tahun 2020.

Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 346 investor menjadi 211 investor pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yakni sebanyak 376 investor, hingga mencapai puncaknya yaitu 2241 investor pada tahun 2020. Namun, di tahun-tahun berikutnya jumlah PMDN mengalami tren penurunan, dimana jumlah Perusahaan yang menanamkan modal di Aceh hanya mencapai 786 perusahaan di tahun 2022.

Tabel 2. 85
Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2019-2023

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)
2017	31	149.089	336	1.680.961
2018	29	48.016	211	1.232.545
2019	70	1.196.941	376	4.615.150
2020	61	737.974	2.241	8.373.043
2021	51	1.399.697	1.003	7.059.417
2022	58	127.073	786	1.433.366
Tw 2-2023	56	2.487.461	538	4.545.212

Sumber : DPMPTSP 2024

N.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah investor berkaitan erat dengan besarnya nilai investasi yang terealisasi di Aceh. Dalam periode tahun 2017 hingga Tw-2 2023 perkembangan nilai realisasi investasi di Aceh juga mengikuti tren fluktuatif bahkan cenderung menurun pada tahun 2022. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing cenderung mengalami fluktuasi yang sangat besar. Puncak realisasi tertinggi terjadi pada tw-2 tahun 2023 sebesar 2,4 triliun dengan realisasi jumlah perusahaan sebanyak 56 perusahaan yang telah beroperasi. Fluktuasi juga terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana puncak realisasi investasi tertinggi

terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,3 triliun, sementara realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,2 triliun.

Ada beberapa penyebab turunnya realisasi Inventasi di Aceh sejak tahun 2018-2022 diantaranya Pembangunan pabrik Semen Laweung masih sangat lambat atau tidak ada proses kemajuan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur/Kamirzu proses pembangunan kontruksinya belum berjalan sesuai perencanaan awal. beberapa pabrik pengolahan ikan di Kawasan Industri Perikanan Lampulo juga melambat. hal ini disebabkan pada tahun 2017 belum terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga proses pembangunannya terkendala. Selain hal tersebut menurunnya realisasi Investasi di Aceh juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan Kawasan Industri Ladong Aceh Besar maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dan Aceh Utara dan ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 sampai dengan pasca berakhirnya pandemi pada pertengahan tahun 2022. sedangkan terjadinya kenaikan nilai realisasi investasi yang begitu signifikan sebelum masa pandemi covid-19 pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 bahkan pada awal tahun 2020 karena iklim investasi dirasakan relatif membaik di Aceh. Terlaksananya realisasi investasi di Aceh juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan publik pada lintas sektor. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pemahaman secara holistik kepada semua sektor. Pelayanan publik harus dilakukan secara akuntabel, cepat dan murah.

O. Kepemudaan dan Olahraga

O.1. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada tahun 2024 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 68 (OKP) sama dengan tahun 2022. Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya

merupakan partner pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa.

Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.86. berikut.

Tabel 2. 86
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2020-2024

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda	Orang	1.343.768	1.319.818	1.344.984	1.349.801	1.404.738
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	2	80	32	36	20
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	71	66	68	68	68

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025

Kualitas pemuda Aceh masih belum mengembirakan yang terlihat dari masih rendahnya jumlah pemuda yang berprestasi baik dalam bidang wirausaha, sosial, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda berprestasi Aceh Tahun 2024 adalah 20 orang menurun 44,44% dari tahun 2023 sebanyak 36 orang. Padahal secara kuantitas jumlah pemuda Aceh tahun 2024 meningkat sebesar 4,07% menjadi 1.404.738 pemuda (sumber Dinas Kependudukan dan Registrasi Aceh). Keadaan dan kondisi ini tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja namun banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya kualitas pendidikan pemuda Aceh yang stagnan di angka 76,67 selama 3 tahun terakhir (sumber: IPP Indonesia). Meskipun demikian, Aceh menempati peringkat 2 nasional pada dimensi pendidikan.

Kesehatan dan kesejahteraan pemuda Aceh juga belum mengembirakan, dimana (1) Indeks kesehatan pemuda Aceh tahun 2024 berada pada angka 0,433 dan masih berada pada kategori rendah (sumber: SDI 2024). Sedangkan indeks kesehatan dan kesejahteraan pemuda Aceh berada di angka 65,00 sejak 2 tahun terakhir (sumber: IPP 2023). Berdasarkan data IPP Aceh, Indeks kesehatan dan kesejahteraan pemuda Aceh mengalami penurunan signifikan hingga 5 poin dari tahun sebelumnya pada skor 70,00. (2) Angka pemuda yang merokok dalam sebulan terakhir berada pada rata-rata skor 23,12 (sumber: BPS Aceh).

Dalam hal penyalahgunaan narkoba, data BNNP Aceh menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95 persen menjadi 1,73 persen untuk kategori setahun terakhir pakai, dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47 persen menjadi 2,20 persen (sumber analisaaceh.com, 2024). Hal ini menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Aceh melalui kegiatan penyadaran pemuda dalam hal ini sosialisasi bahaya narkoba dan kegiatan lainnya mulai menunjukkan hasil yang mengembirakan.

O.2. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan *national character building* suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil pengukuran *Sport Development Index* (SDI) Tahun 2024, dimana:

- (1) Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka olahraga provinsi Aceh juga berada pada kategori tinggi dengan skor indeks 1,000, hal ini menunjukkan bahwa indeks ruang terbuka olahraga Aceh berada pada kategori tinggi.
- (2) Indeks literasi fisik yang mulai membaik pada skor 0,637 dengan kategori menengah, hal ini menunjukkan bahwa mulai meratanya pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggungjawab masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas fisik untuk kehidupan yang berkualitas.
- (3) Mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan olahraga meskipun berada dalam kategori rendah namun skor sudah mencapai 0,382.
- (4) Indeks kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang mulai membaik meskipun masih berada pada kategori rendah dengan indeks 0,433.

Dengan demikian mulai adanya hasil dari program dan kegiatan pembudayaan dan pembinaan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan pada ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina Pemerintah Aceh. Saat ini terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti sepakbola, badminton, tenis meja, futsal, voli, futsal, tinju, panjat tebing, atletik, senam dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak semua cabang olahraga tersebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh dan tidak semua atlet pada cabang olahraga tersebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh. Selain dikarenakan anggaran yang masih belum memadai, namun juga ketersediaan sumber daya manusia olahraga yang masih mencukupi baik pelatih, wasit dan calon atlet. Adapun cabang olahraga,

sumber daya manusia keolahragaan dan infrastruktur olahraga Aceh disajikan pada Tabel 2.87

Tabel 2. 87

Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2020-2024

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	24	29	14	19	27
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	456	309	309	219	172
3	Atlit Berprestasi	Orang	3	84	75	90	43
4	Pelatih Berprestasi	Orang	13	55	15	8	
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	84	56	35	35	35
6	Prestasi Olahraga	Cabor	1	30	12	16	9
7	Gedung Pemuda	Unit	1	1	1	1	1
8	Lapangan Olahraga	Unit	19	19	19	8	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025

Dari Tabel 2.87. di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 23 cabang olahraga binaan yang terbagi dalam 4 kegiatan binaan yaitu 1) Binaan PPLPD/SMAKON 15 jenis cabor, 2) Binaan PPLP 4 jenis cabor, 3) Binaan atlet prioritas peparpenas 2024 4 jenis cabor, 4) Binaan atlet prioritas peparpenas 8 jenis cabor cabang. Adapun total atlet binaan adalah 172 atlet dengan pelatih diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibit unggul baru.

Adapun 27 cabang olahraga binaan pada Tahun 2024 diantaranya yaitu: a) Binaan PPLP, yaitu: 1) Atletik; 2) Angkat Besi; 3) Panahan; 4) Pencak Silat, b) Binaan PPLPD/ SMAKON, yaitu : 1) Karate; 2) Tarung Derajat; 3) Sepakbola; 4) Sepak Takraw; 5) Taekwondo, 6) Bola Voly; 7) Kempo; 8) Tinju; 9) Anggar, 10) Bulutangkis; 11) Dayung, 12) Atletik, 13) Angkat Besi, 14) Panjat Tebing, 15) Wushu, c) Binaan Atlet Prioritas Peparpenas, yaitu: 1) Menembak, 2) Atletik, 3) Tenis Meja, 4) Catur, 5) Angkat Berat, 6) Bulutangkis, 7) Anggar, 8) Bocica.

Dari 27 cabor yang dibina 9 cabang olahraga binaan menyumbang medali yaitu: 1) Panahan, 2) Karate, 3) Taekwondo, 4) Anggar, 5) Dayung, 5) Atletik, 6) Tenis Meja, 7) Catur, 8) Angkat Besi, dan 9) Pencak Silat. Selain itu, terdapat cabang olahraga yang juga menyumbangkan medali meskipun bukan binaan yaitu: 1) Catur Kilat Perseorangan, 2) Olah Vocal, dan 3) Dum Domino.

Pada Tahun 2024 jumlah pelatih yang mengukir prestasi berjumlah 8 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga prestasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Sementara pembangunan lapangan olahraga pada tahun 2024 sebanyak 1 unit. Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/ 2023, Aceh berhasil melaksanakan event nasional ini secara sukses baik sukses pelaksanaan, maupun sukses prestasi PON. Dari segi pelaksanaan, berbagai kontingen dari provinsi lain mengakui bahwa pelaksanaan PON di Aceh akan menjadi standar baru dalam

pelaksanaan PON ke depan dimana mulai dari penerimaan kontingen di bandara yang ramah dengan menyediakan berbagai fasilitas kenyamanan hingga keamanan bagi seluruh kontingen atlet dengan tagline “peumulia jamee adat geutanyo”. Disisi prestasi, Aceh sukses menduduki posisi 5 nasional dengan total perolehan medali 192 yaitu 65 medali emas, 48 perak, dan 79 perunggu.

P. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Pelayanan perpustakaan yang diberikan dapat diakses melalui 2 (dua) cara yaitu akses layanan perpustakaan berkunjung langsung ke gedung perpustakaan dan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui aplikasi playstore i-pustaka, dimana masyarakat dapat memperoleh bahan bacaan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke gedung layanan perpustakaan. Layanan i-pustaka merupakan salah satu inovasi bidang kearsipan yang diluncurkan tahun 2019.

Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan layanan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu informasi ilmu pengetahuan masyarakat melalui minat baca masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan yaitu jumlah judul buku cetak sebanyak 79.640 judul dan jumlah buku sebanyak 365.127 Eksemplar, sedangkan koleksi buku digital sebanyak 16.227 judul dan 153.630 Eksemplar. Hal ini terus meningkat dari tahun sebelumnya.

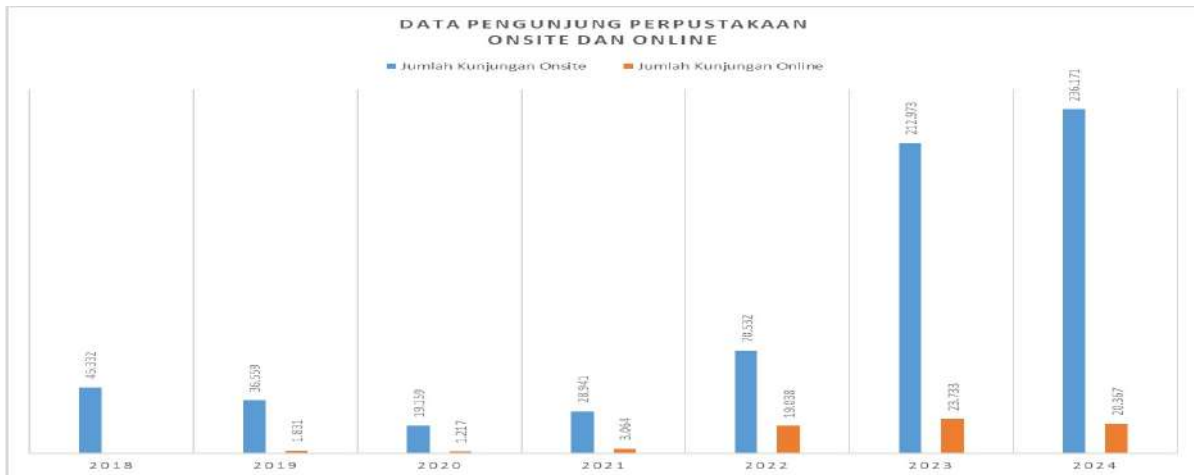
Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 2.88. berikut.

Tabel 2. 88
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Judul Buku					
	Buku cetak	65.278	66.004	63.071	72.342	79.640
	Buku digital	7.699	11.766	12.354	12.510	16.227
2	Jumlah Eksamplar Buku					
	Buku cetak	278.628	285.890	286.485	347.331	365.127
	Buku digital	46.045	86.709	123.989	127.084	153.630

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh setiap tahunnya terus meningkat sehingga berdampak positif kepada jumlah pemustaka baik secara offline maupun online, yang setiap tahunnya juga terus meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

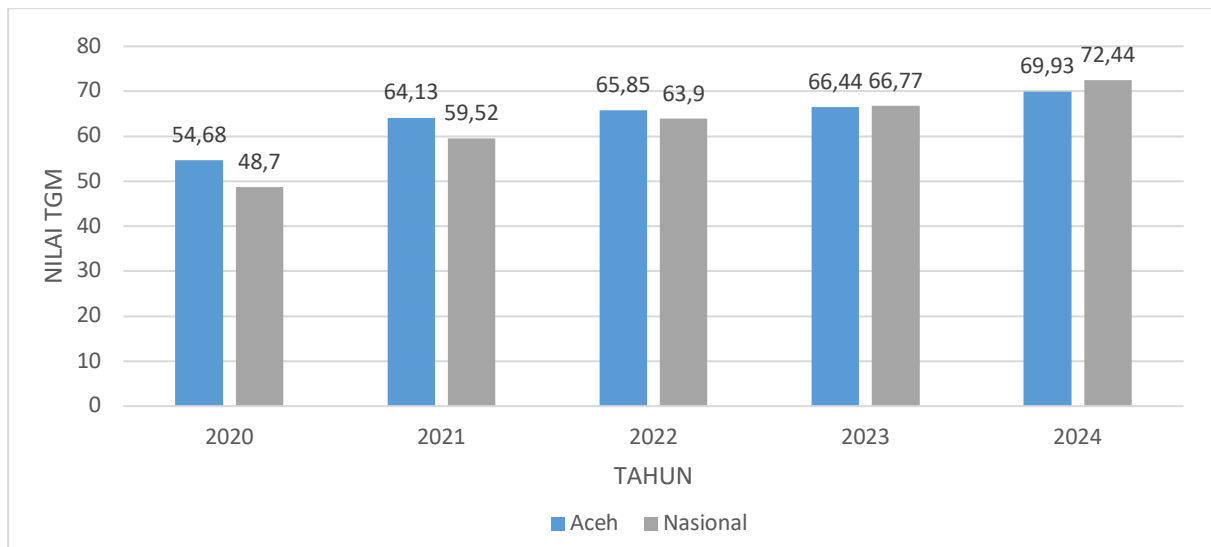


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Gambar 2. 68

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.68. diatas, jumlah pemustaka *offline* yaitu pemustaka yang berkunjung langsung ke gedung layanan perpustakaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, ini dikarenakan pandemi covid-19, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan pembatasan layanan perpustakaan untuk menghindari kerumunan dan juga kebijakan menutup layanan perpustakaan. Tahun 2021 ke tahun 2022 layanan perpustakaan kembali meningkat sebesar 41.591 pengunjung menjadi 70.532 pengunjung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kembali melakukan pembukaan layanan dengan tetap menjalankan protap pencegahan covid-19. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan juga dipengaruhi oleh peresmian dan pembukaan gedung layanan perpustakaan baru yang berada di jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh. Tahun 2024 pemustaka *offline* meningkat secara signifikan yaitu sebesar 236.171 pengunjung, terdiri dari pengunjung *offline* sebesar 236.171 pengunjung, sedangkan pengunjung perpustakaan secara online 20.367 pengunjung. Meningkatnya jumlah kunjungan ke pustaka, sangat berpengaruh dengan tingkat kegemaran membaca di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



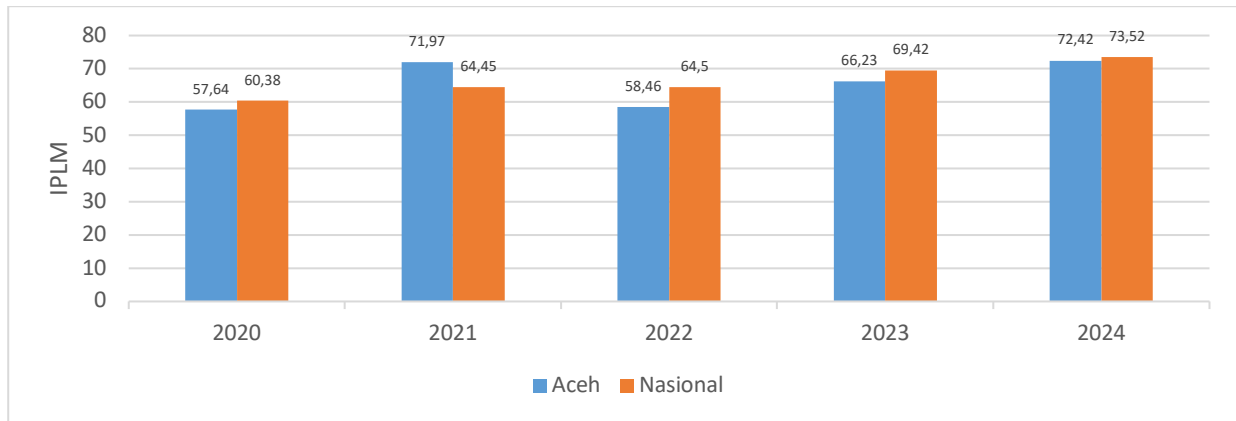
Sumber : Perpustakaan Nasional, 2025

Gambar 2. 69

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2024

Dari Gambar 2.64. diatas terlihat bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Aceh dibandingkan dengan nasional, dimana kebiasaan membaca masyarakat Aceh meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai TGM ini didapat dari hasil survei Perpustakaan Nasional yang dilakukan secara berkala. Data menunjukkan bahwa Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Aceh tahun 2024 yaitu sebesar 69,93 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja pada RPJMN 2020-2024. Terdapat 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu: (1) Pemerataan layanan perpustakaan; (2) Ketercukupan koleksi; (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan; (4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari; (5) Jumlah perpustakaan ber-SNP; (6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi; dan (7) Anggota perpustakaan. Pencapaian nilai IPLM Aceh Vs IPLM Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.70 berikut.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Gambar 2. 70

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2020-2024

Pencapaian IPLM Provinsi Aceh tahun 2024 sebesar 72,42 dan masuk dalam kategori sedang. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang hanya 66,23. Jika dibandingkan dengan angka nasional, IPLM Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi pembangunan literasi masyarakat.

Tabel 2. 89

Rekapan UPLM Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

No.	Unsur IPLM	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0015	0,00095	0,00102	0,00069	0,0033	0,0030	0,2841	0,4361	0,3212	0,4531
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	0,0929	0,08325	0,10789	0,08946	0,9208	1,5311	0,2736	0,3203	0,3815	0,3793
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0001	0,00001	0,00012	0,00006	0,0032	0,0033	1,0000	0,6508	1,0000	0,7811
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat (UPLM4)	0,0002	0,00135	0,00013	0,00073	0,4386	0,4144	0,0785	0,4520	0,3666	0,5327
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,0002	0,00012	0,00047	0,00017	1,7031	1,6833	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
6	Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,0046	0,01424	0,00750	0,01413	0,2481	0,3050	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

No.	Unsur IPLM	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,0216	0,02938	0,03407	0,03020	0,6852	0,5733	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
IPLM Skala (0-100)		57,64	61,55	71,97	64,45	58,46	64,48	66,23	69,42	72,42	73,52

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Selain menjalankan fungsi layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga melakukan kegiatan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*). Adapun data koleksi deposit Aceh disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 90
Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh

No.	Uraian	Jumlah Judul/Naskah			Jumlah Eksamplar			Keterangan
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Koleksi Buku Deposit dan KCKR	3.001	3.150	5.269	3.754	3.850	6.010	
2	Koleksi Buku Muatan Lokal	902	950	1.413	1.009	1.100	1.671	
3	Jumlah Naskah Kuno/Manuskrip yang telah ganti rugi	246	286	306	-	-	-	Naskah
4	Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/Alih Media	74	74	125	-	-	-	Naskah

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Tabel 2.90. diatas menyajikan data koleksi deposit sampai dengan akhir tahun 2024. Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan pustakawan yang profesional. Adapun data rinci mengenai jumlah fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.91. berikut.

Tabel 2. 91
Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022-2024

No.	Jabatan	2022										2023	2024
		Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan						
		L	P	II	III	IV	SMA	D ₃	S1	S2	S3		
1	Kabid/Koordinator												
2	Pustakawan Ahli Muda/Sub. Koordinator	3	5		7	1			7	1		8	8
3	Pustakawan Ahli Utama	1				1			1			1	1
4	Pustakawan Ahli Madya	5	8		4	9			11	2		15	14
5	Pustakawan Ahli Muda	7	10		17				17			24	14
6	Pustakawan Ahli Pertama	1			1				1			1	2
7	Pustakawan Penyelia		5		5		1	3	1			5	4
8	Pustakawan Mahir	1			1			1				1	1
	Jumlah	18	28	0	35	11	1	4	38	3	0	46	44

Sampai dengan tahun 2024, jumlah pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 44 orang dengan berbagai tingkat jabatan dan golongan. Jumlah tersebut tentu masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas utama yang harus dijalankan yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dari jumlah 44 orang fungsional pustakawan, yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi adalah sebanyak 4 (empat) orang.

Q. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh, bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD pengelola arsip secara baku tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 92
Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD
Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Arsip	5.781	6.065	7.201	9.775	9.954	Berkas
2	Jumlah Arsip Terolah	8.178	9.034	10.032	13.086	6.982	Berkas
3	Jumlah Arsip Belum Terolah	2.100	1.874	1.061	8.490	2.972	Boks
4	Jumlah Arsip yang telah Alih Media	3.931	10.333	14.000	6.830	7.000	Lembar
5	Jumlah OPD yang telah mengelola	4	4	5	15	21	SKPA

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Jumlah koleksi arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat dilihat pada tabel diatas. Pengolahan arsip dari tahun ke tahun terus meningkat, apabila kita lihat tabel di atas, pada Tahun 2024 jumlah arsip yang diolah menurun menjadi 6.982 berkas. Apabila dirata-ratakan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah arsip yang diolah pertahunnya sebanyak 7.474 berkas.

Sementara itu ditingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah mengelola arsip secara baku sebanyak 21 SKPA dari 46 SKPA atau sebesar 45,65 persen. Adapun yang dinilai diantaranya Daftar Arsip Aktif dan In Aktif, sarana dan prasana (*record center*, lemari, *filling cabinet*, dll), SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip).

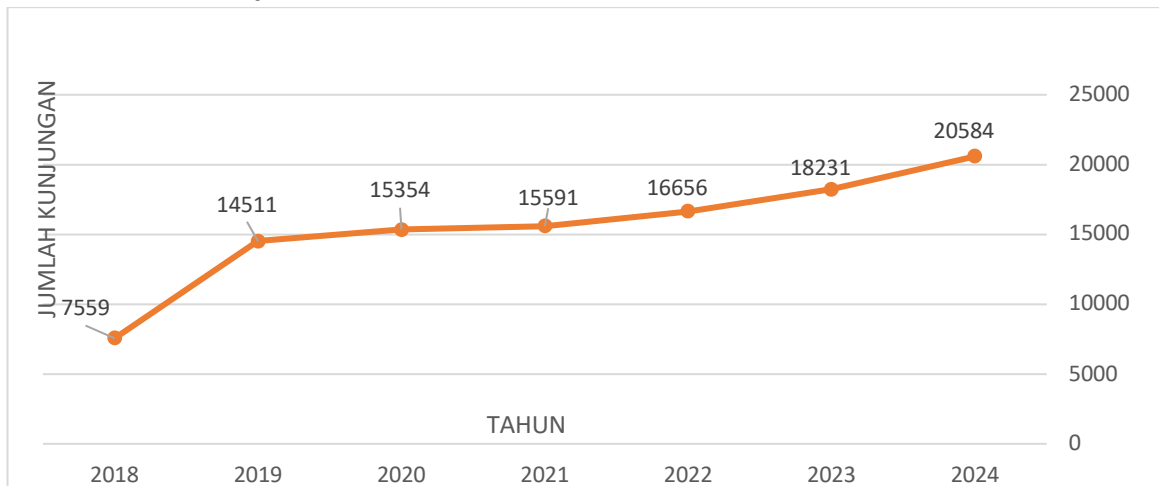
JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional. Secara umum, arsip yang telah diproses digitalisasi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan kemudian diakses oleh publik secara online melalui website JIKN. Saat ini, sudah tersedia informasi arsip dinamis dan statis, yang dapat diakses publik. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip pada JIKN Tahun 2019-2024 yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 93
Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Arsip yang diinput pada Sistem JIKN	5.000	5.000	5.500	5.733	4.405	Berkas
2	Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN	2	2	7	8	21	Simpul JIKN Kab/Kota

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 adalah sebanyak 5.500 berkas.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Gambar 2. 71

Jumlah Pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN Tahun 2018-2024

Adapun Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN sampai akhir 2024 sebanyak 21 Kabupaten/Kota. Semua Kabupaten/ Kota di Aceh sudah menerapkan aplikasi JIKN kecuali Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Sabang. Jumlah pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari grafik diatas bahwa kunjungan layanan arsip/JIKN terus terjadi peningkatan dan di Tahun 2024 meningkat menjadi 20.584 pengunjung. Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan arsiparis yang profesional. Pejabat fungsional arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024, diberbagai jenjang keahlian, mulai dari arsiparis ahli pertama, muda dan madya adalah sebanyak 18 orang. Sedangkan total Fungsional Arsiparis yang tersebar di 40 SKPA terdata sebanyak 108 Arsiparis yang terdiri dari berbagai jenjang keahlian. Jenjang Arsiparis didominasi oleh Arsiparis Ahli Muda sebanyak 61 Arsiparis, selanjutnya di ikuti oleh Arsiparis Ahli Madya sebanyak 19 Arsiparis dan Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 15 Arsiparis. Pada jenjang keterampilan, fungsional arsiparis sebanyak 5 orang pada jenjang arsiparis penyelia dan 8 orang pada jenjang arsiparis mahir.

Q. Gedung dan Bangunan Terbangkalai

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 masih menyisakan pembangunan beberapa gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbangkalai. Lokasi bangunan tersebar di 19 kabupaten/kota dengan jenis bangunan publik yang beragam, mulai dari gedung/bangunan untuk kebutuhan pendidikan, budaya, sumberdaya air, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan jembatan. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan

pemerintah kabupaten/kota perlu menuntaskan pembangunan gedung/bangunan yang terbengkalai sehingga fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 2. 94
Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG	LOKASI KAB/KOTA	TAHUN PELAKSANAAN	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN	SKPA PELAKSANA
				47	562.129.384.462	
1	Pemb.Stadion Olah Raga Sabang	Kota Sabang	2018	1	40.000.000.000	Dispora
2	Gedung RS Gigi Kedokteran USK; Gedung MM Fak. Ekonomi USK; Lab.Terpadu Tarbiyah UNMUHA; Ruang Dikti Keterampilan Hafiz Qur'an Deah Baro; Asrama Mahasiswa P. Aceh Kec. Meuraxa; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Gedung oncologycentre	Banda Aceh	2013 - 2021	8	253.559.095.000	Perkim, Dinkes
3	Sarpras Masjid Al-Ikhlas Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie; Jembatan Panca	Aceh Besar	2016 - 2018	2	44.400.000.000	Perkim, PUPR
4	Ruang Kuliah Yayasan P.T Islam Al Hilal Kab. Pidie	Pidie	2014	1	2.000.000.000	Disdik
5	RKB SMKN 1 Ulim; Padang HMT; Lanjutan 4 RKB Lt. 2 SMAN 1 Bandar Dua	Pidie Jaya	2015 - 2016	4	2.200.000.000	Disdik, Disnak
6	D.I. Aneuk Gajah Rheut; D.I. Mon Seukee Pulot	Bireun	2018 - 2020	2	45.000.000.000	Pengairan
7	Jmbt Rangka Baja Krueng Kreh - Pirak Timu; Jmbt Langkahhan; Jmbt Rayeek Pangee.	Aceh Utara	2015 - 2017	3	13.700.000.000	PUPR
8	Lab Kimia SMAN 4 Lhoks; Balai Promosi Perdagangan dan Industri Aceh; Gedung Kampus STIE dan STIA; Pabrik Garam Beryodium; Kontruksi Fisik Lanjutan; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Pasar Induk Kota Lhoks.	Lhokseumawe	2008 - 2018	7	33.916.289.462	Disdik, Perkim, Budpar, Indag
9	Lanjutan Lab. Kimia SMAN 1 Ranto Peureulak; Lanjutan RKB SMAN 1 Peureulak; Asrama IKAWI Limpuk Abes	Aceh Timur	2008 - 2014	3	3.904.000.000	Disdik, Perkim
10	Pembangunan RSU Regional Langsa	Langsa	2016	1	35.000.000.000	Dinkes
11	Stadion Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2009	1	40.000.000.000	Dispora
12	Sarana Kolam Renang; Lapangan H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka; Pemb. Komplek Reje Linge	Aceh Tengah	2008 - 2015	3	5.000.000.000	Disdik, Perkim, Dispora
13	Pemb. Lab Kimia SMAN 1 Putri Betung	Gayo Lues	2008	1	100.000.000	Disdik
14	RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane	Aceh Tenggara	2015	1	2.000.000.000	Perkim
15	Sarpras Mesjid Alue Peuyareng	Aceh Barat	2016 - 2018	1	15.000.000.000	Perkim
16	Pembangunan Lanjutan Kantor dan Ruang Pertemuan SMAN 4	Aceh Barat Daya	2007 - 2009	2	750.000.000	Disdik
17	STAI ARRAHMAN; Komplek Pendidikan Pasya Blangkejeren; Sarana Air Bersih SMKN Trumon Timur; Pembangunan Mushalla SMKN 1 Trumon Timur	Aceh Selatan	2014 - 2017	3	2.100.000.000	Dayah, Disdik
18	Kolam Renang Kota dan Kantor MPU	Subulussalam	2013 - 2020	2	8.500.000.000	Dispora, Perkim
19	Jembatan Kilangan	Singkil	2020	1	15.000.000.000	PUPR

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan bangunan dan gedung pada pemerintah kabupaten/kota dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 juga menyisakan kewajiban penuntasan pembangunan gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai yang tersebar di 17 kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 95

Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANGUNAN GEDUNG	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN
			39	563.620.000.000
1	Aceh Besar	Jembatan Lampanah Tunong; Jembatan Lam Sie	2	40.000.000.000
2	Pidie	Mesjid Raya Keumala Kec.Keumala; Gedung PDAM Tirta Dharma; Sarana Air Bersih Desa Lhok Panah; Mesjid Agung Al-Falah	4	175.700.000.000
3	Pidie Jaya	Pembangunan Pertokoan Tringgadeng 2 Lantai	1	1.500.000.000
4	Bireun	Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim; Pustu Lamkuta Kec. Jangka	2	370.000.000
5	Lhokseumawe	Jalan menuju Terminal Type A Kota Lhokseumawe	1	4.500.000.000
6	Aceh Timur	Revitalisasi Pasar Tradisional; Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Peunaron	2	7.800.000.000
7	Tamiang	Jalan Elak Tamiang Bypass; Jembatan Jalan Elak Bypass; Jembatan Pantai Keutapang; Pentas Seni Tamiang	4	141.000.000.000
8	Bener Meriah	Lanjutan Stadion Sepak Bola Mini; Jembatan Gp. Pilar Jaya, Kec. Bandar	2	2.000.000.000
9	Gayo Lues	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Akul; Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Uning Pune	2	3.700.000.000
10	Aceh Tenggara	Ruang Ibadah SDN Lawe Sekerah; RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane; Jalan Lingkungan Pasar Salim Pining, Simpang Semadan dan Titi Pasar; Kantor SDN Rambung Teledak; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Bale Lutu ; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Uning Sigugur; Mesjid Kec. Lawe Alas	6	54.150.000.000
11	Aceh Jaya	Lapangan Volly Gampong Dayah Baro	1	400.000.000
12	Aceh Barat	Stadion Alue Peunyareng Rehab Stadion	1	10.000.000.000
13	Nagan Raya	Pembangunan Gor Kec. Kuala Pesisir	1	1.700.000.000
14	Aceh Barat Daya	Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya	1	70.000.000.000
15	Aceh Selatan	Tapaktuan Sport Center (TSC); Bundaran Mesjid Istiqamah (MI) Tahap II	2	27.100.000.000
16	Subulussalam	Lanjutan Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Subulussalam	1	1.500.000.000
17	Simeulue	Gedung Stadion Kabupaten Simeulue; Pengembangan wisata Pantai Ganting; Landscape Taman PAUD Mulia Dharma; Sarana dan Prasarana MIN Sinabang; Sarana Komplek BLK; Gedung Pelatihan Maritim	6	22.200.000.000

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

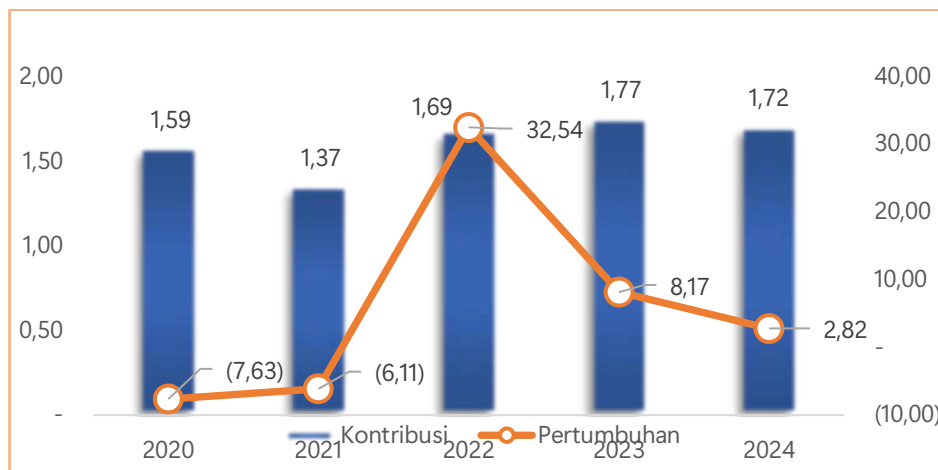
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun di Provinsi Aceh. Peningkatan sektor pariwisata dapat menggerakkan berbagai sektor lain dalam perekonomian seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri, perdagangan, transportasi, pertanian dan lain sebagainya. Secara umum, sektor pariwisata dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat

melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata dan merupakan kategori penanda sektor pariwisata dalam struktur PDRB.

Pariwisata di Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara khusus, tapi juga mampu memberikan dampak positif bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024 (diolah)

Gambar 2. 72

**Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata
(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Aceh (Persen).
Tahun 2020 - 2024**

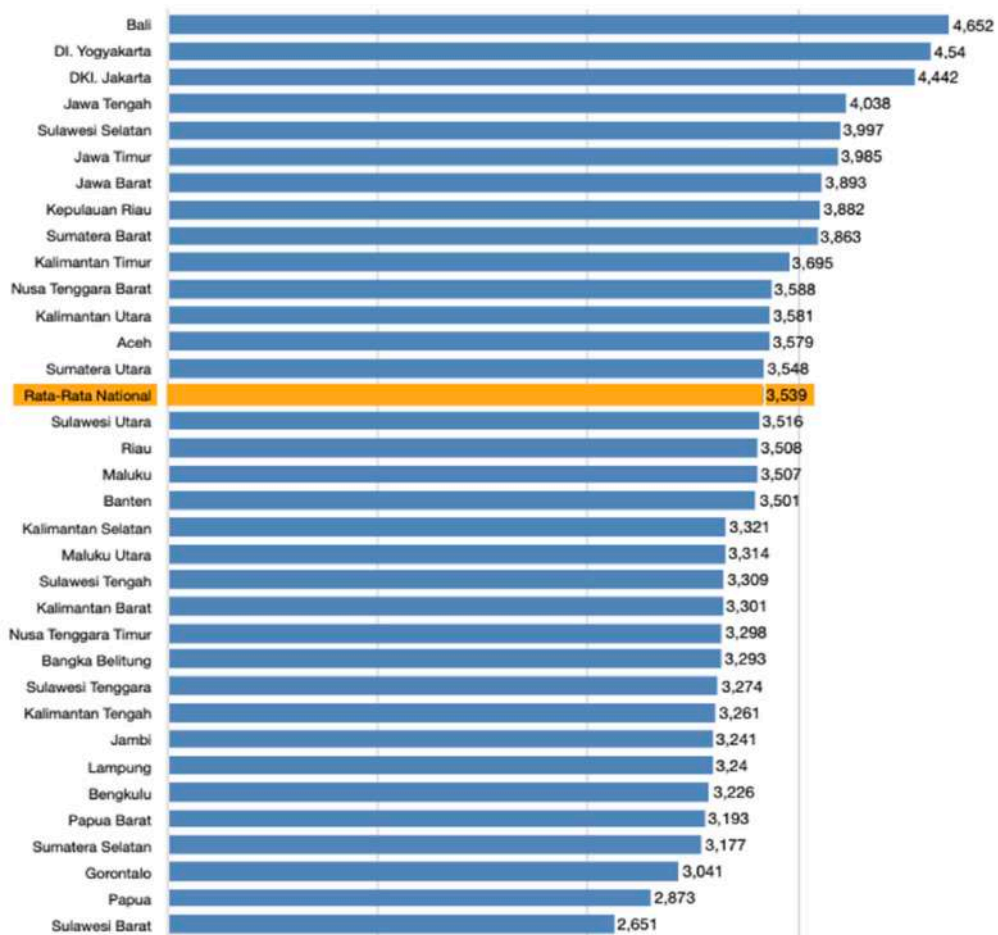
Dalam kurun waktu 2020-2024 pertumbuhan sektor pariwisata di Aceh menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Dari grafik diatas dapat dilihat pertumbuhan sektor pariwisata mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen pada tahun 2020. Sektor ini mengalami tekanan paling besar akibat pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 sehingga mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen pada 2020 dan 6,11 persen pada tahun 2021. Namun sektor pariwisata kembali tumbuh dengan sangat signifikan dan mengalami rebound pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 32,54 persen akibat dari dampak positif pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Pada tahun 2023 sektor pariwisata merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, dengan pertumbuhan sebesar 8,17 persen. Pada tahun 2024 sektor ini terus mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,82 persen, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan gambaran level aktivitas kepariwisataan yang berangsur normal dan secara kuantitatif hilangnya pengaruh efek *rebound* pada tahun 2022.

Selain infrastruktur sarana dan prasarana pada destinasi maupun objek wisata, permasalahan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam peningkatan pengembangan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat umum. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand "*The Light of Aceh*" atau disebut juga "*Cahaya Aceh*" belum mampu dioptimalkan.

A. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2022

Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2022. Indikator ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran nasional pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan di Indonesia dan mengukur besaran peran Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan nasional. Aceh mampu bersaing secara nasional dengan meraih peringkat ke-13 dalam capaian indeks tersebut, dengan nilai indeks sebesar 3,58. Sedangkan pada peringkat pertama diperoleh oleh Provinsi Bali dengan nilai sebesar 4,65 dan paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 2,65.

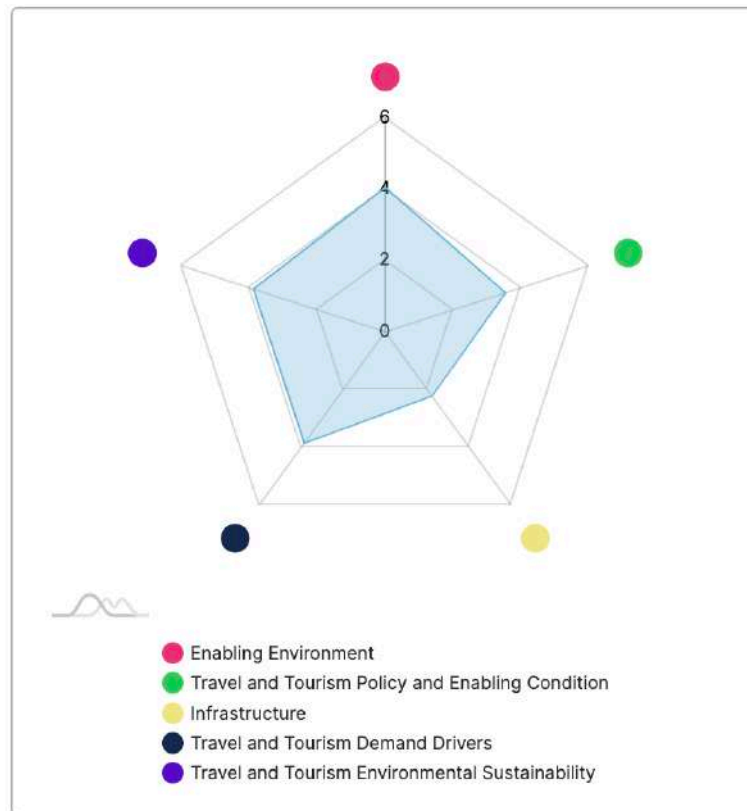
Adapun perbandingan nilai capaian Aceh secara nasional dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Kemenparekraf 2024

Gambar 2. 73
Capaian Pembangunan Kepariwisata Tingkat Provinsi

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Aceh menduduki peringkat ke-13 dari 35 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 Sub Indeks Penilaian IPKN yaitu, Enabling Environment, Travel and Tourism Policy and Conditions, Infrastructure, Travel and Tourism Demand Drivers, dan T&T Sustainability. Berikut nilai capaian Aceh per Sub Indeks :



Sumber: Kemenparekraf 2024

Gambar 2. 74

Gambar Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub indeks

Dari data yang dirilis Kemenparekraf dapat dijelaskan nilai dari grafik diatas per sub indeks sebagai berikut:

- 1) *Enabling Environment* : Aceh mencapai skor 4,05;
- 2) *Travel & Tourism Policy and Conditions*, : Aceh mencapai skor 3.55;
- 3) *Infrastructure* : Aceh mencapai skor 2.23;
- 4) *Travel & Tourism Demand Drivers*, : Aceh mencapai skor 3.86;
- 5) *Travel & Tourism Environmental Sustainability*, : Aceh mencapai skor 3.89.

Nilai Provinsi Aceh paling tinggi terdapat pada sub indeks *Enabling Environment*, hal ini menunjukkan kondisi pemungkin di Aceh yang mendukung perkembangan pariwisata cukup baik, terutama pada indikator kesehatan dan higienitas, lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan. Pada Sub Indeks *T&T Demand Drivers* Aceh bahkan meraih peringkat 5 besar dengan skor 3,86, hal ini menunjukkan daya saing Aceh sangat unggul secara nasional terutama pada sumber daya alam dan sumber daya budayanya. Namun Aceh masih sangat lemah pada sub indikator infrastruktur, baik infrastruktur pelayanan pada objek wisata maupun infrastruktur pendukung seperti transportasi udara dan transportasi laut.

Pembangunan pariwisata Aceh merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi alam yang kaya, budaya yang

unik, dan sejarah yang menarik, menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Aceh. Dari ketiga Indikator tersebut pembangunan pariwisata dihitung untuk memperoleh ranking dari seluruh provinsi se-Indonesia, tahun 2022 Provinsi Aceh berada di peringkat ke-13.

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan pariwisata di Aceh adalah memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan masyarakat dan penguatan kearifan lokal sosial ekonomi di Aceh.

B. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2019 - 2023

Secara umum kondisi kepariwisataan Aceh dapat dikatakan mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari mulai meningkatnya jumlah kunjungan wisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh yang terus mengalami pemulihan kembali pasca terdampak covid pada tahun 2020-2021, sebagaimana data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 96
Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisatawan Nusantara	4.142.179	5.534.405	6.954.578	7.270.318	12.924.997
2	Wisatawan Mancanegara	10.402	-	2.632	29.848	33.854

Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Dari data diatas tercatat pada tahun 2024 terdapat sebanyak 12.924.997 kunjungan wisatawan nusantara, hal ini menandakan minat kunjungan wisatawan dari provinsi lain terhadap Aceh mulai meningkat kembali dibandingkan tahun 2021 dan 2022, namun belum kembali pada kondisi awal ditahun 2019 dimana terdapat 16.660.786 kunjungan ke Aceh. Hal yang serupa juga dialami pada jumlah wisatawan mancanegara, dimana pada tahun 2021 tidak ada kunjungan sama sekali akibat dari pembatasan sosial mulai membaik pada tahun 2022 dimana terdapat 2.632 kunjungan wisata dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2024 dengan jumlah kunjungan wisata sebanyak 33.854 kunjungan wisatawan manca negara.

Selain infrastruktur sarana dan prasarana pada destinasi maupun objek wisata, permasalahan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam peningkatan pengembangan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat umum. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand "The Light of Aceh" atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

2.1.3.3.2. Pertanian

Pertanian masih menjadi sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Lapangan Usaha Pertanian secara umum (termasuk Kehutanan dan Perikanan) tetap menjadi lapangan usaha terbesar berdasarkan PDRB Aceh. Perkembangan PRDB Aceh berdasarkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

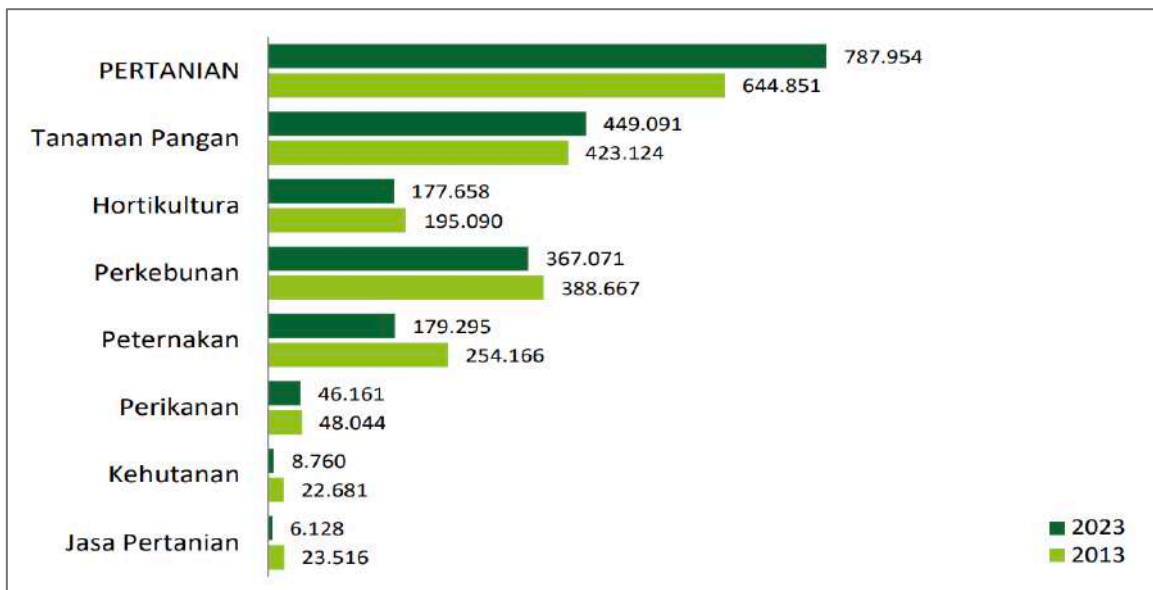


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 75

PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga yang berusaha atau menggeluti lapangan usaha ini. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor di Provinsi Aceh (rumah tangga) tahun 2013 dan 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah Rumah Tangga yang bekerja pada sektor Pertanian bertambah secara signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Jika dilakukan pemilahan berdasarkan sub sektor, maka tanaman pangan menjadi sub sektor terbesar, diikuti oleh Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 76

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh (rumah tangga), 2013 dan 2023

Tabel 2. 97

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit)

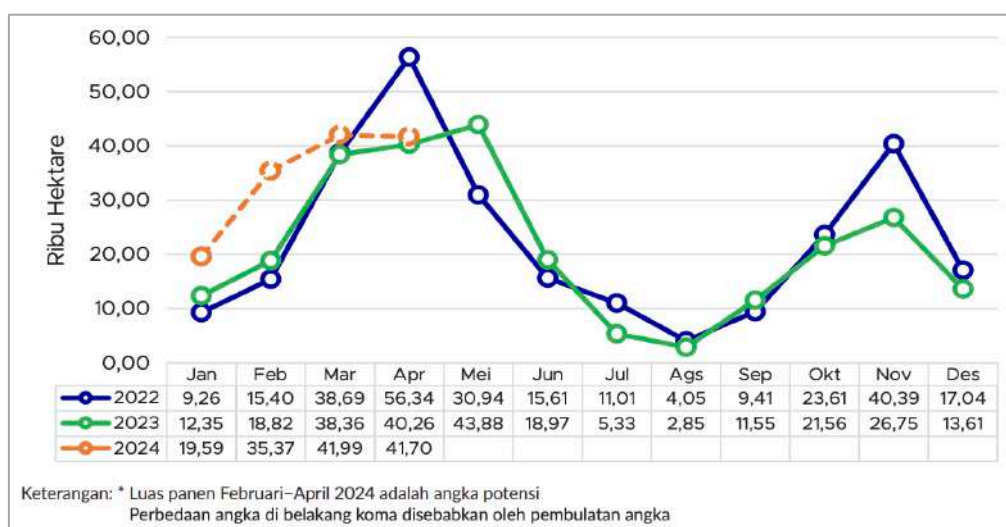
Subsektor	Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Usaha Pertanian Lainnya (UTL)
(1)	(2)	(3)	(4)
PERTANIAN			
Tanaman Pangan	465.507	0	33
Hortukultura	180.046	0	129
Perkebunan	372.452	85	52
Peternakan	181.726	1	43
Perikanan	47.242	3	45
Kehutanan	8.804	2	0
Jasa Pertanian	6.210	1	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Sementara itu jumlah Usaha Pertanian Perorangan pada sub sektor tanaman menempati urutan pertama yang terbesar, sementara Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum terdapat pada sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian lainnya

Pada Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 4 komoditi unggulan Aceh, yaitu: Padi, Jagung, Cabai Besar dan Bawang Merah. Dari keempat komoditi ini, Padi merupakan jenis tanaman pangan utama yang memiliki luas lahan dan produksi paling besar di Aceh. Meskipun memiliki luas lahan terbesar, namun

Aceh mengalami degradasi lahan sawah yang cukup besar. Luas lahan baku sawah di Aceh pada tahun 2018 sebesar 260.428 Ha. Pada tahun 2019, sesuai dengan SK Menteri ATR BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, berkurang menjadi 213.997 Ha. Hal ini terjadi akibat dari alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya. Berkurangnya luas lahan baku sawah telah menyebabkan berkurangnya luas panen padi di Aceh. Disamping akibat dari degradasi lahan, Aceh juga memiliki permasalahan tidak berfungsinya lahan sawah akibat tidak adanya jaringan irigasi yang memadai, sehingga usaha pertanian sangat tergantung pada curah hujan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

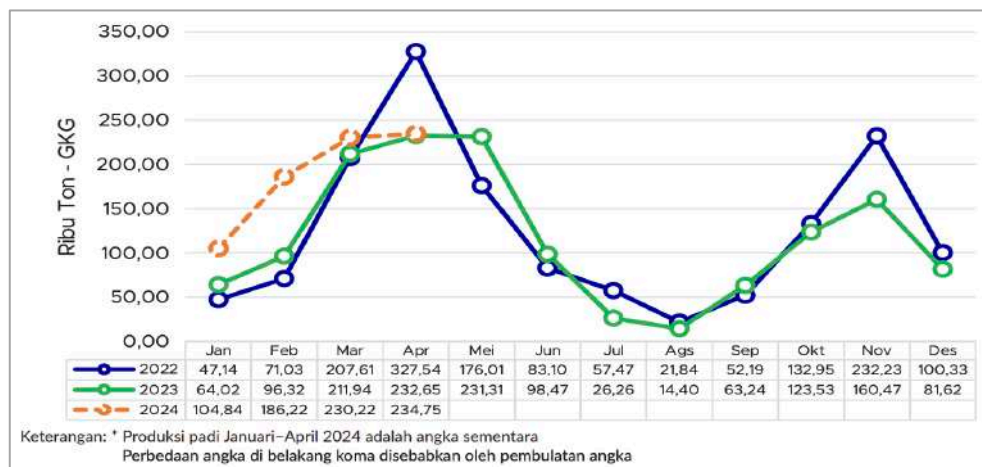
Gambar 2. 77

Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Aceh (Ribu Hektare), Tahun 2022–2024*

Dari grafik di atas terlihat bahwa luas Panen Padi Hal ini semakin diperparah dengan semakin seringnya terjadi bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Aceh. Realisasi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 254,29 ribu hektare, atau mengalami penurunan sebesar 17,46 ribu hektare (6,43 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 271,75 ribu hektare.

Puncak panen padi pada 2023 terjadi pada bulan Mei berbeda dengan 2022 yang terjadi pada bulan April. Luas panen padi pada Mei 2023 adalah sebesar 43,88 ribu hektare, sedangkan pada April 2022 luas panen padi mencapai 56,34 ribu hektare. Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2024 mencapai 19,59 ribu hektare, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2024 diperkirakan seluas 119,07 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari–April 2024 diperkirakan mencapai 138,66 ribu hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 28,86

ribu hektare (26,29 persen) dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari–April 2023 yang sebesar 109,79 ribu hektare.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 78

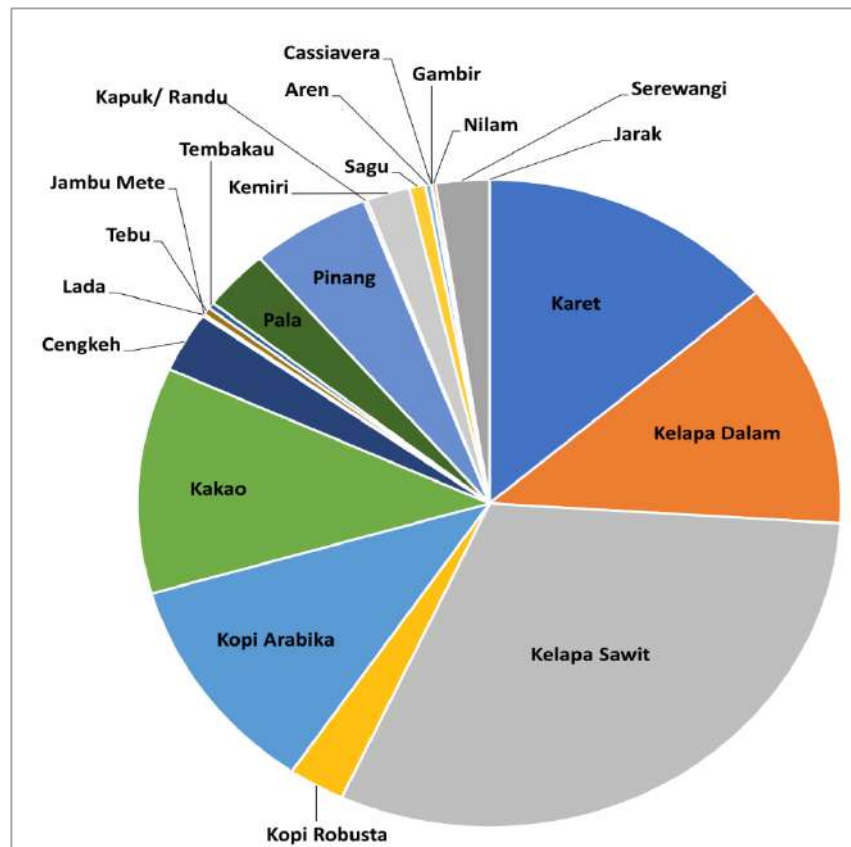
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ribu Ton-GKG), 2022–2024*

Produksi padi di Provinsi Aceh sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 1,40 juta ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 105,22 ribu ton GKG (6,97 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 1,51 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2023 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 232,65 ribu ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sekitar 14,40 ribu ton GKG.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Petani Padi adalah kegagalan panen akibat bencana alam, khususnya banjir. Setiap tahunnya ribuan hektare lahan padi terendam banjir yang kemudian akan mati yang berujung gagal panen. Dengan demikian petani total akan merugi, terutama biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari menggarap sawah hingga biaya untuk mendapatkan sarana produksi pertanian atau saprotan, yang meliputi benih, pupuk, dan pestisida. Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh.

2.1.3.3.3. Perkebunan

Sub Sektor Perkebunan menyumbangkan kontribusi terbesar kedua setelah sub sector tanaman pangan dan hortukultura. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Kelapa Dalam.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023

Gambar 2. 79
Proporsi Komoditi pada sub Sektor Perkebunan

Tabel di bawah ini menunjukkan Luas Lahan, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani dari komoditi perkebunan yang dihasilkan oleh 23 kabupaten/kota di Aceh.

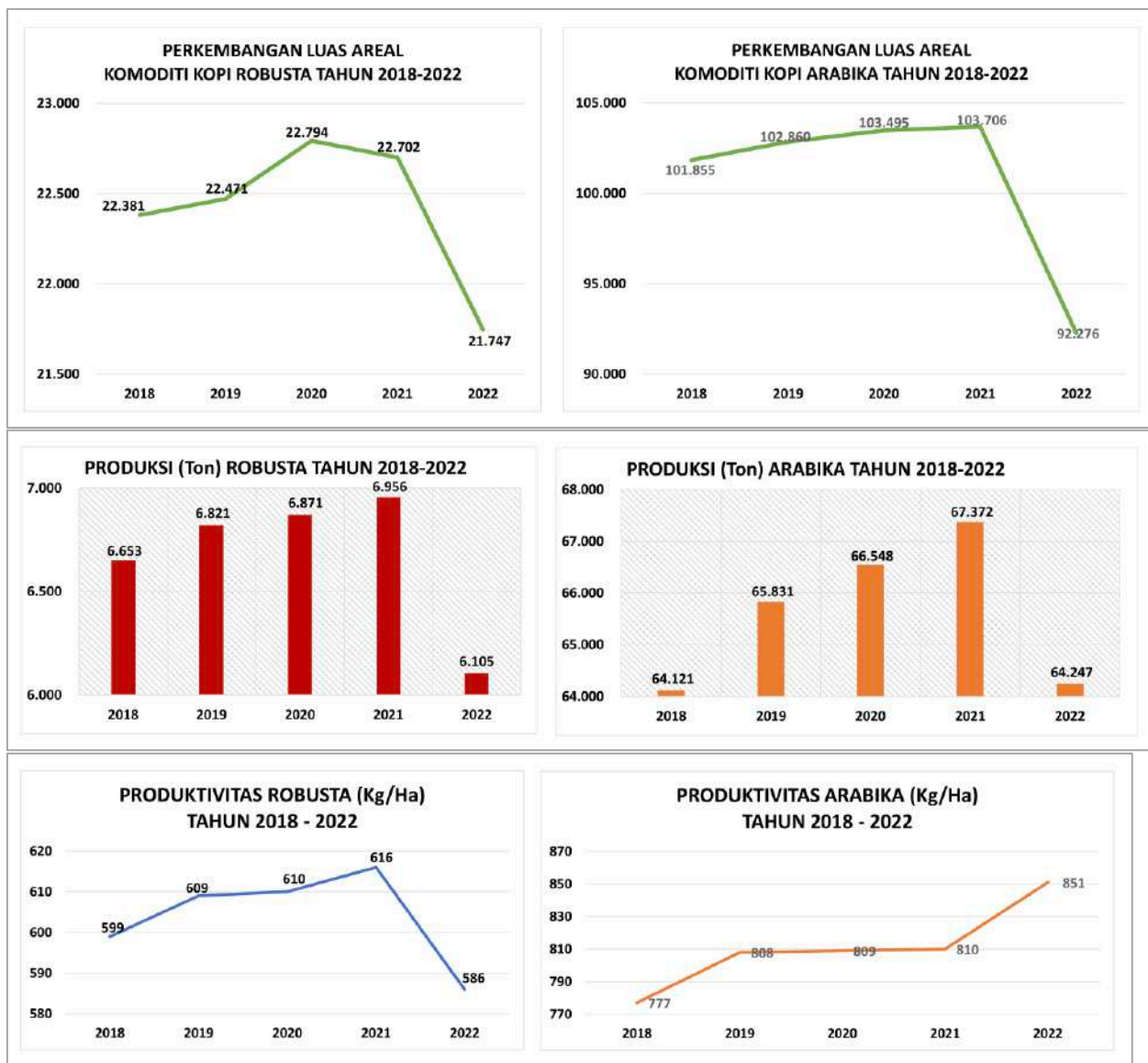
Tabel 2. 98
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani pada Sub sektor
Perkebunan Tahun 2023

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Wujud Produksi
		TBM	TM	TR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nasional								
1.	Karet	22.609,46	72.362,52	19.940,02	114.912,00	61.596,76	851,22	91.187	K3
2.	Kelapa Dalam	11.744,17	74.901,77	16.133,75	102.779,69	62.787,78	838,27	145.420	Kopra
3.	Kelapa Sawit	65.772,25	169.936,95	23.282,36	258.991,56	459.727,37	2.705,28	144.871	CPO
4.	Kopi Robusta	4.955,96	10.425,45	6.365,50	21.746,91	6.105,45	585,63	24.709	Biji Kering
	Arabika	7.818,56	75.473,85	8.983,69	92.276,10	64.247,34	851,25	81.141	Biji Kering
5.	Kakao	23.511,05	52.147,64	18.971,83	94.630,52	36.595,64	701,77	120.493	Biji Kering
6.	Cengkeh	6.368,10	9.592,95	9.459,30	25.420,35	5.738,72	598,22	23.626	Bunga Kering
7.	Lada	235,69	423,02	261,85	920,56	267,00	631,18	2.374	Lada Hitam
8.	Jambu Mete	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering
9.	Tebu	3.092,32	2.754,81	-	3.092,32	19.119,69	6.940,48	4.079	Gula Merah
10.	Tembakau	2.543,30	1.636,00	-	2.543,30	2.085,44	1.274,72	4.053	Daun Kering
	Daerah								
11.	Pala	9.316,70	10.447,44	5.885,25	25.649,39	6.649,58	636,48	30.573	Biji Kering
12.	Pinang	10.086,18	32.575,05	3.514,96	46.176,19	18.227,81	559,56	83.779	Biji Kering
13.	Kapuk / Randu	49,66	783,05	393,50	1.226,21	268,70	343,14	5.810	Serat Kering
14.	Kemiri	1.363,80	12.667,85	2.709,05	16.740,70	8.601,40	678,99	21.327	Biji Kering
15.	Sagu	1.967,16	3.415,02	844,15	6.226,33	1.631,84	477,84	12.405	Tepung
16.	Aren	395,94	1.441,41	265,51	2.102,86	914,79	634,65	5.470	Gula Merah
17.	Cassiavera	52,36	93,70	103,72	249,78	46,47	495,94	1.359	Kulit Kering
18.	Gambir	13,00	91,00	11,00	115,00	57,72	634,29	216	Getah Bening
19.	Nilam	1.321,00	1.015,00	-	1.321,00	181,40	178,72	3.301	Minyak
20.	Sereh Wangi	20.634,55	18.832,80	-	20.634,55	3.189,71	169,37	20.127	Minyak
21.	Jarak	2,70	14,00	6,00	22,70	10,00	714,29	30	Biji Kering
	Jumlah	193.853,91	551.031,28	117.131,44	837.778,02	758.050,61	1.375,69	826.350	

Sumber: Statistik Perkebunan Aceh. 2024 (diolah)

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) kondisi luasan areal tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana pada tahun 2018 luas areal perkebunan sebesar 838.538 Ha, pada tahun 2021 menjadi 845.580 ha, namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 837.778 Ha. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari dikeluarkannya lahan-lahan perkebunan yang masuk di dalam kawasan hutan.

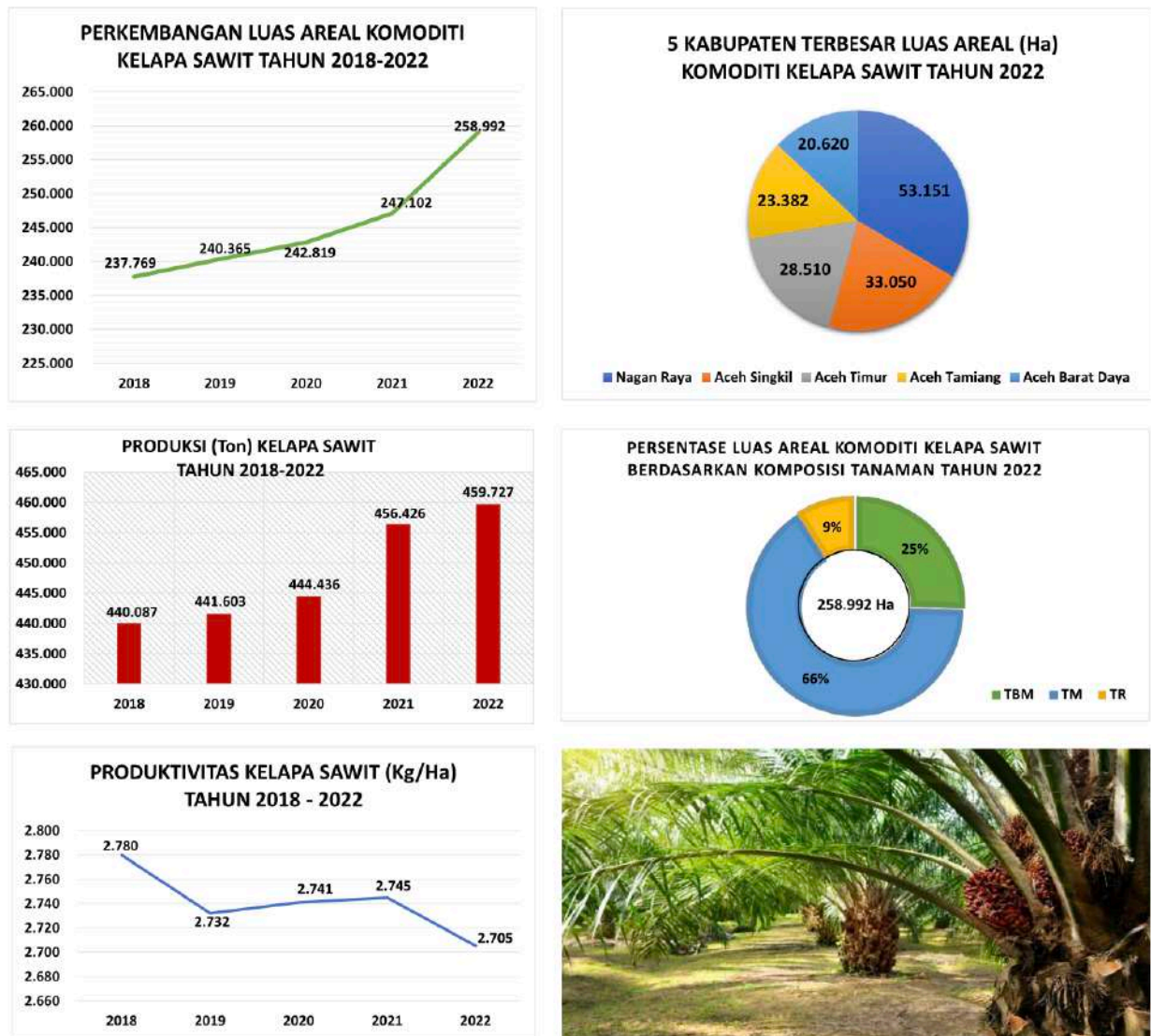
Kopi merupakan komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi cukup baik dan menjadi salah satu komoditi ekspor Aceh. Aceh memiliki 2 jenis kopi andalan, yaitu: Robusta dan Arabika. Kopi Robusta terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh, sementara itu, Kopi Arabika hanya dibudidayakan di 5 (lima) kabupaten, yaitu: Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues dan Pidie.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023

Gambar 2. 80
Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta dan Arabika Tahun 2018-2022

Kelapa Sawit merupakan tanaman perkebunan andalan Aceh saat ini. Kelapa Sawit utamanya dibudidayakan di 15 kabupaten/kota di Aceh. Kelapa Sawit juga menjadi komoditi andalan ekspor Aceh, terutama untuk produk Crude Palm Oil (CPO).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023

Gambar 2. 81

Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2018-2022

2.1.3.3.4. Peternakan

Komoditas peternakan masih menjadi andalan tersendiri di Aceh, meskipun sub sektor peternakan ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan asal hewani yang dibutuhkan para konsumen sehingga masih harus didatangkan dari luar daerah. Namun demikian, secara umum sub sektor peternakan telah mampu memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2. 99
Produksi Daging dan telur di Aceh Tahun 2020-2024

No	Jenis Daging	Jumlah Produksi (Ton)/Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	435.376	455.177	533.593	11.011	11.006
2	Sapi Perah	19	28	19	21	N/A
3	Kerbau	103.866	112.402	124.161	1.916	1.945
4	Kambing Potong	634.073	649.511	657.012	1.361	1.342
5	Kambing Perah	686	451	631	648	N/A
6	Domba	102.000	100.760	118.914	118.958	389.415
7	Babi	1.361	1.631	2.086	2.093	5.813
8	Kuda	2.996	3.310	1.802	1.811	N/A
9	Ayam Ras Pedaging	31.232.588	34.047.386	14.498.541	14.498.562	43.729.453
10	Itik	1.721.992	1.714.738	2.381.401	2.381.428	351.132
11	Itik Manila	613.828	465.571	540.562	540.580	88.115
12	Puyuh	95.181	80.202	92.946	92.992	5.034

Sumber: Dinas Peternakan Aceh

Apabila dilihat dari capaian target, maka dapat dikatakan bahwa produksi produksi daging dan telur telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian capaian ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging dan telur sehingga perlu didatangkan dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri.

Dalam upaya Pemerintah mencapai swasembada daging dari hewan ruminansia dan non ruminansia, Provinsi Aceh membutuhkan berbagai upaya terutama menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Aceh terus menerus berupaya meningkatkan sektor peternakan, berbagai langkah dilakukan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui revitalisasi peternakan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Upaya yang dilakukan melalui revitalisasi peternakan sejak beberapa tahun lalu adalah peningkatan kemampuan peternak dan pendukungnya, peningkatan ketahanan pangan, akses petani terhadap teknologi, pengolahan hasil-hasil peternakan dan pemasaran yang bisa diterima oleh masyarakat konsumen sebagai kelompok demand, perbaikan iklim usaha peternakan secara menyeluruh, peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui peningkatan mutu serta efisiensi distribusi dan pemasaran.

Tabel 2. 100
Produksi Daging dan Telur Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2021-2023

SASARAN PRODUKSI HASIL TERNAK PER KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2022															
NO	KABUPATEN/KOTA	DAGING (Kg)								TELUR (Kg)				SUSU SAPI	
		SAPI	DOMBA	KAMBING	KERBAU	BABI	KUDA	AYAM RAS PEDAGING	AYAM RAS PETELUR	AYAM BURAS	ITIK	AYAM BURAS	AYAM RAS PETELUR		ITIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Simeulue	12.866	-	15.863	165.750			27.083	1.067,00	36.540	2.500	38.980	8.500	15.895	
2	Aceh Singkil	149.989	5.300	28.875	60.375	8.580,00		27.449	2.121,00	15.779	12.021	16.832	16.894	76.406	
3	Aceh Selatan	138.885	14.663	212.625	298.313			796.809	7.328,00	483.771	10.300	516.076	58.387	65.467	
4	Aceh Tenggara	563.824	4.600	49.113	63.375	109.138,00		156.439		91.184	21.347	97.274		135.683	
5	Aceh Timur	786.428	17.113	77.663	12.750			1.996.830	91.486,00	404.421	36.133	431.428	728.901	229.661	
6	Aceh Tengah	151.575	25.900	47.075	192.375			499.543	421,00	66.335	28.891	70.764	3.352	183.637	
7	Aceh Barat	170.796	1.663	141.538	428.625			2.647.537	256,00	291.247	7.805	310.687	2.043	49.610	
8	Aceh Besar	2.119.406	38.725	303.688	146.438			6.590.918	29.170,00	1.227.271	87.913	1.309.226	232.409	558.777	
9	Pidie	89.183	5.800	106.100	121.125			2.077.872		664.916	208.667	741.322		1.327.579	
10	Bireuen	1.561.751	146.175	306.688	1.500			2.262.689	4.012,00	880.878	156.726	938.702	31.970	996.165	
11	Aceh Utara	2.181.799	65.863	222.100	323.625			22.523.000	20.163,00	2.347.114	222.226	2.503.850	160.647	1.412.493	
12	Aceh Barat Daya	101.344	9.450	90.450	188.438			482.061	300,00	436.175	32.142	465.302	2.394	204.287	
13	Gayo Lues	145.583	21.588	47.738	66.375			590.267	237,00	374.375	51.124	399.374	1.890	324.953	
14	Aceh Tamiang	893.588	46.425	77.138	2.063			635.271	3.004,00	220.607	12.817	235.338	23.932	81.471	
15	Nagan Raya	343.335	8.625	34.350	428.438			627.442	4.630,00	44.876	24.874	47.873	38.487	158.105	
16	Aceh Jaya	312.315	-	35.500	81.750			1.169.746		211.888	31.606	226.037		200.888	
17	Bener Meriah	157.568	18.900	26.038	132.188			440.053	971,00	210.425	9.692	224.477	7.731	61.607	
18	Pidie Jaya	385.635	9.963	66.613	33.750			1.594.887		319.571	65.327	340.912		415.227	
19	Kota Banda Aceh	511.654	1.013	39.900	12.563					81.655	4.512	87.108		28.680	
20	Kota Sabang	103.459	225	10.325	3.188			286.057		73.781	2.318	78.708		14.732	
21	Kota Langsa	401.145	6.788	41.013	5.250			3.837.565	243,00	325.063	38.452	346.770	1.938	244.405	
22	Kota Lhokseumawe	703.943	925	62.450	1.500			776.283	2.343,00	180.363	65.440	192.407	18.662	415.939	
23	Kota Subulussalam	28.905	4.163	3.588	4.688	4.010,00		1.094.290	1.881,00	126.176	3.780	134.802	14.994	24.023	
	JUMLAH	12.014.966	453.467	2.046.431	2.774.442	121.728		51.140.091	169.633	9.144.411	1.136.813	9.755.059	1.353.131	7.225.700	

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, 2022

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

Pemerintah Aceh telah mempunyai 10 strategi yang tertuang dalam prioritas utama diantaranya, pengembangan kawasan sentra peternakan adalah sentra pembibitan ternak sapi potong, pengembangan industri peternakan rakyat, peningkatan kompetensi dan moral aparatur, peningkatan investasi dan kemitraan permodalan, peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan yang berdaya saing, penerapan rekayasa teknologi dan sistim informasi peternakan, sistim agribisnis yang terpadu dan integrate, pengembangan kelembagaan peternakan, peningkatan disertifikasi dan pola konsumsi produk pangan hewan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya peternakan spesifik lokal.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023

Gambar 2. 82

Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi di Aceh, Aceh Besar, Bener Meriah dan Aceh Jaya

2.1.3.3.5. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi/diproduksi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pada beberapa daerah di Aceh, dihasilkan NTP Februari 2024 sebesar 117,28 atau mengalami peningkatan sebesar 0,77 persen dari Februari 2024, yang merupakan NTP gabungan kelima sub sektor.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 83
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2023–2024*

Khusus NTP untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada komponen Nilai Tukar Usaha Pertanian.

Tabel 2. 101
Nilai tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024

Subsektor/Rincian	Bulan		Perubahan (%)
	Jan'24	Feb'24	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan			
a. Indeks yang Diterima Petani (It)	121.56	123.29	1.42
b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	114.16	115.12	0.84
c. Nilai Tukar Petani (NTPP)	106.48	107.09	0.58
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPP)	106.48	107.84	1.28
2. Hortikultura			
a. Indeks yang Diterima Petani (It)	112.25	120.53	7.38
b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	114.91	115.83	0.80
c. Nilai Tukar Petani (NTPH)	97.68	104.06	6.53
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPH)	99.08	106.28	7.26

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Sementara itu, pada sub sektor peternakan juga terjadi peningkatan taraf hidup para peternak yang ditandai dengan NTP Peternak sebagai dampak positif dari pembangunan peternakan. Pada Februari 2024, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 95,97 atau mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Indeks yang

diterima petani (It) naik sebesar 1,18 persen. Peningkatan It akibat dari meningkatnya harga jual komoditas ternak besar (sapi potong dan kerbau), dan ternak kecil (kambing), unggas (ayam ras pedaging). Begitu juga dengan Ib yang mengalami peningkatan sebesar 0,75 persen karena meningkatnya indeks KRT sebesar 1,02 persen dan Indeks BPPBM sebesar 0,04 persen. Adapun NTP pada subsektor Peternakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 102
Perkembangan NTP Peternakan Tahun 2024

Subsektor/Rincian	Bulan		Perubahan (%)
	Jan'24	Feb'24	
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Indeks yang Diterima Petani (It)	109.28	110.57	1.18
- Ternak Besar	105.52	106.45	0.87
- Ternak Kecil	114.22	114.79	0.50
- Unggas	119.42	122.00	2.16
- HasilTernak/Unggas	113.23	113.53	0.26
b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	114.36	115.21	0.75
- Indeks KRT	114.25	115.42	1.02
- Indeks BPPBM	114.62	114.67	0.04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

2.1.3.3.6. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.550.390.23 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK 6616/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2. 103
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Konservasi	1.058.364,40	29.81
Hutan Lindung	1.781.677,92	50.18
Hutan Produksi Tetap (HP)	549.794,88	15.49
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.178,34	4.09
Hutan Produksi Konversi	15.374,88	0.43
Jumlah	3.550.390,23	100,00

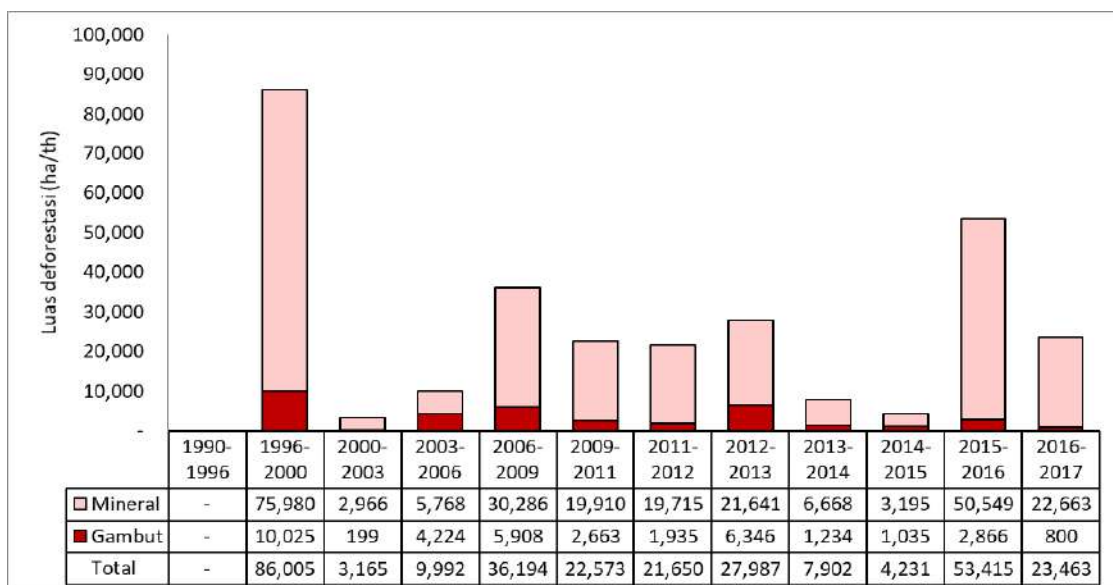
Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018

Tabel 2.103. memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.781.677,92 Ha atau 50.18 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.364,40 Ha atau 29.81 persen dari total luas kawasan hutan.

Luas kawasan hutan Aceh sebesar 62,55 persen dari luas total daratan sebesar 5.675.840,82 Ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

A. Deforestasi

Pendekatan analisis kerusakan hutan dan lahan dilakukan menggunakan analisis perubahan tutupan lahan pada periode tertentu yang dikelompokkan dan dikalkulasi dengan metodologi tertentu menjadi nilai kehilangan tutupan hutan (deforestasi). Berdasarkan baseline emisi aceh menggunakan data series selama 27 tahun terakhir (1990-2017), Total Deforestasi mencapai $\pm$ 675.864 hektar, atau rata-rata 25.032 hektar per tahun (ILED SA, Bappeda Aceh 2020). Berbeda dengan situasi provinsi lain di Pulau Sumatera, pada periode 1990-1996 deforestasi belum terjadi di Aceh mengingat pada saat tersebut konflik bersenjata sedang terjadi sehingga aktifitas dalam sektor berbasis lahan masih sangat terbatas. Deforestasi Aceh baru dimulai pada periode 1996-2000 dengan luas mencapai 86,000. Setelah periode tersebut luas deforestasi tahunan cenderung menurun. Luas deforestasi meningkat kembali pada periode 2006-2013 pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, sejalan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi lahannya, rata-rata deforestasi lebih banyak terjadi di tanah mineral yang mencapai luas 21.675 ha per tahun (87%) dan dalam jumlah sedikit di tanah gambut mencapai luas 3.356 hektar per tahun (13%).



ILED SA, Bappeda Aceh Tahun 2020 (data termutakhir)

Gambar 2. 84

Luas deforestasi di Aceh pada Periode 1990-2017

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990 -2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366 hektar atau 27% (ILED SA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas $\pm$ 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2. 104
Deforestasi 2019-2024

Tahun	Luas (Ha)	Luas Kawasan Hutan SK.580/MENLHK/SETJENSET.1/ 12/2018	Persentase
2019	15.140	3.550.390,23	0,43
2020	14.759	3.550.390,23	0,42
2021	8.617	3.550.390,23	0,24
2022	9.383	3.550.390,23	0,26
2023	8.906	3.550.390,23	0,25
2024	6.780,35	3.550.390,23	0,19

Sumber : DLHK Aceh, 2025

Tabel 2. 105

Deforestasi Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023 Menurut Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	FUNGSI KAWASAN HUTAN				TUBUH AIR	APL	J U M L A H (Ha)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP			
1	Aceh Barat		276.69		27.95	0.51	158.28	463.43
2	Aceh Barat Daya		14.43	16.77			35.73	66.92
3	Aceh Besar		27.62		55.70		2.11	85.43
4	Aceh Jaya		44.88	21.75	60.82	1.77	412.62	541.83
5	Aceh Selatan	542.54	54.81	94.95	6.83		606.01	1,305.15
6	Aceh Singkil	2.66	1.37		52.15	4.49	67.51	128.17
7	Aceh Tamiang				31.40		70.72	102.12
8	Aceh Tengah	36.70	211.97		45.50	0.01	84.10	378.27
9	Aceh Tenggara	34.01	9.01				28.48	71.50
10	Aceh Timur		61.05		286.22	7.91	293.31	648.50
11	Aceh Utara		9.70		128.60		404.36	542.66
12	Bener Meriah		80.59		258.19		75.96	412.73
13	Bireuen		33.84		235.62		49.51	318.97
14	Gayo Lues	6.77	39.72	13.07	2.09		21.06	82.71
15	Kota Subulussalam	38.30	39.44		11.67		248.99	338.39
16	Nagan Raya		110.24	48.81	69.79	0.28	133.00	362.12
17	Pidie		77.63		12.53		11.83	102.00
18	Pidie Jaya		48.17	12.66			364.85	425.68
19	Simeulue		7.28		59.69		336.81	403.78
J u m l a h		660.98	1,148.44	208.01	1,342.74	4.49	10.48	3,405.21
								6,780.35

Catatan :

1. Perhitungan luas deforestasi (dalam hektar) menggunakan Proyeksi Cylindrical Equal Area (World)
2. Data didapatkan dengan analisa spasial identity (data administrasi permendagri, data fungsi kawasan hutan SK.6616/2021 dan Penutupan Lahan Tahun 2022 dan 2023)
3. Sumber Data BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2024

Aktifitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas $\pm 3.375,14$ hektar dan seluas $\pm 3.405,21$ hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan ilegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data KLHK, Aceh memiliki tren deforestasi yang menurun. Hal tersebut menyebutkan Aceh memiliki tren kehilangan tutupan hutan yang terus menurun di 2019 seluas 15.140 hektare, 2020 seluas 14.759 hektare dan cukup stabil 2 tahun terakhir 2021 dan 2022. Memperkirakan Aceh telah kehilangan tutupan hutan seluas ± 9.383 Ha sepanjang 2022. Kehilangan tutupan hutan seluas 8.906 hektare sepanjang 2023, juga terjadi di dalam kawasan ekosistem leuser (KEL) seluas 4.854 hektare. berdasarkan pantauan dan analisis dari citra satelit serta data glad alert dari global forest watch, sebanyak 50 persen aktivitas penggundulan hutan terjadi di area penggunaan lain (APL), mencapai 4.422 hektare, sisanya terjadi dalam kawasan hutan. Hasil interpretasi (HAKA), aktivitas deforestasi dalam kawasan hutan paling tinggi berada di wilayah hutan lindung, yakni mencapai 1.598 hektare, 1.574 hektare di hutan produksi, dan 832 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. "Jika dirinci, kegiatan deforestasi paling tinggi pada 2023, terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas hutan yang hilang mencapai 1.854 hektare,". Persentase tutupan hutan di Aceh masih menjadi yang terbaik di Sumatera dan menduduki peringkat ke-9 di Indonesia pada 2022, karena luas hutan lahan mineral dan rawa gambut yang tersebar di bagian barat Aceh Selatan. "Sebanyak 55 persen hutan Aceh masih luas dibanding rata-rata hutan di Indonesia, luas hutan kita masih di atas rata-rata nasional," Kabupaten dengan dugaan kehilangan tutupan hutan terbesar adalah

kabupaten Aceh Selatan dengan luas 1.883 Ha, diikuti Aceh Jaya 776 Ha dan Aceh Timur 753 Ha. Sekitar 56% dugaan hilangnya tutupan hutan terjadi di Kawasan Hutan. Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGL Aceh) yang merupakan kawasan konservasi ternyata memiliki tren kehilangan tutupan hutannya yang terus menurun. Di Tahun 2022 dugaan kehilangan hutan di TNGL Aceh hanya seluas 179 Hektar atau merupakan yang terendah selama 8 tahun terakhir. Tren kehilangan hutan terus meningkat. Kehilangan hutan sangat masif terjadi ada sekitar 716 hektar hutan yang hilang selama tahun 2022. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding akumulasi 4 tahun sebelumnya.

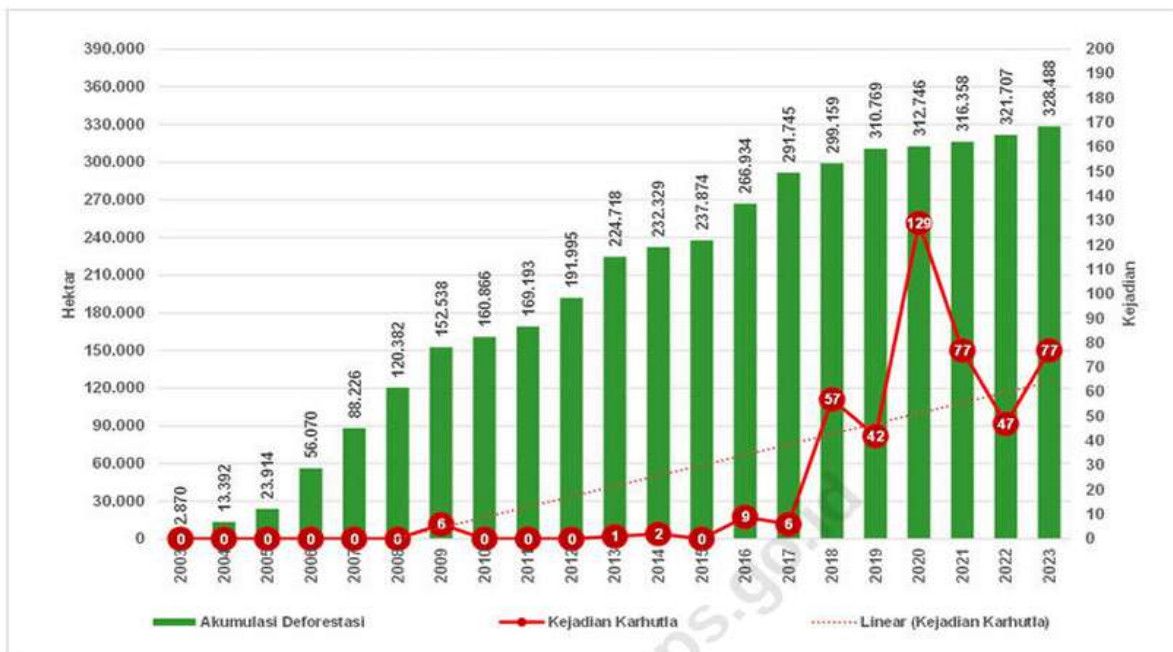
Kerusakan juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tanah mineral dan lahan gambut secara umum dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan melalui pembakaran. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah khususnya yang terjadi pada lahan gambut dengan dampak berupa asap dan hilangnya vegetasi serta komoditi yang dikembangkan di atasnya. Tipe kebakaran ini juga sangat sulit untuk dikendalikan serta memerlukan biaya, waktu serta teknologi (high cost). Kebakaran hutan dan lahan terjadi 63 kali. Lahan yang terbakar seluas 214 hektar.

Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai $\pm$ 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar $\pm$ 256.362 Ha (75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya $\pm$ 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2. 106
Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2020 s.d. 2024

NO	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1,078,00	788,00	175	1642,65	214,00

Sumber: DLHK Aceh Tahun 2025



Sumber : Deforestasi KLHK, Grafik Akumulasi Deforestasi dan Intensitas Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh

Gambar 2. 85

Akumulasi Deforestasi dan Jumlah Kejadian Karhutla tahun 2003-2023

Berdasarkan luasan, kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi penurunan. Upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui peningkatan patroli oleh tenaga pengamanan hutan (PAMHUT), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada masing-masing wilayah KPH. Sosialisasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersama-sama TNI, POLRI dan melibatkan masyarakat terutama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Deforestasi di Aceh tahun 2019 sampai 2024 menurun, sedang pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Deforestasi tertinggi pada tahun 2018 mencapai 11.608 ha atau 0,327 persen dari total luas kawasan hutan disajikan pada Tabel 2.107.

Tabel 2. 107
Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Persentase
2019 - 2020	1.956	3,550,390.23	0,055
2020 - 2021	1,956	3,550,390.23	0,055
2021 - 2022	1,956,83	3,550,390.23	0,055
2022 - 2023	2.069,05	3,550,390.23	0,058
2023 - 2024	6.780,35	3,550,390.23	0,190

Sumber: DLHK Aceh, 2025

Penyebab deforestasi antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan dan Illegal Logging. Deforestasi dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju deforestasi Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan Illegal logging dan tertanganinya kasus illegal logging, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Deforestasi juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen. sedangkan harimau mencapai 4 persen. dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus. Baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus. Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017 BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian. padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

Selain itu, masih tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat di Aceh, dengan jumlah kasus sebanyak 872 kasus dalam kurun waktu 2015-2024. Tahun 2024 Dari 290 kasus tersebut, kasus konflik gajah sebanyak 108 kasus, Harimau 43 kasus, Orang Hutan 30 kasus, Beruang 17 Kasus, Buaya 8 Kasus, dengan jumlah konflik yang tertangani 206 kasus atau setara 71, 03%. Tingginya konflik disebabkan maraknya kasus perambahan hutan, alih fungsi hutan dan praktik penebangan liar. Penyebab kematian gajah didominasi konflik gajah dengan masyarakat yakni 57%, sementara 10% akibat perburuan dan 33% mati secara alami.

B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung menurun dari tahun 2020 sampai 2023, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Lahan kritis terluas yang direhabilitasi pada tahun 2024 seluas 3.437 ha atau 2,46 persen dari total luas hutan dan lahan kritis . Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2016 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2. 108
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024

Tahun	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Persentase
2016	23.876	99.052,00	24,10
2017	23.876	99.052,00	24,10
2018	3.144	95,884,00	12,87
2019	12.520	94.949,00	15,89
2020	4.009	82.429,00	4,86
2021	2.456	56.753,26	4,32
2022	2.194	56.753,00	3,86
2023	3.157	164.110,00	1,92
2024	3.437	164.110,00	2,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2025

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, satwa liar yang berkonflik dengan manusia meliputi; Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Dari 3 species satwa liar tersebut yang paling dominan berkonflik dengan manusia adalah gajah terutama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Bireueun, Aceh Besar, dan Aceh Selatan.

Tabel 2. 109
Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2024

No.	Jenis Satwa Liar	Jumlah Konflik	Kabupaten/Kota
1.	Gajah Sumatera	583	Kabupaten Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang (8 Lokasi, 5 CRU)
2.	Harimau Sumatera	113	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam.
3.	Orangutan Sumatera	91	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Langsa, Pidie, Subulussalam.

Sumber: BKSDA Aceh, 2024

Mengingat keberadaan habitat gajah sebagian besar berada diluar kawasan konservasi, maka penanganan konflik yang dilakukan dilaksanakan melalui pembentukan CRU (Conservation Response Unit) yang menjadi unit mitigasi konflik gajah. Ada 5 (lima) CRU yang operasionalnya di dukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yaitu : CRU Alue Kuyun di Kabupaten Aceh Barat, CRU Mila di Kabupaten Pidie, CRU Peusangan di Kabupaten Bener Meriah, CRU Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara dan CRU Sebadadi di Kabupaten Aceh Timur. Penanggulangan konflik satwa liar di lakukan dengan beberapa kegiatan seperti : pembangunan parit gajah (Barrier), kawat kejut (Fencing), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah, penggiringan gajah dengan mercon dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG).

Salah satu amanah Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Pergub tentang Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) satwa liar, salah satu rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu penetapan Koridor hidupan liar.

Kabupaten/ Kota	Harimau	Orangutan	Gajah
Aceh Barat	1	14	28
Aceh Besar	4	0	10
Aceh Jaya	7	0	74
Aceh Selatan	18	37	6
Aceh Singkil	7	4	0
Aceh Tamiang	10	13	4
Aceh Tengah	4	0	13
Aceh Tenggara	3	9	7
Aceh Timur	3	9	77
Aceh Utara	1	0	44
Bener Meriah	2	0	9
Bireun	1	0	5
Gayo Lues	1	2	14
Langsa	0	3	0
Nagan Raya	2	0	7
Pidie	11	1	86
Pidie Jaya	1	0	14
Subulussalam	9	17	36

Gambar 2.86.

Konflik Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2019-2024

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar.

Penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar di utamakan pada ekosistem yang merupakan habitat dari beberapa spesies kunci yang merupakan jenis satwa prioritas terancam punah yang dilindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. 180/IV/KKH/2015.

Kawasan koridor merupakan areal yang dapat berfungsi sebagai jembatan bagi pergerakan satwa-satwa yang melintas dari satu kawasan habitat ke habitat lainnya atau sebagai tempat mereka bermigrasi (sebagai pengguna koridor atau user), dapat berupa jalan yang dapat dilalui baik oleh satwa arboreal maupun terrestrial. Untuk satwa terrestrial yang perlu diperhatikan adalah kawasan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber pakan dan air untuk mereka makan dan minum maupun dapat digunakan sebagai tempat istirahat saat mereka melintas menuju hutan fragmen atau blok hutan lainnya, Bagi satwa arboreal diperlukan kesinambungan tajuk untuk menjamin keamanan pergerakan mereka dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya.

Pengelolaan koridor hidupan liar sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang adalah untuk meningkatkan kualitas habitat dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati (population viability) melalui upaya mengurangi ancaman dan gangguan sehingga memungkinkan pergerakan satwa liar dalam suatu bentang alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Koridor Hidupan Liar.

C. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

PDRB Aceh beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp.166.372,32 (Milyar) menjadi Rp.243.202,09 (Milyar) pada tahun 2024. PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp.131.580,97 (Milyar) menjadi Rp.153.780,44 (Milyar) pada tahun 2024. PDRB Aceh dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2. 110

PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh

No	Lapangan Usaha/industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (Milyar Rp)	166.372,32	184.979,88	209.698,36	227.018,20	243.202,09
2	PDRB ADHK (Milyar Rp)	131.580,97	135.274,04	140.971,72	146.932,42	153.780,44
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (Miliar Rp)	2.074,44	1.768,15	1.959,68	2.144,53	1.989,33
4	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHK (Miliar Rp)	1.667,01	1.382,88	1.412,75	1.434,46	1.338,76

No	Lapangan Usaha/industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (%)	1,25	0,96	0,93	0,94	0,82
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-0,67	-17,04	2,16	1,54	-6,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Tabel 2.110. memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami penurunan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB dari tahun 2020 senilai Rp.2.074,44 (Milyar) menjadi Rp.1.989,33 (Milyar) pada tahun 2024. Distribusi persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dari tahun 2020 sebesar 1,25 persen menjadi 0,82 persen pada tahun 2024. Selanjutnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari tahun 2020 senilai Rp.1.667,01 (Milyar) menjadi Rp.1.338,76 (Milyar) pada tahun 2024. Kontribusi sektor kehutanan terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -0,67% menjadi -6,67 persen.

D. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 865/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh Secara rinci luas kawasan lindung Aceh, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK 6616/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut ini.

Tabel 2. 111**Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2020-2024**

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2021	2.840.042,32	3,550,390.23	79,99
2022	2.840.042,32	3,550,390.23	79,99
2023	2.642.964,03	3.333.973.89	79,27
2024	2.642.964,03	3.333.973.89	79,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2025

E. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, salah satu skema penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menindaklanjuti peraturan diatas Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2019 melalui SK Nomor 522.12/1351/2019. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai ketua Tim Inver.

Tujuan dari skema TORA didalam Kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat didalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK /SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdapat seluas 95.387 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang terdiri dari beberapa kriteria penguasaan lahan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 112
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan
(PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024

Kabupaten	Kawasan HPK tidak produktif	Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak	Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi	Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-
Aceh Barat				121	121
Aceh Barat Daya		113		0	113
Aceh Besar	1.276	7.524		128	8.928
Aceh Jaya		939		479	1.418
Aceh Selatan		522		36	558
Aceh Singkil	2.704	10.070	2.446	36	15.256
Aceh Tamiang		5.427	940	38	6.405
Aceh Tengah		20.969		93	21.062
Aceh Tenggara		3.056		55	3.111
Aceh Timur		11.340	1.813	174	13.327
Aceh Utara		186		4	190
Bener Meriah		2.641		53	2.694
Bireuen		370			370
Gayo Lues	654	1.285	544	508	2.991
Kota Langsa		813		2	815
Kota Sabang		46		22	68
Kota Subulussalam	2.460	940	3.644	8	7.052
Nagan Raya		159	2.896		3.055
Pidie		3.135	3.672	182	6.989
Simeulue		423		441	864
Grand Total	7.094	69.958	15.955	2.380	95.387

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2024

Penanganan konflik tenurial melalui skema TORA yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan Gubernur untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.579,47 Ha diselesaikan melalui perubahan batas dan 319,18 Ha diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial, dan hingga tahun 2021 baru satu Kabupaten yang telah terbit SK dari Menteri LHK dengan rincian pada berikut berikut:

Tabel 2. 113
Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
menurut Kabupaten/Kota di Aceh

No	Kab/Kota	Surat Rekom Gubernur	Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH (Ha)		Persetujuan MenLHK (Ha)		Keputusan MenLHK Atas Penataan Batas Perubahan Batas		
			Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	SK	Tanggal	Luas (Ha)
1	Aceh Tamiang	522.12/4433 Tanggal 19 Maret 2019	1.326,99	47,54	1.326,99	47,54	SK.188/MENLHK/SETJEN/PL A.2/4/2020	13 April 2020	1.365,55
2	Aceh Timur	522.12/4434 Tanggal 19 Maret 2019	139,03	178,06	139,03	178,06			
3	Langsa	522.12/4435 tanggal 19 Maret 2019	7,51	00.00	7,51	00.00			
4	Aceh Utara	522/1614 Tanggal 30 Januari 2020	78,77	88,77	78,77	88,77			
5	Sabang	522.12/21064 Tanggal 3 Desember 2019	27,17	4,81	27,17	4,81			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2024

F. Perhutanan Sosial

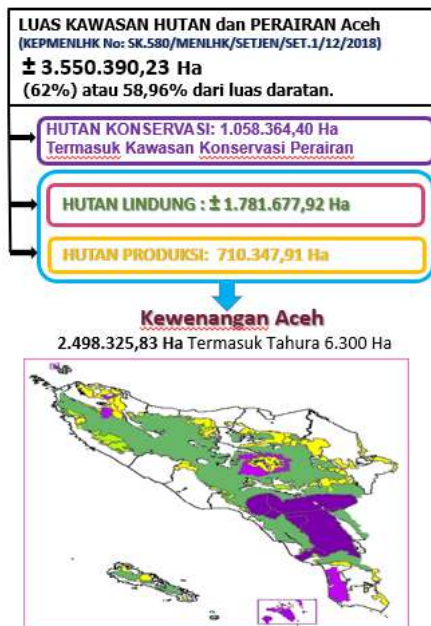
Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian, penyuluh kehutanan berperan sebagai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, terdapat 55 izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian LHK, 10 izin telah didampingi oleh penyuluh, dan 25 izin didampingi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan 15 izin lagi belum dapat didampingi dikarenakan keterbatasan tenaga penyuluh. Untuk hal tersebut, DLHK Aceh akan bermitra dengan PKSM dalam rangka memfasilitasi kelompok binaannya. Selain itu, Penyuluh kehutanan juga berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tabel 2. 114
Capaian Izin Perhutanan Sosial Aceh Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Izin	Luasan (Ha)	Jumlah KK
1	2019	3	2.281	234
2	2021	11	14.659	1.400
3	2022	21	42.693,13	2.033
4	2023	25	28.000	2.800
5	2024	27	30.000	3.500
Jumlah		137	228.415,13	24.335

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa dari target akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional dengan luas 12.700.000 Ha, Target Perhutanan Sosial Aceh seluas 430.841,00 Ha capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 104 izin dengan luasan 172.864,94 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 47 izin dengan luas 83.882 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 37 izin dengan luas 59.960,9 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin dengan luas 7.085 Ha. Dengan capaian outcome penerimaan manfaat dari Kelompok Tani Hutan berjumlah 15.013 KK, Provinsi Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses pada bulan Desember 2024 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Provinsi Aceh.



PERHUTANAN SOSIAL ACEH S.D NOVEMBER 2024	
Target Akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional	12.700.000,00 Ha
Target Perhutanan Sosial Aceh	430.841,00 Ha
Capaian Perhutanan Sosial Aceh	172.864,94 Ha
Sisa Target Perhutanan Sosial Aceh	257.976,06 Ha

PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL S/D NOVEMBER 2024				
NO.	SKEMA	JUMLAH	LUAS (Ha)	KK
1.	Hutan Desa (HD)	47	83.882,00	1.444
2.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	37	59.349,00	8.782
3.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	12	7.084,94	4.787
4.	Hutan Adat (HA)	8	22.549,00	-
	JUMLAH	104	172.864,94	15.013

Gambar 2. 87

Capaian Perhutanan Sosial Aceh S.D 2024

G. Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Aceh ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Aceh nomor 01 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat aceh, cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018. Peraturan Gubernur ini menetapkan:

1. UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2. UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
3. UPTD KPH Wilayah I; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Banda Aceh, dengan wilayah kerja meliputi Unit I KPHP dan Unit XV KPHL mencakup wilayah administratif Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.
4. UPTD KPH Wilayah II; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Pidie dengan wilayah kerja meliputi Unit II KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.
5. UPTD KPH Wilayah III; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Jaya dengan wilayah kerja meliputi Unit X KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya.
6. UPTD KPH Wilayah IV; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Barat, dengan wilayah kerja meliputi Unit XI KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya

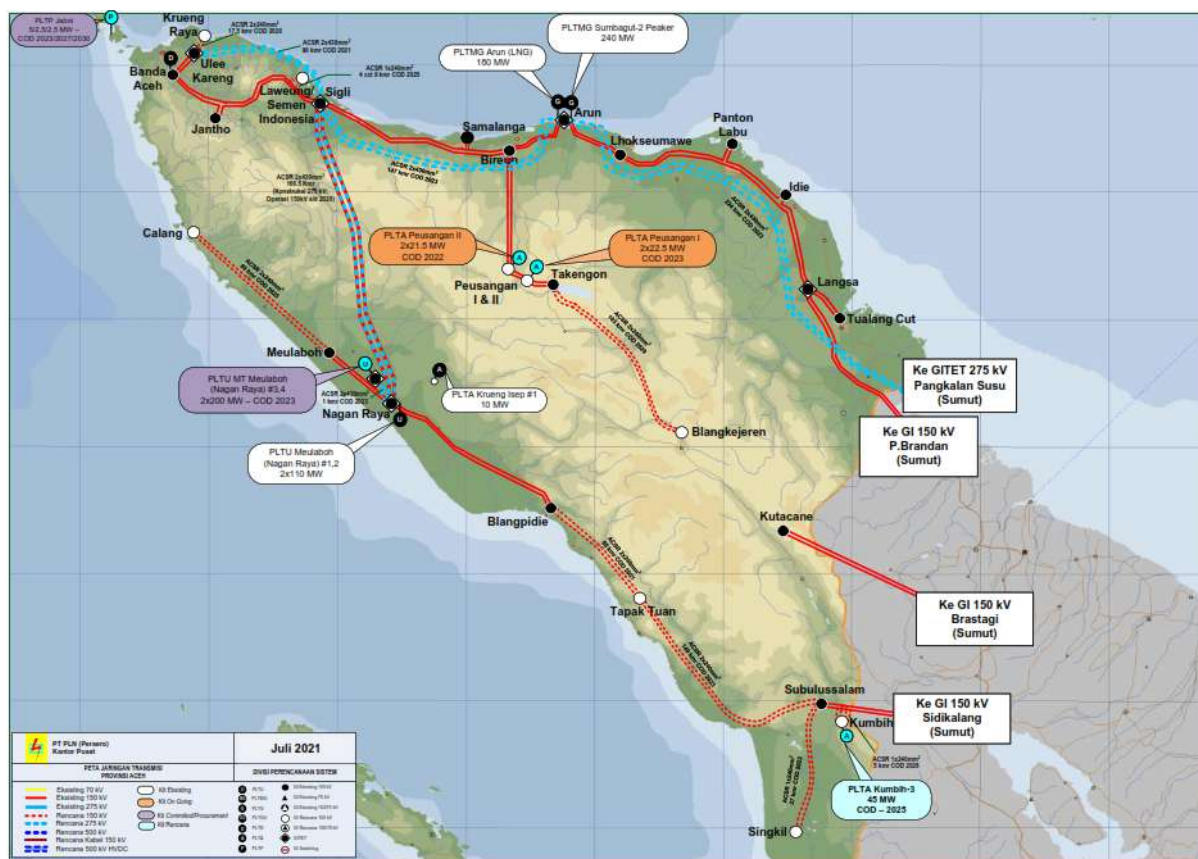
7. UPTD KPH Wilayah V; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Utara, dengan wilayah kerja meliputi Unit III KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
8. UPTD KPH Wilayah VI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Unit VI KPHL dan Unit VII KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.
9. UPTD KPH Wilayah VII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Langsa dengan wilayah kerja meliputi Unit IV KPHL dan Unit V KPHL mencakup wilayah administratif Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
10. UPTD KPH Wilayah VIII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Gayo Lues dengan wilayah kerja meliputi Unit VIII KPHL dan Unit IX KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. UPTD KPH Wilayah IX; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi Unit XII KPHL dan Unit XIII KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
12. UPTD KPH Wilayah X; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Simeulue dengan wilayah kerja meliputi Unit XIV KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Simeulue
13. UPTD KPHK Tahura PMI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Aceh Besar, Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Pidie dan kawasan penyangganya.

UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah I sampai dengan UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah X mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pengolahan hasil hutan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan kehutanan, peredaran serta pemasaran hasil hutan.

2.1.3.3.7. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumbagut dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumatera dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated* terutama untuk lokasi-lokasi di pulau terpisah. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi meliputi seluruh lokasi di Aceh (daratan), baik melalui jaringan 150kV ataupun 20kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 bulan Oktober sebesar 542 MW. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.88 di bawah ini :



Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Gambar 2. 88
Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada sistem *isolated* 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa *genset* untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem *Isolated* di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya.

Kapasitas pembangkit tenaga listrik eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.115 dan 2.107.

Tabel 2. 115
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumatera	2	220,0	140,0	136,0
PLTMG	Sumatera	32	424	401,5	407,2
PLTD	Sumatera	18	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		72	735,8	601,6	597,5
IPP					

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLTD	Sumatera	2	23,0	15,7	7,0
PLTM	Sumatera	2	11,0	11,6	11,4
Jumlah IPP		4	34,0	27,3	18,4
Jumlah		76	769,8	628,9	615,9

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Kondisi sistem *isolated* 20 kV yang tersisa adalah sistem *isolated* di kepulauan seperti Sistem Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan system kecil lainnya juga masih dipasok oleh PLTD.

Tabel 2. 116
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Alue Dua/ Langsa	150/20	2	90
2	Tualang Cut	150/20	3	110
3	Alue Batee/ Idi	150/20	2	50
4	Lhokseumawe	150/20	2	120
5	Bireuen	150/20	2	120
6	Sigli	150/20	2	90
7	Banda Aceh I / Lambaroe	150/20	3	180
8	Jantho	150/20	1	30
9	Pantonlabu	150/20	2	60
10	PLTU Nagan Raya	150/20	1	30
11	Arun	150/20	1	60
12	Meulaboh	150/20	2	90
13	Blang Pidie	150/20	1	30
14	Kutacane	150/20	1	30
15	Subulussalam	150/20	1	30
16	Takengon	150/20	1	30
17	Samalanga	150/20	1	30
18	Ulee Kareeng	150/20	1	30
19	Krueng Raya	150/20	1	30
TOTAL			30	1210

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

B. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Pada tahun 2023 jumlah Pelanggan listrik sebanyak 1.724.360 pelanggan. Mengalami peningkatan sebanyak 59.732 pelanggan dibanding tahun 2022 atau terjadi peningkatan sebesar 3,59% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2023 sebesar 2.173.863MVA. Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh terbesar adalah pelanggan kelompok rumah tangga dengan persentase

86.03 persen dengan jumlah pelanggan 1.483.479. Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.25 persen dengan jumlah pelanggan 4.235 pelanggan. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.108 di bawah ini.

Tabel 2. 117
Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2023

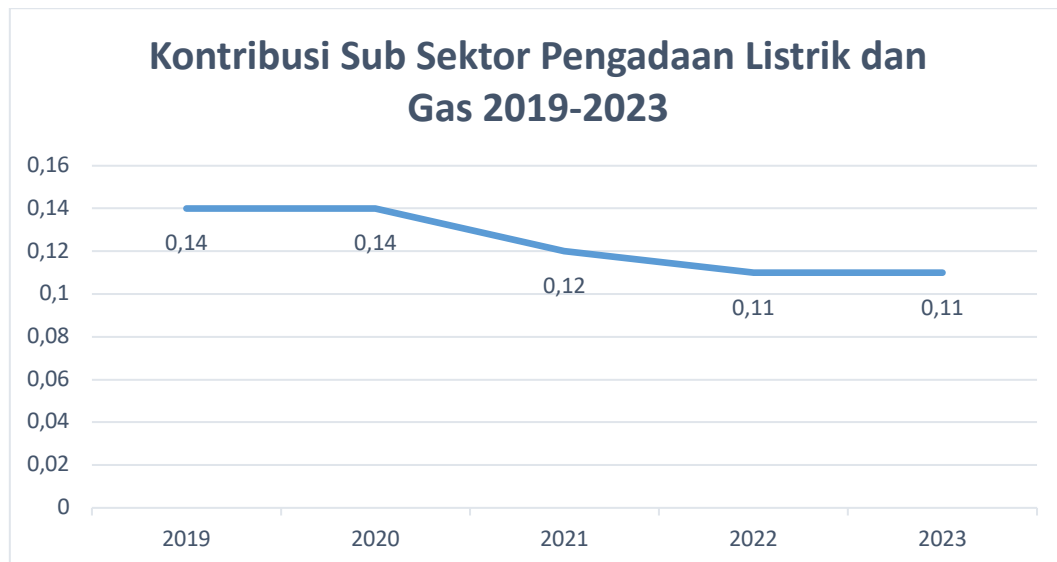
No.	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentase (%)
1.	Rumah Tangga	1.483.479	86.03
2.	Sosial	55.282	3.2
3.	Bisnis	165.203	9,6
4.	Industri	4.235	0.25
5.	Pemerintah	15.848	0.90
6.	Lain-lain	313	0.02
Total		1.724.360	100

Sumber : PT.PLN(Persero) Wilayah Aceh 2024

Adapun perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total di Aceh menunjukkan nilai rasio ketersediaan daya listrik sebesar 99,96 %. Pertumbuhan *demand* rata-rata tahun 2021 s/d 2030 Provinsi Aceh, untuk masing-masing skenario adalah: Optimis 5,7% dan Moderat 4,8%. Berdasarkan kedua skenario tersebut, diambil skenario moderat sebagai referensi untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Namun untuk mengantisipasi *gap* antara perencanaan dan realisasi, perlu dilakukan evaluasi dan koreksi sampai kondisi menjadi kembali stabil.

C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Secara umum kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh menurut lapangan usaha dari tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 0,14 persen. Adapun posisi tahun 2022-2023 relatif menurun menjadi 0.11 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 89

Kontribusi Subsektor Listrik Dan Gas Terhadap PDRB Aceh Tahun 2019-2023

D. Pertambangan Tanpa Ijin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang ilegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI) tidak membayar pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Adapun beberapa lokasi kegiatan pertambangan ilegal (PETI) emas di Aceh meliputi:

- a. Kabupaten Aceh Barat disepanjang aliran Sungai emas (placer)
- b. Kabupaten Nagan Raya di sepanjang Krueng Kila, Beutong (pacer)
- c. Kabupaten Aceh Jaya lokasi Gunung Ujeuen, Kecamatan Krueng Sabe (primer)
- d. Kabupaten Pidie, di kecamatan Geumpang dan Mane (placer dan primer)
- e. Kabupaten Aceh Selatan, kecamatan Manggamat (primer)
- f. Kabupaten Aceh Tengah, kecamatan Lumut (primer)

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabenenya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan illegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut.

Tabel 2. 118
Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI

NO	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Uraian Kejadian	Jumlah Korban
1.	20 Januari 2014	Desa Pulo Loh Lam Jeu, Kec. Geumpang Kab. Pidie	Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter	3 (tiga) orang meninggal dunia
2.	3 September 2018	Desa Pulo Loh Kec. Geumpang	Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter	3 (tiga) orang meninggal dunia
3.	21 April 2019	Desa Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan	Terhimpit batu di lubang penambangan pada kedalaman 100 meter	1 (satu) orang meninggal dunia
4.	14 Maret 2021	Desa Simpang Dua Kec. Kluet Tengah Kemukiman Manggamat Kabupaten Aceh Selatan	Tertimbun oleh longsor dalam lubang tambang	2 (dua) orang meninggal dunia
5.	10 Juli 2021	Kec. Geumpang Desa Bangkeh Kab Pidie	Tertimbun longsor batuan	4 (empat) orang meninggal dunia

Sumber : Dinas ESDM Aceh, 2023

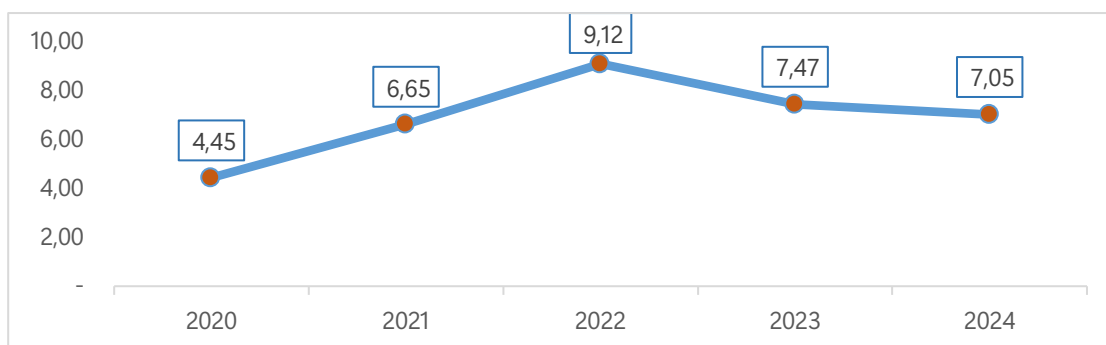
Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah di lakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). Bahkan Undang- Undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan Batubara, pada pasal 158 disampaikan bahwa setiap orang yang melakukan

penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Selanjutnya Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) Tanggal 5 Agustus 2014, namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik, masih perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi Aspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

E. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2023 masih didominasi oleh besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi, diikuti sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya serta pertambangan biji logam.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025 (data diolah)

Gambar 2. 90

Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2024 masih didominasi oleh besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi (3,68% atau Rp.8,94 Trilyun), diikuti sub sektor pertambangan batu bara dan lignit (1,76% atau Rp.4,27 Trilyun), sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya (1,38% atau Rp.3,35 Trilyun) serta pertambangan biji logam (0,24% atau Rp.577 Milyar). Adapun perkembangannya dapat dilihat pada gambar 2.90.



Sumber : BPS(diolah), 2023

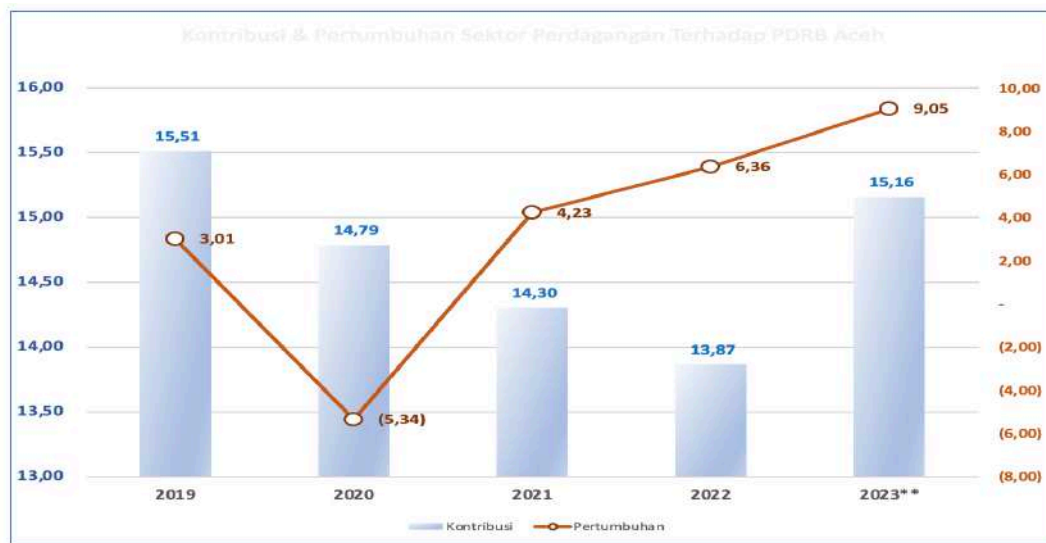
Gambar 2. 91
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan Tahun 2020-2023

2.1.3.3.8. Perdagangan

Sektor Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Sektor perdagangan merupakan sektor atau lapangan usaha yang didalamnya meliputi kegiatan ekonomi perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang yang memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan sektor perdagangan tergambarkan terus meningkat setelah mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pembatasan pergerakan orang

dan barang selama pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2023 (diolah)

Gambar 2. 92

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan terjadi secara signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,23 persen sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi daerah. Tren pertumbuhan sektor perdagangan terus meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,36 persen dan pada tahun 2023 tumbuh kembali sebesar 9,05 persen.

Sedangkan kontribusi sektor perdagangan yang cukup tinggi dicapai pada tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yang juga diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Tren penurunan share kontribusi perdagangan terus terjadi sampai dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan sebesar 15,51 persen menjadi 14,79 pada tahun 2020 dan terus mengalami depresi hingga tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 13,87 persen. Namun kontribusi sektor perdagangan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,16 persen.

Kontribusi sektor perdagangan sangat mempengaruhi PDRB di Aceh, yaitu sebesar 15,16 persen, dan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, dilihat dari sisi ekspor impor, neraca perdagangan Aceh masih mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena ekonomi Aceh dipengaruhi oleh faktor eksternal karena masih tingginya kebutuhan pada pasokan barang-barang dari luar Aceh (dominasi barang impor) termasuk untuk kebutuhan pokok, serta produksi industri lokal yang masih kurang.

Tabel 2. 119
Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Ekspor			Impor			Neraca (USD)	Neraca (%)
	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)		
2020	8.118.173.063	300.417.274	-5,44	109.695.439	25.776.718	-80,36	274.640.556	47,29
2021	9.658.678.737	536.923.577	78,73	72.354.765	119.048.308	361,84	417.875.269	52,15
2022	8.900.165.533	745.801.580	38,90	100.488.223	113.741.363	-4,46	632.059.944	51,26
2023	7.900.445.913	609.246.201	-18,31	350.596.488	148.020.520	30,14	461.225.536	-27,03
2024	11.243.254.894	674.855.855	10,77	843.863.572	454.421.658	207,00	220.434.197	-52,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir meskipun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 ekspor dari Aceh sebesar 300.417.274 USD atau berkontraksi sebesar 5,44 persen sebagai dampak dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021, seiring upaya pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi global, nilai ekspor dari Aceh meningkat tajam menjadi 536.923.577 USD atau tumbuh sebesar 78,73 persen. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 745.801.580 USD atau tumbuh sebesar 38,90 persen. Pada tahun 2023 nilai ekspor Aceh cukup baik yaitu sebesar 609.351.386, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,31 persen, hal ini disebabkan karena berkurangnya nilai ekspor pada kelompok non migas terutama akibat turunnya harga CPO di pasar global. Pada tahun 2024, nilai ekspor Aceh kembali tumbuh sebesar 10,77 persen atau senilai 674.855.855 USD. Hal ini selain akibat perubahan harga-harga di pasar dunia, juga dikarenakan meningkatnya volume ekspor Aceh.

Perkembangan impor Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat cukup stabil, dimana nilai impor terendah Aceh terjadi pada tahun 2020 yaitu senilai 25.776.718 USD, sedangkan impor tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu senilai 454.421.658 USD atau tumbuh sebesar 207 persen dibanding tahun sebelumnya. Pembentuk impor Aceh pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kelompok komoditas adalah bahan bakar mineral, beras, belerang dan kapur.

Sedangkan neraca ekspor dan impor Aceh dalam 5 tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun tetap mengalami surplus, yang menandai nilai ekspor Aceh lebih besar daripada nilai impor. Surplus terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 632.056.844 USD, sedangkan surplus terkecil terjadi pada tahun 2024 sebesar 220.434.197USD.

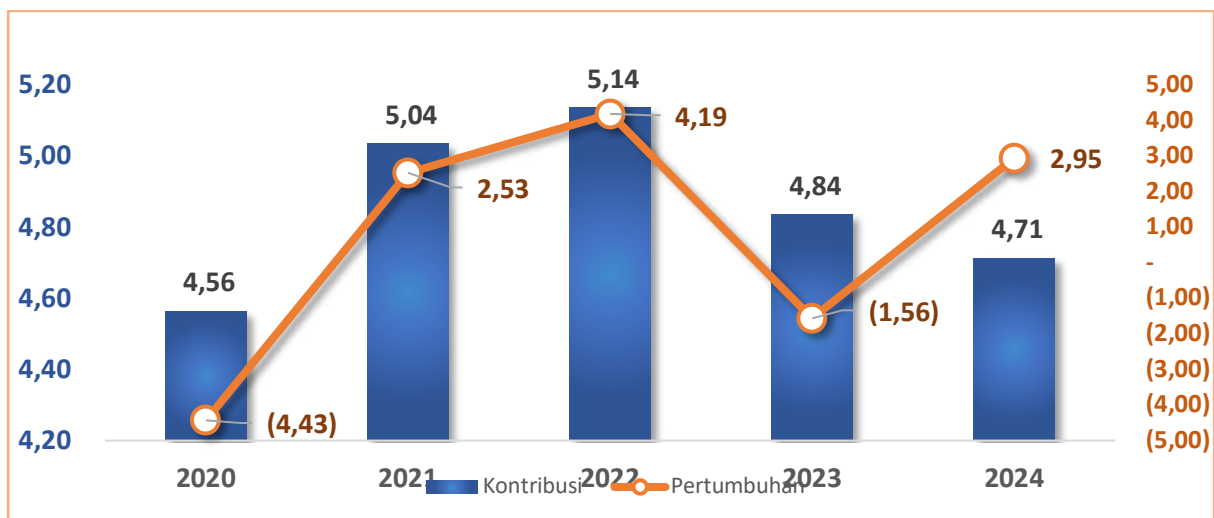
Negara tujuan utama ekspor Provinsi Aceh adalah India, Amerika Serikat, Thailand, Jepang dan Belgia dengan jenis komoditas utama diantaranya bahan bakar mineral, buah-buahan, dan kelompok kopi, teh, rempah-rempah. Sedangkan negara asal impor utama adalah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, Vietnam, dan Thailand dengan komoditas paling dominan berupa bahan bakar mineral, beras, belerang dan kapur.

2.1.3.3.9. Perindustrian

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Perkembangan sektor industri di Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dalam periode waktu tersebut sektor industri di Aceh mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,19 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,14 persen. Namun pertumbuhan dan kontribusi tersebut masih belum optimal dibanding dengan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor yang bergerak di hulu.

Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 93
Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh
(persen) Tahun 2020-2024

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Aceh sempat mengalami lonjakan pertumbuhan pada masa pemulihan ekonomi pasca covid-19, yaitu pada tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 2,53 persen setelah terkontraksi sebesar 4,43 persen pada tahun 2020, tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Namun pada tahun 2023 sektor industri kembali mengalami tekanan dan berkontraksi sebesar 1,56 persen, terjadinya kontraksi pada tahun 2023 salah

satunya diakibatkan karena terjadinya penurunan harga CPO di pasar global. Pada tahun 2024 sektor industri tumbuh kembali sebesar 2,95 persen. Penyebab pertumbuhan ini paling dominan terjadi pada sub sektor industri makanan dan minuman yang dipicu oleh peningkatan harga CPO, sehingga mendorong pelaku industri terkait baik di hulu maupun di hilir meningkatkan produksinya.

Sejalan dengan pertumbuhan, kontribusi sektor industri juga mengalami fluktuasi yang sama, dimana kontribusi terkecil terhadap PDRB terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,56 persen, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,14 persen, sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor ekonomi menurun menjadi sebesar 4,48 persen. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi sektor industri masih belum optimal dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor hulu, terutama sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi selama 5 tahun terakhir sebesar 29,43 - 30,98 persen. Hal ini diakibatkan karena belum tumbuhnya industri pengolahan yang cukup di Aceh, terutama pabrik pengolahan yang berskala sedang maupun besar, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan lebih dominan dipicu oleh Industri berskala kecil.

Sedangkan perkembangan jumlah Sentra IKM terdapat pada table 2.120:

Tabel 2. 120
Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota
(Data Termutakhir)

No.	Kabupaten/ Kota	Sentra			Ket
		Jlh. Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja	
1	2	3	4	5	6
1	Sabang	1	20	71	
2	Banda Aceh	5	58	77	
3	Aceh Besar	11	241	927	
4	Pidie	24	590	1.890	
5	Pidie Jaya	18	662	1.839	
6	Bireuen	19	578	1.735	
7	Aceh Utara	12	741	1.859	
8	Lhokseumawe	2	90	263	
9	Aceh Timur	15	181	1.479	
10	Langsa	6	81	231	
11	Aceh Tamiang	7	125	318	
12	Gayo Lues	1	1	7	
13	Aceh Tenggara	15	226	226	
14	Aceh Tengah	2	107	531	
15	Bener meriah	3	60	103	
16	Aceh Selatan	4	151	341	
17	Nagan Raya	-	-	-	
18	Aceh Barat Daya	13	89	388	
19	Aceh Barat	9	143	377	
20	Aceh Jaya	7	77	184	
21	Singkil	15	1.116	2.564	
22	Subulussalam	-	-	-	
23	Simeulue	-	-	-	
Jumlah		189	5.337	15.410	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sentra IKM di Aceh sebanyak 189 sentra dengan unit usaha sebanyak 5.337 unit mampu menyerap 15.410 orang tenaga kerja. Sebaran Sentra IKM terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 24 sentra, kemudian Bireuen 19 sentra, dan Pidie Jaya 18 Sentra. Sedangkan kabupaten Nagan Raya, Subulussalam dan Simeulue masih belum memiliki Sentra IKM. Dengan melihat potensi yang ada, sentra IKM di Aceh masih perlu ditingkatkan dan sebarannya belum merata. Maka perlu didorong bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar setiap daerah memiliki sentra IKM.

Sedangkan jumlah IKM di Aceh mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 2.606 IKM, turun menjadi 1.411 IKM dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 504 IKM. Hal ini diduga akibat tekanan kondisi perekonomian global dan nasional yang dimulai sejak pandemi covid-19, belum sepenuhnya pulih pada sektor IKM sampai dengan data tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 BPS belum merilis data terbaru untuk tahun 2023.

Tabel 2. 121

Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh Tahun 2019-2022 (Data Termutakhir)

IKM	2019	2020	2021	2022
Jlh Industri Kecil dan Menengah	N/A	2.606	1.411	504
Total Industri	N/A	103.254	113.354	108.580
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	-	2,52	1,24	0,46

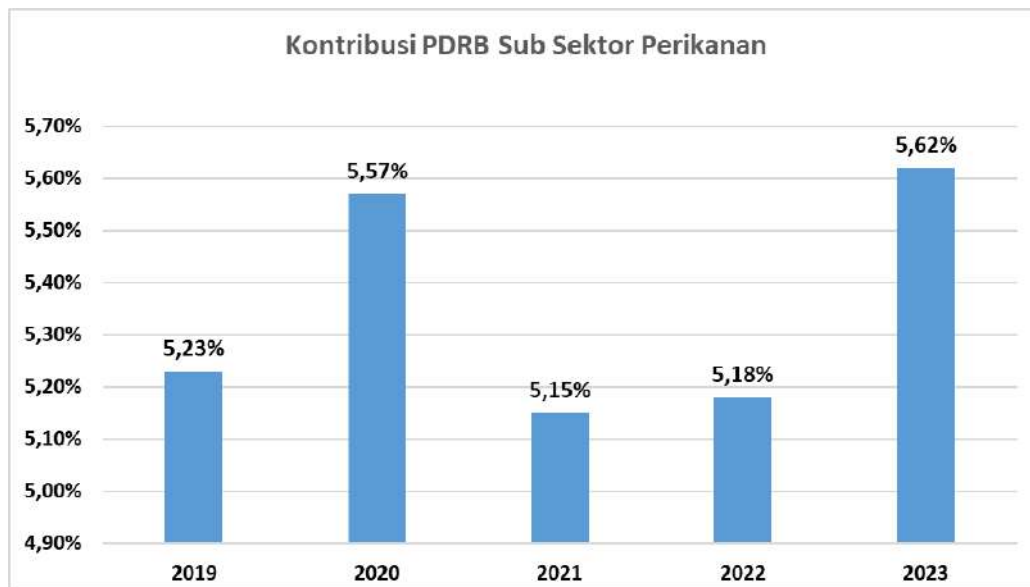
Sumber Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah Industri Kecil dan industri Menengah yang berkurang berbanding terbalik dengan jumlah industri mikro yang bertambah pada tahun 2022 sebanyak 108.050 dibanding tahun 2020 sebanyak 100.625. Hal ini menyebabkan turunnya proporsi jumlah industri kecil dan industri menengah sebanyak 0,46 persen dari 2,52 persen pada tahun 2020.

2.1.3.3.10. Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara dan daerah yang dikelilingi oleh lautan, maka kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan juga Aceh. Sektor kelautan dan perikanan menyumbang kontribusi besar dalam penyediaan bahan pangan, peningkatan devisa, peningkatan pendapatan, pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber potensi wisata yang sangat besar. Oleh karena itu Pemerintah Aceh menempatkan Sub Sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Sub sektor perikanan dalam sektor pertanian saat ini masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh, dan salah satu sektor yang memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Sumbangan sub sektor perikanan terhadap PDRB meningkat tajam di 2023, setelah mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 dan 2022. Besarnya nilai sub sektor perikanan tersebut terdapat pada Gambar 2.85 berikut.



Sumber: DKP Aceh. 2024

Gambar 2. 94

Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Terhadap Total PDRB Aceh Tahun 2019-2023

Aceh memiliki luas wilayah laut mencapai 295.000 km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km. Bentangan geografis ini menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Produksi Perikanan tahun 2019 sampai dengan 2023. Produksi Perikanan Tangkat mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 mencapai 420 ribu ton, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 359 ribu ton.

Tabel 2. 122

Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023.

Produksi Perikanan/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan (ton)	316.483,63	319.648,46	417.947,05	420.500,70	359.453,95
- Produksi perikanan tangkap (ton)	209.174,39	211.266,13	283.676,35	285.094,73	247.434,35
- Produksi perikanan budidaya (ton)	107.309,24	108.382,33	134.270,70	135.405,97	112.019,60

Sumber: DKP Aceh, data diolah, 2024

Permasalahan yang dihadapi nelayan yang menyebabkan menurunnya produksi perikanan tangkap saat ini diantaranya adalah perubahan iklim (el nino dan la nina) yang mempengaruhi waktu penangkapan. Di samping itu permasalahan terkait dengan armada penangkapan yang umumnya masih boat tradisional. Dari total jumlah armada tangkap sebanyak 815 unit pada PPS Lampulo, 70% diantaranya berupa boat dengan ukuran $0 < GT < 5$ (boat thep-thep, yang tidak memiliki palka, tidak ada pembaruan teknologi penangkapan, mengoperasikan 1 alat tangkap, dan merupakan *one day fishing*), sisanya sebanyak 30% merupakan boat ukuran $5 < GT < 10$ (boat bak).

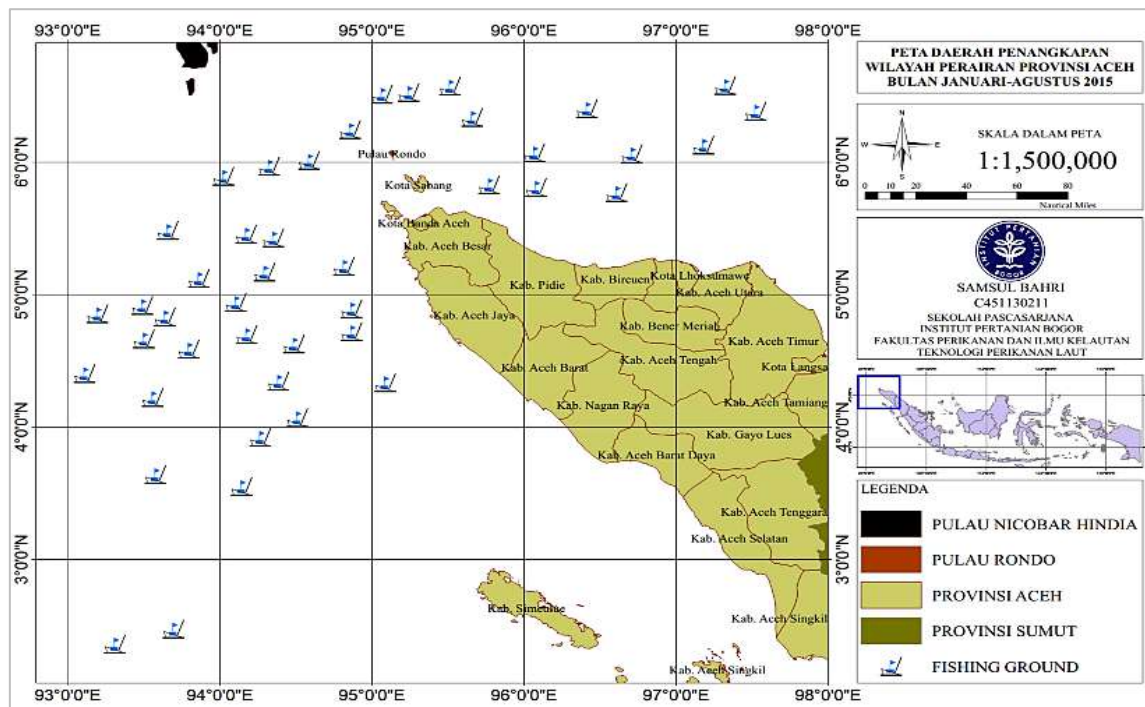
Tabel 2. 123
Jumlah kapal (unit) pada PPS Kutaraja Lampulo

Jenis Kapal	Jumlah (Unit)
0 – 5 GT	454
6 – 10 GT	75
11 – 20 GT	58
21 – 30 GT	110
31 – 60 GT	101
> 60 GT	17
Total	815 Unit

Sumber: DKP Aceh, data diolah, 2024

Boat bak dinilai memiliki beberapa keunggulan, diantaranya; sudah dilengkapi palka berukuran antara 5 hingga 7 ton, adanya pembaruan teknologi dalam kegiatan penangkapan (misalnya, menggunakan GPS), dapat menggunakan beberapa alat tangkap, serta memiliki durasi penangkapan yang lebih lama antara 10-12 hari.

Apabila dilihat dari potensi yang dimiliki, Aceh diperkirakan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap, terutama jenis ikan TTC (Tuna, Tongkol, dan Cakalang). Besarnya potensi ikan tuna diperkirakan mencapai 344.000 ton/tahun untuk ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) dan sebanyak 132.000 ton/tahun untuk ikan tuna mata besar (*Thunnus obesus*) berdasarkan Maximum Sustainable Yield (MSY) atau Produksi Maksimum Lestari pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 dan 572. Berdasarkan data *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), ikan tuna yang bermigrasi di WPP 571 (Selat malaka) dan WPP 572 (Samudera Hindia) umumnya Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) dan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*). Sebaran dan migrasi ikan tuna WPP 571 dan 572 dapat ditunjukkan dalam Peta Fishing Ground Provinsi Aceh di bawah ini.



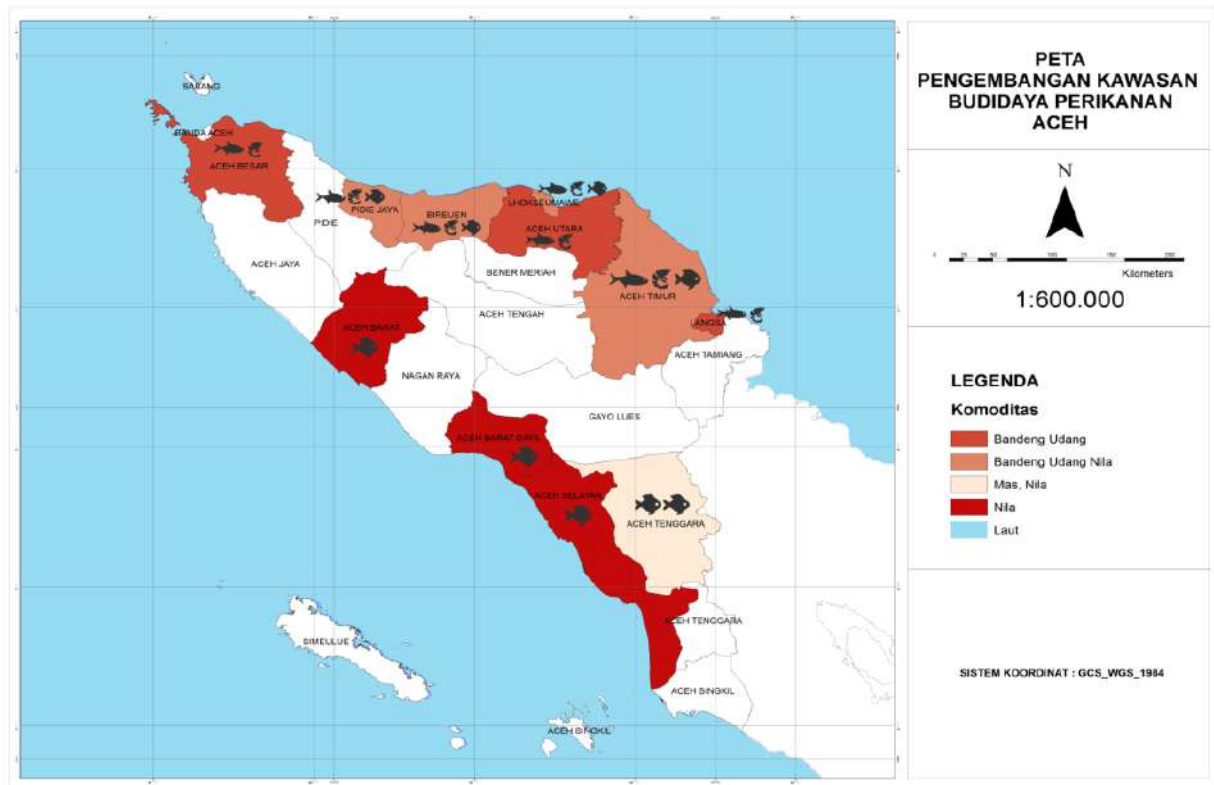
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (2022)

Gambar 2. 95
Peta Fishing Ground Ikan Tuna Provinsi Aceh

Sementara itu, Produksi Perikanan Budidaya mencapai 130 ribu ton lebih pada tahun 2021 dan 2022, namun menurun menjadi 110 ribu ton pada tahun 2023. Penurunan produksi perikanan budidaya diperkirakan sebagai akibat dari beberapa permasalahan yang dihadapi Pembudidaya Ikan di Aceh, diantaranya: tingginya harga pakan (Saat ini pakan masih didatangkan dari luar Aceh sehingga menyebabkan harga pakan relatif tinggi dibandingkan daerah lain), kualitas bibit yang rendah (bibit ikan juga masih didatangkan dari luar daerah, menyebabkan harga jualnya menjadi lebih tinggi namun kualitas tidak terjamin), serta banyaknya pasokan ikan dari luar Aceh dengan harga yang lebih murah sehingga menurunkan permintaan terhadap ikan hasil budidaya lokal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yakni dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh. Kawasan budidaya di pesisir timur

banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng, Nila dan Udang. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.96 berikut.

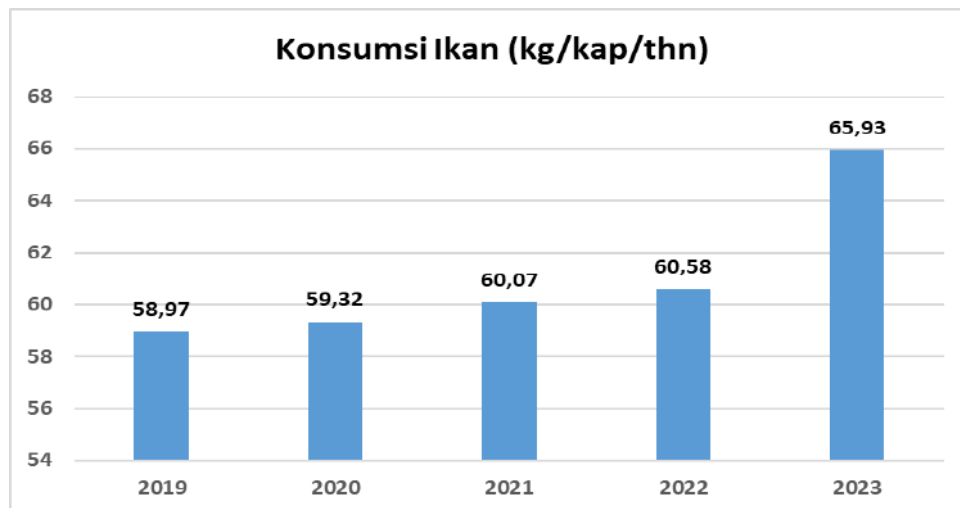


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)

Gambar 2. 96

Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

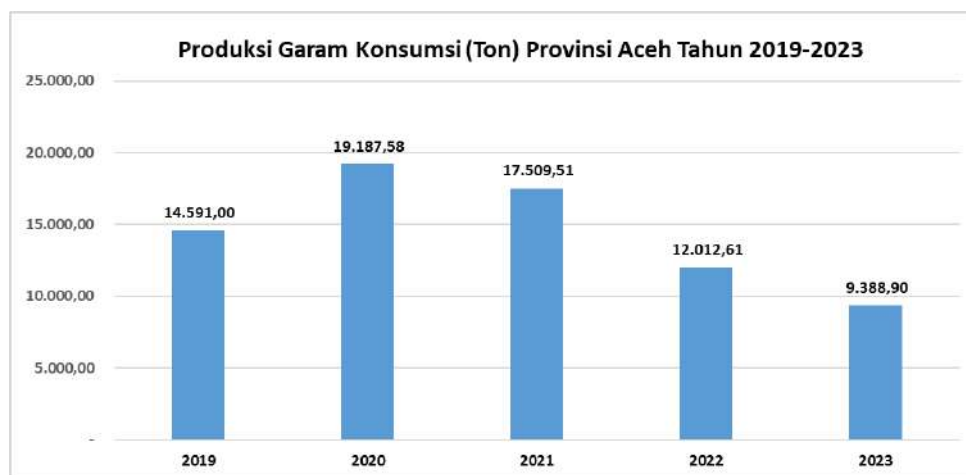
Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 58,97 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 65,93 Kg/Kapita/tahun di tahun 2023. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun.



Sumber: DKP Aceh (2024)

Gambar 2. 97
Konsumsi Ikan Provinsi Aceh Per kapita Tahun 2019-2023

Selain ikan, komoditi kelautan lainnya yang memegang peranan penting dalam perekonomian Aceh adalah garam konsumsi. Produksi Garam Konsumsi di Aceh sejak tahun 2020 terus mengalami penurunan sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber: DKP Aceh (2024)

Gambar 2. 98
Konsumsi Ikan Provinsi Aceh Per Kapita Tahun 2019-2023

Produksi garam di Provinsi Aceh belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dengan baik dikarenakan teknologi yang belum memadai dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, kebutuhan garam Aceh lebih banyak dipenuhi dengan cara mendatangkan garam dari luar Aceh yang memiliki harga jual lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan semakin menurunnya permintaan terhadap garam Aceh.

2.1.3.3.11. Transmigrasi

Transmigrasi dalam konteks pengembangan wilayah merupakan proses pembangunan kawasan berbasis penataan ruang dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha yang dimiliki untuk mencapai tujuan wilayah yang diinginkan. Pengembangan kawasan transmigrasi yang dimaksud menjadi salah satu langkah dalam mengurangi ketimpangan wilayah yang berbasis penataan ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan fungsi dan pelaksanaan sektor ketransmigrasian, terdapat 14 kawasan di Aceh yang saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Namun demikian secara fungsi dan keberadaannya masih perlu menjadi perhatian dengan permasalahan yang sama yakni SPM sarana dan prasarana fisik yang masih perlu menjadi perhatian serius. Kendala utama dalam pengembangan kawasan tersebut yakni keterbatasan fiskal daerah yang tidak memungkinkan untuk merevitalisasi seluruh kawasan. Selain itu juga transmigrasi belum menjadi kawasan yang dapat dibangun secara terintegrasi oleh berbagai multi pihak dan sektor karena terbatasnya kewenangan yang mengikat dalam kawasan tersebut.

Selain 14 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan, Aceh juga memiliki 7 kawasan lainnya yang juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan transmigrasi. Meskipun demikian, ketujuh kawasan tersebut belum ditetapkan secara definitif sebagai kawasan transmigrasi yang penetapannya melalui SK Menteri Transmigrasi. Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai transmigrasi dan kawasan yang memiliki potensi kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 124
Kawasan yang telah ditetapkan sebagai transmigrasi dan kawasan yang memiliki potensi

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Transmigrasi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan transmigrasi sebanyak 14 kawasan:	SPM sarana dan prasarana fisik yang masih perlu menjadi perhatian serius	1. Kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan belum tentu menjadi kawasan prioritas yang akan dilanjutkan proses pembangunannya 2. Komitmen untuk menerapkan pembangunan transmigrasi berbasis kawasan, lintas sektor belum terwujud	1. dana Otsus prov/Kab/kot/dana Migas 2. Peraturan tentang transmigrasi 3. Peraturan tentang Desa
	Kawasan Silaut, Simelue			
	kawasan babahrot, Aceh Barat Daya			
	Kawasan latiung, Simeulue			
	kawasan harus Muda Jaya, Bireuen			
	Kawasan ketapang Nusantara, Aceh tenga			
	Subulussalam			
	samar Kilang, Bener Meriah			
	Woyla, Aceh Barat			
	Cot Girek, Aceh Utara			
	Jantho, Aceh Besar			
	Patek, Aceh Jaya			
	Pintu Rime gayo			
	Seulimum, Aceh Besar			
2	7 kawasan belum ditetapkan oleh Menteri	Belum ditetapkan oleh Menteri karena belum terbitnya rekomendasi Gubernur sehingga tidak dapat dilaksanakan pembangunan kawasan	3. Pembangunan transmigrasi belum menjadi bagian pembangunan desa	
	Gosong Telaga, Aceh Singkil			
	Geumpang-Mane, Pidie			
	Ulee Glee, Pidie Jaya			
	Peunaron-Seumanah jaya, Aceh Timur			
	Seunagan Timur, Nagan Raya			
	Alue Punti, Aceh Tamiang			
	Panten Jaya, Gayo Lues			

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01568/SES/PP.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi Penilaian Indek Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2023. Penilaian IPPN Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan setiap Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya sinergi antar dokumen perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan antara rencana dan kinerja. Dari hasil penilaian IPPN Provinsi Aceh Tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 91,77. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi perencanaan di Pemerintah Aceh memperoleh predikat **Sangat Baik**.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam IPPN yang meliputi aspek sinergi, aspek kualitas perencanaan, dan aspek keterhubungan perencanaan

pembangunan dengan perencanaan kinerja. Aspek Sinergi, bertujuan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

(a) Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN

Terdapat beberapa sub indikator yang masih mendapatkan penilaian atau predikat **sangat kurang** yang meliputi: (1) keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran prioritas nasional (PN) RPJMN, (2) komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Nasional, (3) target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional.

(b) Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RKP.

Terdapat beberapa sub indikator yang masih mendapatkan penilaian atau predikat **kurang dan sangat kurang** yang meliputi: (1) tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN4, PN5, PN6, (2) indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator pada RKP.

(c) Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional/mayor project dalam dokumen RKPD.

Aspek Kualitas Perencanaan merupakan komponen penilaian terhadap hasil akhir kualitas perencanaan yang dilihat dari berbagai kesesuaian dari tiap tiap bagiannya. Sub komponen dari penilaian kualitas perencanaan di daerah diukur berdasarkan sebagai berikut: (1) kesesuaian antara isu strategis-target-program/kegiatan/proyek di RPJMD atau RKPD, (2) inovasi perencanaan pembangunan. Dari kedua sub komponen ini hanya pada sub indikator keterkaitan output dengan outcome inovasi yang memperoleh predikat **kurang** (nilai 3,00) dari maksimal 4,50.

Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja, merupakan indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini adalah target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

2.1.3.4.2. Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke sembilan kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 125
Jumlah Opini WTP Kabupaten Kota 2023

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	16 Kali	13	Pemerintah Aceh	9 Kali
2	Aceh Besar	12 Kali	14	Aceh Barat Daya	9 Kali
3	Kota Sabang	12 Kali	15	Aceh Selatan	9 Kali
4	Kota Lhokseumawe	12 Kali	16	Aceh Timur	8 Kali
5	Kota Langsa	11 Kali	17	Aceh Utara	9 Kali
6	Aceh Barat	10 Kali	18	Nagan Raya	6 Kali
7	Aceh Jaya	11 Kali	19	Pidie	10 Kali
8	Aceh Tamiang	10 Kali	20	Pidie Jaya	10 Kali
9	Aceh Tengah	15 Kali	21	Simeulue	9 Kali
10	Bener Meriah	10 Kali	22	Aceh Singkil	8 Kali
11	Bireuen	10 Kali	23	Subulussalam	5 Kali
12	Gayo Lues	10 Kali	24	Aceh Tenggara	8 Kali

Sumber: BPK, 2024

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2023. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh.

Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

2.1.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuan dari IP-ASN adalah untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Capaian IP ASN di Aceh periode tahun 2020-2024 pada Tabel 2.116. berikut.

Tabel 2. 126
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	61,63	86,1	86,1	57,59	76,76

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, 2025

Dari Tabel 2.116 terlihat bahwa IP-ASN Aceh mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu dari 61,63 menjadi 86,1 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 57,59. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5 dapat direalisasikan sebesar 57,59 dengan persentase tingkat capaian 74,30 persen. Adapun penyebab tidak tercapainya target terhadap indikator ini dikarenakan belum optimalnya pengintegrasian dan sinkronisasi database pegawai ASN Aceh melalui aplikasi E-Keurani dengan aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi data tidak dapat terupdate secara menyeluruh. Untuk nilai IP ASN tahun 2024 belum keluar data realnya hingga saat ini, namun pencapaian sementara hingga Januari 2025 nilai Indeks Profesionalitas ASN sebanyak 76,76 dari target 79,8 sehingga capaian kinerja yang dapat sebanyak 96,19.

Tabel 2. 127
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2020	21.690	207	0,95
2	2021	21.830	333	1,53
3	2022	22.851	540	2,36
4	2023	22.640	565	2,50
5	2024	27.999	527	1,88

Sumber : BPSDMA dan BKA, 2025

Berdasarkan Tabel 2.117 dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional pada tahun 2020 sebesar 0,95 persen dikarenakan refocusing anggaran karena pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya persentase aparatur yang mendapatkan diklat teknis fungsional mulai meningkat lagi pada tahun 2021 dan terus meningkat di tahun 2022 yaitu menjadi 2,36 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,50 persen, untuk tahun 2024 mengalami penurunan di akibatkan adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru di diklatkan pada Tahun 2024 sebanyak 104 Peserta.

Tabel 2. 128
Data Diklat Pejabat Struktural Pemerintah Aceh Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Diklat Struktural Kepemimpinan		
		Jlh Peserta Diklat PKN Tingkat II	Jlh Peserta Diklat PKA	Jlh Peserta Diklat PKP
1	2020	9	2	0
2	2021	5	0	0
3	2022	10	32	0
4	2023	0	92	32
5	2024	0	31	32

Sumber : BPSDMA, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.128, dapat diketahui bahwa jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat PKN Tk. II mengalami fluktuasi dimana jumlah terbanyak ada di tahun 2022 dengan jumlah 10 orang sebelum akhirnya vakum di tahun 2023-2024. Sementara jumlah pejabat eselon III yang mengikuti diklat PKA bertambah setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 hanya terdapat 2 orang yang mengikuti diklat ini dengan metode pengiriman ke Puslatbang KHAN LAN RI, lalu berhenti di 2021 dan dimulai kembali pada tahun 2022 dengan total 32 peserta, dan jumlah tertinggi mencapai 92 orang pada tahun 2023. Adapun untuk Diklat PKP yang diikuti Pejabat Eselon IV vakum selama tiga tahun mulai dari 2020-2022, sebelum akhirnya diselenggarakan kembali pada tahun 2023-2024 dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 32 orang.

Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung program unggulan Aceh Carong terus memberikan kesempatan beasiswa Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat Aceh dan ASN Pemerintah Aceh. Pada tahun 2024, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2. 129
Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	No.	Jenjang
1	Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik	9	S-2 Tahfidz Luar Negeri
2	S-1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh	10	Dokter Spesialis
3	S-1 Prestasi Dalam Negeri	11	S-3 Kerjasama DAAD
4	S-1 Tahfidz Luar Negeri	12	S-3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri
5	S-2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri	13	S-3 Masyarakat Aceh Dalam Negeri

No.	Jenjang	No.	Jenjang
6	S-2 Masyarakat Aceh Luar Negeri	14	S-3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
7	S-2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island)	15	Dosen PTN/PTS Luar Negeri
8	S-2 Kerjasama DAAD		

Sumber : BPSDM Aceh, 2025

Sumber daya Manusia (SDM) memiliki peran vital dalam pembangunan Aceh, sesuai dengan visi Gubernur Aceh yang menekankan pentingnya kualitas SDM sebagai pilar utama pembangunan. Misi kelima dari tujuh misi utama yang secara spesifik berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM Aceh menuju masa depan cerah dan sejahtera. Peningkatan kualitas SDM Aceh dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kelompok usia produktif untuk mendapat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan sarana dalam menyiapkan SDM Aceh yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional dan membuka peluang lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jumlah masyarakat Aceh yang menerima beasiswa yang terus meningkat dari tahun 2019-2024 baik yang melanjutkan Pendidikan dalam negeri maupun luar negeri dengan jenjang Pendidikan mulai dari D1,D3,D4, S1, S2, S3, serta dokter spesialis mengalami fluktuasi. Rincian penerima beasiswa yang melanjutkan Pendidikan tinggi didalam negeri Selama periode 2019-2024 tercatat sebanyak lebih dari 12.566 orang penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang telah dan sedang mengenyam pendidikan tinggi dengan berbagai tingkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2. 130
Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan Spesialis dalam Negeri Tahun 2019-2024

No	Tahun	Dalam Negeri Dan Luar Negeri								Jumlah
		Non Gelar	D1	D3	D4	S1	S2	S3	SPS	
1	2019	-	40	301	34	991	55	100	37	1558
2	2020	-	-	310	7	863	42	79	35	1336
3	2021	-	40	550	5	2106	301	169	106	3277
4	2022	200	38	417	254	1958	142	129	72	3210
4	2023	-	-	347	207	1168	47	72	57	1898
6	2024			151	124	920	-	45	47	1287
Total		200	118	915	585	4046	189	246	176	12566

Sumber : BPSDM Aceh, 2025

Selama periode 2019-2024 tercatat sebanyak lebih dari 12.566 orang penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang telah dan sedang mengenyam pendidikan

tinggi dengan jenjang Pendidikan S1, S2 dan S3. Data penerima penerima beasiswa dari Pemerintah Aceh dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2. 131
Rekapitulasi Penerima Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang S1, S2, S3
Luar Negeri Tahun 2019-2024

No	Tahun	Luar Negeri			Jumlah
		S1	S2	S3	
1	2019	43	40	35	118
2	2020	43	26	16	85
3	2021	114	131	49	294
4	2022	108	88	36	232
5	2023	64	43	28	135
6	2024	55	18	39	112
Total		427	346	203	976

Sumber : BPSDM Aceh, 2025

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang memegang peranan penting dalam mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data dan fakta (evidence based planning). Oleh karenanya, unsur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Peran dan fungsi penelitian dan pengembangan termasuk inovasi dari suatu daerah dapat diukur tingkat capaiannya dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, nilai indeks inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Beberapa indikator di atas juga merupakan salah satu indikator kinerja dalam sistem pemerintahan yang diukur capaiannya setiap tahun.

2.1.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program. Pada tahun 2024 persentase objek Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih berada di level 3 (nilai 0-5).

2.1.3.4.6. Sekretariat DPRD

Layanan bidang urusan Sekretariat DPRA meliputi: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA.

Pelayanan Sekretariat DPRA diberikan dalam bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRA baik dalam bentuk dukungan administrasi dan keuangan, sarana dan prasarana, serta fasilitasi terhadap 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran pada IDSD 2024 mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum atau WEF (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi skor nasional IDSD (berdasarkan skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

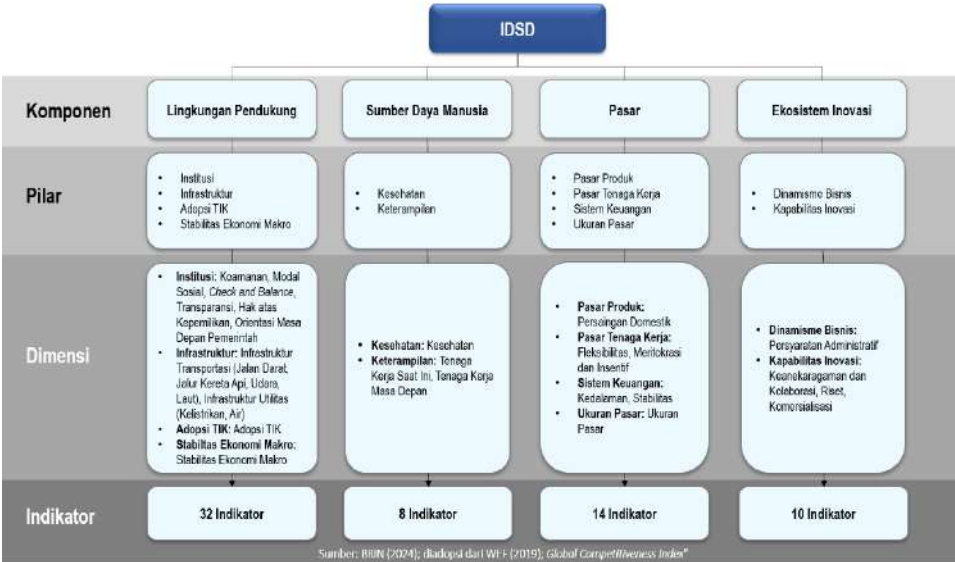
Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam tiga komponen awal pembentuk daya saing. Penyusunan IDSD 2024 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan mulai dari pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan data, pengolahan data, standarisasi data, penghitungan skor akhir dengan agregasi, dan kontrol kualitas data akhir (uji statistik). IDSD 2024 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan

IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu Kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek. Sedangkan Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Tahun 2024 nilai capaian IDSD Provinsi Aceh yaitu sebesar 3,49, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Nasional yaitu 3,43. Selengkapnya berikut ini tabel nilai capaian IDSD Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2024.



Gambar 2. 99
Kerangka IDSD 2024

Secara regional skor IDSD Aceh tahun 2024 tertinggi ketiga di Sumatera setelah Sumatera Utara (3,71) dan Sumatera Barat (3,70). Selanjutnya berdasarkan pembentuk IDSD nilai tertinggi Aceh diperoleh dari pilar 1 institusi yang mencapai 4,70 dan terendah dari pilar 9 sistem keuangan dengan nilai 2,10 (lihat Gambar 2.100).



NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR			EKOSISTEM INOVASI			SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROVINSI ACEH	4,70	2,75	3,12	3,88	3,78	4,05	4,36	2,76	2,10	4,35	2,78	3,24	3,49
RATA-RATA KABIKOTA	4,43	2,82	3,78	3,80	3,64	3,88	3,37	3,22	2,18	3,78	4,04	1,86	3,40
SIMEULUE	4,31	2,31	3,92	3,92	3,39	3,79	3,81	2,39	1,78	3,34	4,19	1,88	3,25
ACEH SINGKIL	4,41	3,00	4,17	3,44	3,57	3,58	3,73	3,22	2,37	3,37	3,69	0,98	3,29
ACEH SELATAN	4,54	2,72	3,35	4,06	3,32	3,97	3,56	3,04	2,62	3,77	4,04	1,23	3,35
ACEH TENGGARA	3,76	2,58	2,60	3,79	3,64	3,94	3,65	2,70	2,80	3,66	3,91	1,67	3,22
ACEH TIMUR	4,63	2,61	3,10	3,56	3,68	3,43	2,85	2,97	2,07	4,05	3,66	1,27	3,16
ACEH TENGAH	4,30	3,05	3,60	3,67	3,69	4,01	2,97	2,48	1,71	3,92	4,21	2,30	3,32
ACEH BARAT	4,63	2,73	3,93	3,69	3,62	3,72	2,15	3,05	2,19	4,01	4,33	2,75	3,40
ACEH BESAR	4,58	3,46	3,91	3,99	3,77	3,70	3,87	3,40	1,96	4,15	4,20	2,55	3,63
PIDIE	4,61	2,80	3,10	3,58	3,53	3,83	3,50	3,48	1,94	4,04	3,82	2,51	3,39
BIREUEN	4,65	3,22	3,94	3,64	3,89	4,17	4,01	3,38	1,35	4,16	4,39	2,35	3,60
ACEH UTARA	4,51	2,55	3,83	2,99	3,68	3,64	2,27	2,98	1,63	4,36	3,60	2,78	3,24
ACEH BARAT DAYA	4,68	2,33	3,51	4,38	3,38	4,00	3,75	3,45	2,16	3,61	4,04	0,74	3,34
GAYO LUES	4,37	2,47	2,74	3,89	3,41	3,93	2,83	1,94	1,67	3,42	3,58	1,15	2,95
ACEH TAMIANG	4,31	3,03	4,04	3,72	3,76	3,69	2,24	3,23	2,07	3,91	4,25	0,92	3,26
NAGAN RAYA	4,62	2,65	3,87	3,01	3,72	3,73	1,84	3,18	2,54	3,99	3,75	1,07	3,16
ACEH JAYA	4,75	3,04	3,41	4,02	3,55	4,20	3,24	3,76	1,52	3,43	3,90	1,38	3,35
BENER MERIAH	4,44	2,48	3,65	3,79	3,72	4,17	2,18	2,02	1,36	3,71	4,18	1,35	3,09
PIDIE JAYA	4,76	2,72	3,09	3,98	3,80	4,08	3,14	3,77	1,74	3,54	4,18	1,14	3,33
BANDA ACEH	4,23	3,32	4,87	3,91	3,92	3,92	5,00	4,15	3,74	4,34	4,54	3,96	4,16
SABANG	4,61	3,33	4,72	4,24	3,84	4,33	4,47	3,30	3,06	3,17	4,06	2,17	3,77
LANGSA	4,18	2,93	4,77	3,96	3,74	3,90	5,00	3,92	2,38	3,73	4,49	3,18	3,85
LHOKSEUMAWE	4,25	2,98	4,75	4,11	3,93	3,82	4,39	4,51	2,61	4,00	3,92	2,87	3,85
SUBULUSSALAM	3,77	2,61	4,10	3,98	3,29	3,71	3,02	3,67	2,96	3,28	3,97	0,68	3,25

Gambar 2. 100
Skor IDSD 2024 Provins Aceh

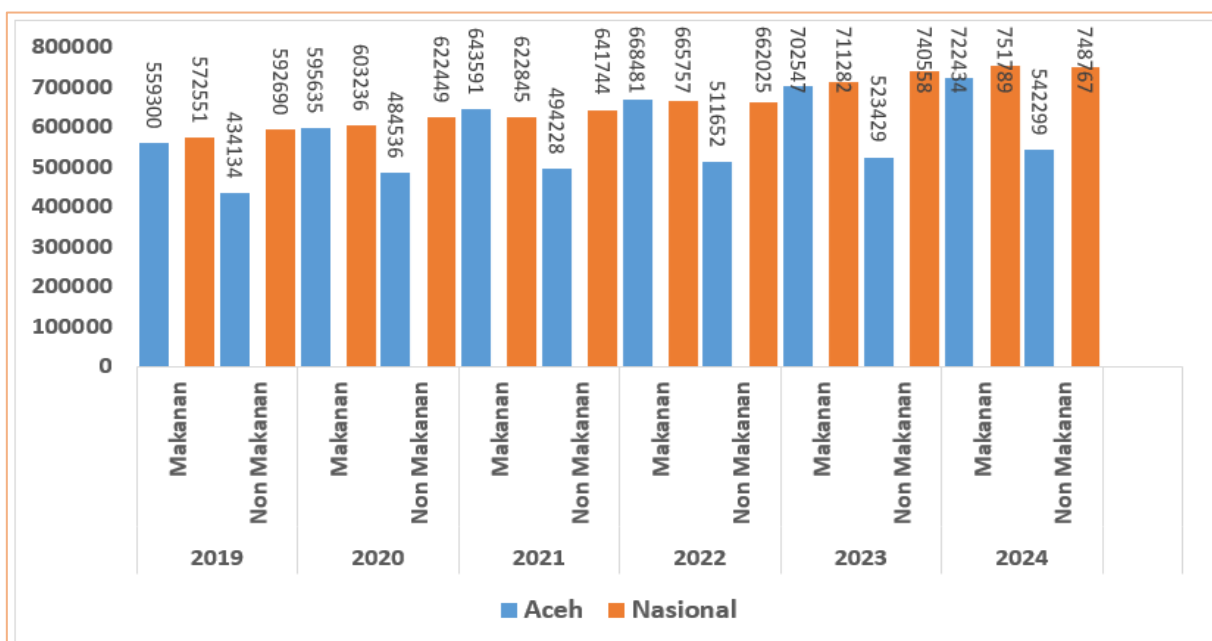
Berdasarkan Gambar di atas, diketahui terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD Tahun 2024 diatas Aceh (3,49) dan Nasional (3,43) yang meliputi sebagai berikut: Kota Banda Aceh (4,16) , Kota Lhokseumawe (3,85), Kota Langsa (0,85) Kota Sabang (3,77), Kab. Aceh Besar (3,63) dan Kab. Bireuen (3,60). Sementara itu 3 (tiga) kabupaten/kota dengan IDSD terendah adalah Kab. Gayo Lues (2,95), Kab. Nagan Raya (3,16) dan Kab. Aceh Tenggara (3,22).

2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Indikator ini dapat memberi gambaran dan menjelaskan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas kegiatan pembangunan perekonomian daerah.

2.1.4.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 668 ribu atau sebesar 56,66 persen. Pengeluaran konsumsi non makanan tertinggi juga terjadi pada tahun 2022 sebesar 511 ribu atau sebesar 43,36 persen. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.101 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 101

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Makanan Dan Non Makanan) Tahun 2019-2024

Pada gambar 2.01 rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menurut kelompok barang kabupaten/kota, 2019-2024 secara umum berfluktuasi cenderung meningkat dan pengeluaran untuk makanan lebih dominan dari makanan. terus mengalami peningkatan baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan namun rata-rata pengeluaran per kapita Aceh relative berada di bawah rata-rata pengeluaran per kapita Nasional. Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi per kapita perbulan Aceh sebesar Rp.722.434, dan nasional adalah sebesar Rp.751.789 . Sedangkan pengeluaran konsumsi per kapita perbulan untuk non makanan Aceh sebesar Rp.542.299 dan nasional relatif lebih baik yaitu sebesar Rp. 748.767. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan.

Pengeluaran rata-rata rumah tangga per kapita sebulan pada tahun 2019 yang berada di atas rata-rata Aceh terdapat di 11 (sebelas) kabupaten/kota, tertinggi di Kota Banda Aceh dan berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan rata-rata pengeluaran Per kapita yang berada di bawah rata-rata Aceh terdapat di 12 (dua belas) kabupaten/kota dan terendah adalah Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi di atas rata-rata Aceh dan Nasional yaitu, Kota Banda Aceh dan Sabang sedangkan yang terendah atau berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional yaitu, Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2. 132

Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita Sebulan menurut Kelompok Barang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Rupiah), Tahun, 2019-2023

KAB/KOTA/ PROVINSI/ NASIONAL	JENIS KONSUMSI									
	MAKANAN					NON MAKANAN				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
SIMEULUE	484431.95	477616.29	442321.79	568852.19	599919.00	348862.70	357000.95	319763.26	373413.34	449243.00
ACEH SINGKIL	505363.22	524441.60	547719.84	598466.75	717289.00	341165.49	392315.25	417512.91	407514.32	458525.00
ACEH SELATAN	516954.09	571914.39	587808.75	548871.52	535670.00	322048.82	449330.89	384002.94	349266.78	334005.00
ACEH TENGGARA	525849.58	532865.68	565035.34	573133.79	606372.00	311721.31	402438.00	393144.81	438080.00	384152.00
ACEH TIMUR	507356.71	598023.05	570085.02	702802.52	634612.00	275298.40	384624.08	384717.34	425617.16	411578.00
ACEH TENGAH	615661.06	720127.93	731026.26	672034.16	686759.00	522080.16	772672.17	561977.35	568435.01	591628.00
ACEH BARAT	635496.67	730223.66	857354.63	849744.31	847241.00	637461.89	640719.47	675787.94	663669.86	677220.00
ACEH BESAR	595554.95	594044.07	662848.97	604091.90	639948.00	475032.59	503387.27	488223.59	494034.61	560990.00
PIDIE	539946.36	609935.22	654984.20	663711.41	679888.00	318392.38	396693.43	394201.54	397783.05	398984.00
BIREUEN	527577.29	530591.40	687257.31	781514.55	739433.00	379760.95	399495.49	434936.69	527174.47	490321.00
ACEH UTARA	459596.85	473847.01	457953.12	540962.67	577079.00	288738.04	286145.03	280268.23	314296.64	353875.00
ACEH BARAT DAYA	495556.37	554298.96	538141.75	545217.99	635124.00	387137.98	395943.48	366887.81	337359.58	453224.00
GAYO LUES	733859.52	688398.87	830288.66	770559.00	747630.00	536629.69	513728.22	616835.09	542367.55	486345.00
ACEH TAMIANG	442298.43	442060.09	498199.43	559578.72	576131.00	316016.95	353666.92	377340.82	456174.58	447751.00
NAGAN RAYA	534409.54	629615.94	821329.84	901022.02	1357007.00	398667.27	525892.71	532243.65	581394.35	674295.00
ACEH JAYA	619049.40	633064.87	761452.35	738528.18	745983.00	426358.87	409930.82	541880.03	505067.14	540294.00
BENER MERIAH	680702.66	712018.07	649228.11	724104.01	863646.00	478294.07	497186.00	488598.96	532474.20	656660.00
PIDIE JAYA	611552.07	762984.36	700228.21	715606.76	670555.00	394235.01	450972.36	393306.91	414966.46	421075.00
BANDA ACEH	848046.42	839685.19	973987.60	903778.97	939848.00	1122766.21	1161846.30	1423313.17	1296524.52	1157905.00
SABANG	780405.09	802787.91	789613.75	855133.02	840007.00	674699.98	672673.08	625598.41	711078.62	807205.00
LANGSA	582716.27	621888.48	672508.68	662477.22	701105.00	706272.50	721191.97	737249.61	779193.36	690824.00
IHOKSEUMAWE	614100.85	612788.00	710184.00	591351.05	773859.00	570254.66	567103.91	669435.13	622837.43	727866.00
SUBULUSSALAM	490168.01	484105.43	505157.13	619912.03	657093.00	416262.75	433839.15	366292.78	487918.98	578505.00
ACEH	559,299.00	595,634.00	643,591.00	668,481.00	702,547.00	434,133.00	484,536.00	494,228.00	511,652.00	523,429.00
NASIONAL	572,551.16	603,235.72	622,845.47	665,757.00	711,282.00	592,689.58	622,448.97	641,744.27	662,025.00	740,558.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2024

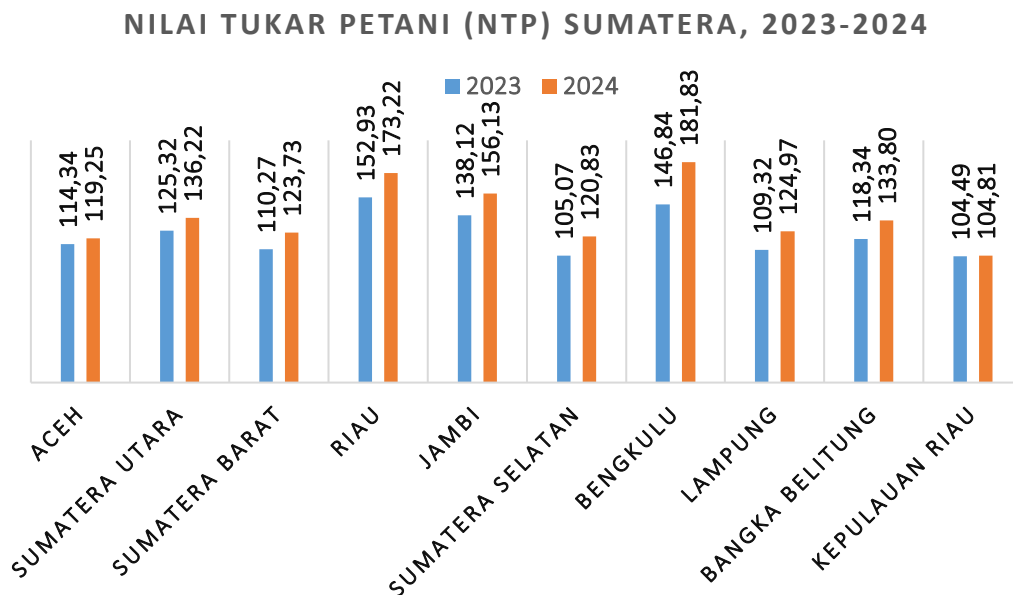
2.1.4.2.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Secara umum, NTP di Sumatera tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. NTP tertinggi dialami oleh Provinsi Bengkulu, dari 146,84 pada tahun 2023 menjadi 181,83 pada tahun 2024. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh Provinsi Riau, yaitu: dari 152,93 pada tahun 2023 menjadi 172,93 pada tahun 2024. Sementara itu, NTP terendah dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 104,49 pada tahun 2023, naik sedikit menjadi 104,81 pada tahun 2024. Aceh menempati posisi terendah kedua atau urutan ke 9 dari 10 provinsi di Sumatera, dengan NTP sebesar 114,34 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 119,25 pada tahun 2024.

NTP Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan yang terlihat dari grafik perkembangan yang terus mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, NTP Aceh berada pada angka 92,29 dan meningkat menjadi 107,45 pada tahun 2022. NTP Aceh terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi 119,25. Meskipun terjadi peningkatan, perkembangan NTP Aceh dinilai lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan NTP provinsi lainnya di Sumatera.

Perlambatan kenaikan NTP utamanya disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) lebih cepat dibandingkan dengan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok, diperkirakan memengaruhi daya beli petani secara keseluruhan.

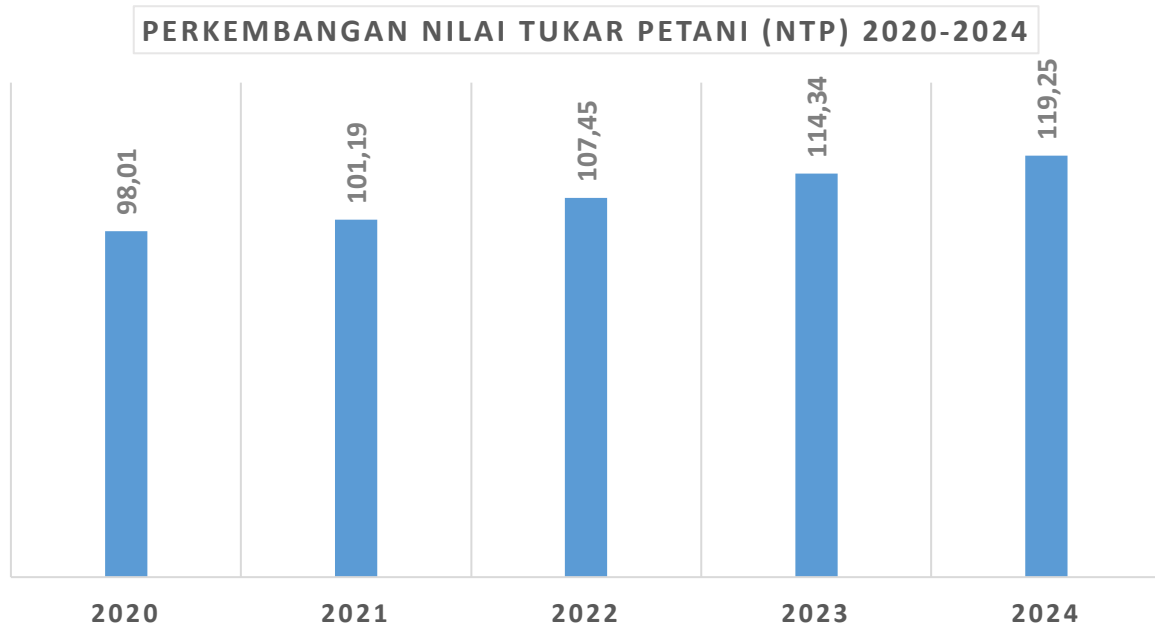


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2. 102
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami tren penurunan. Tahun 2014 NTP Aceh berada pada angka 98.15 dan terus tertekan sampai tahun 2019 yang sudah menyentuh angka 92.29. Dalam kurun waktu lima tahun NTP jatuh lebih dari 5 poin (5.86). Tahun 2020 inflasi sudah dapat ditekan sampai angka 0,99 persen dan NTP juga sedikit mengalami perbaikan 5.72 point yaitu menjadi sebesar 98.01.

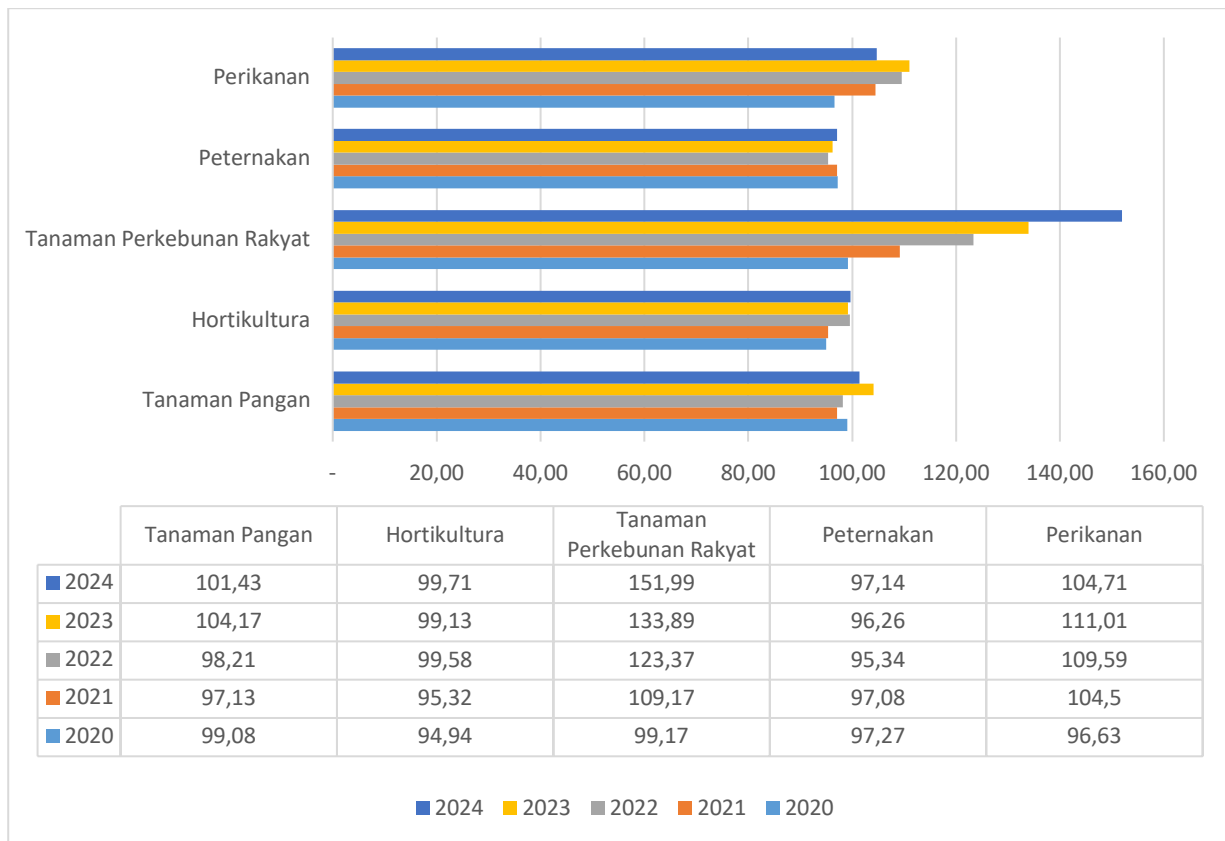
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Akibat NTP yang mengalami penurunan ini berdampak melemahnya daya beli petani yang berujung pada tergerusnya kesejahteraan petani.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 103
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2020-2024

NTP dari tiap subsektor di Provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup stabil, dimana NTP berada di atas 95 poin. Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat merupakan sektor yang paling tinggi pertumbuhannya, dimana sektor ini dapat tumbuh sebesar 52,82 poin dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Di sisi lain, masih terdapat subsektor yang memiliki NTP di bawah 100 poin, yaitu subsektor Peternakan dan Hortikultura. Meskipun demikian, kedua sektor ini menunjukkan tren kenaikan yang perlahan dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

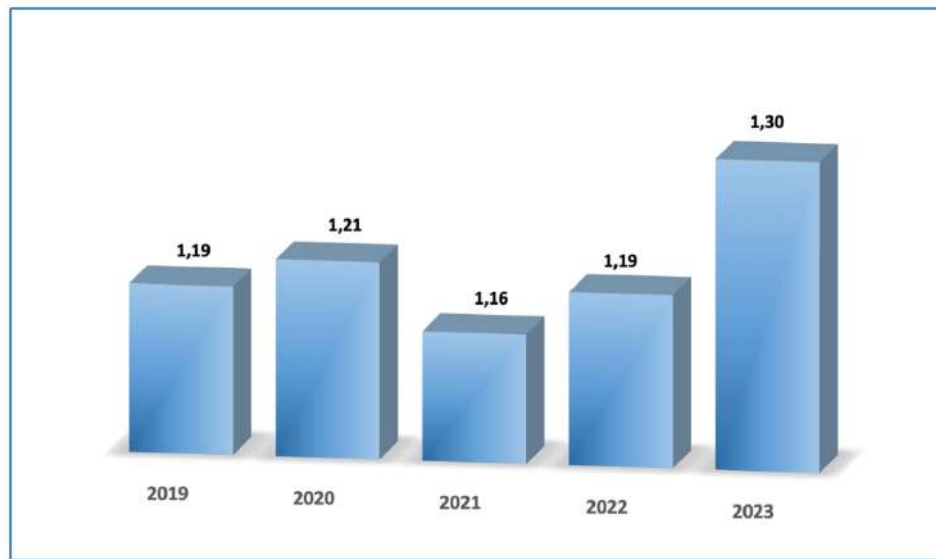
Gambar 2. 104
NTP Aceh Menurut Subsektor, 2020-2024

2.1.4.2.3. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan ekonomi merupakan suatu faktor penting yang berkontribusi pada pertumbuhan suatu daerah. Keterbukaan ekonomi menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Secara teori keterbukaan ekonomi memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Keuntungan dari keterbukaan ekonomi melalui perdagangan diantaranya berupa pembukaan akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang pada setiap negara untuk mengeksport barang yang faktor produksinya menggunakan sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya langka atau mahal jika diproduksi di dalam daerah dengan begitu ekspor impor dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Faktor keterbukaan ekonomi ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena perkembangan perdagangan internasional dan antar daerah mampu mendorong berbagai macam sektor pembentuk pertumbuhan

ekonomi. Adapun Nilai keterbukaan ekonomi Aceh seperti yang disajikan pada Gambar 2.105.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024 (diolah)

Gambar 2. 105
Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2019-2023

Nilai tersebut dapat dihitung dari total ekspor dan total impor Aceh terhadap nilai PDRB. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa indeks keterbukaan ekonomi Aceh cukup baik dan terus meningkat dari tahun 2019 dengan indeks 1,19 menjadi 1,21 pada tahun 2020, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 dapat meningkat kembali menjadi 1,19 dan berlanjut dengan peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1,30. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat di pengaruhi oleh sektor perdagangan, baik perdagangan internasional maupun perdagangan antar daerah. Tingginya Indeks Keterbukaan Ekonomi ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang yang dibentuk oleh berbagai sektor dengan yang didukung atau didorong oleh sektor perdagangan. Namun demikian Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan ketahanan dan kestabilan dalam daerah, mengingat tingginya derajat keterbukaan ekonomi juga menunjukkan tingginya pengaruh atau fluktuasi dari faktor-faktor eksternal.

2.1.4.2.4. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank

Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan kondisi yang terjaga. Aktivitas perbankan di Aceh pada triwulan IV 2023 terpantau mengalami perbaikan. Hal Ini tercermin dari ketahanan dan kualitas kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Aceh.



Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2024

Gambar 2. 106

Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank) Tahun 2021-2023

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran Pembiayaan di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan sebesar 12,68 % (yoy). Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek menurun sebesar 1,25% (yoy). Sementara itu, jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sebesar 5,78% (yoy).

Beberapa indikator utama seperti penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana yang dihimpun atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terus dipantau untuk melihat bagaimana kondisi sektor keuangan.



Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2024

Gambar 2. 107

Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro)

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp38,57 Triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp37,48 Triliun atau tumbuh sebesar 12,68 % (yoy).

Peningkatan penyaluran pembiayaan mendorong peningkatan FDR di triwulan laporan menjadi sebesar 92,00%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 94,02%..

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah banjir. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.4.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.134.

Tabel 2. 133
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simelue	1.821,75	98.633	795,37	0,44	8,06
Aceh Singkil	1.852,82	135.684	556,76	0,30	4,10
Aceh Selatan	4.175,37	241.994	1.232,35	0,30	5,09
Aceh Tenggara	4.179,12	234.430	1.253,58	0,30	5,35
Aceh Timur	5.432,63	443.638	1.766,57	0,33	3,98
Aceh Tengah	4.521,70	226.744	1.159,75	0,26	5,11
Aceh Barat	2.818,17	206.822	867,41	0,31	4,19
Aceh Besar	2.882,83	428.254	1.644,63	0,57	3,84
Pidie	3.133,93	452.547	1.288,84	0,41	2,85
Bireuen	1.793,27	459.073	1.352,21	0,75	2,95

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Aceh Utara	2.711,15	631.984	2.223,13	0,82	3,52
Aceh Barat Daya	1.882,28	159.187	844,36	0,45	5,30
Gayo Lues	5.541,28	106.791	1.109,87	0,20	10,39
Aceh Tamiang	2.184,40	309.039	1.082,24	0,50	3,50
Nagan Raya	3.416,32	176.429	1.147,02	0,34	6,50
Aceh Jaya	3.893,05	99.200	710,73	0,18	7,16
Bener Meriah	1.930,75	172.036	1.479,10	0,77	8,60
Pidie Jaya	953,12	166.467	580,56	0,61	3,49
Banda Aceh	55,85	265.019	676,06	12,10	2,55
Sabang	122,04	43.470	209,97	1,72	4,83
Langsa	217,17	197.909	657,87	3,03	3,32
Lhokseumawe	136,49	200.403	447,25	3,28	2,23
Subulussalam	1.183,60	99.062	604,72	0,51	6,10

Sumber: BPS 2025, diolah (termutakhir)

Tabel 2.134. memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,10 km/km²), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,20 km/Km²). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (10,39 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,23 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 6.1) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

2.1.4.3.2. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh pada Tahun 2023 yaitu dengan perpipaan sebesar 9,57 persen, pompa sebesar 8,36 persen, air dalam kemasan sebesar 46,23 persen, sumur terlindung sebesar 22,58 persen, sumur tak terlindung sebesar 2,48 persen, mata air terlindung sebesar 7,20 persen, mata air tak terlindung sebesar 1,72 persen, air permukaan sebesar 1,50 persen, air hujan sebesar 0,27 persen dan lainnya sebesar 0,08 persen. Selanjutnya Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabe 2.134

Tabel 2.134
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber
Air Minum di Provinsi Aceh, 2023

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
Simeulue	0,70	1,77	77,77	7,01	3,84	2,81
Aceh Singkil	3,06	13,00	36,94	25,55	7,86	3,93
Aceh Selatan	16,29	16,17	36,60	18,36	0,60	2,73
Aceh Tenggara	53,62	17,60	8,11	6,73	1,01	6,56
Aceh Timur	12,96	7,57	38,11	30,35	3,03	3,71
Aceh Tengah	5,52	5,49	19,97	8,52	0,31	49,17
Aceh Barat	1,56	17,33	49,98	23,88	0,78	5,15
Aceh Besar	1,05	3,39	68,19	18,57	0,43	5,15
Pidie	1,58	9,06	44,63	37,64	3,13	0,59
Bireuen	15,92	3,91	36,39	37,31	3,84	0,39
Aceh Utara	12,65	5,08	33,32	43,88	1,47	2,66
Aceh Barat Daya	0,86	28,21	39,61	16,76	1,95	11,47
Gayo Lues	25,32	3,73	20,68	2,44	13,89	29,39
Aceh Tamiang	9,29	15,89	61,18	9,04	3,17	0,68
Nagan raya	0,09	13,68	48,64	19,05	0,60	17,09
Aceh Jaya	4,29	3,97	37,29	22,95	2,88	20,92
Bener Meriah	15,05	2,65	11,54	10,05	2,09	45,22
Pidie Jaya	12,47	5,66	39,67	38,22	2,40	1,56
Banda Aceh	3,22	0,00	96,09	0,69	0,00	0,00
Sabang	7,57	0,00	86,05	3,08	0,00	1,56
Langsa	1,29	12,16	84,83	0,92	0,13	0,18
Lhokseumawe	0,87	4,38	86,91	7,71	0,13	0,00
Subulussalam	4,29	9,10	15,47	31,10	28,70	0,95
Aceh	9,57	8,36	46,23	22,58	2,48	7,20

Sumber: BPS 2025 (termutakhir)

Tabel 2. 135
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber
Air Minum di Provinsi Aceh, 2023 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Simeulue	1,69	0,31	3,55	0,55	100,00
Aceh Singkil	1,65	5,06	2,94	0,00	100,00
Aceh Selatan	2,31	6,94	0,00	0,00	100,00
Aceh Tenggara	2,29	4,08	0,00	0,01	100,00
Aceh Timur	1,61	2,45	0,00	0,21	100,00
Aceh Tengah	10,64	0,20	0,28	0,00	100,00
Aceh Barat	0,00	0,45	0,87	0,00	100,00
Aceh Besar	0,14	2,77	0,00	0,32	100,00
Pidie	2,21	1,04	0,00	0,13	100,00
Bireuen	1,33	0,90	0,00	0,00	100,00
Aceh Utara	0,12	0,76	0,05	0,00	100,00
Aceh Barat Daya	0,64	0,50	0,00	0,00	100,00
Gayo Lues	4,53	0,00	0,00	0,02	100,00
Aceh Tamiang	0,40	0,37	0,00	0,00	100,00
Nagan raya	0,66	0,00	0,00	0,20	100,00
Aceh Jaya	4,12	3,57	0,00	0,00	100,00

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Bener Meriah	8,98	2,04	2,38	0,00	100,00
Pidie Jaya	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
Banda Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sabang	1,51	0,00	0,00	0,22	100,00
Langsa	0,50	0,00	0,00	0,00	100,00
Lhokseumawe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Subulussalam	2,80	5,63	1,26	0,68	100,00
Aceh	1,72	1,50	0,27	0,08	100,00

Sumber: BPS 2025 (termutakhir)

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga belum memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan sumber air baku yang tidak merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pembangunan sistem penyediaan air minum regional pada daerah yang ketersediaan sumber air baku yang tidak merata.

2.1.4.3.3. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2018-2022 meningkat sebesar 0.07. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 2.136.

Tabel 2. 136
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2018-2022

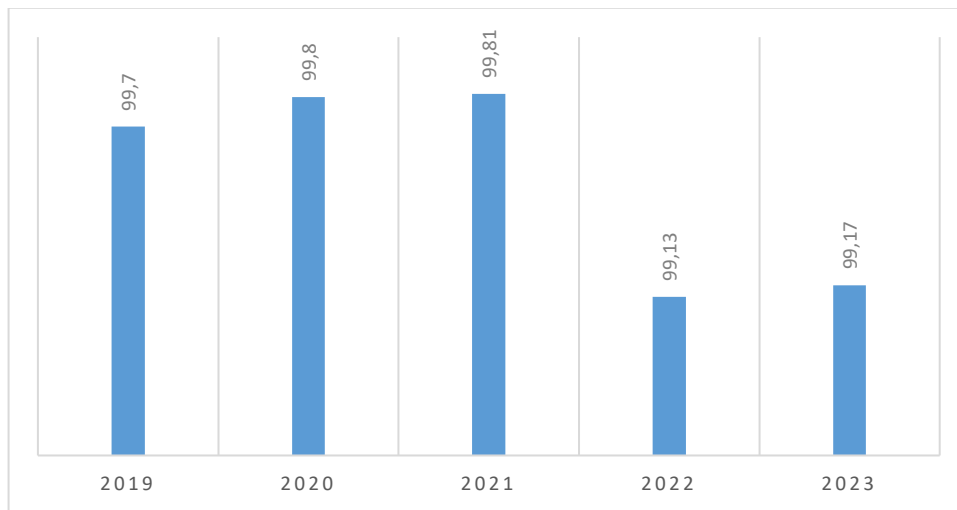
Jenis Penerangan	Tahun (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Daya Listrik Terpasang (MW)	580	605	615	712	712
Jml. Kebutuhan Daya Listrik (MW)	496	535	540	573	573
Rasio Ketersediaan Listrik	1,17	1,13	1,14	1,24	1,24

Sumber: Dinas ESDM Aceh. 2024

2.1.4.3.4. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh mengalami fluktuasi. Jumlah rumah tangga yang

menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2023 sebanyak 1.367.417 Rumah Tangga. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat di lihat pada gambar 2.108 berikut ini.



Sumber : Statistik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Gambar 2. 108
Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2019-2023

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 persen melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPA

2.2.1. Realisasi Pendanaan Tahun 2024

Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 11,45 Triliun atau sebesar 102,82 persen dari target Perubahan RKPA tahun 2024 sebesar Rp. 11,14 Triliun. Realisasi pendapatan ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian Realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 (*audited*) sebesar Rp. 10,57 Triliun.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Aceh Tahun 2024 mencapai Rp. 11,34 Triliun atau 98,23 persen dari target Perubahan RKPA tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp. 11,55 Triliun dan nilai capaian realisasi ini lebih kecil dari realisasi belanja Aceh tahun 2023 (*audited*) mencapai Rp. 11,35 Triliun. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 tersebut menyebabkan terjadinya surplus terhadap anggaran sebesar Rp 0,11 Triliun. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.138 berikut ini.

Tabel 2. 137
Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2024

No	Uraian	RKPA 2024 (Rp)	Realisasi				Realisasi APBA s.d TW IV Tahun 2024	
			Semester I		Semester II			
			Rp	%	Rp	%	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan	11.138.965.353.316	4.639.527.897.424	41,65	6.813.997.468.324	61,17	11.453.525.365.748	102,82
2	Belanja (termasuk transfer ke Kab/Kota)	11.548.261.271.557	3.709.143.830.963	32,12	7.634.139.748.221	66,11	11.343.283.579.184	98,23
3	Surplus/Defisit	(409.295.918.241)	930.384.066.461		(820.142.279.897)		110.241.786.564	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

2.2.1.1. Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Target penerimaan pendapatan Aceh dalam RKPA Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 8,11 persen dari RKPA Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp. 11.138.965.353.316. Tingkat realisasi pendapatan tahun 2024 terhadap target RKPA tahun 2024 mencapai 102,82 persen. Jumlah realisasi pendapatan terbesar berasal dari Dana transfer pemerintah pusat.

Pada umumnya Pendapatan Aceh masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari target besarnya Pendapatan Aceh, besarnya persentase Pendapatan Asli Aceh (PAA) relatif semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Aceh, PAA tercatat sebesar 27,10 persen, hal ini menunjukkan bahwa daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah disamping pendapatan daerahnya masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai target dan realisasi pendapatan daerah, dapat dilihat Tabel 2.138 pada berikut.

Tabel 2. 138
Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	RKPA 2024 (Rp)	Realisasi APBA s.d TW IV 2024	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Aceh	3.019.019.705.316	3.281.968.205.589	108,71
I.1	Pajak Aceh	1.877.493.725.719	1.930.600.340.560	102,83
I.2	Retribusi Aceh	693.832.792.144	790.755.339.626	113,97
I.3	Hasil pengolahan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	265.530.274.530	267.660.903.349	100,80
I.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	182.162.912.923	292.951.622.054	160,82
2	Pendapatan Transfer	8.117.977.648.000	8.167.681.018.238	100,61
2.1	Dana Perimbangan		3.872.838.501.238	
2.1.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak		384.514.132.000	
2.1.3	Dana alokasi umum		2.310.752.304.717	
2.1.4	Dana alokasi khusus		1.177.572.064.521	
2.1.5	Dana Insentif Daerah		17.849.482.000	
2.2	Dana Otonomi Khusus		4.276.993.035.000	
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.968.000.000	3.876.141.921	196,96
3.1	Hibah	1.968.000.000	2.794.075.498	141,98
3.3	Pendapatan lainnya		1.082.066.423	
JUMLAH PENDAPATAN		11.138.965.353.316	11.453.525.365.748	102,82

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- ✚ Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- ✚ Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- ✚ Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
- ✚ Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target pada RKPA Tahun 2024 mencerminkan bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah (kriteria 25-50 persen “rendah”) atau sebesar 27,10 persen dari pagu Pendapatan Aceh. Jika dilihat dari capaian realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 tercatat pendapatan asli Aceh sebesar 28,65 persen dari total realisasi Pendapatan Aceh yang berarti bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) cenderung berfluktuatif, pada tahun 2020 (audited) mencapai Rp. 2,571 Triliun, selanjutnya pada Tahun 2021 menunjukkan penurunan dengan capaian sebesar Rp. 2,506 Triliun (audited). Pada tahun 2022, PAA tercatat meningkat mencapai Rp. 2,917 Triliun (audited). Peningkatannya berasal dari penerimaan pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain-lain yang sah. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2023 dengan capaiannya sebesar Rp. 2,987 Triliun, berasal dari peningkatan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan. Demikian pula pada tahun 2024 capaiannya tercatat meningkat menjadi Rp. 3,282 Triliun, juga berasal dari peningkatan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kontribusi PAA terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan, kontribusi tertinggi Pendapatan Asli Aceh tahun 2024 berasal dari Pajak Aceh yaitu sebesar 58,82 persen dari jumlah Pendapatan Asli Aceh tahun 2024.

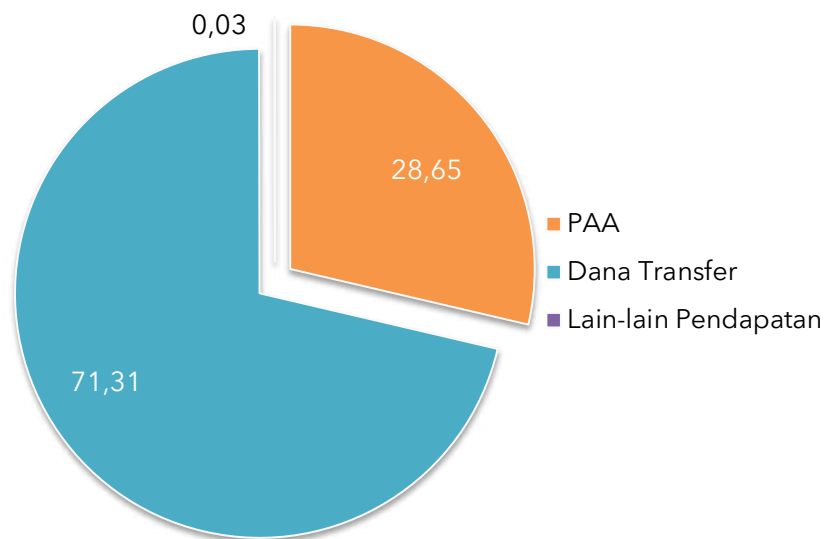


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 2. 109
Pendapatan Asli Aceh Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah)

Pada tahun 2024, pendapatan dari retribusi Aceh tumbuh sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.703,66 persen (unaudited) yang ditandai dengan kontribusi terhadap total realisasi pendapatan asli Aceh sebesar 24,09 persen sedangkan tahun 2023 peranannya sangat rendah hanya sebesar 0,55 persen. Peningkatan signifikan ini terjadi karena meningkatnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi jasa usaha. Sementara itu, peranan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli aceh yang sah masing-masing tercatat sebesar 8,16 persen dan 8,93 persen dari realisasi Pendapatan Asli Aceh.

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Aceh tahun 2024 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 71,31 persen, diikuti oleh pendapatan asli Aceh dengan peranannya sebesar 28,65 persen, dan lain-lain pendapatan dengan peranannya sebesar 0,03 persen. Gambar 2.110 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Aceh tahun 2024.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 2. 110
Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2024

2.2.1.2. Realisasi Belanja Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 jenis belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur jenis belanja menjadi 4 jenis belanja.

Realisasi Belanja Aceh tahun 2024 (sampai dengan periode pelaporan) mencapai 98,23 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Modal merupakan belanja dengan capaian realisasi tertinggi yaitu sebesar 109,10 persen terhadap proyeksi RKPA tahun 2024. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2. 139
Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2024

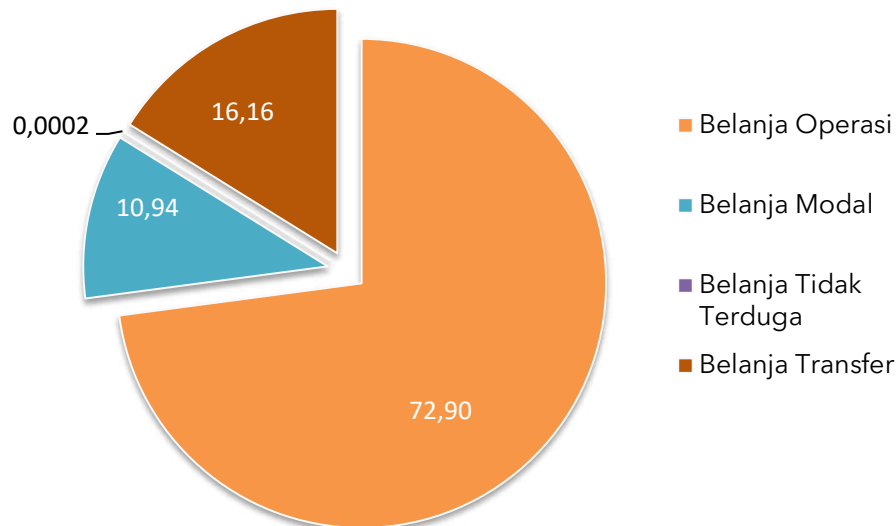
No.	Jenis Belanja	RKPA 2024	Realisasi s/d TW IV- APBA 2024	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	8.531.761.811.657	8.269.339.682.048	96,92
	Belanja Pegawai	3.382.698.183.103	3.372.341.978.211	99,69
	Belanja Barang dan Jasa	3.800.121.906.621	3.728.627.124.233	98,12
	Belanja Subsidi	5.795.700.000	6.386.180.000	110,19

No.	Jenis Belanja	RKPA 2024	Realisasi s/d TW IV- APBA 2024	
		(Rp)	(Rp)	%
	Belanja Hibah	1.103.322.199.351	1.074.734.119.451	97,41
	Belanja Bantuan Sosial	239.823.822.582	87.250.280.153	36,38
2	BELANJA MODAL	1.137.019.544.160	1.240.544.552.987	109,10
	Belanja Modal Tanah		-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		409.459.522.142	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		325.817.680.306	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		402.230.663.576	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		80.400.902.162	
	Belanja Modal Aset Lainnya		22.635.784.801	
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.595.194.981	19.848.398	0,23
	Belanja Tidak Terduga	8.595.194.981	19.848.398	0,23
4	BELANJA TRANSFER	1.870.884.720.759	1.833.379.495.751	98,00
	Belanja Bagi Hasil	865.273.221.759	881.118.949.469	101,83
	Belanja Bantuan Keuangan	1.005.611.499.000	952.260.546.282	94,69
JUMLAH BELANJA		11.548.261.271.557	11.343.283.579.184	98,23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Jumlah realisasi Belanja Aceh Tahun 2024 sebesar Rp. 11,343 Triliun atau mencapai 98,23 persen dari proyeksi RKPA-P 2024 yang ditetapkan sebesar Rp.11,548 Triliun. Jumlah realisasi belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 8,269 Triliun atau sebesar 96,92 persen, Belanja Modal sebesar Rp. 1,241 Triliun atau sebesar 109,10 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 19,84 Juta atau sebesar 0.23 persen dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1,833 Triliun atau sebesar 98,00 persen terhadap proyeksi RKPA-P 2024. Dari gambaran realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2024 sudah optimal dilaksanakan, hal ini terlihat dari realisasi belanja Aceh sebesar 98,23 persen.

Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024, struktur realisasi belanja Aceh didominasi oleh belanja operasi (72,90 persen), diikuti oleh belanja transfer (16,16 persen), belanja modal (10,94 persen), dan belanja tidak terduga (0,0002 persen).



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah)

Gambar 2. 111
Struktur Belanja Aceh Tahun 2024

Ditinjau lebih lanjut tentang kemajuan terhadap pelaksanaan barang dan jasa pada Triwulan IV Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- o Tender, secara total berjumlah 421 paket. Paket yang sudah yang ditandatangani kontrak berjumlah 404 paket, sedangkan yang belum tandatangan kotrak berjumlah berjumlah 17 paket. Diantara 404 paket kegiatan yang telah tandatangan kontrak tersebut masih terdapat 7 paket kegiatan yang belum dimulai aktivitas pelaksanaan di lapangan. Sedangkan sisanya sedang dilaksanakan dengan persentase progress kemajuan yang berbeda-beda (poin 1B Tabel kemajuan pengadaan barang dan jasa).
- o Paket Pengadaan Secara Elektronik (PSE)/e-catalogue berjumlah 1.468 paket yang tersebar pada 37 (tiga puluh tujuh) SKPA dengan total anggaran Rp 1,107 Triliun. Dari jumlah tersebut sebagian sudah tandatangan kontrak sebanyak 1.247 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 0,956 Triliun.

Gambaran secara lebih terperinci mengenai kemajuan pengadaan barang dan jasa, baik terhadap paket tender maupun e-catalogue, dapat dilihat pada Tabel 2.140 berikut.

Tabel 2. 140
Kemajuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Triwulan IV Tahun 2024

No.	Jenis	Uraian	Jlh Anggaran	Paket Kegiatan	
			Rp(Milyar)	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1A	Proses Tender	Sub Total	600,47	421	100,00
		Belum Tandatangan Kontrak	8,98	17	4,04
		Sudah Tandatangan Kontrak*	591,49	404	95,96
1B	Pelaksanaan Paket Tender (Sudah Tandatangan Kontrak*)	Sub Total		404	100,00
		Belum mulai aktivitas di lapangan	9,41	7	1,73
		Progress Fisik 1sd 65 %		182	45,05
		Progress Fisik diatas 66 sd 85 %		25	6,19
		Progress Fisik di atas 86 sd 94 %		87	21,53
		Progress Fisik di atas 95 % sd 100%		103	25,50
2A	E-Catalogue dan Swakelola strategis (> 200 Juta)	Sub Total	1.107,44	1.468	300,00
		Belum Tandatangan Kontrak	150,85	221	15,05
		Sudah Tandatangan Kontrak**	956,59	1.247	84,95
2B	Pelaksanaan Paket E-Catalogue dan Swakelola Strategis (Sudah Tandatangan Kontrak**)	Sub Total		1.247	100,00
		Belum mulai aktivitas di lapangan	2,65	2	0,16
		Progress Fisik 1sd 65 %		506	40,58
		Progress Fisik diatas 66 sd 85 %		28	2,25
		Progress Fisik di atas 86 sd 94 %		324	25,98
		Progress Fisik di atas 95 sd 100 %		387	31,03
TOTAL			1.707,91	1.889	

Sumber : Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA

2.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2024

Sampai dengan semester II tahun 2024, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 421,37 Miliar berasal dari penggunaan SILPA Tahun lalu dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari sisi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi dari pengeluaran pembiayaan berasal dari realisasi pembentukan dana cadangan. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat dapat dilihat Tabel 2.141 berikut.

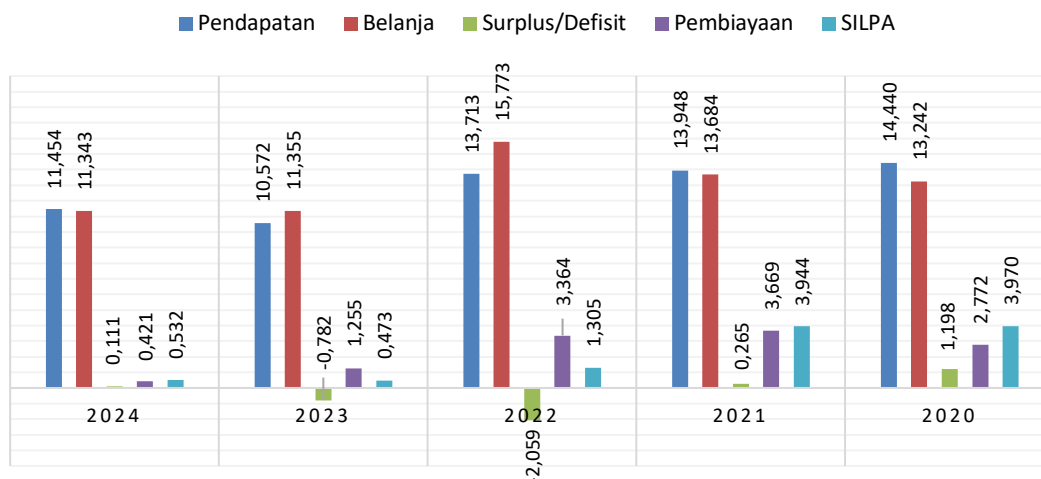
Tabel 2. 141
Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2024

No	Jenis Pembiayaan	RKPA 2024 (Rp)	Realisasi				Jumlah Realisasi Tahun 2024	
			Semester I		Semester II			
			Rp	%	Rp	%	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	473.295.918.241	473.238.123.389	99,99	759.268.148	0,16	473.997.391.537	100,15
3.1.1	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	473.295.918.241	473.238.123.389	99,99	57.794.853	0,01	473.295.918.242	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				701.473.295		701.473.295	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.000.000.000	25.685.796.239	40,13	26.946.178.388	42,10	52.631.974.627	82,24
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	64.000.000.000	25.685.796.239	40,13	26.946.178.388	42,10	52.631.974.627	82,24
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh							
PEMBIAYAAN NETTO		409.295.918.241	447.552.327.149	99,99	(26.186.910.240)	(6,40)	421.365.416.910	102,95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

2.2.1.4. Trend APBA

Berdasarkan data realisasi APBA kurun waktu 2019-2024, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2020-2023 audited, 2024 angka sementara)

Gambar 2. 112
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020-2024
(Dalam Triliun Rupiah)



Dari gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2020 hingga 2024 realisasi pendapatan daerah berfluktuatif dan cenderung menurun. pendapatan daerah mengalami penurunan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disebabkan oleh penurunan penerimaan dana transfer pemerintah pusat, khususnya dana otonomi khusus Aceh. Peningkatan pendapatan daerah terjadi pada tahun 2024 karena meningkatnya realisasi PAA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan capaian pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 14,440 triliun sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 10,573 triliun.

Trend belanja daerah juga mengalami fluktuatif, realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2024. Trend realisasi surplus menunjukkan fluktuatif, defisit terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Demikian pula dengan Pembiayaan daerah netto menunjukkan trend yang fluktuatif, pembiayaan netto tertinggi terjadi pada tahun 2019. Trend SILPA selama periode tahun 2018-2023 juga menunjukkan fluktuatif dan menunjukkan semakin menurun. Pada tahun 2021 SILPA tercatat paling tinggi dibandingkan tahun yang lain, salah satunya disebabkan oleh tertundanya pekerjaan proyek-proyek pembangunan akibat pembatasan sosial bersekala besar, adanya refocusing anggaran dan lain-lain.

2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

2.2.2.1. Metode Evaluasi

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Jenis belanja yang dievaluasi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Penentuan predikat, ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah diatur seperti yang terlihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2. 142
Kriteria Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	ST
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	T
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	S
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	R
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	SR

2.2.2.2. Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2024

2.2.2.2.1. Capaian Anggaran RKPA Tahun 2024

Target anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2028 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebesar Rp. 45.987.525.189.545, dan target alokasi anggaran di tahun 2024 melalui RKPA Tahun 2024 sebesar Rp. 11,548 Triliun dengan tingkat realisasi keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2024 sebesar 49,36 persen dengan kriteria nilai sangat rendah. Kriteria sangat rendah dikarenakan pelaksanaan anggaran masih pada tahap kedua pelaksanaan RPA 2023-2026, namun apabila dilihat dari target sampai dengan tahap kedua pelaksanaan RPA 2023-2026, besaran realisasinya sudah memenuhi target pendanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024.

Besaran proyeksi pendanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPA Tahun 2023 lebih besar (100,93%) dari proyeksi RPA 2023-2026 dengan kebutuhan pendanaan program seluruh SKPA untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 11.382.161.125.182. Sementara itu, untuk tahun 2024 besaran kebutuhan pendanaan program yang ditargetkan pada perubahan RKPA Tahun 2024 sebesar Rp. 11.548.261.271.557 atau 100,82 Persen dari proyeksi RPA 2023-2026 yang tercatat sebesar Rp. 11.454.296.954.309.

Ditinjau lebih lanjut dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan mencapai 91,71 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi.
- Rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 87,80 persen dengan nilai kriteria Tinggi.
- Urusan yang memiliki nilai realisasi tertinggi adalah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 6,50 Triliun atau sebesar 102,56 persen dari Target Anggaran RKPA Tahun 2024. Tingginya jumlah anggaran yang terealisasi pada



urusan pemerintahan tersebut disebabkan terdapatnya 4 (empat) SKPA yang memiliki anggaran terbesar yang berada di bawah urusan ini, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman.

- d. Urusan dengan nilai realisasi terendah adalah Unsur Kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang hanya mencapai 68,19 persen atau sebesar Rp. 0, 22 Triliun terhadap Target Anggaran RKPA Tahun 2024. SKPA yang beradal di bawah urusan ini yaitu Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal, Keurukon Khatibul Wali dan Badan Reintegrasi Aceh.
- e. Urusan pemerintahan yang memiliki nilai realisasi tertinggi adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan tingkat realisasi sebesar Rp 3,76 Triliun,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5,84 Triliun (64,30 persen)

2.2.2.2.2. Capaian Kinerja RKPA Tahun 2024

Ditinjau secara terhadap capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPA Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata persentase capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 87,80 persen dengan nilai kriteria “Tinggi”.
- b. Jika dilihat lebih terperinci berdasarkan masing-masing bidang urusan, maka bidang urusan yang memiliki persentase kinerja tertinggi adalah unsur pemerintahan umum yang mencapai 100 persen. Sedangkan urusan dengan persentase kinerja terendah adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan capaiannya sebesar 75,80 persen yang termasuk dalam nilai kriteria “Tinggi”.
- c. Tingginya persentase kinerja pada bidang unsur pemerintahan umum disebabkan karena Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu-satunya SKPA yang berada di bawah urusan ini, sehingga menyebabkan kontribusi nilai realisasi fisik yang besar dibanding urusan pemerintahan lainnya.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat realisasi anggaran dan capaian realisasi kinerja pada RKPA Tahun 2024 berdasarkan masing-masing urusan/bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 2.143 berikut.

Tabel 2. 143
Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2024 Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

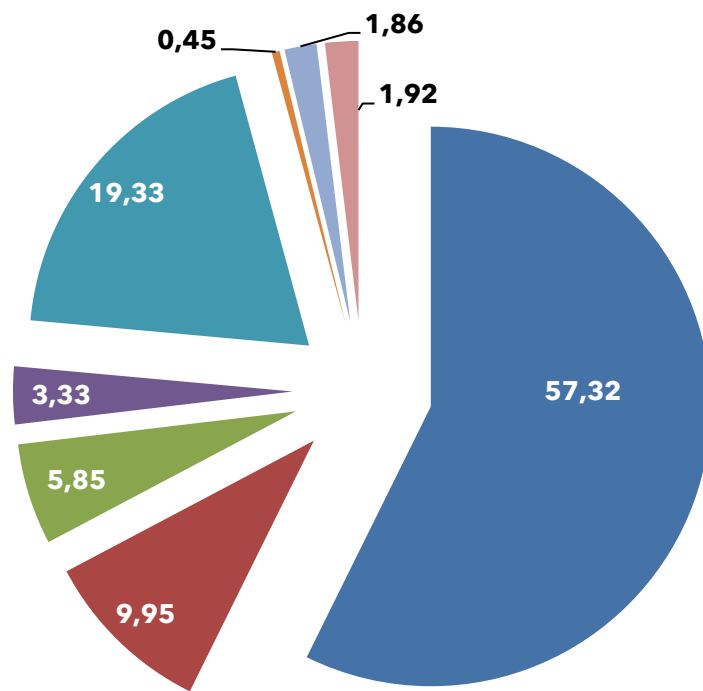
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2024 (Triwulan IV Tahun 2024)		Predikat Kinerja RKPA 2024 (ST/T/S/R/SR)	
			Rp	Rp	K	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.340.099.812.813	6.502.266.349.159	89,34	102,56	T	ST
1	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3.119.108.455.655	3.182.053.597.729	82,57	102,02	T	ST
2	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2.016.197.862.407	2.047.242.190.023	78,49	101,54	T	ST
3	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	652.946.883.166	739.160.084.504	90,00	113,20	T	ST
4	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	397.261.197.454	387.618.547.065	97,00	97,57	ST	ST
5	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	77.357.914.093	71.751.163.052	92,00	92,75	ST	ST
6	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	77.227.500.038	74.440.766.785	96,00	96,39	ST	ST
II		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.150.847.952.662	1.128.266.270.628	75,80	98,04	T	ST
7	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	40.420.796.281	39.114.475.734	54,66	96,77	R	ST
8	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.824.827.268	14.660.995.458	83,54	87,14	T	T
9	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	23.160.803.508	22.682.313.422	100,00	97,93	ST	ST
10	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	14.867.777.111	14.168.702.254	100,00	95,30	ST	ST
11	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	107.444.148.890	107.181.745.770	99,09	99,76	ST	ST
12	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.823.598.677	12.637.264.510	98,00	98,55	ST	ST
13	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.762.520.773	20.051.367.469	20,07	96,57	SR	ST
14	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-
15	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	80.145.696.552	76.768.232.858	75,00	95,79	S	ST
16	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	31.583.926.561	30.228.275.192	34,69	95,71	SR	ST
17	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	73.359.971.589	69.068.852.933	110,61	94,15	ST	ST
18	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	27.391.663.683	26.408.539.935	85,17	96,41	T	ST
19	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	570.191.211.406	566.031.075.707	123,96	99,27	ST	ST
20	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	306.177.000	351.121.234	68,75	114,68	S	ST
21	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	327.184.000	435.418.635	98,96	133,08	ST	ST
22	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	80.103.904.035	78.828.995.130	120,18	98,41	ST	ST
23	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	49.997.678.814	48.516.578.898	50,00	97,04	SR	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2024 (Triwulan IV Tahun 2024)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2024 (ST/T/S/R/SR)	
			Rp	Rp	K	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.136.066.514	1.132.315.489	41,67	99,67	SR	ST
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		688.902.405.552	663.492.279.441	82,10	96,31	SR	ST
25	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	78.675.923.153	77.460.903.957	100,00	98,46	ST	ST
26	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	26.124.279.766	23.359.581.661	100,00	89,42	ST	T
27	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	340.664.760.125	304.798.600.174	64,96	89,47	R	T
28	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	70.984.636.493	70.801.753.305	99,16	99,74	ST	ST
29	3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	115.175.491.476	143.170.879.934	100,00	124,31	ST	ST
30	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	32.260.223.659	29.942.875.473	96,72	92,82	ST	ST
31	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	15.298.314.736	4.345.661.919	29,27	28,41	SR	SR
32	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	9.718.776.144	9.612.023.019	66,67	98,90	S	ST
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		388.609.239.581	377.433.150.583	85,84	97,12	T	ST
33	4.01	Sekretariat Daerah	205.926.667.338	203.579.068.499	71,68	98,86	S	ST
34	4.02	Sekretariat DPRD	182.682.572.243	173.854.082.084	100,00	95,17	ST	ST
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		2.278.066.953.577	2.192.682.461.122	78,01	96,25	T	ST
35	5.01	Perencanaan	53.340.438.920	48.223.473.397	33,33	90,41	SR	ST
36	5.02	Kuangan	2.074.527.407.125	1.995.276.249.025	96,00	96,18	ST	ST
37	5.03	Kepegawaian	23.167.177.941	24.094.610.977	100,00	104,00	ST	ST
38	5.04	Pendidikan dan Pelatihan	95.791.850.563	93.059.890.191	97,00	97,15	ST	ST
39	5.05	Penelitian dan Pengembangan *)	2.615.190.333	2.464.788.697	104,25	94,25	ST	ST
40	5.06	Penghubung	28.624.888.695	29.563.448.834	37,50	103,28	SR	ST
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		53.235.107.110	50.855.129.691	97,83	95,53	ST	ST
41	6.01	Inspektorat Daerah	53.235.107.110	50.855.129.691	97,83	95,53	ST	ST
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		216.191.250.002	211.060.994.791	100,00	97,63	ST	ST
42	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	216.191.250.002	211.060.994.791	100,00	97,63	ST	ST
VIII	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN		432.308.550.260	217.226.943.769	93,44	50,25	ST	R
43	9.01	Kekhususan Aceh						
		Kebudayaan	32.205.336.637	30.185.016.355	98,50	93,73	ST	ST
		Keagamaan	320.255.019.462	168.147.135.875	81,83	52,50	T	R
		Kesatuan dan Perdamaian	79.848.194.161	18.894.791.539	100,00	23,66	ST	SR
Jumlah			11.548.261.271.557	11.343.283.579.184				
Rata-Rata					87,80	91,71		
Predikat Kinerja							T	ST

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

ST = Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)
T = Tinggi ($76\% \leq 90\%$)
S = Sedang ($66\% \leq 75\%$)
R = Rendah ($51\% \leq 65\%$)
SR = Sangat Rendah ($\leq 50\%$)

Berdasarkan strukturnya, realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2024 yang terbesar adalah pendanaan untuk bidang urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebesar Rp. 6,502 Triliun atau sebesar 57,32 persen dari total realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2024, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urutan kedua adalah urusan penunjang urusan pemerintah yaitu sebesar Rp. 2,193 Triliun atau sebesar 19,33 persen yang meliputi bidang Perencanaan, bidang Keuangan, bidang Kepegawaian, bidang Pendidikan dan Pelatihan, bidang Penelitian dan Pengembangan dan bidang Penghubung. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingkat capaian terbesar ketiga dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1,128 Triliun atau sebesar 9,95 persen, meliputi meliputi bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada Gambar 2.113 berikut.



- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- Urusan pemerintahan pilihan
- Unsur pendukung urusan pemerintahan
- Unsur penunjang urusan pemerintahan
- Unsur pengawasan urusan pemerintahan
- Unsur pemerintahan umum
- Unsur kekhususan dan keistimewaan

Gambar 2.113.
Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2024

2.2.2.2.3. Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Terhadap RKPA Tahun 2024

Capaian pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten/kota pada Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jika di bandingkan dengan tahun 2023 peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan target RKPA Tahun 2024 terdapat 16 kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Barat yang tumbuh sebesar 7,50 persen sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Selatan yang hanya tumbuh sebesar 3,21 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa daerah seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar, Bener Meriah dan Aceh Barat sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh.

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang bervariasi. Tingkat kemiskinan di Aceh Kondisi Maret 2024 mengalami penurunan terhadap Maret 2023 sebagai akibat dari perbaikan tingkat kemiskinan di level Kabupaten/Kota dan pencapaiannya sesuai dengan target RKPA Tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan Tahun 2024 terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pada tahun 2024, hanya 11 (sebelas) kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (notifikasi hijau). Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 19,06 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Banda Aceh sebesar 6,95 persen. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Aceh menjadi perhatian khusus pemerintah Aceh, namun peranan dari pemerintah kabupaten/kota tentu lebih penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan memonitoring penurunan kemiskinan secara berkala.

Selama periode tahun 2014-2024 secara umum, sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan kemiskinan, hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan di Aceh selama periode 11 tahun. Namun, Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu-satunya kabupaten yang perubahan tingkat kemiskinannya positif yaitu sebesar 1,29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Aceh Singkil mengalami peningkatan kemiskinan dari sebesar 17,77 persen pada tahun 2011 menjadi 19.06 persen pada tahun 2024. Sementara itu, penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Aceh Barat sebesar -5.37 persen (tahun 2011 tingkat kemiskinan sebesar 22,97 persen dan tahun 2024 sebesar 17,60 persen). Hal ini menunjukkan keberhasilan signifikan Kabupaten Aceh Barat dalam upaya penurunan kemiskinan.



Gambar 2.114.

Peta Rata-Rata Kemiskinan di kabupaten/kota Aceh, Tahun 2014-2024



Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 (kondisi Agustus 2024) belum memenuhi target RKPA 2024, terdapat hanya 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target RKPA 2024 sedangkan 13 (tiga belas) kabupaten/kota belum mencapai target. Ditinjau dari besaran nilainya, TPT tertinggi tercatat di Kota Lhokseumawe sebesar 8,47 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,20 persen.

Perbandingan antara nilai Persentase Penduduk Miskin dengan Tingkat pengangguran Terbuka di level Kabupaten/Kota menunjukkan fenomena anomali. Khusus untuk 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Tengah (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara terlihat bahwa angka TPT memiliki nilai paling kecil, namun memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun penduduk daerah tersebut rendah pengangguran, namun mereka memiliki kesejahteraan yang sangat rendah. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja penduduk sehari-hari namun belum dapat diandalkan guna meningkatkan kesejahteraan. Penyebab utama dari keadaan tersebut adalah belum adanya nilai tambah yang memadai dari komoditi pertanian yang dihasilkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari masih kurangnya skill sumberdaya manusia di bidang pertanian untuk mengolah hasil pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 (kondisi Agustus 2024) belum memenuhi target RKPA 2024, terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target RKPA 2024 sedangkan 13 (tiga belas) kabupaten/kota targetnya tidak tercapai. TPT tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar 8,47 persen sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,20 persen.

Tingkat pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota terhadap RKPA 2024 menunjukkan bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) daerah (notifikasi hijau) yang melebihi target. Sedangkan daerah dengan pencapaian masih di bawah target hanya 1 (satu) daerah, yaitu Kota Subulussalam. Daerah ini juga memiliki nilai IPM paling rendah (70,64) dibanding dengan seluruh Kabupaten/kota se-Aceh. Sedangkan daerah dengan IPM tertinggi (88,85) tercatat di Kota Banda Aceh. Di samping memiliki tertinggi, IPM Kota Banda Aceh jauh berada di atas rata-rata Aceh (75,36) dan rata-rata Nasional (75,02). Pada tahun 2024, tercatat bahwa status pembangunan manusia di Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,64 dan 70,95. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 < \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 20 (dua puluh) kabupaten/kota. Sementara itu, Kota Banda Aceh, Langsa dan Lhokseumawe berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} = 80$). Untuk memberikan gambaran secara lebih terperinci mengenai kondisi IPM sebagaimana yang telah diuraikan, dapat dilihat Tabel 2.144.

Tabel 2. 144
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2024 Terhadap
Target RKPA Tahun 2024

NO	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tahun 2024							
		Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Pembangunan Manusia	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Simeulue	3,20	4,43	17,99	14,23	4,99	5,50	67,18	70,95
2	Aceh Singkil	4,25	3,46	17,50	19,06	4,20	6,44	69,00	71,76
3	Aceh Selatan	3,40	3,21	11,90	12,02	4,00	4,56	69,00	71,82
4	Aceh Tenggara	3,00	3,59	13,37	11,99	5,80	4,79	69,47	73,59
5	Subulussalam	4,48	4,12	15,90	16,38	5,83	5,12	75,96	70,64
6	Pidie Jaya	5,60	4,55	17,09	18,28	4,80	3,82	72,13	76,39
7	Banda Aceh	4,40	6,08	7,07	6,95	8,14	7,55	87,03	88,85
8	Aceh Timur	3,40	4,63	13,60	13,26	6,43	7,75	68,51	71,29
9	Aceh Tengah	3,50	4,98	13,75	14,27	2,25	4,21	73,78	77,27
10	Aceh Barat	2,8-3,5	7,50	17,81	17,60	6,74	5,58	72,09	75,45
11	Aceh Besar	4,00	4,95	13,05	13,21	6,52	7,93	74,18	76,57
12	Pidie	3,42	4,15	18,07	18,59	6,15	5,74	71,21	73,60
13	Bireuen	4,60	4,52	11,75	12,10	3,65	3,93	73,10	75,39
14	Aceh Utara	3,62	3,52	16,00	16,11	7,10	6,88	71,00	73,35
15	Aceh Barat Daya	4,00	4,24	16,00	15,32	3,51	3,83	68,00	71,16
16	Gayo Lues	3,23	3,26	18,48	18,30	1,29	2,40	68,99	71,75
17	Aceh Tamiang	2,50	4,25	12,08	12,17	5,20	6,95	69,74	74,00
18	Nagan Raya	4,30	4,38	17,80	16,94	4,20	5,22	71,20	73,10
19	Aceh Jaya	3,09	3,83	12,63	12,25	3,37	2,75	70,05	73,40
20	Bener Meriah	3,30	3,27	18,96	18,18	1,36	2,20	73,82	76,58
21	Sabang	3,00	4,16	13,42	14,58	3,40	2,95	77,02	79,50
22	Langsa	4,38	4,43	9,00	10,33	7,30	7,34	78,00	80,96
23	Lhokseumawe	4,00	4,46	11,07	10,44	11,08	8,47	77,70	80,89
24	Aceh	4,34	4,66	14,53	14,23	5,36	5,75	73,26	75,36

Sumber : BPS Aceh, 2025

Keterangan :

Hijau : Tercapai; Kuning : Tidak tercapai

Tingkat ketercapaian dari 4 (empat) buah indikator makro Kabupaten/Kota terhadap target Rencana Kerja Pemerintah Aceh cukup bervariasi selama periode, tergantung pada masing-masing jenis indikator. Penjelasan terhadap hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021 terdapat 18 (delapan belas) daerah yang mencapai target, namun pada Tahun 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 14 (empat belas) daerah saja. Kondisi perekonomian Tahun 2023 semakin menunjukkan perbaikan, terdapat hanya 15 (lima belas) daerah yang telah melampaui target, sedangkan 8 (delapan) daerah lainnya belum mencapai target



yang ditetapkan. Tahun 2024, tingkat ketercapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 69,57 persen, terdapat 16 kabupaten/kota yang capaiannya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas kondisi perekonomian Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun ini salah satunya dipengaruhi adanya event-event nasional dan imbas perkembangan kondisi perekonomian Indonesia yang makin lama semakin baik.

- b. Tingkat kemiskinan menunjukkan pencapaian target yang cukup signifikan, dari 2 (dua) daerah di tahun 2021 menjadi 7 (tujuh) daerah (tahun 2022), selanjutnya meningkat menjadi 17 daerah (tahun 2023), namun pada tahun 2024 menurun menjadi 11 (sebelas) daerah yang tercapai. Pencapaian ini terlaksana karena adanya intervensi tinggi dari Pemerintah Daerah guna secara terus-menerus mengurangi angka kemiskinan dengan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan yang ada. Sebagian Kabupaten/kota telah berusaha menggunakan Dana Desa untuk menangani kemiskinan ekstrim. Hal ini juga harus menjadi fokus dari Pj. Bupati/Walikota karena merupakan salah satu indikator dari penilaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Triwulanan.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menunjukkan tren yang semakin tinggi jumlah daerah yang tidak bisa mencapai target. Pada Tahun 2021 terdapat 15 (lima belas) daerah yang mampu mencapai target TPT, namun jumlah tersebut turun menjadi 12 (dua belas) daerah (2022). Pada tahun selanjutnya (2023) hanya 8 (delapan) daerah saja dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 10 daerah yang mencapai target TPT yaitu Aceh Tenggara, Subulussalam, Pidie Jaya, Banda Aceh, Aceh Barat, Pidie, Aceh Utara, Aceh Jaya, Sabang, dan Lhokseumawe. Meskipun dapat mencapai target, Lhokseumawe dan Banda Aceh adalah dua daerah yang masih memiliki nilai TPT tertinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya di Aceh. Tingginya TPT pada dua daerah ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang menganggur dari jumlah angkatan kerja yang tersedia. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) baik yang bekerja, ataupun yang sedang pengangguran.
- d. Selama periode tahun 2021-2024 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Aceh terhadap target menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 9 (sembilan) kabupaten/kota pada tahun 2021 menjadi 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota yang mencapai target IPM pada tahun 2024. Pada tahun 2024, tingkat ketercapaian terhadap target sebesar 95,65 persen artinya capaian IPM di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota sesuai dengan target RKPA 2024. Namun hanya Kota Subulussalam yang belum mencapai target. Nilai IPM yang dicapai adalah sebesar 70,64, sedangkan target yang ditetapkan lebih tinggi, yaitu 75,96, artinya masih terdapat deviasi sebesar -5,32 poin. Ditinjau dari 4 (empat) komponen pembentuk IPM, Kota Subulussalam sebenarnya memiliki angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan ranking ke-4 (empat) tertinggi di Aceh setelah Banda Aceh, Langsa, dan Lhokseumawe. Namun terhadap 3 (tiga)

komponen lainnya, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masing-masing menempati ranking ke-22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) serta pengeluaran riil per kapita menempati ranking ke-23 (dua puluh tiga).

Tabel 2. 145
Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota
yang Mencapai Target Indikator Makro RKPA periode 2021-2024

No	Indikator Makro	Jumlah/%	2021		2022		2023		2024	
			Tercapai i	Tidak	Tercapai i	Tidak	Tercapai i	Tidak	Tercapai i	Tidak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah (Kab/Kota)	18	5	14	9	15	8	16	7
		Capaian (%)	78,26	21,74	60,87	39,13	65,22	34,78	69,57	30,43
2	Tingkat Kemiskinan	Jumlah (Kab/Kota)	2	21	7	16	17	6	11	12
		Capaian (%)	8,70	91,30	30,43	69,57	73,91	26,09	47,83	52,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah (Kab/Kota)	15	8	12	11	8	15	10	13
		Capaian (%)	65,22	34,78	52,17	47,83	34,78	65,22	43,48	56,52
4	Indeks Pembangunan manusia	Jumlah (Kab/Kota)	9	14	11	12	22	1	22	1
		Capaian (%)	39,13	60,87	47,83	52,17	95,65	4,35	95,65	4,35

Sumber: Bappeda (diolah)

2.2.2.3. Hasil Capaian Kinerja RPA Tahun 2023-2026

2.2.2.3.1 Capaian Anggaran RPA Tahun 2023-2026

Tingkat Penggunaan anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) disajikan pada tabel rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 mencapai 49,36 persen dengan nilai kriteria Sangat Rendah. Namun demikian, secara alokasi anggaran RPA untuk tahun 2023 s.d tahun 2024 sejumlah Rp. 22,83 Triliun, realisasinya sudah mencapai 99,43 persen. Jumlah anggaran Rencana Pembangunan Aceh menggunakan pagu berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Sampai dengan tahun 2024, Unsur Pemerintahan Umum merupakan urusan dengan tingkat realisasi anggaran RPA tertinggi karena terjadi penambahan pagu dalam APBA untuk mendukung kegiatan Pemilu dan Pilkada di Aceh, sedangkan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan memiliki tingkat realisasi anggaran terendah atau sebesar 42,66 persen. Berdasarkan distribusi belanjanya, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan realisasi belanjanya terbesar yaitu sebesar Rp. 13,156 Triliun atau sebesar 57,96 persen dari total realisasi RPA Tahun 2023 s/d 2026. Realisasi capaian Rencana Pembangunan

Aceh 2023-2026 ditunjukkan pada tabel tingkat capaian realisasi RPA Tahun 2023-2026 berikut.

2.2.2.3.2. Capaian Kinerja RPA Tahun 2023-2026

Capaian kinerja terhadap hasil pelaksanaan RPA 2023-2026 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata persentase capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 74,39 persen dengan nilai kriteria “Sedang”.
- b. Jika dilihat lebih terperinci berdasarkan masing-masing bidang urusan, maka bidang urusan yang memiliki persentase kinerja tertinggi adalah urusan pemerintahan pilihan yang mencapai 94,13 persen. Sedangkan bidang urusan yang memiliki kinerja terendah adalah unsur pemerintahan umum dengan capaiannya sebesar 59,44 persen.
- c. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan tinggi dan rendahnya kinerja setiap bidang urusan pada tabel evaluasi antara lain:
 1. Target kinerjanya belum dilaksanakan atau targetnya tidak dilaksanakan pada tahun berjalan;
 2. Terjadinya perbedaan satuan target Renja, Renstra dan RKPD;
 3. SKPA belum dapat mengukur capaian kinerja;
 4. Beberapa pagu program dan kegiatan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kinerja yang ingin dihasilkan, namun pada saat pagu yang dianggarkan lebih kecil dari pagu anggaran yang direncanakan, tidak dilakukan penyesuaian target yang sesuai dengan pagu yang dianggarkan (target kinerja tidak berubah sesuai alokasi anggaran yang diterima);
 5. Beberapa data kinerja program dan kegiatan yang diunduh melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak memuat informasi target indikator (indikator kinerja kosong), padahal SKPA sudah menginput target indikator tahun rencana.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat capaian realisasi kinerja RPA Tahun 2023-2026 berdasarkan masing-masing bidang urusan, dapat dilihat pada Tabel 2.146 berikut ini.

Tabel 2. 146
Tingkat Capaian Realisasi Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) (2023 s.d 2026)	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2023)	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2024		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							($\%$)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8	9 = $\frac{7}{4} \times 100$	10	11
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		26.195.389.339.306	6.654.146.640.571	6.502.266.349.159	13.156.412.989.730	64,07	50,22	R	R
1	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	12.596.715.828.233	3.243.738.713.533	3.182.053.597.729	6.425.792.311.263	60,00	51,01	R	R
2	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	6.476.343.453.207	2.022.896.636.989	2.047.242.190.023	4.070.138.827.012	74,32	62,85	S	R
3	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	3.542.109.870.539	722.511.879.288	739.160.084.504	1.461.671.963.792	35,14	41,27	SR	SR
4	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.949.200.750.000	490.003.279.366	387.618.547.065	877.621.826.431	56,21	29,76	R	SR
5	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	272.336.501.126	74.283.779.940	71.751.163.052	146.034.942.992	67,34	53,62	S	R
6	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	358.682.936.201	100.712.351.454	74.440.766.785	175.153.118.239	91,38	48,83	ST	SR
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3.973.229.546.883	968.918.109.862	1.128.266.270.628	2.097.184.380.490	72,08	52,78	S	R
7	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	256.102.309.522	38.352.281.121	39.114.475.734	77.466.756.855	74,82	30,25	S	SR
8	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	75.628.792.558	16.106.548.600	14.660.995.458	30.767.544.058	94,68	40,68	ST	SR
9	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	135.774.600.126	28.459.988.542	22.682.313.422	51.142.301.964	100,00	37,67	ST	SR
10	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	76.493.187.631	14.935.416.093	14.168.702.254	29.104.118.347	83,09	38,05	T	SR
11	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	416.984.377.034	93.531.355.576	107.181.745.770	200.713.101.346	70,35	48,13	S	SR
12	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang	62.842.294.974	15.929.912.928	12.637.264.510	28.567.177.438	100,00	45,46	ST	SR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) (2023 s.d 2026)	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2023)	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2024		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8	9= 7/4)*100	10	11
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
13	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98.467.738.249	22.139.662.737	20.051.367.469	42.191.030.206	25,18	42,85	SR	SR
14	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.200.000.000	-	-	-	-	-		
15	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	661.302.804.424	90.883.524.517	76.768.232.858	167.651.757.375	91,44	25,35	ST	SR
16	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	149.557.431.323	50.021.551.711	30.228.275.192	80.249.826.903	42,94	53,66	SR	R
17	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	598.329.512.586	100.986.215.101	69.068.852.933	170.055.068.033	89,24	28,42	T	SR
18	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	139.984.727.095	26.164.271.381	26.408.539.935	52.572.811.316	83,46	37,56	T	SR
19	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	807.521.600.000	280.316.561.244	566.031.075.707	846.347.636.951	84,62	104,81	T	ST
20	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	9.037.383.456	707.442.377	351.121.234	1.058.563.611	68,75	11,71	S	SR
21	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	5.868.900.000	319.467.025	435.418.635	754.885.660	98,96	12,86	ST	SR
22	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	260.011.025.490	99.438.464.335	78.828.995.130	178.267.459.465	100,00	68,56	ST	S
23	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	208.997.398.047	88.832.704.264	48.516.578.898	137.349.283.162	75,00	65,72	S	S
24	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	9.125.464.369	1.792.742.311	1.132.315.489	2.925.057.800	14,95	32,05	SR	SR
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2.227.170.496.321	647.949.572.798	663.492.279.441	1.311.441.852.239	94,13	58,88	ST	R
25	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	532.394.811.006	86.330.108.769	77.460.903.957	163.791.012.726	100,00	30,76	ST	SR
26	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	91.368.029.498	40.841.182.561	23.359.581.661	64.200.764.222	100,00	70,27	ST	S

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) (2023 s.d 2026)	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2023)	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2024		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023- 2026	
							(%)	(%)	(ST/T/S/R/ SR)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8	9= 7/4)*100	10	11
27	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	869.542.032.082	261.258.026.495	304.798.600.174	566.056.626.668	100,00	65,10	ST	S
28	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	218.422.288.849	75.605.179.146	70.801.753.305	146.406.932.451	84,62	67,03	T	S
29	3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	155.796.782.399	107.070.024.452	143.170.879.934	250.240.904.386	100,00	160,62	ST	ST
30	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	147.515.069.861	46.894.569.723	29.942.875.473	76.837.445.196	100,00	52,09	ST	R
31	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	60.498.730.908	14.561.028.955	4.345.661.919	18.906.690.874	99,33	31,25	ST	SR
32	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	151.632.751.718	15.389.452.698	9.612.023.019	25.001.475.717	69,10	16,49	S	SR
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		1.819.864.933.057	418.164.841.830	377.433.150.583	795.597.992.413	85,84	43,72	T	SR
33	4.01	Sekretariat Daerah	986.297.707.635	225.899.445.996	203.579.068.499	429.478.514.495	71,68	43,54	S	SR
34	4.02	Sekretariat DPRD	833.567.225.422	192.265.395.834	173.854.082.084	366.119.477.918	100,00	43,92	ST	SR
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		10.170.509.007.556	2.145.757.101.0 52	2.192.682.461.12 2	4.338.439.562.174	78,84	42,66	T	SR
35	5.01	Perencanaan	271.355.295.081	53.453.799.271	48.223.473.397	101.677.272.668	65,23	37,47	S	SR
36	5.02	Keuangan	9.011.465.122.244	1.921.604.281.1 48	1.995.276.249.02 5	3.916.880.530.173	67,54	43,47	S	SR
37	5.03	Kepegawaian	183.959.603.413	25.113.376.435	24.094.610.977	49.207.987.412	79,39	26,75	T	SR
38	5.04	Pendidikan dan Pelatihan	479.736.378.150	105.634.105.088	93.059.890.191	198.693.995.279	100,00	41,42	ST	SR
39	5.05	Penelitian dan Pengembangan	37.765.304.918	3.793.530.697	2.464.788.697	6.258.319.394	67,54	16,57	S	SR
40	5.06	Penghubung	186.227.303.750	36.158.008.413	29.563.448.834	65.721.457.247	93,32	35,29	ST	SR
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		214.316.596.000	53.804.529.680	50.855.129.691	104.659.659.371	60,91	48,83	R	SR
41	6.01	Inspektorat Daerah	214.316.596.000	53.804.529.680	50.855.129.691	104.659.659.371	60,91	48,83	R	SR
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		165.000.000.000	106.376.007.435	211.060.994.791	317.437.002.226	59,44	192,39	R	ST
42	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	165.000.000.000	106.376.007.435	211.060.994.791	317.437.002.226	59,44	192,39	R	ST
VIII	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN		1.222.045.270.421	359.683.774.517	217.226.943.769	576.910.718.286	79,78	47,21	T	SR
43	9.01	Kekhususan Aceh								
		Kebudayaan	149.966.329.357	29.635.185.342	30.185.016.355	59.820.201.697	82,99	39,89	T	SR
		Keagamaan	814.039.341.565	250.327.416.690	168.147.135.875	418.474.552.565	73,29	51,41	S	R
		Kesatuan dan Perdamaian	258.039.599.499	79.721.172.485	18.894.791.539	98.615.964.024	83,06	38,22	T	SR
Jumlah			45.987.525.189.545	11.354.800.577. 745	11.343.283.579.1 84	22.698.084.156.929				
Rata-Rata							74,39	49,36		
Predikat Kinerja									SR	SR

Sumber: BPKA (diolah), 2025

Keterangan :

ST = Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)

T = Tinggi ($76\% \leq 90\%$)

S = Sedang ($66\% \leq 75\%$)

R = Rendah ($51\% \leq 65\%$)

SR = Sangat Rendah ($\leq 50\%$)

Dilihat dari program yang direncanakan dalam pelaksanaan tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa:

-  Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
Jumlah program yang direncanakan dalam RKPA 2024 sebanyak 156 program, sedangkan jumlah program yang masuk dalam APBA T.A 2024 sebanyak 153 program (berdasarkan realisasi), sehingga konsistensi program sebesar 98,08 persen;
-  Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Jumlah program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2025-2026 sebanyak 175 program pada tahun 2024, sedangkan jumlah program yang direncanakan dalam RKPA Tahun 2024 sebanyak 156 program, sehingga konsistensi program sebesar 89,14 persen.

2.2.2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPA Tahun 2023-2026

Penetapan Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 ditujukan untuk menetapkan target rencana capaian pembangunan daerah memperhatikan beberapa aspek Pembangunan. Indikator tersebut terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu Indikator Makro (IM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Seluruh target dari indikator tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing SKPA dalam pencapaiannya berdasarkan masing-masing periode. Khusus terhadap IKD, terbagi atas masing-masing aspek Pembangunan yang ditetapkan dalam RPA 2023-2026, yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Daya Saing Daerah; dan (3) Aspek Pelayanan Umum. Aspek Pelayanan Umum terbagi menjadi : (a) Layanan Urusam Wajib Dasar; (b) Layanan Urusan Non Wajib Dasar; (c) Layanan Urusan Pilihan; (d) Penunjang Urusan; (e) Pendukung; dan (f) Keistimewaan Aceh. Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator, baik IM, IKU, dan IKD menurut masing-masing urusan sapat dilihat Tabel 2.147.

Tabel 2. 147
Tingkat Capaian Terhadap Target Indikator RPA Tahun 2023-2026

NO	Indikator/Bidang Urusan	Jumlah Indikator	Status		Persentase Capaian (%)
			H	M	
1	2	3	4	5	6
1	Indikator Makro (IM)	6	5	1	83,33

NO	Indikator/Bidang Urusan	Jumlah Indikator	Status		Persentase Capaian (%)
			H	M	
1	2	3	4	5	6
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	18	13	5	72,22
3	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	124	61	63	49,19
4	a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	15	7	8	46,67
	b. Aspek Daya Saing Daerah	5	4	1	80,00
	c. Aspek Pelayanan Umum	104	50	54	48,08
	-Layanan Urusan Wajib Dasar	17	7	10	41,18
	-Layanan Urusan Wajib Non Dasar	32	21	11	65,63
	- Layanan Urusan Pilihan	19	6	13	31,58
	- Penunjang Urusan	16	8	6	50,00
	- Pendukung	10	4	6	40,00
	- Keistimewaan Aceh	10	3	7	30,00
	TOTAL	148	78	70	52,70

Sumber : Bappeda Aceh (diolah)

H = Tercapai

M= Tidak Tercapai

Hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja (IM, IKU, dan IKD) pada Tahun 2024 menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 52,70 persen. Secara keseluruhan terdapat sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) indikator telah tercapai (notifikasi hijau), dan sedangkan 70 (tujuh puluh) indikator belum tercapai (notifikasi merah). Jika ditinjau lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa :

a. Indikator Makro

Terdapat 6 indikator yang ditargetkan dalam RPA 2023-2026, hanya 1 indikator yang tidak tercapai yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. 5 buah indikator yang telah mencapai target adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, Indeks Gini.

Tabel 2. 148

Capaian Indikator Makro Tahun 2024 Terhadap Target RPA 2023-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR MAKRO									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	74,70	72,78	75,36	103,54	H		
2	Persentase Penduduk Miskin	%	14,45	14,53	12,64	114,95	H		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,36	5,75	93,22		K	
4	Pertumbuhan PDRB	%	4,23	3,75	4,15	137,87	H		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	41,41	26,2	43,78	167,10	H		
6	Indeks Gini	%	0,296	0,304	0,294	103,40	H		

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)

Keterangan Notifikasi:



Tercapai



Kinerja 76% ≤ 99%



Kinerja ≤ 75%

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

b. Indikator Kinerja Utama,

Terdapat 18 indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam RPA Tahun 2023-2026, sebanyak 13 indikator telah tercapai sedangkan 5 indikator belum tercapai.

Tabel 2. 149
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Terhadap Target RPA
Tahun 2023-2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,00	66,00	66,00	100,00	H		
2	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	77,53	74,22	77,53	104,46	H		
3	Indeks Resiko Bencana Aceh	Indeks	146,9 / Tinggi	143/ Sedang	144,29 / Tinggi	100,90	H		
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,53	76,48	79,66	104,16	H		
5	Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73	0,76	104,11	H		
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,38	14,52	14,39	99,10		K	
7	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,62	3,40	3,64	107,06	H		
8	Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	100,00	H		
9	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	81,84	85,00	83,9	98,71		K	
10	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,96	75,59	73,94	97,82		K	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor	2,9618/ Sedang	2,8500/ Tinggi	2,9000/ Tinggi	101,75	H		
12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	78,85	78,50	81,10	103,31	H		
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	89,74	88,20	90,08	102,13	H		
14	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,13	89,16	80,8	90,62		K	
15	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	%	55,26	56,23	56,45	100,40	H		
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	68,98	76,10	100	131,41	H		
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13,91	17,51	72,42	413,59	H		
18	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	10.625	11.130	9.468	85,07		K	

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)

Keterangan Notifikasi:



Tercapai



Kinerja 76% ≤ 99%



Kinerja ≤ 75%

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

c. Indikator Kinerja Daerah

Terdapat 124 indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam tahun 2024, hanya tercapai sebanyak 61 indikator, sementara 63 indikator belum tercapai.

Tabel 2. 150
Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 Terhadap Target RPA
Tahun 2023-2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIA N TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Inflasi	%	1,53	2,15	2,17	99,08		K	
2	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,394	0,410	0,394	104,06	H		
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,06	70,02	73,06	104,34	H		
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,55	9,82	9,64	98,17		K	
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,77	64,55	65,11	100,87	H		
6	Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	%	30,73	31,23	30,97	99,17		K	
7	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	3,74	6,15	3,99	64,88			M
8	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	10,85	7,96	11,41	143,59	H		
9	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	7,47	4,30	7,05	163,95	H		
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,76	1,8	1,78	98,89		K	
11	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,63	5,35	5,32	99,44		K	
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,17	15,06	14,99	99,54		K	
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,84	5	4,71	94,20		K	
14	Pertumbuhan Industri	%	1,56	2,7	2,95	109,26	H		
15	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa (Ribu)	806,75	823,52	804,53	102,36	H		
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	57,31	62,45	40,58	64,98			M
2	Pengeluaran Per Kapita	Rp (Ribu)	10.334	9.958	10.811	108,57	H		
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	114,34	101,49	122,11	120,32	H		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Ratio	19,46	3,05	27,48	900,98	H		
5	Rasio ketergantungan	Indeks	49,19	47,6	35,91	132,55	H		
III. ASPEK PELAYANAN UMUM									
3.1. LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
3.1.1.	Pendidikan								
3.1.1.1	Rasio Sekolah dengan Akreditasi A	%	95,43	95,81	27,11	28,30			M
3.1.2.	Kesehatan								
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	/1000 Kelahiran Hidup	13	9	13	69,23			M
3.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	132	183	132	138,64	H		
3.1.2.3	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100	20,03	20,03			M
3.1.2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	94,6	94,60		K	
3.1.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	31,2	85,70	86,10	100,47	H		
3.1.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	81,10	91,77	83,82	91,34		K	
3.1.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	84,7	83,75	81,00	96,72		K	
3.1.2.8	Persentase Balita Stunting	%	29,4	29,00	29,4	98,64		K	
3.1.2.9	Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan	%	100	86	100	116,28	H		
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
A.	Pekerjaan Umum								
3.1.3.1	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	%	39,31	39,81	39,93	100,31	H		
3.1.3.2	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	%	71,21	72,65	72,98	100,45	H		
B.	Penataan Ruang:								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.3.3	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	70	80	79,5	99,38		K	
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
3.1.4.1	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	28,54	46,92	30,35	64,68			M
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
3.1.5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	95	95,00		K	
3.1.5.2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,54/Sedang	0,60/Sedang	0,60/Sedang	100,00	H		
3.1.6	Sosial								
3.1.6.1	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan	%	100	100	100	100,00	H		
3.2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR									
3.2.1	Naker								
3.2.1.1	Persentase penduduk yang bekerja	%	93,97	98,98	94,25	95,22		K	
3.2.2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
3.2.2.1	Persentase Cakupan Masyarakat yang terlayani Adminduk	%	99,06	98,4	97	98,58		K	
3.2.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
3.2.3.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,24	92,98	93,28	100,32	H		
3.2.3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,92	66,49	67,5	101,52	H		
3.2.3.3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,21	77,1	77,3	100,26	H		
3.2.3.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100,00	H		
3.2.4	Pangan								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.4.1	Ketersediaan energi	kcal/kapi ta/hari	3573	3833	3236	84,42		K	
3.2.4.2	Ketersediaan protein perkapita	gram/ka pita/hari	117,51	86,44	107,08	123,88	H		
3.2.4.3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,8	74,78	83,4	111,53	H		
3.2.5	Tanah								
13.2.5.1	Penyelesaian kasus tanah negara	%	54	50	50	100,00	H		
3.2.6	Lingkungan Hidup								
3.2.6.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,30	60,50	61,30	101,32	H		
3.2.6.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,94	88,71	90,94	102,51	H		
3.2.6.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	86,75	80,23	83,24	103,75	H		
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
3.2.7.1	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,67	0,65	0,685	105,38	H		
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
3.2.8.1	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,18	2,13	2,11	99,06		K	
3.2.9	Perhubungan								
3.2.9.1	Rasio ijin trayek	Rasio	1:1456	1:1494	1:3999	267,67	H		
3.2.9.2	Persentase layanan angkutan darat	%	32,28	29,40	38,07	129,49	H		
3.2.9.3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	%	55,99	51,01	56,03	109,84	H		
3.2.10	Komunikasi dan Informatika								
3.2.10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	81,27	79,7	98,31	123,35 %	H		
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	%	56,12	64	52	81,25		K	
3.2.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	%	1,78	0,015	0,03	200,00	H		
3.2.12	Penanaman Modal								
3.2.12.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	10,625	11,13	4,486	40,31			M
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga								
3.2.13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang dibina	%	70	62,00	73,53	118,60	H		
3.2.13.2	Persentase Atlet yang berprestasi	%	60	85	50	58,82			M

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAH TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.13.3	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	70	78,00	91,3	117,05	H		
3.2.14	Statistik								
3.2.14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	43,11	64,81	100	154,30	H		
3.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	43,11	64,81	100	154,30	H		
3.2.15	Persandian								
3.2.15.1	Keamanan Siber Pemerintah Aceh	%	95	95	95	100,00	H		
3.2.16	Kebudayaan								
3.2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25,73	27,94	22,81	81,63		K	
3.2.16.2	Rasio Jumlah pengunjung museum	Rasio Pengunjung/ 1000	145,4	131,0	100,33	76,59		K	
3.2.17	Perpustakaan								
3.2.17.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0019	0,0018	0,000895	49,72			M
3.2.18	Kearsipan								
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	36,36	76	72,73	95,70		K	
3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN									
3.3.1	Pariwisata								
3.3.1.1	Kunjungan wisata	Orang	6.064.178	2.652.354	7.173.457	270,46	H		
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,45	3	1,45	48,33			M
3.3.1.3	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	136.562	108.007	140.158	129,77	H		
3.3.2	Pertanian								
3.3.2.1	Produksi komoditi pangan utama (Padi)	Ton	1.402.432	1.729.000	1.643.355	95,05		K	
3.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,55	5,65	5,46	96,60		K	
3.3.2.3	Produksi sektor perkebunan	Ton	761.213,04	767.153	761.267,05	99,23		K	
3.3.2.4	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	Indeks	96,26	101,07	98,09	97,05		K	
3.3.2.5	Peningkatan Produksi daging Ternak Besar	Ton	21.016	22.307	14.741	66,08			M

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.3	Kehutanan								
3.3.3.1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	76,51	77,03	76,51	99,32		K	
3.3.3.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	1,92	3,2	1,92	60,00			M
3.3.3.3	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,058	0,03	0,058	51,72			M
3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.3.4.1	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	%	5,06	17,99	5,54	30,79			M
3.3.5	Perdagangan								
3.3.5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	461.330.869	285.740.605	57,77	0,00			M
3.3.6	Perindustrian								
3.3.6.1	Pertumbuhan Kawasan Industri dan SIKIM	KI/Sentra	3/14	2/10	0/10	0,00			M
3.3.7	Transmigrasi								
3.3.7.1	Besaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	%	35,71	35,71	35,71	100,00	H		
3.3.8	Kelautan dan Perikanan								
3.3.8.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	111,01	103	105,94	102,85	H		
3.3.8.2	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	USD	2.141.627	2.256.368	4.323.836	191,63	H		
3.3.8.3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	NTPi	112,55	98,04	102,68	104,73	H		
3.3.8.4	Produksi Perikanan	Ton	359.453,95	469.668,63	361.376,72	76,94			M
3.4. PENUNJANG URUSAN									
3.4.1	Perencanaan Pembangunan								
13.4.1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	96,9	100	89,14	89,14		K	
13.4.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	98,07	98,07		K	
3.4.2	Kuangan								
3.4.2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,55	5	4,55	91,00	H		
3.4.2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	28,18	20	27,26	136,30	H		
3.4.2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,15	10	17,54	175,40	H		
3.4.2.4	Penetapan APBD Tepat Waktu	Ya / Tidak	Ya	Ya	Tidak	0,00			M

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.2.5	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	-14,15	10	1,71	17,10			M
3.4.2.6	Persentase PAA terhadap pendapatan	%	28,41	30	28,66	95,53		K	
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59,7	79,8	76,76	96,19		K	
3.4.3.2	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,29	0,21	0,21	100,00	H		
3.4.3.3	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	2,84	25,53	22,97	89,97		K	
3.4.3.4	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	6,71	61,66	24	38,92			M
3.4.4	Penelitian dan pengembangan								
3.4.4.1	Penerapan SIDa:								
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	89,00	100	112,36	H		
3.4.4.2	Indeks Inovasi Daerah Aceh	Indeks	55,38	55,00	55,87	101,58	H		
3.4.5	Pengawasan								
3.4.5.1	Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	100,00	H		
3.4.6	Sekretariat DPRA								
3.4.6.1	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	75,00	72,00	90,91	126,26	H		
3.5. PENDUKUNG									
3.5.1	Sekretariat Daerah								
A	Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
3.5.1.1	Pesentase penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah	%	2,30	2,45	6,90	281,63	H		
3.5.1.2	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	20,00	81,00	60,00	74,07		K	
B	Ekonomi								
3.5.1.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	42,69	38,08	42,87%	1,13			M

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5.1.4	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	91,50	91	91,60%	1,01			M
3.5.1.5	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	%	3,09	1,50	0,67%	0,45			M
3.5.1.6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	110	96	99%	1,03			M
C	Organisasi								
3.5.1.7	Nilai SAKIP	Nilai	74,55	66,00	67,02	101,55	H		
3.5.2	Kesatuan Bangsa								
	Kesatuan Bangsa dan Politik								
3.5.2.1	Skor aspek hak-hak politik	Skor	74,47	65,50	74,47	113,69	H		
3.5.2.2	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	73,12	75,50	73,12	96,85		K	
3.5.2.3	Skor aspek Kebebasan Sipil	Skor	85,71	85,10	85,71	100,72	H		
3.6. KEISTIMEWAAN ACEH									
3.6.1	Syariat Islam								
3.6.1.1	Angka Melek Alquran	%	82,00	85,00	85,1	100,12	H		
3.6.2	Perdamaian Aceh								
3.6.2.1	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	16	23,58	0	0,00			M
3.6.2.2	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Rasio	0,714	0,857	0,143	16,69			M
3.6.3	Adat Istiadat Aceh								
3.6.3.1	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,0276	0,0063	0,054	857,14	H		
3.6.4	Peran Ulama Aceh								
3.6.4.1	Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Rasio	4,27	2,37	0,97	40,93			M
3.6.4.2	Sertifikasi Halal	Rasio	0,68	0,72	0,59	81,84		K	
3.6.5	Pendidikan Khusus Aceh								
3.6.5.1	Rasio Kebijakan/pertimbangan yang diterbitkan	Rasio	1,00	1,33	0,9	65,63			M

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2024			
			2023	2024	2024	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.6	Zakat dan Infaq Aceh								
3.6.6.1	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	63,06	80,00	96,54	120,68	H		
3.6.7	Peran Lembaga Wali Nanggroe								
3.6.7.1	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	85	85	71	83,53		K	
3.6.8	Pendidikan Dayah								
3.6.8.1	Persentase dayah yang mandiri	%	40,57	41,00	39	95,12		K	

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)

Keterangan Notifikasi:



Tercapai



Kinerja 76% ≤ 99%



Kinerja ≤ 75%

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

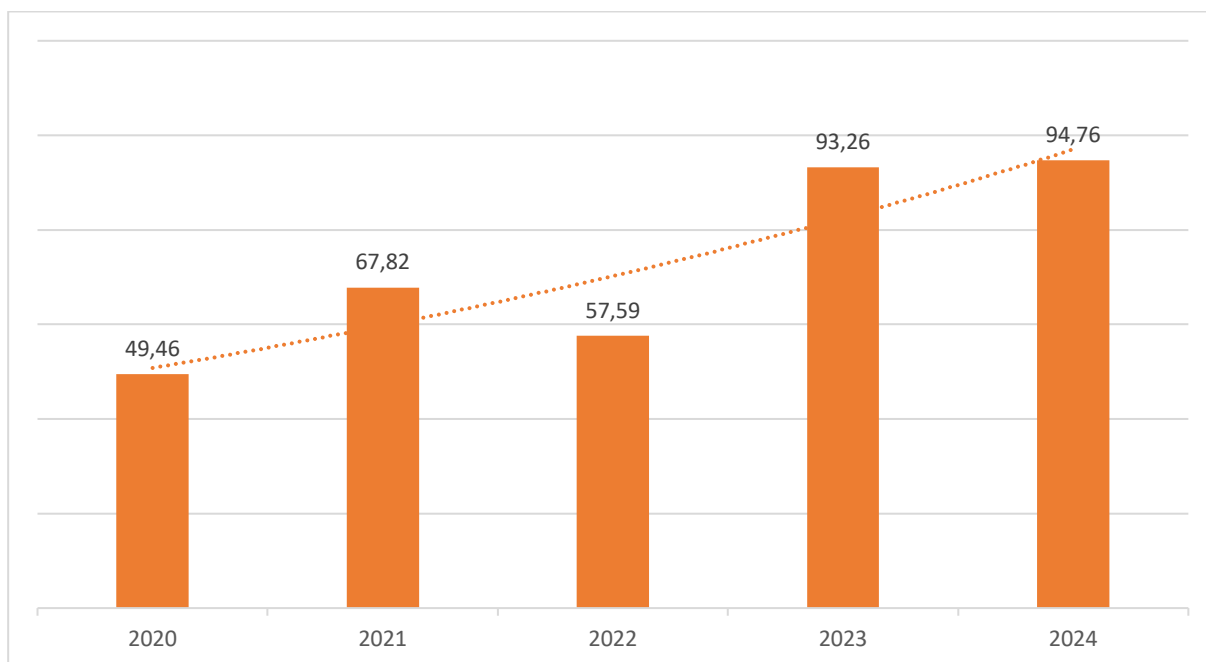
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Penetapan substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas (jenis SPM):

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

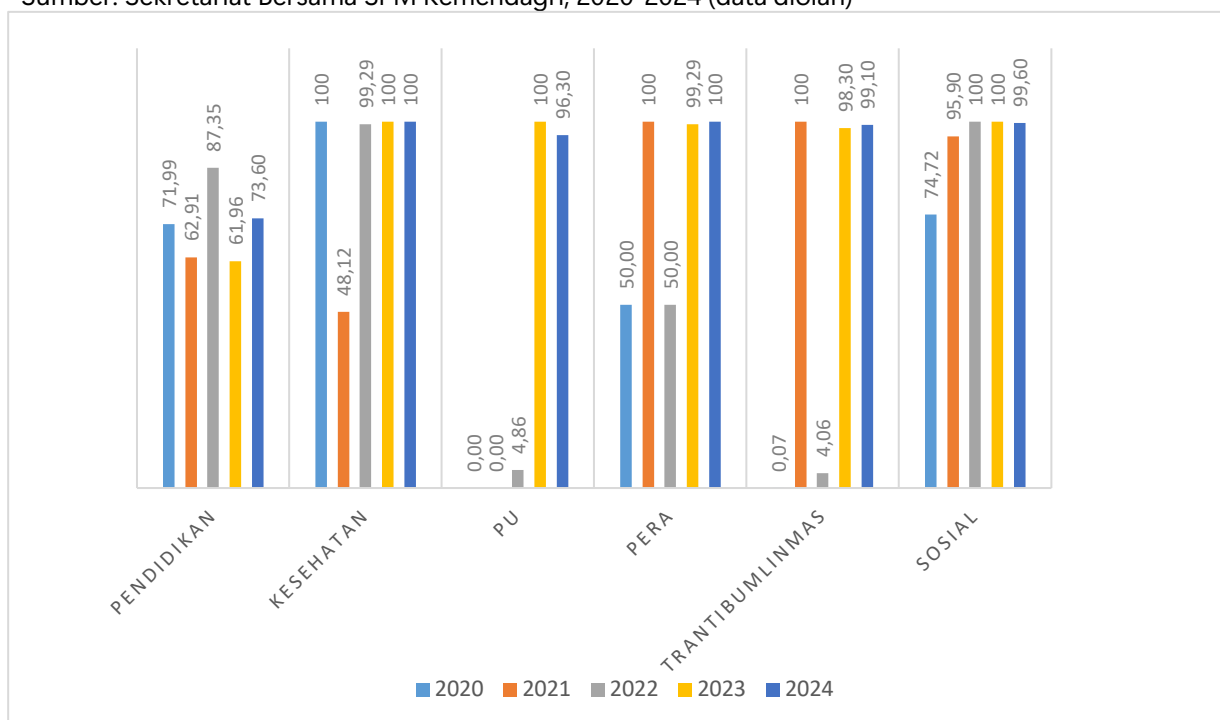
Keberhasilan pencapaian target SPM tidak hanya diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib tersebut, namun juga didukung oleh semua pihak, baik dari berbagai unsur Pemerintahan sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan dukungan semua pihak diharapkan target SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Karena pencapaian target SPM merupakan komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pencapaian target SPM juga dapat turut menyumbang upaya Pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2020-2024 (data diolah)

Gambar 2.115
Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2020-2024 (data diolah)



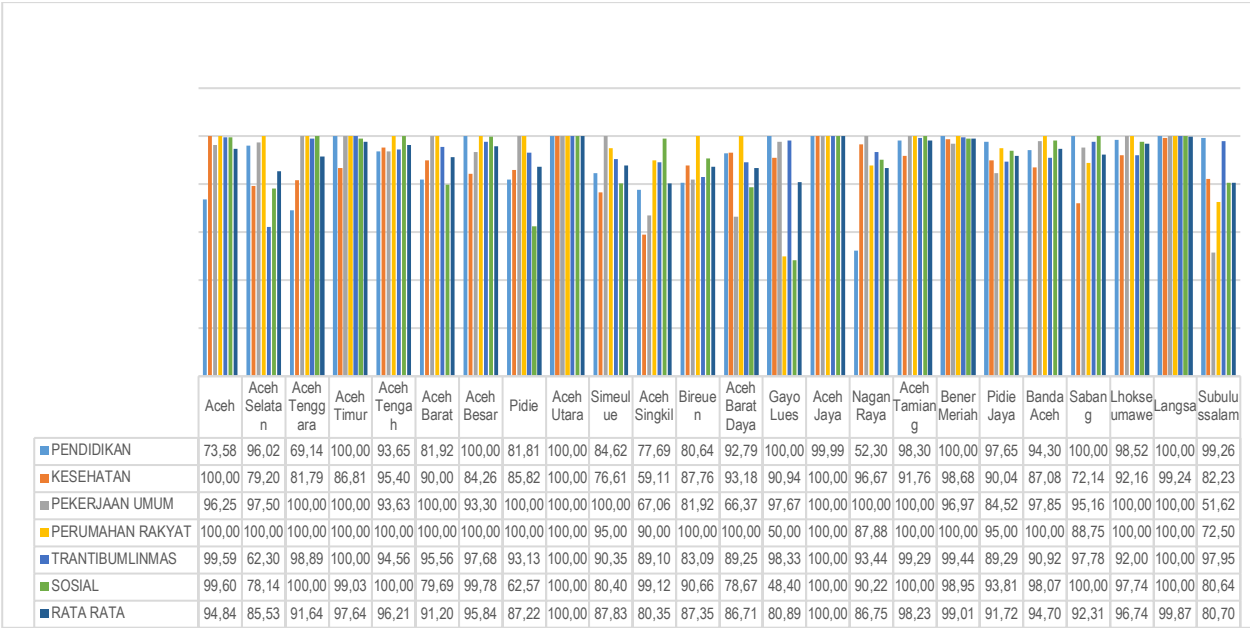
Gambar 2.116
Capaian SPM Provinsi Aceh Per Bidang Tahun 2020-2024

Dari Gambar 2.115 dan Gambar 2.116 diatas dapat dilihat capaian SPM mengalami fluktuasi baik itu di bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU); Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pera); Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) maupun Sosial.

Pada Tahun 2020 capaian SPM Provinsi Aceh berada pada angka 49,46% dan meningkat pada tahun 2021 yaitu 67,82%. Pada Tahun 2022 Kembali turun diangka 57,59% dan Tahun 2023 naik menjadi 93,26% dan terus meningkat pada Tahun 2024 sebesar 94,76%.

Capaian terbaik SPM terdapat pada bidang Kesehatan dimana telah mencapai 100% di tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan tahun 2021 pada angka 48,12%. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2024 berada pada angka 99,60%. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam empat tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100% pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 di angka 96,34%

Berdasarkan capaian SPM Se-Aceh berbasis aplikasi hanya 1 (satu) Kabupaten yang telah melakukan pelaporan capaian SPM Triwulan IV Tahun 2024 dengan baik (Progres sudah mencapai 100%) yaitu Kabupaten Aceh Utara, sementara Kab/Kota lainnya telah melakukan pelaporan walaupun setiap bidangnya masih belum terlaksana 100%. Gambar 2.117 berikut ini memberikan gambaran Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh.



Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2024 (data diolah)

Gambar 2.117
Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024

Dalam proses capaian SPM, secara umum terdapat beberapa permasalahan dan kendala yaitu sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum sepenuhnya berbasis SPM; belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah; Permasalahan teknis pada pengisian dalam e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara capaian kinerja dengan target kinerja pembangunan yang telah direncanakan.

2.4.1. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian.

1. **Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal**, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh Tahun 2024 masih sekitar sebesar 87,01 dengan rincian dimensi, yaitu aqidah 87,01, akhlak 82,50, melek Al-Qur'an 83,25, manajemen masjid 83,47, ZIS 84,03, hukum jinayat 83,51 dan Lembaga Keuangan Syariah 83,58.
2. **Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan** yang terdiri dari Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan Cagar Budaya. Pudarnya pelaksanaan adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Aceh Tahun 2023, yaitu sebesar 55,33 dan nasional 57,13 dan berada pada peringkat 22 Nasional. Disamping itu, masih adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam.
3. **Belum optimalnya Aspek pendapatan dan Pendistribusian Baitul Mal**, hal ini ditandai dengan besarnya SiLPA dari Ziswaf pada Tahun 2024 ini hampir mencapai Rp. 95,54 Milyar (meningkat 7 persen dibandingkan dengan Tahun 2023). Jumlah ini jika dibandingkan dengan potensi Ziswaf masih tergolong rendah yang disebabkan oleh masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab. Disamping itu, masih terdapat kendala dalam dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian. Selanjutnya, beberapa masalah utama berkenaan dengan pengelolaan aset wakaf seperti tanah wakaf yang tidak produktif, adanya sengketa tanah wakaf, terbatasnya tanah wakaf yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait, dan permasalahan lainnya dalam pengelolaan oleh Baitul Mal di Aceh dan Kabupaten/Kota.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan implementasi Keistimewaan Aceh belum optimal, antara lain, belum optimalnya kesepakatan politik yang kuat antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Ketidaksepakatan politik atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat pemerintah daerah Aceh dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keistimewaan. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh dapat mempersulit



implementasi. Kurangnya panduan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat mengenai otonomi khusus Aceh dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat lokal. Implementasi Keistimewaan Aceh mungkin menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kelompok-kelompok kepentingan di luar Aceh. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang diusulkan atau dijalankan oleh pemerintah Aceh. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran. Beberapa kebijakan atau program yang terkait dengan keistimewaan Aceh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Untuk meningkatkan implementasi Keistimewaan Aceh, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperjelas regulasi dan kebijakan terkait. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi juga merupakan kunci keberhasilan.

Jika implementasi Keistimewaan Aceh, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, penerapan syariat Islam, dan penanganan korban konflik, belum optimal, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: Ketidakpuasan Masyarakat di kalangan masyarakat Aceh. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Implementasi yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebijakan di Aceh. Kurangnya kejelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait syariat Islam atau otonomi khusus Aceh dapat menghambat kepastian hukum dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Daerah yang mendapatkan manfaat lebih besar dari kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih cepat, sementara daerah lain dapat tertinggal. Kurangnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Penegakan syariat Islam yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia atau perlakuan yang tidak adil terhadap korban konflik dapat menciptakan kerentanan dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Sosial Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ketegangan antar-atau dalam daerah, dan konflik kepentingan politik dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Sumber Daya, program-program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat menyia-nyiakan anggaran publik yang berharga, sementara peluang-peluang pembangunan yang terlewatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memperbaiki hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

2.4.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif:

1. **Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan**, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2024 sebesar 4,66 persen sedangkan nasional 5,03 persen.
2. **Inflasi Aceh masih belum stabil**, hal ini ditandai tahun 2021 angka inflasi Aceh sebesar 2,24 persen, sementara itu di tahun 2022 tercatat sebesar 5,89 persen, di tahun 2023 inflasi yang dapat dikendalikan sebesar 1,53 persen , namun tahun 2024 meningkat kembali menjadi 2,17 persen.
3. **Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi dan dinamis**, hal ini ditandai dengan rasio gini tahun 2020 sebesar 0,319 naik menjadi 0,323 pada tahun 2021, sementara itu pada tahun 2024 turun menjadi 0,294.
4. **Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro**. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2045,
5. **Masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh** yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen,
6. **Masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital**, terutama bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB,
7. **Belum optimalnya Return On Asset (ROA) BUMD** yang hanya 2 persen. Walaupun secara Indonesia ini sudah baik, namun angka idealnya adalah 5-20 persen.
8. **Pembangunan koperasi masih lemah**, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berskisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.
9. **Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah**, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 (%) dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 baru sekitar 4,71 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan

hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif.

10. **Iklim investasi belum baik**, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar 9,47 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.
11. **Daerah rawan pangan masih tinggi**. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase daerah rawan pangan di Aceh tahun 2024 yang mencapai 11,42 persen.
12. **Belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan**. Menurut data terakhir, skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh tahun 2019 sebesar 66 dan belum mencapai angka 100.
13. **Produktivitas Pertanian semakin menurun**, hal ini ditandai dengan produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 turun menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022. Produksi padi juga mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 1.937.889,5 ton menjadi 1.533.138,1 ton di tahun 2022. Dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun;

Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen;
14. **Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan**. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2024 yaitu masing-masing 119,25 dan 120,30 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian.
15. **Kesejahteraan Petani belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81.

2.4.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh:

1. **Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal**, hal ini ditandai capaian Indeks Reformasi hukum Aceh adalah 67.8.

2. **Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal, Hal ini ditandai** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aceh sebesar 3.64 (sangat baik) pada tahun 2024 sedangkan yang paling tinggi adalah Jawa Barat sebesar 4,73 (memuaskan). Aceh tidak masuk dalam sepuluh besar pemanfaatan IT ini.
3. **Pelayanan publik di Pemerintah Aceh belum optimal**, hal ini ditandai masih Indeks Pelayanan Publik hanya sebesar 4.01 (2022) sedangkan nasional 61,1 persen
4. **Masih belum optimalnya SDM ASN**, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 76,76 (2023).
5. **Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh**, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Integritas Nasional 72,43 (2021) sedangkan pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 70,97.
6. **Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal** yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan Mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus.
7. **Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada.** partisipasi pemilih pada pemilu presiden tahun 2024 sebesar 87,01 persen, pemilu legislatif 86,86 persen, pemilihan kepala daerah 77,5 persen.
8. **Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan.** SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan monitoring dan evaluasi belum berjalan.
9. **Kemandirian Fiskal Masih Rendah.** Persentase kemandirian fiskal tahun 2024 sebesar 28,67 persen (*unaudited*) atau tergolong dalam kriteria rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat (dana transfer) sebesar 71,31 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).
10. **Pembangunan Sumber daya ASN belum optimal**, hal ini ditandai belum optimalnya pelaksanaan manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga



pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi, rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.

11. **Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset** untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan Pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
12. **Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi** melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien.
13. **Belum optimalnya tingkat Inovasi Daerah.** Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai indeks inovasi daerah Aceh tahun 2024 yang baru mencapai sebesar 55,87 pada level “inovatif” sedangkan level tertinggi adalah “sangat inovatif” (nilai indeks 100-60,01). Sementara itu, Sumatera Barat menduduki peringkat pertama Indeks Inovasi Daerah dengan nilai indeks sebesar 88,92 (katagori “Sangat Inovatif”).
14. **Pelayanan dasar belum optimal**, hal ini ditandai oleh belum maksimalnya standar pelayanan minimal di Aceh, menurut data terakhir pada tahun 2023 indeks pemenuhan SPM Aceh baru mencapai 93,26 persen dan berada pada ranking 24 dari 38 provinsi. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 94,76 persen.
15. **Pembangunan di gampong masih belum optimal**, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Desa **Membangun** (IDM) Aceh tahun 2024 yang baru mencapai 0,6848 (status: berkembang), sedangkan nasional dengan status yang sama memiliki IDM yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,7034.
16. **Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban pasca konflik.** Hal ini ditandai belum tersedianya data korban konflik yang akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik yang dilaksanakan selama ini belum memberikan hasil yang maksimal.
17. **Masih terdapat potensi lahan HPH/HGU yang tidak dimanfaatkan serta memiliki potensi yang besar untuk dialihfungsikan kepada daerah.** Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat pengembalian lahan tersebut dapat dilakukan melalui kerangka UUPA guna menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat (redistribusi).

18. **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** seperti cakupan akta kelahiran yang masih 96,40 persen pada tahun 2023, sementara yang diharapkan cakupan kepemilikan tersebut adalah sebesar 100 persen. Demikian pula dengan cakupan akta kematian yang capaiannya masih rendah dan data kependudukan *by name by address* perlu diperbaharui.

2.4.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah:

1. **Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh**, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan Provinsi, yaitu sebesar 80,80 persen (2024). Sedangkan kondisi mantap jalan nasional di wilayah Aceh sudah mencapai sebesar 95,92 persen;
2. **Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW**; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Hutan Aceh, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
3. **Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 7.526,51 ha Tahun 2023 menjadi 7.627,54 ha di Tahun 2024, Capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh Tahun 2024 sebesar 90,08 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 92,64 persen; dan Rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 81,1 persen dan nasional sebesar 83,60 persen pada Tahun 2024;
4. **Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal**, Kondisi infrastruktur dan pelestarian sumber daya air di Aceh masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik (60,39% pada 2022), menurunnya debit air andalan, sebagian daerah irigasi yang tidak berfungsi optimal (hanya 82,56% dari luas 65.409 Ha yang berfungsi baik), serta terbatasnya penanganan banjir yang baru mencakup 38,21% dari potensi genangan.

Beberapa sungai mengalami degradasi dan sedimentasi, sehingga diperlukan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir: rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di hulu, pengawasan pemanfaatan sungai serta pembangunan tanggul di bagian tengah, dan pengerukan sedimentasi di hilir yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan perekonomian.

Permasalahan juga muncul akibat tingginya sedimentasi di muara sungai (antara lain di Krueng Baro, Krueng Ulim, Krueng Pante Raja, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib, Krueng Idi, Krueng Langsa, Krueng Tamiang, Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Teunom, Krueng Seunagan,

Krueng Tripa, Krueng Singkil, Krueng Labuhan Haji, Krueng Kluet, dan Krueng Sarah), yang menghambat aliran banjir dan lalu lintas kapal nelayan.

Selain itu, pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu karena adanya perbedaan kewenangan BPDAS (BPDAS Krueng Aceh dan BPDAS Sei Wampu). Oleh karena itu, permasalahan utama yang perlu ditangani adalah: 1. Degradasi daerah aliran sungai; 2. Tingginya sedimentasi di muara sungai; 3. Belum terwujudnya pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu hingga hilir

5. **Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan**, baik darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada Tahun 2024 sebesar 0,73, capaiannya masih dalam katagori rendah.
6. **Kawasan transmigrasi belum optimal**, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

Ketimpangan antara daerah di Aceh dapat tinggi karena beberapa faktor, diantaranya:

- a) Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi daripada daerah lain. Ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah.
- b) Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu, dimana Kabupaten/kota yang tergantung pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, mungkin mengalami ketimpangan ekonomi jika sektor tersebut tidak berkembang dengan merata di seluruh wilayah Aceh. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses pasar, dan perubahan iklim.
- c) Alokasi anggaran yang tidak merata dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak dana dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program ekonomi, sementara daerah-daerah lain mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- d) Kurangnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ketimpangan pendidikan dan kesehatan antara daerah di Aceh juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang baik mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e) Perbedaan dalam Kebijakan Pembangunan Regional. Perbedaan dalam kebijakan pembangunan regional antara pemerintah daerah dapat memperburuk ketimpangan antar daerah. Daerah-daerah yang menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-poor mungkin dapat mengurangi

ketimpangan ekonomi, sementara daerah-daerah lain yang fokus pada kepentingan kelompok tertentu atau pengembangan infrastruktur yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, memperkuat infrastruktur, dan mendorong diversifikasi ekonomi di seluruh wilayah Aceh.

Selanjutnya, ketimpangan yang tinggi juga dapat menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang berbeda, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya atau pembangunan oleh pemerintah. Ketegangan sosial ini dapat meningkatkan risiko konflik antar-atau dalam daerah, mengganggu stabilitas politik dan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mampu berkontribusi sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi potensi pembangunan regional dan nasional secara keseluruhan, dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih makmur, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah tujuan.

Ketika ketimpangan antar daerah di Aceh tinggi, dapat timbul sejumlah akibat yang merugikan, seperti :

- a. Peningkatan Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, polarisasi ekonomi dan sosial antara Kabupaten/kota yang kaya dan miskin di Aceh. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, dan memperdalam ketidaksetaraan sosial.
- b. Kurangnya Akses Terhadap Layanan Dasar. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan dasar ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan kesehatan antara daerah.
- c. Ketergantungan pada Bantuan dan Dana Pemerintah: Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin menjadi lebih tergantung pada bantuan pemerintah atau dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Ketergantungan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi global.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan menerapkan kebijakan dan program yang memperkuat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal, memperkuat infrastruktur, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

2.4.5. Sumber Daya Manusia masih rendah:

1. **Sumber daya manusia masih rendah dan adanya disparitas yang tinggi antar kabupaten/kota**, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 75,36% (2024) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 88,35 dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 70,4.
2. **Mutu guru belum optimal dan merata**. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SMK sudah mencapai 60 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA guru yang tersertifikasi belum mencapai 40 persen dan pada SLB guru yang tersertifikasi belum mencapai 30 persen, selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS, yaitu mencapai 86,9 persen pada tingkatan pendidikan SLB.
3. **Masih rendahnya APS anak usia 4-18 tahun penyandang Disabilitas**. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun di Aceh sudah baik (83,10 persen) dibandingkan Nasional (73,15 tahun) meskipun belum mencapai target 100 persen, namun APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dibawah 40 persen.
4. **Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh**, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2024 masih sebesar 72,42 masih di bawah rata-rata nasional dan masuk dalam katagori Sedang;
5. **Angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar**. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 34,62 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 17,54 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.
6. **Angka ketergantungan penduduk masih tinggi**, hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh Tahun 2024 tercatat mencapai 48,61 persen lebih baik dari nasional 46,80 persen, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif.
7. **Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi, yaitu sebesar 5,75 persen (2024) sedangkan nasional sebesar 4,91 persen**.
8. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Aceh (%) 49,62 sedangkan nasional 55,41 (2024)**.
9. **Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah**, dayah masih kurangnya inisiatif membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan dsb akan tetapi lebih focus pada perbaikan srapas. Dari 1.484 jumlah dayah hanya 44% yang mandiri.
10. **Derajat kesehatan masyarakat belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 73,2 masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 74,15 pada Tahun 2024;

11. **Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal**, hal ini ditandai angka Kematian Ibu Tahun 2024 di Aceh 98/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target.
12. **Masih tingginya prevalensi stunting**, data terakhir Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 29,40 persen, masih diatas angka Nasional 21,50 persen;
13. **Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh**, dikarenakan menurunnya pendapatan dari Otsus dari 2% (2018-2022) menjadi 1% (2023-2027) dan pada Tahun 2028 akan berakhir; Capaian terbaik SPM terdapat pada bidang Kesehatan dimana telah mencapai 100% di Tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan Tahun 2021 pada angka 48,12 persen. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada Tahun 2024 berada pada angka 99,60 persen. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam empat tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100 persen pada Tahun 2023 dan kembali turun pada Tahun 2024 di angka 96,34 persen.
14. **Belum Optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan** di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin,
15. **Penduduk miskin Aceh masih tinggi**, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 14,23 (Maret 2024) sedangkan nasional 9,03%, sedangkan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 14,23%. (2023)
16. **Pendapatan perkapita Aceh masih rendah**, hal ini ditandai Tahun 2024 sebesar Rp. 39.16 sedangkan nasional Rp. 71.03, pendapatan perkapita penduduk Aceh setengah dari rata-rata pendapatan **perkapita** penduduk Indonesia.
17. **Ketimpangan Gender dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi**. Hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 sedangkan nasional 76,90. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana Tahun 2024 IPG Aceh 92,64 sedangkan nasional 91,85, Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Tahun 2022 (1.029 kasus) menjadi 1.098 kasus di Tahun 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh
18. **Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal, demikian juga dengan kepemudaan dan keolahrgaan**, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum optimal, yaitu sebesar sebesar 58,01 belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00, lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan

olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.

19. **Daya tampung dalam panti masih belum optimal** dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi.
20. **Penanganan Disabilitas belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20 persen dari jumlah 8,361 PPKS.
21. **Kesejahteraan pekerja belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 20,86 persen. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

Penyebab masih rendahnya SDM Aceh adalah adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, meskipun Aceh memiliki banyak sekolah dan lembaga pendidikan, tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Wilayah pedalaman atau terpencil mungkin menghadapi kendala dalam hal infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Konflik bersenjata yang telah lama berlangsung di Aceh telah mengganggu proses pembangunan SDM. Konflik ini dapat mengganggu akses pendidikan, menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan, dan menyebabkan gangguan pada proses belajar-mengajar. Pembangunan SDM memerlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi masih belum fokus dan masif. Namun, Aceh mungkin mengalami kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah, yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan SDM.

Kondisi Kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk tingginya angka kematian ibu dan anak, stunting, serta prevalensi penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, dapat menghambat pembangunan SDM di Aceh. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, beberapa komunitas mungkin kurang menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi. Kesadaran akan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan di Aceh. Untuk meningkatkan pembangunan SDM di Aceh, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyebab masih tingginya disparitas adalah karena konflik dan juga bencana alam, akses layanan dasar yang belum merata, terkendalanya dengan infrastruktur dan akses transportasi yang belum maksimal, Ketidakseimbangan dalam investasi pembangunan manusia antara wilayah-wilayah di Aceh, Faktor-faktor sosial dan budaya seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan tradisi yang membatasi

akses perempuan dan kelompok minoritas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat menyebabkan disparitas dalam IPM di Aceh.

2.4.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah;

1. Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana **masih rendah, hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 144,30/tinggi (2024) bandingkan nasional adalah sebesar 128,5.**
2. **Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup.** hal ini ditandai dengan Indeks kualitas lingkungan hidup Aceh Tahun 2024, masih sebesar 79,66 walaupun sedikit lebih tinggi dari nasional (73,53), dengan rincian kualitas air 63,25 persen, tutupan lahan 76,66 persen, indeks kualitas udara 92,81 persen, indeks kualitas air laut sebesar 83,24 persen. disamping itu, selama periode Tahun 2003-2022 peningkatan suhu udara sebesar 0.4°C.
3. **Pembangunan kehutanan belum maksimal,** hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama Tahun 2019 - 2020 terdapat seluas $\pm$ 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada Tahun 2020-2022 terutama dengan Gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada Tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada Tahun 2022; dan Kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan.
4. **Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal,** hal ini ditandai dengan rasio elektrifikasi Aceh Tahun 2024 yang belum mencapai 100 persen (99,99 persen) dari yang diharapkan saat ini. Disamping itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana yang masih rendah di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat dan pengambil keputusan dapat menjadi faktor utama yang menghambat upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan hutan liar, overfishing, atau penambangan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat upaya untuk melaksanakan kebijakan dan program perlindungan lingkungan hidup serta mendorong praktek-praktek eksploitasi yang merugikan. Ketidakstabilan politik dan konflik di Aceh dapat mengganggu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pengungsi, dan ketidakpastian keamanan, yang semuanya dapat memperburuk



kondisi lingkungan hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi bencana dapat menghambat kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk bertindak secara efektif. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya di Aceh. Kurangnya perencanaan adaptasi dan mitigasi yang memadai dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar akibat bencana-bencana tersebut.

Jika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah di Aceh, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, kerusakan lahan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ini akan berdampak buruk pada ekosistem dan spesies yang ada di Aceh. krisis kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya akan membebani sistem kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Misalnya, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi dapat merusak infrastruktur, properti, dan tanaman, serta mengganggu kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko bencana dan mengadaptasi perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan Aceh terhadap bencana alam dan fenomena ekstrem lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian manusia, kerugian ekonomi, dan memerlukan upaya pemulihan yang mahal. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat mengganggu produksi pangan dan rantai pasokan makanan di Aceh. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian keamanan pangan, peningkatan harga pangan, dan meningkatnya risiko kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan gangguan sosial, termasuk konflik antar-masyarakat, pengungsi, dan migrasi paksa. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial, memicu konflik, dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan migrasi.

Oleh karena itu, penting bagi Aceh untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan bencana, dan mengadopsi strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, penegakan hukum lingkungan yang ketat, pendidikan lingkungan yang lebih luas, dan promosi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini meliputi peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan, investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, dan promosi kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

2.5. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan di atas dan merujuk pada Rancangan RPJMA Tahun 2025-2049, maka isu-isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

2.5.1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat Syariat Islam, dan budaya Aceh dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat. Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong promosi dan pelestarian cagar budaya dan objek kemajuan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas daerah. mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka. Disamping itu, pengelolaan harta agama terhadap wakaf perlu ditangani secara serius seperti manajemen kelembagaan dan status hukum aset wakaf (sertifikasi tanah wakaf).

2.5.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting yang meliputi:

1. Peningkatan Akses Makanan Bergizi dengan upaya meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat termasuk daerah terpencil, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
3. Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.
4. Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan dengan mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada

kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami stunting.

5. Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan meningkatkan akses kepada masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
6. Kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah berbagai stakeholder termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan stunting.

2.5.3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Pemerintah Aceh dapat mengimplentasikan pemerataan Pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1. Menurunkan Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat
- Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
- Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
- Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil

2. Memperkuat Pendidikan Vokasi

Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi
- Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal
- Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa
- Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi

3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan
- Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku
- Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan
- Pembangunan Keterampilan
- Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait
- Pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi
- Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan

2.5.4. Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar akses masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak; pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya berikutnya dengan memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin; membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan. Disamping itu, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

2.5.5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya mendukung peningkatan UMKM terhadap akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM, dan pengembangan produk bersertifikasi halal. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan. Optimalisasi potensi pariwisata Aceh, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisata budaya dan sejarah, ekowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, wisata minat khusus lainnya serta membangun membangun infrastruktur wilayah yang mendukung. Disamping itu, pengembangan pariwisata di Aceh perlu dilakukan dalam kerangka dan branding pada wisata halal/*Muslim Friendly* . Mengembangkan sektor-sektor



baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2.5.6. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Digitalisasi

Riset dan Inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik. membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta dengan dikoordinir oleh Bappeda Aceh. Selanjutnya membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian.

2.5.7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.

Permasalahan lapangan kerja di Aceh saat ini masih menjadi permasalahan utama yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tergambar dari rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbatas, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Aceh yang belum cukup kuat dan terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Berbagai upaya pembangunan yang dapat dilakukan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat antara lain, yaitu: 1) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan penguatan mutu produk UMKM diarahkan pada sertifikasi produk terutama sertifikat halal; 2) memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar; 3) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan; 4) menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas; 5) mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif; 6) mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi; 7) mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat; dan 8) mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.

2.5.8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan ekspor dengan cara mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan positioning pada Industri Halal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang Islami. Untuk meningkatkan nilai tambah, Pemerintah Aceh berfokus pada agroindustry terintegrasi terhadap komoditi unggulan dan strategis, terutama: Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, dan Pala), Komoditi Pertanian (Padi dan Jagung), Komoditi Peternakan (Sapi/Kerbau, kambing/domba dan ungags), serta Komoditi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Budidaya).

Untuk mendukung pengembangan industri terintegrasi, Pemerintah Aceh membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, jaringan transportasi darat dan laut secara mamadai, serta memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan juga standarisasi produk untuk memenuhi persyaratan pasar global, dan mendorong sertifikasi produk halal.

Pemerintah Aceh membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional. Pemerintah Aceh mengusung paradigma baru yang bervisi global karena memiliki keunggulan geostrategis Aceh. Posisi geostrategis didadap karena keberadaan Aceh diantara ekosistem ekonomi global, seperti: Indo-Pasifik, IORA (*Indian Ocean Rip Association*), IMT-GT, BRICS, kerjasama Indonesia-India, kerjasama Indonesia-Turkiye, Selat Malaka, posisi yang dekat pasar dan pintu gerbang pariwisata dunia ke Indonesia, Terusan Kra, serta akses langsung Aceh ke berbagai penjuru dunia melalui Selat malaka dan Samudera Hindia.

2.5.9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan melalui skema ekonomi hijau dan ekonomi biru. dengan upaya meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan dukungan kepada petani. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya mendorong pengembangan



energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

2.5.10. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan saat ini juga diarahkan pada peningkatan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan, dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan dengan upaya mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

2.5.11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan cerminan kinerja pemerintahan dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.

2.5.12. Memperkuat Otonomi Khusus

Otonomi Khusus Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya, terutama terkait penerapan hukum Syariah, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus kedepan

di arahkan pada memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh. Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional serta membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.

2.5.13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendanaan pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat. Menggalakkan promosi investasi dan kebijakan kemudahan berinvestasi seperti memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha serta pengembangan ekonomi lokal. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri. Membangun komitmen yang kuat bersama stakeholder untuk memperkuat kemandirian fiskal di Aceh.

2.5.14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk penanganan PPKS dan disabilitas, memperkuat gender dan keluarga dengan cara mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh serta pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan. Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selanjutnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan parenting.

2.5.15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara:



mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dan mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Menerapkan pendanaan insentif kinerja berbasis ekologi dengan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan.

2.5.16. Pengurangan Risiko Bencana

Aceh merupakan daerah dengan Indeks Risiko Bencana yang tinggi. Beberapa bencana yang sering terjadi di Aceh antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan darurat. Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana. Pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan shelter. Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

2.5.17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Aceh mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi secara merata, menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, potensi wilayah tertinggal juga menjadi perhatian dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan. Pembangunan Aceh ke depan juga berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat dan pembangunan jalan nasional dan provinsi menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong pemanfaatan lahan transmigrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengembangkan kapasitas sumber

daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2.5.18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

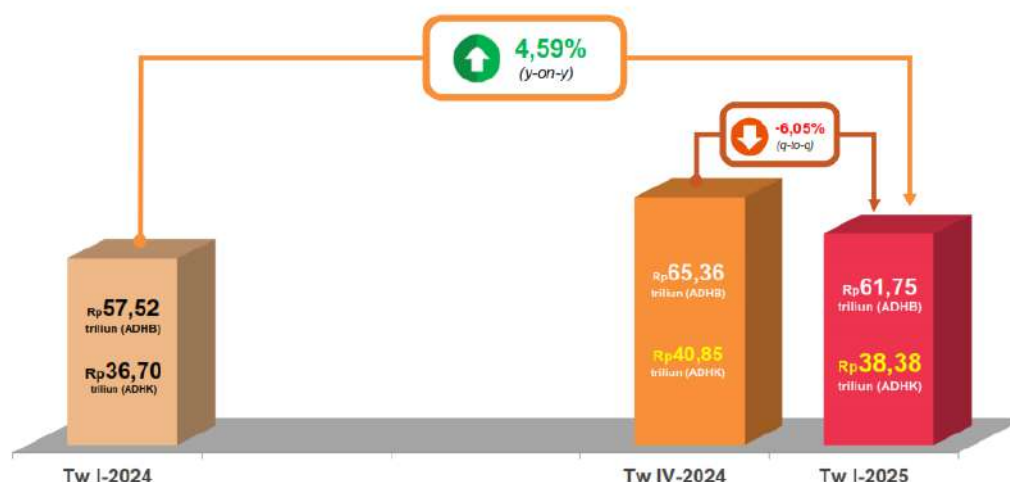
Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya penting seperti: 1). mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi serta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas; 2). meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara; 3). mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan; 4). memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh; 5) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi; 6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan 7) mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Aceh yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I - 2025 mencapai Rp. 61,75 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 38,18 triliun. Ekonomi Aceh pada triwulan I - 2025 tercatat sebesar 4,59 persen (y-on-y) dan 6,05 persen (q-to-q). Lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I - 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2025

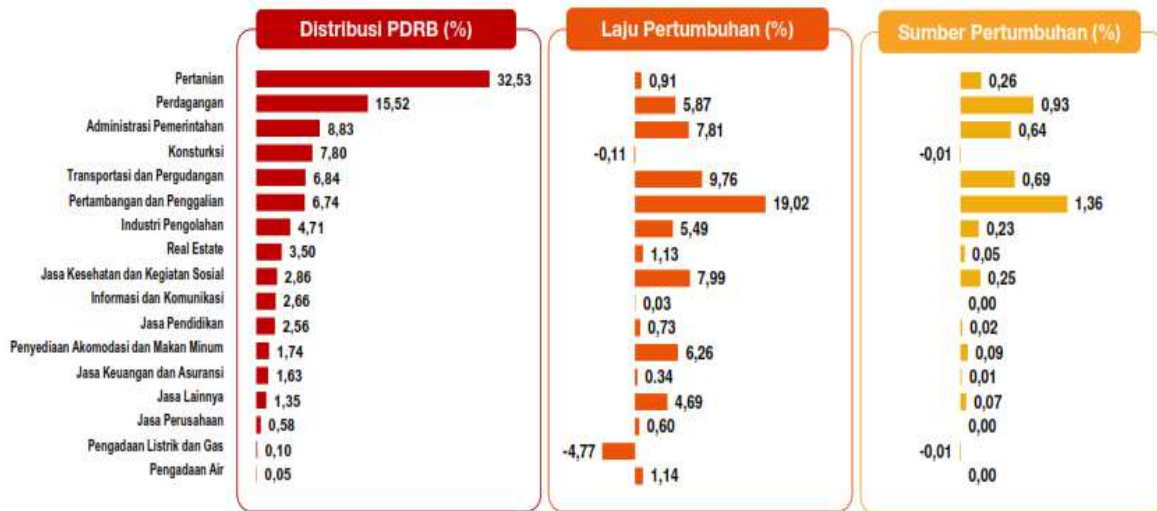
Gambar 3. 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen)

Dari Gambar 3.2 diketahui pertumbuhan ekonomi pada triwulan I - 2025 masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 0,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali pengadaan listrik dan gas serta konstruksi yang berkontraksi masing-masing sebesar 4,77 persen dan 0,11 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pertambangan dan penggalian yang tercatat sebesar 19,02 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 9,76 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,99 persen. Selanjutnya, struktur PDRB Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti, mengingat perekonomian Aceh masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 32,53 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran-reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,52 persen, administrasi pemerintahan sebesar 8,83 persen, konstruksi sebesar 7,80 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 6,84 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai sebesar 71,52 persen. Lebih jelas mengenai

III-2

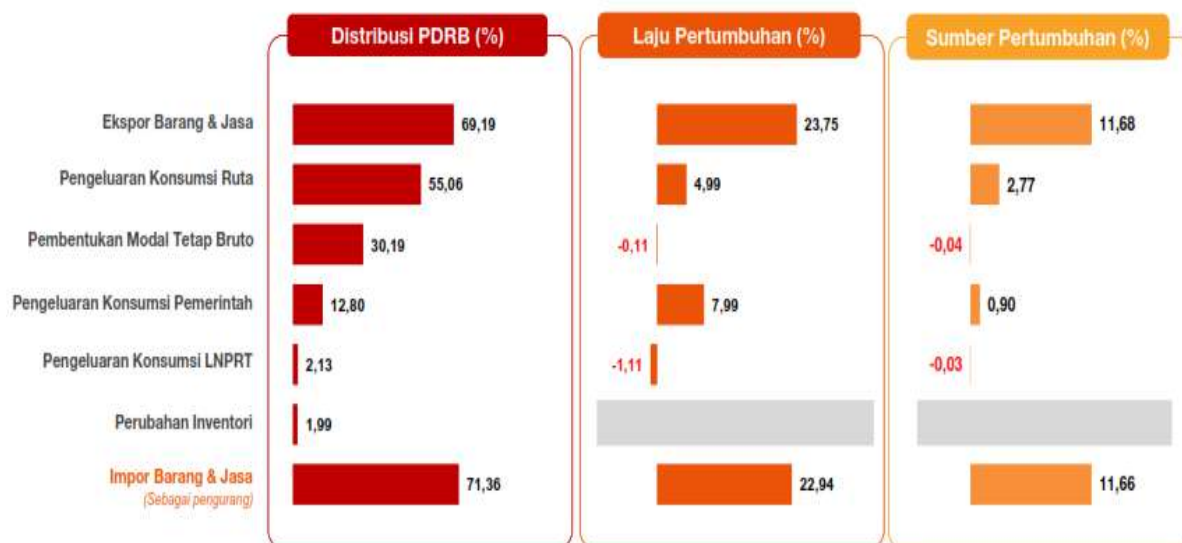
pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha tahun 2024 (y-on-y) dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.



Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2025

Gambar 3. 2
Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen)

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I - 2025 didukung oleh hampir semua komponen kecuali pengeluaran konsumsi LNPR (PK-LNPR) dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,75 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,99 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,99 persen. Sementara itu, Komponen PK-LNPR mengalami kontraksi sebesar 1,11 persen dan Komponen PMTB mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen. Pada faktor pengurang, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 22,94 persen. Struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun PDRB menurut pengeluaran berkontribusi sebesar 70,35 persen (lihat Gambar 3.3).

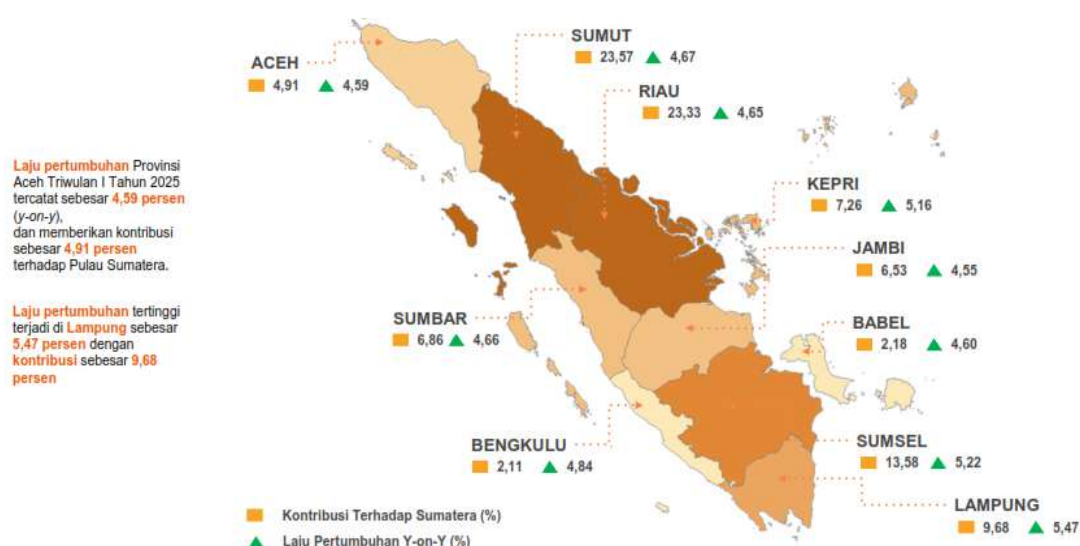


Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2025

Gambar 3. 3

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen)

Secara regional, laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I - 2025 yang tercatat sebesar 4,59 persen berkontribusi sebesar 4,91 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Lampung yakni sebesar 9,68 persen dengan kontribusi sebesar 5,47 persen. Sementara itu provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Sumatera Utara yaitu sebesar 23,57 persen. Lebih jelas kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi se Sumatera triwulan I - 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2025

Gambar 3. 4

Perbandingan Kinerja Ekonomi Provinsi se-Sumatera Triwulan I - 2025 (y-on-y) (persen)

3.1.2. Inflasi

Inflasi Aceh pada April 2025 tercatat sebesar 3,11 persen (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Meulaboh sebesar 3,67 persen (y-on-y) dengan IHK sebesar 111,30 dan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 2,38 persen (y-on-y) dengan IHK sebesar 110,21. Perbandingan IHK dan tingkat inflasi pada bulan April 2025 berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, April 2025

Wilayah	IHK	Inflasi Y-on-Y (Persen)	Inflasi m-to-m (Persen)
1	2	3	4
Kab. Aceh Tengah	112,27	3,14	2,15
Kota Meulaboh	111,30	3,67	1,75
Kab. Aceh Tamiang	110,21	2,38	0,79
Kota Banda Aceh	108,99	3,44	1,84
Kota Lhokseumawe	108,83	2,98	1,37
Aceh	110	3,11	1,61

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 02 Mei 2025

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,99 persen; kelompok transportasi sebesar 0,64 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,84 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,28 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,50 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,08 persen. Lebih jelas mengenai inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran April 2025 (y-on-y) dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3. 2
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran April 2025 (y-on-y) (persen)

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
1	2	3	4
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	4,26	1,58
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,46	0,09
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,08	0,48
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,25	0,01
5	Kesehatan	1,99	0,03
6	Transportasi	0,64	0,07
7	Informasi, Komunikatif, dan Jasa Keuangan	-1,09	-0,04
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,84	0,01
9	Pendidikan	1,28	0,05
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,50	0,27
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	10,08	0,56

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 02 Mei 2025

Selanjut terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain: emas perhiasan, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, tarif air minum PAM, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai merah, minyak goreng, ikan dencis, kelapa, kontrak rumah, dan mobil. Sedangkan 10 komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tomat, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, bensin, kangkung, cabai rawit, bayam, telepon seluler, dan hand body lotion. Lebih jelas mengenai komoditas yang memberikan andil kepada inflasi/deflasi April 2025 (y-on-y) dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Andil Beberapa Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi April 2025 (y-on-y) (persen)

No	Andil Inflasi (%)		Andil Deflasi (%)	
1	2	3	4	5
1	Emas Perhiasan	0,54	Tomat	-0,15
2	Ikan Tongkol	0,32	Bawang Merah	-0,11

No	Andil Inflasi (%)		Andil Deflasi (%)	
	2	3	4	5
3	Tarif Air Minum PAM	0,31	Telur Ayam Ras	-0,06
4	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,28	Angkutan Udara	-0,05
5	Cabai merah	0,24	Bensin	-0,03

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 02 Mei 2025

3.1.3. Gini Ratio

Gini ratio Aceh pada September 2024 tercatat stabil sebesar 0,294. Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,332 poin mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,325. Sebaliknya, gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,253 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,258. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan di wilayah perdesaan yang merupakan hasil dari pelaksanaan program pembangunan daerah yang meliputi program pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur atau distribusi bantuan sosial yang lebih efektif. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini.



Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025

Gambar 3. 5
Perkembangan Gini Ratio Aceh Maret 2019 - September 2024 (Indeks)

Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional, gini ratio Aceh pada September 2024 jauh lebih baik, dimana gini ratio nasional pada September 2024 tercatat sebesar 0,381. Secara nasional pada September 2024, provinsi dengan gini ratio tertinggi adalah DKI Jakarta yang tercatat sebesar 0,431, dan terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,235 (lihat Tabel 3.4)

Tabel 3. 4
Gini Ratio Menurut Provinsi Periode Maret 2023 – September 2024

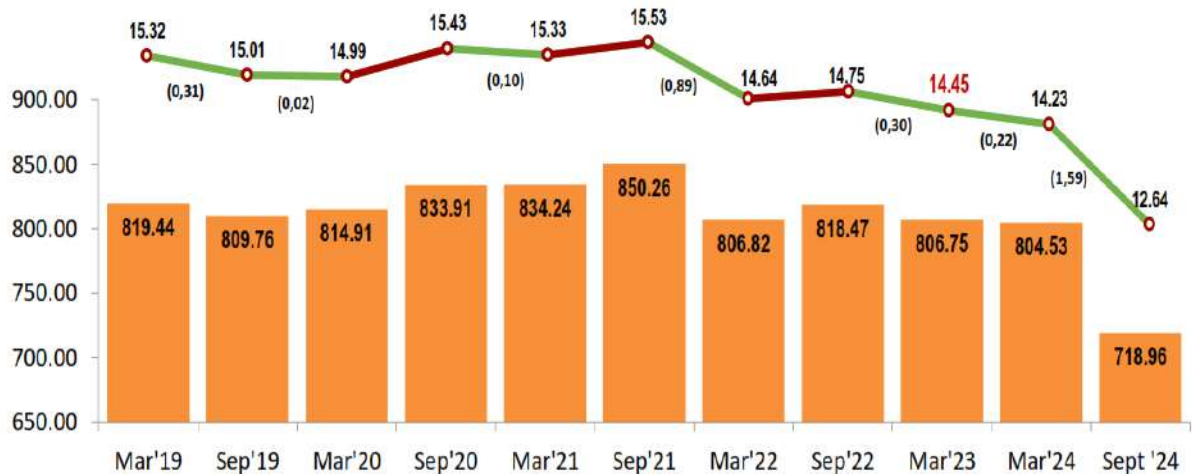
Provinsi	Maret 2023			Mar-24			Sep-24		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	0,318	0,265	0,296	0,325	0,258	0,294	0,332	0,253	0,294
Sumatera Utara	0,340	0,242	0,309	0,325	0,230	0,297	0,333	0,236	0,306
Sumatera Barat	0,305	0,232	0,280	0,310	0,228	0,283	0,313	0,226	0,287
Riau	0,369	0,274	0,324	0,345	0,267	0,307	0,333	0,271	0,306
Jambi	0,365	0,320	0,343	0,360	0,288	0,321	0,353	0,279	0,315
Sumatera Selatan	0,360	0,305	0,338	0,352	0,305	0,333	0,357	0,300	0,331
Bengkulu	0,386	0,283	0,333	0,413	0,275	0,342	0,409	0,278	0,343
Lampung	0,359	0,287	0,324	0,323	0,275	0,302	0,329	0,270	0,301
Kepulauan Bangka Belitung	0,265	0,202	0,245	0,263	0,196	0,244	0,251	0,189	0,235
Kepulauan Riau	0,339	0,248	0,340	0,351	0,240	0,349	0,360	0,236	0,357
DKI Jakarta	0,431	–	0,431	0,423	–	0,423	0,431	–	0,431
Jawa Barat	0,439	0,321	0,425	0,434	0,325	0,421	0,439	0,327	0,428
Jawa Tengah	0,399	0,318	0,369	0,399	0,310	0,367	0,392	0,317	0,364
DI Yogyakarta	0,453	0,362	0,449	0,440	0,349	0,435	0,429	0,355	0,428
Jawa Timur	0,404	0,337	0,387	0,387	0,325	0,372	0,388	0,332	0,373
Banten	0,372	0,256	0,368	0,357	0,254	0,353	0,361	0,246	0,359
Bali	0,367	0,290	0,362	0,364	0,287	0,361	0,352	0,285	0,348
Nusa Tenggara Barat	0,402	0,334	0,375	0,383	0,326	0,361	0,388	0,320	0,364
Nusa Tenggara Timur	0,299	0,307	0,325	0,281	0,305	0,316	0,282	0,306	0,316
Kalimantan Barat	0,348	0,273	0,321	0,340	0,259	0,310	0,341	0,258	0,314
Kalimantan Tengah	0,335	0,298	0,317	0,311	0,288	0,301	0,322	0,282	0,304
Kalimantan Selatan	0,345	0,259	0,313	0,329	0,255	0,302	0,326	0,259	0,298
Kalimantan Timur	0,328	0,292	0,322	0,325	0,289	0,321	0,315	0,282	0,310
Kalimantan Utara	0,274	0,270	0,277	0,258	0,273	0,264	0,245	0,265	0,259
Sulawesi Utara	0,377	0,345	0,370	0,364	0,334	0,360	0,351	0,331	0,347
Sulawesi Tengah	0,344	0,265	0,304	0,340	0,259	0,301	0,340	0,271	0,309
Sulawesi Selatan	0,386	0,339	0,377	0,373	0,325	0,363	0,369	0,330	0,360
Sulawesi Tenggara	0,393	0,338	0,371	0,392	0,330	0,370	0,374	0,337	0,365
Gorontalo	0,403	0,403	0,417	0,397	0,408	0,414	0,400	0,402	0,413
Sulawesi Barat	0,452	0,308	0,351	0,456	0,303	0,354	0,404	0,296	0,330
Maluku	0,288	0,247	0,288	0,277	0,233	0,282	0,284	0,236	0,291
Maluku Utara	0,326	0,269	0,300	0,343	0,275	0,316	0,328	0,243	0,296
Papua Barat	-	-	-	0,283	0,426	0,389	0,296	0,416	0,385
Papua Barat Daya	-	-	-	0,266	0,413	0,346	0,262	0,418	0,347
Papua	-	-	-	0,299	0,418	0,362	0,322	0,505	0,405
Papua Selatan	-	-	-	0,299	0,435	0,404	0,351	0,429	0,424
Papua Tengah	-	-	-	0,270	0,397	0,381	0,253	0,374	0,355
Papua Pegunungan	-	-	-	0,224	0,346	0,340	0,244	0,349	0,346
INDONESIA	0,409	0,313	0,388	0,399	0,306	0,379	0,402	0,308	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

3.1.4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Aceh pada September 2024 tercatat sebesar 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 poin jika dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 14,23 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada September 2024 berjumlah sebesar 718,96 ribu orang mengalami penurunan sebesar 85.570 orang jika dibandingkan dengan periode

Maret 2024 yang berjumlah sebesar 804,53 ribu orang. Penurunan ini merupakan penurunan tertinggi di Sumatera dan nomor tiga secara nasional. Pencapaian ini juga merupakan pencapaian tertinggi selama empat tahun terakhir. Lebih jelas mengenai perkembangan persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Aceh periode Maret 2019 s.d Maret 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.

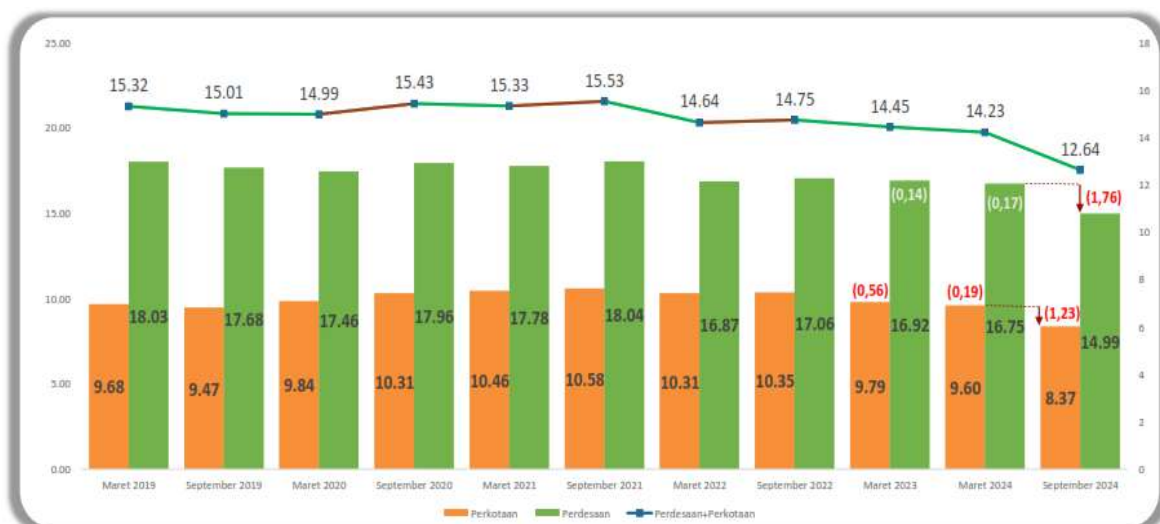


Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2025

Gambar 3. 6

Perkembangan Kemiskinan Aceh Periode Maret 2019 - September 2024

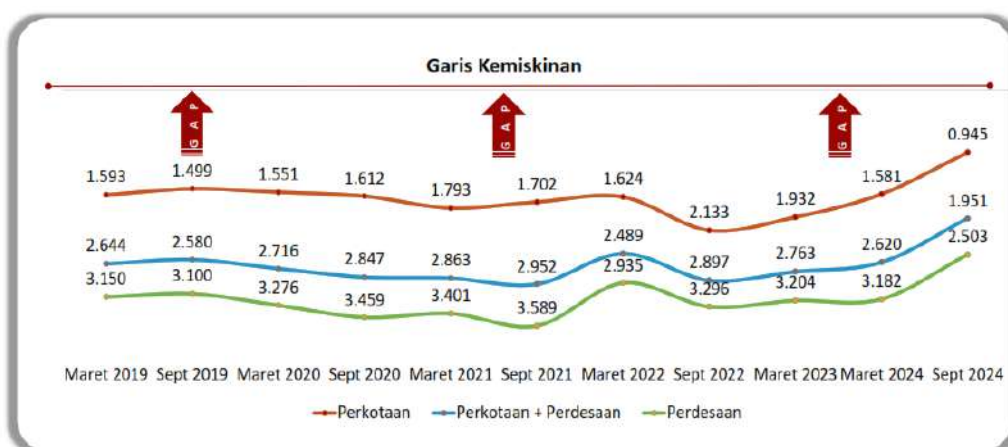
Berdasarkan Gambar 3.7 diketahui penurunan kemiskinan lebih terasa di wilayah perdesaan, dimana tingkat kemiskinan turun sebesar 1,76 poin persen, lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan di wilayah perkotaan sebesar 1,23 poin persen. Tingkat kemiskinan pada September 2024 di perdesaan sebesar 14,99 persen, sementara di perkotaan sebesar 8,37 persen. Hal ini menandakan bahwa masyarakat perdesaan, yang selama ini menjadi fokus utama program pengentasan kemiskinan, semakin merasakan dampak positif dari kebijakan yang telah diimplementasikan.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2025

Gambar 3. 7
Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Perdesaan Periode
Maret 2019 - September 2024

Jika dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan Aceh pada September 2024 tercatat sebesar 1,951 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 2,620. Penurunan ini mencerminkan bahwa bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga dibarengi dengan jarak pendapatan (didekati dengan konsumsi) rumah tangga miskin dari garis kemiskinan semakin kecil (lihat Gambar 3.8).



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2025

Gambar 3. 8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Periode Maret 2019 - September 2024

Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan Aceh pada September 2024 turun menjadi 0,470 dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 0,712. Indeks Keparah yang menurun menunjukkan distribusi bantuan atau program

pengentasan kemiskinan yang lebih merata dan efektif. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa intervensi kebijakan, seperti subsidi atau program bantuan sosial, telah berhasil menjangkau kelompok yang paling rentan, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan secara keseluruhan. Ini merupakan sinyal positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lebih jelas mengenai indeks keparahan kemiskinan Aceh periode Maret 2019 s.d September 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut ini.



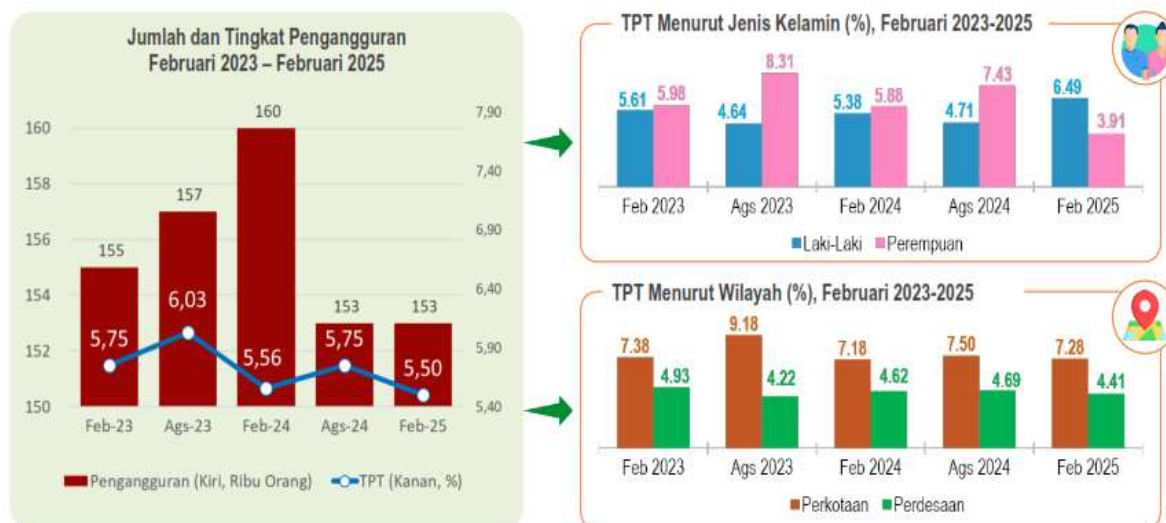
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2025

Gambar 3. 9

Indeks Keparahannya Kemiskinan Periode Maret 2019 - September 2024

3.1.5. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2025 tercatat sebesar 5,50 persen mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin jika dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang tercatat sebesar 5,75 persen. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, TPT Perempuan pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,91 persen mengalami penurunan sebesar 3,52 persen poin dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang tercatat sebesar 7,43 persen. TPT laki-laki pada Februari 2025 tercatat sebesar 6,49 persen mengalami peningkatan sebesar 1,78 persen poin dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang tercatat sebesar 4,71 persen. Selanjutnya, menurut wilayah TPT perkotaan pada Februari 2025 tercatat sebesar 7,28 persen, mengalami penurunan sebesar 0,22 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2024. TPT wilayah perdesaan pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,41 persen mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin jika dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang tercatat sebesar 4,69 persen. Lebih jelas mengenai TPT Aceh periode Februari 2023 s.d Februari 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh 05 Mei 2025

Gambar 3. 10

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Februari 2023 - Februari 2025

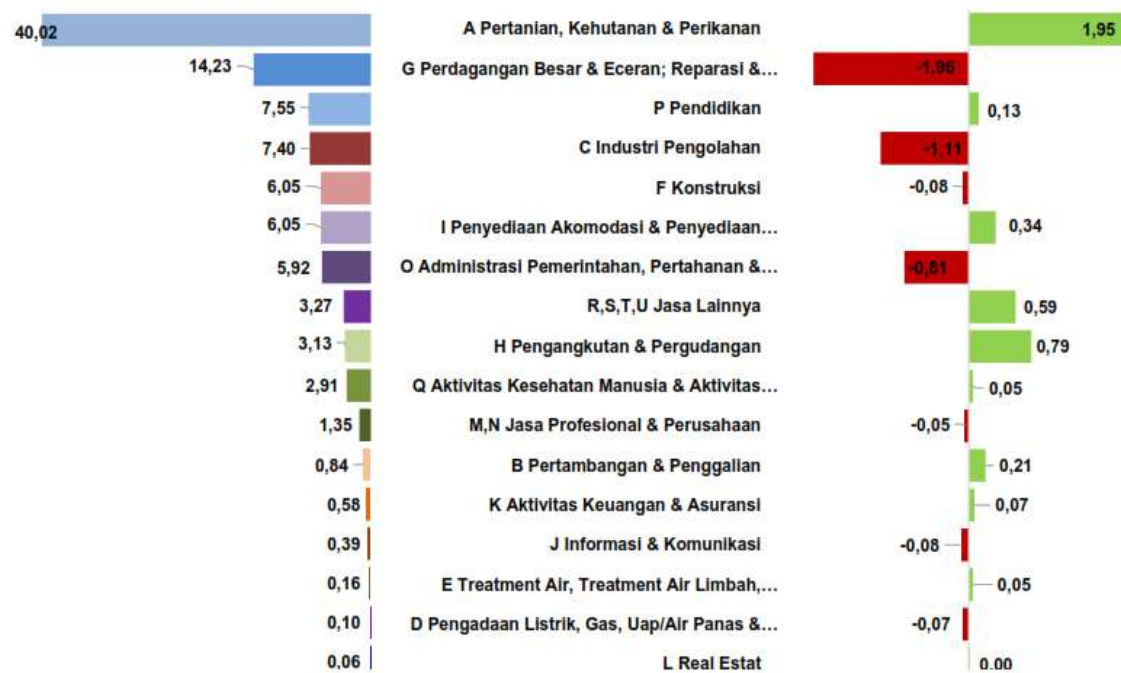
Penduduk usia kerja di Aceh pada Februari 2025 berjumlah sebanyak 4.121 ribu orang, naik sebanyak 68 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 2.705 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1.416 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 2.556 ribu orang penduduk bekerja dan 149 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 105 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 100 ribu orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 4 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2025 sebesar 65,63 persen, naik 1,48 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 81,29 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 50,04 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin dan perempuan mengalami kenaikan, sebesar 2,99 persen poin. Lebih jelas mengenai penduduk usia kerja dan angkatan kerja Februari 2023 s.d Februari 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Periode Februari 2023 s.d Februari 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2024 - Feb 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
1	2	3	4	5	6	7	8
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.992	4.021	4.053	4.087	4.121	68	1,68
Angkatan Kerja	2.599	2.604	2.600	2.661	2.705	105	4,04
Bekerja	2.450	2.447	2.455	2.508	2.556	100	4,11
Pengangguran	149	157	145	153	149	4	2,76
Bukan Angkatan Kerja	1.392	1.417	1.453	1.426	1.416	-37	-2,55
	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	65,12	64,77	64,15	65,11	65,63	1,48	
Laki-Laki	82,13	80,57	81,33	80,68	81,29	-0,04	
Perempuan	48,21	49,05	47,05	49,62	50,04	2,99	

Sumber: Berita Resmi Statistika, BPS Aceh, 05 Mei 2025

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha dengan tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 40,02 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,23 persen; serta sektor Pendidikan sebesar 7,55 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,95 persen poin); sektor Pengangkutan dan Pergudangan (0,79 persen poin) dan Jasa Lainnya (0,59 persen poin). Sementara tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan tenaga kerja adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (1,96 persen poin), sektor Industri Pengolahan (1,11 persen poin); dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,81 persen) (Gambar 3.11).

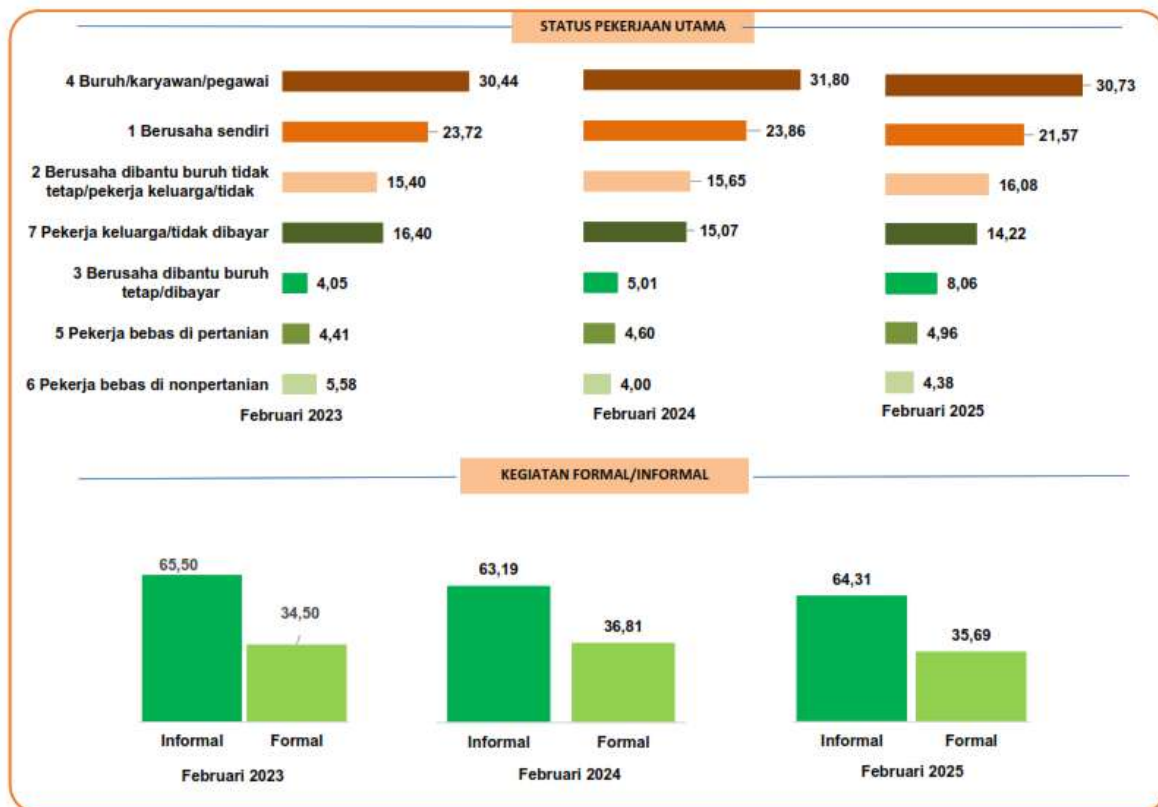


Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 05 Mei 2025

Gambar 3. 11
Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025

Pada Februari 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 30,73 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas non pertanian, yaitu sebesar 4,38 persen. Dibandingkan Februari 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah pekerja bebas di pertanian sebesar 3,05 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha sendiri sebesar 2,29 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

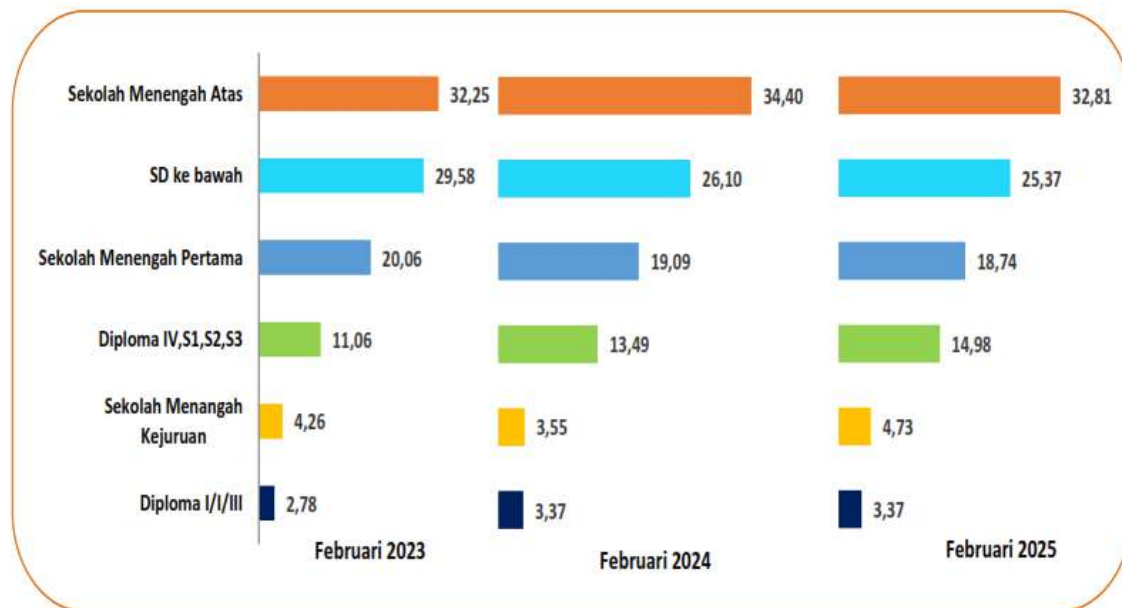
Sementara itu, pada Februari 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.644 ribu orang (64,31 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 912 ribu orang (35,69 persen). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin (Gambar 3.12).



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 05 Mei 2025

Gambar 3. 12
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2023 - Februari 2025.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 32,81 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 14,98 persen dan mengalami tren yang semakin meningkat dari Februari 2023. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023 dan Februari 2024. Dibandingkan dengan Februari 2024, kontribusi penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas, SD ke bawah, dan Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,59 persen poin, 0,73 persen dan 0,35 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3, Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 (1,48 persen poin). Lebih jelas mengenai persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan periode Februari 2023 s.d Februari 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut ini.



Sumber Berita Resmi Statistik, BPS Aceh 05 Mei 2025

Gambar 3. 13
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan, Februari 2023 - Februari 2025.

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Aceh diatas maka arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta tingkat pengangguran Aceh secara konvergensi melalui sinergitas program/kegiatan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga terkait, Badan Usaha, perbankan serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Membangun pondasi transformasi Sumberdaya Manusia, Birokrasi, Ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan melalui implementasi green economi di dengan pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau yang mencakup penerapan good agriculture practices, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan serta perikanan, pengembangan industri hilir dan diversifikasi produk, perbaikan rantai pasok dan rantai hilir, dukungan kemitraan dan permodalan, serta intervensi terhadap komoditas unggulan pada kabupaten/kota;
3. Peningkatan akselerasi ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah dan ekonomi pesantren;
4. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terutama pada prioritas program dan kegiatan terutama belanja modal untuk mendukung visi dan misi Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMA tahap ke dua tahun 2026 dalam percepatan pertumbuhan ekonomi;

5. Penguatan kelembagaan dan membuka lapangan usaha industri pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja;
6. Membangun koordinasi dalam penyaluran KUR dan UMI yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan;
7. Mengidentifikasi sebagai pondasi model bisnis sharing factory dalam rangka mendorong UMKM dan Industri;
8. Penguatan dan peningkatan pemenuhan kualitas yang mendorong industri rumah tangga dan UMKM agar dapat bersaing di pasar.
9. Perlu kolaborasi peran pemerintah Pusat dan Daerah terkait kewenangan serta *stakeholders* dalam realisasi percepatan pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan RPJMA Tahun 2025-2029 target indikator makro Aceh dalam RKPA tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 6
Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMA 2025-2029	TARGET RKPD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,4
2.	PDRB Per Kapita (juta)	50,95	50,95
3.	Kontribusi PDRB Provinsi	1,1	1,1
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,60 - 12,00	10,60 - 12,00
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45 - 4,60	4,45 - 4,60
6.	Rasio Gini	0,287 - 0,291	0,287 - 0,291
7.	Indeks Modal Manusia	0,58	0,58
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	41,23	41,23
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	83,06	83,06

Sumber:

RPJMA Tahun 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh

Realisasi pendapatan Aceh periode Tahun 2022-2024 berfluktuasi. Tahun 2022 realisasi pendapatan Aceh mencapai sebesar Rp. 13.713.584.703.596, tahun 2023 realisasi pendapatan Aceh hanya mencapai sebesar Rp. 10.572.558.202.287, mengalami penurunan sebesar Rp. 3.141.026.501.309 atau sebesar 22,90 persen. Penurunan terbesar terdapat pada komponen pendapatan transfer yang mencapai

sebesar Rp. 3.194.787.629.103 terutama dari komponen Dana Otsus yang pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp. 7.560.000.000.000 turun menjadi Rp. 3.960.000.000.000. Hal ini terjadi karena adanya penurunan Dana Otsus sesuai dengan Pasal 183 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa dana otsus berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas (2008 s.d 2022) yang besarnya setara dengan 2 (dua) persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (2023-2027) yang besarnya setara 1 (satu) persen dari plafon DAU Nasional. Tahun 2023 merupakan tahun pertama penurunan dana otsus menjadi sebesar 1 persen dari DAU Nasional. Tahun 2024, realisasi pendapatan Aceh tercatat sebesar Rp. 11.396.038.068.930 mengalami peningkatan sebesar Rp. 823.479.866.643 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Aceh tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 10.572.558.202.287. Peningkatan terbesar terdapat pada komponen Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 2.987.176.840.818 bertambah sebesar Rp. 823.479.866.643 pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 3.225.685.925.856. Sementara itu, Pendapatan transfer tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 587.397.198.655 menjadi sebesar Rp. 8.167.778.560.238 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 7.580.381.361.583.

Selanjutnya, pendapatan Aceh tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 10.796.565.460.935 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 599.472.607.994. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan TKD sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, pendapatan Aceh tahun 2026 berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPKA berjumlah sebesar Rp. 11.482.353.912.048. Peningkatan pendapatan ini disebabkan karena adanya Dana Abadi sebesar Rp. 1.481.336.056.446,74 yang terdapat dalam komponen Lain Lain PAD yang sah. Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target pendapatan Aceh Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2022-2026

U R A I A N	2022	2023	2024	APBA 2025	RKPA 2026
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	13.713.584.703.596	10.572.558.202.287	11.396.038.068.930	10.796.565.460.935	11.482.353.912.048
PENDAPATAN ASLI ACEH	2.917.145.003.052	2.987.176.840.818	3.225.685.925.856	2.859.122.172.935	4.448.857.324.508
Pajak Aceh	1.717.834.522.320	1.791.227.845.430	1.930.621.844.261	1.722.008.235.092	1.771.946.210.642
Retribusi Aceh	15.000.911.792	16.461.509.498	790.959.745.325	700.477.633.788	751.907.776.848
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.862.545.156	252.723.801.693	267.660.903.349	265.781.801.886	329.563.729.463
Lain-Lain Pendapatan Sah	1.004.447.023.784	926.763.684.197	236.443.432.921	170.854.502.169	1.595.439.607.555
PENDAPATAN TRANSFER	10.775.168.990.686	7.580.381.361.583	8.167.778.560.238	7.935.475.288.000	7.031.400.187.540
Dana Perimbangan	3.183.288.821.686	3.609.932.652.583	3.872.936.043.238		3.031.206.482.540
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	7.560.000.000.000	3.960.000.000.000	4.276.993.035.000		4.000.193.705.000
Insentif Fiskal	-	10.448.709.000	17.849.482.000	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	31.880.169.000	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.270.709.858	4.999.999.886	2.573.582.836	1.968.000.000	1.458.659.703.393
Hibah	21.164.409.858	4.999.999.886	2.573.582.836	1.968.000.000	2.096.400.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	106.300.000	-	-	-	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 (*audited*), 2023 (*audited*), 2024 (*LRA Unaudited*), 2025 (APBA 2025) dan 2026 (Proyeksi BPKA)

Penurunan TKD akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, efisiensi anggaran ini akan terus berlanjut pada tahun 2026 dan berdampak secara signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah yang terus mengalami tren penurunan, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka kebijakan Pendapatan Aceh tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor terutama pajak daerah, retribusi daerah dan BLUD, serta dana perimbangan/TKD untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai berikut: (1) optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan; peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah; mengembangkan inovasi dalam pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan sistem informasi dan telematika dibidang pendapatan (2) meningkatkan dividen BUMD melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme manajemen serta penyertaan modal pemerintah daerah; (3) optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber PAD; (4) peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana perimbangan melalui insentif fiskal; (5) optimalisasi pengelolaan ziswaf melalui pembentukan baitulmal di gampong-gampong (6) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kementerian/Lembaga untuk optimalisasi alokasi dana perimbangan sesuai dengan kewenangan (*sharing budget/penyiapan RC*) dan (7) Melakukan koordinasi/komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk perpanjangan dana OTSUS.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh

Realisasi belanja Aceh tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 11.354.853.671.229. Realisasi belanja tersebut masih berada jauh dibawah belanja pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 15.773.078.722.045. Penurunan yang cukup signifikan tersebut terjadi pada semua belanja baik belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Penurunan tersebut sangat relevan mengingat pendapatan Aceh yang terus mengalami penurunan di tahun 2023, terutama pada sumber pendapatan transfer dana Otsus. Dampak dari penurunan dana Otsus, berimplikasi pada belanja bantuan keuangan berupa dana Otsus ke Kabupaten/ Kota sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh No.1 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus yang membagi peruntukan transfer Otsus ke Kabupaten/Kota sebesar 40 persen dan provinsi sebesar 60 persen.

Sementara itu Belanja Provinsi Aceh pada tahun 2026 diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 10.338.839.566.444, yang secara umum terdiri dari: a.) Belanja Operasi sejumlah Rp. 7.999.189.133.414; b.) Belanja Modal sejumlah Rp. 575.977.374.407; c.) Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 25.000.000.000; dan d.) Belanja Transfer sejumlah Rp. 1.738.673.058.623.

Belanja Operasi terdiri dari a.) Belanja Pegawai sejumlah Rp. 4.031.519.756.677; b.) Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 3.310.740.924.299; c.) Belanja Subsidi sejumlah Rp. 90.000.000; d.) belanja hibah Rp. 460.048.072.224; serta e.) Belanja Bantuan Sosial Rp. 196.790.380.214.

Belanja Transfer terdiri dari dua komponen, yaitu Belanja Bagi Hasil yang berjumlah Rp. 692.337.223.921 dan Belanja Bantuan Keuangan yang berjumlah Rp. 1.046.335.834.702 yang terdiri dari a.) TDBH sejumlah Rp. 27.778.401.700; b.) BOP MUKIM sejumlah Rp. 5.000.000.000; c.) Bantuan Keuangan Anggaran KIP Kab. Aceh Timur sejumlah Rp. 3.165.959.002; d.) Bantuan Keuangan Infrastruktur Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp. 10.000.000.000; e.) Bantuan Keuangan Infrastruktur Kab. Aceh Utara sejumlah Rp. 10.000.000.000; f.) Bantuan Keuangan Infrastruktur Kab. Aceh Timur sejumlah Rp. 10.000.000.000; g.) Bantuan Keuangan Infrastruktur Kota Lhokseumawe sejumlah Rp. 10.000.000.000; h.) Bantuan Keuangan Infrastruktur Kab. Aceh Barat sejumlah Rp. 10.000.000.000; i.) Bantuan Keuangan Infrastruktur Kota Banda Aceh dan i.) Bantuan Keuangan PORA Aceh Jaya sejumlah Rp. 80.000.000.000. Disamping itu, terdapat pula Belanja Transfer Lainnya sejumlah Rp. 870.391.474.000 yang dialokasikan untuk Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Untuk Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target belanja Aceh Tahun 2022 s.d 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3. 8
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2022-2026

U R A I A N	2022	2023	2024	APBA 2025	RKPA 2026
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
BELANJA	15.773.078.722.045	11.354.800.577.744	11.287.148.887.852	11.006.439.723.330	10.338.839.566.444
BELANJA OPERASI	9.853.395.736.247	7.920.985.964.478	8.209.331.872.526	8.194.353.477.358	7.999.189.133.414
Belanja Pegawai	2.672.636.562.975	2.777.232.840.075	3.371.730.786.947	3.680.706.217.572	4.031.519.756.677
Belanja Barang dan Jasa	5.961.654.335.730	4.023.048.182.624	3.726.959.739.159	3.877.196.438.703	3.310.740.924.299
Belanja Subsidi	13.225.283.500	18.244.902.500	6.386.180.000	4.764.000.000	90.000.000
Belanja Hibah	1.026.826.661.463	909.872.227.035	1.017.004.886.267	380.328.997.012	460.048.072.224
Belanja Bantuan Sosial	179.052.892.579	192.587.812.244	87.250.280.153	251.357.824.071	196.790.380.214
BELANJA MODAL	2.868.705.757.385	1.676.030.003.504	1.244.417.671.176	1.004.234.420.901	575.977.374.407
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.335.030.000	34.500.000	19.848.398	45.424.099.538	25.000.000.000
BELANJA TRANSFER	3.046.642.198.413	1.757.750.109.762	1.833.379.495.751	1.762.427.725.532	1.738.673.058.623
Belanja Bagi Hasil	764.976.522.259	892.314.580.120	881.118.949.469	657.454.350.940	692.337.223.921
Belanja Bantuan Keuangan	2.281.665.676.154	865.435.529.642	952.260.546.282	1.104.973.374.592	1.046.335.834.702

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 (Audited), 2023 (Audited), 2024 Unaudited), 2025 (SIPD RI) dan 2026 (SIPD RI)

Secara umum kebijakan belanja Aceh tahun 2026 diarahkan pada penguatan kualitas belanja melalui penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka mendukung visi, misi dan program prioritas RPJMA Tahun 2025-2029. Sejalan dengan tema RKPA tahun 2026 yaitu: **Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja**, maka kebijakan belanja tahun 2026 diarahkan antara lain:

1. Efisiensi belanja non prioritas (program penunjang urusan pemerintahan daerah) terutama belanja barang dan jasa tanpa mengurangi tingkat pelayanan publik;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung visi, misi dan program prioritas serta program hasil terbaik cepat (PHTC)/Quickwins kepala daerah terpilih;
3. Penguatan reformasi subsidi dan perlindungan sosial untuk lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Realisasi pembiayaan Aceh tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi pembiayaan Aceh tahun 2023 berjumlah sebesar Rp. 1.255.603.592.331, sedangkan pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp. 3.364.172.736.900. Penurunan pembiayaan tersebut dipengaruhi SilPa Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.304.607.179.450, atau sebesar 11,4 persen dari total belanja pada tahun 2023. Penerimaan pembiayaan Aceh dapat dilakukan melalui optimalisasi peran sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Aceh.

Pembiayaan Aceh tahun 2026 direncanakan sebesar negatif Rp. 1.143.514.345.604. Alokasi untuk pembentukan dana cadangan sebagai bagian pembentukan Dana Abadi Daerah yang sudah terbentuk sampai dengan 16 Juni 2025 sebesar Rp. 1.481.336.056.446,74 yang terdiri dari bilyet deposito sebesar Rp. 1.461.683.406.808 dan giro sebesar Rp. 19.652.649.638.74. Untuk melihat realisasi dan proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2022 s.d 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3. 9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2022-2026

U R A I A N	2022	2023	2024	APBA 2025	RKPA 2026
	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN	3.364.172.736.899	1.255.603.592.331	421.372.974.556	209.874.262.395	-1.143.514.345.604
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.934.600.250.977	1.305.536.023.919	474.004.949.183	261.874.262.395	313.048.957.789
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.933.596.612.390	1.304.607.179.450	473.295.918.242	261.874.262.395	97.000.000.000
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	150.000.000.000
Sisa Belanja Lainnya	-	-	-	-	66.048.957.789
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.003.638.587	928.844.469	709.030.941	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	570.427.514.078	49.932.431.588	52.631.974.627	52.000.000.000	1.456.563.303.393
Pembentukan Dana Cadangan	50.427.514.078	49.351.316.199	52.631.974.627	52.000.000.000	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	520.000.000.000	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	581.115.389	-	-	-
Pembentukan Dana Abadi Daerah					1.456.563.303.393

RSumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 (audited), 2023 (audited), 2024 (LRA Audited), 2025 (SIPD RI) dan 2026 (Proyeksi BPKA)

3.3. Dukungan Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

3.3.1 Alokasi dan Realisasi TJSLP/CSR Tahun 2024

TJSLP atau CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Organisasi atau perusahaan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat. Dana pengembangan masyarakat tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan. Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat dikelola sendiri oleh pelaku usaha. Selanjutnya, pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan TJSLP di Aceh, mengamanatkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP, sementara itu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya bukan di bidang dan/atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSLP.

Berdasarkan Tabel 3.10 diketahui realisasi Renja TJSLP/CSR tahun 2024 mencapai 98,74 persen atau Rp. 128.715.494.869 dari alokasi Renja sebesar Rp. 131.097.150.569. Secara rinci dapat diuraikan realisasi Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Terdapat 7 (tujuh) Badan Usaha yang status realisasinya berwarna biru (realisasi diatas 100 persen) yaitu:
 1. PT. Pelindo Cabang Malahayati (realisasi mencapai 100 persen);
 2. Perum. Bulog Kanwil Aceh (realisasi mencapai 100 persen);
 3. PT. MIFA Bersaudara (realisasi mencapai 100 persen);
 4. PT. Bank Aceh Syariah (realisasi mencapai 100 persen);
 5. PT. Pegadaian (Persero) Syariah (realisasi mencapai 100 persen);
 6. PT. PLN UID Aceh (realisasi mencapai 142,22 persen);
 7. PT. Bank Syariah Indonesia (realisasi mencapai 122,74 persen).
- b. Terdapat 5 (lima) Badan Usaha dengan status realisasinya berwarna hijau (realisasi antara 90 - 99 persen) yaitu:
 1. PT. Pertamina EP Rantau Field (realisasi mencapai 97,58 persen);
 2. PT. Medco EP Malaka (realisasi mencapai 98,53 persen);
 3. PT. Bara Energi Lestari (realisasi mencapai 99,34 persen);
 4. PT. Pupuk Iskandar Muda (realisasi mencapai 98,48 persen);
 5. PT. Solusi Bangun Andalas (realisasi mencapai 97,49 persen).
- c. Terdapat 1 (satu) Badan Usaha dengan status realisasinya berwarna kuning (realisasi antara 80 s.d 89 persen) yaitu:
 1. PT. Perkebunan Nusantara I Regional 6 (realisasi mencapai 84,27 persen).
- d. Terdapat 4 (empat) Badan Usaha dengan status realisasinya berwarna merah (realisasi dibawah 80 persen) yakni
 1. PT. Agrabudi Jasa Bersama (realisasi mencapai 53,24 persen);
 2. PT. Telkom Witel Aceh (realisasi 64,30 persen);
 3. PT. Pema Global Energi (realisasi 68,05);
 4. PT. Pembangunan Aceh (realisasi mencapai 29,79 persen).

Lebih jelas mengenai alokasi dan realisasi TJSLP/CSR Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3. 10
Anggaran dan Realisasi TJSPL/CSR Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Renja 2024	Realisasi 2024		Status Realisasi				KET
			Rp.	%	B	H	K	M	
	JUMLAH	130.355.912.169	128.715.494.869	98,74	7	5	1	4	
1	PT. Pelindo Cabang Malahayati	1.597.000.000	1.597.000.000	100,00	B				
2	Perum. Bulog Kanwil Aceh	140.415.000	140.415.000	100,00	B				
3	PT. Pertamina EP Rantau Field	1.893.945.000	1.893.120.000	99,96		H			
4	PT. MIFA Bersaudara	52.239.916.731	52.239.916.731	100,00	B				
5	PT. Medco E&P Malaka	6.347.690.000	6.254.089.150	98,53		H			
6	PT. Bank Aceh Syariah	10.755.038.064	10.755.038.064	100,00	B				
7	PT. PLN UID Aceh	2.254.868.216	3.206.861.228	142,22	B				
8	PT. Bara Energi Lestari	13.358.680.213	13.269.891.611	99,34		H			
9	PT. Pupuk Iskandar Muda	7.304.000.000	7.193.295.000	98,48		H			
10	PT. Perkebunan Nusantara I	1.200.000.000	1.011.233.000	84,27			K		
11	PT. Solusi Bangun Andalas	5.326.000.000	5.192.456.375	97,49		H			
12	PT. Agrabudi Jasa Bersama	350.000.000	186.353.900	53,24				M	
13	PT. Telkom Witel Aceh	303.993.200	195.452.460	64,30				M	
14	PT. Pema Global Energi	8.730.000.000	5.940.682.350	68,05				M	
15	PT. Pegadaian (Persero) Syariah	242.500.000	242.500.000	100,00	B				
16	PT. Bank Syariah Indonesia	15.000.000.000	18.410.500.000	122,74	B				
17	PT. Pembangunan Aceh	3.311.865.745	986.690.000	29,79				M	Laporan TW 2 2024

3.3.2. Program/Kegiatan CSR Tahun 2024

3.3.2.1. PT. Pelindo Cabang Malahayati

Realisasi CSR PT. Pelindo Branch Malahayati tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 1.597.000.000 yang terdiri dari 9 (sembilan) program/kegiatan yang meliputi sebagai berikut:

1. Pelindo Berbagi Ramadhan Pembagian Takjil Ramadhan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Maret 2024, dengan volume sebanyak 1200 paket dengan realisasi sebesar Rp. 42.000.000 dan berlokasi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
2. Pelindo Berbagi Ramadhan Santunan Kepada 100 Orang Anak Yatim yang dilaksanakan pada 26 Maret 2024, dengan paket sebanyak 200 dengan realisasi sebesar Rp. 60.000.000 dan berlokasi di Banda Aceh dan Lamreh Kabupaten Aceh Besar;
3. Pelindo Berbagi Ramadhan Santunan Pembagian Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024, sebanyak 600 volume dengan realisasi sebesar Rp. 90.000.000 dan berlokasi di Lamreh Kabupaten Aceh Besar;
4. Pelindo Berbagi Qurban Idul Adha yang dilaksanakan pada Juli 2024, sebanyak 2 (dua) volume dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000 dan berlokasi di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Lhokseumawe;
5. Bantuan Balai Pengajian dan Majelis Taklim di Aceh yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024, sebanyak 1 volume dengan realisasi sebesar Rp. 500.000.000 dan berlokasi di Kota Banda Aceh;
6. Bantuan Pengerasan Jalan Lingkungan Perkebunan (Oktober 2024) sebanyak 1(satu) volume dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000 dan berlokasi di Gampong Mereu Baro, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
7. Bantuan Jalan Usaha Tani yang dilaksanakan pada tanggal Oktober 2024, sebanyak 1 volume dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000 dan berlokasi di Gampong Lamsiot, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
8. Gapoktan Avocado Lambada (Oktober 2024) sebanyak 1 (satu) satuan dengan realisasi sebesar Rp. 265.000.000 dan berlokasi di Gampong Lamteuba, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 3.14.
Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Pelindo Cabang Malahayati
Tahun 2024

3.3.2.2. Perum Bulog Kanwil Aceh

Tahun 2024, realisasi TJS LP/CSR Perum Bulog Kanwil Aceh mencapai sebesar Rp. 140.415.000 atau sebesar 100 persen dari rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan BULOG Aksi Berbagi untuk meringankan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara melalui pemberian beras premium kemasan sebanyak 150 paket (masing-masing 5 kg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.275.000 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024;
2. Bantuan BULOG Aksi Berbagi Safari Ramadhan Tahun 2024 kepada tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.275.000 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 sebanyak 150 paket bantuan untuk kelompok masyarakat di Desa Siron;
3. Bantuan BULOG Aksi Berbagi pemberian komoditi pangan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara (beras premium kemasan 5 kg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.250.000 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dengan total 500 paket bantuan untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Bantuan BULOG Aksi Berbagi pemberian bantuan komoditi pangan kepada masyarakat fakir/miskin di Kab. Aceh Utara berupa beras premium kemasan 5 Kg dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 dengan total 200 paket bantuan untuk kelompok masyarakat di Kab. Aceh Utara;
5. Program BULOG Pendidikan Khusus Renovasi Sarana dan Prasarana PAUD TK - IKAL DOLOG Aceh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.615.000

yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024, terdapat 1 bantuan kepada PAUD TK-IKAL DOLOG ACEH di Lampineung.



Gambar 3.15.

Dokumentasi Pelaksanaan CSR Perum Bulog Kanwil Aceh Tahun 2024

3.3.2.3. PT. Pertamina EP Rantau Field

Realisasi anggaran TJSLP/CSR PT. Pertamina EP Field Rantau Persero Area pada Tahun 2024 berjumlah sebesar Rp. 1.893.120.000,- dengan 23 paket program/kegiatan. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, meliputi program migas center, pengembangan pendidikan inklusif, apresiasi ide kreatif keterampilan mahasiswa/pemuda dan program beasiswa dan pelatihan sertifikasi bagi mahasiswa;
2. Bidang Kesehatan, meliputi peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sosialisasi kesehatan dan perbaikan gizi balita dan ibu hamil sekitar wilayah operasi, peningkatan dan edukasi kesehatan masyarakat sekitar wilayah operasi, dukungan program pencegahan stunting/penyediaan MCK/sanitasi air bersih bersama TNI AD, peningkatan kualitas kesehatan penyandang difabel;
3. Bidang Ekonomi, meliputi program bersama sinergi stakeholders dukungan pengentasan kemiskinan dan stunting, lingkungan, pariwisata, dan kebencanaan (program bersama SKK Sumbagut), program UMKM galeri ajang ambe (pengembangan unit usaha koperasi), program UMKM kelompok aren (pengembangan pemasaran online), program UMKM posyandu kenari/rumah gizi gampong (pengembangan unit usaha baru), program bengkel difabel (pengembangan unit usaha), program UMKM

inklusi (pengembangan unit usaha), pengembangan kapasitas UMKM atau local business development (program bersama SKK Migas SUMBAGUT);

4. Bidang infrastruktur, meliputi partisipasi peningkatan fasilitas infrastruktur di sekitar wilayah operasi PEP Rantau;
5. Bidang lingkungan, meliputi penghijauan di wilayah operasi, inisiasi desa konservasi mangrove, penanaman pohon bersama SKK Migas;
6. Bidang Kebencanaan, meliputi bantuan bencana alam;
7. Bidang Studi, meliputi pemetaan sosial, SROI (rumah gizi gampong) di wilayah operasional, pendampingan program studi indeks kepuasan masyarakat dan dukungan penyusunan grand design dan roadmap PPM Hulu Migas.



Gambar 3.16.

Dokumentasi Pelaksanaan CSR PT. Pertamina EP Rantau Filed Tahun 2024

3.3.2.4. PT. Mifa Bersaudara

Realisasi CSR PT. Mifa Bersaudara tahun 2024 berjumlah sebesar Rp. 52.239.916.731 atau sebesar 100 persen dari alokasi rencana kerja tahun 2024. Untuk realisasi anggaran per pilar CSR dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3. 11
Rekapitulasi Capaian CSR PT Mifa Bersaudara Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan/Proyek	Pagu 2024	Total			
			Progress (YTD Triwulan III)	Realisasi (YTD Triwulan III)	Realisasi + Progress (YTD Triwulan III)	Fisik (%) YTD Triwulan III
I	Pendidikan	5.053.000.000	1.123.206.152	2.315.829.947	3.439.036.099	68,59%
II	Kesehatan	12.660.000.000	12.209.278.000	631.321.650	12.840.599.650	101,43%
III	Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan	4.270.000.000	1.453.593.895	1.015.625.144	2.469.219.039	58,75%
IV	Kemandirian Ekonomi	2.589.300.000	552.686.835	1.321.632.840	1.874.319.675	72,39%
V	Sosial Budaya	9.615.000.000	1.334.036.172	9.450.346.400	10.784.382.571	112,15%
VI	Partisipasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1.372.000.000	1.085.451.550	794.013.420	1.879.464.970	136,99%
VII	Pembentukan kelembagaan Komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM	9.184.376.963	2.950.145.125	8.856.745.658	11.806.890.783	127,84%
VIII	Pembangunan Infrastruktur yang menunjang PPM	7.496.239.768	6.648.530.191	497.473.754	7.146.003.945	95,33%
GRAND TOTAL		52.239.916.731	27.356.927.919	24.882.988.812	52.239.916.731	100%

Secara rinci, realisasi CSR PT. Mifa Bersaudara per pilar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pilar Pendidikan,

Realisasi CSR pada pilar pendidikan mencapai sebesar 68,59 persen atau sebesar Rp. 3.439.036.099 dari pagu awal sebesar Rp. 5.053.000.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

- Beasiswa, realisasi anggaran mencapai Rp. 1.882.810.750 atau sebesar Rp. 113,01 persen dari pagu awal sebesar Rp. 1.666.000.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- ✚ Program beasiswa S1 sekaligus program orientasi penerima beasiswa;
- ✚ Program beasiswa S2;
- ✚ Program beasiswa (SD, SMP/MTs, SMA/SMK Santri Berprestasi, wilayah opsional sekaligus program orientasi penerima beasiswa;
- ✚ Program MIFA Scholarships SUKMA;
- ✚ Beasiswa jurusan Nautia-Sekolah Tinggi Pelayaran.

- Pendidikan, pelatihan, keterampilan dan keahlian dasar, realisasi anggaran sebesar Rp. 580.989.767 atau sebesar 40,57 persen dari pagu awal Rp. 1.432.000.000. Kegiatan meliputi sebagai berikut:

- ✚ Program sarjana magang;
 - ✚ Kampus merdeka;
 - ✚ Pelatihan dan on the job training (seperti welding, barber, servis motor dll).
- c. Bantuan tenaga pendidikan, dengan kegiatan bantuan santunan tenaga pendidik keagamaan dan honorarium dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.560.000.
- d. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pengadaan sarana/prasarana pendidikan untuk SD/SMP/SLTA dan Perguruan Tinggi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 367.361.596 atau sebesar 28,04 persen dari pagu awal sebesar Rp. 1.310.000.000. Selain itu untuk kegiatan bantuan sarana dan/atau prasarana dayah/pesantren realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 423.059.385 atau sebesar 84,61 persen dari pagu awal sebesar Rp. 500.000.000.
- e. Pelatihan dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan MIFA mengajar, mifa goes to campus dan Latihan kepemimpinan dan orientasi industry tambang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.105.350 atau sebesar 6,28 persen dari pagu awal sebesar Rp. 145.000.000.

2. Pilar Kesehatan,

Secara keseluruhan realisasi CSR pada pilar kesehatan mencapai 101,43 persen atau sebesar Rp. 12.840.599.650 dari pagu awal sebesar Rp. 12.660.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kesehatan masyarakat sekitar tambang, realisasi anggaran sebesar Rp. 648.912.750 atau sebesar 185,40 persen dari pagu awal sebesar Rp. 350.000.000, melalui kegiatan sebagai berikut:
 - ✚ Program kesehatan keliling wilayah operasional Perusahaan (KESLING)
 - ✚ Studi Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) Stunting dan Sosialisasi
- b. Sarana dan/atau prasarana kesehatan, realisasi anggaran sebesar Rp. 12.191.686.900 atau sebesar 99,04 persen dari pagu awal sebesar Rp. 12.310.000.000, dengan kegiatan yang mencakup:
 - ✚ Bantuan prasarana/sarana untuk posyandu/fasilitas kesehatan di wilayah operasional perusahaan;
 - ✚ Mifa klinik.

3. Pilar Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan

Realisasi CSR pada pilar tingkat pendapatan riil atau pekerjaan mencapai sebesar Rp. 2.508.453.039 atau sebesar 58,75 persen dari pagu awal sebesar Rp. 4.270.000.000, dengan program sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.425.176.539 atau sebesar 67,37 persen dari pagu awal sebesar Rp. 3.600.000.000, dengan kegiatan yang meliputi

- ✚ One Village One Fruit (OVOF);
 - ✚ One Village One Product (OVOP) untuk 26 gampong di Kec. Meureubo
 - ✚ Kemiskinan ekstrim bagi keluarga miskin dan stunting;
 - ✚ Pemberdayaan ekonomi nelayan pesisir meureubo;
 - ✚ Pengobatan ternak program OVOP;
 - ✚ Pengembangan ekonomi di 11 kecamatan di Kab. Aceh Barat.
- b. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.276.500 atau sebesar 12,43 persen dari pagu awal sebesar Rp. 670.000.000. Kegiatan mencakup sebagai berikut:
- ✚ Monitoring dan evaluasi program PPM;
 - ✚ Bantuan subsidi pupuk untuk petani di lingkaran operasional;
 - ✚ Bantuan pompa dan sumur bor.

4. Pilar Kemandirian Ekonomi,

Realisasi CSR pada pilar kemandirian ekonomi Pagu Awal sebesar Rp. 2.589.300.000 dan realisasi pada pilar ini sebesar Rp. 1.874.319.675. Adapun beberapa program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan usaha mikro melalui kegiatan program lanjutan pembinaan pupuk organik. Realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 61.531.000 atau sebesar 184,78 persen dari pagu awal sebesar Rp. 33.300.000.
- b. Pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang melalui kegiatan operasi pasar murah, program pembinaan usaha mikro/UMKM/modal kerja/usaha, pengembangan kios UMKM kawasan usaha terpadu (MIFA Mart). Realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 88,26 persen atau sebesar Rp. 1.059.066.343 dari pagu awal sebesar Rp. 1.200.000.000.
- c. Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dengan pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya. Realisasi anggaran pada program ini mencapai 55,58 persen atau sebesar Rp. 753.722.332 dari pagu awal sebesar Rp. 1.356.000.000 dengan kegiatan yang meliputi:
 - ✚ Mifa Cut Nyak Dhien Business Center (CBC)
 - ✚ Mifa Integrated Livestock in Reclaimed Area (ILRA).
 - ✚ Honor outsourcing CBC, OVOP, dan ILRA.

5. Pilar Sosial Budaya

Realisasi anggaran CSR pada pilar sosial budaya mencapai 112,15 persen atau sebesar Rp. 10.783.601.539 dari pagu awal sebesar Rp. 9.615.000.000 dengan program sebagai berikut:

- a. Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.945.069.295 atau

sebesar 83,24 persen dari pagu awal sebesar Rp. 3.538.000.000 dengan kegiatan yang meliputi sebagai berikut:

- ✚ Bantuan masjid gampong di wilayah operasional;
- ✚ Pengecatan Masjid Agung Baitul Makmur;
- ✚ Pembinaan Tengku gampong lingkaran operasional;
- ✚ Program mimbar jumaat;
- ✚ Program umroh bersama.

b. Bantuan bencana alam, dengan pagu awal sebesar Rp. 500.000.0000 terealisasi sebesar Rp. 3.547.546.763 atau sebesar 709,51 persen. Adapun kegiatannya meliputi sebagai berikut:

- ✚ Bantuan taktis bencana alam;
- ✚ Bantuan suka cita dan kemalangan;

c. Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat, realiasi mencapai sebesar Rp. 4.290.985.482 atau sebesar 76,94 persen dari pagu awal sebesar Rp. 5.577.000.000. Adapun kegiatan utamanya meliputi sebagai berikut:

- ✚ Kenduri meugang Ramadhan;
- ✚ Program safari Ramadhan dan buka puasa bersama;
- ✚ Program idul fitri dan santunan anak yatim;
- ✚ Program Idul Adha;
- ✚ Bantuan maulid;
- ✚ Kesenian dan budaya Aceh Barat;
- ✚ Kenduri laot;
- ✚ Program community dan stakeholder engagement;
- ✚ Monument punga, penataan taman hijriah, pembangunan tiang lampu panel surya, pembangunan tugu manggih meuggantung) petilasan perjuangan Teuku Umar);
- ✚ Anniversary PT. Mifa Bersama Masyarakat dan Stakeholders;
- ✚ Bantuan peringatan Tsunami Aceh ke 20.

6. Pilar Partisipasi Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Pada pilar ini dari pagu awal sebesar Rp. 1.372.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 1.879.464.970 atau sebesar 136,99 persen dengan program yaitu:

- a. Program penanggulangan bencana, realiasi anggaran pada program ini mencapai sebesar 6,74 persen atau sebesar Rp. 10.113.210 dari pagu awal sebesar Rp. 150.000.000.
- b. Program bina lingkungan alam, realisasi mencapai sebesar 136,65 persen atau sebesar Rp. 849.353.910 dari pagu awal sebesar Rp. 622.000.000, dengan kegiatan meliputi Mifa green/program mifa bersih gampong dan program penghijauan dan revegetasi lahan kritis.

- c. Program konservasi lingkungan, realisasi mencapai sebesar 170 persen atau sebesar Rp. 1.019.997.850 dari pagu awal sebesar Rp. 600.000.000. Adapun kegiatannya meliputi: konservasi terumbu karang, konservasi gajah, konservasi penyu dan revitalisasi lingkungan sekitar port dan mine.

7. Pilar Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM

Realisasi pada pilar ini mencapai 127,84 persen atau sebesar Rp. 11.741.587.065 dari pagu awal sebesar Rp. 9.184.376.963 terdapat beberapa program yang dilaksanakan adalah dari pilar ini yaitu:

- ✚ Bantuan kepada pihak ketiga berbasis proposal;
- ✚ Kerjasama dengan stakeholder khusus;
- ✚ Dokumentasi dan publikasi CSR;
- ✚ Peningkatan Capacity Building Pelaksana PPM berupa pelatihan softskill Kepada fasilitator
- ✚ Penghargaan atau award kinerja dan koordinasi CSR
- ✚ Konsultan Sosial Budaya Lokal
- ✚ Bantuan kepada pihak ke tiga berbasis proposal
- ✚ Fasilitator Sosial Infrastruktur & Pengembangan Ekonomi
- ✚ Studi indek kepuasan masyarakat, studi need assessment, sosial mapping, rencana induk penyusunan PPM, road map CSR dan ESG;
- ✚ Pelatihan jurnalistik;
- ✚ Lokakarya penyusunan program PPM & FGD;
- ✚ Pembinaan Olahraga/Atlet Berprestasi;

8. Pilar Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang PPM

Realisasi anggaran pada pilar ini mencapai 95,33 persen atau sebesar Rp. 7.146.003.945 dari pagu awal sebesar Rp. 7.496.239.768, terdapat beberapa program yang dilaksanakan adalah dari pilar ini yaitu:

- ✚ Program pembangunan rumah layak huni;
- ✚ Program mifa mini islamic center (MMIC);
- ✚ Service sarana prasarana desa penunjang PPM.



Gambar 3.17.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Mifa Bersaudara Tahun 2024

3.3.2.5. PT. Medco E & P Malaka

Program TJSLP/CSR PT. Medco E&P Malaka sesuai dengan renja 2024 adalah sebesar Rp. 6.347.690.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 6.254.089.150 , atau sebesar 98,53 persen, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Bidang Pendidikan, terdapat 4 (empat) program yang meliputi sebagai berikut:

- ✚ Pendampingan SMKN Menjadi sekolah Unggulan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 atau sebesar 100 persen dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000;
 - ✚ Dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.496.150 atau sebesar 139% dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Blang Nisam, Desa Alue ie Mirah, Desa Jam, Desa Jambo Kec. Indra Makmu, Desa Alue Siwah serdang Kec. Nurussalam dan Kec. Julok;
 - ✚ Bantuan biaya pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.320.250.000 atau sebesar 105% dari alokasi sebesar Rp. 305.085.000.
 - ✚ Peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat melalui program rumah pemberdayaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 815.731.000 atau sebesar 79% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.030.770.000. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Blang Nisam Kec. Indra Makmu dan Desa Landang Baro Kec. Julok Kabupaten Aceh Timur;
- b) Bidang Kesehatan, dengan program sebagai berikut:
- ✚ Pelayanan kesehatan dan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil, bayi, balita dan manula yang berada di sekitar lokasi perusahaan dengan realisasi anggaran sebesar 99% persen atau sebesar Rp. 333.624.500 dari alokasi sebesar Rp. 337.245.000;
 - ✚ Penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar lokasi pengembangan gas terkait penjegahan stunting, NAPZA, dan TBC dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.4093.000 atau sebesar 147% dari pagu sebesar Rp. 91.530.000;
- c) Bidang Infrastruktur, dengan program sebagai berikut:
- ✚ Perbaikan infrastruktur fasilitas umum masyarakat sekitar lokasi proyek dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 877.855.500 atau sebesar 123% dari pagu sebesar Rp. 711.855.000;
 - ✚ Perbaikan jalan desa dan kecamatan sekitar wilayah operasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.827.348.750 atau sebesar 111% dari pagu sebesar Rp. 2.542.380.000;
 - ✚ Bantuan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera di sekitar wilayah operasi dengan realisasi sebesar Rp. 749.640.000 atau sebesar 150% dari pagu sebesar Rp. 500.000.000;
 - ✚ Program Monumental dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000 dari pagu sebesar Rp.100.000.000.
- d) Bidang lingkungan, dengan program sebagai berikut:
- ✚ Bantuan pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 147.465.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.700.000 atau 24 persen.
- e) Bidang Ekonomi, dengan program sebagai berikut :

- ✚ Pelatihan Kewirausahaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.950.000 atau sebesar 5% dari pagu sebesar Rp.381.360.000.



Gambar 3.18.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Medco E & P Malaka Tahun 2024

3.3.2.6. PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah telah merealisasikan CSR Tahun 2024 sebesar Rp. 10.755.038.064 yang terdiri dari dua program utama yaitu :

1. Program Bina Lingkungan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.407.799.799. Sasaran dari program ini adalah kelompok sosial masyarakat dan mitra kerja yang berada dalam lingkungan interaksi wilayah kerja Bank (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan masyarakat dan mitra kerja di wilayah lainnya dalam rangka pemerataan dan perluasan peran partisipasi Bank terhadap berbagai dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Program bina lingkungan ini terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Bantuan sosial (60 paket), melalui penyediaan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana umum, bahan pokok makanan pasar murah, penanggulangan korban musibah /bencana alam. Pembangunan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, kegiatan penataan dan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan partisipasi program perumahan layak hui masyarakat kurang mampu/fakir

- miskin/dhuafa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.393.631.500,- yang berlokasi di kabupaten/kota se Aceh yang dilaksanakan pada bulan 01 Januari-31 Desember 2024.
- b. Bantuan Pendidikan, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata Daerah (15 paket). Program ini berupa biaya pendidikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa, penyediaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah/kegiatan belajar mengajar, partisipasi mendukung kegiatan akademisi pelajar, mahasiswa dan organisasi lainnya dan mendukung kegiatan pembinaan olahraga dan seni budaya serta pariwisata di daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.967.568.299,- yang berlokasi di kabupaten/kota se Aceh dan dilaksanakan dari bulan 01 Januari-31 Desember 2024.
 - c. Bantuan Kesehatan (5 paket), melalui pengobatan massal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar, partisipasi mendukung kegiatan akademisi pelajar, mahasiswa dan organisasi lainnya dan mendukung kegiatan pembinaan olahraga dan seni budaya serta pariwisata di daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.600.000,- yang berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan waktu pelaksanaan antara bulan 01 Januari-31 Desember 2024.
 - d. Bantuan Yayasan (10 paket) melalui kegiatan Yayasan Kesejahteraan karyawan bank, koperasi karyawan bank, sosial dalam rangka HUT Bank dan peringatan hari besar Islam, santunan kepada para pensiunan pegawai Bank Aceh dan beasiswa khusus anak yatim piatu/tidak mampu dari pensiunan pegawai Bank dengan realisasi anggaran sebesar Rp 866.000.000 yang berlokasi di kabupaten/kota se Aceh dan dilaksanakan pada bulan 01 Januari-31 Desember 2024.
2. Program Kemitraan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.252.500.000 yang terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Bantuan Hibah (7 paket), melalui pemberian akses modal atau barang dan/atau investasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas usaha masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp, 1.197.500.000,- dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024.
 - b. Bantuan Binaan (3 paket), melalui bantuan diberikan dalam bentuk workshop, pelatihan kewirausahaan, pengkajian/penelitian, pemangangan, monitoring serta pendampingan kegiatan sosialisasi dan promosi dalam rangka pemberdayaan peningkatan dan peningkatan kapasitas entrepreneurship dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024.



Gambar 3.19.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2024

3.3.2.7. PT. PLN UID Aceh

PT. PLN UID Aceh pada tahun 2024 telah merealisasikan anggaran TJSPL/CSR sebesar Rp. 3.206.861.228, melebihi dari yang direncanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan PT. PLN UID Aceh berjumlah 16 (enam belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembangan usaha makanan kelompok bangkit bersama yang berlokasi di Kabupaten Pidie Jaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.600.000, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas usaha kelompok makanan, sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas dan juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya;
- b. Pengembangan usaha kelompok sobotik, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, kegiatan ini berfokus pada pengembangan usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok sobotik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.100.000;
- c. Pengembangan kelompok tani rudal arhanud, yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.240.000. Bantuan ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani melalui pelatihan serta pengadaan alat pertanian;
- d. Sertifikasi digital marketing untuk guru pesantren hudawanur, yang berlokasi di Kota Langsa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 369.163.000. Program ini dilaksanakan untuk membekali para guru pesantren, dengan keterampilan digital Marketing;
- e. Pengembangan usaha kelompok UMKM Ratu Ikan, yang berlokasi di Kota Langsa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 160.350.000. Dana ini di alokasikan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan produksi, pemasaran dan daya saing di pasar yang lebih luas;

- f. Pengembangan usaha kelompok petani garam, yang berlokasi di Kabupaten Pidie dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.000.000. Kegiatan ini membantu petani garam dalam meningkatkan produksi dan kualitas garam;
- g. Operasional rumah BUMN Aceh Utara, yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.318.328;
- h. Pengembangan laboratorium multimedia Prodi Ilmu Komunikasi yang beralokasi di Kota Banda Aceh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.619.900. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di bidang multimedia dan komunikasi;
- i. Desa berdaya dan wisata yang berlokasi di Kota Sabang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000, dimana program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan desa agar lebih mandiri dan meningkatkan daya tarik wisata;
- j. Social Mapping, IKM & SROI Tahun 2024, yang berlokasi di Kota Banda Aceh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.000.000, dan bertujuan untuk memetakan potensi sosial dan industri kecil menengah (IKM) guna pengembangan yang lebih terarah;
- k. Pelatihan UMKM 5 titik lokasi, Pemuda Langsa Bersatu yang berlokasi di langsa, dengan anggaran Realisasi sebesar Rp. 500.000.000, dana ini digunakan untuk biaya pelatihan, materi, dan dukungan modal awal bagi peserta pelatihan;
- l. Bantuan kegiatan partisipasi dalam INACRAFT 2024-RB Aceh Utara yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.120.000. Bantuan ini meliputi biaya pendaftaran, promosi produk, serta transportasi dan akomodasi bagi peserta dari Aceh;
- m. Kegiatan bazar UMKM binaan rumah BUMN PLN di Bandara SIM, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.400.00;
- n. Employee Green Involvement tahun 2024, yang berlokasi di Kota Banda Aceh dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000. Program ini merupakan kegiatan lingkungan yang melibatkan karyawan perusahaan dalam aksi penghijauan;
- o. Event karya nyata festival 7.0 di Aceh, yang berlokasi di Kota Banda Aceh, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000. Dana ini digunakan untuk persiapan acara, penyewaan tempat, promosi, serta biaya operasi lainnya;

- p. Bazar KNF Rumah BUMN di kota Banda Aceh, program ini bertujuan untuk memperkenalkan produk dari berbagai UMKM binaan rumah BUMN yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.950.000.



Gambar 3.20.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. PLN UID Aceh Tahun 2024

3.3.2.8. PT. Bara Energi Lestari

Realisasi anggaran CSR PT. Bara Energi Lestari tahun 2024 mencapai sebesar 99,34 persen atau sebesar Rp. 13.269.891.611 dari pagu awal sebesar Rp. 13.358.680.213. Program/kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2024 dikelompokkan menjadi beberapa pilar yaitu:

1. Pilar Pendidikan,

Realisasi anggaran pada pilar ini mencapai sebesar Rp. 1.293.925.931 atau sebesar 98,77 persen dari pagu awal sebesar Rp. 1.310.000.000. Adapun beberapa program yang dilaksanakan pada pilar ini meliputi sebagai berikut:

- 📌 Program beasiswa untuk mahasiswa s1 yang meliputi beasiswa PT. Bara Energi Lestari bekerjasama dengan yayasan sukma bangsa;
- 📌 Penguatan kader PPM gampong;
- 📌 Sponsorship kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa UIN Ar Raniry;
- 📌 Sponsorship kegiatan summer school Universitas Syiah Kuala (USK);
- 📌 Sponsorship kegiatan industrial science, art, and talent (I-sat) ke-XIII Universitas Syiah Kuala (USK);

- ✚ Sponsorship kegiatan mining aggression XI HMTP USK;
- ✚ Pembinaan tenaga pendidik/guru TK/PAUD;
- ✚ Program pengadaan alat permainan edukatif untuk TK Aisyiah Bustanul Athfal Gampong Latong;
- ✚ Program dukungan alat permainan edukatif untuk PAUD Aneuk Nanggroe Gampong Krueng Ceuko;
- ✚ Penyediaan paket konsumsi untuk kegiatan registrasi online peserta pelatihan bersama BPVP Banda Aceh dan FKPLI Aceh;
- ✚ Program pengadaan 2 unit AC pendingin ruangan balai latihan kerja Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Program bina desa dalam mewujudkan prestasi pendidikan di Balee Carong Gampong Alue Buloh;
- ✚ Rehabilitasi ruang kelas sekolah madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Kab. Nagan Raya;
- ✚ Sponsorship kegiatan seminar internasional 20 tahun tsunami dan perdamaian Aceh;
- ✚ Pemasangan paving block di Balee Carong Alue Gampong Alue Buloh;
- ✚ Bantuan sarana penunjang kebutuhan operasional madrasah aliyah swasta kuala Kab. Nagan Raya;
- ✚ Program pengadaan peralatan untuk pengembangan sanggar seni makmue beusare Kab. Nagan Raya;
- ✚ Sponsorship kegiatan launching UMD corner oleh UIN Ar Raniry dan Pemerintah Aceh;

2. Pilar Kesehatan

Realisasi anggaran pada pilar kesehatan tahun 2024 mencapai Rp. 381.618.500 atau sebesar 71,33 persen dari pagu awal sebesar Rp. 535.000.000. Adapun program yang dilaksanakan pada pilar ini meliputi sebagai berikut:

- ✚ Lanjutan program SIGASEH-BEL;
- ✚ Program sponsorship kegiatan BKKBN Aceh: Intervensi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting;
- ✚ Program dukungan alat bantu disabilitas di Kabupaten Nagan Raya;

3. Pilar Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan

Realisasi anggaran pada pilar ini mencapai sebesar Rp. 1.956.577.225 atau sebesar 79,08 persen dari pagu awal sebesar Rp. 2.474.150.014. Program yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- ✚ Program pembangunan untuk kalangan dhuafa di gampong area operasional sebanyak 9 unit.

4. Pilar Kemandirian Ekonomi

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2024, pagu awal pada pilar ini berjumlah sebesar Rp. 1.035.000.000, dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 2.071.555.690 atau sebesar 200,15 persen. Adapun program yang dilaksanakan pada pilar ini meliputi sebagai berikut:

- ✚ Program pembuatan kolam untuk kelompok budidaya ikan air tawar di Gampong lhok Padang;
- ✚ Program dukungan pengembangan usaha nursery kelompok tani hudep beusare gampong krueng ceuko;
- ✚ Program peremajaan dan pengembangan usaha kecil keluarga di Gampong Paya Udeng;
- ✚ Program dukungan material untuk renovasi tempat usaha masyarakat di Gampong Blang Murong;
- ✚ Program Bina Usaha Menjahit Kelompok Tuah Jaroe Kamoe Gampong Kuta Aceh;
- ✚ Program Pengadaan Bibit Ikan Untuk Empang Sumber Batu;
- ✚ Program Pengembangan Usaha Kecil Keluarga Di Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Pengadaan Hand Tractor Untuk Kelompok Tani Barona Gampong Krueng Ceuko;
- ✚ Program Pengembangan Usaha Ternak Ayam Kampung Di Gampong Kuta Aceh;
- ✚ Program Bina Kelompok Usaha Pisang Salee Gurih Sejahtera Gampong Alue Buloh;
- ✚ Partisipasi pada kegiatan pembagian sembako kepada fakir miskin di Kabupaten Nagan Raya 2024;
- ✚ Program Pelatihan Menjahit Dan Membuat Kue Bekerjasama Dengan BPVP Banda Aceh;
- ✚ Mobilisasi Material Keramba Jaring Apung Dari Office Bel Ke Gampong Alue Buloh (Pit I BEL);
- ✚ Pengamanan Alat Perlengkapan Pelatihan Di Gampong Kuta Aceh Dan Paya Udeung;
- ✚ Perawatan Jalan Untuk Pembinaan Usaha Yang Menunjang Pemasukan Gampong Krueng Ceuko;
- ✚ Program Bina Usaha Ternak Kambing Di Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Program Pengembangan Usaha Kue Rumahan Di Gampong Kuta Aceh;
- ✚ Program Pengadaan Sarana Penunjang Budidaya Ikan Di Keramba Apung Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Bina Usaha Kelontong Di Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Program Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Di Gampong Seumambek Dan Alue Buloh;

- ✚ Program Pemberdayaan Kelompok Pekebun Hudep Meurata Gampong Seumambek;
- ✚ Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Program Pengadaan Hand Traktor Untuk Pembinaan Kelompok Tani Bintang Jaya;
- ✚ Program Bina Usaha Kelontong di Gampong Mon Bateung;
- ✚ Program Pengadaan Mesin Usaha untuk Pengembangan Kelompok UMKM Halalan;
- ✚ Program Bina Usaha Cetak Paving Block dan Batako Di Ujong Fatihah;
- ✚ Program Bina Ekonomi Keluarga Kurang Mampu Melalui Pengadaan Becak Motor Penumpang;
- ✚ Program Pengembangan Usaha Jasa Pertukangan di Gampong Pulo le;
- ✚ Program Bina Usaha Kelontong di Gampong Lhok Mesjid;
- ✚ Program Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pengadaan Benih Padi Berkualitas;
- ✚ Program Pengembangan Bumg le Beudoh Melalui Pengadaan Mesin AMDK Gelas,
- ✚ Program Bina Usaha Kelontong di Gampong Blang Sapek;
- ✚ Program Bina Usaha Pisang Salee Ata Droe Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Bina Usaha Produksi Kue Basah di Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Pengembangan UMKM Bungong Sitangke Gampong Simpang Peut.

5. Pilar Sosial Budaya

Realisasi anggaran CSR pada pilar ini mencapai sebesar Rp. 2.470.840.223 atau sebesar 182,09 persen dari pagu awal yang berjumlah sebesar Rp. 1.356.926.135. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada pilar ini adalah sebagai berikut:

- ✚ Program meugang ramadhan;
- ✚ Program ramadhan mubarak;
- ✚ Santunan anak yatim menyambut idul fitri dan paket lebaran;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Ceramah Dan MTQ di Gampong Sumber Batu;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Dakwah Akhbar Karang Taruna Gampong Suak Bilie;
- ✚ Program dukungan kegiatan olahraga bola voli Alma VC Gampong Alue le Mameh;
- ✚ Pengadaan AC, speaker dan karpet sholat untuk Mesjid Seumambek;
- ✚ Program pengadaan paket daging meugang untuk stakeholder (Sat Brimob Batalyon C Pelopor);
- ✚ Program Safari Ramadhan 1445 H Di Balee Carong Gampong Alue Buloh;

- ✚ Dukungan untuk Remaja Mesjid Gampong Suak Bilie Pada Kegiatan Tadarus Ramadhan 1445 H-2024 M;
- ✚ Pengadaan Baju dan Sarung untuk Remaja Mesjid Gampong Sumber Batu;
- ✚ Support Acara Rateb Siribee (MPTT) di Gampong Kuta Aceh;
- ✚ Partisipasi Pada Kegiatan GTTG Aceh Ke XXV Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Dukungan pada Kegiatan Tasyakuran Tahfizh Al-Qur'an ke 4 SDIT Cut Nyak Dhien Nagan Raya;
- ✚ Program Qurban Hari Raya Idul Adha 1445H-2024 M;
- ✚ Program Dukungan Peralatan Latihan Untuk IPSI Kab. Nagan Raya;
- ✚ Program Dukungan Semarak HUT RI Ke-79 Di Kecamatan Seunagan;
- ✚ Sponsorship Kegiatan Turnamen Futsal Family Himadistra Cup I 2024;
- ✚ Program Penyediaan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1445H 2024 M untuk stakeholder;
- ✚ Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Dalam Rangka Semarak HUT RI Ke-79 di Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Program Penyediaan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1445H 2024 M Untuk Ketua MPU Aceh;
- ✚ Program Pengadaan Mukenah, Sarung, Al-Qur'an, Dan Sajadah Untuk Kelompok Majelis Taklim Di Nagan Raya;
- ✚ Program Penyediaan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1445 H 2024 M Untuk Pj. Bupati Nagan Raya;
- ✚ Program Penyediaan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1445 H 2024 M Untuk Stakeholder Khusus PT. BEL;
- ✚ Program Santunan Anak Yatim Dan Pembagian Sembako Pada Milad BEL Ke-19 di Dayah Daarul 'Uluum Al-Mukarramah Babah Krueng.

6. Pilar Partisipasi Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Realisasi anggaran CSR pada pilar ini mencapai sebesar Rp. 1.234.891.625 atau sebesar 182,95 persen dari pagu awal sebesar Rp. 675.000.000. Program yang dilaksanakan pada pilar ini meliputi sebagai berikut:

- ✚ Program Percontohan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Area Kantor Camat Seunagan;
- ✚ Program Jumat Bersih Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M;
- ✚ Sponsorship Kegiatan Peringatan Hari Bumi 22 April 2024 (HMTG "Pangea" UPN "Veteran" Yogyakarta);
- ✚ Dukungan Pada Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) Tahun 2024;
- ✚ Program Pemindahan Aliran Sungai Krueng Nagan Area Kemukiman Paya Udeung;

- ✚ Program Pengadaan 1 Unit Kontainer Sampah Di Kecamatan Seunagan;
- ✚ Program Pertanaman Lahan Sawah Di Lokasi BBU Pulo le;
- ✚ Program Pembuatan Green House Untuk Pemanfaatan Pekarangan;
- ✚ Normalisasi Drainase/Saluran Irigasi Persawahan Masyarakat Di Kecamatan Suka Makmue;
- ✚ Pemasangan Spanduk Seruan Cegah Karhutla Dan Judi Online;
- ✚ Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan Masyarakat Di Kecamatan Suka Makmue (Area Cot Kuta-Suak Bilie);
- ✚ Program Pengelolaan Sampah Di TPA Gampong Babah Dua Tadu Raya;
- ✚ Program Merawat Kebersihan Lingkungan Melalui Pengadaan Wadah Sampah;
- ✚ Program Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan Di Area Kecamatan Seunagan;
- ✚ Biaya Clearing Dan Penebangan Pohon Di Demplot Seumambek;
- ✚ Program Menanam Pohon Dalam Rangka Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia 2024;
- ✚ Rehabilitasi Pagar Dan Gorong-Gorong Demplot Seumambek;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Tahiroe Aceh Tahun 2024.

7. Pilar Pembentukan kelembagaan Komunitas Masyarakat dalam Menunjang Kemandirian PPM

Realisasi anggaran CSR pada pilar ini berjumlah sebesar Rp. 1.423.284.817 atau sebesar 102,76 persen dari pagu awal sebesar Rp. 1.385.000.000. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada pilar ini meliputi sebagai berikut:

- ✚ Program Pembangunan Jamban Sehat Di Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Pembangunan Jamban Sehat Di Gampong Seumambek;
- ✚ Program Pembangunan Jamban Sehat Di Gampong Krueng Ceuko;
- ✚ Program Pembangunan Jamban Sehat Di Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Program kerjasama dengan konsultan perencana konstruksi dan pembuatan maket BEL Ville;
- ✚ Seremonial Serah Terima Alat Bantu Disabilitas Bersama Pj Bupati Nagan Raya;
- ✚ Dukungan Untuk PWI Nagan Raya Mengikuti Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024;
- ✚ Koordinasi Dengan Stakeholder (Periode Februari 2024);
- ✚ Pengadaan 1 Unit Speaker Untuk Kegiatan Pertemuan Mingguan Stake Holders ER & CSR;
- ✚ Sponsorship Semarak Ramadhan Kodam Iskandar Muda 1445 H - 2024 M;
- ✚ Sponsorship Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Buka Puasa Bersama PERHAPI Aceh;

- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Sosialisasi Peran Pers Aliansi Wartawan Nagan (Awan);
- ✚ Dukungan Material Untuk Pembuatan Posko Operasi Ketupat Di Kecamatan Seunagan;
- ✚ Koordinasi Dan Silaturahmi Dengan Wartawan Nagan Raya (Periode Mei 2024);
- ✚ Program Pembangunan Jamban Sehat Dukungan TMMD Kodim 0116 Nagan Raya;
- ✚ Pendaftaran Keanggotaan Perhapi Untuk Inspektur Tambang (It) Penempatan Provinsi Aceh;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Olahraga Bola Voli Satpol Pp & Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Koordinasi Dengan Stakeholder (Periode Mei 2024);
- ✚ Pembangunan Jamban Sehat Di Gampong Kuta Aceh;
- ✚ Sponsorship Kegiatan Seminar & Musyawarah Nasional APKPI Ke-III 2024;
- ✚ Silaturahmi Dan Diskusi Bersama Wartawan Nagan Raya Bulan Juni 2024;
- ✚ Sponsorship Kegiatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64 2024;
- ✚ Biaya Rehab Rumah Dinas Kapolsek Seunagan;
- ✚ Sponsorship Kegiatan Ikata Development Program (Idp) Upn "Veteran" Yogyakarta 2024;
- ✚ Sponsorship Memperingati Hari Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024;
- ✚ Partisipasi Pada Acara Pelantikan Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra Banda Aceh);
- ✚ Program Pengadaan 3 Unit Laptop Untuk Dayah Daarul Ulum Al-Mukarramah Gampong Babah Krueng;
- ✚ Regisrasi ICA-ISDA AWards 2024;
- ✚ Koordinasi Dengan Stakeholder Periode Juli 2024;
- ✚ Pengadaan Material Tambahan Untuk Instalasi Rakit Penyeberangan Masyarakat Gampong Alue Buloh;
- ✚ Pengadaan 14 Pasang Sepatu Safety Untuk Tamu Management Bel;
- ✚ Publikasi Ucapan Selamat HUT Ke -22 Untuk Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Pengadaan Speaker Untuk Kebutuhan Kegiatan di Kantor Camat Seunagan;
- ✚ Sponsorship Kegiatan BKPRMI DPD Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Sponsorship Kegiatan Jambore Nasional Green Generation Indonesia 2024;
- ✚ Partisipasi Pada Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Ke- Iv Dpd Knpi Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Perawatan Jalan Untuk Pembinaan Usaha Yang Menunjang Pemasukan Gampong Krueng Ceuko;
- ✚ Program Pengadaan Handy Talky (Ht) Untuk Setdakab Nagan Raya;

- ✚ Koordinasi Dengan Stakeholder Periode September 2024;
- ✚ Sponsorship Kegiatan TPT PERHAPI XXXIII 2024;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Hut TNI Ke-79 Tahun 2024 Di Makodim 0116 Nagan Raya;
- ✚ Dukungan Untuk Renovasi Pos Penjagaan Sat Samapta Polres Nagan Raya;
- ✚ Silaturahmi Dan Diskusi Bersama Wartawan Nagan Raya Bulan Oktober 2024;
- ✚ Program Silaturahmi Team CEC MDB Dengan Ketua MPU Aceh Di Ponpes Aceh Jaya;
- ✚ Dukungan Memperingati Hut Korps Brimob Polri Ke -79;
- ✚ Program Pengadaan Ring Buoy Dan Life Jacket Untuk Menunjang Safety Penyeberangan Warga Melalui Rakit;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Sekolah Keluarga Samara;
- ✚ Penataan Ruang Tunggu Loker Tilang Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya;
- ✚ Sponsorship Untuk Kegiatan Pelantikan Dan Pengukuhan Pengurus Dpd Knpi Nagan Raya Masa Bhakti 2024 -2027;
- ✚ Program Dukungan Perlengkapan Olahraga Untuk ESDM Aceh;
- ✚ Pengadaan 2 Unit Ac Pendingin Ruangan Sipropam Polres Nagan Raya;
- ✚ Dukungan Dana Untuk Penyusunan Dan Penerbitan Buku Perencanaan Dan Pembangunan Daerah;
- ✚ Koordinasi Dengan Stakeholder Periode November 2024;
- ✚ Biaya (Akomodasi Dan Transportasi) Team Rohaniawan Ulama Nagan Raya Utk Support Operasional Malam Di Pit Bel Di Area Rawan Gangguan Metafisik;
- ✚ Dukungan Pada Kegiatan Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2024;
- ✚ Biaya Pembuatan Pos Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025.

8. Pilar Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang PPM

Realisasi anggaran CSR pada pilar ini mencapai sebesar Rp. 2.437.197.601 atau sebesar 53,12 persen dari pagu awal sebesar Rp. 4.587.604.064. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada pilar ini yang meliputi:

- ✚ Pembangunan MCK Santri Dayah Istiqamatul Khairat Gampong Suak Puntong;
- ✚ Pembangunan Balai Pengajian TPA Inti Istirakiyah Gampong Kuta Paya;
- ✚ Program Dukungan Material Untuk Pembangunan Pagar Mesjid Gampong Pulo le;
- ✚ Program Dukungan Material Untuk Pembangunan Mesjid Al-Ikhsan Gampong Purwodadi;

- ✚ Renovasi Kamar Mandi Dewan Guru Dayah Daarul Uluum Al-Mukarramah;
- ✚ Pembangunan Tempat Wudhuk Dan MCK Masjid At-Taqwa Gampong Kuta Makmue;
- ✚ Rehab Taman Bundaran Dan Pemeliharaan Kawasan Alun-Alun Suka Makmue;
- ✚ Dukungan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Gampong Macah;
- ✚ Pemeliharaan Pompa Air Bersih Dan Sambungan Rumah (Sr) Gampong Krueng Ceuko;
- ✚ Pembangunan Depot Air Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Perluasan Jaringan Perpipaan Air Bersih Di Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Dukungan Material Untuk Pembuatan Plafond Masjid Gampong Seumambek;
- ✚ Program Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Kabupaten Nagan Raya;
- ✚ Pekerjaan Canopy Masjid Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Pembangunan Balai Pengajian Di Dayah Istiqamatuddin Hayatussurur;
- ✚ Pemeliharaan Bangunan Tribun Utama Alun-Alun Suka Makmue;
- ✚ Pembangunan Pagar Gedung Posyandu Bungong Keupula Gampong Kuta Aceh;
- ✚ Evakuasi Rakit Dari Jembatan Kuala Tuha Ke Gampong Alue Buloh;
- ✚ Program Pembangunan Balai Pengajian Di TPA Intan Permata Gampong Paya Udeung;
- ✚ Program Pembangunan Bilik Santri Dayah Daarul 'Uluum Al-Mukarramah.



Gambar 3.21.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Bara Energi Lestari Tahun 2024

3.3.2.9. PT. Pupuk Iskandar Muda

PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran CSR sebesar Rp. 7.304.000.000 yang terdiri dari 12 (dua belas) paket kegiatan. Secara keseluruhan realisasi anggaran CSR tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 7.193.295.000 atau sebesar 98 persen. Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1. Program tani sejahtera (PTS) dan Pengembangan Paya Nie Lestari Berdaya (PANEL DAYA);

2. Bantuan modal usaha (pengembangan masyarakat;
3. Biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu, program stunting, jumat sehat bersama dan program sunat massal gratis;
4. Sarana fasilitas ruang terbuka anak, program kelas pantai dan PIM CARE Education (beasiswa anak asuh);
5. Program youth entrepreneur (YES) pelatihan dan keterampilan, program pembinaan UMK, program local business development (LBD) oleh oleh dewantara;
6. Program mudik gratis 2024, program rumah sehat sederhana, peningkatan sarana dan prasarana umum, bright with PIM (bantuan subsidi listrik);
7. Kegiatan bakti sosial untuk masyarakat lingkungan, kegiatan hari besar keagamaan;
8. Biaya pendampingan CDO;
9. Program create share value (CSV);
10. Program masyarakat tanggap bencana;
11. Program pelestarian alam;
12. Program pembinaan UMK.



Gambar 3.22.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Pupuk Iskandar Muda Tahun 2024

3.3.2.10. PT. Perkebunan Nusantara I Regional 6

PT. Perkebunan Nusantara I Regional 6 tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran CSR sebesar Rp. 1.200.000.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 1.011.233.000 atau sebesar 84 persen yang terdiri dari 28 paket kegiatan sebagai berikut:

1. Program pembagian sembako gratis, dengan pagu awal Rp. 50.000.000,-. Realisasi pada program ini sebesar Rp137.600.000,- (900 Paket) dengan penerima manfaat masyarakat di Kota Langsa, Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang;

2. Program kegiatan khitan massal, dengan pagu awal Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar 100 persen. Program ini diikuti oleh 100 Anak di Kota Langsa.
3. Program bantuan sepeda motor untuk penyandang disabilitas, dengan pagu awal Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 24.000.000,- (1 Orang);
4. Program bantuan bibit tanaman sawit untuk masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.500.000,- (600 Batang). Penerima manfaat merupakan kelompok masyarakat disekitar lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Utara. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12.
Realisasi Pelaksanaan CSR PT. Perkebunan Nusantara I Regional 6 Tahun 2024

NO.	URAIAN BANTUAN	NAMA OBJEK	TPB	INDIKATOR	7 SUBJEK INTI	MANDIRI / DUKUNGAN /	NILAI BANTUAN
1	Pemberian Makanan Tambahan	Penanganan Stunting Aceh Tahun 2024	3			Kolaborasi	50.000.000,00
2	Pemberian Makanan Berbuka Puasa	Program Semarak Ramadan 1445 H bersama PT PN I Regional 6	2			Mandiri	50.000.000,00
3	Bantuan Dana Pembinaan Olah Raga	Bantuan Pengembangan Olah Raga Klub Sepak Bola PSBL Langsa	4			Mandiri	50.000.000,00
4	Bantuan dalam rangka HUT POMAD	Bantuan Kegiatan Acara HUT POMAD Korem Lilawangsa	8			Kolaborasi	45.000.000,00
5	Bantuan Pembuatan Kandang Rusa Totos	Bantuan Pembuatan Kandang Rusa Totos disekitar Bandara Malikussaleh	15			Kolaborasi	106.670.000,00
6	Bantuan Hewan Qurban untuk Pemerintah Aceh	Bantuan Hewan Qurban untuk Pemerintah Aceh	1			Kolaborasi	26.500.000,00
7	Pemberian Bantuan Bibit Buah-Buahan dan Ikan	Program Peduli Lingkungan dalam rangka hari Lingkungan Sedunia	15			Mandiri	13.100.000,00
8	Bantuan Untuk Pesantren Yayasan Cahaya Aceh	Bantuan Sarana Pendidikan	4			Mandiri	10.000.000,00
9	Bantuan Perbaikan Jembatan Kebun Lama	Bantuan Sarana dan Prasarana lalu lintas TBS	9			Mandiri	10.000.000,00
10	Bantuan Pembangunan MCK Pesantren Babul Ulum	Bantuan Sanitasi	6			Mandiri	5.000.000,00
11	Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar	Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka Maulid	2			Mandiri	10.000.000,00
12	Bantuan Peralatan Olah Raga	Bantuan Bola Volly	4			Mandiri	2.000.000,00
13	Bantuan Untuk BKM Darul Qarrar Langsa	Bantuan Sarana Ibadah	4			Mandiri	5.000.000,00
14	Renovasi Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia	Pemugaran Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia di Aceh Utara	9			Kolaborasi	100.000.000,00
15	Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang dan Aceh Selatan	Bantuan Sembako untuk Posko Pengungsian	2			Mandiri	5.000.000,00
16	Bantuan Partisipasi Penanam Mangrove	Bantuan Partisipasi Penanaman 25 ribu Pohon Mangrove di Aceh Timur	15			Kolaborasi	2.500.000,00
17	Berbagi Makanan Sehat dalam rangka HUT kota Langsa	Berbagi Bubur dalam rangka HUT Kota Langsa	3			Mandiri	3.000.000,00
18	Bantuan Sepeda Motor Untuk Penyandang Disabilitas	Bantuan Turnamen Golf	4			Kolaborasi	24.313.000,00
19	Bantuan Sponsorship Turnamen Bulutangkis	Kegiatan Olah Raga Bulu Tangkis Kapolres Aceh Tamiang Cup 2024	4			Dukungan	25.000.000,00
20	Bantuan Pengembangan tempat Wisata Sikabu Aceh Aceh Selatan	Bantuan Pengembangan tempat Wisata Sikabu Aceh Selatan	11			Mandiri	125.000.000,00
21	Bantuan Sembako untuk pengentasan kemiskinan	Bantuan Sembako dalam rangka HUT PT PN Group	1			Mandiri	49.050.000,00
22	Bantuan Bibit Tanaman Sawit	Bantuan Bibit Tanaman Sawit untuk Masyarakat Sekitar Lingkungan Perusahaan	15			Mandiri	34.500.000,00
23	Kegiatan Khitan Massal	Kegiatan Khitanan Massal untuk Yatim Piatu disekitar Lingkungan Perusahaan	3			Mandiri	100.000.000,00
24	Bantuan Sponsorship Turnamen Futsal antar Pelajar	Bantuan Dana Pembinaan untuk Kegiatan Olahraga Futsal Pelajar Menengah	4			Dukungan	2.000.000,00
25	Bantuan Untuk Sarana Ibadah Masjid/Dayah/Pesantren	Bantuan Perbaikan Ruang Tahfiz Quran dan Mushalla Nurshadrina	4			Mandiri	5.000.000,00
26	Bantuan Sponsorship Untuk Persaudaraan Muslimah	Bantuan Dana untuk Kegiatan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)	4			Dukungan	5.000.000,00
27	Bantuan Sembako untuk pengentasan kemiskinan	Bantuan Sembako untuk Masyarakat disekitar Lingkungan Perusahaan	1			Mandiri	137.600.000,00
28	Bantuan Partisipasi Kegiatan IMI Motor Langsa	Bantuan Kejuaraan Balap Motor Bersama IMI Motor Langsa	4			Dukungan	10.000.000,00
Jumlah							1.011.233.000



Gambar 3.23.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Perkebunan Nusantara I Regional 6 Tahun 2024

3.3.2.11. PT. Solusi Bangun Andalas

Alokasi CSR PT. Solusi Bangunan Andalas tahun 2024 berjumlah sebesar Rp. 5.326.000.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 5.192.456.375 atau sebesar 97 persen yang terdiri dari 22 paket yang meliputi sebagai berikut yaitu :

- Pilar Sosial - Kesehatan
 1. Pekan olahraga solusi bangun andalas (POR-SBA) dengan pagu awal Rp.175.000.000 dan terealisasi sebesar 100 persen. Kegiatan ini difokuskan pada pemuda/masyarakat dengan target sejumlah 360 orang di 34 Gp. di Kec.Lhoknga dan Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 2. Program gerakan masyarakat berperilaku sehat dan bersih (GEMA BERSERI)- Jamban Sehat, dengan pagu awal sebesar Rp. 154.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Program ini difokuskan pada masyarakat, siswa dengan target berjumlah sebanyak 300 orang, dan berlokasi di 35 Gp. di Kec. Lhoknga dan Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar.
- Pilar Sosial - Pendidikan
 1. Program sarana dukungan aksesibilitas kegiatan anak sekolah (sukseskan anak sekolah) dengan pagu awal sebesar Rp. 141.300.000

dan terealisasi sebesar Rp. 78.845.400 atau 78 persen. Kegiatan ini difokuskan kepada siswa, guru dengan jumlah 200 orang, yang berlokasi di 6 Gp. Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini mendukung fasilitas transportasi sekolah bagi anak dan guru mengingat tidak tersedianya angkutan umum di Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.

2. Program beasiswa semen andalas dengan pagu awal sebesar Rp. 610.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Kegiatan ini dilaksanakan di 34 Gp. Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini difokuskan pada Siswa/i, Mahasiswa/i dan Santriwan/ti dengan target 1100 orang. Kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
 3. Program generasi muda berpendidikan islami dan berwawasan qur'ani (generasi madani) dengan pagu awal sebesar Rp. 132.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Kegiatan ini difokuskan pada Santri, Ustadz/ah sejumlah 200 orang di 34 Gp. di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar dan bertujuan untuk pengembangan pendidikan Tahfidz al-Qur'an bagi anak usia dini.
 4. Program optimalisasi fasilitas pendidikan dayah salafiah dengan pagu awal sebesar Rp. 110.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. . Program ini bertujuan untuk mendukung media pembelajaran (kitab dan fasilitas) dengan target sejumlah 100 orang di 34 Gp. di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 5. Program beasiswa EVE (*entrepreneur vocational education*). Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.900.000.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 1.841.999.475 atau sebesar 99 persen. Target program ini berjumlah sebanyak 50 orang di 34 Gp di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung. Program ini memberikan beasiswa kuliah D3 di Naragong/Cilacap dengan menyediakan semua biaya pendidikan, transportasi, penginapan dan uang saku bagi siswa/i.
- Pilar Ekonomi - Pemberdayaan
 1. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan pagu awal sebesar Rp. 110.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Program ini difokuskan pada pengembangan ekonomi untuk kelompok rentandi dengan target 100 orang di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 2. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan usaha pertanian dan peternakan atau perikanan dengan pagu awal sebesar Rp. 347.500.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Program ini bertujuan untuk pengembangan ekonomi kelompok rentandi dengan

target 150 orang di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.

3. Program Penguatan Kapasitas dan Dukungan Operasioanal Komite Bersama Program Pemberdayaan Masyarakat dari 5 kemukiman (Lhoknga, Leupung, Kueh, Lamihom dan Lampuuk) dengan pagu awal sebesar Rp.330.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Program ini difokuskan pada kelompok masyarakat dengan target sebanyak 13 orang di Kec. Lhoknga dan Leupung Kabupaten Aceh Besar.
- Pilar Lingkungan – Sosial Budaya
 1. Program safari ramadhan dengan pagu awal sebesar Rp.110.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.109.421.500. Program ini bertujuan untuk menyemarakkan bulan ramadhan dengan peserta sebanyak 3.400 orang di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 2. Program berkah ramadhan (berbagi kebaikan bulan ramadhan) dengan pagu awal sebesar Rp.29.500.000 dan telah terealisasi Rp.29.400.000. Penerima manfaat kegiatan ini berjumlah 3.400 orang di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 3. Program takbir akbar dengan pagu awal sebesar Rp.44.000.000 dan realisasi mencapai 100 persen. Program ini dilaksanakan di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 4. Program kenduri laot dengan pagu awal sebesar Rp.66.000.000 dan realisasi mencapai 100 persen dengan lokasi di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 5. Program Peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardika) dengan pagu awal Rp.22.000.000 dan realisasi mencapai 100 persen.
 6. Program peringatan tsunami dengan pagu awal sebesar Rp.66.000.000 dan realisasi sebesar 100 persen dan dilaksanakan di Kec.Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 7. Program rumah dhuafa dengan pagu awal sebesar Rp.165.000.000 dan telah terealisasi 100 persen. Program ini difokuskan pada masyarakat dengan jumlah 35 orang di Kec. Lhoknga dan Kec. Leupung Kabupaten Aceh Besar.
 - Pilar Lingkungan
 1. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan pariwisata dengan pagu awal sebesar Rp.100.000.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen.
 2. Program SOBAT SI-ABES (solusi bersama jaga ekosistem pesisir dan laut bebas sampah) dengan pagu awal sebesar Rp.326.200.000 dan telah terealisasi sebesar 100 persen.



Gambar 3.24.

Dokumentasi Pelaksanaan Program PT. Solusi Bangun Andalas Tahun 2024

3.3.2.12. PT. Agrabudi Jasa Bersama

Realisasi CSR PT. Agrabudi Jasa Bersama (AJB) tahun 2024 mencapai Rp. 186.353.900 dari pagu awal sebesar Rp. 350.000.000,- dengan 8 paket program/kegiatan. Secara rinci realisasi dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13.
Realisasi CSR PT. AJB Tahun 2024 (Per Sektor)

Program/Kegiatan	Pagu Renja 2024	Realisasi Renja sampai dengan Triwulan IV 2024
Pendidikan	50.000.000	26.785.400
Kesehatan	30.000.000	9.010.000
Pendapatan Riil	50.000.000	15.000.000
Kemandirian UMKM	25.000.000	24.225.500
Sosial & Budaya	120.000.000	62.505.000
Kelembagaan Komunitas	10.000.000	5.000.000
Lingkungan Hidup	20.000.000	-
Infrastruktur	45.000.000	43.828.000
Total Pagu	350.000.000	186.353.900

Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut : a) Bantuan UMKM kios berupa penyediaan barang sembako untuk kios terealisasi sebesar Rp. 24.225.500,- dari pagu awal Rp. 25.000.000,-. b) Bantuan Infrastruktur, rumah tidak layak huni akibat kebakaran. dari anggaran Rp. 45.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 43.828.000,-. c) Bantuan berupa alat peraga (timbangan bayi, timbangan dewasa, tensi digital dan thermometer untuk posyandu dengan realisasi mencapai Rp. 2.510.000,- dari anggaran awal sebesar Rp. 10.000.000,-. d) Bantuan kesehatan, rehap bangunan posyandu, dengan realisasi sebesar Rp. 9.010.000,- dari alokasi awal sebesar Rp. 15.000.000,-. e) Bantuan keagamaan, berupa sound system dan buku da'ar khairat dengan pagu awal sebesar Rp. 120.000.000,- dan realisasi mencapai sebesar Rp. 62.505.000,-. f) Bantuan pendidikan, PAUD dalam bentuk mainan APE luar realisasi mencapai sebesar Rp. 26.785.400,- dari pagu awal sebesar Rp. 50.000.000.



Gambar 3.24.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Agrabudi Jasa Bersama Tahun 2024

3.3.2.13. PT. Telkom Witel Aceh

Realisasi pelaksanaan CSR PT. Telkom Witel Aceh Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 195.452.460 yang terdiri dari 3 (tiga) pilar sebagai berikut:

a) Pilar Sosial:

Terdiri dari 6 (enam) paket kegiatan/proyek dengan realisasi anggaran sebesar Rp 117.452.480, dengan rincian sebagai berikut:

- 📦 Bantuan komputer dan akses internet kepada MTS Mon Malem Kabupaten Aceh Besar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.993.200.
- 📦 Safari ramadhan telkom group 2024 berupa bantuan santunan anak yatim dan dhuafa terhadap 20 anak yatim Darul Tauhid Kota Banda Aceh dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.000.000.
- 📦 Penyaluran bingkisan paket lebaran terhadap masyarakat disekitar perusahaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.

- ✚ Telkom employee social activity (TESA) – Pelatihan cyber security dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 1 Lhoknga dengan peserta 300 siswa dan guru.
- ✚ Bantuan komputer dan akses internet dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.580.390. Kegiatan ini dilaksanakan di SMKN 1 Bireuen pada tanggal 19 November 2024.
- ✚ Bantuan komputer dan internet dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.878.870. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN Unggul Tapak Tuan pada tanggal 23 November 2024.

b) Pilar Lingkungan:

Realisasi anggaran CSR pada pilar lingkungan mencapai sebesar Rp 60.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Penanaman pohon dan aksi pembersihan pemeliharaan pesisir pantai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh pada tanggal 26 April 2024.
- ✚ Bantuan sarana air bersih (SAB) di Pesantren Teknologi MSBS Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000 yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024.

c) Pilar Ekonomi:

Realisasi anggaran pada pilar ekonomi adalah sebesar Rp 18.000.00, dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Indicast, meretas sukses dalam pemasaran konten melalui copywriting dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000. Kegiatan ini diikuti oleh anak muda, UMKM dan mitra binaan telkom dan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024.
- ✚ Workshop digital branding di plasa indeks bersama owner harvies coffee tommy harvie dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dengan peserta dari UMKM dan mitra binaan telkom.
- ✚ Workshop digital marketing di plasa indeks bersama owner bitata food ratyur anissa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.
- ✚ Indicast: budaya otomenashi membangun kesetiaan pelanggan dalam keramahan Jepang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.
- ✚ Indicast: bisnis next gen solusi digital untuk tantangan bisnis masa kini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.
- ✚ Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.
(lebih jelas lihat Tabel 2.7).



Gambar 3.25.

Dokumentasi Realisasi Program CSR PT. Telkom Witel Aceh Tahun 2024

3.3.2.14. PT. Pema Global Energi

PT. Pema Global Energi tahun 2024 telah merealisasi anggaran TJSL/CSR sebesar Rp. 5.940.682.350 atau sebesar 68,05 persen dari alokasi pagu sebesar Rp. 8.730.000.000. Secara rinci realisasi program TJSLP/CSR tahun 2024 meliputi sebagai berikut:

- a) Pelatihan vokasi (sertifikasi/non sertifikasi). Pelatihan ini terdiri dari pelatihan pengelasan yang diikuti oleh 21 orang peserta pria dan pelatihan menjahit yang diikuti oleh 25 orang peserta Wanita. Peserta pelatihan berasal dari Kecamatan Syamtalira (pelatihan pengelasan) dan Kecamatan Matangkuli (pelatihan menjahit) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. Rp. 439.159.900 atau sebesar 125 persen dari pagu awal Rp. 350.000.000.
- b) Beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dengan realisasi anggaran mencapai 171 persen atau sebesar Rp. 426.950.000 dari pagu awal sebesar Rp. 250.000.000.

- c) Peningkatan kapasitas terkait pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.720.250 atau sebesar 13 persen dari pagu awal sebesar Rp. 225.000.000.
- d) Pendampingan SMKN 1 Tanah Luas (migas) menjadi sekolah unggulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.104.000 atau sebesar 49 persen dari pagu awal sebesar Rp. 150.000.000. Kegiatan ini mencakup pemberian beasiswa kepada guru (1 orang) dan pelatihan 4 sesi.
- e) Kegiatan Kesehatan - Pamsimas/khitanan massal yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang meliputi Kec. Syamtalira Aron, Tanah luas, Paya Bakong, Matang Kuli, Langkahan, Pirak Timu, Nibung dan Baktia dengan sasaran 450 anak. Realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 400.118.000 atau mencapai 107 persen dari pagu awal sebesar Rp. 375.000.000.
- f) Kegiatan Sosial Masyarakat yang meliputi pemberian bantuan 56 sapi meugang dan santunan terhadap 4.050 anak yatim di kabupaten Aceh Utara. Realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 2.741.250.000 atau sebesar 96 persen dari pagu awal sebesar Rp. 2.850.000.000.
- g) Pengendalian/Penanganan Stunting dengan penerima manfaat 27 Anak stunting, Kader posyandu dan ibu rumah tangga dari 8 kecamatan wilayah operasional PT. PGE. Realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 270.090.000 atau sebesar 90 persen dari pagu awal sebesar Rp. 300.000.000.
- h) Program peningkatan hasil pertanian dengan demplot padi semi organik dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 160.028.500 atau sebesar 59 persen dari pagu awal sebesar Rp. 270.000.000.
- i) Peternakan domba atau kambing terpadu dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.495.000 atau sebesar 44 persen dari pagu awal sebesar Rp. 225.000.000.
- j) Pembinaan dan pengembangan UMKM dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 186.704.000 atau sebesar 124 persen dari pagu awal sebesar Rp. 150.000.000.
- k) Pendampingan program pengembangan Masyarakat berbasis komunitas yang dilaksanakan di Kec. Syamtalira Aron, Tanah Luas, Paya Bakong, Matang Kuli, Langkahan, Pirak Timu dan Nibung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.728.500 atau sebesar 35 persen dari pagu awal sebesar Rp. 300.000.000.
- l) Pembangunan 5 unit rumah layak huni untuk Dhuafa dengan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 424.715.000 atau sebesar 129 persen dari pagu awal sebesar Rp. 330.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tanjung Krueng Pase Aron, Meudang Ara Baktya, Keh Nibung, Paya Yanah Luas dan Paya Meudru Paya Bakong.

- m) Perbaikan sarana prasarana umum berupa rehabilitasi Masjid Al Ikhlas, perbaikan gorong-gorong, pembersihan saluran irigasi sawah, pengadaan container sampah dan subur bor yang dilaksanakan di Desa Teupin Punti Kec. Syamtalira Aron, Desa Keude Blang Jruen Kec. Tanah Luas dan Kab. Aceh Besar. Realisasi anggaran mencapai sebesar Rp.202. 965.000 atau sebesar 90 persen dari pagu awal sebesar Rp. 225.000.000.
- n) Renovasi bangunan sarana pendidikan di wilayah kerja perusahaan berupa bantuan plafon dan dinding ruang belajar LPI Faqihatuddiniyah Al- Amiriyah. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 atau sebesar 3 persen dari pagu awal sebesar Rp. 150.000.000.
- o) Sarana prasarana community Learning Center PGE yang dilaksanakan di Kec. Syamtalira Aron dengan total realisasi emncapai sebesar Rp. 145.319.200 atau sebesar 65 persen dari pagu awal sebesar Rp. 225.000.000.
- p) Perbaikan Sarana prasarana kebersihan desa yang dilaksanakan di Kec. Matang Kuli, Nibong, Syamtalira Aron dan Tanah Luas, dengan total realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 68.400.000 atau sebesar 30 persen dari pagu awal sebesar Rp. 225.000.000.
- q) Normalisasi Sungai, saluran air, gorong-gorong, semak belukar dengan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 70.083.000 atau sebesar 13 persen dari pagu awal Rp. 525.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tutong Matangkuli dan Kemukiman Syamtalirail Aron.
- r) Bantuan bencana alam berupa bantuan banjir dan angin putting beliung yang terjadi di Tanah luas dengan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 92.852.000 atau sebesar 31 persen dari pagu awal sebesar Rp. 300.000.000.



Gambar 3.26.

Dokumentasi Realisasi Program CSR PT. Pema Global Energi Tahun 2024

3.3.2.15. PT. Pegadaian (Persero) Syariah

PT. Pegadaian (Persero) Syariah tahun 2024 telah merealisasikan CSR sebesar Rp. 242.500.000, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Bantuan kegiatan hari Peduli Sampah di Kab. Aceh Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2024 dengan lokasi di Jl. Teuku Cut Ali No.95, Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Word Habitat Day "Ekosistem Laut" Transplantasi terumbu karang pulau Rubiah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 yang dilaksanakan pada 16 Mei 2024 yang terdiri dari 100 balok rumah terumbu karang bantuan masyarakat di Pulau Weh, Jurong Lhot, Iboh, Sukamkmue, Kota Sabang.
- c. Bantuan Sedekah Protein Hewani Qurban di sekitar Kantor Area Banda Aceh PT Pegadaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000, dan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024 berupa paket bantuan masyarakat 140 kantong daging(1 ekor sapi, 2 ekor kambing), di Desa Lambaro Biluy, Kec. Darul Kamal, Kab.Aceh Besar.
- d. Sedekah Protein Hewani Qurban di sekitar Kantor Cabang Syariah Pegadaian berupa 9 (sembilan) ekor kambing dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000 dan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024.
- e. Khitanan Massal PT. Pegadaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000 dan dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2024. Sasaran kegiatan ini adalah Anak-anak yatim & dhuafa(45 anak) di Jl. Imam Bonjol No.14, Kp Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- f. Bantuan Sarana & Prasarana Gampong Pasar Palo, Pidie sebesar Rp.10.000.000 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, dengan lokasi bantuan kepada Gampong Pasar Palo, Pidie Gampong Pasar Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, Aceh.
- g. Bantuan Sarana Meunasah Gampong Blang Timu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024.
- h. Bantuan Sarana Gampong Keude Teunom dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 yang diserahkan pada tanggal 29 Juli 2024.
- i. Bantuan Uang Saku UMKM Kegiatan FEBIS & EPIKS OJK Aceh sebesar Rp.15.000.000 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024.
- j. Gerakan Literasi Keuangan 9 Kantor Cabang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000 dan dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2024.
- k. Bantuan Bahan Material Masjid Jami' Baitannur Gampong Mane Tunong dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024.
- l. Kegiatan BIK OJK Aceh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.549.570 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Bantuan kepada

Masyarakat Gampong Umong Seribee di Gampong Umong Seribee, Kec. Lhoong, Aceh Besar.

- m. Partisipasi Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kab. Bireuen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.250.000 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 dengan lokasi bantuan kantor Bupati Bireuen Jl. Sultan Malikusseh Cot Gapu.
- n. Bantuan Revitalisasi Makam Pahlawan Cut Nyak Meutia kepada Korem 011 Lilawangsa, Lhokseumawe dengan alokasi anggaran sebesar Rp.346.500.000 yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 November 2024.



Gambar 3.27.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tahun 2024

3.3.2.16. PT. Bank Syariah Indonesia

Realisasi alokasi program CSR PT. Bank Syariah Indonesia Aceh tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 18.410.500.000 atau sebesar 122,74 dari alokasi awal sebesar Rp. 15.000.000.000 yang terdiri dari 24 paket sebagai berikut:

1. Desa binaan BSI-Desa wisata Sabang;
2. PON Aceh SUMUT;
3. Support kegiatan olahraga (persiraja);
4. Pengembangan UMKM konsorsium bawang merah;
5. Pengembangan UMKM dayah jeumala amal;
6. Pengembangan UMKM ternak kambing asjadi Bireuen;
7. Support kegiatan pemerintah, organisasi, gampong, dan dayah;
8. Pelatihan literasi keuangan syariah;
9. Pembagian sembako ramadhan;
10. Pembangunan dapur ponpes mahyal ulum Al Aziziyah;
11. Pembagian sembako;
12. Pengembangan UMKM kelompok ternak tani pasee mandiri;
13. Pengembangan wisata sikabu Aceh Selatan;
14. Program desa UMKm coklat Sabang;
15. Program pesantren sehat tahun 2024;
16. Pengembangan UMKM dayah misbahur rasyad Al Aziziyah;

17. Renovasi masjid fathun qarib UIN Ar Raniry Tahap 1;
18. Pembangunan infrastruktur lainnya;
19. Bantuan sapi potong hari raya qurban;
20. Pengembangan UMKM dayah teungku chiek pante geulima;
21. Bantuan kebakaran ponpes babul maghrifah;
22. Pengembangan UMKM dan industri kreatif;
23. Bantuan banjir Aceh tamiang;
24. Dukungan untuk galeri atsiri center di Balohan Sabang.

Lebih jelas mengenai realisasi program CSR PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14.

Realisasi Pelaksanaan Program CSR PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Tahun 2024

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Desa Binaan BSI - Desa Wisata Sabang	400.000.000
2	PON Aceh Sumut	5.000.000.000
3	Support Kegiatan Olahraga (Persiraja)	2.500.000.000
4	Pengembangan UMKM Konsorsium bawang merah	1.000.000.000
5	Pengembangan UMKM Dayah Jeumala Amal	750.000.000
6	Pengembangan UMKM ternak kambing Asjadi Bireun	700.000.000
7	Support kegiatan pemerintah, organisasi, gampong dan dayah	564.500.000
8	Pelatihan literasi keuangan syariah	500.000.000
9	Pembagian Sembako ramadhan	500.000.000
10	Pembangunan Dapur Ponpes Mahyal Ulum Al Aziziyah	500.000.000
11	Pembagian Sembako	500.000.000
12	Pengembangan UMKM Kelompok Ternak Tani Pasee Mandiri	500.000.000
13	Pengembangan wisata sikabu Aceh Selatan	500.000.000

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
14	Program Desa UMKM Cokelat Sabang	700.000.000
15	Program Pesantren sehat tahun 2024	346.000.000
16	Pengembangan UMKM Dayah Misbahur Rasyad Al-Aziziyah	320.000.000
17	Renovasi Mesjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Tahap I	1.700.000.000
18	Pembangunan Infrastruktur lainnya	300.000.000
19	Bantuan sapi potong Hari Raya Qurban	400.000.000
21	Pengembangan UMKM Dayah Teungku Chiek Pante Geulima	280.000.000
22	Bantuan Kebakaran Ponpes Babul Maghfirah	200.000.000
23	Pengembangan UMKM dan Industri Kreatif	100.000.000
24	Bantuan Banjir Kab. Aceh Tamiang	100.000.000
25	Dukungan untuk Galery Atsiri Center di Balohan Sabang	50.000.000
TOTAL		18.410.500.000



Gambar 3.28.

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Tahun 2024

3.3.2.17. PT. Pembangunan Aceh

Berdasarkan laporan pelaksanaan program CSR dari PT. Pembangunan Aceh, realisasi anggaran CSR sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 986.690.000, yang dilaksanakan dalam 25 program/kegiatan yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembelian hewan qurban Idul Adha 2024;
2. Bhayangkara Fest 2024;
3. Stand Bhayangkara Fest 2024;
4. Baju PON Aceh SUMUT;
5. Series Talkshow Jurnalis Ekonomi Aceh;
6. Gerakan pembagian bendera merah putih;
7. Indonesia Investor Day (IID);
8. Semarak 17 Agustus Gp. Kuta Alam;
9. Bimtek petani garam;
10. Semarak 17 Agustus PUSDA Aceh;
11. Pekan Olahraga Wartawan Nasional;
12. Kejuaraan balap tahun 2024;
13. Pembangunan tempat wudhu BKM Masjid Al Haramain;
14. Pekan olahraga mahasiswa;
15. Semarak 17 Agustus;
16. Persiraja;
17. PON BLU;
18. Munas IKASMANDU;
19. Bantuan UMKM;
20. Maulid Kuala Langsa;
21. Lomba berhitung fakultas teknis XXX;
22. National moot competition on againts corruption piala jaksa agung VIII.

Lebih jelas mengenai realisasi pelaksanaan program CSR PT. Pembangunan Aceh s.d triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 18 berikut ini.

Tabel 3.15.

Realisasi Pelaksanaan Program CSR PT. Pembangunan Aceh s.d Triwulan 2
Tahun 2024

1	Pembelian Hewan Qurban Idul Adha 2024	132.600.000
2	Bhayangkara Fest 2024	100.000.000
3	Stand Bhayangkara Fest 2024	14.790.000
4	Baju PON Aceh SUMUT	364.800.000
5	Series Talkshow Jurnalisi Ekonomi Aceh	25.000.000
6	Gerakan pembagian Bendera Merah Putih	3.000.000
7	Indonesia Investor Day (IID)	3.000.000
8	Semarak 17 Agustus Gp. Kuta Alam	4.000.000
9	Bimtek Petani Garam	3.000.000
10	Semarak 17 Agustus PUSDA Aceh	3.000.000
11	Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas)	20.000.000
12	Kejuaraan Balap Tahun 2024	7.000.000
13	Pembangunan Tempat Wudhu BKM Mesjid Al Haramain	3.000.000
14	Pekan Olahraga Mahasiswa	3.000.000
15	Semarak 17 Agustus	1.000.000
18	Persiraja	175.000.000
19	PON BLU	100.000.000
20	MUNAS IKASMANDU	3.000.000
21	Bantuan UMKM	10.000.000
22	Maulid Kuala Langsa	3.000.000
23	Lomba Berhitung Fakultas Teknik XXX	1.500.000
24	Goverest FISIP USK	2.000.000
25	National Moot Competition On Againts Corruption Piala Jaksa Agung VIII	5.000.000
Total		986.690.000

**Gambar 3.29.**

Dokumentasi Pelaksanaan Program CSR PT. Pembangunan Aceh
Tahun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, maka Visi Pembangunan Nasional periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Makna dari visi diatas adalah mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Untuk pencapaian visi diatas, terdapat 8 (delapan) misi yang dituangkan kedalam Delapan Asta Cita yang meliputi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Indonesia Emas 2045, maka Astacita yang merupakan misi dari Presiden memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

17 Program Prioritas	8 Program Hasil Terbaik Cepat
1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi, baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah; 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten; 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional; 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi; 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat negara; 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23 persen.

Gambar 4. 1
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

RKPA Tahun 2026 merupakan RKPA yang disusun bersamaan dengan disusunnya RPJMA Tahun 2025-2029. Mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 adalah

“ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN”

Makna Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

Islami adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariat Islam.

Maju adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi;

Bermartabat adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh yang religius, memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa;

Berkelanjutan adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi yang meliputi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.
4. Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas.
6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, terlihat keselarasan antara Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029. Lebih jelas keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1**Keselarasan Antara Visi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029**

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029
1	2
BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045	ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Visi/Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih

Tabel 4. 2**Keselarasan Antara Misi Pembangunan Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029**

Misi RPJMA 2025-2029		Misi RPJMN 2025-2029	
1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA		
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		5	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4	Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Misi RPJMA 2025-2029		Misi RPJMN 2025-2029	
5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 4. 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
	Misi - 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.					
01.01	Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks		80,00 - 87,00	80,63 - 87,50
01.01.01	Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam	Persentase dayah yang mandiri	%	42,02	44	47,19
01.01.02	Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah	Indeks Zakat Nasional Aceh	Indeks	0,53	0,62	0,65
01.02	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	%	26,78	27,27	27,72
01.02.01	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	%	83	83,5	84
01.03	Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks		73,7 - 73,81	74,08 - 74,26
01.03.01	Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat	Persentase dimensi toleransi	%		65,07	65,09
01.03.02	Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	90	100	100
	Misi - 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA					
02.01	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh	Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA	%		90	90
02.01.01	Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Indeks Reintegrasi Aceh	Indeks		0,08	0,14

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
02.01.02	Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	%		90	90
02.01.03	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	51,25	52,5	53,75
		Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%		95	95
		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%		61,17	62,26
02.01.04	Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,33	56,53-56,56	57,11 - 57,15
02.01.05	Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan dibidang pendidikan	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	%	15,12	17,39	34,78
02.01.06	Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	%		20,81	24,34
	Misi - 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.					
03.01	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,15	5	5,0 - 5,3
03.01.01	Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	Indeks	119,25	117,66	119,74

IV - 8

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
03.01.02	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		56	58,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,7	3,78	3,87
		Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat		13	12,6
		Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	%		0,5	0,56
03.01.03	Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	Ribu Orang	34,1	12	13,1
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%		0,4	0,41
		Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	%		16,41	16,48
		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,61 - 5,28	4,81	4,93
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	1,72	1,84	1,9
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,62	0,78	0,8
03.02	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan	%	89,87 (2022)	94,91	95,24
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	%		1,1	1,1
		Rasio Gini	Indeks	0,29	0,290 - 0,293	0,280- 0,290

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
		Tingkat Inflasi	%	2,17	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
		Tingkat Kemiskinan	%	12,64	12,00-13,00	9,46 - 10,46
03.02.01	Meningkatnya penerimaan Aceh	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%		1,14	1,14
03.02.02	Terbukanya jaringan pasar domestik dan global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	53,36	64,13-64,79	64,78-65,44
		Indeks Harga Konsumen	%	107,21	110	110
03.02.03	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%		14,28571	14,28
03.02.04	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%		0,54	0,95
03.02.05	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%		0,45	0,48
		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata- rata Tahunan*	Nilai		1443395	1996602,2
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%		1,92	2,1
		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	%		18,88	19,87
		Total Kredit/PDRB (%)	%		18,1	19,09
03.03	Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	27,68	46,8	48,9 - 50,2
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	4,60-4,78	5,12 - 5,47
03.03.01	Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	%		14,53	15,64
03.03.02	Terwujudnya lumbung pangan Aceh	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73.,94	75,14	76,34

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	%	9,1	8,48	7,99
03.03.03	Meningkatnya pembangunan infrastruktur investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB		32,44 - 32,77	32,77 - 33,10
03.03.04	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	%		42.58.00	43,9 : 56,1
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%		42	44,38
	Misi - 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.					
04.01	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar	Indeks Williamson	Indeks		0,4	0,391
04.01.01	Meningkatnya ketahanan air daerah	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%		30,47	34,82
		Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	3,54	3,58	3,61
04.01.02	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%		68,5	70,47
04.01.03	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	%		5,63	5,7
04.01.04	Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar	Rasio Elektrifikasi	%	99,2	99,45	99,6

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
04.01.05	Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang	Rasio Konektivitas	Rasio	0,7	0,7	0,7
04.02	Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	%		NA	72
04.02.01	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tata ruang	%		NA	72
04.02.02	Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks		5,7	5,8
	Misi - 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas					
05.01	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56	0,57	0,58
05.01.01	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun		14,66-14,68	14,77 - 14,78
05.01.02	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Kualitas Pendidikan (SPM)	%	69,33	70,67	73,17
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	NA	8,70 – 13,04	9,75 – 14,00
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum	%	NA	0,00 – 3,00	1,00 - 3,50

IV - 12

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
		pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi				
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%		58,19	59,24
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%		30,00 - 32,00	31,35- 33,50
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%		27,00 - 29,00	28,00 - 29,8
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%		13,58	13,66
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun		10,20-10,21	10,37 - 10,39
05.01.03	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	69,93	73,28	72

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
05.01.04	Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,44	70,7	70,84
05.02	Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65,7	66	66,35
05.02.01	Meningkatnya keluarga berkualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan kesejahteraan disabilitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,46	0,44	0,438
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks		92,85	93,05
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks		66,7	67,6
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,34	68,34	70,34
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%		22	24,06
05.02.02	Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	0,57	0,572
05.03	Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,46	0,487	0,51
05.03.01	Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka		62	64
Misi - 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik, dan supremasi hukum.						
06.01	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,69	81	82
06.01.01	Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,45	4,47	4,5

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
		Nilai SAKIP	Nilai		67,5	68
		Opini BPK	Opini		WTP	WTP
06.01.02	Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	91,77	93	94
06.01.03	Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	76,76	(blank)	84,55
06.01.04	Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik	Indeks Transformasi Digital	Indeks	49,47	50,1	50,73
06.01.05	Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	Indeks		70,2	71,1
		Maturitas SPIP terintegrasi	Level		3	3
06.01.06	Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik	Indeks Reformasi Hukum	Indeks		68,5	71
06.02	Meningkatkan stabilitas politik	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	Tinggi	77,60-77,65	77,65-77,70
06.02.01	Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	73,12	75,9	76
Misi - 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.						
07.01	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	%		63,58	65,06
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		36,08	32,91 - 37,47
07.01.01	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		82,89	83,06
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%		15	18,75

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
				2024 (R)	2025	2026
07.01.02	Meningkatnya kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks		0,592	0,596
07.01.03	Terwujudnya pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp milyar	108,19	107,25	106,62
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	7,08	9,41	12,07
07.02	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	144,29	181,05	179,88
07.02.01	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,54	0,5	0,51

Sumber: Rancangan Akhir RPJMA Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Sesuai dengan arahan presiden yang menekankan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya serta meningkatkan produktifitas, maka tema RKP Tahun 2026 adalah **Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**. Sesuai dengan tema diatas, maka penekanan prioritas pembangunan RKP tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) direktif presiden yang meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi lokal melalui koperasi desa/kelurahan merah putih;
2. Penerapan digitalisasi pendidikan;
3. Pengentasan kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
4. Pengelolaan sampah terpadu;
5. Memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui sekolah rakyat.

Selanjutnya, fokus pembangunan RKP tahun 2026 juga mencakup 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Gender dan Inklusi Sosial, dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran Perempuan di berbagai bidang serta menurunnya kekerasan terhadap Perempuan; terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan sasaran menguatnya pelaksanaan SDGs melalui integrasi perencanaan, pelaporan serta rekognisi;
3. Pembangunan Rendah Karbon, dengan sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK);
4. Transformasi Digital, dengan sasaran meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional dan terwujudnya pemerintahan berbasis digital yang transparan, inklusif dan efisien;
5. Pembangunan Bertahanan Iklim, dengan sasaran menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor pertanian prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian) dan kesehatan.

Merujuk pada trisula pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat tiga pilar utama pembangunan nasional yang menjadi sasaran pembangunan nasional tahun 2026 yaitu (1) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, (2) penurunan kemiskinan dan (3) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM). Lebih jelas mengenai target indikator untuk masing-masing pilar disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 - 6,3
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
GNI Per Capita	5.870
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67
Penurunan Kemiskinan	
Kemiskinan Ektrem (%)	0,0 - 0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 - 4,96
Rasio Gini	0,377 - 0,380
Sumber Daya Manusia Berkualitas	
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57

Sumber: Rancangan RKP 2026

Untuk mencapai sasaran diatas, maka terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) tahun 2026 yang meliputi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Merujuk pada RKP Tahun 2026, maka sasaran pembangunan untuk masing-masing PN dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5
Sasaran Pembangunan dan Indikator Berdasarkan Prioritas Nasional (PN)
Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
PN1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;	1.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	1.1.1	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 - 85,66
				1.1.2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,8
PN2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	2.1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	2.1.1	Asia Power Indeks (Military Capability)	17
				2.1.2	Asia Power Indeks (Diplomacy Influence)	65,8
				2.1.3	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)	68
				2.1.4	Global Cybersecurity Index	95
				2.1.5	Indeks Keamanan Laut Nasional	61

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
		2.2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	2.2.1	Indeks Ketahanan Pangan	75,4
				2.2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,33
				2.2.3	Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi Pangan (PoA)	6,55
		2.3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	2.3.1	Indeks Ketahanan Energi	6,82
				2.3.2	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20
		2.4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	2.4.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,5
				2.4.2	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	60,16
				2.4.3	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,24

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				2.4.4	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	17
		2.5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	2.5.1	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	2
				2.5.2	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	41,26
				2.5.3	Indeks Daya saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41
		2.6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	2.6.1	Indeks Ekonomi Hijau	71,01
				2.6.2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28
				2.6.3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	19,07
				2.6.4	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	27,35
				2.6.5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47
				2.6.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
PN3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	3.1	Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	3.1.1	Stok Infrastruktur Terhadap PDB (%)	47
		3.2	Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	3.2.1	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04
				3.2.2	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51
				3.2.3	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63
				3.2.4	Aset Asuransi/PDB (%)	9,3
				3.2.5	Kapitalisasi Pasar Modal /PDB (%)	59,9
				3.2.6	Total Kredit/PDB (%)	38,46
				3.2.7	Inklusi Keuangan (%)	91,5
		3.3	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	3.3.1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95
				3.3.2	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%)	1,12
				3.3.3	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
		3.4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	3.4.1	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60 - 4,70
				3.4.2	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	22,00 - 24,70
		3.5	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	3.5.1	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40 - 8,00
PN4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;	4.1	Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata	4.1.1	Rata Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45
				4.1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,36
				4.1.3	Rata - Rata Nilai PISA	
					(a) Membaca	396
					(b) Matematika	404
					(c) Sains	416

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				4.1.4	Rata Rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional	
					(a) Literasi Membaca	65,89
					(b) Numerasi	58,86
				4.1.5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan tinggi (%)	34,92
				4.1.6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,49
				4.1.7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5
		4.2	Terwujudnya kesehatan untuk semua	4.2.1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68
				4.2.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata Rata Kelahiran per wanita usia subur 15 - 49 tahun)	2,1
				4.2.3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				4.2.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,5
				4.2.5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252
				4.2.6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,7
		4.3	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	4.3.1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83
				4.3.2	Indeks Perlindungan Anak	72,33
				4.3.3	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24
				4.3.4	Indeks Ketimpangan Gender	0,421
				4.3.5	Indeks Pembangunan Gender	92,11 - 92,21
				4.3.6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,5
				4.3.7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,5
		4.4	Menguatkan ipetk, inovasi dan produktifitas tenaga kerja	4.4.1	Peringkat Indeks Inovasi Global	52

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				4.4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 - 4,96
				4.4.3	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31
				4.4.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40 - 59,31
		4.5	Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	4.5.1	Peringkat pada Asian Games	9 - 11
				4.5.2	Peringkat pada Asian Para Games	5 - 7
				4.5.3	Peringkat pada ASEAN Para Games	1.-2
				4.5.4	Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,80 - 11,94
PN5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	5.1	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktifitas dan daya saing pengolahan	5.1.1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,2
		5.2	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	5.2.1	Biaya Logistik (% PDB)	13,3
				5.2.2	Pembentukan Modal Tetap bruto (% PDB)	29,44

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				5.2.3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22,7
PN6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;	6.1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	6.1.1	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5
				6.1.2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0 - 0,50
				6.1.3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	18,2
				6.1.4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99
				6.1.5	Penyandang Disabilitas yang Bekerja di sektor formal	10,4
		6.2	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	6.2.1	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66
		6.3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	6.3.1	Persentase desa mandiri (%)	23,91
		6.4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	6.4.1	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	57,7

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				6.4.2	Proporsi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional (%)	44,58
PN7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;	7.1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	7.1.1	Indeks Pembangunan Hukum	0,7
				7.1.2	Indeks Persepsi Korupsi	40
				7.1.3	Indeks Integritas Partai politik	65 - 66,99
		7.2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	7.2.1	Indeks reformasi Birokrasi Nasional	72,8
				7.2.2	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	94
		7.3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	7.3.1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,7
		7.4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	7.4.1	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
		7.5	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	7.5.1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,22 - 13,35
				7.5.2	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,45 - 11,40
		7.6	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	7.6.1	Tingkat Inflasi (%)	2,5 - 1
PN8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	8.1	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	8.1.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15
				8.1.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target 2026
1	2	3		4		5
				8.1.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14
		8.2	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	8.2.1	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,136

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.5 diatas, terdapat beberapa proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Aceh tahun 2026 sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4. 6
Proyek Strategis Nasional RKP Tahun 2026

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
1	2	3	4
Direktif Presiden			
APBN			
1	Makanan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional
2	Koperasi Desa/Kelurahan	Nasional	Kementerian Koperasi
3	Pembangunan Sekolah Rakyat	Nasional	Kementerian Sosial
4	Digitalisasi Pendidikan	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
5	Kartu Kesejahteraan	Nasional	Kementerian Sosial
6	Kartu Usaha Afirmatif	Nasional	Kementerian Sosial
7	Pengelolaan Sampah Terpadu	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
NON APBN			
1	Pengelolaan Sampah Terpadu	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum
Swasembada Pangan			

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
1	2	3	4
APBN			
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum
Swasembada Air			
APBN			
1	Bendungan Keureuto	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum
2	Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum
Konektivitas dan Kawasan			
NON APBN			
1	Jalan Tol Sigli-Banda Aceh-Bagian Trans Sumatera	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum
2	Palapa Ring Integrasi	Nasional	Kementerian Komunikasi dan Digital
Perumahan dan Pemukiman			
APBN			
1	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
NON APBN			
1	Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe	Aceh	BUPP KEK Arun Lhokseumawe

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

4.2.2.1. Tema Pembangunan Aceh Tahun 2026

RKPA tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMA Tahun 2025-2029. Arah kebijakan tahun 2026 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029 adalah penguatan implementasi Syariat Islam, kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dengan strategi, yaitu : (a). Penguatan perdamaian dan penjaminan stabilitas Aceh-Nasional; (b). Pemerataan pembangunan antar kabupaten-kota dan wilayah pedesaan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja; (c). Pengawasan keberlanjutan dana Otonomi Khusus sebagai sumber utama pembangunan; dan (d). Peningkatan kapasitas dan peran Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal perdamaian Aceh. Selain itu, arah kebijakan lainnya adalah peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Arah kebijakan pembangunan untuk penguatan kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dilakukan dengan strategi, yaitu : (a). Membangun infrastruktur yang terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan (b). Membangun infrastruktur pendukung investasi sesuai standar negara maju . Merujuk pada arah kebijakan tersebut dan selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, maka tema pembangunan RKPA Tahun 2026 adalah **“Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja”**. Melalui tema tersebut, fokus pembangunan Aceh tahun 2026 diarahkan untuk (1) mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan serta ketimpangan, (2) mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dan maritim dengan sasaran peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah dan stabilitas ekonomi makro, dan (3) mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal serta industri kreatif. Target sasaran pembangunan Aceh tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4. 7
Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026

Swasembada Pangan dan Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	50,95
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,1
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	41,23
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	83,06
Penurunan Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan (%)	10,60 - 12,00
Rasio Gini	0,287 - 0,291

Indeks Modal Manusia	0,58
Penciptaan Lapangan Kerja	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45 - 4,60

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

Untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Aceh tahun 2026 dan selaras dengan 7 (tujuh) misi pembangunan Aceh Tahun 2025-2029, maka dirumuskan 10 (sepuluh) Prioritas Aceh (PA) tahun 2026. Lebih jelas mengenai 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh tahun 2026 dan keselarasannya dengan misi RPJMA Tahun 2025-2029 dan Prioritas Nasional (PN) tahun 2026 dilihat pada Gambar 4.2, Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 berikut ini.



Gambar 4. 2
10 (Sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

Tabel 4. 8**Keselarasan Antara Misi RPJMA Tahun 2025-2029 dan Prioritas Aceh**

No	Misi RPJMA Tahun 2025-2029	No.	Prioritas Aceh
1	2		3
1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).
2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	2	Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	3	Penurunan Angka Kemiskinan
		4	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim
		5	Penciptaan lapangan kerja
		8	Transformasi digital yang terintegrasi
4	Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	6	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	7	Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi
6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	9	Tata Kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	10	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tabel 4. 9
Keselarasan Antara Prioritas Nasional dan Prioritas Aceh Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Aceh
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).
		Penguatan implementasi kekhususan dan keistiweraan Aceh
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Penciptaan Lapangan Kerja
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;	Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;	Penurunan Kemiskinan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah
		Transformasi Digital yang Terintegrasi
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMN dan RPJMA Tahun 2025-2029

PA-1**Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).**

Prioritas Aceh (PA-1) adalah **Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)**, dengan fokus pada peningkatan pengamalan nilai aqidah, syariah, akhlak dan muamalah. Penguatan pelaksanaan syariat Islam dilakukan dengan beberapa kebijakan antara lain : (a) Pengelolaan Harta Agama (zakat, infaq, sadaqah dan waqaf), (b) Penguatan masjid sebagai rumah ibadah yang juga memiliki fungsi iradah, imarah dan riayah. Disamping itu penggunaan masjid akan difokuskan pada kegiatan pengajian ba'da magrib (semeubet) bagi generasi muda dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam membaca Al Qur'an (Melek Al Qur'an), (c) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dayah. Untuk sasaran pembangunan PA-1 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4. 10
Sasaran Pembangunan PA-1

"Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)"

Indikator	Target 2026
1	2
Indeks Pembangunan Syariat	80,63 - 87,50
Persentase Dayah yang Mandiri	47,19
Indeks Zakat Nasional Aceh	0,65
Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	27,72
Indeks Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Dalam Menjalankan Syariat Islam	84,00
Persentase dimensi toleransi	65,09
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,08 - 74,26
Persentase Potensi Konflik yang Tertangani	100,00

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih detail mengenai Program Prioritas (PP) tahun 2026 yang mendukung PA-1 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4. 11
Program Prioritas Mendukung PA-1

“Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				532.330.257.829	
1	Program Baitul Mal Aceh	Indeks Wakaf Nasional Aceh	Indeks	0,71	199.393.330.656	BAITUL MAL
		Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	Persentase	90		BAITUL MAL
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	75	8.877.835.504	BIRO ISRA SEKDA ACEH
3	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Aceh	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan	Persentase	96	4.655.373.046	MPU
4	Program Pendidikan Dayah	Indeks kompetensi kurikulum dayah	Indeks	68,9	239.856.000.000	DAYAH
		Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	45,05		DAYAH
		Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar	Persentase	64,2		DAYAH
		Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah	Persentase	68,25		DAYAH
5	Program Syariat Islam Aceh	Indeks kesadaran masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam	Persentase	84	79.547.718.623	DSI

Sumber: SIPD RI dan RPJMA 2025-2029

PA-2**Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh**

Prioritas Aceh (PA-2) adalah **Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh**. PA-2 difokuskan pada percepatan peningkatan kesejahteraan serta inklusivitas masyarakat melalui kebijakan penguatan lembaga kekhususan Aceh seperti Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal keberlanjutan perdamaian Aceh, menjamin stabilitas Aceh-Nasional melalui komitmen yang telah ditandatangani sehingga mendorong gaya hidup aktif rakyat Aceh dalam memupuk persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan bagi para kombatan GAM, korban konflik, dan perbedaan antar kelompok masyarakat menjadi prioritas pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4. 12
Sasaran Pembangunan PA-2

“Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh”

Indikator	Target 2026
1	2
Persentase Kajian Wali Nanggroe Terhadap Implementasi MoU Helsinki dan UUPA	90
Indeks Reintegrasi Aceh	0,14
Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	90
Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	53,75
Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	95
Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di aera tempat tinggalnya (%)	62,26
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,11 – 57,15
Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	34,78
Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	24,34

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih detail mengenai program prioritas tahun 2026 yang mendukung PA-2 dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4. 13
Program Prioritas Mendukung PA-2

“Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				98.620.290.270	
1	Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	90,00	28.273.353.057	KKW
2	Program Majelis Adat Aceh (Maa)	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	15	351.007.302	MAA
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	61,86	2.901.000.000	BUDPAR
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar	Organisasi Masyarakat	15	200.000.000	KESBANGPOL
4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah	Persentase	4,38	504.554.604	BUDPAR
	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh	Persentase	13,04	80.939.150	TANAH
5	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota	Persentase	10,53	30.000.000	TANAH

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		yang diselesaikan				
6	Program Pengelolaan Permuseuman	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum	Persentase	0,5	5.500.000.000	BUDPAR
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang dikelola dengan baik	Persentase	90,53	53.901.538	DINSOS
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	0,9	7.875.000.000	BUDPAR
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persentase	4,92	4.465.000.000	BUDPAR
9	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/so sialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase	42	857.383.126	KESBANGPOL
10	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	9.024.282.493	BPBA
		Persentase Penanganan Pra Bencana	Persentase	100		BPBA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100		BPBA
		Persentase penegakan peraturan daerah	Persentase	38		SATPOL PP DAN WH
		Persentase Penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah	Persentase	100		SATPOL PP DAN WH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persentase	81		SATPOL PP DAN WH
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase	79,8		BPBA
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Persentase	80	600.000.000	KESBANGPOL
12	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas	Persentase	17	6.600.000.000	KESBANGPOL

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	Etika Serta Budaya Politik	pendidikan politik				
13	Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Persentase	15,28	31.303.869.000	BRA

Sumber: SIPD RI dan RPJMA 2025-2029 dan SIPD RI

PA-3**Penurunan Kemiskinan**

Prioritas Aceh (PA-3) adalah **Penurunan Kemiskinan**. PA-3 fokus pada percepatan penurunan angka kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, melalui kebijakan antara lain meliputi sebagai berikut: (a). Penggunaan data kemiskinan yang akurat dan terpadu untuk merencanakan melaksanakan dan evaluasi program program pengantasan kemiskinan; (b). Pemberian dukungan modal menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor padat karya; (c). Memberikan dukungan modal pelatihan dan akses pasar bagi UMKM sehingga dapat membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan; (d). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar; (e). Layanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui program jaminan Kesehatan Aceh; (f). Memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pendampingan dibidang kewirausahaan dan manajemen keuangan; (g). Memberikan akses Pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan vokasi untuk dapat meningkatkan peluang ekonomi di masa depan. Sasaran utama pembangunan PA-3 meliputi sebagai berikut (Tabel 4.14).

Tabel 4. 14
Sasaran Pembangunan PA-3
 "Penurunan Kemiskinan"

Indikator	Target 2026
1	2
Tingkat Kemiskinan (%)	10,60 - 12,00

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Program prioritas tahun 2026 yang mendukung PA-3 "Penurunan Kemiskinan" dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4. 15
Program Prioritas Mendukung PA-3
 “Penurunan Kemiskinan”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				474.443.496.752	
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan BUMG Maju	Persentase	4	336.000.000	DPMG
		Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif	Persentase	47		DPMG
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	92.000	39.270.000.000	DKP
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	274.000	19.260.000.000	DKP
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/KAP/TH	156,74	1.600.000.000	PANGAN
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Keberhasilan Panen	Persentase	95,3	350.000.000	TANBUN
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap	Persentase	0,11	70.000.000	DISNAK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		jumlah populasi ternak				
		Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	Persentase	7,87		DISNAK
		Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	Persentase	7,2		DISNAK
7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	59,52	28.222.867.500	DKP
8	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Meningkatnya Kertersediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	400	242.725.600	TANAH
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase	39	46.350.732.000	TANBUN
		Pertumbuhan produksi telur (ayam,	Ton	344.000		DISNAK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		itik, puyuh)				
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,56	76.813.000.770	TANBUN
		Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	Ton	12.500		DISNAK
11	Program Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Surat Keputusan	60	10.915.463.491	TANBUN
		Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	106,43		DISNAK
12	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria	Persentase	10	10.853.613	TANAH
13	Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,211	115.484.100.000	PERKIM
14	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	38,17	5.900.000.000	NAKER
15	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya	Koperasi	6	903.563.041	KOP UKM

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
16	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	68,65	1.446.130.862	DINSOS
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	4,02	54.629.942.500	KOP UKM
18	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	20.785.110.742	DINSOS
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Persentase	92,51		DINSOS

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
19	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK) Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan.	Persentase	100	85.296.000	DINSOS
20	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	Persentase	15	2.078.000.000	DLHK
		Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan (	Persentase	10		DLHK
21	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Persentase	39	400.000.000	KOP UKM
22	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)	Persentase	0,3	15.885.583.000	KOP UKM
		Indek Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	87,01		KOP UKM
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase	0,5		KOP UKM
23	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persentase	99,6	1.122.889.000	ESDM
24	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	Persentase	38,17	150.000.000	NAKER
25	Program Pengembangan Umkm	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	Persentase	1,1	11.223.737.500	KOP UKM

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
26	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	Persentase	38,17	100.000.000	NAKER
27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan	Persentase	31,92	15.459.695.755	DINSOS
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	30,92		DINSOS
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	29,92		DINSOS
28	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100	5.347.805.378	DINSOS
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase	100		DINSOS

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100		DINSOS

Sumber: SIPD RI dan RPJMA Tahun 2025-2029

PA-4**Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim**

Prioritas Aceh (PA-4) adalah “**Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim**”. PA-4 difokuskan pada pengembangan potensi sumberdaya alam dan maritim yang tersedia disertai dengan upaya maksimal untuk meningkatkan nilai tambah. Disamping meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan industrialisasi tersebut juga dimaksudkan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Terdapat beberapa arah kebijakan PA-4 yang meliputi sebagai berikut : (a). Mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian dan kelautan Aceh menjadi produk turunan sebagai komoditas ekspor. Beberapa produk yang diupayakan untuk peningkatan nilai tambah antara lain: komoditi pertanian dan perkebunan seperti *Crude Palm Oil* (CPO), Kopi, Nilam, Karet dan hasil laut; (b). Hilirisasi produk CPO dan Migas akan dilakukan dan akan ditambah dengan hilirisasi sumber daya alam lainnya, seperti mineral lainnya, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi hijau/biru; (c). Pelatihan dan Pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal; (d). Memberikan kemudahan bagi investor serta melakukan perlindungan bagi industri lokal; (e). Mempermudah perizinan, permodalan, dan mengupayakan akses pasar; (f). Mengembangkan inovasi dan penerapan teknologi dan penerapan hilirisasi. Sasaran pembangunan PA-4 disajikan pada Tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4. 16
Sasaran Pembangunan PA-4

“Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim”

Indikator	Target 2026
1	2
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4
Nilai Tukar Petani (Indeks)	119,74
Indeks Inovasi Daerah	58,5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,87
Persentase Dana Untuk Inovasi dari APBA	0,56
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	13,1
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah UKM)	0,41
Proporsi UMKM terhadap Jumlah Angkatan Kerja %)	16,48
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,93

Indikator	Target 2026
1	2
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,9
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,8
Inklusi Keuangan (%)	95,24
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,1
Tingkat Inflasi	1,5 - 3,5
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	1,14
Eksport Barang dan Jasa (% PDRB)	64,78 - 65,44
Indeks Harga Konsumen	110
Persentase Kawasan Transmigrasi Berstatus Mandiri	14,28
Persentase Desa Mandiri	0,95
Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,48
Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata Rata Tahunan	1996602,2
Return of asset (ROA) BUMD (%)	2,1
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	19,87
Total Kredit/PDRB (%)	19,09
Persentase Pemanfaatan Lahan Terlantar	15,64
Indeks Ketahanan Pangan	76,34
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	7,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,77 - 33,10

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas mendukung PA-4 disajikan pada Tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4. 17
Program Prioritas Mendukung PA-4

"Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				23.131.995.604	
1	Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	58	9.504.554.604	BUDPAR

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persentase	4,75	487.441.000	ESDM
3	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri	Persentase	80	21.000.000	INDAG
4	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persentase	30,9	3.200.000.000	BUDPAR
5	Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan ekspor	Persentase	4,00	100.000.000	INDAG
		Nilai Ekspor bersih Aceh	USD	238.421.628		INDAG
6	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah izin yang dikeluarkan	Persentase	100	25.000.000	INDAG
7	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi	Persentase	100	75.000.000	INDAG
8	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Menjamin ketersediaan stok bapakting dan keterjangkauan harga	Persentase	20	80.000.000	INDAG
9	Program perencanaan dan	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	42.202	5.254.000.000	INDAG

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	pembangunan industri					
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persentase	0,59		INDAG
10	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan	Persentase	100	191.890.023	INDAG
11	Program perizinan usaha pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Persentase	90	3.290.000.000	INDAG
12	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	Persentase	6,95	395.000.000	INDAG
13	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase	100	508.109.977	INDAG

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

PA-5**Penciptaan Lapangan Kerja**

Prioritas Aceh (PA-5) adalah "**Penciptaan Lapangan Kerja**". PA-5 fokus pada upaya penciptaan lapangan kerja dalam rangka perluasan lapangan berusaha akan dilakukan dengan arah kebijakan yang meliputi sebagai berikut: (a). Mewujudkan Penguatan UMKM Rakyat Aceh; (b). Mewujudkan Industri Pariwisata dan Industri Halal, dan (c). Mewujudkan industri kreatif. Adapaun sasaran pembangunan PA-5 dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4. 18
Sasaran Pembangunan PA-5
"Penciptaan Lapangan Kerja"

Indikator	Target 2026
1	2
PDRB per Kapita (Rp Juta)	50,95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45 - 4,60
Persentase Lapangan Kerja Menurut Status Formal dan Informal	43,9 - 56,1
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	44,38

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

Lebih detail mengenai program prioritas yang mendukung PA-5 dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 4. 19
Program Prioritas Mendukung PA-5
"Penciptaan Lapangan Kerja"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				900.000.000	
1	Program hubungan industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	32,67	400.000.000	NAKER

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan	%	45,45	350.000.000	NAKER
3	Program pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	1.924	150.000.000	NAKER

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

Berdasarkan Tabel 4.19 diketahui total anggaran dalam rangka mendukung PA-5 relatif sangat kecil yakni sebesar Rp. 900.000.000 dengan didukung oleh tiga program prioritas utama yaitu: 1) Program Hubungan Industrial, 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan 3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Rendahnya anggaran pendukung PA-5 disebabkan karena PA-5 merupakan tujuan/sasaran/dampak dari pelaksanaan dari prioritas pembangunan Aceh lainnya seperti pada PA3- Penurunan Kemiskinan, PA-4 Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim, dan PA-6 Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas.

PA-6**Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas**

Prioritas Aceh (PA-6) adalah **“Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas”**. Fokus PA-6 adalah untuk peningkatan konektivitas, integrasi antar wilayah, serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, dengan sasaran pembangunan PA-6 dapat dilihat pada Tabel 4. 20 berikut ini.

Tabel 4. 20
Sasaran Pembangunan PA-6
“Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas”

Indikator	Target 2026
1	2
Indeks Williamson	0,391
Indeks Ketahanan Air Daerah	3,61
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,82
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	70,47
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	5,70
Konsumsi Listrik per Kapita	714,5
Rasio Konektivitas	0,70
Persentase Kesesuaian Pembangunan dengan Tata Ruang	72,00
Persentase Kepatuhan Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	72,00
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,80

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung PA-6 dapat dilihat pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4. 21
Program Prioritas Mendukung PA-6
 “Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				519.549.086.298	
1	Program kebijakan administrasi pembangunan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan Pembangunan	Persentase	87	1.552.264.217	BIRO ADPEM SEKDA ACEH
2	Program penataan bangunan gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase	81,00	10.400.000.000	PERKIM
3	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	2	10.610.834	TANAH
4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional	Persentase	4,5	1.080.488.000	PERKIM
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota	Persentase	16,5	1.419.512.000	PERKIM
6	Program pengelolaan pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	78,49	1.392.932.000	DISHUB
7	Program pengelolaan perkeretaapian	Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta	Persentase	20	810.000.000	DISHUB

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Api dengan Jalan Provinsi				
8	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Kapasitas Air Baku	Persentase	0,65	23.008.274.200	PENGAIRAN
9	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	3,12	130.411.442	PUPR
10	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase	18	13.600.277.302	BUDPAR
11	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	Persentase	67,88	373.537.055.000	PERKIM
12	Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	Persentase	81,44	48.589.978.543	PUPR
13	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	76,96	43.509.942.760	DISHUB
14	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	Persentase	82	507.340.000	PUPR

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

PA-7**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi**

Prioritas Aceh (PA-7) adalah “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi**”. PA-7 fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak untuk menekankan pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Adapun sasaran pembangunan PA-7 dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4. 22
Sasaran Pembangunan PA-7

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi”

Indikator	Target 2026
1	2
Indeks Modal Manusia	0,58
Harapan Lama Sekolah	14,77 - 14,78
Kualitas Pendidikan (SPM)	73,17
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	9,75 - 14,00
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	1,00 - 3,50
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	59,24
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	31,35 - 33,50
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	28,00 - 29,8
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,66
Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,37 - 10,39
Tingkat Kegemaran Membaca	72,00
Usia Harapan Hidup (UHH)	70,84
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	93,21

Indikator	Target 2026
1	2
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	72,50
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,35
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,34
Indeks Kesejahteraan Sosial	0,572
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24,06
Indeks Pembangunan Olahraga	0,51
Indeks Pembangunan Pemuda	64,00

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-7 dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut.

Tabel 4. 23
Program Prioritas Mendukung PA-7

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				1.263.783.778.358	
1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP	Persentase	43	100.000.000	DPMG
2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin	Persentase	1,11	400.000.000	KOP UKM
3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persentase	58	220.000.000	DINKES
4	Program pembinaan perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat	(Indeks)	74,25	3.879.378.323	ARPUS

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
5	Program pemenuhan hak anak (pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	(Indeks)	66,47	1.110.183.454	DPMG
		Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA)	Persentase	82,6		DPMG
6	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Balita (AKBa)	(Per 1.000 Kelahiran)	8	358.246.182.471	DINKES
		Prevalensi Stunting	Persentase	25,6		DINKES
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persentase	10,5		DINKES
		Persentase RS Regional yang Fungsional	Persentase	40		DINKES
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	41,3		DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Persentase	100		DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa	Persentase	100		DINKES
		Angka Kematian Ibu (AKI)	((per 100.000 kelahiran hidup))	79		DINKES
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (	Persentase	99,5		DINKES
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	72,5		DINKES
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	46		DINKES

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	10		DINKES
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		DINKES
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSIA
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSJ
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSUDZA
7	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru SDLB	Nilai	0,33	76.920.000	DISDIK
		Indeks Distribusi Guru SMA	Nilai	0,58		DISDIK
		Indeks Distribusi Guru SMALB	Nilai	0,33		DISDIK
		Indeks Distribusi Guru SMK	Nilai	0,6		DISDIK
		Indeks Distribusi Guru SMPLB	Nilai	0,33		DISDIK
		Proporsi PTK bersertifikat SDLB	Persentase	42,00		DISDIK
		Proporsi PTK bersertifikat SMA	Persentase	64,00		DISDIK
		Proporsi PTK bersertifikat SMALB	Persentase	42,00		DISDIK
		Proporsi PTK bersertifikat SMK	Persentase	59,00		DISDIK
		Proporsi PTK bersertifikat SMPLB	Persentase	73,00		DISDIK
8	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas SDM	Koperasi	200	400.000.000	KOP UKM
9	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	Persentase	10	484.223.378	DPMG
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	50.70-52.75		DPMG

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Program pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Kearsipan	Rasio	77,00	1.109.105.786	ARPUS
11	Program pengelolaan pendidikan	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	57,00	781.234.325.270	DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB (Nilai)	Nilai	82,00		DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA	Nilai	74,00		DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB (Nilai)	Nilai	78,00		DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK (Nilai)	Nilai	72,00		DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB (Nilai)	Nilai	76,00		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	Nilai	76,00		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Nilai	74,00		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB (Nilai)	Nilai	74,00		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK (Nilai)	Nilai	72,00		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB (Nilai)	Nilai	74,00		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SDLB (Nilai)	Nilai	74,00		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SMA (Nilai)	Nilai	2,00		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SMALB (Nilai)	Nilai	72,00		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SMPLB (Nilai)	Nilai	83,00		DISDIK
		Indeks Literasi SDLB (Nilai)	Nilai	91,00		DISDIK
		Indeks Literasi SMA	Persentase	72,00		DISDIK
		Indeks Literasi SMALB	Persentase	83,00		DISDIK
		Indeks Literasi SMK	Persentase	62,00		DISDIK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Literasi SMPLB	Persentase	86,00		DISDIK
		Indeks Numerasi SDLB	Persentase	84,00		DISDIK
		Indeks Numerasi SMA	Persentase	74,00		DISDIK
		Indeks Numerasi SMALB (%)	Persentase	85,00		DISDIK
		Indeks Numerasi SMK	Persentase	61,00		DISDIK
		Indeks Numerasi SMPLB	Persentase	85,00		DISDIK
		Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK	Persentase	87,00		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SDLB	Nilai	71,00		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMA	Nilai	66,00		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMALB	Nilai	70,00		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMK	Nilai	65,00		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMPLB	Nilai	69,00		DISDIK
		Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	87,00		DISDIK
12	Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga	Persentase	57,57	55.312.000.000	PORA
13	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	Persentase	0,04	3.770.000.000	PORA
14	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	Persentase	95	3.000.000.000	PORA
15	Program pengembangan sumber daya manusia	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal	(Orang)	150	38.822.320.867	BPSDM

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	1,8		BPSDM
16	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persentase	0,05	2.300.000.000	BUDPA R
17	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Persentase	2,3	121.369.950	DP3A
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	(Indeks)	63,2		DP3A
18	Program pengendalian perizinan pendidikan	Akreditasi Sekolah SLB	Persentase	80	51.585.955	DISDIK
		Akreditasi Sekolah SMA	Persentase	93		DISDIK
		Akreditasi Sekolah SMK	Aduan	97		DISDIK
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar	Persentase	26	11.919.648.000	RSUDZA
20	Program peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	Persentase	70	89.301.020	DP3A
		Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitas keluarga	Persentase	21,50		DP3A
21	Program penyelenggaraan majelis pendidikan aceh	umlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan	Rasio	1,6	158.250.604	MPA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		target atau kebutuhan kebijakan				
22	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	45	208.519.000	KOMINSA
23	Program perizinan penggunaan arsip	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,5	100.368.200	ARPUS
24	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat DigitalisasiArsip	Indeks	94,5	40.840.000	ARPUS
25	Program perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	76,15	130.864.550	DP3A
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	80		DP3A
26	Program perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	498.391.530	DP3A

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

PA-8**Transformasi Digital yang Terintegrasi**

Prioritas Aceh (PA-8) adalah **“Transformasi Digital yang Terintegrasi”** PA-8 fokus pada peningkatan digitalisasi dan teknologi maju (*advance technology*) dengan arah kebijakan yang meliputi: (a). Intensifikasi ekonomi digital, (b). pengarusutamaan digitalisasi untuk mencapai pembangunan inklusif, dan (c). Percepatan R&D dan C&I serta memanfaatkan potensi teknologi maju. Adapun sasaran pembangunan PA-8 dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4. 24
Sasaran Pembangunan PA-8
“Transformasi Digital yang Terintegrasi”

Indikator	Target 2026
1	2
Indeks Transformasi Digital	50,73

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-8 dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut.

Tabel 4. 25
Program Prioritas Mendukung PA-8
“Transformasi Digital yang Terintegrasi”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				21.921.032.532	
1	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	82	10.100.000.000	BIRO PBJ
2	Program pembangunan sistem informasi pertanahan	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan se kab/kota se Aceh	Persentase	13,04	202.696.732	TANAH
3	Program pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai LPPD	Persentase	2,95	2.039.944.220	BIRO PEMOTDA
		Persentase kerjasama daerah	Persentase	40		BIRO PEMOTDA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi	Persentase	33,33		BIRO PEMOTDA
4	Program penataan organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	Persentase	88	1.112.493.192	BIRO ORGAN
5	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,06	3.609.917.388	KOMINSA
6	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	81,2	4.764.500.000	KOMINSA
7	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	45	91.481.000	KOMINSA

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2026

PA-9**Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah**

Prioritas Aceh (PA-9) adalah **"Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah"**. PA-9 fokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pemerintahan Aceh melalui reformasi dan inovasi, dengan arah kebijakan yang meliputi sebagai berikut: (a). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Aceh melalui pengembangan sistem informasi dan pengawasan yang efektif; (b). Pengembangan pemerintahan yang berbasis pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; (c). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif; (d). Penguatan kelembagaan pemerintahan Aceh dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan. Adapun sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut.

Tabel 4. 26
Sasaran Pembangunan PA-9

"Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah"

Indikator	Target 2026
1	2
Indeks Reformasi Birokrasi	82,00
Indeks Pelayanan Publik	4,50
Nilai SAKIP	68
Opini BPK	WTP
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94,00
Indeks Profesionalisme ASN	84.55
Indeks Demokrasi Indonesia	77,65 - 77,70
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	76,00
Indeks Reformasi Hukum	71,00
Maturitas SPIP terintegrasi	3,00
Indeks Transformasi Digital	50,73
Indeks Integritas Nasional	71,1

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-9 dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut. Dari Tabel 4.27 diketahui pagu indikatif untuk

mendukung PA -9 Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah berjumlah sebesar Rp. 7.295.511.665.890. Besarnya alokasi anggaran pendukung PA-9 diakibatkan karena alokasi ini mencakup program pendukung urusan pemerintah daerah provinsi yang meliputi gaji dan tunjangan ASN serta kegiatan rutin seluruh SKPA yang berjumlah sebesar Rp. 5.390.795.442.540. Selain itu, juga terdapat alokasi anggaran transfer dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang terdapat pada BPKA yang meliputi DOKA sebesar Rp. 870.391.474.000, TDBH Migas sebesar Rp. 27.778.401.700 serta Bankeu ke beberapa kabupaten/kota seperti KIP Kab. Aceh Timur (Rp. 3.165.959.002), Bankeu Infrastruktur ke Kab. Abdya, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Barat, Kota Banda Aceh (sebesar Rp. 10.000.000.000 per kab/kota) serta Bankeu PORA Kab. Aceh Jaya sebesar Rp. 80.000.000.000.

Tabel 4. 27
Program Prioritas Mendukung PA-9
 “Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah”

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				7.295.511.665.890,03	
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA	Persentase	95	73.319.315.603	SEKWAN
2	Program fasilitasi dan koordinasi hukum	Indeks penyelesaian fasilitas perundangundangan	Persentase	85	4.562.912.863	BIRO HUKUM SEKDA ACEH
		Persentase penyelesaian bantuan hukum	Persentase	85		BIRO HUKUM SEKDA ACEH
3	Program kepegawaian daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	Persentase	98	162.727.483	BAPPEDA
4	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang	Persentase	100	4.524.627.832	BAPPEDA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Infrastruktur dan Kewilayahan				
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,R KPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100		BAPPEDA
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,R KPA) bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100		BAPPEDA
5	Program pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,15	483.459.800	DPMPTSP
6	Program pelayanan penghubung	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	Persentase	70	4.724.537.998	BPA
7	Program pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persentase	98	99.204.430	DRKA
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100		DRKA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100		DRKA
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100		DRKA
8	Program pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	22,9	164.790.600	DRKA
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	55		DRKA
9	Program penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Kematangan Organisasi Kelitbangan	Indeks	55,00	1.788.185.943	BAPPEDA
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	65		BAPPEDA
10	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	Persentase	90,8	203.332.866	BPKA
11	Program pengelolaan data dan sistem	Persentase Data dan Sistem Informasi	Persentase	100	62.356.000	DPMPTSP

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	informasi penanaman modal	Penanaman Modal yang dapat di akses				
12	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	59,68	219.763.450	DRKA
13	Program pengelolaan keuangan daerah	Penetapan APBA tepat waktu (Indeks kualitas pelayanan keuangan)	Indeks	3,2	1.767.338.626.832	BPKA
14	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	Persentase	27,66	19.633.544.304	BPKA
15	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	48.952.180	DRKA
16	Program pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan	Persentase Meningkatnya perankelembagaan pertanahan secara mandiri (%)	Persentase	75,000	134.101.018	TANAH
17	Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	triliun rupiah	9,80	191.394.950	DPMPTSP
18	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM	Persentase	100	123.060.000	DPMPTSP
19	Program penunjang urusan pemerintahan	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran	Persentase	100	5.390.795.442.540	SEMUA SKPA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	daerah provinsi					
20	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Persentase	80	7.236.980.000	INSPEKTORAT
21	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,25	399.998.500	KOMINSA
22	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase perumusan dan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	99	2.000.000.000	BIRO EKONOMI SEKDA ACEH
23	Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundangundangan	Persentase	100	14.607.466.783	BAPPEDA
24	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	2.028.280.000	INSPEKTORAT
24	Program promosi penanaman modal	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	200	376.322.708	DPMPSTP
25	Program riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan	Persentase	82	260.079.580	BAPPEDA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Inovasi di Daerah				
		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase	82		BAPPEDA
26	Program survei, pengukuran dan pemetaan	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	Persentase	11,00	22.201.627	TANAH

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2026

PA-10**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Prioritas Aceh (PA-10) adalah **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”**. PA-10 fokus pada penguatan manajemen kelestarian lingkungan dan ekosistemnya dengan arah kebijakan yang meliputi sebagai berikut; (a). Pengembangan program lingkungan, (b). Pengadaan teknologi lingkungan dan (c). peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Adapun dengan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut.

Tabel 4. 28
Sasaran Pembangunan PA-10
“Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”

Indikator	Target 2026
1	2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,06
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,06
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,596
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	18,57
Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	106,62
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,07
Indeks Risiko Bencana (IRB)	179,88
Indeks Ketahanan Daerah	0,51
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Kumulatif	41,23

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-10 dapat dilihat pada Tabel 4.29 berikut.

Tabel 4. 29
Program Prioritas Mendukung PA-10
"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				108.247.962.911	
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,595	7.028.179.720	DLHK
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	Persentase	35	125.000.000	DLHK
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	10	101.300.000	DLHK
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55	2.782.052.879	BPBA
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	149691,39	90.000.000	DKP
6	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Km2	6200	411.550.253	ESDM
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Rehabilitasi lahan di sempadan sungai	Ha	15	1.000.000.000	DLHK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
8	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	Persentase	20,86	67.018.561.300	ESDM
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase	20	85.000.000	DLHK
10	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	107,13	22.140.000.000	DKP
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	55	4.600.000.000	DLHK
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persentase Rumah Tangga	26,88		DLHK
12	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	7855	77.620.000	DLHK
13	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	77,57	1.934.220.000	DLHK
14	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	6	132.242.000	DLHK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026		SKPA
				Indikator	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
15	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persentase	15	277.336.759	DLHK
		Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan	Persentase	10		DLHK
16	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	80	444.900.000	DLHK

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2026

Selanjutnya, pada Tabel 4.30 disajikan Program Prioritas Aceh Tahun 2026 yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional sebagaimana yang terdapat dalam RKP Tahun 2026.

Tabel 4. 30
Program Prioritas Aceh Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026		SKPD
1	2	3	4		5
PN4	MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN	Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan didaerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
	PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
P2	MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	Pengembangan hilirisasi kelapa	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026		SKPD
1	2	3	4		5
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
		Pengembangan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		DINAS PANGAN
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP lumbung pangan)		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
		Pengembangan pangan alami		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS PANGAN
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		
					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
				Penataan Prasarana Pertanian		
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			DINAS PETERNAKAN
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
					Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			DINAS PETERNAKAN
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
					Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
					Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
		Pengembangan pangan akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai 12 Mil		
					Pengadaan Sarana Pendukung untuk Pelaksanaan Penangkapan Ikan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	
		Konservasi sumberdaya air	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			DINAS PENGAIRAN
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	
					Pembangunan Tanggul Sungai	
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Rehabilitasi Tanggul Sungai	
					Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Normalisasi/Restorasi Sungai	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026			SKPD
1	2	3	4			5
					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha-3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.		
					Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Pembangunan Bendung Irigasi	
					Rehabilitasi Bendung Irigasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026		SKPD
1	2	3	4		5
PN3	MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	
				Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPA 2026		SKPD
1	2	3	4		5
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

Sementara itu, dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional tahun 2026 terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPA Tahun 2026 yang mendukung highlight intervensi nasional di Aceh tahun 2026 sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 4.31 berikut.

Tabel 4. 31

Keselarasan Highlight Intervensi RKP Tahun 2026 dengan Program Prioritas Aceh Tahun 2026

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
	Provinsi Aceh	Direktif Presiden	Provinsi Aceh	Direktif Presiden	
		Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi dengan output:			
		Ω Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis;		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		Ω Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional;	Aceh	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	
		Ω Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
				Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		Ω Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN UKM
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
		Ω Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor;	Aceh	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Direktif Presiden			
		Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:			
		Ω SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
		Ω SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
		Ω SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus	
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
		Direktif Presiden			
		Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output:			
		Ω Peningkatan kapasitas usaha koperasi	Aceh	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN UKM

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Ω	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi	Aceh	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI DAN UKM
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output:					
		Ω	Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur;		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
		Ω	Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH);	Aceh	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Ω	Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
		Ω	Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan;			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
		Ω	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
					Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
		Ω	Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan;	Aceh Jaya dan Aceh Barat Jaya	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
				Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
					Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
		Ω	Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Ω	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan;	Aceh	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
		Ω	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan;	Aceh	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN
		Ω	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
		Ω	Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
		Ω	Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik;		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
					Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
		Ω	Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana;	Aceh	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

RKP 2026				RKPA 2026				
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SKPA
1	2	3		5	6			7
							Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
		Ω	Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya;	Aceh	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			DINAS SOSIAL
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
							Penyediaan Permakanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
							Penyediaan Alat Bantu	

RKP 2026			RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3	5	6		7
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
A1/A7	Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho (A1) dan KPBPB Sabang (A7) (Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar dan Kota Sabang)	Ω Pembangunan jalan missing link Jantho-Keumala;	Aceh	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DINAS PUPR
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Rekonstruksi Jalan	
		Ω Pembangunan TPST Regional Aceh;		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
		Ω	Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) Zainal Abidin	Banda Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		RSUDZA
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
A2	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe (Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara, Kab.	Ω	Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara;	Aceh Utara	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
	Aceh Besar, Kab. Bireuen)				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		Ω Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
		Ω	Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi;	Aceh	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		Ω	Rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
						Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
A3	Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ω	Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Redelong-Takengon dan Takengon-Blangkejeren;	Aceh	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DINAS PUPR

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
	Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar (Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah, Kab. Gayo Lues)				
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Rekonstruksi Jalan	
		Ω Pembangunan Jembatan Enang-Enang (Kab. Bener Meriah);	Aceh	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
				Pembangunan Jembatan	
A4	Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kab. Aceh Barat	Ω Preservasi jalan ruas Takengon-Meulaboh, Meulaboh-Calang, Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;	Aceh	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	

RKP 2026			RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3	5	6		7
					Rekonstruksi Jalan	
A5	Kawasan Perkotaan Langsa, Kota Langsa	Ω Pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa;	Aceh	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DINAS PUPR
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Rekonstruksi Jalan	
A6	Kawasan Perkotaan Subulussalam, Kota Subulussalam	Ω Pengembangan SPAM Perkotaan Subulussalam;	Subulussalam	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
C1	Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang)	Ω Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Alue Ubay, D. I. Krueng Pase, D. I. Jambo Aye, D. I. Krueng Tiro;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pengairan
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
		Ω Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Sigli;		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
					Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
		Ω	Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Pangkalan Susu;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
						Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
		Ω	Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu:	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		Kab. Aceh Besar: Mesjid Raya;		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
		Kab. Pidie: Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga;		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
		Kab. Pidie Jaya: Panteraja, Meurah Dua, Ulim;			
		Kab. Bireuen: Kuala;			
		Kab. Aceh Utara: Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat;			
		Kota Lhokseumawe: Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat;			

RKP 2026			RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3	5	6		7
		Kab. Aceh Timur: Madat, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun;				
		Kota Langsa: Langsa Barat;				
C2	Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo (Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah)	Ω Revitalisasi Danau Laut Tawar;		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DINAS PENGAIRAN
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	
		Ω Pembangunan infrastruktur PLTA Peusangan I & II #2;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya)	Ω Pembangunan jaringan irigasi pada D. I. Lhok Guci, D. I. Susoh;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PENGAIRAN
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

RKP 2026				RKPA 2026				
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SKPA
1	2	3		5	6			7
							Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Ω	Preservasi Jalan Ruas BTS. Kota Banda Aceh - Calang);	Aceh	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			DINAS PUPR
						Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
						Rekonstruksi Jalan		
		Ω	Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Kab. Nagan Raya;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
							Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
D1	Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan), Kab. Simeulue	Ω Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeulue, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pembangunan sistem drainase, pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi, serta perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;	Aceh	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	
		Ω Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya	Aceh	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		percepatan pengentasan kemiskinan;			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo (Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah)	Ω Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PENGAIRAN
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

RKP 2026				RKPA 2026				
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SKPA
1	2	3		5	6			7
							Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
							Rehabilitasi Bendung Irigasi	
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	
							Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
B2, B3, B4	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Pesisir Timur Aceh (B2) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (B3)	Ω	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			DINAS PENGAIRAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
	B4: Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Utara-Timur Aceh: Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Besar, Pesisir Timur-Utara	Ω Fasilitas prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit	Aceh	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		Ω Fasilitas pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi;		Penataan Prasarana Pertanian	
		Ω Fasilitas potensi usaha koperasi sektor agromaritim		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
		Ω Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma;			
		Ω Volume biofuel untuk domestik;			
		Ω Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan;		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
				Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Leuser (Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tenggara, Aceh Selatan)	Ω Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;	10 KPH Wil Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
	Provinsi Aceh	Ω Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T;	Aceh Singkil, Pidie, Simeulue, Gayo Lues, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
				Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
		Ω Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan;	Bireuen dan Aceh Selatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RKP 2026				RKPA 2026			
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
						Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
		Ω	Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat;	Aceh Selatan, Bireuen dan Bener Meriah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
		Ω	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan;	Bireuen dan Aceh Selatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
		Ω Rehabilitasi hutan mangrove;	10 KPH Wil Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
				Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
		Ω Optimasi Lahan;	Aceh	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
		Ω Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP);	Aceh Utara	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Ω Layanan Kesehatan Hewan;	Aceh	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PETERNAKAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
		Ω Ternak Unggas;	Aceh	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
		Ω Kawasan Kelapa;	Simeulue	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
		Ω Ternak Ruminansia Potong;	Aceh	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
		Ω Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;	Aceh	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	DINAS PERTANAHAN
				Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	
				Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	
		Ω Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		Ω Membangun unit sekolah baru SMA;	Aceh	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

RKP 2026				RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3		5	6	7
		Ω	Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Ω	Menanggulangi TB di tempat kerja;		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Ω	Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh;	Aceh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		Ω Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Ω Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC;	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		Ω Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat;		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Ω Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan;		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Ω Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Ω Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Ω Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Ω Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		Ω Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Ω Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Ω Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Ω Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Ω Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Ω Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D;	Aceh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

RKP 2026			RKPA 2026		
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPA
1	2	3	5	6	7
		Ω Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan;		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
		Ω Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri;	Aceh	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KSEHATAN
				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Ω Menyusun rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMINSA
		Ω Melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers;		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	

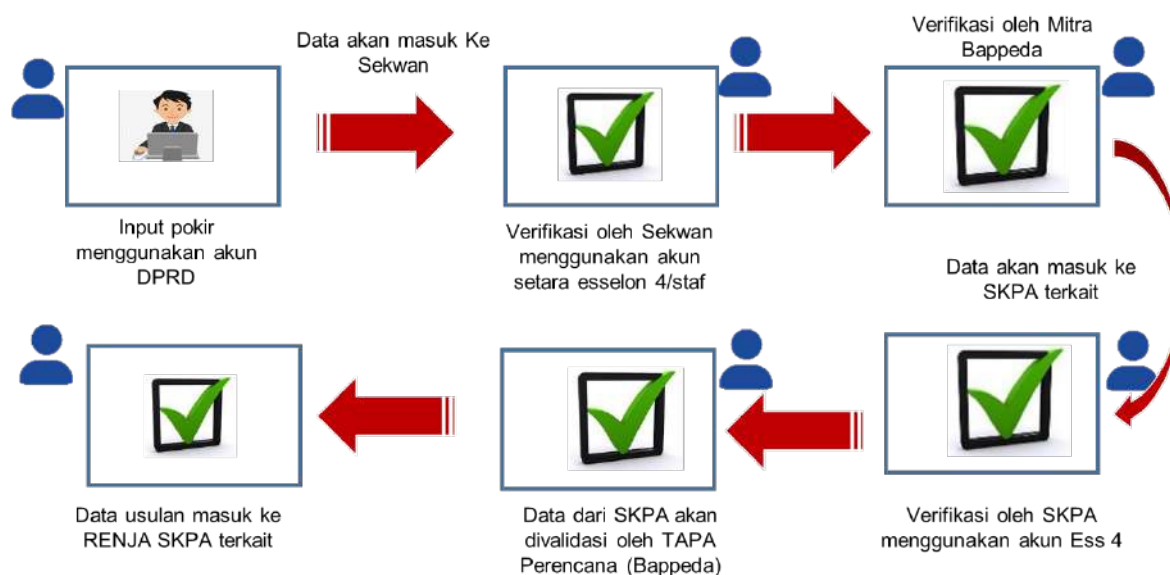
RKP 2026			RKPA 2026				
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SKPA
1	2	3		5	6		7
		Ω	Memfasilitasi uji kompetensi wartawan;			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		Ω	Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;				
		Ω	Menyusun rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;				
		Ω	Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;				
		Ω	Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers;				
		Ω	Mengawasi lembaga penyiaran tv dan radio;				
		Ω	Menyiarkan informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;				

RKP 2026				RKPA 2026				
No	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SKPA
1	2	3		5	6			7
		Ω	Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;					
		Ω	Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran;					
		Ω	Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;	Aceh	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			DINAS PERTANAHAN
		Ω	Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;			Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi		
							Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	

4.2.3. Penelaahan Pokok Pokok Pikiran

Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program/kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPA tahun 2026 pokok pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan riil anggaran oleh Bappeda setelah berkoordinasi dengan SKPA terkait. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam SIPD dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 4. 3
Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRA

POKIR memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan RKPD. Hal ini disebabkan karena melalui POKIR yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh

seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Melalui penyampaian POKIR ini akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, berdasarkan masukan hasil penelaahan POKIR yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan akan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan.

4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026

Arah pembangunan Aceh tahun 2026, sesuai dengan tahapan RPJMA Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut:

Tabel 4. 32
Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026

Arah Kebijakan	
Arah kebijakan pembangunan Aceh Tahap I difokuskan pada :	
1.	Penguatan implementasi Syariat Islam, kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dengan strategi, yaitu :
a.	Penguatan perdamaian dan penjaminan stabilitas Aceh-Nasional;
b.	Pemerataan pembangunan antar kabupaten-kota dan wilayah pedesaan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
c.	Pengawasan keberlanjutan dana Otonomi Khusus sebagai sumber utama pembangunan; dan
d.	Peningkatan kapasitas dan peran Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal perdamaian Aceh.
2.	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Arah kebijakan pembangunan untuk penguatan kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dilakukan dengan strategi, yaitu :
a.	Membangun infrastruktur yang terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan
b.	Membangun infrastruktur pendukung investasi sesuai standar negara maju.

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

4.3. Inovasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”, regulasi dimaksud diperkuat dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Selanjutnya

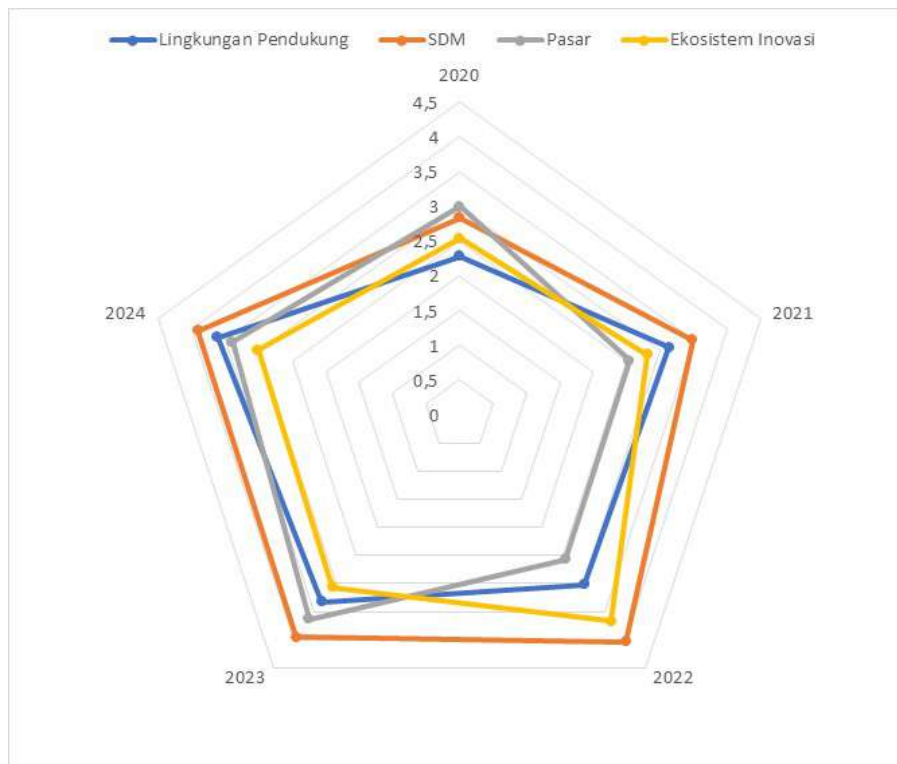
melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh, Pemerintah Aceh juga menekankan akan pentingnya penerapan inovasi dalam setiap aspek penyelenggaraan sistem birokrasi, tata Kelola Pemerintahan, dan aspek penting lainnya.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat penting bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan daya saing dan produktivitas di daerah mengingat IDSD menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pengukuran IDSD ini melibatkan empat aspek utama, yaitu Ekosistem Inovasi, Pasar/Market, Sumber Daya Manusia (SDM)/Human Capital, dan Penguat/Enabling Environment. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator yang digunakan untuk menilai keempat aspek tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dirilis oleh Kemenristek, Aceh termasuk dalam kategori daerah dengan daya saing tinggi, dengan nilai 2,66 pada tahun 2020 dan 2,99 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, nilai IDSD yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak lagi menggunakan kategori seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai gantinya, pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada perbandingan antar daerah secara objektif dan terukur, dengan menggunakan indikator yang lebih spesifik.

Nilai IDSD Aceh pada tahun 2022 mencapai 3,15, mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena meredanya kondisi Covid-19 di Aceh, yang memungkinkan aktivitas ekonomi kembali berjalan, serta berkat dampak dari diterbitkannya Keppres No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Aspek IDSD di tahun 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan. Peningkatan terjadi pada aspek komponen SDM, ekosistem inovasi dan pasar. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek komponen lingkungan pendukung, dimana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar perekonomian daerah. Pada tahun 2023 dan 2024 aspek ekosistem inovasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertama, kurangnya keanekaragaman sektor dan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah yang membatasi potensi inovasi; kedua, keterbatasan dana riset dan fasilitas penelitian, serta tantangan dalam komersialisasi inovasi yang menyebabkan banyak produk inovatif gagal mencapai pasar. Lebih lanjut untuk aspek lingkungan pendukung, pasar dan SDM mengalami peningkatan. Hal ini sangat ditentukan oleh berbagai hal, seperti perbaikan infrastruktur, transparansi pemerintahan, kemajuan sektor pendidikan dan pelatihan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pemerintah Aceh dan sektor swasta diharapkan terus memperbaiki berbagai aspek ini, menciptakan iklim yang lebih baik untuk investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperbaiki konektivitas serta pelayanan publik, yang pada

gilirannya mendukung perkembangan pasar dan ekosistem inovasi di daerah tersebut. Aspek yang memiliki rata-rata nilai IDSD tertinggi adalah aspek SDM sebesar 3,95 (2023) dan 3,92 (2024) sedangkan aspek yang memiliki rata-rata nilai IDSD terendah adalah aspek ekosistem inovasi sebesar 3,06 (2023) dan 3,01 (2024). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.33 dibawah ini:



Gambar 4. 4

Nilai Indeks Inovasi Aceh Tahun 2020-2024

Dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024, Provinsi Aceh memiliki skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata skor di tingkat kabupaten/kota di Aceh. Hal ini mencerminkan adanya variasi dalam daya saing antar daerah di dalam provinsi tersebut. Untuk memahami hubungan ini, dapat dilihat hubungan antara aspek dan pilar IDSD Provinsi Aceh dengan rata-rata skor kabupaten/kota di Aceh secara lebih mendalam seperti yang tersaji pada Tabel 4.33 dibawah ini.

Tabel 4. 33
Perbandingan Daya Saing Provinsi Aceh dengan Rata-Rata Kabupaten/Kota
Berdasarkan Aspek dan Pilar IDSD 2024

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROVINSI ACEH	4,70	2,75	3,12	3,88	3,78	4,05	4,36	2,76	2,10	4,35	2,78	3,24	3,49
RATA-RATA KAB/KOTA	4,43	2,82	3,78	3,80	3,64	3,88	3,37	3,22	2,18	3,78	4,04	1,86	3,40
SIMEULUE	4,31	2,31	3,92	3,92	3,39	3,79	3,81	2,39	1,78	3,34	4,19	1,88	3,25
ACEH SINGKIL	4,41	3,00	4,17	3,44	3,57	3,58	3,73	3,22	2,37	3,37	3,69	0,98	3,29
ACEH SELATAN	4,54	2,72	3,35	4,06	3,32	3,97	3,56	3,04	2,62	3,77	4,04	1,23	3,35
ACEH TENGGARA	3,76	2,58	2,60	3,79	3,64	3,94	3,65	2,70	2,80	3,66	3,91	1,67	3,22
ACEH TIMUR	4,63	2,61	3,10	3,56	3,68	3,43	2,85	2,97	2,07	4,05	3,66	1,27	3,16
ACEH TENGAH	4,30	3,05	3,60	3,67	3,69	4,01	2,97	2,48	1,71	3,92	4,21	2,30	3,32
ACEH BARAT	4,63	2,73	3,93	3,69	3,62	3,72	2,15	3,05	2,19	4,01	4,33	2,75	3,40
ACEH BESAR	4,58	3,46	3,91	3,99	3,77	3,70	3,87	3,40	1,96	4,15	4,20	2,55	3,63
PIDIE	4,61	2,80	3,10	3,58	3,53	3,83	3,50	3,48	1,94	4,04	3,82	2,51	3,39
BIREUEN	4,65	3,22	3,94	3,64	3,89	4,17	4,01	3,38	1,35	4,16	4,39	2,35	3,60
ACEH UTARA	4,51	2,55	3,83	2,99	3,68	3,64	2,27	2,98	1,63	4,36	3,60	2,78	3,24
ACEH BARAT DAYA	4,68	2,33	3,51	4,38	3,38	4,00	3,75	3,45	2,16	3,61	4,04	0,74	3,34
GAYO LUES	4,37	2,47	2,74	3,89	3,41	3,93	2,83	1,94	1,67	3,42	3,58	1,15	2,95
ACEH TAMIANG	4,31	3,03	4,04	3,72	3,76	3,69	2,24	3,23	2,07	3,91	4,25	0,92	3,26
NAGAN RAYA	4,62	2,65	3,87	3,01	3,72	3,73	1,84	3,18	2,54	3,99	3,75	1,07	3,16
ACEH JAYA	4,75	3,04	3,41	4,02	3,55	4,20	3,24	3,76	1,52	3,43	3,90	1,38	3,35
BENER MERIAH	4,44	2,48	3,65	3,79	3,72	4,17	2,18	2,02	1,36	3,71	4,18	1,35	3,09
PIDIE JAYA	4,76	2,72	3,09	3,98	3,80	4,08	3,14	3,77	1,74	3,54	4,18	1,14	3,33
BANDA ACEH	4,23	3,32	4,87	3,91	3,92	3,92	5,00	4,15	3,74	4,34	4,54	3,96	4,16
SABANG	4,61	3,33	4,72	4,24	3,84	4,33	4,47	3,30	3,06	3,17	4,06	2,17	3,77
LANGSA	4,18	2,93	4,77	3,96	3,74	3,90	5,00	3,92	2,38	3,73	4,49	3,18	3,85
LHOKSEUMAWE	4,25	2,98	4,75	4,11	3,93	3,82	4,39	4,51	2,61	4,00	3,92	2,87	3,85
SUBULUSSALAM	3,77	2,61	4,10	3,98	3,29	3,71	3,02	3,67	2,96	3,28	3,97	0,68	3,25

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan Tabel 4.33 diatas dapat kita uraikan aspek dan pilar IDSD 2024, sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendukung

Lingkungan Pendukung di IDSD mengacu pada pilar-pilar yang berkaitan dengan institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro. Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang kuat di beberapa bidang, meskipun ada tantangan di beberapa sektor. Pada Pilar Institusi, Provinsi Aceh mencatat skor tinggi 4,70, yang mencerminkan keberhasilan kelembagaan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Di tingkat kabupaten/kota, skor sedikit lebih rendah di 4,43, namun tetap menunjukkan bahwa struktur kelembagaan daerah mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Namun, pada Pilar Infrastruktur, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Provinsi Aceh hanya meraih skor 2,75, yang menunjukkan masih adanya

kekurangan dalam hal infrastruktur yang memadai. Sementara itu, rata-rata skor kabupaten/kota sedikit lebih baik, yaitu 2,82, mengindikasikan bahwa beberapa daerah di dalam provinsi telah berhasil memperbaiki kualitas infrastruktur meski masih ada tantangan di banyak tempat. Untuk Pilar Adopsi TIK, yang semakin penting di era digital ini, Provinsi Aceh meraih skor 3,12, yang menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi. Namun, di tingkat kabupaten/kota, skor lebih tinggi di angka 3,78, yang menggambarkan adopsi TIK yang lebih pesat di beberapa wilayah, memberi harapan bahwa teknologi semakin mendukung efisiensi dan inovasi di daerah-daerah tersebut.

Sementara itu, pada Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, Provinsi Aceh mencatat skor yang solid 3,88, menunjukkan stabilitas ekonomi yang cukup baik dan menciptakan iklim usaha yang lebih terprediksi. Rata-rata kabupaten/kota di Aceh juga menunjukkan skor yang hampir setara, yaitu 3,80, menandakan bahwa kestabilan ekonomi sudah merata di berbagai wilayah di Aceh. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Aceh menunjukkan hasil yang kuat dalam hal kelembagaan dan ekonomi, masih ada ruang untuk perbaikan di sektor infrastruktur dan adopsi teknologi, yang jika ditingkatkan, akan semakin memperkuat daya saing provinsi dan kabupaten/kota di masa depan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek SDM dalam IDSD mencakup kesehatan dan keterampilan, yang sangat penting untuk membangun daya saing ekonomi daerah. Pada Pilar Kesehatan, Provinsi Aceh mencatatkan skor 3,78, yang mencerminkan kualitas kesehatan yang cukup baik dan mendukung produktivitas masyarakat. Di tingkat kabupaten/kota, rata-rata skor sedikit lebih rendah di angka 3,64, namun tetap menunjukkan kondisi kesehatan yang cukup stabil di seluruh wilayah Aceh, meskipun ada beberapa perbedaan antar daerah.

Sementara itu, pada Pilar Keterampilan, Provinsi Aceh memperoleh skor 4,05, yang menunjukkan bahwa tingkat keterampilan tenaga kerja di provinsi ini cukup tinggi dan siap bersaing di dunia kerja. Di sisi lain, rata-rata skor kabupaten/kota di Aceh adalah 3,88, sedikit lebih rendah dari provinsi, namun masih menunjukkan bahwa keterampilan tenaga kerja di banyak daerah sudah berada pada level yang cukup baik.

Secara keseluruhan, baik dalam hal kesehatan maupun keterampilan, Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di dalamnya menunjukkan hasil yang positif. Meskipun ada sedikit perbedaan, keduanya memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

3. Pasar

Pasar dalam IDSD mengukur seberapa terbuka dan efisien pasar produk dan tenaga kerja, serta keberfungsian sistem keuangan dan ukuran pasar. Provinsi Aceh mencatatkan skor 4,36, yang menunjukkan bahwa pasar produk di provinsi ini cukup terbuka dan efisien. Sementara itu, rata-rata kabupaten/kota di Aceh hanya mendapatkan skor 3,37, yang sedikit lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar produk di provinsi cukup baik, di tingkat kabupaten/kota masih ada ruang untuk meningkatkan keterbukaan pasar agar lebih efisien. Provinsi Aceh meraih skor 2,76 untuk pasar tenaga kerja, yang mencerminkan tantangan dalam menciptakan peluang kerja yang cukup di tingkat provinsi. Namun, rata-rata kabupaten/kota menunjukkan hasil yang lebih baik dengan skor 3,22, menandakan bahwa pasar tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota lebih efisien dan menawarkan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Pada Pilar Sistem Keuangan, Provinsi Aceh memperoleh skor 2,10, yang menunjukkan bahwa sistem keuangan di provinsi ini masih kurang mendukung aktivitas ekonomi secara optimal. Di sisi lain, rata-rata kabupaten/kota sedikit lebih baik dengan skor 2,18, mencerminkan bahwa di beberapa kabupaten/kota, sistem keuangan sudah lebih mendukung aktivitas ekonomi lokal meskipun masih perlu ditingkatkan.

Provinsi Aceh memiliki skor 4,35 pada Pilar Ukuran Pasar, yang mencerminkan bahwa pasar di tingkat provinsi cukup besar dan memiliki potensi yang luas untuk pengembangan ekonomi. Sebaliknya, rata-rata kabupaten/kota di Aceh mendapatkan skor 3,78, yang sedikit lebih rendah, menandakan bahwa pasar di tingkat kabupaten/kota masih perlu diperluas agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Aceh unggul dalam Pilar Pasar Produk dan Ukuran Pasar, kabupaten/kota di Aceh menunjukkan skor yang lebih baik pada Pilar Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan. Ini menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten/kota, terdapat lebih banyak kesempatan dalam pasar tenaga kerja dan sistem keuangan yang lebih mendukung, namun di tingkat provinsi, pasar produk dan ukuran pasar memiliki potensi yang lebih besar.

4. Ekosistem Inovasi

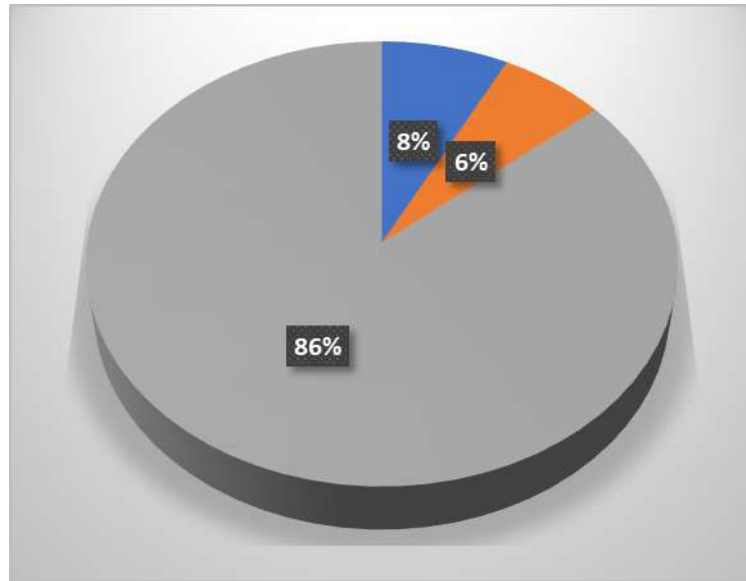
Ekosistem inovasi mengukur sejauh mana daerah dapat mendorong dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi melalui teknologi dan riset. Provinsi Aceh mencatatkan skor 2,78, yang menunjukkan bahwa dinamisme bisnis di tingkat provinsi masih terbilang rendah. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menciptakan iklim bisnis yang fleksibel dan dinamis, di mana proses memulai dan menutup usaha bisa jadi lebih sulit dan penuh hambatan. Namun, rata-rata kabupaten/kota di Aceh memperoleh skor 4,04, jauh lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten/kota, bisnis lebih dinamis. Di sini, pelaku

usaha lebih mudah untuk memulai usaha baru dan menutup usaha yang tidak efisien. Ini berarti, kabupaten/kota di Aceh memiliki iklim yang lebih mendukung untuk pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan responsif.

Provinsi Aceh memperoleh skor 3,24, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal penguasaan teknologi dan penerapannya di sektor ekonomi. Hal ini mencerminkan potensi provinsi yang lebih besar untuk berinovasi dan mendorong perkembangan teknologi dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Sementara itu, rata-rata kabupaten/kota di Aceh hanya meraih skor 1,86, yang jauh lebih rendah. Ini menandakan bahwa kabupaten/kota masih menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan berinovasi, penguasaan teknologi, dan penerapan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.

Secara keseluruhan, meskipun kabupaten/kota di Aceh lebih unggul dalam hal Dinamisme Bisnis, Provinsi Aceh menunjukkan skor yang lebih baik dalam Kapabilitas Inovasi. Hal ini berarti bahwa meskipun bisnis di tingkat kabupaten/kota lebih dinamis dan berkembang, kemampuan untuk berinovasi dan menerapkan teknologi masih lebih kuat di tingkat provinsi, yang memberikan keunggulan dalam mendukung kemajuan ekonomi jangka Panjang.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi secara signifikan dari tahun 2017 s.d. 2021 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, 17.779, dan 25.124 inovasi. Pada tahun 2022, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 26.900 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19. Hingga tahun 2024, Pemerintah Aceh Bersama Kabupaten/Kota telah berhasil melaporkan 788 Inovasi Daerah ke Kemendagri, dengan komposisi 60 inovasi baru, 50 masih tahap uji coba, dan 678 inovasi sudah diterapkan. Berikut ini diagram yang menunjukkan persentase Inovasi Aceh yang telah berada pada Tahap Penerapan sebanyak 86%, mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan inovasi baru sebesar 8%, dan inovasi yang masih tahap uji coba sebesar 6%. Lebih jelas mengenai persentase inovasi Aceh tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 4.34 berikut.



Gambar 4. 5
Persentase Inovasi Aceh Tahun 2024

Hingga tahun 2024 tercatat bahwa Pemerintah Aceh telah memiliki inovasi yang sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri berjumlah 139 inovasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 46 inovasi yang memiliki score kematangan 95 - 111 diikutsertakan dalam kompetisi Innovation Government Award (IGA) tahun 2024. Tahun 2024, melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang difasilitasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11 - 4898 tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, Pemerintah Aceh memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 55,87 dengan predikat "Provinsi Inovatif". Nilai yang diperoleh mengalami kenaikan sebesar 0,49 poin dibandingkan tahun tahun 2023 yaitu sebesar 55,38. Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh tahun 2024 di atas merupakan kontribusi dari 45 Satuan Inovasi yang telah dilaporkan oleh 19 SKPA sebagaimana disajikan pada Tabel 4.34 di bawah ini.

Tabel 4. 34
Daftar Satuan Inovasi SKPA Tahun 2024

No	SKPA Pengelola Inovasi	Satuan Inovasi	
1	2	3	
1	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1	Gampong Sadar Administrasi Kependudukan (GAMSA)
		2	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)
2	Dinas Pendidikan Aceh	3	SISTEM INFORMASI DATA SEKOLAH KITA (SIDAKOTA)
		4	SUA ACEH
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	5	Geoportal Aceh
		6	Aplikasi Papan Informasi Terpadu (PINTU) Aceh
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh	7	TAGTO (Terapi Ablasi Gondok Tanpa Operasi)
		8	Layanan Manajemen Nyeri Minimal Invasif (LAMNI)
		9	SEMISI (sepakat, komitmen, dan aksi)
		10	ACZEMAR - Aceh Eczema Registry
		11	JMS (Journal of Medical Science)
		12	PIJOKSIN (Pijat Oksitoksin)
		13	KETAN DURIAN (Kendali Kegiatan Dokter Spesialis dalam Bingkai Pelayanan)
		14	SIKARZA (SISTEM INFORMASI KARYAWAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN): ONE CLICK FOR ALL
		15	Pajoh Ubat Tiep Uroe (PUTROE)
		16	ASHABA (AMAL SHALIH BERKAH BERSAMA)
		17	MEDIQIS (Medicine Queue Information System)
		18	YASMINA (Layanan Anti Nyeri Persalinan Normal Ibu Dengan Akupunktur)
		19	SEHATI (Senam Otak Sehat dan Edukasi)
		20	ICE MELON ACEH (Inovasi Operasi Cepat Satu Tahap Mega Colon pada Bayi dan Anak Besar di Aceh)

No	SKPA Pengelola Inovasi	Satuan Inovasi	
1	2	3	
		21	Terapi Quranic Healing untuk Peningkatan Kesadaran Pasien
		22	KB-JAPAN (KELUARGA BERENCANA JANGKA PANJANG)
		23	PenTas di PeTA Cinta (Pengabdian Tanpa Batas di Pedalaman Untuk Negeriku Tercinta)
		24	Pain.DRE Monitoring Device (Pain.DRE-MODE)
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	25	Sistem Informasi Gampong (SIGAP)
6	Dinas Kesehatan Aceh	26	E-Profilkes Terintegrasi
7	Biro Administrasi Pembangunan, Setda Aceh	27	Si TransPor (Trampil dan Sigap Pelaporan)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	28	POS LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	29	Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam (GEPEUAMAN)
		30	Sistem Informasi Pelayanan Benih Bersertifikat (SINABERKAT)
		31	Gerakan Pemanfaatan Jerami Padi (GEuPEJADI)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	32	Aplikasi Sistem Informasi Gender & Anak (SIGA) Aceh
11	Biro Pengadaan Barang & Jasa, Setda Aceh	33	Implementas e-katalog lokal Provinsi Aceh dalam percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

No	SKPA Pengelola Inovasi	Satuan Inovasi	
1	2	3	
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	34	Rumah Kemasan Aceh (RKA)
13	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	35	SAPA (SISTEM ADMINISTRASI PEMBINAAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA)
14	Dinas Sosial Aceh	36	SIREHSOS (Sistem Informasi Rehabilitasi Sosial)
15	Badan Kepegawaian Aceh	37	E-Keurani (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi)
		38	Sistem Informasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Berbasis CAT (Computer Assisted Test)
16	Rumah Sakit Jiwa Aceh	39	Teumuleh Jeut Bagah Puleh
17	Dinas Perhubungan Aceh	40	SiPEGEL (Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik)
		41	Simpel Link
		42	SiKotak Biru
		43	Serupa
18	Dinas Pangan Aceh	44	Gerakan Pangan Murah Keliling (GPM Ling)
19	Bappeda Aceh	45	TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi) Aceh

Sebanyak 45 Satuan Inovasi yang telah dilaporkan tersebut, 17 diantaranya merupakan inovasi yang mendukung 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan dan sosial.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh telah mengamanahkan bahwa iklim berinovasi salah satunya dapat diwujudkan dengan pelibatan Para Pihak dalam proses Pembangunan, juga apresiasi bagi pihak-pihak yang mendukung terwujudnya iklim inovasi yang baik. Selain itu penilaian dan pengukuran nilai Indeks Inovasi Daerah menjadi suatu tolak ukur tingkat keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan hal tersebut di atas, melalui tahapan penilaian Inovasi terbaik dan SKPA terinovatif lingkup Pemerintah Aceh tahun 2024 melalui ajang **"Anugerah Inovasi Aceh Tahun (AIA) 2024"** yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan penilaian.

Selanjutnya ditetapkan 5 inovasi terbaik yang diapresiasi pada ajang “Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2024” yaitu:

Tabel 4. 35
Inovasi Terbaik AIA Tahun 2024

Inovasi Terbaik 1	Terapi Ablasi Gondok Tanpa Operasi (TAGTO)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh
Inovasi Terbaik 2	Sistem Informasi Rehabilitasi Sosial (SIREHSOS)	Dinas Sosial Aceh
Inovasi Terbaik 3	ICE MELON (Inovasi Operasi Cepat Satu Tahap Mega Colon pada Bayi dan Anak Besar di Aceh)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh
Inovasi Terbaik 4	Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)	Bappeda Aceh
Inovasi Terbaik 5	Teumuleh Jeut Bagah Puleh	Rumah Sakit Jiwa Aceh

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Aceh, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Dalam pengembangannya diperlukan analisis pengembangan wilayah sebagai panduan dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Aceh akan menjadi rujukan dalam arah pembangunan kabupaten/kota dalam konteks pengembangan wilayah Aceh serta juga menjadi panduan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program dan kegiatan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Pemerintah Aceh Tahun 2026.

5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, pengembangan wilayah diimplementasikan dengan pendekatan keterkaitan aspek fisik alam, sosial ekonomi, dan/atau budaya untuk mengoordinasikan pembangunan dan keterpaduan pengembangan. RTRW bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan di Aceh harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dengan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di Jawa Tengah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, pembangunan wilayah di arahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Aceh berbasis pada sektor pertanian, Pengolahn, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir. Dalam upaya pemerataan pembangunan di Aceh, maka pembangunan di arahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antarwilayah maupun di dalam wilayah dengan peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan; peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi,

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah; serta peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui strategi seperti

- a. Peningkatan sistem pusat pemukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
- c. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
- d. Pemanfaatan kawasan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
- f. Pengembangan kawasan strategis provinsi.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota

5.2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2026.

5.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,70 persen per tahun, dari 73,29 pada tahun 2020 menjadi 75,36 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,62 persen. Demikian juga pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tetap tumbuh masing-masing 0,19 dan 0,07 persen sama seperti tahun 2023. Sementara itu, pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) melambat dari 1,17 persen menjadi 0,94 persen. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Dimensi
Penyusunnya, Tahun 2020–2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	72,69	72,71	72,92	73,06	73,20
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14.31	14.36	14.37	14.38	14.39
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9.33	9.37	9.44	9.55	9.64
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	9,492	9,572	9,963	10,334	10,811

Sumber: BPS Aceh, 2024

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,64 dan 70,95. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 20. Sementara itu, Kota Banda Aceh, Langsa dan Lhokseumawe berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). Perkembangan Nilai IPM di Kabupaten/Kota antara tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5. 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen Pembentuk dan
Provinsi, Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	2023	2024
1	2	3	4
1	Simeulue	69,98	70,95
2	Aceh Singkil	71,14	71,76
3	Aceh Selatan	71,14	71,82
4	Aceh Tenggara	72,93	73,59
5	Aceh Timur	70,73	71,29
6	Aceh Tengah	76,45	77,27
7	Aceh Barat	74,62	75,45
8	Aceh Besar	75,98	76,57
9	Pidie	72,95	73,6
10	Bireuen	74,56	75,39

No	Kabupaten/Kota	2023	2024
1	2	3	4
11	Aceh Utara	72,5	73,35
12	Aceh Barat Daya	70,47	71,16
13	Gayo Lues	70,82	71,75
14	Aceh Tamiang	73,02	74
15	Nagan Raya	72,15	73,1
16	Aceh Jaya	72,44	73,4
17	Bener Meriah	76,06	76,58
18	Pidie Jaya	76,04	76,39
19	Banda Aceh	88,32	88,85
20	Sabang	78,7	79,5
21	Langsa	80,5	80,96
22	Lhokseumawe	80,26	80,89
23	Subulussalam	69,66	70,64
24	Aceh	74,7	75,36

Sumber: BPS Aceh, 2024

5.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

Ekonomi Aceh tahun 2024 tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan sebesar 22,04 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,79 persen; dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 11,16 persen. Sementara itu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 1,19 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Administrasi Pemerintahan masing-masing tumbuh sebesar 2,55 persen dan 7,48 persen.

Struktur PDRB Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,97 persen; diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,99 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,08 persen; konstruksi sebesar 8,80 persen; serta pertambangan dan penggalan sebesar 7,05 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 70,89 persen.

Tabel 5. 3
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)
1	2	3
1	Simeulue	4.43
2	Aceh Singkil	3.46
3	Aceh Selatan	3.21
4	Aceh Tenggara	3.59
5	Aceh Timur	4.63
6	Aceh Tengah	4.98
7	Aceh Barat	7.5
8	Aceh Besar	4.95
9	Pidie	4.15
10	Bireuen	4.52
11	Aceh Utara	3.56
12	Aceh Barat Daya	4.24
13	Gayo Lues	3.26
14	Aceh Tamiang	4.25
15	Nagan Raya	4.38
16	Aceh Jaya	3.83
17	Bener Meriah	3.27
18	Pidie Jaya	4.55
19	Banda Aceh	6.08
20	Sabang	4.16
21	Langsa	4.43
22	Lhokseumawe	4.46
23	Subulussalam	4.12
	Aceh	4.66

Sumber: BPS Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota se-Aceh menunjukkan adanya pertumbuhan pada Laju PDRB. Laju pertumbuhan yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Aceh Barat dengan pertumbuhan mencapai 7,7 persen dan terendah di capai kabupaten Aceh Selatan yang tumbuh mencapai 3.21 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Aceh, yang merupakan hasil dari perkembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota di provinsi tersebut, membutuhkan upaya pemerataan untuk memastikan bahwa pola pertumbuhan ekonomi tersebut merata. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang pada akhirnya

akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan dalam hal pendapatan masyarakat.

Pemerintah Aceh pada tahun 2025 berkomitmen menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui berbagai langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. sejumlah program yang dijalankan pemerintah Aceh untuk mendorong perekonomian, diantaranya memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan bagi UMKM.

Selain itu, upaya lainnya juga terus diperkuat dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk, dunia usaha, dan akademisi, sangatlah diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan lainnya seperti angka kemiskinan dan pengangguran.

Pertanian menjadi sektor paling besar yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Aceh. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan di Aceh perlu melakukan upaya yang dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah dari pertanian di Aceh. Begitupun dengan pengolahan dimana selama ini sebagian besar produk pertanian Aceh masih diolah ke Sumatera utara sehingga semua pihak diharapkan dapat berkontribusi untuk mewujudkan agar industri hilirisasi pertanian bisa tumbuh di Aceh, dimana jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh sudah berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi Aceh juga akan terus meningkat.

Dalam upaya mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Aceh, telah disusun pola pengembangan wilayah dengan menetapkan daerah pengembangan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Dengan melaksanakan rencana ini, diharapkan pengembangan ekonomi dapat merata di seluruh wilayah Aceh, mengoptimalkan potensi setiap daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 5,75 persen, turun sebesar 0,28 persen poin dibanding Agustus 2023.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 2.661 ribu orang, naik 57 ribu orang dibanding Agustus 2023 dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,34 persen poin dibanding Agustus 2023. Pada data terkait Penduduk

yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 2.508 ribu orang, naik sebanyak 61 ribu orang dari Agustus 2023 dimana lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 951 ribu orang.

Pada Agustus 2024 sebanyak 999 ribu orang (39,82 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 0,31 persen poin dibanding Agustus 2023, untuk persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 3,30 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,03 persen poin dibanding Agustus 2023. Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh dengan Kota Lhokseumawe dengan TPT tertinggi sebesar 8,47 persen dan Kabupaten Bener Meriah dengan TPT terendah sebesar 2,2 persen.

Tabel 5. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	TPT (%)
1	Simeulue	5.5
2	Aceh Singkil	6.44
3	Aceh Selatan	4.56
4	Aceh Tenggara	4.79
5	Aceh Timur	7.75
6	Aceh Tengah	4.21
7	Aceh Barat	5.58
8	Aceh Besar	7.93
9	Pidie	5.74
10	Bireuen	3.93
11	Aceh Utara	6.88
12	Aceh Barat Daya	3.83
13	Gayo Lues	2.4
14	Aceh Tamiang	6.95
15	Nagan Raya	5.22
16	Aceh Jaya	2.75
17	Bener Meriah	2.2
18	Pidie Jaya	3.82
19	Banda Aceh	7.55
20	Sabang	2.95

No.	Kabupaten/Kota	TPT (%)
21	Langsa	7.34
22	Lhokseumawe	8.47
23	Subulussalam	5.12
	Aceh	5.75

Sumber BPS Aceh, 2025

Meskipun terjadi tren penurunan, tingkat pengangguran di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional sehingga diperlukan upaya-upaya penanganan pengangguran ini merupakan upaya bersama di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pola pengembangan kawasan berdasarkan sektor usaha unggulan yang ada di daerah.

Pertumbuhan sektor-sektor usaha seperti industri pengolahan, transportasi, perdagangan, dan konstruksi juga menunjukkan angka yang rendah, bahkan negatif, sehingga diperlukan upaya terintegrasi dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah pengangguran di Aceh. Pelaksanaan program pembiayaan usaha bagi kelompok muda milenial, dengan skema bunga rendah untuk modal usaha dan peralatan kerja yang sedang dilaksanakan diharapkan dapat bergotong-royong menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap lulusan diploma dan sarjana. Program nasional untuk membangun sentra kegiatan HUB UMKM di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan menggerakkan KEK Lhokseumawe diyakini dapat membantu menurunkan angka TPT di Aceh. Selain itu, investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemetaan kebutuhan perusahaan juga diperlukan untuk menempatkan tenaga kerja Aceh sesuai dengan tuntutan pasar dalam upaya menyesuaikan antara supply tenaga kerja dan demand perusahaan. Upaya lain yang akan dilaksanakan antara lain menambah jumlah lowongan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, serta mendorong pelatihan prakerja. Kebijakan yang tepat dan terarah dari pemerintah provinsi, didukung oleh upaya berbagai stakeholder, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

5.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentase penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada awal tahun 2020, wabah covid-19 melanda Indonesia dan menyebabkan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak dari wabah tersebut mulai terasa di Aceh pada April 2020. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan persentase penduduk miskin di Aceh yang terus meningkat dari

Maret 2020 hingga September 2021. Namun, pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di Aceh sempat turun dari 15,43 persen pada September 2020 menjadi 15,33 persen pada Maret 2021. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Aceh paling tinggi pada September 2021, yaitu sebesar 15,53 persen. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,64 persen. Kondisi September 2022, persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 14,75 persen dan pada Maret 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,45 persen.

Selanjutnya Maret 2024, persentase penduduk miskin di Aceh kembali mengalami penurunan dibanding Maret 2023, sebesar 14,23 persen. Jika kita lihat dari segi jumlah, penduduk miskin di Aceh juga sedikit berfluktuasi. Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Aceh berjumlah 814,91 ribu orang. Kemudian terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 833,91 ribu orang pada September 2020. Jumlah ini sedikit mengalami kenaikan menjadi 834,24 ribu orang pada Maret 2021. Penambahan jumlah penduduk tersebut lebih cepat dibandingkan dengan penurunan kemiskinan. Hal ini menyebabkan penurunan persentase kemiskinan tidak sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada September 2021 (menjadi 850,26 ribu orang). Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 806,82 ribu orang. Kondisi September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh kembali mengalami kenaikan menjadi 818,47 ribu orang dan kembali mengalami penurunan pada Maret 2023 menjadi 806,75 ribu orang. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 804,53 ribu orang. Jika kita lihat perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh dari Maret 2023-Maret 2024, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 14,45 persen menjadi 14,23 persen.

Berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,17 poin, yaitu dari 16,92 persen pada Maret 2023 menjadi 16,75 persen pada Maret 2024, sedangkan di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,19 poin, yaitu dari 9,79 persen menjadi 9,60 persen. Berdasarkan jumlah, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sekitar 3,6 ribu orang sehingga jumlahnya menjadi 613,98 ribu orang pada Maret 2024. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penambahan sekitar 1,4 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin di Aceh menjadi 190,55 ribu orang pada Maret 2024.

Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Aceh fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan

meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Aceh terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu.

Tabel 5.5

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Simeulue	17,59	17.69
2	Aceh Singkil	24,84	19.06
3	Aceh Selatan	30,53	12.02
4	Aceh Tenggara	27,28	11.99
5	Aceh Timur	60,86	13.26
6	Aceh Tengah	31,85	14.27
7	Aceh Barat	38,78	17.6
8	Aceh Besar	58,98	13.21
9	Pidie	86,89	18.59
10	Bireuen	59,93	12.1
11	Aceh Utara	104,48	16.11
12	Aceh Barat Daya	24,44	15.32
13	Gayo Lues	17,93	18.3
14	Aceh Tamiang	37,76	12.17
15	Nagan Raya	29,6	16.94
16	Aceh Jaya	12,24	12.25
17	Bener Meriah	28,37	18.18
18	Pidie Jaya	30,95	18.28
19	Banda Aceh	19,97	6.95
20	Sabang	5,17	14.58
21	Langsa	19,37	10.33
22	Lhokseumawe	22,77	10.44
23	Subulussalam	13,95	16.38
	Aceh	804,53	14.23

Sumber: Susenas Maret 2024

Keberhasilan penurunan persentase masyarakat miskin tidak lepas dari beberapa keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh antara lain pelaksanaan dari lima langkah yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin

melalui keberlanjutan program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh). Kemudian, program keluarga harapan (PKH), bantuan beras, pembangunan rumah duaafa, dana bos dan serta bantuan ekonomi lainnya, untuk strategi kedua, adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin lewat bantuan UMKM, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu menaikkan pendapatan, termasuk pelatihan kerja. Ketiga, mengendalikan kebutuhan pokok, seperti melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok yang sudah disubsidi pemerintah. Selanjutnya, meminimalisir ekonomi biaya tinggi dengan pembangunan jalan yang menghubungkan lintasan provinsi dan di daerah terpencil, sehingga terjadinya konektivitas. Kelima masalah membantu pasca bencana, karena bencana juga menyumbang kemiskinan.

Secara garis besar, ada lima strategi yang dilakukan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Terkait persoalan kemiskinan, Pemerintah Aceh memegang dua sumber data utama, yakni survei Badan Pusat Statistik (BPS), dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemudian, Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,5 persen dari total saat ini mencapai 14,23 persen atau berjumlah 804.530 orang. Target utama Pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan berfokus pada perbaikan pendapatan masyarakat, terutama yang sudah terdaftar di DTKS. Dimana penurunan angka kemiskinan di Aceh tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja, tetapi perlu keterlibatan seluruh masyarakat.

5.2.2. Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh

Target keberhasilan pembangunan Aceh merupakan agregat dari kondisi kinerja makro Kabupaten dan kota. Tolak ukur keberhasilan tersebut tergambar dari beberapa indikator kinerja serta merupakan dampak dari segala pencapaian program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu merupakan amanah bagi Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan arah kebijakan pembangunan yang tepat bagi kabupaten dan kota. Pemerintah Aceh akan terus mendorong terutama bagi kabupaten/Kota dengan indikator makro berkinerja lemah untuk dapat ditingkatkan.

Sebagaimana sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2026 maka Pemerintah Aceh telah menargetkan capaian i pada beberapa indikator makro pada tahun 2026 antara lain; Pertumbuhan PDRB yang ditargetkan mencapai 4,5 - 5,1 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,70 - 76,50; Persentase Penduduk Miskin menjadi 10 - 12 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di targetkan 5,12 - 5,47 persen; dan Indeks Gini menjadi 0,280 - 0,290 poin. Target capaian tersebut merupakan hasil dari capaian indikator pembangunan Pemerintah Aceh tersebut yang merupakan target bersama dari seluruh capaian Kabupaten

dan Kota sehingga diperlukan sinkronisasi dalam upaya pencapaian target tersebut.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2026 yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2025-2029 maka Tema Rencana Kerja Pembangunan Aceh tahun 2026 yaitu Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja maka perencanaan yang disusun untuk tahun 2026 telah disesuaikan dengan arah pembangunan yang sudah diarahkan pada kebijakan pembangunan tersebut.

Pada tahun 2026, pemerintah Aceh optimis dalam menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan dengan beberapa program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya. Kinerja dari Pemerintah Aceh terkait peningkatan beberapa indikator Makro Pembangunan tersebut diharapkan juga dapat disinergikan dengan berbagai kebijakan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan pada Kabupaten/Kota. Berikut pada tabel dapat dilihat target indikator kinerja Makro yang tersebar pada 23 Kabupaten/ Kota.

Tabel 5. 6
Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Target 2026
Kabupaten/Kota Se-Aceh

NO	KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI		KEMISKINAN		TPT		IPM	
		CAPAIAN 2024	TARGET 2026	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	CAPAIAN 2024	TARGET 2026	CAPAIAN 2024	TARGET 2026
1	Simeulue	4.43	4.50 - 5.10	17.69	16.59 - 17.45	5.5	4.50 - 5.12	70.95	71.75 - 72.57
2	Aceh Singkil	3.46	3.50 - 4.00	19.06	17.72 - 18.60	6.44	5.60 - 6.00	71.76	72.48 - 72.90
3	Aceh Selatan	3.21	3.65 - 4.34	12.02	10.97 - 11.50	4.56	3.60 - 4.08	71.82	72.00 - 72.95
4	Aceh Tenggara	3.59	3.75 - 4.20	11.99	11.20 - 11.50	4.79	4.00 - 4.50	73.59	74.35 - 75.10
5	Aceh Timur	4.63	3.50 - 4.50	13.26	11.80 - 12.79	7.75	5.81 - 7.00	71.29	72.03 - 72.77
6	Aceh Tengah	4.98	5.00 - 5.15	14.27	13.60 - 14.00	4.21	3.60 - 4.05	77.27	77.50 - 78.00
7	Aceh Barat	7.5	5.10 - 6.00	17.6	16.00 - 16.50	5.58	5.00 - 5.30	75.45	76.17 - 76.90
8	Aceh Besar	4.95	4.50 - 5.10	13.21	12.40 - 12.75	7.93	7.20 - 7.55	76.57	77.08 - 77.60
9	Pidie	4.15	4.15 - 4.50	18.59	17.62 - 18.20	5.74	5.20 - 5.70	73.6	77.63
10	Bireuen	4.52	4.50 - 5.10	12.1	11.32 - 11.50	3.93	3.20 - 3.50	75.39	76.08 - 76.77
11	Aceh Utara	3.56	3.80 - 4.20	16.11	14.60 - 15.10	6.88	5.80 - 6.00	73.35	74.10 - 74.87
12	Aceh Barat Daya	4.24	4.40 - 4.90	15.32	14.50 - 14.90	3.83	3.20 - 3.60	71.16	72.30 - 72.60
13	Gayo Lues	3.26	3.30 - 4.00	18.3	16.50 - 17.00	2.4	2.14 - 2.30	71.75	72.59 - 73.44
14	Aceh Tamiang	4.25	4.20 - 4.40	12.17	11.20 - 11.80	6.95	5.75 - 6.04	74	74.72 - 75.44
15	Nagan Raya	4.38	4.50 - 4.90	16.94	15.90 - 16.50	5.22	4.39 - 5.00	73.1	73.50 - 74.57
16	Aceh Jaya	3.83	4.00 - 4.50	12.25	11.30 - 12.00	2.75	2.45 - 2.60	73.4	73.94 - 74.73
17	Bener Meriah	3.27	3.05 - 4.00	18.18	17.50 - 18.00	2.2	1.90 - 2.17	76.58	77.20 - 78.0
18	Pidie Jaya	4.55	4.50 - 4.65	18.28	16.50 - 17.50	3.82	3.50 - 3.80	76.39	77.63
19	Banda Aceh	6.08	5.75 - 6.05	6.95	6.55 - 6.71	7.55	6.70 - 6.95	88.85	89.80 - 90.05
20	Sabang	4.16	4.25 - 4.50	14.58	13.80 - 14.29	2.95	2.70 - 2.90	79.5	80.25 - 80.81
21	Langsa	4.43	4.50 - 5.00	10.33	9.50 - 9.80	7.34	6.50 - 6.83	80.96	81.58 - 82.28
22	Lhokseumawe	4.46	4.53 - 4.80	10.44	9.00 - 9.81	8.47	7.75 - 7.85	80.89	81.95 - 82.30
23	Subulussalam	4.12	4.22 - 4.50	16.38	14.90 - 15.75	5.12	4.00 - 4.30	70.64	72.00 - 72.48

Sumber: Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Aceh, 2025.

5.2.3. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Ketimpangan antara daerah di Aceh dapat tinggi karena beberapa faktor, di antaranya Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi daripada daerah lain. Ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar

daerah. Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu, dimana Kabupaten/kota yang tergantung pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, mungkin mengalami ketimpangan ekonomi jika sektor tersebut tidak berkembang dengan merata di seluruh wilayah Aceh.

Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses pasar, dan perubahan iklim. Alokasi anggaran yang tidak merata dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak dana dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program ekonomi, sementara daerah-daerah lain mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Kurangnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ketimpangan pendidikan dan kesehatan antara daerah di Aceh juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang baik mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perbedaan dalam Kebijakan Pembangunan Regional. Perbedaan dalam kebijakan pembangunan regional antara pemerintah daerah dapat memperburuk ketimpangan antar daerah. Daerah-daerah yang menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-poor mungkin dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, sementara daerah-daerah lain yang fokus pada kepentingan kelompok tertentu atau pengembangan infrastruktur yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, memperkuat infrastruktur, dan mendorong diversifikasi ekonomi di seluruh wilayah Aceh.

Ketika ketimpangan antar daerah di Aceh tinggi, dapat timbul sejumlah akibat yang merugikan, seperti Peningkatan Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, polarisasi ekonomi dan sosial antara Kabupaten/kota yang kaya dan miskin di Aceh. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, dan memperdalam ketidaksetaraan sosial. Kurangnya Akses Terhadap Layanan Dasar. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan dasar ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan kesehatan antara daerah. Ketergantungan pada Bantuan dan Dana Pemerintah: Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin menjadi lebih tergantung pada bantuan pemerintah atau dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Ketergantungan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi global. Ketimpangan yang tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang berbeda, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya atau pembangunan oleh pemerintah. Ketegangan sosial ini dapat meningkatkan risiko konflik antar-daerah dalam daerah, mengganggu stabilitas politik dan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mampu berkontribusi sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi potensi pembangunan regional dan nasional secara keseluruhan, dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih makmur, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah tujuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan menerapkan kebijakan dan program yang memperkuat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal, memperkuat infrastruktur, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

Arah pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Aceh difokuskan pada beberapa aspek, antara lain:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dimana pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif.
- b. Pertumbuhan Ekonomi yang mana Pemerintah Aceh berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui perencanaan pembangunan yang tepat dan pengelolaan sumber daya yang optimal.

Beranjak dalam hal diatas maka didalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah kabupaten/kota di Aceh perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah, antara lain : karakteristik wilayah sehingga pemerintah daerah perlu memahami karakteristik wilayah masing-masing kabupaten/kota untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat. Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan adalah pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga perlunya pemerintah memahami kebutuhan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang relevan dan efektif.

Dalam upaya pengembangan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2025-2029, Pemerintah pusat sudah membagi pola pengembangan kewilayahann di Aceh, yaitu:

- A. Kawasan Pertumbuhan

- 1) Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho
 - 2) Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe
 - 3) Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan DT Gayo-Danau Laut Tawar
 - 4) Kawasan Perkotaan Meulaboh
 - 5) Kawasan Perkotaan Langsa
 - 6) Kawasan Perkotaan Subulussalam
 - 7) KPBPB Sabang
- B. Kawasan Komoditas Unggulan
- 1) Kopi di DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)
 - 2) Sawit dan Karet di Pesisir Timur Laut Aceh (Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam)
- C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- 1) Swasembada Pangan di Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang)
 - 2) Swasembada Air dan Energi di DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)
 - 3) Swasembada Pangan dan Energi di Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Barat Daya)
- D. Kawasan Afirmasi
- 1) Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan)
- E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana
- 1) TN Gunung Leuser

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah yang dirumuskan melalui konsep THIS (tematik, holistik, integrative dan spasial. Pendekatan tematik-holistik mengutamakan kegiatan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh K/L dan antar SKPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Disamping itu, pendekatan integrative-spasial mengarah pada pengintegrasian program/kegiatan/sub kegiatan dan pertimbangan dimensi ruang antar SKPD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2026

Pasal 258 Ayat 3 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional maka kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah dalam bentuk koordinasi teknis pembangunan. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS) Tahun 2025 secara online yang dimulai dari tanggal 18 Februari s.d 28 Maret 2025. Lebih jelas mengenai hasil pembahasan desk kewilayahan Aceh dalam Rakortekrenbang Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1
Hasil Pembahasan Desk Kewilayahan Aceh Dalam RAKORTEKRENBANG NASIONAL Tahun 2026

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total					1.100.595.548.000	
1	Kesehatan	Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit (SHIREN)	Kementerian Kesehatan	4	Unit	137.000.000.000	Direkomendasikan dengan catatan, lokasi hanya bisa diusulkan pada RSUDZA
2		Layanan penemuan aktif TBC	Kementerian Kesehatan	1	Layanan	1.200.000.000	Tidak direkomendasikan, dapat diusulkan melalui mekanisme DAK
3	Pembangunan Ekonomi	Kawasan Kelapa	Kementerian Pertanian	3000	Ha	58.889.360.000	Direkomendasikan dengan catatan, perlu melengkapi RC sebelum Forum Pra Musrenbangnas dan daerah perlu melakukan input usulan melalui e-proposal pada aplikasi BIMA, Kementerian Pertanian

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pembangunan Sumber Daya Alam	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan	Kementerian Pertanian	48	Unit	10.400.000.000	Direkomendasikan dengan catatan, dibahas kembali pada Forum Pra Musrenbangnas
5		Optimasi Lahan	Kementerian Pertanian	67	Km2	33.645.000.000	Direkomendasi dengan catatan, dibahas kembali dalam Forum Pra Musrenbangnas, daerah perlu melengkapi RC dan geotagging.
6		Pembangunan Irigasi Perpompaan	Kementerian Pertanian	1.250	Unit	135.360.000.000	Direkomendasikan dengan catatan, dibahas lebih lanjut pada Forum Pra Musrenbangnas, jika usulannya pembangunan bangunan dapat diarahkan ke Kementerian PU.

VI-4

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pembangunan Sumber Daya Alam	Layanan Kesehatan Hewan	Kementerian Pertanian	144	Layanan	25.317.087.000	Direkomendasikan dengan catatan, dibahas kembali dalam Forum Pra Musrenbangnas, serta volume menyesuaikan pagu Kementan dan RC perlu dilengkapi.
8		Ternak Unggas	Kementerian Pertanian	407.403	Ekor	199.800.000.000	Direkomendasikan dengan catatan, dibahas kembali dalam Forum Pra Musrenbangnas, RC dapat diperbaiki dan RO yang diusulkan berupa pakan/bibit/ vaksin yang sesuai dengan kemampuan Kementan, selain itu perlu perbaikan Geotagging usulan.

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pangan	Kementerian Pertanian	1	Produk	10.842.001.000	Tidak dapat direkomendasikan , jika usulan berupa Pembangunan Laboratorium.
10		Ternak Ruminansia Potong	Kementerian Pertanian	610	Ekor	15.250.000.000	Direkomendasikan dengan catatan , dibahas kembali dalam Forum Pra Musrenbangnas dan daerah bisa menyiapkan RC untuk ternak yang diusulkan hanya ternak kambing/domba saja.
11		Klaster Kawasan Revitalisasi Tambak Udang	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	Unit	2.400.000.000	Tidak direkomendasikan
12		Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipati	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Unit	1.500.000.000	Direkomendasikan dengan catatan , RC perlu dilengkapi.

VI-6

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Pembangunan Sumber Daya Alam	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Unit	50.000.000.000	Tidak dapat direkomendasikan, baik dari status kewenangan, prioritas dan ketersediaan anggaran.
14	Infrastruktur dan Kewilayahan	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan	Kementerian Kehutanan	30	Unit	1.200.000.000	Direkomendasikan dengan catatan, dibahas kembali dalam Forum Pra Musrenbangnas serta perlu memperbaiki kelengkapan RC, dan perbaikan geotagging berupa poligon
15		Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan	Kementerian Kehutanan	300	Ha	3.500.000.000	

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
16		Rehabilitasi hutan mangrove	Kementerian Kehutanan	75	Ha	3.000.000.000	
17		Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat	Kementerian Kehutanan	33	Unit	7.800.000.000	
18		Instalasi Pengolahan Air Limbah	Kementerian Lingkungan Hidup			10.000.000.000	Direkomendasikan dengan catatan, untuk dibahas kembali di Forum Pra Musrenbangnas, dengan catatan Dit. Perkim, Bappenas dapat berkoordinasi dengan Ditjen CK. Kementerian PUPR dan perbaikan tagging RO yang ditujukan ke Kementerian PU.

VI-8

No	Tematik	Usulan RO	Kementerian	Volume	Satuan	Pendanaan	Hasil Kesepakatan
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Infrastruktur dan Kewilayahan	Pembangunan SPAM	Kementerian Pekerjaan Umum	490	lt/detik	373.792.100.000	Direkomendasikan dengan catatan , untuk diakomodasi hanya pada lokasi Krueng Sabe dan di Simpang Kiri dan perlu dilakukan perbaikan geotagging usulan.
20		Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan	Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	985	Unit	19.700.000.000	Tidak direkomendasikan , dikarenakan belum terdapat data dukung kesiapan RC usulan.

Sumber: Aplikasi KRISNA SELARAS 2025

Berdasarkan Tabel 6.1 diketahui terdapat 20 (dua puluh) usulan proyek prioritas Aceh tahun 2026 yang dibahas dalam Rakortekrenbang Nasional tahun 2025 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 15 (lima belas) usulan Rincian Output (RO) dengan status **direkomendasikan dengan catatan**. Usulan ini akan dibahas kembali pada Forum Pra Musrenbangnas Tahun 2025. Adapun usulan tersebut meliputi sebagai berikut:
 1. Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit (SHIREN);
 2. Kawasan kelapa;
 3. Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan;
 4. Optimasi lahan;
 5. Pembangunan irigasi perpompaan;
 6. Layanan kesehatan hewan;
 7. Ternak unggas;
 8. Ternak ruminansia potong;
 9. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipati;
 10. Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan;
 11. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan;
 12. Rehabilitasi hutan mangrove;
 13. Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat;
 14. Instalasi pengolahan air limbah;
 15. Pembangunan SPAM.
- b. Terdapat 5 (lima) usulan Rincian Output (RO) dengan status **tidak direkomendasikan** atau ditolak, meliputi sebagai berikut:
 1. Layanan penemuan aktif TBC;
 2. Hasil uji mutu dan keamanan pakan;
 3. Klaster kawasan revitalisasi tambak udang;
 4. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;
 5. Bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya miskin dan rentan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Desk Aceh pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 28 Mei 2025 secara online, diketahui 8 (delapan) usulan rincian output yang

VI-10

direkomendasikan untuk dibahas lebih lanjut pada forum berikutnya yang meliputi sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit (SIHREN);
2. Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan;
3. Optimasi lahan;
4. Pembangunan irigasi perpompaan;
5. Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan;
6. Rehabilitasi hutan mangrove;
7. Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat;
8. Pembangunan SPAM.

Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) usulan rincian output yang tidak direkomendasikan yang meliputi sebagai berikut:

1. Kawasan kelapa;
2. Layanan kesehatan hewan;
3. Ternak unggas;
4. Ternak ruminansia potong;
5. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipati;
6. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan;
7. Instalasi pengolahan air limbah.

Lebih jelas mengenai hasil kesepakatan desk Aceh pada Musrenbangnas tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6. 2
Hasil Desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025

No	Usulan RO	Usulan Proyek	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.000)	Lokasi Prioritas	K/L	Hasil Kesepakatan	Catatan Pembahasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit (SIHREN)	Pengadaan alat kesehatan KJSIA (CT scan)	4	Unit	137.000.000	Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Selatan	Kementerian Kesehatan	Direkomendasikan	Jenis alat kesehatan akan dibahas lebih lanjut dengan Kemenkes RI
2	Kawasan Kelapa	Pengembangan Kawasan Kelapa	3000	Ha	58.889.360	Provinsi Aceh, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara	Kementerian Pertanian	Tidak Direkomendasikan	Fokus pada cetak sawah baru
3	Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	48	Unit	10.400.000	Provinsi Aceh, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah,	Kementerian Pertanian	Direkomendasikan	Merupakan direktif presiden untuk cetak baru sawah di Aceh

VI-12

No	Usulan RO	Usulan Proyek	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.000)	Lokasi Prioritas	K/L	Hasil Kesepakatan	Catatan Pembahasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Abdya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Pidie Jaya,			
4	Optimasi Lahan	Pembangunan/rehabilitasi tanggung, pintu air, saluran irigasi, saluran pembuangan, dll.	67	Km2	33.645.000	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tamiang,	Kementerian Pertanian	Direkomendasikan	Berkoordinasi dengan Ditjen LIP (Lahan dan Irigasi Pertanian) Kementan RI

No	Usulan RO	Usulan Proyek	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.000)	Lokasi Prioritas	K/L	Hasil Kesepakatan	Catatan Pembahasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pembangunan Irigasi Perpompaan	Pembangunan rumah pompa dan mesin pompa air, bak penampung dan saluran distribusi	1.250	Unit	135.360.000	Provinsi Aceh	Kementerian Pertanian	Direkomendasikan	Diusulkan berupa pengadaan pompa air; Untuk usulan rumah pompa dan irigasi diusulkan melalui mekanisme Inpres No. 2 Tahun 2025
6	Layanan Kesehatan Hewan	Pengadaan Pengobatan PMK, Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas	144	Layanan	25.317.087	Provinsi Aceh	Kementerian Pertanian	Tidak Direkomendasikan	Fokus Kementan RI tahun 2026 cetak sawah baru, usulan masuk stocklist jika terdapat pagu tambahan
7	Ternak Unggas	Pengadaan Pakan/Bibit/Vaksin	407.403	Ekor	199.800.000	Provinsi Aceh	Kementerian Pertanian	Tidak Direkomendasikan	Fokus Kementan RI tahun 2026 cetak sawah baru, usulan masuk stocklist jika terdapat

VI-14

No	Usulan RO	Usulan Proyek	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.000)	Lokasi Prioritas	K/L	Hasil Kesepakatan	Catatan Pembahasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pagu tambahan
8	Ternak Ruminansia Potong	Pengadaan Komoditas Kambing dan Domba	610	Ekor	15.250.000	Kab. Aceh Besar	Kementerian Pertanian	Tidak Direkomendasikan	Fokus Kementan RI tahun 2026 cetak sawah baru, usulan masuk stocklist jika terdapat pagu tambahan
9	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipati (PITAP)	Pembangunan Saluran Irigasi Tambak/Kluster Perikanan Budidaya	3	Unit	1.500.000	Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tidak Direkomendasikan	Fokus Kementerian KP RI pada swasembada garam dan keterbatasan anggaran
10	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan	15 DAM Penahan dan 15 Gully Plug	30	Unit	1.200.000	Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Jaya	Kementerian Kehutanan	Direkomendasikan	Volume dan pagu anggaran disesuaikan dengan ketersediaan pagu Kementerian Kehutanan tahun 2026

No	Usulan RO	Usulan Proyek	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.000)	Lokasi Prioritas	K/L	Hasil Kesepakatan	Catatan Pembahasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan		30	Ha	1.000.000	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Aceh Jaya	Kementerian Kehutanan	Tidak Direkomendasikan	Karena berada dalam kawasan hutan
12	Rehabilitasi hutan mangrove	Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Operasional Kelompok Kerja Mangrove	10	Ha	1.000.000	Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang dan Kota Langsa	Kementerian Kehutanan	Direkomendasikan	Volume dan pagu anggaran disesuaikan dengan ketersediaan pagu Kementerian Kehutanan tahun 2026
13	Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat		33	Unit	7.800.000	Provinsi Aceh	Kementerian Kehutanan	Direkomendasikan	Volume dan pagu anggaran disesuaikan dengan ketersediaan pagu Kementerian Kehutanan tahun 2027

VI-16

No	Usulan RO	Usulan Proyek	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.000)	Lokasi Prioritas	K/L	Hasil Kesepakatan	Catatan Pembahasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pembangunan IPLT Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil	20	M3/Hari	3.071.800	Kab. Aceh Singkil	Kementerian Lingkungan Hidup	Tidak Direkomendasikan	Tidak masuk dalam usulan Konreg Kementerian PUPR
15	Pembangunan SPAM	Optimalisasi SPAM IKK Krueng Sabe di Kab. Aceh Jaya (Bangunan pendukung)	10	Lt/Detik	11.568.100	Kab. Aceh Jaya	Kementerian Pekerjaan Umum	Direkomendasikan	Disepakati peningkatan kapasitas 1 x 10 Lt/detik
		Optimalisasi SPAM IKK Simpang Kiri Kota Subulussalam (Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) dan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU)	1	Paket	62.224.000	Kota Subulussalam		Direkomendasikan	Penyelesaian RC dan dokumen lingkungan tahun 2025

Sumber: Hasil Desk Musrenbangnas Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, diketahui terdapat 154 proyek (highlight intervensi) yang akan dilaksanakan di Aceh tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut: 11 proyek (PN-1), 19 proyek (PN-2), 26 proyek (PN-3), 46 proyek (PN-4), 17 proyek (PN-5), 32 proyek (PN-6), 1 proyek (PN-7) dan 2 proyek (PN-8). Disamping itu selain program makan siang gratis, terdapat 4 program Direktif Presiden yang meliputi: sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan pengentasan kemiskinan. Lebih jelas mengenai proyek/highlight intervensi di Aceh tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut ini.

Tabel 6.3
Proyek/Highlight Intervensi APBN di Aceh Tahun 2026

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
	Provinsi Aceh	Direktif Presiden
		Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi dengan output:
		Ω Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis;
		Ω Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional;
		Ω Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
		Ω Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;
		Ω Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor;
		Ω Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan;
		Direktif Presiden
		Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.
		Direktif Presiden
		Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan.
		Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:
		Ω Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Ω SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		Ω SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		Ω SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		Ω SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		Ω SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		Direktif Presiden
		Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output:
		Ω Peningkatan kapasitas usaha koperasi
		Ω Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi
		Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output:
		Ω Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur;
		Ω Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan;
		Ω Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;
		Ω Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH);
		Ω Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih;
		Ω Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
		Ω Kartu prakerja;
		Ω Keluarga penerima manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha;
		Ω Alat dan mesin pertanian pra panen;
		Ω Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya;
		Ω Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan;
		Ω Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan;
		Ω Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat;
		Ω Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Ω Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan;
		Ω Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).
		Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output:
		Ω Bantuan PBI JKN;
		Ω Kartu Indonesia Pintar;
		Ω Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
		Ω Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako;
		Ω Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
		Ω Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan;
		Ω Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran
		Ω Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik;
		Ω Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana;
		Ω Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial;
		Ω Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya;
A1/A7	Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho (A1) dan KPBPB Sabang (A7) (Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar dan Kota Sabang)	Ω Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar di PKSN Perbatasan Prioritas Sabang;
		Ω Pembangunan jalan missing link Jantho-Keumala;
		Ω Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh;
		Ω Pembangunan TPST Regional Aceh;
		Ω Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) Zainal Abidin
A2	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe (Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen)	Ω Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		- Ω Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe; - Ω Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu; - Ω Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi; - Ω Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (olefin dan turunannya); - Ω Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari batubara (gasifikasi batubara); - Ω Revitalisasi industri pupuk dan hilirisasi gas bumi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; - Ω Rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara;
A3	Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar (Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah, Kab. Gayo Lues)	- Ω Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Redelong-Takengon dan Takengon-Blangkejeren; - Ω Pembangunan Jembatan Enang-Enang (Kab. Bener Meriah);
A4	Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kab. Aceh Barat	Ω Preservasi jalan ruas Takengon-Meulaboh, Meulaboh-Calang, Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;
A5	Kawasan Perkotaan Langsa, Kota Langsa	Ω Pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa;
A6	Kawasan Perkotaan Subulussalam, Kota Subulussalam	Ω Pengembangan SPAM Perkotaan Subulussalam;
C1	Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang)	- Ω Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Alue Ubay, D. I. Krueng Pase, D. I. Jambo Aye, D. I. Krueng Tiro; - Ω Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Sigli; - Ω Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Pangkalan Susu; - Ω Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: Kab. Aceh Besar: Mesjid Raya; Kab. Pidie: Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga; Kab. Pidie Jaya: Panteraja, Meurah Dua, Ulim; Kab. Bireuen: Kuala; Kab. Aceh Utara: Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat; Kota Lhokseumawe: Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat; Kab. Aceh Timur: Madat, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun; Kota Langsa: Langsa Barat;
C2	Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo (Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah)	Ω Revitalisasi Danau Laut Tawar;
		Ω Pembangunan infrastruktur PLTA Peusangan I & II #2;
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya)	Ω Pembangunan jaringan irigasi pada D. I. Lhok Guci, D. I. Susoh; Ω Preservasi Jalan Ruas BTS. Kota Banda Aceh - Calang); Ω Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Kab. Nagan Raya;
D1	Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan), Kab. Simeulue	Ω Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeulue, melalui fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pembangunan sistem drainase, pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi, serta perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; Ω Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan;
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo (Kab. Bener	Ω Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
	Meriah dan Kab. Aceh Tengah)	
B2, B3, B4	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Pesisir Timur Aceh (B2) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (B3) B2: Pesisir Timur: Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang B3: Pesisir Barat-Selatan: Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil	Ω Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian;
		Ω Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan;
		Ω Restrukturisasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia;
	B4: Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Utara-Timur Aceh: Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Besar, Pesisir Timur-Utara	Ω Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak; sawit
		Ω Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi;
		Ω Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim
		Ω Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
		Ω Volume biofuel untuk domestik;
		Ω Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan;
		Ω Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan;
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Leuser (Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tenggara, Aceh Selatan)	Ω Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;
	Provinsi Aceh	Ω Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T;
		Ω Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan;
		Ω Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Ω Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan;
		Ω Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Pusat;
		Ω Pembangunan irigasi perpompaan pertanian;
		Ω Rehabilitasi hutan mangrove;
		Ω Optimasi Lahan;
		Ω Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP);
		Ω Layanan Kesehatan Hewan;
		Ω Ternak Unggas;
		Ω Kawasan Kelapa;
		Ω Ternak Ruminansia Potong;
		Ω Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;
		Ω Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan;
		Ω Membangun unit sekolah baru satuan PAUD;
		Ω Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan;
		Ω Membangun unit sekolah baru SD;
		Ω Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan;
		Ω Membangun unit sekolah baru SMP;
		Ω Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan;
		Ω Membangun unit sekolah baru SMA;
		Ω Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran;
		Ω Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);
		Ω Menanggulangi TB di tempat kerja;
		Ω Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh;
		Ω Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;
		Ω Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile;
		Ω Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta;
		Ω Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC;
		Ω Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat;
		Ω Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Ω Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;
		Ω Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;
		Ω Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;
		Ω Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;
		Ω Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;
		Ω Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;
		Ω Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;
		Ω Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;
		Ω Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;
		Ω Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D;
		Ω Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan;
		Ω Memberikan bantuan operasional RS Kapal;
		Ω Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri;
		Ω Menyusun rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;
		Ω Melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers;
		Ω Memfasilitasi uji kompetensi wartawan;
		Ω Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;
		Ω Menyusun rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;
		Ω Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;
		Ω Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers;
		Ω Mengawasi lembaga penyiaran tv dan radio;
		Ω Menyiarkan informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;

No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Ω Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;
		Ω Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran;
		Ω Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
		Ω Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

6.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2026

Berdasarkan inputan aplikasi SIPD RI rencana belanja Aceh tahun 2026 berjumlah sebesar Rp. 10.338.839.566.444 - . Berikut disajikan pagu per SKPA tahun 2026, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6. 4
Pagu Tahun 2026 Berdasarkan SKPA

SKPA	Pagu (Rp.)
Badan Kepegawaian Aceh	21.328.086.862
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.655.237.591
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.562.009.766
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.875.898.833.360
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.094.059.717
Badan Penghubung Pemerintah Aceh	32.017.176.925
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.451.452.004
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	924.630.854.166
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	91.466.886.908
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93.229.817.862
Dinas Kelautan dan Perikanan	172.295.566.485
Dinas Kesehatan Aceh	429.889.040.177
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	33.631.780.974
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	89.009.906.151
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	234.338.057.930
Dinas Pangan	20.715.930.734
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.348.614.339
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	18.996.979.586
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.100.246.056
Dinas Pemuda dan Olahraga	121.962.034.857
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.450.822.123
Dinas Pendidikan	3.034.869.606.088
Dinas Pendidikan Dayah	272.120.358.290
Dinas Pengairan	72.065.203.724

SKPA	Pagu (Rp.)
Dinas Perhubungan	116.460.738.042
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.949.378.042
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.541.423.183
Dinas Pertanahan	12.014.815.016
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	247.345.157.697
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	548.159.085.439
Dinas Peternakan	53.376.741.131
Dinas Registrasi Kependudukan	12.269.945.408
Dinas Sosial	73.949.348.521
Dinas Syariat Islam Aceh	110.502.626.746
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	39.031.701.666
Inspektorat	56.041.020.701
Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	47.267.488.896
Rumah Sakit Ibu dan Anak	105.372.503.268
Rumah Sakit Jiwa	117.844.916.667
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	73.233.426.553
Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	60.818.694.326
Sekretariat Baitul Mal Aceh	214.989.573.639
Sekretariat Daerah	267.734.318.158
Sekretariat DPR Aceh	177.743.315.224
Sekretariat Majelis Adat Aceh	10.628.110.834
Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	6.515.327.189
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	14.921.347.423
Total	10.338.839.566.444

Lebih detail terkait rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 disajikan pada Tabel 6.5. yang dapat dilihat pada Buku 2 (dua) RKPA Tahun 2026 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian capaian strategis yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah maka indikator kinerja mempunyai peranan yang sangat penting. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran dan program/kegiatan. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam periode tertentu, sehingga setiap program dan kegiatan harus mempunyai indikator kinerja yang terukur dan konkrit untuk mengatasi permasalahan, isu strategis dan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi target capaian indikator kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMA Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMA Tahun 2025-2029. Target capaian IKU Pemerintah Aceh Tahun 2026 secara rinci terdapat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	THN AWAL (2024)	KINERJA 2026	SKPA
1	2	3	4	5	6
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	34,82	PERKIM
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	77,53-77,60	77,65-77,70	KESBANGPOL
3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	%	NA	65,06	DLHK, ESDM
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	NA	74,08 - 74,26	KESBANGPOL
5	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,94	76,34	PANGAN, TANBUN, DISNAK
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57	0,58	BAPPEDA, DISDIK, ARPUS, MPA, RSIA, DINKES, RSUZA, RSJ, DP3A, DINSOS, BRA, SETDA/RO ISRA
7	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,464	0,51	PORA
8	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	NA	80,63 - 87,50	DSI, DAYAH, BMA
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,69	82	SETDA/RO HUKUM, SETDA/RO ORGAN, SETDA/RO PEMOTDA, SETDA/RO PBJ, SETDA/RO ADPEM, SETDA/RO UMUM,

No	INDIKATOR	SATUAN	THN AWAL (2024)	KINERJA 2026	SKPA
1	2	3	4	5	6
					SETDA/RO ADPIM, SETDA/RO ISRA, DRKA, BPA, DPRA, SETDA/RO EKORSIA, RSUZA, RSJ, BPKA, BAPPEDA, BKA, BPSDM, KOMINSA, ARPUS, DPMG
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	144,29	179,88	BPBA
11	Indeks Transformasi Digital	Indeks	49,47	50,73	KOMINSA, ARPUS, DPMG
12	Indeks Williamson	Indeks	0,401	0,391	PERKIM, PENGAIKIRAN, DKP, ESDM, PUPR, DISHUB
13	Inklusi Keuangan	%	89,87 (2022)	95,24	SETDA/RO EKO, BPKA, INDAG, NAKER, DPMG
14	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	23,79	41,23	DLHK, ESDM
15	Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	NA	12,6	BAPPEDA
16	Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA	%	NA	90	KKW, BRA, POL PP, MAA, BUDPAR, MPA, MPU
17	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	%	NA	72	PUPR
18	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,2	5,4	BAPPEDA, TANBUN, INDAG, DISNAK, BUDPAR, KOP UKM

VII-4

No	INDIKATOR	SATUAN	THN AWAL (2024)	KINERJA 2026	SKPA
1	2	3	4	5	6
19	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	%	26,78	27,72	SETDA/RO EKO, DSI
20	Rasio Gini	Indeks	0,294	0,287 - 0,291	BAPPEDA, BPKA, INDAG, NAKER, PERKIM, DPMG, TANAH, DPMPTSP
21	Tingkat Inflasi	%	2,17	1,5 – 3,5	BAPPEDA, BPKA, INDAG, NAKER, DPMG, SETDA/RO EKO
22	Tingkat Kemiskinan	%	12,64	10,60-12,00	BAPPEDA, BPKA, INDAG, NAKER, PERKIM, DPMG, TANAH, DPMPTSP
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	4,45-4,60	NAKER, TANAH, TANBUN, DISNAK, PANGAN, DPMPTSP, PUPR

Sumber: RPJMA 2025-2029

Sementara itu, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. IKD meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** merupakan semua indikator yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. IKD yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari: laju inflasi, indeks ketimpangan Williamson, angka usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, indeks gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka melek huruf, persentase prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang, cakupan desa siaga aktif, tingkat pengangguran terbuka dan lain-lain.
2. **Aspek Daya Saing Daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti: distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran per kapita, nilai tukar petani, rasio Ekspor + Impor terhadap PDB, rasio ketergantungan, produktivitas total daerah, dan lain lain.
3. **Aspek Pelayanan Umum** menjelaskan kondisi dan perkembangan tentang urusan layanan wajib dan layanan pilihan yang meliputi berbagai indikator seperti angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran, proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 km/jam), pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan dan lain lain.

Penetapan IKD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2026

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
I	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	84,55	Badan Kepegawaian Aceh
4	Indeks Wakaf Nasional Aceh	Indeks	0,71	Sekretariat Baitul Mal Aceh
5	Indeks Zakat Nasional Aceh	Indeks	0,65	Sekretariat Baitul Mal Aceh
6	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	70	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
7	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
8	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	0,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	45,05	Dinas Pendidikan Dayah
11	Persentase dayah yang mandiri	%	47,19	Dinas Pendidikan Dayah
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	76,96	Dinas Perhubungan
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	78,49	Dinas Perhubungan
14	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP	%	43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
16	Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif	%	47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA	%	95	Sekretariat DPR Aceh
19	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	98	Dinas Registrasi Kependudukan

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
20	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
21	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
22	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
23	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	59,68	Dinas Registrasi Kependudukan
24	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	22,9	Dinas Registrasi Kependudukan
25	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	55	Dinas Registrasi Kependudukan
26	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Indeks Integritas Nasional	Indeks	71,1	Inspektorat
28	Maturitas SPIP terintegrasi	Level	3	Inspektorat
29	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	45	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
32	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	81,2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
33	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
34	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,06	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
35	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
36	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan.	Rasio	1,6	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
37	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	%	34,78	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
38	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	%	24,34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

VII-8

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
39	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan	%	96	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
40	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	1924	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
41	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	%	43,9 : 56,1	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
42	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota	%	16,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
43	Persentase pemenuhan penyelenggaraan drainase perkotaan	%	NA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	19,87	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tata ruang	%	72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	%	77,5	Rumah Sakit Ibu dan Anak
48	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan			Rumah Sakit Jiwa
49	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan			BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
50	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaran pembangunan	%	87	Sekretariat Daerah/Biro Administrasi Pembangunan
51	Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti	%	99	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
52	Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan	%	85	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
53	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
54	Persentase penyelesaian bantuan hukum	%	85	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
55	Nilai SAKIP	Nilai	68	Sekretariat Daerah/Biro Organisasi
56	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	%	88	Sekretariat Daerah/Biro Organisasi
57	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	82	Sekretariat Daerah/Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
58	Nilai LPPD	Skor	2,95	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
59	Persentase kerjasama daerah	%	40	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
60	Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi	%	33,33	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
61	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,5	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
62	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh	%	13,04	Dinas Pertanahan
63	Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah	%	85	Dinas Pertanahan
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
64	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
65	Indeks Reintegrasi Aceh	Indeks	0,14	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
66	Indek Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	87,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
67	Indeks Keanekaragaman Hayati	%	0,596	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
68	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	77,57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
69	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86,91	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
72	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,596	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
73	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
74	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	%	13,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
75	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	2,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
76	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	63,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VII-10

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
77	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
78	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
79	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	8,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
80	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	84,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
81	Persentase penataan wilayah Mukim dan Gampong yang difasilitasi	%	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
82	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	%	84	Dinas Syariat Islam Aceh
83	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	714,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
84	Persentase dimensi toleransi	%	65,09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
85	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	%	90	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
86	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	0,15	Sekretariat Majelis Adat Aceh
87	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%	14,28	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
88	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	38,17	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
89	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	100	Dinas Pangan
90	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	10,38	Dinas Pangan
91	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84,29	Dinas Pangan
92	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,65	Dinas Pengairan
93	Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	3,61	Dinas Pengairan
94	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional	%	4,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
95	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	53,75	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
96	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%	95	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
97	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan	%	62,26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
	sendirian di area tempat tinggalnya (%)			
98	Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria	%	10	Dinas Pertanahan
99	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	2	Dinas Pertanahan
100	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	75	Dinas Pertanahan
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
101	Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
102	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	0,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
103	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	%	19,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
104	Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	14,9	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
105	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	15,28	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
106	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	1,9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
107	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,11 - 57,15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	93,21	Dinas Kesehatan Aceh
109	Angka Kematian Balita (AKBa)	/1.000 LH	8	Dinas Kesehatan Aceh
110	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 LH	79	Dinas Kesehatan Aceh
111	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	41,3	Dinas Kesehatan Aceh
112	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	Dinas Kesehatan Aceh
113	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	72,5	Dinas Kesehatan Aceh
114	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	46	Dinas Kesehatan Aceh
115	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	10	Dinas Kesehatan Aceh
116	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa	%	100	Dinas Kesehatan Aceh

VII-12

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
117	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	%	100	Dinas Kesehatan Aceh
118	Persentase RS Regional yang Fungsional	%	40	Dinas Kesehatan Aceh
119	Prevalensi Stunting	%	25,6	Dinas Kesehatan Aceh
120	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	%	10,5	Dinas Kesehatan Aceh
121	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	58	Dinas Kesehatan Aceh
122	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	30,92	Dinas Sosial
123	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	29,92	Dinas Sosial
124	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,572	Dinas Sosial
125	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	59,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
126	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
127	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10,37 - 10,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
128	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77 - 14,78	Dinas Pendidikan
129	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	57	Dinas Pendidikan
130	Indeks Distribusi Guru SDLB	Nilai	0,33	Dinas Pendidikan
131	Indeks Distribusi Guru SMA	Nilai	0,58	Dinas Pendidikan
132	Indeks Distribusi Guru SMALB	Nilai	0,33	Dinas Pendidikan
133	Indeks Distribusi Guru SMK	Nilai	0,6	Dinas Pendidikan
134	Indeks Distribusi Guru SMPLB	Nilai	0,33	Dinas Pendidikan
135	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB	Nilai	82	Dinas Pendidikan
136	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA	Nilai	74	Dinas Pendidikan
137	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB	Nilai	78	Dinas Pendidikan
138	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK	Nilai	72	Dinas Pendidikan
139	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB	Nilai	76	Dinas Pendidikan
140	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	Indeks	76	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
141	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Indeks	74	Dinas Pendidikan
142	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	Indeks	74	Dinas Pendidikan
143	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	Indeks	72	Dinas Pendidikan
144	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	Indeks	74	Dinas Pendidikan
145	Indeks Inklusivitas SDLB	Nilai	74	Dinas Pendidikan
146	Indeks Inklusivitas SMA	Nilai	62	Dinas Pendidikan
147	Indeks Inklusivitas SMALB	Nilai	72	Dinas Pendidikan
148	Indeks Inklusivitas SMPLB	Nilai	83	Dinas Pendidikan
149	Indeks Literasi SDLB	%	91	Dinas Pendidikan
150	Indeks Literasi SMA	%	72	Dinas Pendidikan
151	Indeks Literasi SMALB	%	83	Dinas Pendidikan
152	Indeks Literasi SMK	%	62	Dinas Pendidikan
153	Indeks Literasi SMPLB	%	86	Dinas Pendidikan
154	Indeks Numerasi SDLB	%	84	Dinas Pendidikan
155	Indeks Numerasi SMA	%	74	Dinas Pendidikan
156	Indeks Numerasi SMALB	%	85	Dinas Pendidikan
157	Indeks Numerasi SMK	%	61	Dinas Pendidikan
158	Indeks Numerasi SMPLB	%	85	Dinas Pendidikan
159	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK	%	87	Dinas Pendidikan
160	Kualitas Pembelajaran SDLB	Nilai	71	Dinas Pendidikan
161	Kualitas Pembelajaran SMK	Nilai	65	Dinas Pendidikan
162	Kualitas Pendidikan (SPM)	%	73,17	Dinas Pendidikan
163	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter.	Nilai	60,14	Dinas Pendidikan
164	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	9,75 - 14,00	Dinas Pendidikan
165	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	1,00 - 3,50	Dinas Pendidikan
166	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	31,35- 33,50	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
167	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	28,00 - 29,8	Dinas Pendidikan
168	Rasio Konektivitas	Rasio	0,7	Dinas Perhubungan
169	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	106,43	Dinas Peternakan
170	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	Ton	12.500	Dinas Peternakan
171	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	Ton	344.000	Dinas Peternakan
172	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	92.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
173	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	274.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
174	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	%	5,7	Dinas Kelautan dan Perikanan
175	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,438	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
176	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	66,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
177	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
178	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	76,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
179	Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA)	%	82,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
180	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	24,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
181	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	66,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
182	Indeks Harga Konsumen	%	110	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
183	Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
184	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%	38,17	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
185	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	44,38	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
186	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	95	Dinas Pemuda dan Olahraga
187	Persentase pembinaan olahraga	%	55,57	Dinas Pemuda dan Olahraga
188	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,84	Rumah Sakit Ibu dan Anak

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
189	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	%	15,64	Dinas Pertanahan
190	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	KEP	60	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
191	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,56	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
192	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	%	39	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
IV	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
193	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
195	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
197	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	Nilai	1.996.602	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
199	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
201	Total Kredit/PDRB (%)	%	19,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
203	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	%	1,1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
205	Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	%	0,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
207	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	27,66	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
209	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	1,14	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
211	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	Ribu Orang	13,1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
213	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum	%	0,5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
215	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara	%	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
217	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	0,9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
219	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	50,95	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
221	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	149.691	Dinas Kelautan dan Perikanan
223	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	107,13	Dinas Kelautan dan Perikanan
225	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%	18,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
227	Persentase Desa Mandiri	%	0,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
229	Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan	%	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
231	Persentase Peningkatan BUMG Maju	%	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
233	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Rp Triliun	9,8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
235	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	32,77 - 33,10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
237	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp milyar	106,62	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
239	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	4,75	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
241	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	12,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
243	Rasio Elektrifikasi	%	99,6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
245	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	64,78-65,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
247	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	42202	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
249	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	%	6,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
251	Nilai Ekspor bersih Aceh	USD	238.421.628	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
253	Persentase peningkatan ekspor	%	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
255	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	0,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
257	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
259	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
261	Persentase Koperasi Sehat	%	39	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
263	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	%	1,1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
265	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	0,41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
267	Rasio Kewirausahaan	Rasio	4,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
269	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
271	Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%)	%	16,48	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	INDIKATOR T/S/P	SATUAN	KINERJA 2026	SKPA
	(sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)			
273	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	%	7,99	Dinas Pangan
275	Persentase irigasi modern	%	67,87	Dinas Pengairan
277	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	56,71	Dinas Pengairan
279	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	70,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
281	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	64	Dinas Pemuda dan Olahraga
283	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	81,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	2,1	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
287	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	Indeks	119,74	Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Sumber: RPJMA 2025-2029

Pasal 258 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Oleh karena itu, pencapaian target pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka target pembangunan nasional harus dibagi ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Berdasarkan hasil desk urusan pemerintahan pada Rakortekrenbangnas tahun 2025 diperoleh kesepakatan target indikator urusan pemerintahan tahun 2026 sebagaimana terdapat pada Tabel 7.3 berikut.

Tabel 7. 3
Target Indikator Urusan Pemerintahan Tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
3.1	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR			
3.1.1.	PENDIDIKAN			
3.1.1.1	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	97	DISDIK
3.1.1.2	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	80	DISDIK
3.1.1.3	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	40	DISDIK
3.1.1.4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	555	DISDIK
3.1.2.	KESEHATAN			
3.1.2.1	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	3	DINKES
3.1.2.2	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	15	DINKES
3.1.2.3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	10	DINKES
3.1.2.4	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	18	DINKES

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.1.2.5	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	DINKES
3.1.2.6	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	2907	DINKES
3.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1.3.1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,3	PENGAIARAN
3.1.3.2	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	1,2	PENGAIARAN
3.1.3.3	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	Hektar	147000	PENGAIARAN
3.1.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
3.1.5.1	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	4	SATPOL PP DAN WH
3.1.5.2	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	4	SATPOL PP DAN WH
3.1.5.3	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	SATPOL PP DAN WH
3.1.5.4	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	1	SATPOL PP DAN WH
3.1.6	SOSIAL			
3.1.6.1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	4	DINSOS
3.1.6.2	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga	Orang	40	DINSOS

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
	Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			
3.1.6.3	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	20	DINSOS
3.1.6.4	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	DINSOS
3.2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR			
3.2.1	TENAGA KERJA			
3.2.1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	1072	NAKERMOBDUK
3.2.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	NAKERMOBDUK
3.2.1.3	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	122	NAKERMOBDUK
3.2.1.4	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	669142	NAKERMOBDUK
3.2.2	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
3.2.2.1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	DRKA
3.2.2.2	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	1	DRKA
3.2.2.3	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	4	DRKA
3.2.2.4	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	1	DRKA
3.2.3	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.2.3.1	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	69	DP3A
3.2.3.2	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	100	DP3A
3.2.3.3	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	50	DP3A
3.2.3.4	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	40	DP3A
3.2.4	PANGAN			
3.2.4.1	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1	PANGAN
3.2.4.2	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	1	PANGAN
3.2.4.3	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	PANGAN
3.2.4.4	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	PANGAN
3.2.5	TANAH			
3.2.5.1	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1	TANAH
3.2.5.2	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	1	TANAH
3.2.6	LINGKUNGAN HIDUP			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.2.6.1	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton	109,500	DLHK
3.2.6.2	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	DLHK
3.2.6.3	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	10	DLHK
3.2.6.4	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	4	DLHK
3.2.8	PERHUBUNGAN			
3.2.8.1	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	4	DISHUB
3.2.8.2	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	DISHUB
3.2.9	KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
3.2.9.1	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	65	KOMINSA
3.2.9.2	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	25	KOMINSA
3.2.9.3	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Dokumen	3	KOMINSA
3.2.9.4	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	KOMINSA
3.2.9.5	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	Laporan	12	KOMINSA

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.2.9.6	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	48	KOMINSA
3.2.9.7	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	KOMINSA
3.2.9.8	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	139	KOMINSA
3.2.10	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.2.10.1	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit usaha	850	KOP UKM
3.2.10.2	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	113620	KOP UKM
3.2.10.3	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	60	KOP UKM
3.2.10.4	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit usaha	1000	KOP UKM
3.2.11	PENANAMAN MODAL			
3.2.11.1	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	10	DPMPTSP
3.2.11.2	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	4	DPMPTSP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
3.2.12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
3.2.12.1	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	101	PORA
3.2.12.2	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase	100	PORA
3.2.12.3	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	370	PORA
3.2.12.4	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	132	PORA
3.2.13	STATISTIK			
3.2.13.1	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	70	KOMINSA
3.2.13.2	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	70	KOMINSA
3.2.14	PERSANDIAN			
3.2.14.1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	47	KOMINSA
3.2.14.2	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen	1	KOMINSA
3.2.15	PERPUSTAKAAN			
3.2.15.1	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	1	ARPUS

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.2.15.2	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	15	ARPUS
3.2.15.3	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	50	ARPUS
3.2.15.4	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	3	ARPUS
3.3	LAYANAN URUSAN PILIHAN			
3.3.1	PARIWISATA			
3.3.1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	BUDPAR
3.3.1.2	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	30	BUDPAR
3.3.1.3	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	30	BUDPAR
3.3.1.4	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	1	BUDPAR
3.3.1.5	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	BUDPAR
3.3.1.6	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	50	BUDPAR
3.3.1.7	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	70	BUDPAR
3.3.1.8	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	30	BUDPAR
3.3.2	PERTANIAN			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.3.2.1	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	67,35	TANBUN
3.3.2.2	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Ha	3	TANBUN
3.3.2.3	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	TANBUN
3.3.2.4	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	TANBUN
3.3.2.5	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	TANBUN
3.3.2.6	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	TANBUN
3.3.3	KEHUTANAN			
3.3.3.1	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	400	DLHK
3.3.3.2	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	30000	DLHK
3.3.4	ENERGI DAN SDM			
3.3.4.1	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	ESDM
3.3.4.2	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	3000	ESDM
3.3.5	PERDAGANGAN			
3.3.5.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	2	INDAG
3.3.5.2	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	60	INDAG
3.3.5.3	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	INDAG
3.3.5.4	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	3	INDAG
3.3.6	PERINDUSTRIAN			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.3.6.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	INDAG
3.3.6.2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	INDAG
3.3.6.3	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	INDAG
3.3.6.4	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Dokumen	1	INDAG
3.3.7	TRANSMIGRASI			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.3.7.1	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Orang	100	NAKERMOBDUK
3.3.7.2	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	6	NAKERMOBDUK
3.3.7.3	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	10	NAKERMOBDUK
3.3.8	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.3.8.1	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	149691,39	DKP
3.3.8.2	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	1	DKP
3.3.8.3	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	10	DKP
3.3.8.4	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	DKP
3.3.8.5	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	40	DKP
3.3.8.6	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	7	DKP
3.3.8.7	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	DKP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
3.3.8.8	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	4	DKP
3.3.8.9	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	4	DKP
3.3.9	KEARSIPAN			
3.3.9.1	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	54	ARPUS
3.3.9.2	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	3000	ARPUS
3.3.10	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
3.3.11	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400	KESBANGPOL
3.3.12	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	KESBANGPOL
3.3.11	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
3.3.11.1	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1	BPBA
3.3.11.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Kabupaten/Kota	23	BPBA

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	SKPA
1	2	3	4	5
	(SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun			
3.3.12	KEBUDAYAAN			
3.3.12.1	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	DISBUDPAR
3.3.12.2	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	3	DISBUDPAR
3.3.12.3	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	4	DISBUDPAR
3.3.12.4	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	DISBUDPAR
3.3.12.5	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	DISBUDPAR
3.3.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
3.3.14.1	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	PPKB
3.3.14.2	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	3	PPKB

Sumber:

Berita Acara Kesepakatan (BAK) Hasil Desk Urusan Pemerintahan RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2025

BAB VIII PENUTUP

RKPA Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMA Tahun 2025-2029 yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan dimaksud dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif, yakni Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Berpedoman pada arah kebijakan Rancangan Awal RPJMA Tahun 2025-2029 dan selaras dengan tema RKP Tahun 2026 maka tema RKPA tahun 2026 adalah” **Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja**” dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang meliputi (1) penguatan pelaksanaan syariat islam (aqidah, syariat, akhlak dan muamalah); (2) penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh; (3) penurunan Angka Kemiskinan; (4) hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim; (5) penciptaan lapangan kerja; (6) transformasi digital yang terintegrasi; (7) peningkatan infrastruktur yang berkualitas; (8) peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi; (9) tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah; serta (10) peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan maka RKPA tahun 2026 merupakan pedoman bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2026; menjadi dokumen operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA tahun 2026; pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA tahun 2026; pedoman penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026; sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2026; serta menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh tahun 2026.



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
TAHUN 2025**



Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No.26, Banda Aceh 24415



www.bappeda.acehprov.go.id